



BUKU I

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Nomor : 75.A /LHP/XVIII.TJP/04/2023
Tanggal : 10 April 2023**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Jl. Raja Isa, Batam Center, Batam 29461, Telepon (0778) 468579: Fax (0778) 468581**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas antara lain menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Bintan mempunyai kewajiban menyelenggarakan pencatatan akuntansi dan melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun untuk klasifikasi akun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan laporan keuangan ini merupakan salah satu perwujudan bentuk kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Semoga Pelaporan Keuangan Daerah melalui buku Laporan Keuangan Daerah ini dapat meyakinkan segenap komponen masyarakat di Kabupaten Bintan akan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD.

Bandar Seri Bentan, April 2023

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Dra. HATRIAH

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xviii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xix
LAPORAN KEUANGAN POKOK	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)	3
3. NERACA	4
4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	6
5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)	8
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	10
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)	
7.1 PENDAHULUAN	
7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	11
7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	11
7.1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan	13
7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET PERDA APBD	15
7.2.1 Ekonomi Makro	15
7.2.2 Kebijakan Keuangan	28
7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	31
7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja	37
7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	39
7.4 DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN	
7.4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	40
7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.	42
7.4.3 Peranan dan tujuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	42
7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Prinsip-prinsip dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	44

7.4.5	Komponen Laporan Keuangan	47
7.5	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
7.5.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	109
7.5.2	laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL)	179
7.5.3	Neraca	181
7.5.4	Laporan Operasional (LO)	284
7.5.5	Laporan Arus Kas (LAK)	341
7.5.6	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	349
7.6	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	
7.6.1	Kondisi Geografis dan Perangkat Daerah	352
7.6.2	Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	355
7.6.3	Pembinaan Batas Wilayah	356
7.6.4	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	357
7.6.5	Pengelolaan Kawasan Khusus	373
7.6.6	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	374
7.6.7	Penyelenggaraan Pembinaan Keuangan Desa	374
7.6.8	Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan	376
7.6.9	Permasalahan yang Dihadapi Daerah	376
7.7	PENUTUP	379

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 7.2.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)	18
Tabel 7.2.2	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021	18
Tabel 7.2.3	Laju Pertumbuhan Persektor Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021	19
Tabel 7.2.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021	21
Tabel 7.2.5	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Bintan TA 2017-2021	23
Tabel 7.2.6	PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021	25
Tabel 7.2.7	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Bintan Tahun 2021 s.d. Tahun 2023	32
Tabel 7.2.8	Realisasi dan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 s.d. Tahun 2023	34
Tabel 7.2.9	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2022	36
Tabel 7.3.1	Ikhtisar Realisasi Pendapatan Kabupaten Bintan Tahun 2022	37
Tabel 7.3.2	Ikhtisar Realisasi Belanja Kabupaten Bintan Tahun 2022	38
Tabel 7.4.1	Kebijakan Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang	66
Tabel 7.4.2	Komponen Biaya Perolehan	75
Tabel 7.5.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	109
Tabel 7.5.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	109
Tabel 7.5.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	110
Tabel 7.5.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah –LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	111
Tabel 7.5.5	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	111
Tabel 7.5.6	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	112

Tabel 7.5.7	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022 ...	112
Tabel 7.5.8	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	113
Tabel 7.5.9	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	113
Tabel 7.5.10	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	114
Tabel 7.5.11	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN di FKTP Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	114
Tabel 7.5.12	Anggaran dan Realisasi Pendapatan JKN FKTP Non Kapitasi Per Puskesmas Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022 ...	115
Tabel 7.5.13	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	115
Tabel 7.5.14	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	116
Tabel 7.5.15	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Dana Perimbangan – LRA Dana Bagi Hasil – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	116
Tabel 7.5.16	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Dana Perimbangan – LRA Dana Bagi Hasil Pajak – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	117
Tabel 7.5.17	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Dana Perimbangan – LRA Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	117
Tabel 7.5.18	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	118
Tabel 7.5.19	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	118
Tabel 7.5.20	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	119
Tabel 7.5.21	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	119
Tabel 7.5.22	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	119
Tabel 7.5.23	Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	120
Tabel 7.5.24	Anggaran dan Realisasi Dana Desa – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	120

Tabel 7.5.25	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	120
Tabel 7.5.26	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	121
Tabel 7.5.27	Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	121
Tabel 7.5.28	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	121
Tabel 7.5.29	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	122
Tabel 7.5.30	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	122
Tabel 7.5.31	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	123
Tabel 7.5.32	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	123
Tabel 7.5.33	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	123
Tabel 7.5.34	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Jenis Belanja Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	125
Tabel 7.5.35	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	127
Tabel 7.5.36	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per jenis Belanja Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	129
Tabel 7.5.37	Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	136
Tabel 7.5.38	Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	136
Tabel 7.5.39	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	136
Tabel 7.5.40	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Perjenis Belanja Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	137
Tabel 7.5.41	Anggaran dan Realisasi Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	138
Tabel 7.5.42	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	138
Tabel 7.5.43	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	138

Tabel 7.5.44	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	140
Tabel 7.5.45	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Koperasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	165
Tabel 7.5.46	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	165
Tabel 7.5.47	Anggaran dan Realisasi Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	166
Tabel 7.5.48	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	166
Tabel 7.5.49	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	166
Tabel 7.5.50	Anggaran dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	167
Tabel 7.5.51	Anggaran dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	167
Tabel 7.5.52	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	167
Tabel 7.5.53	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	168
Tabel 7.5.54	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	168
Tabel 7.5.55	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	170
Tabel 7.5.56	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	171
Tabel 7.5.57	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	171
Tabel 7.5.58	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Bintan Tahun 2022	172
Tabel 7.5.59	Jaminan Pemeliharaan Kegiatan Fisik Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	172
Tabel 7.5.60	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	173
Tabel 7.5.61	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	173
Tabel 7.5.62	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022	173

Tabel 7.5.63	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	174
Tabel 7.5.64	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Per Desa – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022.....	174
Tabel 7.5.65	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Per Desa – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	175
Tabel 7.5.66	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	176
Tabel 7.5.67	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	177
Tabel 7.5.68	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	177
Tabel 7.5.69	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	178
Tabel 7.5.70	Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	180
Tabel 7.5.71	Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	181
Tabel 7.5.72	Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	181
Tabel 7.5.73	Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	182
Tabel 7.5.74	Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	182
Tabel 7.5.75	Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	183
Tabel 7.5.76	Kas di Bendahara BLUD pada Kas Tunai dan Rekening BLUD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	183
Tabel 7.5.77	Kas Dana Kapitasi pada FKTP Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	183
Tabel 7.5.78	Kas Dana BOS Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	184
Tabel 7.5.79	Kas Dana BOS pada Kas Tunai dan Kas di Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	186
Tabel 7.5.80	Kas Dana BOS pada Kas Tunai Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	187
Tabel 7.5.81	Kas Dana BOS pada Kas di Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	187
Tabel 7.5.82	Kas Lainnya di Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	187
Tabel 7.5.83	Setara Kas Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	187
Tabel 7.5.84	Piutang Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	188

Tabel 7.5.85	Mutasi Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	188
Tabel 7.5.86	Penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	189
Tabel 7.5.87	Piutang Pajak Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	189
Tabel 7.5.88	Mutasi Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	189
Tabel 7.5.89	Penyisihan Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	190
Tabel 7.5.90	Piutang Retribusi Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	190
Tabel 7.5.91	Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	190
Tabel 7.5.92	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	191
Tabel 7.5.93	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	191
Tabel 7.5.94	Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	192
Tabel 7.5.95	Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	192
Tabel 7.5.96	Mutasi Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	193
Tabel 7.5.97	Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	193
Tabel 7.5.98	Piutang Lainnya Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	193
Tabel 7.5.99	Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	194
Tabel 7.5.100	Beban Dibayar Dimuka Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	194
Tabel 7.5.101	Persediaan Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	195
Tabel 7.5.102	Mutasi Persediaan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	196
Tabel 7.5.103	Persediaan atau Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	198
Tabel 7.5.104	Persediaan Obat-obatan Dalam Kondisi Rusak dan Kadaluarsa Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	199
Tabel 7.5.105	Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	226

Tabel 7.5.106	Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	227
Tabel 7.5.107	Mutasi Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	227
Tabel 7.5.108	Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per Komoditi Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	228
Tabel 7.5.109	Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	228
Tabel 7.5.110	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	228
Tabel 7.5.111	Perhitungan Ekuitas PD BPR Bintang Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	229
Tabel 7.5.112	Perhitungan Ekuitas PT Bintang Inti Sukses Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	230
Tabel 7.5.113	Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	230
Tabel 7.5.114	Rincian Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	231
Tabel 7.5.115	Data Mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	231
Tabel 7.5.116	Data Aset Tetap Tanah per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	232
Tabel 7.5.117	Data Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	233
Tabel 7.5.118	Data Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	234
Tabel 7.5.119	Data Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	247
Tabel 7.5.120	Data Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	248
Tabel 7.5.121	Data Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	252
Tabel 7.5.122	Data Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	252
Tabel 7.5.123	Data Mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	256
Tabel 7.5.124	Data Aset Tetap Lainnya Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	257
Tabel 7.5.125	Data Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	259
Tabel 7.5.126	Data Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	260

Tabel 7.5.127	Data Mutasi Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	265
Tabel 7.5.128	Data Akumulasi Penyusutan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	265
Tabel 7.5.129	Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	256
Tabel 7.5.130	Data Mutasi Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	266
Tabel 7.5.131	Data Aset Tidak Berwujud Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	268
Tabel 7.5.132	Data Aset Lain-Lain Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	269
Tabel 7.5.133	Data Akumulasi Amortisasi Tidak Berwujud per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	271
Tabel 7.5.134	Data Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	272
Tabel 7.5.135	Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	273
Tabel 7.5.136	Data Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	273
Tabel 7.5.137	Data Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	274
Tabel 7.5.138	Data Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	274
Tabel 7.5.139	Data Mutasi Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	274
Tabel 7.5.140	Rincian Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	274
Tabel 7.5.141	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	275
Tabel 7.5.142	Utang Obat-obatan pada RSUD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	275
Tabel 7.5.143	Utang Bahan Medis pada RSUD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	279
Tabel 7.5.144	Utang Bahan Kimia pada RSUD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	280
Tabel 7.5.145	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	282
Tabel 7.5.146	Utang Isi Tabung Gas (Oksigen) pada RSUD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	282
Tabel 7.5.147	Data Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	282
Tabel 7.5.148	Pendapatan Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	283

Tabel 7.5.149	Pendapatan Asli Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	284
Tabel 7.5.150	Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	284
Tabel 7.5.151	Rincian Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah LO dengan LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	284
Tabel 7.5.152	Selisih Pendapatan Pajak Daerah LO dengan LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	285
Tabel 7.5.153	Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	285
Tabel 7.5.154	Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	286
Tabel 7.5.155	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	286
Tabel 7.5.156	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	287
Tabel 7.5.157	Rincian Perbedaan Pengakuan Pendapatan Retribusi Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	287
Tabel 7.5.158	Selisih Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	287
Tabel 7.5.159	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	287
Tabel 7.5.160	Rincian Perbedaan Pengakuan Akun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	288
Tabel 7.5.161	Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	288
Tabel 7.5.162	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	288
Tabel 7.5.163	Pendapatan Jasa Giro – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	289
Tabel 7.5.164	Pendapatan Bunga Deposito – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	289
Tabel 7.5.165	Pendapatan Denda Pajak – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	299
Tabel 7.5.166	Pendapatan Denda Retribusi – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	299
Tabel 7.5.167	Pendapatan dari Pengembalian – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	300

Tabel 7.5.168	Rincian Perbedaan Pengakuan Akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	300
Tabel 7.5.169	Selisih Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	300
Tabel 7.5.170	Pendapatan Transfer – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	300
Tabel 7.5.171	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	301
Tabel 7.5.172	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	302
Tabel 7.5.173	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	302
Tabel 7.5.174	Rincian Perbedaan Pengakuan Akun Pendapatan Transfer Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	302
Tabel 7.5.175	Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	302
Tabel 7.5.176	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	303
Tabel 7.5.177	Pendapatan Hibah – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	303
Tabel 7.5.178	Pendapatan Hibah – LO per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	303
Tabel 7.5.179	Pendapatan Dana Darurat - LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	304
Tabel 7.5.180	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	305
Tabel 7.5.181	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan – LO Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	305
Tabel 7.5.182	Rincian Perbedaan Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	305
Tabel 7.5.183	Selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022.....	305
Tabel 7.5.184	Beban Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	306
Tabel 7.5.185	Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	306
Tabel 7.5.186	Beban Pegawai – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022.....	306

Tabel 7.5.187	Beban Pegawai – LO Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	309
Tabel 7.5.188	Rincian Perbedaan Beban Pegawai Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	310
Tabel 7.5.189	Beban Persediaan – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	310
Tabel 7.5.190	Beban Persediaan – LO Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	312
Tabel 7.5.191	Beban Jasa – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	313
Tabel 7.5.192	Beban Jasa – LO Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	317
Tabel 7.5.193	Beban Pemeliharaan – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	318
Tabel 7.5.194	Beban Pemeliharaan – LO Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	321
Tabel 7.5.195	Beban Perjalanan Dinas – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	322
Tabel 7.5.196	Beban Perjalanan Dinas Per OPD – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	323
Tabel 7.5.197	Rincian Perbedaan Beban Barang dan Jasa Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	324
Tabel 7.5.198	Selisih Belanja Barang dan Jasa LRA dan Beban Barang dan Jasa LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	324
Tabel 7.5.199	Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	325
Tabel 7.5.200	Beban Hibah Per Jenis Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	325
Tabel 7.5.201	Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	326
Tabel 7.5.202	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	326
Tabel 7.5.203	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	326
Tabel 7.5.204	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	327
Tabel 7.5.205	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	327

Tabel 7.5.206	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	327
Tabel 7.5.207	Beban Hibah Barang Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	327
Tabel 7.5.208	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	327
Tabel 7.5.209	Beban Hibah Kepada Koperasi Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	328
Tabel 7.5.210	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	328
Tabel 7.5.211	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	328
Tabel 7.5.212	Rincian Perbedaan Beban Hibah Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	328
Tabel 7.5.213	Selisih Belanja Hibah LRA dan Beban Hibah LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022.....	329
Tabel 7.5.214	Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	329
Tabel 7.5.215	Beban Bantuan Sosial Berdasarkan Jenisnya Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	329
Tabel 7.5.216	Rincian Perbedaan Beban Bantuan Sosial Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	329
Tabel 7.5.217	Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	329
Tabel 7.5.218	Beban Lain-Lain Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	330
Tabel 7.5.219	Beban Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	331
Tabel 7.5.220	Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	332
Tabel 7.5.221	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	332
Tabel 7.5.222	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	333
Tabel 7.5.223	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	334
Tabel 7.5.224	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	334

Tabel 7.5.225	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	335
Tabel 7.5.226	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	335
Tabel 7.5.227	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	336
Tabel 7.5.228	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	337
Tabel 7.5.229	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	337
Tabel 7.5.230	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	337
Tabel 7.5.231	Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	337
Tabel 7.5.232	Rincian Perbedaan Beban Pegawai Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	338
Tabel 7.5.233	Beban Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	338
Tabel 7.5.234	Surplus Non Operasional Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	338
Tabel 7.5.235	Defisit Non Operasional Penghapusan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	339
Tabel 7.5.236	Beban Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	339
Tabel 7.5.237	Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	340
Tabel 7.5.238	Arus Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	341
Tabel 7.5.239	Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	341
Tabel 7.5.240	Pendapatan Retribusi Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	341
Tabel 7.5.241	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	342
Tabel 7.5.242	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	342
Tabel 7.5.243	Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022.....	343
Tabel 7.5.244	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	343
Tabel 7.5.245	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	343

Tabel 7.5.246	Arus Kas Keluar Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	344
Tabel 7.5.247	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	345
Tabel 7.5.248	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	345
Tabel 7.5.249	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	346
Tabel 7.5.250	Arus Kas Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	346
Tabel 7.5.251	Rincian Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	347
Tabel 7.5.252	Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	347
Tabel 7.5.253	Surplus/Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	349
Tabel 7.5.254	Koreksi Ekuitas Lain-lain Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	349
Tabel 7.5.255	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	349
Tabel 7.5.256	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	350
Tabel 7.5.257	Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	351
Tabel 7.6.1	Data Bencana yang terjadi di Kabupaten Bintang Tahun 2022	357
Tabel 7.6.2	Data Anggaran dan Realisasi Dana Desa APBD dan APBN Kabupaten Bintang Tahun 2022	375
Tabel 7.6.3	Kewajiban Perpajakan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022	376
Tabel 7.6.4	Daftar Pemilik Tanah Untuk Embung Hulu Sungai Bintang	377

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1 Grafik Perkembangan Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2022	21
Grafik 2 PDRB atas harga berlaku menurut pengeluaran 2015-2019	25

Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas antara lain menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah Laporan Keuangan yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Dengan demikian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan / atau barang pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2022 ini telah disusun berdasarkan Laporan Keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2022 setelah perubahan beserta realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.161.198.545.963,57 atau 105,57% dari anggaran sebesar Rp1.099.900.202.235,00 dan Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.134.530.797.791,40 atau 91,74% dari anggaran sebesar Rp1.236.683.735.754,00.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

• Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 136.160.052.859,29
• Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(Rp. 136.779.170.359,09)
• Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 163.448.168.531,26
• Koreksi Kesalahan Pembukuan	Rp. 619.117.499,80
• Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 163.448.168.531,26

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi / entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

• Aset	Rp. 2.453.386.938.410,85
• Kewajiban	Rp. 7.091.920.203,80
• Ekuitas	Rp. 2.435.289.648,207,85

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

• Jumlah Pendapatan – LO	Rp.1.154.894.896.157,61
• Jumlah Beban – LO	Rp.1.118.670.317.105,13
• Jumlah Surplus/Defisit - LO	Rp. 30.457.324.592,48

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasi berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset untuk keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

Informasi tentang Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bintan periode 1 Januari s/d Desember 2022 adalah sebagai berikut :

• Saldo awal kas per 1 Januari tahun 2022	Rp.	136.779.170.359,09
• Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	177.679.018.018,12
• Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp.	151.010.019.845,95)
• Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
• Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	0,00
• Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2022	Rp.	163.448.168.531,26

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Ekuitas pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.435.289.648.207,05.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar Penyusunan Laporan Keuangan, Kebijakan Akuntansi dan Informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja diakui berdasarkan basis kas yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah (KUD).

LAPORAN KEUANGAN POKOK
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

No Urut	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6	5
1	Pendapatan	7.5.1.1				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	7.5.1.1.1				
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	7.5.1.1.1.1)	162.297.546.000,00	145.481.518.689,93	89,64	130.059.598.323,77
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	7.5.1.1.1.2)	10.865.420.000,00	7.313.516.224,00	67,31	7.601.797.691,00
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.5.1.1.1.3)	10.477.231.219,00	8.706.275.676,00	83,10	11.411.312.907,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	7.5.1.1.1.4)	32.349.696.996,00	36.528.416.959,19	112,92	46.673.165.663,15
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		215.989.894.215,00	198.029.727.549,12	91,68	195.745.874.584,92
1.2	Pendapatan Transfer	7.5.1.1.2				
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	7.5.1.1.2.1)				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	7.5.1.1.2.1.1)	98.199.763.839,00	176.332.416.938,00	179,57	98.171.066.468,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.2.1.2)	475.851.608.000,00	475.851.608.000,00	100,00	476.841.183.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus - Fisik	7.5.1.1.2.1.4)	97.507.328.000,00	93.467.543.851,00	95,86	90.479.520.346,00
1.2.1.5	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	7.5.1.1.2.1.5)	89.899.782.573,00	85.130.297.254,00	94,69	56.162.194.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		761.458.482.412,00	830.781.866.043,00	109,10	721.653.963.814,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	7.5.1.1.2.2)				
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	7.5.1.1.2.2.1)	19.885.822.000,00	19.885.822.000,00	100,00	44.420.166.000,00
1.2.2.2	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
1.2.2.3	Dana Keistimewaan		-	-	-	-
1.2.2.4	Dana Desa	7.5.1.1.2.2.2)	28.338.150.000,00	28.226.109.120,00	99,60	40.186.161.200,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		48.223.972.000,00	48.111.931.120,00	99,77	84.606.327.200,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.5.1.1.2.3)				
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	7.5.1.1.2.3.1)	73.111.853.608,00	82.752.167.509,00	113,19	63.898.047.803,00
1.2.3.2	Bantuan Keuangan		1.116.000.000,00	1.116.000.000,00	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		74.227.853.608,00	83.868.167.509,00	113,19	63.898.047.803,00
	Total Pendapatan Transfer		883.910.308.020,00	962.761.964.672,00	108,92	870.158.338.817,00
1.3	Lain-lainnya Pendapatan Daerah yang Sah	7.5.1.1.3				
1.3.1	Pendapatan Hibah	7.5.1.1.3.1)	-	254.000.000,00	-	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan lainnya	7.5.1.1.3.2)	-	152.853.742,45	-	40.086.631.395,00
	Jumlah Lain-lainnya Pendapatan Daerah yang Sah		-	406.853.742,45	-	40.086.631.395,00
	JUMLAH PENDAPATAN		1.099.900.202.235,00	1.161.198.545.963,57	105,57	1.105.990.844.796,92
2	Belanja	7.5.1.2				
2.1	Belanja Operasi	7.5.1.2.1				
2.1.1	Belanja pegawai	7.5.1.2.1.1)	516.744.618.269,00	470.125.670.747,00	90,98	476.609.153.074,00
2.1.2	Belanja barang dan jasa	7.5.1.2.1.2)	384.595.778.747,00	349.842.979.580,45	90,96	327.840.463.570,98
2.1.3	Belanja bunga		-	-	-	-
2.1.4	Belanja subsidi	7.5.1.2.1.3)	1.900.000.000,00	1.690.823.167,00	-	-
2.1.5	Belanja hibah	7.5.1.2.1.4)	53.919.406.384,00	51.051.247.835,00	94,68	45.560.989.228,00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	7.5.1.2.1.5)	9.793.300.000,00	7.549.600.000,00	77,09	3.939.600.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan		-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi		966.953.103.400,00	880.260.321.329,45	91,03	853.950.205.872,98

No Urut	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6	5
2.2	Belanja Modal	7.5.1.2.2				
2.2.1	Belanja tanah	7.5.1.2.2.1)	6.000.000.000,00	956.984.073,00	15,95	994.839.115,00
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	7.5.1.2.2.2)	50.580.502.348,00	47.774.943.804,00	94,45	39.826.077.526,00
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	7.5.1.2.2.3)	64.991.766.710,00	63.625.599.408,98	97,90	63.060.135.647,33
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	7.5.1.2.2.4)	38.857.449.174,00	37.169.864.362,97	95,66	43.580.037.497,00
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	7.5.1.2.2.5)	1.521.606.701,00	1.483.878.197,00	97,52	1.954.288.040,00
2.2.6	Belanja aset lainnya	7.5.1.2.2.6)	-	-	-	2.970.000,00
	Jumlah Belanja Modal		161.951.324.933,00	151.011.269.845,95	93,24	149.418.347.825,33
2.3	Belanja Tak Terduga	7.5.1.2.3)				
2.3.1	Belanja Tak Terduga	7.5.1.2.3)	5.483.017.521,00	1.074.996.083,00	19,61	5.674.118.343,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga		5.483.017.521,00	1.074.996.083,00	19,61	5.674.118.343,00
2.4	Belanja Transfer	7.5.1.2.4)				
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	7.5.1.2.4.1)	17.316.296.600,00	17.316.296.600,00	100,00	15.285.365.800,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota		-			
2.4.3	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota Daerah Provinsi		-			
2.4.4	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	7.5.1.2.4.2)	84.979.993.300,00	84.867.913.933,00	99,87	92.996.547.466,00
	Jumlah Belanja Transfer		102.296.289.900,00	102.184.210.533,00	99,89	108.281.913.266,00
	JUMLAH BELANJA		1.236.683.735.754,00	1.134.530.797.791,40	91,74	1.117.324.585.307,31
	SURPLUS/DEFISIT		(136.783.533.519,00)	26.667.748.172,17	(19,50)	(11.333.740.510,39)
3	Pembiayaan	7.5.1.3				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	7.5.1.3.1)	136.783.533.519,00	136.780.420.359,09	100,00	149.093.793.369,68
3.1.1	Penggunaan SILPA	7.5.1.3.1)	136.783.533.519,00	136.779.170.359,09	100,00	149.088.793.369,68
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	7.5.1.3.1)	-	1.250.000,00	100,00	5.000.000,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		-	-	-	-
3.1.7	Pengembalian Pokok Dana Bergulir		-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		136.783.533.519,00	136.780.420.359,09	100,00	149.093.793.369,68
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	7.5.1.3.2)	-	-	-	1.600.000.000,00
3.2.1	Pembentukan dana cadangan		-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-	-	1.600.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pinjaman Daerah		-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	1.600.000.000,00
	Pembiayaan Netto		136.783.533.519,00	136.780.420.359,09	100,00	147.493.793.369,68
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	7.5.1.4	-	163.448.168.531,26	-	136.160.052.859,29

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REFKALK	2022	2021
1	2	3		5
	PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	7.5.2		
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1)	136.160.052.859,29	149.088.793.369,68
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2)	(136.779.170.359,09)	(149.088.793.369,68)
3	Sub Total		<u>(619.117.499,80)</u>	<u>-</u>
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	7.5.2.3)	163.448.168.531,26	136.160.052.859,29
5	Sub Total		<u>162.829.051.031,46</u>	<u>136.160.052.859,29</u>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	7.5.2.4)	619.117.499,80	-
8	Koreksi Penambahan Saldo Kas pada BLUD	7.5.2.5)	-	-
9	Saldo Anggaran Lebih Akhir	7.5.2.6)	<u>163.448.168.531,26</u>	<u>136.160.052.859,29</u>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

3. NERACA DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
NERACA DAERAH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REFF CALK	Tahun 2022	TAHUN 2021
1	2	3		5
1	ASET			
2	ASET LANCAR	7.5.3.1		
3	Kas dan Setara Kas	7.5.3.1.1		
4	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1)	53.368.218.970,28	122.218.026.235,56
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.2)	18.805,00	983.581,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1.3)	80.000,00	-
7	Kas di BLUD	7.5.3.1.1.4)	5.991.828.655,47	12.940.786.698,47
8	Kas Dana BOS	7.5.3.1.1.6)	898.131.312,51	1.619.373.844,06
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	7.5.3.1.1.5)	189.890.788,00	-
10	Kas Lainnya	7.5.3.1.1.7)	-	4.363.160,00
11	Setara Kas	7.5.3.1.1.8)	103.000.000.000,00	-
12	Investasi Jangka Pendek	7.5.3.1.2	-	-
13	Piutang Pajak	7.5.3.1.3.1	68.116.398.740,05	63.083.751.216,98
14	Penyisihan Piutang Pajak	7.5.3.1.3.7	(39.276.127.376,90)	(35.854.338.761,98)
15	Piutang Pajak Netto		28.840.271.363,15	27.229.412.455,00
16	Piutang Retribusi	7.5.3.1.3.2	389.458.313,00	392.270.333,00
17	Penyisihan Piutang Retribusi		(294.540.604,00)	(246.297.432,80)
18	Piutang Retribusi Netto		94.917.709,00	145.972.900,20
28	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	7.5.3.1.3.3	30.545.884.683,24	24.555.303.202,18
29	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		(18.047.299.753,05)	(15.921.193.565,87)
30	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto		12.498.584.930,19	8.634.109.636,31
31	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	7.5.3.1.3.4	-	-
32	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
33	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto		-	-
34	Piutang Transfer Antar Daerah	7.5.3.1.3.5	19.399.345.835,00	19.731.542.871,00
35	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		-	-
36	Piutang Transfer Antar Daerah Netto		19.399.345.835,00	19.731.542.871,00
37	Piutang Lainnya	7.5.3.1.3.6	1.422.445.696,00	1.385.324.876,00
38	Penyisihan Piutang Lainnya	7.5.3.1.3.7	(1.206.736.424,75)	(1.183.928.729,88)
39	Piutang Lainnya Netto		215.709.271,25	201.396.146,12
41	Beban Dibayar Dimuka	7.5.3.1.4	124.125.500,00	165.587.500,00
42	Persediaan	7.5.3.1.5	23.798.626.309,00	27.806.798.242,99
43	Jumlah Aset Lancar		248.419.749.448,85	220.698.353.270,71
44				
45	Investasi Jangka Panjang	7.5.3.2		
46	Investasi Non Permanen	7.5.3.2.1		
47	Investasi kepada BUMN		-	-
48	Investasi kepada BUMD		-	-
49	Investasi dalam Obligasi		-	-
50	Investasi dalam Proyek pembangunan		-	-
51	Dana Bergulir	7.5.3.2.1	3.362.967.000,00	3.364.367.000,00
52	Penyisihan Dana Bergulir	7.5.3.2.1	(3.362.967.000,00)	(3.364.367.000,00)
53	Jumlah Investasi Non Permanen		-	-
54	Investasi Permanen	7.5.3.2.2		
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.3.2.2.1	90.485.291.356,00	96.104.697.867,00
56	Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
57	Jumlah Investasi Permanen	7.5.3.2.2.1	90.485.291.356,00	96.104.697.867,00
58	Jumlah Investasi Jangka Panjang		90.485.291.356,00	96.104.697.867,00
59				

No	URAIAN	REFE CALK	Tahun 2022	TAHUN 2021
1	2	3		5
60	ASET TETAP	7.5.3.3		
61	Tanah	7.5.3.3.1)	353.017.406.517,00	355.655.756.211,00
62	Peralatan dan Mesin	7.5.3.3.2)	585.992.258.060,00	544.776.914.253,00
63	Gedung dan Bangunan	7.5.3.3.3)	1.244.355.426.937,00	1.154.776.066.415,00
64	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.3.3.4)	1.647.682.984.328,00	1.613.799.500.522,00
65	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.3.5)	54.394.797.077,00	53.635.440.194,00
66	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.3.3.6)	7.715.941.070,00	31.785.134.272,00
67	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.3.7)	(1.799.924.859.005,00)	(1.665.222.704.151,00)
68	Jumlah Aset Tetap		2.093.233.954.984,00	2.089.206.107.716,00
69				
70	DANA CADANGAN			
71	Dana Cadangan		-	-
72	Jumlah Dana Cadangan		-	-
73				
74	ASET LAINNYA	7.5.3.4		
75	Tagihan Jangka Panjang			
77	Tagihan Penjualan Angsuran	7.5.3.4.1	339.697.527,00	539.716.145,00
78	Tuntutan Ganti Rugi		-	-
79	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.5.3.4.2	-	75.289.420,00
80	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	7.5.3.4.3	89.195.180,00	-
81	Aset Tak Berwujud	7.5.3.4.4	7.965.422.254,00	6.425.835.400,00
82	Aset Lain-lain	7.5.3.4.5	19.132.591.294,00	11.286.473.755,00
83	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.5.3.4.6	(5.249.435.997,00)	(4.997.669.284,00)
84	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	7.5.3.4.7	(1.029.527.636,00)	-
85	Jumlah Aset Lainnya		21.247.942.622,00	13.329.645.436,00
86				
87	JUMLAH ASET		2.453.386.938.410,85	2.419.338.804.289,71
88	KEWAJIBAN	7.5.3.5		
89	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.3.5.1		
90	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	7.5.3.5.1.1)	-	619.117.500,00
91	Utang Bunga		-	-
92	Utang Pinjaman Jangka Pendek		-	-
93	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
94	Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.3.5.1.2)	996.608.174,80	816.080.706,56
95	Utang Belanja	7.5.3.5.1.3)	6.006.116.849,00	4.008.765.175,43
96	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.5.1.4)	89.195.180,00	79.652.580,00
97	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		7.091.920.203,80	5.523.615.961,99
98				
99	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.5.3.5		
100	Utang kepada Pemerintah Pusat		-	-
101	Utang kepada Lembaga Keuangan BANK		-	-
102	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan BANK		-	-
103	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-
104	Premium (Diskonto) Obligasi		-	-
105	Utang Jangka Panjang Lainnya	7.5.3.5	11.005.370.000,00	
106	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		11.005.370.000,00	-
107	JUMLAH KEWAJIBAN		18.097.290.203,80	5.523.615.961,99
108				
109	EKUITAS			
110	JUMLAH EKUITAS	7.5.3.7	2.435.289.648.207,05	2.413.815.188.327,72
111	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.453.386.938.410,85	2.419.338.804.289,71

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	SALDO 2022	SALDO 2021	KENADKAN/ (PENURUNAN)	%
1	2	3	4	5	6	7
7	PENDAPATAN - LO	7.5.4.1				
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	7.5.4.1.1				
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	7.5.4.1.1.1	150.517.394.855,25	91.687.960.182,63	58.829.434.672,62	64,16
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.5.4.1.1.2	7.768.055.034,00	8.230.457.748,33	(462.402.714,33)	(5,62)
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	7.5.4.1.1.3	3.086.869.165,00	11.687.932.218,00	(8.601.063.053,00)	(73,59)
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	7.5.4.1.1.4	46.800.962.783,9	44.123.918.368,55	2.677.044.415,36	6,07
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		208.173.281.838,16	155.730.268.517,51	52.443.013.320,65	33,68
7.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	7.5.4.1.2				
7.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	7.5.4.1.2.1				
7.2.1.1	Dana Bagi Hasil	7.5.4.1.2.1	186.448.293.458,00	95.825.732.510,00	90.622.560.948,00	94,57
7.2.1.2	Dana Alokasi Umum	7.5.4.1.2.1	475.851.608.000,00	476.841.183.000,00	(989.575.000,00)	(0,21)
7.2.1.3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	7.5.4.1.2.1	93.467.543.851,00	90.479.520.346,00	2.988.023.505,00	3,30
7.2.1.4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	7.5.4.1.2.1	85.130.297.254,00	56.162.194.000,00	28.968.103.254,00	51,58
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		840.897.742.563,00	719.308.629.856,00	121.589.112.707,00	16,90
7.2.2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	7.5.4.1.2.2				
7.2.2.1	Dana Insentif Daerah	7.5.4.1.2.2	19.885.822.000,00	44.420.166.000,00	(24.534.344.000,00)	(55,23)
7.2.2.2	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
7.2.2.3	Dana Keistimewaan		-	-	-	-
7.2.2.4	Dana Desa		-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		19.885.822.000,00	44.420.166.000,00	(24.534.344.000,00)	(55,23)
7.2.3	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	7.5.4.1.2.3				
7.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	7.5.4.1.2.3	82.419.970.473,00	69.620.460.903,00	12.799.509.570,00	18,38
7.2.3.2	Bantuan Keuangan	7.5.4.1.2.3	1.116.000.000,00	-	1.116.000.000,00	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		83.535.970.473,00	69.620.460.903,00	13.915.509.570,00	19,99
	Total Pendapatan Transfer		944.319.535.036,00	833.349.256.759,00	110.970.278.277,00	13,32
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	7.5.4.1.3				
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO	7.5.4.1.3.1	2.249.225.541,00	39.063.385.715,00	(36.814.160.174,00)	(94,24)
7.3.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - LO		-	-	-	-
7.3.3	Pendapatan Dana Darurat - LO	7.5.4.1.3.2	-	-	-	-
7.3.4	Pendapatan Lainnya	7.5.4.1.3.3	152.853.742,45	40.086.631.395,00	(39.933.777.652,55)	(99,62)
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		2.402.079.283,45	79.150.017.110,00	(76.747.937.826,55)	(96,97)
	JUMLAH PENDAPATAN		1.154.894.896.157,61	1.068.229.542.386,51	86.665.353.771,10	8,11
8	BEBAN	7.5.4.2				
8.1	BEBAN OPERASI	7.5.4.2.1				
8.1.1	Beban Pegawai - LO	7.5.4.2.1.1	470.082.170.747,00	476.609.153.074,00	(6.526.982.327)	(1,37)
8.1.2	Beban Persediaan	7.5.4.2.1.2	99.857.517.525,56	87.788.776.317,85	12.068.741.208	13,75
8.1.2	Beban Jasa	7.5.4.2.1.3	190.006.537.020,93	183.530.430.162,12	6.476.106.859	3,53
8.1.2	Beban Pemeliharaan	7.5.4.2.1.4	21.320.934.854,52	19.537.376.812,00	1.783.558.043	9,13
8.1.2	Beban Perjalanan Dinas	7.5.4.2.1.5	41.028.919.990,00	24.922.899.828,00	16.106.020.162	64,62
8.1.3	Beban Bunga-LO		-	-	-	-
8.1.4	Beban Subsidi-LO	7.5.4.2.1.6	1.690.823.167,00	-	1.690.823.167	-
8.1.5	Beban Hibah-LO	7.5.4.2.1.7	54.414.807.656,00	48.297.301.381,00	6.117.506.275	12,67
8.1.6	Beban Bantuan Sosial-LO	7.5.4.2.1.8	7.549.600.000,00	3.939.600.000,00	3.610.000.000	91,63
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	7.5.4.2.1.9	5.617.545.668,17	4.173.489.948,07	1.444.055.720	34,60
8.1.8	Beban Lain-Lain	7.5.4.2.1.10	9.835.315.329,95	3.734.119.468,53	6.101.195.861	163,39
	Jumlah Beban Operasi		901.404.171.959,13	852.533.146.991,57	48.871.024.967,56	5,73
8.2	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	7.5.4.2.2				
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.5.4.2.2.1	47.847.136.169,00	50.123.805.027,00	(2.276.668.858)	(4,54)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.5.4.2.2.2	23.956.803.602,00	32.454.466.514,00	(8.497.662.912)	(26,18)
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.4.2.2.3	70.177.341.166,00	73.402.803.881,00	(3.225.462.715)	(4,39)
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.5.4.2.2.4	-	3.166.112.177,00	(3.166.112.177)	(100,00)
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya		-	-	-	-
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.5.4.2.2.5	251.766.713,00	198.771.713,00	52.995.000	26,66
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		142.233.047.650,00	159.345.959.312,00	(17.112.911.662,00)	(10,74)

NO	URAIAN	REFF CALK	SALDO 2022	SALDO 2021	KENADKAN/ (PENURUNAN)	%
1	2	3		5	6	7
8.3	BEBAN TRANSFER	7.5.4.2.3				
8.3.1	Beban Bagi Hasil	7.5.4.2.3	17.316.296.600,00	15.285.365.800,00	2.030.930.800	13,29
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	7.5.4.2.3	56.641.804.813,00	52.810.386.266,00	3.831.418.547	7,26
	Jumlah Beban Transfer		73.958.101.413,00	68.095.752.066,00	5.862.349.347,00	8,61
8.4	BEBAN TAK TERDUGA	7.5.4.2.4				
8.4.1	Beban Tak Terduga	7.5.4.2.4	1.074.996.083,00	5.674.118.343,00	(4.599.122.260)	(81,05)
	Jumlah Beban Tak Terduga		1.074.996.083,00	5.674.118.343,00	(4.599.122.260,00)	(81,05)
	JUMLAH BEBAN		1.118.670.317.105,13	1.085.648.976.712,57	33.021.340.392,56	3,04
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		36.224.579.052,48	(17.419.434.326,06)	53.644.013.378,54	(307,95)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	7.5.4.2.5				
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL	7.5.4.2.5				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		480.126.532,00	-	480.126.532	-
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
7.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
	Jumlah Surplus Non Operasional		480.126.532,00	-	480.126.532,00	-
8.5	DEFISIT NON OPERASIONAL	7.5.4.2.6				
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	7.5.4.2.6	6.247.380.992,00	115.908.179.409,00	(109.660.798.417)	(94,61)
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
8.5.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
	Jumlah Defisit Non Operasional		6.247.380.992,00	115.908.179.409,00	(109.660.798.417,00)	(94,61)
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(5.767.254.460,00)	(115.908.179.409,00)	110.140.924.949,00	(95,02)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		30.457.324.592,48	(133.327.613.735,06)	163.784.938.327,54	(122,84)
	POS LUAR BIASA					
7.5	PENDAPATAN LUAR BIASA	7.5.4.1.1				
7.5.1	Pendapatan Luar Biasa	7.5.4.1.1	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
8.6	BEBAN LUAR BIASA	7.5.4.2.7				
8.6.1	Beban Luar Biasa-LO	7.5.4.2.7	-	-	-	-
	Jumlah Beban Luar Biasa		-	-	-	-
	POS LUAR BIASA		-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT LO	7.5.4.3	30.457.324.592,48	(133.327.613.735,06)	163.784.938.327,54	(122,84)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	2022	2021
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	7.5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	7.5.5.1.1.1	145.481.518.689,93	130.059.598.323,77
4	Penerimaan Retribusi Daerah	7.5.5.1.1.2	7.313.516.224,00	7.601.797.691,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.5.1.1.3	8.706.275.676,00	11.411.312.907,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	7.5.5.1.1.4	36.528.416.959,19	46.673.165.663,15
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	7.5.5.1.1.5	176.332.416.938,00	98.171.066.468,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	7.5.5.1.1.6	475.851.608.000,00	476.841.183.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	7.5.5.1.1.7.1	93.467.543.851,00	90.479.520.346,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	7.5.5.1.1.7.2	85.130.297.254,00	56.162.194.000,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	7.5.5.1.1.8	19.885.822.000,00	44.420.166.000,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
13	Penerimaan Dana Keistimewaan		-	-
14	Penerimaan Dana Desa		-	-
15	Penerimaan Bagi Hasil Dari Provinsi	7.5.5.1.1.9	82.752.167.509,00	63.898.047.803,00
16	Penerimaan Bantuan Keuangan	7.5.5.1.1.10	1.116.000.000,00	-
17	Penerimaan Hibah	7.5.5.1.1.11	254.000.000,00	-
18	Penerimaan Dana Darurat		-	-
19	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	7.5.5.1.1.12	152.853.742,45	40.086.631.395,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas		1.132.972.436.843,57	1.065.804.683.596,92
21	Arus Keluar Kas:	7.5.5.1.2		
22	Pembayaran Pegawai	7.5.5.1.2	470.125.670.747,00	476.580.386.274,00
23	Pembayaran Barang	7.5.5.1.2	349.842.979.580,45	327.869.230.370,98
24	Pembayaran Bunga		-	-
25	Pembayaran Subsidi		1.690.823.167,00	-
26	Pembayaran Belanja Hibah	7.5.5.1.2	51.051.247.835,00	45.560.989.228,00
27	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	7.5.5.1.2	7.549.600.000,00	3.939.600.000,00
28	Pembayaran Tak Terduga	7.5.5.1.2	1.074.996.083,00	5.674.118.343,00
29	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/kota	7.5.5.1.2	17.316.296.600,00	15.285.365.800,00
30	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Daerah Provinsi		-	-
31	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	7.5.5.1.2	56.641.804.813,00	52.810.386.266,00
32	Jumlah Arus Keluar Kas		955.293.418.825,45	927.720.076.281,98
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		177.679.018.018,12	138.084.607.314,94
34	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	7.5.5.2		
35	Arus Masuk Kas	7.5.5.2.1		
36	Pencairan Dana Cadangan			
37	Penjualan atas Tanah		-	-
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
41	Penjualan Aset Tetap		-	-
42	Penjualan Aset Lainnya		-	-
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	7.5.5.2.1	1.250.000,00	5.000.000,00
45	Jumlah Arus Masuk Kas		1.250.000,00	5.000.000,00

NO	URAIAN	REF KALK	2022	2021
46	Arus Keluar Kas	7.5.5.2.2		
47	Pembentukan Dana Cadangan			
48	Perolehan Tanah	7.5.5.2.2	956.984.073,00	994.839.115,00
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.2	47.774.943.804,00	39.826.077.526,00
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.2	63.625.599.408,98	63.060.135.647,33
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.5.2.2	37.169.864.362,97	43.580.037.497,00
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.2	1.483.878.197,00	1.954.288.040,00
53	Perolehan Aset Lainnya	7.5.5.2.2	-	2.970.000,00
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.5.2.2	-	1.600.000.000,00
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen			
56	Jumlah Arus Keluar Kas		151.011.269.845,95	151.018.347.825,33
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(151.010.019.845,95)	(151.013.347.825,33)
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	7.5.5.3		
59	Arus Masuk Kas			
60	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		-	-
61	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
62	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		-	-
63	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
64	Penerimaan Pinjaman Daerah - masyarakat (Obligasi Daerah)		-	-
65	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		-	-
66	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
67	Arus Keluar Kas :		-	-
68	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		-	-
69	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		-	-
70	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		-	-
71	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
72	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi daerah)		-	-
73	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
74	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
75	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
76	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4		
77	Arus Masuk Kas	7.5.5.4.1		
78	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4.1	77.130.819.672,00	62.989.317.921,80
79	Jumlah Arus Masuk Kas		77.130.819.672,00	62.989.317.921,80
80	Arus Keluar Kas	7.5.5.4.2		
81	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4.2	77.130.819.672,00	62.370.200.422,00
82	Jumlah Arus Keluar Kas		77.130.819.672,00	62.370.200.422,00
83	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	619.117.499,80
84	Kenaikan/penurunan Kas		26.668.998.172,17	(12.309.623.010,59)
85	Saldo Awal Kas	7.5.5.5	136.779.170.359,09	149.088.793.369,68
86	Saldo Akhir Kas	7.5.5.5	163.448.168.531,26	136.779.170.359,09

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF KALK	2022	2021
1	2	4		6
1	PERUBAHAN EKUITAS	7.5.6		
2	EKUITAS AWAL	7.5.6.1)	2.413.815.188.327,72	2.552.025.244.633,75
3	SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.6.2)	30.457.324.592,48	(133.327.613.735,06)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.5.6.3)		
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)			
	Koreksi Nilai Persediaan		-	-
	Selisih Revaluasi Tanah		-	-
	Selisih Revaluasi Gedung dan Bangunan			
	Selisih Revaluasi Ekstrakompatabel			
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			
	Koreksi Piutang Pajak			
	Koreksi Piutang Lainnya			
	Koreksi Bagian Lancar TPTGR			
	Koreksi Ekuitas Lainnya		-	
	Koreksi atas Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya			
	Lain - lain	7.5.6.3.3)	(8.982.864.713,15)	(4.882.442.570,97)
5	EKUITAS AKHIR	7.5.6.4)	2.435.289.648.207,05	2.413.815.188.327,72

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 PENDAHULUAN

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1) Maksud

Maksud Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 disajikan dalam rangka pertanggung jawaban pengelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

2) Tujuan

Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 adalah memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapat informasi seluas-luasnya tentang keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Landasan hukum penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 5);



26. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 7);
27. Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 79);
28. Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 55);
29. Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bintan tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 59).

7.1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) adalah sebagai berikut.

7.1. PENDAHULUAN

- 7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET PERDA APBD

- 7.2.1 Ekonomi Makro
- 7.2.2 Kebijakan Keuangan
- 7.2.3 Indikator Pencapaian target kinerja APBD

7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah
- 7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

7.4 DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN

- 7.4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



7.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Daerah.

7.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran

7.5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

7.5.3 Neraca

7.5.4 Laporan Operasional

7.5.5 Laporan Arus Kas

7.5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

7.6. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

7.6.1 Kondisi Geografis dan Perangkat Daerah

7.6.2 Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

7.6.3 Pembinaan Batas Wilayah

7.6.4 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

7.6.5 Pengelolaan Kawasan Khusus

7.6.6 Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

7.6.7 Penyelenggaraan Pembinaan Keuangan Desa

7.6.8 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

7.6.9 Permasalahan yang Dihadapi Daerah

7.7. PENUTUP



7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2022 memperhatikan gambaran ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya.

7.2.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Bintan

Kondisi ekonomi makro di Kabupaten Bintan ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi global dan nasional dimana pada tahun 2022 tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan dalam mencapai target kinerja daerah yang telah ditetapkan melalui kerangka pendanaan yang dapat diperkirakan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2022, diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis.

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari Pemerintah perlu tetap diberikan

kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi. Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4–6,0 persen pada tahun 2022 (Tabel 2.10). Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) menjadi US\$4370-4400 pada tahun 2022, membawa kembali Indonesia ke dalam kategori Upper-Middle Income Countries.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan bersumber dari investasi, ekspor, dan industri pengolahan. Sektor jasa yang terkena dampak besar akibat pandemi Covid-19 akan mengalami akselerasi.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada 2022 diharapkan akan mampu tumbuh 5,4-6,0 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi ditopang oleh meningkatnya investasi, yang diperkirakan tumbuh 6,5– 7,2 persen, dan ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 6,5-7,1 persen. Peningkatan investasi dan ekspor akan meningkatkan kapasitas produktif dan produktivitas perekonomian, yang sempat turun karena dampak Covid-19. Di samping itu juga menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar, sehingga dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang menganggur. Meningkatnya ekspor juga akan mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan.



Konsumsi masyarakat juga diperkirakan mengalami rebound, tumbuh mencapai 5,8–6,3 persen, karena daya beli masyarakat yang meningkat dan tingkat inflasi yang rendah. Faktor lain yang akan mendorong

peningkatan konsumsi masyarakat adalah revenge spending, seiring dengan pulihnya tingkat keyakinan masyarakat, terutama kelompok kelas menengah ke atas. Dalam masa pandemi Covid-19, tabungan masyarakat kelompok ini menunjukkan peningkatan, namun menahan konsumsinya seiring dengan ketidakpastian penyelesaian Covid-19. Ketika Covid-19 terkendali, tabungan masyarakat yang tinggi akan menjadi sumber bagi peningkatan konsumsi masyarakat.

Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh relatif lambat, 0,8–2,8 persen, namun diharapkan tetap dapat memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didukung oleh kebijakan fiskal yang akomodatif, meski di saat yang bersamaan secara bertahap melakukan proses konsolidasi. Konsumsi pemerintah yang relatif melambat juga didorong, salah satunya, oleh realokasi belanja ke belanja yang lebih produktif.

Impor barang dan jasa diperkirakan akan tumbuh 7,8–8,9 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang menguat. Peningkatan impor juga didorong oleh meningkatnya impor jasa seiring pulihnya aktivitas ekspor dan impor, serta perjalanan ke luar negeri.

Dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor yang terkena dampak negatif pandemi diharapkan dapat pulih cepat sejalan dengan kembali-normalnya kondisi global dan domestik, sehingga mampu menggerakkan roda produksi dan mendatangkan wisatawan.

Sektor industri mampu pulih karena didorong oleh aktivitas produksi yang kembali menuju tingkat normal dan tren pertumbuhan positif beberapa subsektor esensial selama pandemi, seperti industri makanan, minuman, dan farmasi. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2022 antara lain:

- (1) Keberlanjutan pertumbuhan subsektor industri makanan dan kimia farmasi,
- (2) Peningkatan investasi di subsektor industri logam dasar, khususnya yang terkait dengan produksi baterai untuk kendaraan listrik,
- (3) Pulihnya ekspor produk manufaktur Indonesia ke mitra dagang utama (ASEAN, Cina, Jepang, dan AS),
- (4) Percepatan transisi sektor industri pengolahan dalam beradaptasi dengan automasi, digitalisasi, dan perluasan penerapan industri hijau (Circular Economy).

Pemulihan sektor industri pengolahan dilaksanakan melalui strategi

- (1) Reaktivasi pasar tenaga kerja sektor industri pengolahan melalui perluasan kebijakan re-hiring dan re-training tenaga kerja,
- (2) Peningkatan belanja pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk produk dalam negeri,
- (3) Memastikan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong dalam tingkat yang kompetitif,
- (4) Keberlanjutan stimulus dunia usaha,
- (5) Percepatan pembangunan Kawasan Industri prioritas untuk menampung relokasi investasi, dan
- (6) Perluasan pendanaan proyek industri prioritas.

Dalam rangka transformasi ekonomi, strategi yang akan dilaksanakan mencakup

- (1) Peningkatan kualitas SDM industri melalui re-skilling dan upskilling tenaga kerja industri,



- (2) Hilirisasi peningkatan nilai tambah SDA dan perbaikan rantai pasok berbasis investasi teknologi maju dan orientasi ekspor/GVC,
- (3) Peningkatan peran industri kecil dan menengah dalam rantai pasok domestik dan global,
- (4) Perluasan penerapan industri 4.0 pada 6 subsektor prioritas,
- (5) Peningkatan dan perluasan ekspor,
- (6) Peningkatan standar kualitas, dan
- (7) Konsolidasi logistik dan pemasaran yang didukung oleh digitalisasi.

Modalitas pertumbuhan sektor pariwisata pada tahun 2022 antara lain melalui,

- 1) Program Vaksinasi Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- 2) Kondisi kesehatan yang membaik di Indonesia dan negara- negara pasar wisatawan mancanegara; 3) meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam negeri;
- 4) Kesiapan tata kelola dan pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas dengan penerapan standar kebersihan, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan yang didukung penciptaan nilai tambah dari ekonomi kreatif;
- 5) Pemasaran melalui branding, advertising, selling serta pelaksanaan MICE dan event minat khusus yang dapat menarik pasar wisatawan baru dan meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran dari wisatawan.

Pemulihan sektor pariwisata dilaksanakan melalui strategi

- (1) Pemulihan pasar wisatawan melalui pemberian insentif paket wisata, MICE Pemerintah, dan pengembangan travel bubble bilateral dan regional;
- (2) Pemulihan lapangan kerja melalui pemulihan tenaga kerja, pemulihan jam kerja serta re-hiring tenaga kerja;
- (3) Pemulihan industri pariwisata melalui hibah pemulihan dunia usaha, penerapan standar Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) di destinasi dan industri pariwisata, penyelesaian pembangunan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); serta
- (4) Pemulihan pariwisata Bali dan destinasi unggulan lainnya (Batam-Bintan, Bandung, dan Banyuwangi). Dalam rangka transformasi ekonomi, strategi yang akan dilaksanakan mencakup
 - (a) Penguatan pasar pariwisata yang didukung pengembangan tourism hub, niche tourism package, pembuatan film di sebuah destinasi, bidding event minat khusus, MICE, sport tourism, dan pemanfaatan big data;
 - (b) Peningkatan kualitas pariwisata melalui penataan destinasi dan desa wisata, re-skilling dan upskilling tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif; (c) regenerasi kota warisan yang mendukung aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - (d) Penguatan konten dan kemasan dengan dukungan ekonomi kreatif;
 - (e) Peningkatan vokasi geowisata untuk mendukung pengembangan geopark sebagai destinasi pariwisata.

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bias membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sector-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara lain inflasi, tingkat kemiskinan, kinerja investasi, nilai tukar dan kinerja ekspor.

Pertumbuhan PDRB yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor yang bergerak maju dan bersifat saling mempengaruhi (antara sektor satu dan lainnya).



Data ini dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah karena ditampilkan berdasarkan sektor (dan subsektor). Selain itu, data PDRB juga dapat menunjukkan tingkat inflasi/deflasi yang terjadi di suatu daerah dengan membandingkan data PDRB berdasarkan harga konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku. PDRB perkapita penduduk juga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah

Besarnya sumbangan sektor ekonomi dalam PDRB Kab. Bintan Tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021**
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.138.403,61	1.250.776,57	1.314.969,35	1.430.744	1.512.447,89
B	Pertambangan dan Penggalian	1.589.275,14	1.289.328,56	1.240.976,15	990.871	971.577,57
C	Industri Pengolahan	7.052.890,11	7.621.976,86	8.331.309,21	8.379.229	8.690.851,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24.300,93	23.508,12	25.050,49	26.093	26.429
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.439,38	11.431,55	12.201,2	12.717	12.953,71
F	Konstruksi	3.342.699,39	4.067.023,67	4.652.213,78	4.665.065	4.772.319,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.643.234,12	1.802.385,09	1.967.032,03	1.938.715	1.980.384,4
H	Transportasi dan Pergudangan	409.418,65	435.206,1	486.048,91	447.059	468.446,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.007.661,7	1.144.878,37	1.244.816,22	763.398	761.860,95
J	Informasi dan Komunikasi	208.692,38	226.174,29	245.972,02	249.692	250.587,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	306.576,48	321.813,51	340.638,8	339.694	340.132,74
L	Real Estat	201.284,37	216.518,52	229.938,17	238.716	239.854,63
M,N	Jasa Perusahaan	160,97	167,28	173,21	155	156,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	485.566,75	536.713,84	582.194,06	616.276	562.259,45
P	Jasa Pendidikan	346.473,55	370.128,71	389.733,66	396.432	402.185,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	167.762,18	181.283,09	202.198,52	217.163	226.486,33
R,S,T,U	Jasa Lainnya	315.68,84	33.649,28	35.579,44	31.677	32.193,43
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		17.966.408,56	19.532.963,41	21.301.045,23	20.743.698	21.251.125,59

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2022

Tabel 7.2.2 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2017-2021

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021**
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,12	6,9	6,17	6,4	6,34
B	Pertambangan dan Penggalian	4,57	4,78	5,83	6,6	8,85
C	Industri Pengolahan	40,9	40,39	39,11	39,02	39,26



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,13	0,12	0,12	0,14
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	22,46	22,49	21,84	20,82	18,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,32	9,35	9,23	9,23	9,15
H	Transportasi dan Pergudangan	2,2	2,16	2,28	2,23	2,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,59	3,68	5,84	5,86	5,61
J	Informasi dan Komunikasi	1,18	1,2	1,15	1,16	1,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,6	1,64	1,6	1,65	1,71
L	Real Estat	1,13	1,15	1,08	1,11	1,12
M,N	Jasa Perusahaan	0	0	0	0	0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,65	2,97	2,73	2,75	2,7
P	Jasa Pendidikan	1,89	1,91	1,83	1,89	1,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,05	0,95	0,93	0,93
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,15	0,15	0,17	0,17	0,18
PRODUK DOMESTIK BRUTO		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2022

Pertumbuhan PDRB yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor yang bergerak maju dan bersifat saling mempengaruhi (antara sektor satu dan lainnya). Data ini dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah karena ditampilkan berdasarkan sektor (dan subsektor). Selain itu, data PDRB juga dapat menunjukkan tingkat inflasi/deflasi yang terjadi di suatu daerah dengan membandingkan data PDRB berdasarkan harga konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan pada tahun 2022 terlihat positif sebesar 0,23%, dibanding tahun 2021 sebesar -4,28%. Sektor yang mengalami peningkatan paling tajam adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu -0,51%, selanjutnya yaitu sektor jasa lainnya meningkat 0,99%.

Tabel 7.2.3 Laju Pertumbuhan Persektor Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Kategori	Uraian	2017	2018*	2019	2020	2021**
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,96	7,45	3,21	5,6	2,12
B	Pertambangan dan Penggalian	-14,2	-19,97	-7,72	-21,22	-12,3
C	Industri Pengolahan	4,9	4,89	4,36	-1,83	1,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,93	-0,43	1,96	2,86	1,31
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,23	5,97	1,36	2,53	1,6
F	Konstruksi	14,42	16,14	9,46	0,16	0,2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,72	5,44	5,49	-4,33	1,17
H	Transportasi dan Pergudangan	6,09	3,67	5,92	-9,43	3,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,98	9,29	5,77	-35,68	-0,51



J	Informasi dan Komunikasi	5,99	5,45	4,28	3,24	0,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,91	3,59	5,2	-0,9	0,02
L	Real Estate	7,38	5,37	5,01	2,9	0,19
M,N	Jasa Perusahaan	3,75	1,22	1,82	-11,03	0,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,55	6,56	7,34	3,23	-8,32
P	Jasa Pendidikan	4,84	2,68	4,32	-1,64	0,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,66	5,59	6,22	5,59	3,05
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,89	4,57	3,56	-13,37	0,99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,94	4,85	4,71	-4,28	0,23

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2022

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 8,33 persen s.d 8,88 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada periode tahun 2017-2021 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih rendah dari impor. Kecenderungan pada periode ini selalu menunjukkan posisi “defisit” atau merugi. Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (economic growth). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah, Kabupaten Bintan mengalami pertumbuhan ekonomi positif selama 2017-2019 dan 2021 walaupun cenderung melambat yakni sebesar 4,94 persen (2017); 4,85 persen (2018); 4,51 persen (2019) dan 0,23 persen (2021). Sementara itu, pada 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 4,20 persen

Pada tahun 2017-2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan rata-rata mengalami fluktuasi. Hal ini telah diprediksi dari sektor yang sangat mempengaruhi PDRB secara total yaitu sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan yang negatif. Dimana pada tahun 2012 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang peraturan pertambangan dan penggalian. Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil digunakan PDRB Harga Konstan. PDRB Harga Konstan ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi karena menggunakan harga dasar yang konstan yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih yaitu tahun 2010. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang diukur dari kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berdasarkan harga konstan pada tahun 2022 mengalami percepatan selama 5 tahun terakhir.

7.2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM mencerminkan capaian kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPM direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi, dimensi kesehatan diwakili oleh indikator Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pendidikan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah/ Expected Years of Schooling (EYS), dan Rata-rata Lama Sekolah/ Mean Years of Schooling (MYS). Sementara itu, dimensi standar hidup diwakili oleh pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Capaian pembangunan manusia di Kabupaten Bintan selama periode 2014-2021 terus mengalami kemajuan. IPM Kabupaten Bintan meningkat dari 71,65 pada tahun 2014



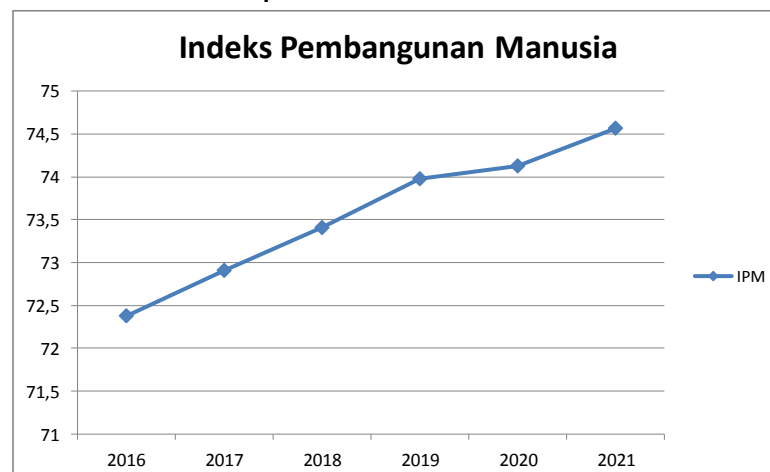
menjadi 74,57 pada tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Bintan rata-rata tumbuh 0,56 persen per tahun. Sedangkan pada periode 2020 hingga 2021, IPM Kabupaten Bintan tumbuh sebesar 0,59 persen. Pertumbuhan pada periode tersebut meingkat, dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mengalami pertumbuhan hanya sebesar 0,2 persen saja. Selama periode 2014 hingga 2021 IPM Kabupaten Bintan menunjukkan status pembangunan yang berkategori “tinggi”. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain, IPM Kabupaten Bintan selalu berada pada posisi ketiga teratas dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Sejak munculnya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020, telah memberikan ketidakpastian ekonomi di seluruh sektor pembangunan setiap wilayah. Ketidakpastian ekonomi tersebut berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Kekhawatiran pandemi COVID-19 terhadap layanan kesehatan masyarakat juga mulai bermunculan, dengan keterbatasannya fasilitas pemenuhan masker, obat-obatan bahkan akese rumah sakit. Disamping itu juga, kondisi pendidikan juga mulai jarang diperhatikan khususnya pada masyarakat kelompok yang rentan. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya pertumbuhan di tahun 2020 hanya sebesar 0,20 persen saja. Namun demikian, pada tahun 2021 kondisi perekonomian perlahan mulai pulih, melalui berbagai kebijakan pemerintah intensive serta berbagai bantuan COVID-19 dan lain-lain. IPM Kabupaten Bintan tahun 2021 ini, tumbuh sebesar 0,59 persen, tidak terlepas didorong oleh peningkatan semua dimensi pembentuknya

Tabel 7.2.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bintan Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
1	2016	71,65
2	2017	72,91
3	2018	73,41
4	2019	73,98
5.	2020	74,13
6.	2021	74,57

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2022

Grafik 1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan Tahun 2016 – 2021



Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2022



7.2.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah

Prediksi pertumbuhan ekonomi daerah sangat sulit dilakukan mengingat situasi dan kondisi yang dinamis, sulit diramalkan (unpredictable), dan keterkaitan antar sektor dan antar spasial. Berbagai hal yang terjadi di daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi nasional yang terjadi. Lapangan usaha pariwisata, hotel, restoran, transportasi di Kabupaten Bintan, sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan regional Kawasan ASEAN karena banyaknya wisatawan dari manca negara dan wisatawan domestik perlu ditingkatkan promosinya.

Proyeksi dan arah pembangunan ekonomi disusun dengan memperhatikan kondisi perekonomian daerah tahun sebelumnya, serta memperhatikan prospek dan tantangan perekonomian nasional dan Provinsi Kepulauan Riau. Secara umum kondisi perekonomian daerah Kabupaten Bintan tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020. Kondisi ini akan meningkat di tahun 2022 sejalan dengan penyelesaian vaksinasi Covid 19 (sampai dengan akhir semester I Tahun 2022) diperkirakan situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi lebih baik.

Dinamika perekonomian nasional dan kondisi Provinsi Kepulauan Riau yang membaik diharapkan mampu mendorong perekonomian Kabupaten Bintan. Empat sektor utama yang akan menopang pertumbuhan ekonomi yaitu : industri pengolahan, konstruksi, pertambangan dan penggalian serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan terutama didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah daerah sejalan dengan pemulihan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang diperkirakan stabil diharapkan mampu menjaga keyakinan konsumen sehingga pertumbuhan konsumsi masyarakat tetap terjaga. Investasi diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan kebijakan pemerintah, deregulasi peraturan-peraturan di bidang investasi, dan pelayanan perijinan terpadu. Upaya peningkatan kinerja investasi sebagai salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan perlu disertai dengan upaya menjaga dan meningkatkan tingkat keyakinan masyarakat dan investor melalui peningkatan ketertiban umum, stabilitas politik dan keamanan, serta kepastian hukum.

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2022 disusun berdasarkan pada tema pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2022, dan tantangan dan prospek ekonomi daerah, serta memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Kepulauan Riau maka kebijakan ekonomi Kabupaten Bintan tahun 2022. peningkatan jaminan perlindungan pada masyarakat dan peningkatan pelayanan publik menuju New Normal, dengan fokus pada Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui:

1. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dan retribusi.
2. Mengoptimalkan realisasi APBD khususnya untuk belanja modal serta melaksanakan dan memonitor perkembangan proyek pembangunan infrastruktur agar dapat berjalan dengan baik sebagai pendorong perekonomian untuk mendukung perkembangan investasi swasta dan kinerja ekspor Kepri.
3. Menjaga iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui percepatan reformasi struktural terutama terkait dengan aspek kemudahan perizinan serta stabilitas keamanan di Kabupaten bintan.
4. Penguatan kerja sama antara dunia industri dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan di lokasi produksi (teaching factory) disertai perbaikan fasilitas pembelajaran dan penyusunan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri prioritas nasional serta kebutuhan pasar tenaga kerja.
5. Peningkatan kinerja UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian lokal.



6. Penyusunan teknologi dan inovasi dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah.
7. Memaksimalkan potensi kemaritiman dalam rangka meningkatkan pendapatan, pengembangan pariwisata di era new normal.
8. Mendorong percepatan realisasi dari investasi-investasi baik PMA maupun PMDN yang telah didaftarkan agar dapat mendorong kinerja investasi Kepri serta membuka lapangan kerja baru.
9. Pengembangan bidang pendidikan menuju SDM yang unggul juga menjadi modal dasar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

7.2.1.4 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang disertai dengan pengurangan jumlah masyarakat miskin dengan cara seperti meningkatkan mutu pendidikan dan juga perbaikan derajat kesehatan, sehingga pada akhirnya akan dapat membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Peningkatan PDRB dan pendapatan per kapita menjadi salah satu ukuran dalam pencapaian tingkat kemakmuran masyarakat disuatu wilayah jika data tersebut disajikan secara berkala.

Nilai PDRB ADHB maupun ADHK Kabupaten Bintan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB ADHB Kabupaten Bintan pada tahun 2021 mencapai 21.251,13 miliar rupiah. Sementara itu, PDRB ADHK sebesar 130.727,08 miliar rupiah. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya, penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Jika PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita maka laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah harus lebih besar dari laju pertumbuhan penduduknya. Pada tahun 2021, pertumbuhan sebesar 1,99 persen meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai -1,13 persen

Tabel 7.2.5
Perkembangan Pendapatan Regional PDRB Perkapita
Kabupaten Bintan TA 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	17.982,66	19.597,81	21.303,01	20.743,70	21.251,13
- ADHK 2010	13.244,04	13.886,09	14.512,07	13.902,16	13.9633,49
PDRB perkapita (Ribu Rp)					



- ADHB	115.042,67	124.094,11	132.144,49	130.148,37	130.727,08
- ADHK 2010	84.727,70	87.927,25	90.019,69	87.223,78	85.712,39
Pertumbuhan	3,78	3,78	2,38	-3,11	-1,73
PDRB perkapita ADHK 2010					
Jumlah penduduk (000 org)	156,31	157,92	161,21	159,38	162,56
Pertumbuhan	1,12	1,03	2,08	-1,13	1,99

Sumber : BPS Kabupaten Kabupaten Bintan, Tahun 2022

7.2.1.5 Perkembangan PDRB Pengeluaran

Menurut kaidah ekonomi, pengukuran tingkat kesejahteraan dapat digambarkan dengan besarnya pendapatan seseorang. Namun demikian, kesulitan untuk mengukur pendapatan membuat tingkat kesejahteraan secara moneter seringkali didekati dengan besarnya pengeluaran seseorang. Pengeluaran per kapita penduduk merupakan proksi dari pendapatan per kapita yang selanjutnya dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Data pengeluaran per kapita penduduk diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikelompokkan menjadi pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bintan pada periode 2017- 2021, terlihat bahwa selama 2017-2021 nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Bintan berfluktuasi juga, yakni sebesar 13.244,04 miliar Rupiah (2017); 13.886,09 miliar Rupiah (2018); 14.512,07 miliar Rupiah (2019); 13.902,16 miliar Rupiah (2020) dan 13.933,49 miliar Rupiah (2021). Sementara itu, terjadi penurunan pada tahun 2020 disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. bahwa di Kabupaten Bintan mengalami pertumbuhan ekonomi positif selama 2017-2019 dan 2021 walaupun cenderung melambat yakni dari 4,94 persen pada tahun 2017 menjadi 4,51 persen pada tahun 2019 dan 0,23 persen pada tahun 2021. Sementara itu, pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 4,20 persen.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan System of National Accounts (SNA) yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDRB tersebut.

Pada periode tahun 2017-2021 PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku berfluktuasi cukup signifikan, yakni sebesar; 17.982,66 miliar Rupiah (2017); 19.597,81



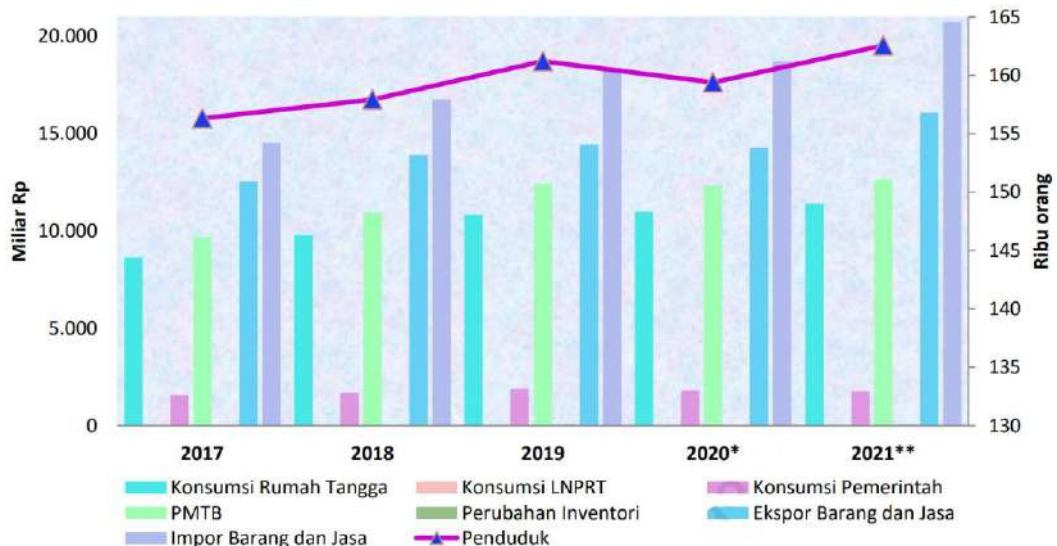
miliar Rupiah (2018); 21.303,01 miliar Rupiah (2019); 20.743,70 miliar Rupiah (2020) dan 21.251,13 miliar Rupiah (2021). Terjadinya penurunan pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan pada beberapa komponen pengeluaran akibat pandemi Covid-19. Perubahan PDRB sisi produksi diikuti oleh perubahan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Bintan pada periode 2017-2021 dapat dilihat dari Tabel dan Grafik berikut ini:

Tabel 7.2.6
PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.647,36	9.785,44	10.851,39	11.001,20	11.420,15
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	21,72	23,64	26,23	26,61	27,68
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.582,07	1.686,79	1.891,97	1.802,29	1.770,87
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.696,96	10.955,92	12.427,35	12.333,30	12.662,24
Perubahan Inventori	13,71	19,49	55,17	11,27	45,85
Ekspor	12.538,64	13.899,81	14.452,92	14.285,93	16.082,52
Impor	14.517,79	16.773,27	18.402,01	18.716,90	20.758,18
Produk Domestik Regional Bruto	17.982,66	19.597,81	21.303,01	20.743,70	21.251,13

Sumber : BPS Kab. Bintan, Tahun 2022

Grafik 2
PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kab. Bintan, Tahun 2022

7.2.1.6 Evaluasi Pelaksanaan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan RPJMD sangat penting dilakukan agar dapat menjadi masukan bagi perencanaan tahun-tahun berikutnya. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan telah disahkan menjadi Peraturan



Daerah Kabupaten Bintan No. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026, sehingga menjadikan setiap priode Pemerintahan Daerah telah tersusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat dijadikan acuan dan terlegitimasi.

Keselarasan antara RPJMN, RPJMD Provinsi dan RJPMD dimaksudkan untuk meningkatkan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk menilai keselarasan antara RPJMN tahun 2020–2024 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 dengan RPJMD Kabupaten Bintan 2021– 2026 maka hal tersebut dilakukan dengan melihat upaya yang dilakukan di dalam RJPMD. Adanya kesamaan upaya di dalam RPJMD dan RPJMN menunjukkan adanya usaha yang sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mencapai tujuan pembangunan provinsi dan nasional. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa upaya/misi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan telah selaras dengan misi/upaya yang dilakukan di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021–2026 dan RPJMN 2020–2024.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten bintan dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA.”

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021–2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan berpedoman pada arah dan kebijakan nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan memperhatikan arah kebijakan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 (proses penyusunan) dan mengacu RPJPD Kabupaten Bintan Tahun 2005 – 2025. Dokumen RPJMD ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan serta Penetapan Indikator Kinerja Daerah. RPJMD menjadi pedoman dalam Penyusunan RKPd, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta berfungsi sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama periode tahun 2021 – 2026.

Pencapaian target indikator kinerja daerah merupakan serangkaian pencapaian indikator program-program prioritas yang termuat dalam RPJMD ini dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan kapasitas daerah yang tersedia baik dari pemerintah daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat secara sinergis untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Pengembangan wilayah di Kabupaten Bintan ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pariwisata internasional, industri MRO (maintenance, repair, dan overhaul) dan industri pengolahan makanan.



Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengembangan wisata alam, olahraga rekreasi standar internasional;
- b. Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata;
- c. Pengembangan Pusat Pelatihan Vokasi sektor industri, logistik dan pariwisata;
- d. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan pelabuhan;
- e. Percepatan dan fasilitasi pembangunan jembatan Batam- Bintan;
- f. Pengembangan pusat industri pengolahan pertambangan;
- g. Pengembangan pusat industri pengolahan bahan makanan;
- h. Pengembangan Kawasan Industri Lobam dan Pelabuhan (BIIE);
- i. Pengembangan Industri MRO dan Transportasi; dan
- j. Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau ada signal).

Latar belakang prioritas pembangunan di Kabupaten Bintan berdasarkan dokumen RPJMN adalah

1. Kawasan Batam-Bintan di Provinsi Kepulauan Riau berada pada lokasi yang strategis terhadap hub di Singapura sehingga berpotensi menarik pasar global terutama di wilayah Asia. Namun, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dalam 5 tahun mengalami penurunan dari 6,60% (2014) menjadi 4,56% (2018). Share sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan dari 38,21% (2014) menjadi 36,86% (2018).
2. Tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan, padahal di tiga wilayah ini telah didukung dengan adanya pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi.
3. Pusat pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan yaitu: KEK Galang Batang (operasional), KPBPB Batam (belum optimal), rencana pengembangan KI Bintan Aerospace, KSPN Nongsa (belum optimal), KSPN Lagoi-Bintan (belum optimal dikembangkan oleh swasta).
4. KI Bintan Aerospace akan dikembangkan seluruhnya oleh PT Bintan Aviation Investment (Salim Group) bekerjasama dengan PT. Angkasa Pura II dengan kluster Bintan offshore marine center dan New Bintan Airport. Untuk mendukung pengembangan pariwisata dan industri kedirgantaraan secara terpadu. KI Bintan Aerospace akan beroperasi pada tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka highlight major project untuk Kabupaten Bintan RPJMN adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Wilayah Batam – Bintan yang bertujuan untuk Meningkatnya pertumbuhan industri dan pariwisata Batam- Bintan
2. Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan (DPP Batam– Bintan)
3. Fasilitasi dan Pembangunan Investasi Infrastruktur Kawasan Industri
4. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI
5. Pengembangan KI Bintan Aerospace
6. Pengembangan kawasan Bintan Resort
7. Pengembangan KEK Galang Batang



8. Pengembangan sistem pengelolaan limbah industri B3
9. Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional
10. Jalan Bintan
11. Akses KEK Galang Batang I

7.2.2 Kebijakan Keuangan

Pada tahun 2022, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kebijakan pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah yang terdiri dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah yang terdiri dari : Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, sedangkan Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengoptimalkan penggunaannya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa isu yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2022 – 2026 dan masa pemulihan terhadap dampak pandemi Covid 19.
2. Asumsi dana transfer pemerintah pusat, berpotensi mengalami tekanan kisaran 62,71% (masih tergantung ada alokasi dana perimbangan);
3. Struktur APBD Tahun 2021 harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga terdapat perubahan struktur keuangan dalam RKPD Tahun 2022 yang selanjutnya harus diikuti dengan penyesuaian kebijakan belanja;



4. Dinamika perubahan regulasi pemerintah pusat terkait pemerintah daerah, menyebabkan adanya penyesuaian terhadap beberapa aspek, antara lain meliputi : perencanaan daerah, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang baru.
5. Postur makro fiskal 2022 dilandaskan pada baseline proyeksi 2020 yang menurun akibat perlambatan ekonomi, penurunan harga komoditas, dan pemulihan dari dampak Pandemi Covid-19 yang masih memperhatikan refocusing dan mendukung transisi sosial ekonomi menuju kondisi normal.

7.2.2.1 Kebijakan Keuangan Pendapatan Daerah

Penyusunan anggaran tahun 2022 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bintan merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bintan tahun anggaran 2022 dilakukan upaya-upaya pada penyusunan RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2022 pengelolaan keuangan berpedoman pada PP No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Melihat perubahan ini maka struktur anggaran yang telah dilakukan pada tahun 2016 – 2019 dilakukan konversi sebagaimana PP Nomor 12 tahun 2019. Salah satu proses dalam pengelolaan keuangan daerah adalah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan. APBD dan APBDP digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD setiap tahunnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. LKPD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan dan audit. Analisis keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan LKPD. Analisis keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pelaksanaan pembangunan daerah.

Pendapatan Kabupaten Bintan selama 2017 dan proyeksi tahun 2021 masih tergantung dari pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2017 – 2019 total pendapatan cenderung mengalami peningkatan berdasarkan laporan keuangan hasil audited. Pada tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi Covid 19 dan berdampak pada penurunan pendapatan daerah yang diproyeksi di tahun 2021. Penurunan pendapatan berasal dari turunnya pajak daerah dan retribusi daerah yaitu pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Kebijakan dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bintan, antara lain sebagai berikut :



1. Diadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pajak daerah secara intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat dengan dilanjutkan upaya penegakan hukum (law enforcement) secara periodik bersama-sama Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Riau (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Lalu lintas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan PT. Jasa Raharja di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau);
2. Peningkatan pelaksanaan online system dalam akurasi data wajib pajak khususnya terhadap pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat;
3. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dengan SKPD penghasil terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pemungutan retribusi daerah serta dalam rangka menggali potensi retribusi baru.
4. Peningkatan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat antara lain : Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, Kementerian ESDM, BP Migas dan Kantor Perwakilan Pajak di Batam dan Tanjungpinang.

7.2.2.2 Kebijakan Keuangan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah dan pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur



Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Komposisi Struktur Belanja APBD Tahun anggaran 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian :
 - Belanja Operasi
 - Belanja Modal
 - Belanja Tidak Terduga
 - Belanja Transfer
2. Penyesuaian Belanja Hibah dan Bansos, yang sebelumnya tercantum dalam DPA-PPKD/BPPKAD, menjadi diampu oleh masing-masing perangkat daerah/unit kerja yang membidangi, meliputi:
 - Hibah Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) diampu oleh masing-masing kelurahan;
 - Hibah BPMKS (swasta) dan Bansos BPMKS diampu oleh Dinas Pendidikan;
 - Hibah lainnya yang semula di PPKD ke OPD yang membidangi.
3. Upaya pemenuhan belanja yang dimandatkan (mandatory spending), antara lain:
 - Pendidikan (sebesar 20%);
 - Kesehatan (sebesar 10%);
 - belanja modal (sebesar 15%);
 - Pendanaan Desa dari APBD (5% pendapatan daerah dikurangi DAK), diarahkan pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa.
 - Rasio belanja modal yang makin meningkat

7.2.2.3 Kebijakan Keuangan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD. Di dalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2022 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan SiLPA tahun sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi SiLPA tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran.

7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Kabupaten Bintan tahun 2022 serta melihat performa pendapatan daerah tahun 2017 hingga tahun 2021, diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut :



Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa analisis keuangan daerah diperlukan dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Analisa Keuangan Daerah dalam Penyusunan RKPD pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.

Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD tahun rencana dimaksudkan untuk mengetahui amanat dari RPJMD dalam menentukan kapasitas keuangan daerah serta hasilnya.

7.2.3.1 Target pendapatan daerah

Proyeksi pendapatan daerah dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat, dihitung dengan memperhatikan realisasi pajak daerah dari tahun 2021 s/d September 2023, memperhatikan regulasi dan potensi sumber pajak dan retribusi daerah;
2. Dana transfer dari Pemerintah pusat menggunakan asumsi anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan berlaku dan Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan penggunaannya diarahkan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai Desa, dukungan program sektor prioritas di desa serta program atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Lain lain pendapatan yang sah juga diproyeksikan sesuai realisasi 2023.

Tabel 7.2.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Bintan Tahun 2021 s.d. Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Anggaran Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1	Pendapatan Asli Daerah	195.745.874.584,92	215.989.894.215	198.029.727.549,12	313.222.115.319
1.1.1	Pajak Daerah	130.059.598.323,77	162.297.546.000	145.481.518.689,93	258.857.149.000
1.1.2	Retribusi Daerah	7.601.797.691,00	10.865.420.000	7.313.516.224,00	10.892.851.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	11.411.312.907,00	10.477.231.219	8.706.275.676,00	10.477.231.219
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46.673.165.663,15	32.349.696.996	36.528.416.959,19	32.994.884.100
1.2	Dana Transfer	870.158.338.817,00	883.910.308.020	962.761.964.672,00	821.353.073.295
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	98.171.066.468,00	98.199.763.839	176.332.416.938,00	81.056.459.000



No.	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Anggaran Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2.2	Dana Alokasi Umum	476.841.183.000,00	475.851.608.000	475.851.608.000,00	493.791.884.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	90.479.520.346,00	97.507.328.000	93.467.543.851,00	28.339.311.000
1.2.4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	56.162.194.000,00	89.899.782.573	85.130.297.254,00	96.887.176.000
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
1.2.5	Dana Insentif Daerah	44.420.166.000,00	19.885.822.000	19.885.822.000	19.710.229.000
1.2.6	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Dana Desa	40.186.161.200,00	28.338.150.000	28.226.109.120,00	30.582.567.000
	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
1.2.9	Pendapatan Bagi Hasil	63.898.047.803,00	73.111.853.608	82.752.167.509,00	70.985.447.295
1.2.10	Bantuan Keuangan	0,00	1.116.000.000	1.116.000.000,00	0,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	40.086.631.395,00	0,00	406.853.742,45	3.171.257.500
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	254.000.000,00	0,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan lainnya	40.086.631.395,00	0,00	152.853.742,45	3.171.257.500
	Total Pendapatan Daerah	1.206.127.115.886,45	1.099.900.202.235	1.161.198.545.963,57	1.137.746.446.114

7.2.3.2 Target Belanja Daerah

Analisis proyeksi belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Bintan tahun 2022 dan sebagaimana PP No 12 tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja digunakan untuk belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan belanja bantuan social. Belanja modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- 2) Pendanaan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk 6 urusan;
- 3) Pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan;



- 4) Penyediaan anggaran anggaran yang menunjang program penanggulangan kemiskinan antara lain : peningkatan kualitas SDM dibidang perekonomian potensial di Kabupaten Bintan;
- 5) Fungsi Pendidikan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Sekurang-kurangnya 20% dari APBD;
- 6) Anggaran Kesehatan Minimal 10% dari Total Belanja Daerah diluar Gaji;
- 7) Anggaran Infrastruktur yang Bersumber Dari Dana Transfer Umum Sebesar 25%;
- 8) Anggaran Peningkatan Kapasitas SDM Sekurang-kurangnya 0,34% Untuk Pemerintah Provinsi Dan 0,16% Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Dari Total Belanja Daerah.

Rencana Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada kebijakan pendapatan daerah 2021, sebagaimana pada tabel proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 7.2.8 Realisasi dan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 s.d Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Anggaran Tahun 2023 (Rp)
2.1	Belanja Operasi				
2.1.1	Belanja pegawai	476.609.153.074,00	516.744.618.269	470.125.670.747,00	545.770.158.955
2.1.2	Belanja barang	327.840.463.570,98	384.595.778.747	349.842.979.580,45	378.300.246.396
2.1.3	Belanja bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja subsidi	0,00	1.900.000.000	1.690.823.167,00	1.000.000.000
2.1.5	Belanja hibah	45.560.989.228,00	53.919.406.384	51.051.247.835,00	28.810.259.868
2.1.6	Belanja bantuan social	3.939.600.000,00	9.793.300.000	7.549.600.000,00	8.330.000.000
2.2	Belanja Modal				
2.2.1	Belanja tanah	994.839.115,00	6.000.000.000	956.984.073,00	0,00
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	39.826.077.526,00	50.580.502.348	47.774.943.804,00	16.685.852.676
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	63.060.135.647,33	64.991.766.710	63.625.599.408,98	25.210.594.501
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	43.580.037.497,00	38.857.449.174	37.169.864.362,97	41.115.114.157
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	1.954.288.040,00	1.521.606.701	1.483.878.197,00	2.699.925.615
2.2.6	Belanja aset lainnya	2.970.000,00	0,00	-	0,00
2.3	Belanja Tak Terduga				
2.3.1	Belanja Tak Terduga	5.674.118.343,00	5.483.017.521	1.074.996.083,00	18.194.350.245
2.4	Belanja Transfer				
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/kota	15.285.366.000,00	17.316.296.600	17.316.296.600,00	26.975.000.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/kota Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/kota Kepada Desa	92.996.547.466,00	84.979.993.300	84.867.913.933,00	90.347.401.300
	Total Belanja	1.117.324.585.307,31	1.236.683.735.754	1.134.530.797.791,40	1.183.438.903.713



7.2.3.3 Target Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau pencairan dana cadangan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau pemberian pinjaman daerah.

Rencana Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada kebijakan Pembiayaan daerah 2022, sebagaimana pada tabel proyeksi pembiayaan Daerah Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun 2022 adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) merupakan sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Penggunaan SiLPA terutama digunakan untuk menutup defisit anggaran setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun 2022 adalah:

- 1) Meningkatkan *performance* dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- 2) Pengembalian pinjaman daerah yang telah diberikan dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat Kabupaten Bintan.

Berdasarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan, realisasi pengeluaran pembiayaan, dan proyeksi, arah kebijakan pembiayaan daerah selanjutnya dituangkan dalam tabel berikut.

**Tabel 7.2.9 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah		
		Anggaran Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Anggaran Tahun 2023
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	136.783.533.519	136.779.170.359,09	45.692.457.599
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	1.250.000,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Pengembalian Pokok Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	136.783.533.519	136.780.420.359,09	45.692.457.599
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	136.783.533.519	136.780.420.359,09	45.692.457.599

**7.3. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja****7.3.1.1 Realisasi Pendapatan**

Melalui tabel berikut dapat dilihat ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk pendapatan daerah:

Tabel 7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	4	5	6
1.1	Pendapatan Asli Daerah	215.989.894.215,00	198.029.727.549,12	91,68
1.1.1	Pajak Daerah	162.297.546.000,00	145.481.518.689,93	89,64
1.1.2	Retribusi Daerah	10.865.420.000,00	7.313.516.224,00	67,31
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	10.477.231.219,00	8.706.275.676,00	83,10
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.349.696.996,00	36.528.416.959,19	112,92
1.2	Dana Transfer	883.910.308.020,00	962.761.964.672,00	108,92
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil	98.199.763.839,00	176.332.416.938,00	179,57
1.2.2	Dana Alokasi Umum	475.851.608.000,00	475.851.608.000,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus – Fisik	97.507.328.000,00	93.467.543.851,00	95,86
1.2.4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	89.899.782.573,00	85.130.297.254,00	94,69
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya			
1.2.5	Dana Insentif Daerah	19.885.822.000,00	19.885.822.000,00	19.885.822.000,00
1.2.6	Dana Otonomi Khusus	0,00	-	-
1.2.7	Dana Keistimewaan	0,00	-	-
1.2.8	Dana Desa	28.338.150.000,00	28.338.150.000,00	28.226.109.120,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah			
1.2.9	Pendapatan Bagi Hasil	73.111.853.608,00	82.752.167.509,00	113,19
1.2.10	Bantuan Keuangan	1.116.000.000,00	1.116.000.000,00	100,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	406.853.742,45	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	254.000.000,00	0,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00		0,00
1.3.3	Pendapatan lainnya	0,00	152.853.742,45	0,00
	Total Pendapatan Daerah	<u>1.099.900.202.235,00</u>	<u>1.161.198.545.963,57</u>	<u>105,57</u>



Realisasi Pendapatan Tahun 2022 secara keseluruhan sebesar Rp 1.161.198.545.963,57 atau 105,57% dari target sebesar Rp1.099.900.202.235,00. Realisasi Pendapatan merupakan gabungan dari realisasi pajak daerah sebesar Rp145.481.518.689,93 atau 89,64%, realisasi retribusi daerah sebesar Rp 7.313.516.224,00 atau 67,31% dari target, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp8.706.275.676,00 atau 83,10% dari target dan Realisasi lain-lain PAD yang sah sebesar Rp36.528.4

16.959,19 atau 112,92% dari target. Dan selebihnya merupakan pendapatan transfer.

7.3.1.2 Realisasi Belanja

Melalui tabel berikut dapat dilihat ikhtisar realisasi target kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022.

Tabel 7.3.2 Ikhtisar Realisasi Belanja Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.1	Belanja Operasi	966.953.103.400,00	880.260.321.329,45	91,03
2.1.1	Belanja pegawai	516.744.618.269,00	470.125.670.747,00	90,98
2.1.2	Belanja barang	384.595.778.747,00	349.842.979.580,45	90,96
2.1.3	Belanja bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja subsidi	1.900.000.000,00	1.690.823.167,00	88,99
2.1.5	Belanja hibah	53.919.406.384,00	51.051.247.835,00	94,68
2.1.6	Belanja bantuan sosial	9.793.300.000,00	7.549.600.000,00	77,09
2.2	Belanja Modal	161.951.324.933	151.011.269.845,95	93,24
2.2.1	Belanja tanah	6.000.000.000,00	956.984.073,00	15,95
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	50.580.502.348,00	47.774.943.804,00	94,45
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	64.991.766.710,00	63.625.599.408,98	97,90
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	38.857.449.174,00	37.169.864.362,97	95,66
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	1.521.606.701,00	1.483.878.197,00	97,52
2.2.6	Belanja aset lainnya	0,00	0,00	0,00
2.3	Belanja Tak Terduga	5.483.017.521	1.074.996.083,00	19,61
2.3.1	Belanja Tak Terduga	5.483.017.521	1.074.996.083,00	19,61
2.4	Belanja Transfer	102.296.289.900	102.184.210.533,00	99,89
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	17.316.296.600	17.316.296.600,00	100,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/kota Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/kota Kepada Desa	84.979.993.300	84.867.913.933,00	99,87
	Total Belanja	1.236.683.735.754,00	1.134.530.797.791,40	91,74



Secara keseluruhan realisasi belanja Tahun 2022 sebesar Rp1.134.530.797.791,40 atau 91,74% dari anggaran sebesar Rp1.236.683.735.754,00. Tidak terserapnya seluruh belanja terutama disebabkan oleh efisiensi belanja modal yang dilaksanakan secara pelelangan, terjadinya efisiensi dalam penggunaan belanja pegawai, barang & jasa, pekerjaan belum dilaksanakan serta belum digunakannya belanja bantuan sosial, hibah, subsidi, bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut.

- a. Masih terdapat beberapa pelaksana kegiatan kurang memahami ketentuan tata kelola keuangan daerah, sehingga dalam merealisasikan kegiatan masih bergantung pada Bendaharawan Pengeluaran. Pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang lambat dari pelaksana kegiatan sehingga mempengaruhi Bendaharawan Pengeluaran yang juga lambat dalam mengusulkan proses pertanggungjawaban dan pencairan dana berikutnya.
- b. Terbatasnya tenaga yang terampil dan telah bersertifikat di bidang pengadaan barang dan jasa sehingga proses pengadaan belum sepenuhnya dapat diselesaikan dan berakibat pelaksanaan fisik kegiatan terhambat.
- c. Perencanaan yang tidak matang sehingga beban pekerjaan tertumpuk pada akhir tahun anggaran atau pada triwulan IV dan kondisi yang mendesak dan berakibat tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.
- d. Kegiatan fisik pada beberapa program yang ditetapkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada triwulan IV dalam kondisi yang mendesak dan berakibat tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.



7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

7.4.1.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Dengan demikian, entitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan wewenangnya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Kabupaten Bintan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. BKAD Kabupaten Bintan sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan (konsolidasian) berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan keuangan.

7.4.1.2 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah OPD sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan dimaksud berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan keuangan.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan adalah:

- 1 Dinas Pendidikan
- 2 Dinas Kesehatan
- 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
- 4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5 Satuan Polisi Pamong Praja
- 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 7 Dinas Sosial
- 8 Dinas Tenaga Kerja
- 9 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 10 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
- 11 Dinas Lingkungan Hidup
- 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 14 Dinas Perhubungan



- 15 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 16 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
- 17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 18 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
- 19 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 20 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- 21 Dinas Perikanan
- 22 Sekretariat Daerah
- 23 Inspektorat Daerah
- 24 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 25 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
- 26 Badan Pendapatan Daerah
- 27 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 28 Sekretariat DPRD
- 29 Kecamatan Bintan Utara
- 30 Kecamatan Bintan Pesisir
- 31 Kecamatan Tambelan
- 32 Kecamatan Mantang
- 33 Kecamatan Toapaya
- 34 Kecamatan Teluk Sebong
- 35 Kecamatan Teluk Bintan
- 36 Kecamatan Gunung Kijang
- 37 Kecamatan Bintan Timur
- 38 Kecamatan Seri Kuala Lobam
- 39 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Disamping memiliki 39 (tiga puluh sembilan) OPD di atas, pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bintan juga memiliki 36 (tiga puluh enam) desa, 15 (lima belas) kelurahan, 6 (enam) Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan 2 (dua) Perusahaan Daerah. Adapun Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) terdiri dari:

- 1) Pola Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap 5 (lima) Puskesmas;
- 2) Pola Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap Dana Bergulir;
- 3) Pola Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap RSUD Bintan.

Kedua PPK-BLUD tersebut statusnya adalah PPK-BLUD Bertahap yang berarti belum PPK-BLUD penuh sehingga merupakan entitas akuntansi dari dinas teknis terkait, yaitu untuk PPK-BLUD Bertahap Puskesmas Teluk Sebong, Puskesmas Kawal, Puskesmas Tanjung Uban, Puskesmas Kijang dan Puskesmas Teluk Sasah dengan Dinas Kesehatan.



Sedangkan PPK PPK-BLUD Bertahap Dana Bergulir dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Sedangkan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bintan, terdiri dari:

1. PT Bintan Inti Sukses (BIS) yang memiliki satu anak perusahaan PT Bintan Anugerah Bersama (PT BAB) yang bergerak di bidang SPBU;
2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintan.

Perusahaan daerah pada dasarnya adalah suatu entitas pelaporan keuangan namun standar akuntansi dan penyajian laporannya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Laporan keuangan perusahaan daerah tidak dikondolidasi ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan, namun disertakan dalam lampiran laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan.

7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

7.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis Penyusunan Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja



dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

- c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

- d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

- e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;



- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Prinsip-prinsip dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam



memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

- a) basis akuntansi;
- b) prinsip nilai perolehan;
- c) prinsip realisasi;
- d) prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e) prinsip periodisitas;
- f) prinsip konsistensi;
- g) prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h) prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian
2. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.
3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.
4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

1. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
2. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.



Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

1. Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.
2. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

1. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
2. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

1. Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.



2. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

7.4.5 Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Definisi Pendapatan -LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.



Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Pendapatan LRA terdiri dari

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA
- b. Pendapatan Transfer – LRA
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pengakuan Pendapatan -LRA

Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran Pendapatan -LRA

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatandimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan



Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan -LRA

Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan Asli Daerah –LRA

Definisi Pendapatan Asli Daerah – LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah)

Pengakuan Pendapatan Asli Daerah –LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah –LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Transfer –LRA

Definisi Pendapatan Transfer –LRA



Pendapatan Transfer – LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005).

Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA

Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.

Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA

Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Definisi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA (dana perimbangan).

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah – LRA,
- b. Dana Darurat – LRA,
- c. Pendapatan Lainnya – LRA.

.Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh PPKD.

Pengukuran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

Penyajian Dan Pengungkapan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Kebijakan Akuntansi Belanja

Definisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

Pengakuan Belanja

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan hingga tanggal pelaporan belum dipertanggungjawabkan/dimintakan penggantian dari RKUD, dengan ketentuan Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Pengukuran Belanja

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan Belanja

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.



Belanja Operasi

Definisi Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial adalah Belanja Operasi yang ada di PPKD.

Belanja pegawai serta belanja barang dan jasa adalah Belanja Operasi yang ada di SKPD.

Pengakuan Belanja Operasi

Pengakuan belanja operasi pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD atau bendahara pengeluaran berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan menggunakan dokumen SP2D GU atau SP2D Nihil,

Pengukuran Belanja Operasi

Pengukuran belanja operasi dilakukan dengan azas bruto yaitu sesuai dengan jumlah nominal yang tercantum pada bukti pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Operasi

Belanja operasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Belanja modal

Definisi belanja modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Belanja Modal merupakan akun yang akan dikelola oleh unit SKPD.

Pengakuan Belanja Modal

Pengakuan Belanja Modal dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Bersamaan dengan pengakuan Belanja Modal dilakukan pengakuan atas Aset Tetap (basis akrual).



Pengukuran Belanja Modal

Pengukuran Belanja Modal dilakukan berdasarkan jumlah nominal yang tercantum dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Penyajian dan Pengungkapan Belanja Modal

Belanja Modal disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Belanja tak terduga

Definisi belanja tak terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Tak Terduga adalah akun yang akan dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau unit Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Pengakuan belanja Tak Terduga

Pengakuan Belanja Tak Terduga pada saat terjadinya pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Pengukuran Belanja Tak Terduga

Pengukuran Belanja Tak Terduga berdasarkan nilai yang diterima dalam bukti pengeluaran atas belanja tak terduga atau berdasarkan jumlah nilai dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Kebijakan Akuntansi Transfer

Definisi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk (bagi pemerintah daerah) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Transfer masuk (bagi pemerintah daerah) terklasifikasi dalam Pendapatan Transfer.



Transfer keluar (bagi pemerintah daerah) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, Transfer yang dimaksud adalah transfer keluar yang terdiri dari:

- a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan
- b. Transfer Bantuan Keuangan.

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang lebih rendah.

Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pengakuan Transfer

Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja.

Transfer hanya dikeluarkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Transfer ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Transfer

Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan Transfer

Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan klasifikasi Transfer dan disajikan setelah klasifikasi Belanja. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan



b. Pengeluaran pembiayaan

Penerimaan pembiayaan definisi

Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian Dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pengeluaran Pembiayaan

Definisi Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.



Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Penyajian Dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

B. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.

Dalam Permendagi Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.

Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

- a. Surplus/Defisit - LRA
- b. Pembiayaan Netto
- c. SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
- d. Perubahan SAL

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. (PSAP 01 Paragraf 8).

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.



Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.

Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.

Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

penyajian dan pengungkapan saldo anggaran lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (face) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

C. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.



Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Aset lancar

Kas dan setara kas

Definisi Kas Dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas meliputi:

1. Seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal sebagai Uang Persediaan,
2. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran,
3. Uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah,
4. Uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kas terdiri dari :

1. Kas di Kas Daerah;
2. Kas di Bendahara Penerimaan;
3. Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas meliputi investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Setara kas terdiri dari :

1. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
2. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau Rekening Kas Umum Daerah.



Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pengukuran Kas Dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengakuan Kas Dan Setara Kas

Terkait dengan pengakuan aset, secara umum pengakuan aset dilakukan:

pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

Penyajian Dan Pengungkapan Kas Dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;

rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.



Investasi jangka pendek

Definisi investasi jangka pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;

Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
2. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (reliable) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Penyajian Dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

Penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;

Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;

Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);

Penurunan nilai investasijangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;



Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

Piutang

Definisi piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pada bagan akun standar, piutang terbagi menjadi:

1. Piutang pendapatan,
2. Piutang Lainnya.

Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari, yang dibedakan menjadi:

1. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/ pungutan pendapatan daerah;
2. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian;
3. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan;

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/ pungutan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di pemerintah daerah yang meliputi Piutang Lain-lain PAD yang Sah.

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, dan Piutang Pendapatan Lainnya.

Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

Jenis piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan antara lain meliputi:



1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat seperti Piutang Bagi Hasil, Piutang DAU, Piutang DAK; Piutang Transfer Pemerintah Pusat-lainnya seperti Piutang Dana otonomi Khusus, Piutang Dana Penyesuaian, dan Piutang Dana Darurat;
2. Piutang Transfer Pemerintah Daerah seperti Piutang Bagi Hasil ke Pemerintah dibawahnya.

Piutang Lainnya dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, yang dibedakan menjadi

1. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi
2. Piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Piutang berdasarkan peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa di atas. Piutang ini meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka, dan Panjar Kegiatan.

Uang Muka adalah suatu pengeluaran kas kepada pihak lain yang menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Uang muka ini misalnya adalah uang muka pengadaan barang/jasa.

Panjar Kegiatan adalah suatu pengeluarankas yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebagai pada awal pelaksanaan suatu kegiatan dan menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah dengan penyelesaian kegiatan yang dilaksanakan.

Pengukuran Piutang

Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas negara/daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:



1. Untuk metode *official assessment* dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan:
 - a. Dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b. Dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c. Dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
2. Untuk metode *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.
3. Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang.

Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
2. Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
3. Piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
4. Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
5. Piutang Transaksi dibayar di muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar pemerintah daerah.

Pengukuran Piutang transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. Dana Alokasi Umum (DAU) dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran Piutang lainnya berdasarkan peristiwa tuntutan ganti rugi dilakukan dengan :

1. Mencatatnya sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Mencatatnya sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nilai nilai nominal piutang yang belum dibayar atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan.

Pengakuan Piutang

Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari harus dipenuhi kriteria:

1. Telah diterbitkan surat ketetapan;
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pendapatan berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria :

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pendapatan berdasarkan Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:

1. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak daerah yang bersangkutan belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah.
2. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU), apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai



piutang oleh pemerintah daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

3. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pemerintah daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK.
4. Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak pemerintah daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah.
5. Piutang Transfer Antar Daerah, apabila jumlah/nilai definitif jumlah yang menjadi hakpemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang pemerintah daerah.

Piutang lainnya berdasarkan Peristiwa tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:

1. Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
2. Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:

1. Pengakuan Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka.
2. Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapannya.

Penyajian Dan Pengungkapan Piutang

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
4. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan.



Penyesuaian nilai piutang dapat dilakukan dengan cara:

1. Metode Penghapusan Langsung; dan
2. Metode Penyisihan.

Metode Penghapusan Langsung adalah Penghapusan sejumlah piutang yang sudah dipastikan tidak akan tertagih, digunakan ketika tidak memungkinkan mengestimasi piutang tidak tertagih, atau ketika jumlah piutang relatif kecil dibandingkan dengan total aset lancar.

Metode Penyisihan adalah Penyisihan sejumlah piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih, digunakan ketika jumlah piutang relatif besar dibandingkan dengan total aset lancar.

Penyisihan Piutang tak tertagih untuk jenis piutang berikut ini diperlakukan dengan kebijakan persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang yaitu:

Tabel 7.4.1 Kebijakan Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang

Nomor	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		< 1 Th	1-3 Th	3-5 Th	>5Th
1	Piutang Pajak Daerah	0,5 %	10%	50%	100%
2	Piutang Retribusi Daerah	0,5 %	10%	50%	100%
3	Piutang Dana Bergulir	0,5 %	10%	50%	100%
4	Selain Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Dana Bergulir	0,5 %	10%	50%	100%

Penyajian Dan Pengungkapan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Pencatatan Perubahan Jumlah Piutang harus disajikan dan diungkapkan jika terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Penghapusan Piutang oleh Bendahara Umum Daerah dapat dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitor yang memiliki kualitas macet. Penghapusan Piutang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Perlakuan akuntansi penghapusan dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan. Dalam hal terdapat penambahan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara menambah akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan penambahan jumlah Piutang dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan.



Dalam hal terdapat pengurangan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan pengurangan jumlah Piutang dilakukan apabila:

1. Surat tagihan/persetujuan/keputusan telah terbit; atau
2. Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan.

Beban dibayar dimuka

Definisi beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

Persediaan

Definisi persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/instansi pemerintah lainnya;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan/instansi pemerintah lainnya.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.



Untuk barang yang diproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan meliputi:

1. Barang konsumsi;
2. Barang pakai habis;
3. Barang cetakan;
4. Peranko dan materai;
5. Obat-obatan dan bahan farmasi;
6. Amunisi;
7. Bahan untuk pemeliharaan;
8. Suku cadang;
9. Persediaan untuk tujuan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) /berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras);
10. Pita cukai dan leges;
11. Bahan baku ;
12. Barang dalam proses/setengah jadi;
13. Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
14. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diungkapkan secara jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).

Persediaan diakui sebagai:

1. Aset, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan dan bahan farmasi.



2. Beban, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenisnya.

Pengukuran Persediaan

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan:

1. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenisnya.
2. Persediaan dicatat secara perpetual meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi, jenis persediaan yang sifatnya continues, dan membutuhkan kontrol yang besar antara lain berupa obat-obatan, bahan farmasi dan yang sejenisnya.

Metode periodik adalah metode pencatatan persediaan dimana nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Dengan metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan dimana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan.

Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan:

1. Harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.
2. Metode sistematis FIFO (First In First Out) jika persediaan dicatat secara perpetual.

Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.

Metode sistematis FIFO (First In First Out) adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan.

Metode FIFO ini memungkinkan harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Penyajian Dan Pengungkapan Persediaan

Pengungkapan untuk persediaan di dalam Laporan Keuangan, antara lain:

1. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



2. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

Aset untuk dikonsolidasikan

Definisi aset untuk dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengakuan Aset Untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengukuran Aset Untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

Pengungkapan Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

Aset Non Lancar

Aset nonlancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi Jangka Panjang

Definisi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.



Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen berupa:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
2. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, berupa:

1. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
2. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
3. Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
4. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

1. Dividen Tunai;
2. Dividen Saham; dan
3. Bagian Laba.

Pengakuan untuk hasil investasi untuk Dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
2. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi



(dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah
(dalam jurnal berbasis akrual)

Pengakuan untuk hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pengakuan untuk hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
2. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:

1. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
2. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
3. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
4. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
5. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.



Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode Biaya;
2. Metode Ekuitas;
3. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh

yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penyajian Dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Aset tetap

Definisi aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (PSAP 07 Paragraf 4).

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau



konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Masa manfaat adalah:

1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
2. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
3. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
4. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

Aset Tetap renovasi adalah komponen biaya renovasi atas aset tetap yang digunakan oleh pemerintah daerah, namun kepemilikannya bukan oleh pemerintah daerah.



Penyajian Aset Tetap renovasi termasuk dalam Aset Tetap lainnya dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan Aset Tetap yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa dilakukan bersamaan dengan adanya pengakuan Belanja Modal (basis kas). Pengakuan Belanja Modal (basis kas) didasarkan pada dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.2 Komponen Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	mesin tersebut siap
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Jalan, Jaringan, & Instalasi	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan capitalization threshold. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Penyajian Dan Pengungkapan Aset Tetap

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
3. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar



kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

4. Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
5. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
6. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
7. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
8. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (carrying amount).
9. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap

Definisi penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Akumulasi penyusutan (accumulated depreciaton) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

Masa manfaat adalah:

1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi biaya penyusutan. Nilai sisa pada akhir masa manfaat adalah Rp. 1,00 (satu rupiah)



Pengakuan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengukuran Penyusutan Aset Tetap

Pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aset tetap yang akan disusutkan harus memiliki nilai perolehan.
2. Cara penetapan nilai perolehan aset tetap pada huruf a tersebut antara lain mengacu pada harga pasar setempat, appraisal dan penetapan harga oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
3. Untuk aset tetap yang direnovasi, mekanisme penyusutannya adalah:
 - a. Menentukan nilai buku aset tetap yang akan direnovasi,
 - b. Menambahkan biaya renovasi yang akan mengkapitalisasi aset tetap yang bersangkutan,
 - c. Menentukan kembali umur manfaat ekonomis aset tetap dimulai sejak selesainya kegiatan renovasi,
 - d. Penentuan nilai perolehan aset setelah renovasi adalah sebesar nilai buku dikurangi nilai komponen yang dibongkar ditambah nilai renovasi.
4. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
5. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.

Penyajian Dan Pengungkapan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi.



Dana cadangan

Definisi dana cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

Pengukuran Dana Cadangan

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Penyajian Dan Pengungkapan Dana Cadangan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Aset lainnya

Definisi aset lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang termasuk aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan Pihak Ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Lainnya terdiri dari:

1. Tagihan Jangka Panjang;
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;



3. Aset Tidak Berwujud;
4. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.

Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:

1. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
2. Bangun, Kelola, Serah – BKS (Build, Operate, Transfer – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BKS.
3. Bangun, Serah, Kelola – BSK (Build, Transfer, Operate – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
4. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
5. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Jenis Aset Tak Berwujud adalah:

1. Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
2. Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.



3. Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
4. Software komputer yang termasuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
5. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
6. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
7. Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
8. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.

Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal, sengketa hukum), piutang tidak tertagih (macet) yang belum terbit surat ketetapan penghapusannya, Detail Engineering Design (DED) dan AMDAL yang belum terealisasi konstruksi pembangunannya.

Pengakuan Aset Lainnya

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:

1. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.



2. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSK/BTO, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
3. Dalam rangka kerja sama pola BSK/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
4. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
5. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
6. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
7. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

Aset Tak Berwujud diakui pada saat:

1. Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak.

Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

1. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
2. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
3. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar



nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

1. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1. Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
2. Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
3. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah :

1. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
2. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari.
3. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.

Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

Proses penghapusan terhadap aset lain–lain diantaranya piutang macet, aset tetap yang kondisinya rusak berat, software (aplikasi) yang sudah tidak dimanfaatkan dan aset lain-lain yang tidak ada manfaatnya dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi, kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.



Penyajian Dan Pengungkapan

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitor.

Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.

Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

1. Masa manfaat dan metode amortisasi;
2. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud;
3. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Amortisasi Aset Lainnya

Definisi Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun “Beban Amortisasi” terhadap akun “Akumulasi Amortisasi”.

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas dengan :

Amortisasi Atas Aset Tidak Berwujud

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tidak berwujud (ATB) secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Masa Manfaat untuk ATB adalah terbatas atau tak terbatas.



Aset Tetap Renovasi

Suatu satuan kerja dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang bukan miliknya. Jika biaya renovasi tersebut material, memenuhi kriteria kapitalisasi dan meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap, maka biaya renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap renovasi dalam kelompok aset tetap lainnya. Tetapi jika biaya renovasi tersebut tidak material, tidak memenuhi kriteria kapitalisasi, dan tidak meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap yang direnovasi tersebut atau manfaat ekonominya kurang dari satu tahun, maka biaya renovasi diperlakukan sebagai beban operasional tahun berjalan. Kriteria kapitalisasi harus memperhatikan kebijakan akuntansi tentang ketentuan nilai minimum kapitalisasi. Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset tetap renovasi tersebut belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi.

Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, tanaman, dan aset tetap renovasi.

Aset tetap lainnya berupa barang bercorak kebudayaan/olah raga, hewan, tanaman dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak digunakan atau mati.

Untuk penyusutan pada aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomisnya, mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset tetap tersebut dengan masa pinjam pakai/sewa. Penyusutan atas aset tetap lainnya pada suatu periodik disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Metode perhitungan penyusutan aset tetap renovasi adalah dengan- menggunakan metode garis lurus.

Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya

Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”

- b.** Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban muncul antara lain karena:



1. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
2. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
3. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
4. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu:

1. Kewajiban Jangka Pendek; dan
2. Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban jangka pendek

Definisi kewajiban jangka pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan.

Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek adalah:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
2. Utang Bunga (Accrued Interest);
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
4. Pendapatan Diterima Dimuka;
5. Utang Beban; dan
6. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

1. Utang Bunga (Accrued Interest);
2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
3. Utang Beban; dan
4. Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
2. Pendapatan Diterima Dimuka;
3. Utang Beban; dan
4. Utang Jangka Pendek Lainnya;



Utang perhitungan fihak ketiga (PFK)

Definisi utang perhitungan fihak ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran BPJS, Taspen, dan Taperum.

Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapetarum, dan BPJS) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Utang bunga (accrued interest)

Definisi utang bunga (accrued interest)

Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

Pengakuan Utang Bunga (Accrued Interest)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya



berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran Utang Bunga (Accrued Interest)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Bunga (Accrued Interest)

Utang bunga maupun commitment fee merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun commitment fee untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang commitment fee diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara terpisah.

Utang jangka pendek lainnya

Definisi utang jangka pendek lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya pendapatan yang ditangguhkan.

Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampe dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

Kewajiban untuk dikonsolidasikan

Definisi kewajiban untuk dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD.

Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.



Akun ini menurut Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

Pengakuan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

Pengukuran Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.

Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

Pengungkapan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Definisi Bagian

Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand).

Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.



Penyajian Dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan dineraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan diterima dimuka

Definisi pendapatan diterima dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Utang beban

Definisi utang beban

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (Account Payable).

Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

1. Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
2. Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan dibelakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.



3. Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
4. Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat:

1. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
2. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
3. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Utang jangka pendek lainnya

Definisi utang jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Kewajiban Jangka Panjang

Definisi kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah:

1. Utang Dalam Negeri;
2. Utang Luar Negeri; dan
3. Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD

Utang Dalam Negeri

Definisi Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

1. Utang Dalam Negeri – sektor perbankan;
2. Utang Dalam Negeri – sektor lembaga keuangan non bank;
3. Utang Dalam Negeri – obligasi;
4. Utang pemerintah pusat;
5. Utang pemerintah provinsi; dan
6. Utang pemerintah kabupaten/kota.

Pengakuan Utang Dalam Negeri

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

Pengukuran Utang Dalam Negeri

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.



Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman.

Utang Luar Negeri

Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

Definisi Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

Pengakuan Utang Luar Negeri

kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran Utang Luar Negeri

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.



Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (carrying amount) utang tersebut.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (carrying amount).

Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

Utang jangka panjang lainnya

Definisi utang jangka panjang lainnya

Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan

Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK).

Bangun, Serah, Kelola (BSK) merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan para pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.

Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.

Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.



Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013.

Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

Penyajian Dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



D. Laporan Operasional (LO)

Definisi Pendapatan – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan – LO terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah – LO,
- b. Pendapatan Transfer – LO,
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO
- d. Pendapatan NonOperasional – LO
- e. Pos Luar Biasa – LO.

Pengakuan Pendapatan – LO

Pendapatan–LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:

- a. Pendapatan–LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
- b. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pendapatan–LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak



pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.

Penetapan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

Untuk alasan kepraktisan dan sifat pendapatan daerah serta mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan–LO dapat diakui pada saat kas diterima (bersamaan dengan penerimaan kas) dengan memperhatikan:

- a. Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh masyarakat, maka nilainya diakui sebagai penambah Pendapatan Pajak–LO. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Piutang Pajak Daerah” di debit dan “Pendapatan Pajak–LO (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.
- b. Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode akuntansi berikutnya tidak diakui sebagai pendapatan tetapi harus diakui sebagai pengurangan terhadap “Piutang Pendapatan (Piutang Pajak Daerah sesuai dengna rincian obyek terkait)”.
- c. Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang dan debitur atau wajib pajak/retribusi sebagai dasar perhitungan beban penyisihan piutang.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan:

- a. Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tidak terlalu lama dan masih dalam periode akuntansi maka ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (accounting treatment) yang harus dilakukan.
- b. Ketidakpastian penerimaan yang cukup tinggi

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian akan jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

Penetapan – LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.



Pengukuran Pendapatan – LO

Pendapatan–LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan–LObruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan - LO

Pendapatan – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Asli Daerah – LO

Definisi Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pengakuan Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi pemerintah daerah.

Jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) pengakuan atar Pendapatan Asli Daerah – LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:

- a. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
- b. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah – LO dengan pertimbangan kepraktisan; biaya dan manfaat; jangka waktu antara pengakuan hak dan penerimaan kas yang tidak terlalu lama; dan tidak adanya dokumen penetapan maka Pendapatan Asli Daerah – LO dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
- c. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah – LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.

Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (accounting treatment) pada akhir periode



akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (understated) maupun lebih (overstated).

Pendapatan Asli Daerah – LO untuk rincian Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai karakteristik yang spesifik. Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai siklus yang tetap dan pasti. Misalnya pajak dibayarkan pada bulan Mei, maka wajib pajak membayar untuk waktu 12 (dua belas) bulan. Meskipun hak atas pajak kendaraan pada periode akuntansi berjalan hanya sekitar 8 (delapan) bulan namun pada periode akuntansi berikutnya dan sebelumnya selalu dibayarkan pajak dengan jangka waktu yang sama. Sehingga hak atas pajak kendaraan tersebut diakui dengan jumlah yang sama untuk periode akuntansi bersangkutan.

Dengan pertimbangan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor akan selalu dibayarkan untuk waktu 12 (dua belas) bulan (adanya kepastian jumlah hak yang akan diterima), tidak akan pernah ada klaim (restitusi), kepraktisan pengakuan maka Pajak Kendaraan Bermotor diakui haknya dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas dan nilai yang diakui adalah nilai pajak 12 (dua belas) bulan.

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Transfer – LO

Definisi Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO atau Dana Perimbangan adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Alokasi Pendapatan Transfer – LO untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden RI Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Kas Umum Negara.

Pengakuan Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO diakui pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul yaitu bersamaan dengan terbitnya peraturan mengenai Alokasi Pendapatan Transfer.

Pada saat Alokasi Pendapatan Transfer diterbitkan dan terjadi pengakuan Pendapatan Transfer – LO, jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pendapatan ini diakui dengan kondisi sebelum penerimaan kas. Oleh sebab itu saat pengakuan Pendapatan Transfer – LO akan menimbulkan akun Piutang Pendapatan Transfer – LO pada sisi debit.



Pencairan atau penerimaan distribusi Pendapatan Transfer – LO secara periodik mengurangi jumlah Piutang Transfer – LO dan tidak akan menambah Pendapatan Transfer – LO. Pencairan ini diakui berdasarkan Nota Kredit yang diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan Transfer – LO hanya dilakukan di unit PPKD.

Pengukuran Pendapatan Transfer – LO

Pengukuran Pendapatan Transfer – LO dilakukan berdasarkan jumlah Alokasi Pendapatan Transfer.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer – LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO

Definisi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LO dan Pendapatan Transfer – LO (dana perimbangan).

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah – LO,
- b. Dana Darurat – LO,
- c. Pendaptan Lainnya – LO.

Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO adalah pada saat pendapatan ini menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan Hibah – LO diakui pada saat perjanjian Hibah disetujui.

Dana Darurat – LO terkait dengan sifatnya ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan dikeluarkannya Kas di Kas Daerah (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

Pendapatan Lainnya – LO diakui pada saat telah menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.

Pengukuran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang menjadi hak pemerintah daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.



Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Non Operasional – LO

Definisi Pendapatan Non Operasional – LO

Pendapatan Non Operasional – LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.

Pendapatan Non Operasional – LO terdiri dari:

- a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO.
- b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO.
- c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO.

Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO

Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO pada saat hak atas pendapatan timbul.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misalnya: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

Pengukuran Pendapatan Non Operasional – LO

Pendapatan Non Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional – LO

Pendapatan Non Operasional - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional – LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pos Luar Biasa – LO

Definisi Pos Luar Biasa – LO

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pengakuan Pos Luar Biasa – LO

Pos Luar Biasa – LO diakui pada saat hak atas pendapatan pos luar biasa timbul.



Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

Pengukuran Pos Luar Biasa – LO

Pos Luar Biasa – LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan pos Luar Biasa – LO

Pos Luar Biasa - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional. Rincian dari Pendapatan Non Operasional – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Kebijakan Akuntansi Beban

Definisi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban terdiri dari:

- a. Beban Operasi
- b. Beban Transfer
- c. Beban Non Operasional
- d. Beban Luar Biasa

Pengakuan Beban

Beban dapat diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.



Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat

terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (accounting treatment) yang panjang yang harus dilakukan.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Beban operasi

Definisi beban operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.



Pengakuan Beban Operasi

Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.

Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Pengukuran Beban Operasi

Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.



Penyajian Dan Pengungkapan Beban Operasi

Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban Transfer

Definisi Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan Beban Transfer

Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban Transfer

Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban non operasional

Definisi beban non operasional

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Pengakuan Beban Non Operasional

Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.

Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Pengukuran Beban Non Operasional

Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dihasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban Non Operasional

Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban luar biasa

Definisi beban luar biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.



Pengakuan Beban Luar Biasa

Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Pengukuran Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Rincian dari Beban Luar Biasa dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

E. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang



diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (on the face) laporan keuangan.

**7.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN****7.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN****7.5.1.1 PENDAPATAN – LRA**

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Sisa Anggaran Lebih (SAL) dalam periode Tahun Anggaran (TA) yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Kabupaten Bintan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lainnya Pendapatan yang Sah, dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut.

**Tabel 7.5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Pendapatan Asli Daerah	215.989.894.215,00	198.029.727.549,12	91,68	(17.960.166.665,88)	195.745.874.584,92	1,17
2	Pendapatan Transfer	883.910.308.020,00	962.761.964.672,00	108,92	78.851.656.652,00	870.158.338.817,00	10,64
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	406.853.742,45	0,00	406.853.742,45	40.086.631.395,00	(98,99)
Jumlah		1.099.900.202.235,00	1.161.198.545.963,57	105,57	61.298.343.728,57	1.105.990.844.796,92	4,99

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan – LRA TA 2022 adalah sebesar Rp1.099.900.202.235,00 terealisasi sebesar Rp1.161.198.545.963,57 atau 105,57%. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp55.207.701.166,65 atau 4,99%. Peningkatan realisasi pendapatan daerah TA 2022 dari TA 2021 terjadi karena adanya peningkatan dari Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tersebut menurun dibandingkan dengan pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp39.679.777.652,55 atau 98,99% disebabkan pendapatan Dana BOS untuk TA 2022 terdapat pada rekening Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

7.5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH – LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA yang dicapai pada TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Pajak Daerah-LRA	162.297.546.000,00	145.481.518.689,93	89,64	(16.816.027.310,07)	130.059.598.323,77	11,86
2	Retribusi Daerah-LRA	10.865.420.000,00	7.313.516.224,00	67,31	(3.551.903.776,00)	7.601.797.691,00	(3,79)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	10.477.231.219,00	8.706.275.676,00	83,10	(1.770.955.543,00)	11.411.312.907,00	(23,70)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA	32.349.696.996,00	36.528.416.959,19	112,92	4.178.719.963,19	46.673.165.663,15	(21,74)
Jumlah		215.989.894.215,00	198.029.727.549,12	91,68	(17.960.166.665,88)	195.745.874.584,92	1,17

Tabel diatas menunjukkan anggaran masing-masing jenis PAD TA 2022 sebesar Rp215.989.894.215,00 terealisasi sebesar Rp198.029.727.549,12 atau 91,68%. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.283.852.964,20 atau 1,17%.



7.5.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Pajak Hotel - LRA	58.287.301.000,00	62.456.176.468,22	107,15	4.168.875.468,22	13.241.827.713,99	371,66
2	Pajak Restoran – LRA	1.648.050.000,00	1.438.138.762,41	87,26	(209.911.237,59)	6.213.190.825,03	(76,85)
3	Pajak Hiburan - LRA	7.877.735.000,00	2.826.742.246,00	35,88	(5.050.992.754,00)	373.205.305,00	657,42
4	Pajak Reklame – LRA	524.500.000,00	655.826.972,00	125,04	131.326.972,00	510.125.857,00	28,56
5	Pajak Penerangan Jalan – LRA	13.236.252.000,00	14.154.349.466,00	106,94	918.097.466,00	12.984.150.557,00	9,01
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	14.279.545.000,00	15.638.136.597,30	109,51	1.358.591.597,30	13.029.623.287,00	20,02
7	Pajak Parkir - LRA	130.000.000,00	132.486.866,00	101,91	2.486.866,00	69.858.633,00	89,65
8	Pajak Air Tanah - LRA	4.428.000,00	5.166.000,00	116,67	738.000,00	3.552.000,00	45,44
9	Pajak Sarang Burung Walet – LRA	3.834.000,00	3.250.000,00	84,77	(584.000,00)	1.450.000,00	124,14
10	BPHTB – LRA	16.389.143.000,00	17.570.074.837,00	107,21	1.180.931.837,00	24.180.312.733,75	(27,34)
11	PBB-P2-LRA	49.916.758.000,00	30.601.170.475,00	61,30	(19.315.587.525,00)	59.452.301.412,00	(48,53)
	Jumlah	162.297.546.000,00	145.481.518.689,93	89,64	(16.816.027.310,07)	130.059.598.323,77	11,86

Tabel diatas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp162.297.546.000,00 terealisasi sebesar Rp145.481.518.689,93 atau 89,64%. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp15.421.920.366,16 atau 11,86%. Dari jumlah realisasi pendapatan pajak daerah tersebut, diantaranya sebesar Rp62.456.176.468,22 diperoleh dari objek Pajak Hotel yang merupakan kontribusi pendapatan pajak daerah terbesar.

Terjadi kenaikan yang signifikan pada Pajak Hotel dan Hiburan disebabkan karena naiknya tingkat okupansi/kunjungan sehingga penerimaan atas pajak meningkat. Untuk kenaikan yang signifikan pada objek pajak hotel disebabkan karna untuk pajak restoran yang merupakan fasilitas di hotel untuk tahun 2022 dalam pelaporan pajaknya dilaporkan ke penerimaan pajak hotel. Dan terjadi kenaikan yang signifikan juga pada objek Pajak Sarang Burung Walet disebabkan karena adanya pelaporan penjualan atas pajak tahun sebelumnya yang dilaporkan pada tahun 2022.

7.5.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Retribusi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Retribusi Jasa Umum – LRA	365.000.000,00	419.368.800,00	114,90	54.368.800,00	250.559.200,00	67,37
2	Retribusi Jasa Usaha – LRA	6.416.420.000,00	3.271.513.240,00	50,99	(3.144.906.760,00)	664.506.500,00	392,32
3	Retribusi Perijinan Tertentu - LRA	4.084.000.000,00	3.622.634.184,00	88,70	(461.365.816,00)	6.686.731.991,00	(45,82)
Jumlah		10.865.420.000,00	7.313.516.224,00	67,31	(3.551.903.776,00)	7.601.797.691,00	(3,79)

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi daerah – LRA TA 2022 sebesar Rp10.865.420.000,00 terealisasi sebesar Rp7.313.516.224,00 atau 67,31%. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp288.281.467,00 atau 3,79%. Dari jumlah realisasi pendapatan Retribusi Daerah – LRA tersebut, diantaranya sebesar Rp3.622.634.184,00 atau 88,70% diperoleh dari objek retribusi Perijinan Tertentu yang merupakan pemberi kontribusi retribusi daerah terbesar. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

7.5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum – LRA

Retribusi Jasa Umum – LRA merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum – LRA TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan) – LRA	60.000.000,00	49.120.000,00	81,87	(10.880.000,00)	42.411.500,00	15,82
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	120.000.000,00	168.761.000,00	140,63	48.761.000,00	123.900.000,00	36,21
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LRA	50.000.000,00	40.822.000,00	81,64	(9.178.000,00)	11.995.000,00	240,33
4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	135.000.000,00	160.665.800,00	119,01	25.665.800,00	72.252.700,00	122,37
Jumlah		365.000.000,00	419.368.800,00	114,90	54.368.800,00	250.559.200,00	67,37

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan Retribusi Jasa Umum – LRA TA 2022 sebesar Rp365.000.000,00 terealisasi sebesar Rp419.368.800,00 atau 114,90%. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp168.809.600,00 atau 67,37%.

7.5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha – LRA

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LRA merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha – LRA TA 2022 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 7.5.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	356.000.000,00	473.741.740,00	133,07	117.741.740,00	506.610.000,00	(6,49)
2	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LRA	6.000.000.000,00	2.750.749.500,00	45,85	(3.249.250.500,00)	151.342.500,00	1.717,57
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga – LRA	60.420.000,00	47.022.000,00	77,83	(13.398.000,00)	6.554.000,00	617,45
Jumlah		6.416.420.000,00	3.271.513.240,00	50,99	(3.144.906.760,00)	664.506.500,00	392,32

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LRA TA 2022 sebesar Rp6.416.420.000,00 terealisasi sebesar Rp3.271.513.240,00 atau 50,99%. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.607.006.740,00 atau 392,32%. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA terdiri dari Sewa Rumah Dinas dan Sewa Laboratorium.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tersebut meningkat dibandingkan dengan pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp40.468.000,00 atau 617,45% disebabkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terdiri dari pendapatan Kawasan Wisata Pantai dan Kawasan Wisata Mangrove yang dikelola oleh PT. BRC Lagoi. Pada tahun 2021 pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga hanya di peroleh dari kawasan wisata pantai yaitu dengan menjual tiket pas masuk dan tiket sewa gazebo senilai Rp6.554.000,00 serta belum dibuka nya kunjungan dari wisatawan mancanegara sehingga Kawasan Wisata Mangrove belum dibuka dan tidak ada pendapatan dari tempat wisata tersebut. Tahun 2022 sudah dibukanya kunjungan dari luar negeri maka Kawasan Wisata Mangrove PT. BRC mulai memperoleh pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada bulan Agustus, dan peningkatan pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga pada tahun 2022 sebanyak Rp47.022.000,00.

7.5.1.1.1.2.3 Retribusi Perijinan Tertentu – LRA

Pendapatan retribusi perijinan tertentu – LRA berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan ijin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perijinan Tertentu merupakan sumber PAD – LRA. Anggaran dan realisasi Retribusi Perijinan Tertentu – LRA TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Retribusi IMB – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201.033.191,00	(100,00)
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Beralkohol – LRA	80.000.000,00	102.500.000,00	128,13	22.500.000,00	56.000.000,00	83,04
3	Retribusi Izin Trayek – LRA	4.000.000,00	435.000,00	10,88	(3.565.000,00)	90.000,00	383,33
4	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing – LRA	1.000.000.000,00	1.214.686.300,00	121,47	214.686.300,00	1.429.608.800,00	(15,03)
5	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LRA	3.000.000.000,00	2.305.012.884,00	76,83	(694.987.116,00)	0,00	100,00
Jumlah		4.084.000.000,00	3.622.634.184,00	88,70	(461.365.816,00)	6.686.731.991,00	(45,82)

Tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan retribusi perijinan tertentu – LRA TA 2022 sebesar Rp4.084.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.622.634.184,00 atau 88,70%. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp3.064.097.807,00 atau 45,82%.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Bangunan Gedung maka untuk Tahun 2022 Realisasi terdapat pada rekening Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bukan pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan yang diterima dan dikelola melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bintan yang berupa PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bintan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.8 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	BUMD/BPR Bintan – LRA	3.106.224.484,00	803.888.899,00	25,88	(2.302.335.585,00)	1.778.554.464,00	(54,80)
2	BUMD PT BIS – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bank Riau Kepri - LRA	7.371.006.735,00	7.902.386.777,00	107,21	531.380.042,00	9.632.758.443,00	(17,96)
Jumlah		10.477.231.219,00	8.706.275.676,00	83,10	(1.770.955.543,00)	11.411.312.907,00	(23,70)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA Tahun 2022 mencapai Rp8.706.275.676,00 atau sebesar 83,10% dari anggaran sebesar Rp10.477.231.219,00 yang berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR Bintan dan Bank Riau Kepri. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 menurun sebesar Rp2.705.037.231,00 atau 23,70%.

Berdasarkan Laporan Keuangan BUMD PT. BIS pada tahun 2020 dan 2021, PT. BIS mengalami kerugian sebesar (Rp83.129.014,00) untuk tahun 2020 dan tahun 2021 rugi sebesar (Rp6.552.912.999,00) sehingga mengakibatkan BUMD PT. BIS tidak dapat membagikan bagian laba atas penyertaan modal ke Pemerintah Kabupaten Bintan untuk tahun 2021 dan 2022.

7.5.1.1.1.4 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LRA TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

NO	URAIAN	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	501.697.823,00	0,00	501.697.823,00	377.868.105,00	32,77
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127.200,00	(100,00)
3	Jasa Giro	1.567.434.100,00	1.442.508.740,93	92,03	(124.925.359,07)	1.992.359.653,76	(27,60)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	600.000,00	(75,00)
5	Pendapatan Bunga Deposito	2.663.100.000,00	3.019.830.050,55	113,40	356.730.050,55	3.566.857.266,46	(15,34)
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah (TGR)	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	100,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	98.369.225,51	0,00	98.369.225,51	158.980.221,80	(38,12)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	845.000.000,00	1.063.918.085,40	125,91	218.918.085,40	4.130.831.096,57	(74,24)
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	3.112.752,00	0,00	3.112.752,00	0,00	100,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	2.375.570.442,80	0,00	2.375.570.442,80	957.705.473,56	148,05
11	Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Penerimaan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pendapatan BLUD	24.427.450.000,00	25.399.727.653,00	103,98	972.277.653,00	32.605.539.485,00	(22,10)



NO	URAIAN	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
14	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	4.074.090,00	0,00	4.074.090,00	4.286.411,00	(4,95)
15	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	2.846.712.896,00	2.616.458.096,00	91,91	(230.254.800,00)	2.874.010.750,00	(8,96)
16	Pendapatan JKN di FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		32.349.696.996,00	36.528.416.959,19	112,92	4.178.719.963,19	46.673.165.663,15	(21,74)

Tabel di atas menunjukkan Anggaran lain-lain PAD yang Sah TA 2022 sebesar Rp32.349.696.996,00 terealisasi sebesar Rp36.528.416.959,19 atau 112,92%. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp10.144.748.703,96 atau 21,74%. Sedangkan perbandingan antara target dan realisasi TA 2022 melebihi sebesar 12,92%. Pos-pos pendapatan yang melampaui antara lain adalah pendapatan bunga deposito sebesar Rp3.019.830.050,55 atau 113,40%, Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp1.063.918.085,40 dan Pendapatan dari BLUD sebesar Rp25.399.727.653,00 atau 103,98%.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah sudah termasuk pendapatan PPK-BLUD Puskesmas dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir serta pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada sembilan puskesmas Non BLUD serta Pendapatan PPK BLUD RSUD Kabupaten Bintan dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 7.5.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	PPK BLUD Puskesmas Teluk Sebong – LRA	1.457.405.452,00	595.267.961,00	40,84	(862.137.491,00)	719.589.721,00	(17,28)
2	PPK BLUD Puskesmas Teluk Sasah – LRA	493.045.555,00	449.386.625,00	91,15	(43.658.930,00)	442.042.300,00	1,66
3	PPK BLUD Puskesmas Kijang – LRA	1.088.010.897,00	978.851.100,00	89,97	(109.159.797,00)	934.878.200,00	4,70
4	PPK BLUD Puskesmas Tanjung Uban – LRA	941.007.889,00	993.561.500,00	105,58	52.553.611,00	911.495.800,00	9,00
5	PPK BLUD Puskesmas Kawal – LRA	657.705.642,00	742.870.850,00	112,95	85.165.208,00	704.492.500,00	5,45
6	Pendapatan BLUD RSUD Bintan – LRA	29.399.389.561,00	21.639.789.617,00	73,61	(7.759.599.944,00)	28.893.040.964,00	(25,10)
Jumlah		34.036.564.996,00	25.399.727.653,00	74,62	(8.636.837.343,00)	32.605.539.485,00	(22,10)

Pendapatan dari BLUD terdiri dari BLUD Puskesmas sebesar Rp601.118.386,00,00 dan pendapatan BPJS pada BLUD Puskesmas sebesar Rp3.158.819.650,00, Pendapatan BPJS pada BLUD RSUD sebesar Rp21.514.700.404,00 serta Pendapatan Jasa Giro pada BLUD RSUD sebesar Rp125.089.213,00.

Pendapatan dari BLUD TA 2022 sebesar Rp25.399.727.653,00 atau 74,62% dari anggaran sebesar Rp34.036.564.996,00. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp7.205.811.832,00 atau 22,10%.

**Tabel 7.5.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN di FKTP
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Puskesmas Kelong – LRA	335.640.000,00	330.774.693,00	98,55	(4.865.307,00)	325.364.000,00	1,66
2	Puskesmas Mantang - LRA	210.000.000,00	133.424.567,00	63,54	(76.575.433,00)	219.211.000,00	(39,13)
3	Puskesmas Toapaya - LRA	458.000.000,00	398.545.572,00	87,02	(59.454.428,00)	410.858.100,00	(3,00)
4	Puskesmas Teluk Bintan - LRA	327.000.000,00	285.614.755,00	87,34	(41.385.245,00)	320.220.000,00	(10,81)
5	Puskesmas Tambelan - LRA	315.319.000,00	300.655.722,00	95,35	(14.663.278,00)	260.095.500,00	15,59
6	Puskesmas Berakit - LRA	127.562.000,00	131.753.811,00	103,29	4.191.811,00	151.313.000,00	(12,93)
7	Puskesmas Sri Bintan - LRA	258.788.000,00	242.912.153,00	93,87	(15.875.847,00)	254.502.000,00	(4,55)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
8	Puskesmas Kuala Sempang - LRA	350.000.000,00	250.432.304,00	71,55	(99.567.696,00)	346.248.000,00	(27,67)
9	Puskesmas Sei. Lekop - LRA	427.362.000,00	400.107.319,00	93,62	(27.254.681,00)	417.915.450,00	(4,26)
10	JKN FKTP Non Kapitasi - LRA	37.041.896,00	142.237.200,00	383,99	105.195.304,00	168.283.700,00	(15,48)
	Jumlah	2.846.712.896,00	2.616.458.096,00	91,91	(230.254.800,00)	2.874.010.750,00	(8,96)

Pendapatan dari JKN FKTP pada puskesmas yang terdiri dari pendapatan BPJS TA 2022 sebesar Rp2.474.220.896,00 atau 88,06% dari anggaran sebesar Rp2.809.671.000,00. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp231.506.154,00 atau 8,56% dan pendapatan dari JKN FKTP Non Kapitasi sebesar Rp142.237.200,00 atau 39,34% dari anggaran sebesar Rp361.586.500,00. Sehingga total pendapatan pada JKN di FKTP TA 2022 sebesar Rp2.616.458.096,00 atau 91,91% dari anggaran sebesar Rp2.846.712.896,00.

Adapun anggaran dan realisasi JKN FKTP Non Kapitasi – LRA TA 2022 per Puskesmas adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan JKN FKTP Non Kapitasi Per Puskesmas Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Puskesmas Kelong – LRA	34.996.500,00	0,00	0,00	(34.996.500,00)	0,00	0,00
2	Puskesmas Mantang - LRA	16.000.000,00	0,00	0,00	(16.000.000,00)	0,00	0,00
3	Puskesmas Toapaya - LRA	40.150.000,00	27.238.400,00	67,84	(12.911.600,00)	16.725.000,00	62,86
4	Puskesmas Teluk Bintan - LRA	12.500.000,00	2.244.200,00	17,95	(10.255.800,00)	27.833.700,00	(91,94)
5	Puskesmas Tambelan - LRA	96.990.000,00	48.536.800,00	50,04	(48.453.200,00)	47.775.000,00	1,59
6	Puskesmas Berakit - LRA	25.000.000,00	15.281.800,00	61,13	(9.718.200,00)	13.950.000,00	9,55
7	Puskesmas Sri Bintan - LRA	51.750.000,00	23.744.700,00	45,88	(28.005.300,00)	28.700.000,00	(17,27)
8	Puskesmas Kuala Sempang – LRA	34.200.000,00	0,00	-	(34.200.000,00)	400.000,00	(100,00)
9	Puskesmas Sei. Lekop - LRA	50.000.000,00	25.191.300,00	50,38	(24.808.700,00)	32.900.000,00	(23,43)
	Jumlah	361.586.500,00	142.237.200,00	39,34	(219.349.300,00)	168.283.700,00	(15,48)

7.5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER – LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer – LRA TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA	761.458.482.412,00	830.781.866.043,00	109,10	69.323.383.631,00	721.653.963.814,00	15,12
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA	48.223.972.000,00	48.111.931.120,00	99,77	(112.040.880,00)	84.606.327.200,00	(43,13)
3	Transfer Pemerintah Antar Daerah - LRA	74.227.853.608,00	83.868.167.509,00	112,99	9.640.313.901,00	63.898.047.803,00	31,25
	Jumlah	883.910.308.020,00	962.761.964.672,00	108,92	78.851.656.652,00	870.158.338.817,00	10,64

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp962.761.964.672,00 atau 108,92% dari anggaran sebesar Rp883.910.308.020,00. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp92.603.625.855,00 atau 10,64%.

7.5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan yang ditransfer ke daerah terdiri dari Dana



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Anggaran dan realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dana Bagi Hasil – LRA	98.199.763.839,00	176.332.416.938,00	179,57	78.132.653.099,00	98.171.066.468,00	79,62
2	Dana Alokasi Umum – LRA	475.851.608.000,00	475.851.608.000,00	100,00	0,00	476.841.183.000,00	(0,21)
3	Dana Alokasi Khusus Fisik – LRA	97.507.328.000,00	93.467.543.851,00	95,86	(4.039.784.149,00)	90.479.520.346,00	3,30
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LRA	89.899.782.573,00	85.130.297.254,00	94,69	(4.769.485.319,00)	56.162.194.000,00	51,58
	Jumlah	761.458.482.412,00	830.781.866.043,00	109,10	69.323.383.631,00	721.653.963.814,00	15,12

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp830.781.866.043,00 atau 109,10% dari anggaran sebesar Rp761.458.482.412,00. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp109.127.902.229,00 atau 15,12%.

7.5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil - LRA

Dana Bagi Hasil merupakan jenis transfer yang menurut ketentuan perundang-undangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Pemerintah Pusat yang sebagian dibagikan kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil – LRA TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Dana Perimbangan – LRA Dana Bagi Hasil – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	26.922.964.019,00	26.498.021.549,00	98,42	(424.942.470,00)	26.871.516.690,00	(1,39)
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA – LRA	71.276.799.820,00	149.834.395.389,00	210,21	78.557.595.569,00	71.299.549.778,00	110,15
	Jumlah	98.199.763.839,00	176.332.416.938,00	179,57	78.132.653.099,00	98.171.066.468,00	79,62

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer – Dana Bagi Hasil TA 2022 sebesar Rp176.332.416.938,00 atau 179,57% dari anggaran sebesar Rp98.199.763.839,00. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp78.161.350.470,00 atau 79,62%. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tersebut meningkat dibandingkan dengan pendapatan TA 2021 sebesar Rp78.534.845.611,00 atau 110,15% disebabkan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 27 Juni 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 26 Agustus 2022.

7.5.1.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak – LRA

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak. Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LRA TA 2022 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 7.5.16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA
 Dana Perimbangan – LRA Dana Bagi Hasil Pajak – LRA
 Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan – LRA	8.712.994.394,00	10.016.012.680,00	114,95	1.303.018.286,00	9.026.348.987,00	10,96
2	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan pasal 21 – LRA	16.744.534.500,00	15.016.733.578,00	89,68	(1.727.800.922,00)	16.966.847.200,00	(11,49)
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 25/29 – LRA	1.455.083.125,00	1.455.083.125,00	100,00	0,00	857.257.000,00	69,74
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – LRA	10.352.000,00	10.192.166,00	98,46	(159.834,00)	21.063.503,00	(51,61)
	Jumlah	26.922.964.019,00	26.498.021.549,00	98,42	(424.942.470,00)	26.871.516.690,00	(1,39)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer – Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp26.498.021.549,00 atau 98,42% dari anggaran sebesar Rp26.922.964.019,00. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp373.495.141,00 atau 1,39% sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 27 Juni 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 26 Agustus 2022.

7.5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – LRA

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LRA TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA
 Dana Perimbangan – LRA Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA
 Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dana Bagi Hasil dari Pentambangan Minyak Bumi – LRA	7.944.925.820,00	18.925.807.867,00	238,21	10.980.882.047,00	2.397.403.700,00	689,43
2	Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	58.595.480.000,00	125.346.390.564,00	213,92	66.750.910.564,00	63.044.917.349,00	98,8.2
3	Dana Bagi Hasil dari Iuran Tetap (<i>Land Rent</i>) - LRA	74.494.000,00	116.061.523,00	155,80	41.567.523,00	24.673.475,00	370,39
4	Dana Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) -LRA	2.648.908.000,00	3.479.622.285,00	131,36	830.714.285,00	4.081.075.600,00	(14,74)
5	Dana Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan - LRA	54.681.000,00	8.202.150,00	15,00	(46.478.850,00)	76.979.504,00	(89,35)
6	Dana Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	0,00	1.674.500.150,00	16,95
	Jumlah	71.276.799.820,00	149.834.395.389,00	210,21	78.557.595.569,00	71.299.549.778,00	110,15

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer – Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2022 sebesar Rp149.834.395.389,00 atau 210,21% dari anggaran sebesar Rp71.276.799.820,00. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp78.534.845.611,00 atau 110,15%. Dana Bagi Hasil dari Pentambangan Minyak Bumi dan Dana Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Land Rent*) tersebut meningkat dibandingkan dengan pendapatan TA 2021 sebesar Rp78.534.845.611,00 atau 110,15% disebabkan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 27 Juni 2022 dan Peraturan Menteri



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 26 Agustus 2022.

7.5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum - LRA

Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum – LRA TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dana Alokasi Umum - LRA	475.851.608.000,00	475.851.608.000,00	100,00	0,00	476.841.183.000,00	(0,21)
	Jumlah	475.851.608.000,00	475.851.608.000,00	100,00	0,00	476.841.183.000,00	(0,21)

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 27 Juni 2022, DAU Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp475.851.608.000,00 dan terealisasi sebesar Rp475.851.608.000,00 atau 100,00%. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp989.575.000,00 atau 0,21%.

7.5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus – LRA

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik – LRA TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dana Alokasi Khusus - LRA	187.407.110.573,00	178.597.841.105,00	95,30	(8.809.269.468,00)	146.641.714.346,00	21,79
	Jumlah	187.407.110.573,00	178.597.841.105,00	95,30	(8.809.269.468,00)	146.641.714.346,00	21,79

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 27 Juni 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 26 Agustus 2022, DAK Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp187.407.110.573.000,00 terealisasi sebesar Rp178.597.841.105,00 atau 95,30% dari anggarannya. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp31.956.126.759,00 atau 21,79%.

7.5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Fisik – LRA

Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik merupakan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Khusus. Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik – LRA TA 2022 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 7.5.20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dana Alokasi Khusus Fisik - LRA	97.507.328.000,00	93.467.543.851,00	95,86	(4.039.784.149,00)	90.479.520.346,00	3,30
	Jumlah	97.507.328.000,00	93.467.543.851,00	95,86	(4.039.784.149,00)	90.479.520.346,00	3,30

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 27 Juni 2022, DAK Fisik Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp97.507.328.000,00 terealisasi sebesar Rp93.467.543.851,00 atau 95,86% dari anggarannya. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.988.023.505,00 atau 3,30%.

7.5.1.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LRA

Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik merupakan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Khusus. Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LRA TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LRA	89.899.782.573,00	85.130.297.254,00	94,69	(4.769.485.319,00)	56.162.194.000,00	51,58
	Jumlah	89.899.782.573,00	85.130.297.254,00	94,69	(4.769.485.319,00)	56.162.194.000,00	51,58

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 27 Juni 2022, DAK Non Fisik Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp89.899.782.573,00 terealisasi sebesar Rp85.130.297.254,00 atau 94,69% dari anggarannya. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp28.968.103.254,00 atau 51,58%.

7.5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA

**Tabel 7.5.22 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dana Insentif Daerah	19.885.822.000,00	19.885.822.000,00	100,00	0,00	44.420.166.000,00	(55,23)
2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dana Desa	28.338.150.000,00	28.226.109.120,00	99,60	(112.040.880,00)	40.186.161.200,00	(29,76)
	Jumlah	48.223.972.000,00	48.111.931.120,00	99,77	(112.040.880,00)	84.606.327.200,00	(43,13)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2022 sebesar Rp48.111.931.120,00 atau 99,77% dari anggaran sebesar Rp48.223.972.000,00. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp36.494.396.080,00 atau 43,13%.

7.5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID) - LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.23 Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dana Insentif Daerah (DID) – LRA	19.885.822.000,00	19.885.822.000,00	100,00	0,00	44.420.166.000,00	(55,23)
2	Dana Insentif Daerah Kategori Kesehatan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		19.885.822.000,00	19.885.822.000,00	100,00	0,00	44.420.166.000,00	(55,23)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Dana Insentif Daerah (DID) TA 2022 sebesar Rp19.885.822.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp19.885.822.000,00. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp24.534.344.000,00 atau 55,23% sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 27 Juni 2022.

7.5.1.1.2.2 Dana Desa – LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Desa TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.24 Anggaran dan Realisasi Dana Desa – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dana Desa – LRA	28.338.150.000,00	28.226.109.120,00	99,60	(112.040.880,00)	40.186.161.200,00	(29,76)
Jumlah		28.338.150.000,00	28.226.109.120,00	99,60	(112.040.880,00)	40.186.161.200,00	(29,76)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Dana Desa TA 2022 sebesar Rp28.226.109.120,00 dari anggaran sebesar Rp28.338.150.000,00 atau 99,60%. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp11.960.052.080,00 atau 29,76% sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 27 Juni 2022.

7.5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.25 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Pendapatan Transfer Antar Daerah- LRA	73.111.853.608,00	82.752.167.509,00	113,19	9.640.313.901,00	63.898.047.803,00	29,51
2	Bantuan Keuangan - LRA	1.116.000.000,00	1.116.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Jumlah		74.227.853.608,00	83.868.167.509,00	112,99	9.640.313.901,00	63.898.047.803,00	31,25

Tabel diatas menunjukkan realisasi penerimaan Transfer Antar Daerah TA 2022 sebesar Rp83.868.167.509,00 atau 112,99% dari anggaran sebesar Rp74.227.853.608,00. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp19.970.119.706,00 atau 31,25%.

7.5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 adalah sebagai berikut.



Tabel 7.5.26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	13.637.208.398,00	13.483.946.707,00	98,88	(153.261.691,00)	12.336.609.497,00	9,30
2	Pajak Bahan Bakar Bermotor (PBBKB)	7.322.645.682,00	7.688.146.685,00	104,99	365.501.003,00	34.321.216.193,00	(77,60)
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	40.118.010.395,00	48.833.955.552,00	121,73	8.715.945.157,00	6.400.715.076,00	662,95
4	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	71.021.940,00	56.564.575,00	79,64	(14.457.365,00)	57.497.607,00	(1,62)
5	Pajak Rokok	11.962.967.193,00	12.689.553.990,00	106,07	726.586.797,00	10.782.009.430,00	17,69
Jumlah		73.111.853.608,00	82.752.167.509,00	113,19	9.640.313.901,00	63.898.047.803,00	29,51

Tabel diatas menunjukkan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 yang merupakan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp82.752.167.509,00 atau 113,19% dari anggaran sebesar Rp73.111.853.608,00. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp18.854.119.706,00 atau 29,51%.

Pendapatan atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp42.433.240.476,00 atau 662,95% disebabkan adanya perubahan alokasi tahun 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 1290 Tahun 2022 Tanggal 7 November 2022.

7.5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan – LRA

Anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.27 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan - LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.116.000.000,00	1.116.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Jumlah		1.116.000.000,00	1.116.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Tabel diatas menunjukkan realisasi Bantuan Keuangan TA 2022 yang merupakan Bantuan Keuangan umum dari Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp1.116.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.116.000.000,00.

7.5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA

Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.28 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Pendapatan Hibah	0,00	254.000.000,00	0,00	254.000.000,00	0,00	100,00
2	Pendapatan Lainnya	0,00	152.853.742,45	0,00	152.853.742,45	40.086.631.395,00	(99,62)
Jumlah		0,00	406.853.742,45	0,00	406.853.742,45	40.086.631.395,00	(98,99)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2022 sebesar Rp406.853.742,45,00. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp40.086.631.395,00 atau 98,99% karena saldo Pendapatan Lainnya yang berisi anggaran pendapatan hibah dana BOS pada TA 2022 disajikan di Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Khusus Non Fisik.



7.5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Tabel 7.5.29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	254.000.000,00	0,00	254.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	0,00	254.000.000,00	0,00	254.000.000,00	0,00	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada TA 2021 tidak terdapat realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah dan pada TA 2022 terdapat realisasi sebesar Rp254.000.000,00. Realisasi tersebut sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor: PHD-79/MK/7/DTK.03/AMD/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk hibah air minum perdesaan yang bersumber dari penerima dalam negeri APBN TA 2022 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

7.5.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya TA. 2022 merupakan Pendapatan Dana BOS dan Pendapatan Atas Pengembalian Hibah.

Tabel 7.5.30 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lainnya
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	152.853.742,45	0,00	152.853.742,45	10.882.193.395,00	(98,60)
2	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.204.438.000,00	(100,00)
	Jumlah	0,00	152.853.742,45	0,00	152.853.742,45	40.086.631.395,00	(99,62)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Lainnya TA 2022 sebesar Rp152.853.742,45,00. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp39.933.777.652,5500 atau 99,62%.

Pendapatan atas pengembalian hibah menurun dari tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2021 terdapat pendapatan hibah dari KPU. Sedangkan pendapatan Hibah Dana Bos pada tahun 2022 di reklas ke Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

7.5.1.2 BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam suatu periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada desa/kelurahan, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

Anggaran dan realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bintang pada TA 2022 adalah sebagai berikut.



**Tabel 7.5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Belanja Operasi	966.953.103.400,00	880.260.321.329,45	91,03	(86.692.782.070,55)	853.950.205.872,98	3,08
2	Belanja Modal	161.951.324.933,00	151.011.269.845,95	93,24	(10.940.055.087,05)	149.418.347.825,33	1,07
3	Belanja Tidak Terduga	5.483.017.521,00	1.074.996.083,00	19,61	(4.408.021.438,00)	5.674.118.343,00	(81,05)
4	Belanja Transfer	102.296.289.900,00	102.184.210.533,00	99,89	(112.079.367,00)	108.281.913.266,00	(5,63)
	Jumlah	1.236.683.735.754,00	1.134.530.797.791,40	91,74	(102.152.937.962,60)	1.117.324.585.307,31	1,54

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp1.236.683.735.754,00 terealisasi sebesar Rp1.134.530.797.791,40 atau 91,74%. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp17.206.212.484,09 atau 1,54%.

Realisasi belanja tidak terduga belanja yang diperuntukkan *Covid-19* dan bencana alam pada TA 2022 lebih kecil dibandingkan dengan TA 2021 karena menurunnya kasus *Covid-19* dan bencana alam di Bintan.

7.5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Belanja Pegawai	516.744.618.269,00	470.125.670.747,00	90,98	(46.618.947.522,00)	476.609.153.074,00	(1,36)
2	Belanja Barang	384.595.778.747,00	349.842.979.580,45	90,96	(34.752.799.166,55)	327.840.463.570,98	6,71
3	Belanja subsidi	1.900.000.000,00	1.690.823.167,00	88,99	(209.176.833,00)	0,00	100,00
4	Belanja Hibah	53.919.406.384,00	51.051.247.835,00	94,68	(2.868.158.549,00)	45.560.989.228,00	12,05
5	Belanja Bantuan Sosial	9.793.300.000,00	7.549.600.000,00	77,09	(2.243.700.000,00)	3.939.600.000,00	91,63
6	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	966.953.103.400,00	880.260.321.329,45	91,03	(86.692.782.070,55)	853.950.205.872,98	3,08

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp966.953.103.400,00 terealisasi sebesar Rp880.260.321.329,45 atau 91,03%. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp26.310.115.456,47 atau 3,08%.

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan pimpinan & anggota DPRD, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Per Jenis Belanja TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	187.421.033.818,00	174.396.902.391,00	93,05	(13.024.131.427,00)	169.450.792.115,00	2,92
2	Dinas Kesehatan	92.499.790.860,00	87.949.198.709,00	95,08	(4.550.592.151,00)	85.065.101.020,00	3,39
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	8.432.789.646,00	7.495.221.615,00	88,88	(937.568.031,00)	6.814.069.730,00	10,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
	Pertanahan						
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.333.669.900,00	3.956.147.851,00	91,29	(377.522.049,00)	3.774.789.982,00	4,80
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13.851.398.341,00	13.168.212.537,00	95,07	(683.185.804,00)	14.020.516.855,00	(6,08)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.606.727.175,00	5.835.021.569,00	88,32	(771.705.606,00)	5.991.544.400,00	(2,61)
7	Dinas Sosial	3.712.640.544,00	3.231.875.819,00	87,05	(480.764.725,00)	3.440.731.046,00	(6,07)
8	Dinas Tenaga Kerja	2.989.306.368,00	2.700.571.867,00	90,34	(288.734.501,00)	2.607.806.792,00	3,56
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.417.647.902,00	4.045.031.748,00	91,57	(372.616.154,00)	4.145.279.951,00	(2,42)
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.562.582.204,00	8.855.986.398,00	92,61	(706.595.806,00)	8.442.566.610,00	4,90
11	Dinas Lingkungan Hidup	6.154.517.305,00	5.496.053.094,00	89,30	(658.464.211,00)	5.219.010.001,00	5,31
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.976.378.320,00	4.133.839.666,00	83,07	(842.538.654,00)	4.325.601.562,00	(4,43)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.838.817.941,00	3.465.454.601,00	90,27	(373.363.340,00)	3.412.735.167,00	1,54
14	Dinas Perhubungan	6.350.684.139,00	5.790.635.499,00	91,18	(560.048.640,00)	5.297.088.408,00	9,32
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.489.386.629,00	5.126.855.429,00	93,40	(362.531.200,00)	5.142.999.866,00	(0,31)
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	5.899.682.872,00	5.497.580.125,00	93,18	(402.102.747,00)	5.202.459.874,00	5,67
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.028.035.448,00	4.626.494.888,00	92,01	(401.540.560,00)	4.681.495.951,00	(1,17)
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.527.704.115,00	3.102.495.061,00	87,95	(425.209.054,00)	3.300.773.167,00	(6,01)
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.791.265.677,00	4.331.228.722,00	90,40	(460.036.955,00)	4.352.361.107,00	(0,49)
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.616.862.895,00	3.310.697.785,00	91,54	(306.165.110,00)	3.384.916.282,00	(2,19)
21	Dinas Perikanan	7.390.024.378,00	6.929.138.432,00	93,76	(460.885.946,00)	6.171.861.437,00	12,27
22	Sekretariat Daerah	19.292.809.339,00	16.872.213.581,00	87,45	(2.420.595.758,00)	18.195.735.434,00	(7,27)
23	Inspektorat Daerah	8.296.756.967,00	7.442.162.900,00	89,70	(854.594.067,00)	6.885.643.110,00	8,08
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.752.372.842,00	6.165.954.934,00	91,32	(586.417.908,00)	6.218.138.171,00	(0,84)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	11.571.747.637,00	8.487.682.405,00	73,35	(3.084.065.232,00)	24.128.131.894,00	(64,82)
26	Badan Pendapatan Daerah	11.337.276.370,00	8.223.135.748,00	72,53	(3.114.140.622,00)	10.236.467.259,00	(19,67)
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.384.901.879,00	10.671.075.370,00	86,16	(1.713.826.509,00)	9.015.603.015,00	18,36
28	Sekretariat DPRD	16.500.325.660,00	15.343.137.851,00	92,99	(1.157.187.809,00)	14.524.570.108,00	5,64
29	Kecamatan Bintan Utara	5.550.764.176,00	4.652.772.533,00	83,82	(897.991.643,00)	4.564.599.845,00	1,93
30	Kecamatan Bintan Pesisir	2.391.643.398,00	1.875.613.417,00	78,42	(516.029.981,00)	1.699.727.550,00	10,35
31	Kecamatan Tambelan	2.978.874.351,00	2.281.852.088,00	76,60	(697.022.263,00)	1.917.587.045,00	19,00
32	Kecamatan Mantang	2.154.860.259,00	1.776.502.313,00	82,44	(378.357.946,00)	1.825.759.962,00	(2,70)
33	Kecamatan Toapaya	3.093.825.968,00	2.597.234.120,00	83,95	(496.591.848,00)	2.577.042.506,00	0,78
34	Kecamatan Teluk Sebong	3.311.960.895,00	2.981.297.435,00	90,02	(330.663.460,00)	3.049.597.708,00	(2,24)
35	Kecamatan Teluk Bintan	3.166.568.105,00	2.640.620.364,00	83,39	(525.947.741,00)	3.012.251.400,00	(12,34)
36	Kecamatan Gunung Kijang	3.413.586.488,00	3.037.355.209,00	88,98	(376.231.279,00)	3.110.790.346,00	(2,36)
37	Kecamatan Bintan Timur	5.725.014.891,00	5.029.115.449,00	87,84	(695.899.442,00)	4.589.725.541,00	9,57
38	Kecamatan Seri Kuala Lobam	3.761.847.654,00	2.961.934.308,00	78,74	(799.913.346,00)	3.277.810.815,00	(9,64)
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.168.534.913,00	3.641.366.916,00	87,35	(527.167.997,00)	3.535.470.042,00	3,00
	Jumlah	516.744.618.269,00	470.125.670.747,00	90,98	(46.618.947.522,00)	476.609.153.074,00	(1,36)

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 adalah sebesar Rp516.744.618.269,00 atau sebesar 90,98% dari anggaran sebesar Rp470.125.670.747,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp6.483.482.327,00 atau 1,36%. Dari realisasi belanja pegawai tersebut termasuk didalamnya belanja pegawai pada PPK-BLUD



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Puskesmas sebesar Rp1.966.270.681,00, PPK-BLUD RSUD sebesar Rp8.658.080.532,00, belanja pegawai dari penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas non BLUD sebesar Rp983.642.879,00.

Adapun rincian Belanja Pegawai per jenis belanja adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.34 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Jenis Belanja
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Belanja Gaji Pokok PNS	161.214.353.807,00	154.684.807.707,00	95,95	(6.529.546.100,00)	153.205.347.898,00	0,97
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	8.630.141.000,00	6.016.062.000,00	69,71	(2.614.079.000,00)	0,00	100,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.823.481.033,00	14.816.992.684,00	93,64	(1.006.488.349,00)	14.965.530.419,00	(0,99)
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	908.460.000,00	550.463.740,00	60,59	(357.996.260,00)	0,00	100,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.432.227.000,00	6.755.375.000,00	90,89	(676.852.000,00)	6.694.122.396,00	0,92
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.771.378.800,00	8.634.351.050,00	98,44	(137.027.750,00)	8.954.135.190,00	(3,57)
7	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.799.145.000,00	2.513.070.000,00	89,78	(286.075.000,00)	2.094.961.434,00	19,96
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	656.630.000,00	375.180.000,00	57,14	(281.450.000,00)	0,00	100,00
9	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.926.574.399,00	9.563.278.248,00	96,34	(363.296.151,00)	9.573.944.703,00	(0,11)
10	Belanja Tunjangan Beras PPPK	659.891.000,00	409.173.000,00	62,01	(250.718.000,00)	0,00	100,00
11	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	207.963.907,00	125.347.438,00	60,27	(82.616.469,00)	74.473.075,00	68,31
12	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.600.001,00	2.298.962,00	63,86	(1.301.039,00)	2.266.927,00	1,41
13	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	350.000,00	132.443,00	37,84	(217.557,00)	0,00	100,00
14	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	14.235.464.925,00	13.674.687.855,00	96,06	(560.777.070,00)	13.977.782.780,00	(2,17)
15	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	514.308.864,00	292.583.677,00	56,89	(221.725.187,00)	0,00	100,00
16	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	410.233.217,00	317.936.719,00	77,50	(92.296.498,00)	314.656.360,00	1,04
17	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	33.722.507,00	12.759.040,00	37,84	(20.963.467,00)	0,00	100,00
18	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.225.242.388,00	953.813.456,00	77,85	(271.428.932,00)	943.969.075,00	1,04
19	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	57.096.000,00	38.275.328,00	67,04	(18.820.672,00)	0,00	100,00
20	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.270.684.789,00	0,00	0,00	(2.270.684.789,00)	0,00	0,00
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	190.215.848.070,00	172.301.624.131,00	90,58	(17.914.223.939,00)	136.438.167.990,00	26,29
22	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.920.800.000,00	1.333.791.200,00	69,44	(587.008.800,00)	0,00	100,00
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.351.384.000,00	899.317.440,00	66,55	(452.066.560,00)	1.100.359.280,00	(18,27)
24	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	7.537.230.000,00	6.353.229.280,00	84,29	(1.184.000.720,00)	7.043.351.600,00	(9,80)
25	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.648.000.000,00	3.216.000.000,00	88,16	(432.000.000,00)	3.900.000.000,00	(17,54)
26	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.808.756.662,00	417.948.387,00	23,11	(1.390.808.275,00)	0,00	100,00
27	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	57.072.251,00	13.098.674,00	22,95	(43.973.577,00)	0,00	100,00
28	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	272.807.301,00	0,00	0,00	(272.807.301,00)	0,00	0,00
29	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	18.163.524,00	4.168.651,00	22,95	(13.994.873,00)	20.639.756,00	(79,80)
30	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	458.373.655,00	105.202.153,00	22,95	(353.171.502,00)	574.743.441,00	(81,70)
31	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	4.501.922,00	2.342.807,00	52,04	(2.159.115,00)	0,00	100,00
32	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	494.503.069,00	202.614.644,00	40,97	(291.888.425,00)	557.615.212,00	(63,66)
33	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak	550.243.721,00	296.322.262,00	53,85	(253.921.459,00)	755.036.036,00	(60,75)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
	atas Tanah dan Bangunan						
34	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
35	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	25.000.000,00	17.500.000,00	70,00	(7.500.000,00)	30.473.000,00	(42,57)
36	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	109.500.000,00	95.625.000,00	87,33	(13.875.000,00)	211.481.000,00	(54,78)
37	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.920.000,00	2.550.000,00	87,33	(370.000,00)	1.168.000,00	118,32
38	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	36.500.000,00	31.875.000,00	87,33	(4.625.000,00)	47.450.000,00	(32,82)
39	Belanja TPG PNSD	39.894.672.984,00	36.661.355.900,00	91,90	(3.233.317.084,00)	33.924.882.200,00	8,07
40	Belanja TKG PNSD	1.808.551.376,00	655.610.400,00	36,25	(1.152.940.976,00)	491.071.800,00	33,51
41	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.259.750.000,00	956.250.000,00	75,91	(303.500.000,00)	523.750.000,00	82,58
42	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.071.361.183,00	983.642.879,00	91,81	(87.718.304,00)	1.123.667.671,00	(12,46)
43	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.961.500.000,00	3.617.435.000,00	91,31	(344.065.000,00)	0,00	100,00
44	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00	36.000.000,00	33,33
45	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00	0,00	558.180.000,00	0,60
46	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	103.635.000,00	73.327.800,00	70,76	(30.307.200,00)	73.294.200,00	0,05
47	Belanja Tunjangan Beras DPRD	92.523.240,00	84.007.200,00	90,80	(8.516.040,00)	83.717.520,00	0,35
48	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	48.132.000,00	85,71	(8.022.000,00)	47.796.000,00	0,70
49	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	100,00	0,00	809.361.000,00	0,60
50	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	74.176.200,00	74.115.300,00	99,92	(60.900,00)	71.983.800,00	2,96
51	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	150.000.000,00	24.679.725,00	16,45	(125.320.275,00)	17.706.675,00	39,38
52	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	100,00	0,00	3.129.000.000,00	0,67
53	Belanja Tunjangan Reses DPRD	525.000.000,00	514.500.000,00	98,00	(10.500.000,00)	493.500.000,00	4,26
54	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	50.000.006,00	526.749,00	1,05	(49.473.257,00)	526.749,00	0,00
55	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	120.000,00	0,00	0,00	(120.000,00)	0,00	0,00
56	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	161.280.000,00	138.240.000,00	85,71	(23.040.000,00)	137.280.000,00	0,70
57	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.043.088,00	1.155.168,00	28,57	(2.887.920,00)	1.147.464,00	0,67
58	Belanja Jaminan Kematian DPRD	167.067.696,00	3.465.504,00	2,07	(163.602.192,00)	3.440.952,00	0,71
59	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.915.200.000,00	1.834.800.000,00	95,80	(80.400.000,00)	1.817.000.000,00	0,98
60	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.954.160.000,00	2.954.160.000,00	100,00	0,00	2.954.160.000,00	0,00
61	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	240.660.000,00	0,00	0,00	(240.660.000,00)	0,00	0,00
62	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.972.000,00	40.131.700,00	71,70	(15.840.300,00)	54.600.000,00	(26,50)
63	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.720.000,00	5.448.000,00	62,48	(3.272.000,00)	6.708.000,00	(18,78)
64	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.744.000,00	46.440.000,00	46,10	(54.304.000,00)	98.280.000,00	(52,75)
65	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.818.000,00	4.634.880,00	52,56	(4.183.120,00)	6.807.480,00	(31,91)
66	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	392.000,00	86.786,00	22,14	(305.214,00)	234.270,00	(62,95)
67	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	84.000,00	1.400,00	1,67	(82.600,00)	2.040,00	(31,37)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
68	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	13.169.960,00	3.263.280,00	24,78	(9.906.680,00)	5.469.120,00	(40,33)
69	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	2.056.220,00	88.560,00	4,31	(1.967.660,00)	112.320,00	(21,15)
70	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.511.900,00	265.680,00	17,57	(1.246.220,00)	336.960,00	(21,15)
71	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	163.739.507,00	142.032.780,00	86,74	(21.706.727,00)	0,00	100,00
72	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	4.729.624,00	4.677.543,00	98,90	(52.081,00)	0,00	100,00
73	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	22.607.761,00	0,00	0,00	(22.607.761,00)	0,00	0,00
74	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1.505.226,00	1.488.645,00	98,90	(16.581,00)	2.352.113,00	(36,71)
75	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	37.985.795,00	37.567.530,00	98,90	(418.265,00)	72.987.100,00	(48,53)
76	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	373.078,00	368.964,00	98,90	(4.114,00)	0,00	100,00
77	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	40.979.868,00	40.528.638,00	98,90	(451.230,00)	67.669.135,00	(40,11)
78	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	45.599.141,00	45.097.047,00	98,90	(502.094,00)	93.200.942,00	(51,61)
79	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	40.500.000,00	16.875.000,00	41,67	(23.625.000,00)	45.936.750,00	(63,26)
80	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1.080.000,00	450.000,00	41,67	(630.000,00)	432.000,00	4,17
81	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	13.500.000,00	5.625.000,00	41,67	(7.875.000,00)	11.287.500,00	(50,17)
82	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	201.600.000,00	80,00	(50.400.000,00)	193.200.000,00	4,35
83	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	243.789.000,00	40,63	(356.211.000,00)	450.040.000,00	(45,83)
84	Belanja Pegawai BLUD	11.163.938.604,00	10.624.351.213,00	95,17	(539.587.391,00)	12.048.895.378,00	(11,82)
85	Belanja TPG PPPK	338.181.000,00	275.884.500,00	81,58	(62.296.500,00)	0,00	100,00
86	Belanja Tamsil Guru PPPK	463.500.000,00	149.250.000,00	32,20	(314.250.000,00)	0,00	100,00
87	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	54.018.074.658,00	(100,00)
88	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	192.248.569,00	(100,00)
89	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.137.136,00	(100,00)
Jumlah		516.744.618.269,00	470.125.670.747,00	90,98	(46.618.947.522,00)	476.609.153.074,00	(1,36)

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan dan material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, pemeliharaan dan perjalanan dinas. Anggaran dan realiasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	65.064.798.788,00	61.882.604.788,45	95,11	(3.182.193.999,55)	51.717.193.858,98	19,66



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
2	Dinas Kesehatan	92.861.806.310,00	80.270.370.972,00	86,44	(12.591.435.338,00)	96.929.469.208,00	(17,19)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	15.242.024.027,00	14.219.995.192,00	93,29	(1.022.028.835,00)	14.713.416.310,00	(3,35)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18.796.551.639,00	18.155.905.609,00	96,59	(640.646.030,00)	17.910.116.193,00	1,37
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3.077.089.817,00	2.929.851.211,00	95,22	(147.238.606,00)	2.687.290.786,00	9,03
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.174.495.801,00	2.023.474.719,00	93,05	(151.021.082,00)	1.439.827.514,00	40,54
7	Dinas Sosial	5.311.731.116,00	5.121.435.325,00	96,42	(190.295.791,00)	3.128.011.514,00	63,73
8	Dinas Tenaga Kerja	1.776.295.205,00	1.696.445.613,00	95,50	(79.849.592,00)	1.138.073.818,00	49,06
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.434.108.794,00	3.484.315.644,00	78,58	(949.793.150,00)	2.367.819.621,00	47,15
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.618.660.414,00	2.486.241.318,00	94,94	(132.419.096,00)	3.138.312.370,00	(20,78)
11	Dinas Lingkungan Hidup	17.417.882.798,00	16.977.064.915,00	97,47	(440.817.883,00)	15.430.544.509,00	10,02
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.006.023.772,00	1.730.513.294,00	86,27	(275.510.478,00)	2.596.231.804,00	(33,35)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.504.682.872,00	2.299.688.626,00	91,82	(204.994.246,00)	2.677.662.097,00	(14,12)
14	Dinas Perhubungan	4.461.301.139,00	4.070.543.929,00	91,24	(390.757.210,00)	3.212.610.255,00	26,71
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.413.543.240,00	5.062.828.100,00	93,52	(350.715.140,00)	4.174.410.689,00	21,28
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	5.349.231.429,00	4.230.743.011,00	79,09	(1.118.488.418,00)	2.068.160.709,00	104,57
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.914.354.463,00	2.757.512.547,00	94,62	(156.841.916,00)	1.856.332.989,00	48,55
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.448.905.129,00	3.281.791.695,00	95,15	(167.113.434,00)	2.142.551.813,00	53,17
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.120.483.001,00	5.531.879.397,00	90,38	(588.603.604,00)	3.374.009.583,00	63,96
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.205.406.460,00	1.195.424.203,00	99,17	(9.982.257,00)	1.077.434.776,00	10,95
21	Dinas Perikanan	3.221.463.821,00	2.904.912.816,00	90,17	(316.551.005,00)	2.066.455.524,00	40,57
22	Sekretariat Daerah	44.002.890.302,00	40.812.327.787,00	92,75	(3.190.562.515,00)	33.315.816.421,00	22,50
23	Inspektorat Daerah	3.017.523.189,00	2.649.026.377,00	87,79	(368.496.812,00)	2.070.082.487,00	27,97
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.339.212.576,00	6.490.782.062,00	88,44	(848.430.514,00)	6.566.256.679,00	(1,15)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	12.818.128.836,00	10.964.409.236,00	85,54	(1.853.719.600,00)	10.120.126.572,00	8,34
26	Badan Pendapatan Daerah	4.032.155.950,00	3.646.634.780,00	90,44	(385.521.170,00)	3.625.140.966,00	0,59
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.904.512.196,00	3.540.886.940,00	90,69	(363.625.256,00)	2.180.618.299,00	62,38
28	Sekretariat DPRD	25.696.591.124,00	22.004.727.220,00	85,63	(3.691.863.904,00)	13.189.787.135,00	66,83
29	Kecamatan Bintan Utara	2.672.406.835,00	2.555.866.323,00	95,64	(116.540.512,00)	3.179.754.733,00	(19,62)
30	Kecamatan Bintan Pesisir	997.395.519,00	904.116.062,00	90,65	(93.279.457,00)	891.658.547,00	1,40
31	Kecamatan Tambelan	1.305.535.236,00	1.257.919.756,00	96,35	(47.615.480,00)	1.843.537.430,00	(31,77)
32	Kecamatan Mantang	1.245.509.796,00	1.195.426.658,00	95,98	(50.083.138,00)	908.939.877,00	31,52
33	Kecamatan Toapaya	1.657.123.955,00	1.623.168.550,00	97,95	(33.955.405,00)	1.922.010.208,00	(15,55)
34	Kecamatan Teluk Sebong	1.413.601.087,00	1.386.566.013,00	98,09	(27.035.074,00)	1.168.610.491,00	18,65
35	Kecamatan Teluk Bintan	1.286.426.646,00	1.265.771.425,00	98,39	(20.655.221,00)	1.304.336.369,00	(2,96)
36	Kecamatan Gunung Kijang	1.640.348.868,00	1.518.715.301,00	92,58	(121.633.567,00)	2.462.824.362,00	(38,33)
37	Kecamatan Bintan Timur	2.542.619.296,00	2.339.442.460,00	92,01	(203.176.836,00)	2.901.058.953,00	(19,36)
38	Kecamatan Seri Kuala Lobam	2.311.045.530,00	2.183.342.594,00	94,47	(127.702.936,00)	2.900.155.366,00	(24,72)
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.291.911.771,00	1.190.307.112,00	92,14	(101.604.659,00)	1.443.812.735,00	(17,56)
	Jumlah	384.595.778.747,00	349.842.979.580,45	90,96	(34.752.799.166,55)	327.840.463.570,98	6,71

Realisasi untuk Belanja Barang dan Jasa TA 2022 adalah sebesar Rp349.842.979.580,45 atau sebesar 90,96% dari anggaran sebesar Rp384.595.778.747,00.



Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp22.002.516.009,47 atau 6,71%. Dari realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut termasuk didalamnya pengeluaran Belanja Barang dan Jasa PPK-BLUD Puskesmas sebesar Rp1.370.127.209,00, Belanja Barang dan Jasa PPK-BLUD RSUD sebesar Rp18.213.435.195,00, Belanja PPK BLUD Dana Bergulir sebesar Rp192.000,00, dan Belanja Barang dan Jasa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Non BLUD sebesar Rp1.226.604.949,00 serta Belanja Barang dan Jasa atas Dana BOS sebesar Rp22.310.460.691,00.

Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa per jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per jenis Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	997.019.047,00	995.817.745,00	99,88	(1.201.302,00)	2.789.340.739,00	(64,30)
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	252.424.752,00	239.529.182,00	94,89	(12.895.570,00)	2.129.226.504,00	(88,75)
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.512.007.403,00	8.437.093.985,00	99,12	(74.913.418,00)	7.598.628.220,00	11,03
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	180.951.335,00	168.862.698,00	93,32	(12.088.637,00)	408.811.744,00	(58,69)
5	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	89.931.550,00	83.230.500,00	92,55	(6.701.050,00)	19.574.500,00	325,20
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	99.187.845,00	79.463.241,00	80,11	(19.724.604,00)	768.467.450,00	(89,66)
7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.599.680.244,00	3.382.771.368,00	93,97	(216.908.876,00)	12.511.469.926,00	(72,96)
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.767.754.373,00	1.714.798.545,00	97,00	(52.955.828,00)	939.779.288,00	82,47
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	23.457.517,00	10.871.000,00	46,34	(12.586.517,00)	225.767.849,00	(95,18)
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	31.321.400,00	31.321.400,00	100,00	0,00	0,00	100,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	2.445.600,00	2.432.000,00	99,44	(13.600,00)	49.918.000,00	(95,13)
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	119.108.601,00	103.274.850,00	86,71	(15.833.751,00)	72.476.800,00	42,49
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	38.241.720,00	37.804.130,00	98,86	(437.590,00)	0,00	100,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	512.299.650,00	499.741.430,00	97,55	(12.558.220,00)	79.791.200,00	526,31
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.599.830.966,80	4.444.772.479,00	96,63	(155.058.487,80)	5.651.454.728,00	(21,35)
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.106.362,00	3.808.300,00	92,74	(298.062,00)	22.821.600,00	(83,31)
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.672.825.797,20	8.003.710.301,00	92,28	(669.115.496,20)	8.484.055.222,00	(5,66)
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	273.031.714,00	256.447.000,00	93,93	(16.584.714,00)	200.784.000,00	27,72
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	537.533.463,00	505.686.349,00	94,08	(31.847.114,00)	151.286.256,00	234,26
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.350.943.535,00	1.319.535.355,00	97,68	(31.408.180,00)	641.764.424,00	105,61
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.803.450.332,00	1.746.668.090,00	96,85	(56.782.242,00)	1.902.359.653,00	(8,18)
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	87.190.320,00	86.651.040,00	99,38	(539.280,00)	22.466.000,00	285,70
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	120.899.800,00	120.047.085,00	99,29	(852.715,00)	46.904.000,00	155,94
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	331.675.132,00	321.133.086,00	96,82	(10.542.046,00)	133.925.750,00	139,78
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.748.902.016,00	1.611.022.815,00	92,12	(137.879.201,00)	5.140.675.872,00	(68,66)
26	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.326.136.367,00	5.508.016.784,00	87,07	(818.119.583,00)	2.618.793.905,00	110,33
27	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	159.054.833,00	156.020.830,00	98,09	(3.034.003,00)	1.206.769.897,00	(87,07)
28	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.037.168.787,00	4.854.375.216,00	96,37	(182.793.571,00)	2.783.115.965,00	74,42
29	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	216.111.370,00	216.103.870,00	100,00	(7.500,00)	89.360.645,00	141,83
30	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.566.481.404,00	931.624.810,00	59,47	(634.856.594,00)	2.405.530.470,00	(61,27)
31	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	50.724.400,00	50.564.385,00	99,68	(160.015,00)	0,00	100,00
32	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.239.225.045,00	6.247.302.478,00	86,30	(991.922.567,00)	4.526.712.985,00	38,01
33	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.871.215.365,00	1.834.928.535,00	98,06	(36.286.830,00)	1.394.613.909,00	31,57



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
34	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	0,00	25.865.000,00	(78,74)
35	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.416.854.269,00	8.246.227.828,00	87,57	(1.170.626.441,00)	5.014.026.492,00	64,46
36	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	146.316.348,00	145.812.000,00	99,66	(504.348,00)	120.450.000,00	21,06
37	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	142.007.500,00	141.612.200,00	99,72	(395.300,00)	42.790.000,00	230,95
38	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	38.513.950,00	38.225.000,00	99,25	(288.950,00)	0,00	100,00
39	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	314.371.920,00	312.001.030,00	99,25	(2.370.890,00)	62.624.100,00	398,21
40	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	465.697.515,00	447.317.085,00	96,05	(18.380.430,00)	386.887.610,00	15,62
41	Belanja Pakaian KORPRI	13.828.001,00	13.827.968,00	100,00	(33,00)	0,00	100,00
42	Belanja Pakaian Adat Daerah	968.166.321,00	960.829.080,00	99,24	(7.337.241,00)	785.896.199,00	22,26
43	Belanja Pakaian Batik Tradisional	36.492.574,00	36.292.450,00	99,45	(200.124,00)	50.184.200,00	(27,68)
44	Belanja Pakaian Olahraga	444.996.210,00	442.038.954,00	99,34	(2.957.256,00)	431.403.126,00	2,47
45	Belanja Pakaian Paskibraka	111.412.850,00	111.299.700,00	99,90	(113.150,00)	114.889.500,00	(3,12)
46	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.052.589.000,00	2.548.061.000,00	83,47	(504.528.000,00)	1.375.534.480,00	85,24
47	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.672.862.888,00	7.094.387.281,00	92,46	(578.475.607,00)	5.293.541.632,00	34,02
48	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.386.811.000,00	2.924.926.000,00	86,36	(461.885.000,00)	470.388.000,00	521,81
49	Honorarium Rohaniwan	9.220.650.000,00	8.767.966.000,00	95,09	(452.684.000,00)	8.305.110.000,00	5,57
50	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	680.625.600,00	594.200.000,00	87,30	(86.425.600,00)	23.600.000,00	2.417,80
51	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	828.599.812,00	714.195.000,00	86,19	(114.404.812,00)	733.600.000,00	(2,65)
52	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	19.328.000.000,00	18.697.482.240,00	96,74	(630.517.760,00)	22.094.700.000,00	(15,38)
53	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	21.743.481.148,00	17.887.482.958,00	82,27	(3.855.998.190,00)	19.442.401.057,00	(8,00)
54	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	308.740.563,00	211.494.600,00	68,50	(97.245.963,00)	45.978.000,00	359,99
55	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.017.035.000,00	1.762.755.116,00	87,39	(254.279.884,00)	3.476.358.469,00	(49,29)
56	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	70.800.000,00	65.400.000,00	92,37	(5.400.000,00)	144.680.000,00	(54,80)
57	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	45.450.000,00	44.450.000,00	97,80	(1.000.000,00)	66.000.000,00	(32,65)
58	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	220.050.000,00	220.050.000,00	100,00	0,00	1.800.700.000,00	(87,78)
59	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	687.615.000,00	660.075.000,00	95,99	(27.540.000,00)	684.750.000,00	(3,60)
60	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00	0,00	316.500.000,00	(90,05)
61	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	311.700.000,00	297.900.000,00	95,57	(13.800.000,00)	120.625.000,00	146,96
62	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.776.700.000,00	24.384.626.000,00	94,60	(1.392.074.000,00)	23.555.322.000,00	3,52
63	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	7.566.300,00	7.500.000,00	99,12	(66.300,00)	8.250.000,00	(9,09)
64	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	675.200.000,00	633.250.000,00	93,79	(41.950.000,00)	335.600.000,00	88,69
65	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.580.268.710,00	2.100.643.388,00	81,41	(479.625.322,00)	2.690.128.000,00	(21,91)
66	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	14.914.633.089,00	14.562.666.264,00	97,64	(351.966.825,00)	13.548.904.423,00	7,48
67	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.339.480.000,00	1.222.480.000,00	91,27	(117.000.000,00)	495.300.000,00	146,82
68	Belanja Jasa Tenaga Supir	283.200.000,00	283.200.000,00	100,00	0,00	460.642.584,00	(38,52)
69	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	50.400.000,00	50.400.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
70	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	166.124.727,00	163.052.783,00	98,15	(3.071.944,00)	100.107.500,00	62,88
71	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	6.000.000,00	192.500,00	3,21	(5.807.500,00)	0,00	100,00
72	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	90.406.819,00	90.400.000,00	99,99	(6.819,00)	30.950.000,00	192,08
73	Belanja Jasa Tata Rias	12.000.000,00	11.899.200,00	99,16	(100.800,00)	17.347.000,00	(31,40)
74	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	166.578.000,00	138.578.250,00	83,19	(27.999.750,00)	208.390.000,00	(33,50)
75	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	313.744.902,00	183.624.153,00	58,53	(130.120.749,00)	18.557.440,00	889,49
76	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	212.209.238,00	92.736.859,93	43,70	(119.472.378,07)	4.579.900,00	1.924,87
77	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	174.475.000,00	172.855.000,00	99,07	(1.620.000,00)	189.832.500,00	(8,94)
78	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	504.027.176,00	495.428.000,00	98,29	(8.599.176,00)	181.434.250,00	173,06
79	Belanja Jasa Kalibrasi	57.679.004,00	44.874.145,00	77,80	(12.804.859,00)	173.380.244,00	(74,12)
80	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	168.495.000,00	123.626.880,00	73,37	(44.868.120,00)	0,00	100,00
81	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	4.600.000,00	600.000,00	13,04	(4.000.000,00)	654.165.610,00	(99,91)
82	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.709.130.490,00	2.645.136.130,00	97,64	(63.994.360,00)	1.461.447.400,00	80,99
83	Belanja Tagihan Telepon	305.707.101,00	160.930.964,00	52,64	(144.776.137,00)	287.436.716,00	(44,01)
84	Belanja Tagihan Air	455.708.395,00	382.144.405,00	83,86	(73.563.990,00)	317.062.950,00	20,53
85	Belanja Tagihan Listrik	15.672.085.181,00	14.437.372.632,00	92,12	(1.234.712.549,00)	13.284.739.532,00	8,68
86	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	530.527.400,00	436.608.050,00	82,30	(93.919.350,00)	466.929.400,00	(6,49)
87	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	4.184.382.800,00	3.892.444.908,00	93,02	(291.937.892,00)	3.225.532.913,00	20,68



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
	Berlangganan						
88	Belanja Paket/Pengiriman	95.624.574,00	53.225.780,00	55,66	(42.398.794,00)	7.667.500,00	594,17
89	Belanja Penambahan Daya	20.250.000,00	20.208.850,00	99,80	(41.150,00)	0,00	100,00
90	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	537.370.158,00	362.842.590,00	67,52	(174.527.568,00)	167.085.823,00	117,16
91	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan COVID-19	21.071.436,00	21.071.436,00	100,00	0,00	0,00	100,00
92	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	612.981.600,00	580.289.248,00	94,67	(32.692.352,00)	596.635.424,00	(2,74)
93	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.400.000.000,00	8.292.147.500,00	98,72	(107.852.500,00)	8.356.189.000,00	(0,77)
94	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.155.840.000,00	1.112.778.800,00	96,27	(43.061.200,00)	1.058.982.400,00	5,08
95	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.345.966.373,00	5.553.936.780,00	87,52	(792.029.593,00)	6.312.235.679,00	(12,01)
96	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.205.763.986,00	1.893.720.114,00	85,85	(312.043.872,00)	1.777.223.510,00	6,55
97	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	21.000.000,00	15.000.000,00	71,43	(6.000.000,00)	0,00	100,00
98	Belanja Sewa Excavator	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
99	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	99.194.880,00	73.896.030,00	74,50	(25.298.850,00)	0,00	100,00
100	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.298.609.690,00	8.548.319.800,00	91,93	(750.289.890,00)	657.588.300,00	1.199,95
101	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	27.600.000,00	25.162.700,00	91,17	(2.437.300,00)	33.105.000,00	(23,99)
102	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.201.986.666,00	1.176.911.000,00	97,91	(25.075.666,00)	1.858.163.200,00	(36,66)
103	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	133.200.000,00	132.667.200,00	99,60	(532.800,00)	129.984.800,00	2,06
104	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	278.985.052,00	265.893.545,00	95,31	(13.091.507,00)	150.172.000,00	77,06
105	Belanja Sewa Mebel	91.387.748,00	89.228.220,00	97,64	(2.159.528,00)	21.366.840,00	317,60
106	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	443.729.300,00	414.560.040,00	93,43	(29.169.260,00)	141.091.500,00	193,82
107	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	193.489.260,00	181.136.800,00	93,62	(12.352.460,00)	98.410.000,00	84,06
108	Belanja Sewa Sumber Tenaga	6.000.000,00	5.994.000,00	99,90	(6.000,00)	4.950.000,00	21,09
109	Belanja Sewa Alat Laboratorium Farmasi	11.675.000,00	0,00	0,00	(11.675.000,00)	0,00	0,00
110	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	408.936.000,00	408.592.500,00	99,92	(343.500,00)	69.630.000,00	486,81
111	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	110.814.000,00	109.890.000,00	99,17	(924.000,00)	256.740.000,00	(57,20)
112	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	876.060.500,00	806.980.500,00	92,11	(69.080.000,00)	406.655.000,00	98,44
113	Belanja Sewa Bangunan Gudang	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	263.900.000,00	(98,29)
114	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	149.675.415,00	107.000.000,00	71,49	(42.675.415,00)	370.797.300,00	(71,14)
115	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00	18.000.000,00	0,00
116	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	355.500.000,00	315.500.000,00	88,75	(40.000.000,00)	225.160.000,00	40,12
117	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	430.000.000,00	200.000.000,00	46,51	(230.000.000,00)	343.000.000,00	(41,69)
118	Belanja Sewa Hotel	2.594.872.160,00	2.255.881.929,00	86,94	(338.990.231,00)	1.641.125.400,00	37,46
119	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	46.517.500,00	(14,01)
120	Belanja Sewa Tanaman	38.940.000,00	38.764.300,00	99,55	(175.700,00)	41.525.000,00	(6,65)
121	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	4.900.000,00	4.898.810,00	99,98	(1.190,00)	0,00	100,00
122	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	432.898.578,00	431.932.590,00	99,78	(965.988,00)	0,00	100,00
123	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	70.000.000,00	69.930.000,00	99,90	(70.000,00)	0,00	100,00
124	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.067.422.041,00	1.046.441.627,00	98,03	(20.980.414,00)	1.266.947.800,00	(17,40)
125	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	362.950.000,00	344.627.400,00	94,95	(18.322.600,00)	1.489.130.500,00	(76,86)
126	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	905.842.625,00	900.735.490,00	99,44	(5.107.135,00)	1.004.860.450,00	(10,36)
127	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	2.910.818.898,00	2.807.916.718,00	96,46	(102.902.180,00)	0,00	100,00
128	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	583.529.400,00	582.503.440,00	99,82	(1.025.960,00)	175.824.000,00	231,30
129	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	99.999.939,00	99.715.000,00	99,72	(284.939,00)	643.134.497,00	(84,50)
130	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	10.599.999,00	10.594.000,00	99,94	(5.999,00)	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
131	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekyasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	3.534.662.386,00	3.490.951.615,00	98,76	(43.710.771,00)	1.768.612.150,00	97,38
132	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekyasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	75.450.125,00	56.679.708,00	75,12	(18.770.417,00)	99.621.500,00	(43,10)
133	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekyasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	289.904.000,00	288.304.185,00	99,45	(1.599.815,00)	595.684.750,00	(51,60)
134	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekyasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	45.750.000,00	45.630.000,00	99,74	(120.000,00)	0,00	100,00
135	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	70.350.000,00	0,00	0,00	(70.350.000,00)	7.581.680,00	(100,00)
136	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	60.000.000,00	0,00	0,00	(60.000.000,00)	0,00	100,00
137	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	533.426.000,00	467.143.500,00	87,57	(66.282.500,00)	403.499.300,00	15,77
138	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	90.000.000,00	89.988.810,00	99,99	(11.190,00)	0,00	100,00
139	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataaan	17.500.000,00	7.492.500,00	42,81	(10.007.500,00)	0,00	100,00
140	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	496.800.000,00	478.894.389,00	96,40	(17.905.611,00)	1.052.645.000,00	(54,51)
141	Belanja Bimbingan Teknis	2.005.738.167,00	1.922.525.838,00	95,85	(83.212.329,00)	452.980.000,00	324,42
142	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	25.000.000,00	22.564.635,00	90,26	(2.435.365,00)	0,00	100,00
143	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat Lainnya	19.282.000,00	19.282.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
144	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.382.781.176,00	1.353.501.559,00	97,88	(29.279.617,00)	1.697.306.000,00	(20,26)
145	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.712.909.862,00	1.653.899.274,00	96,55	(59.010.588,00)	1.653.795.790,00	0,01
146	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	464.626.388,00	459.703.040,00	98,94	(4.923.348,00)	401.222.000,00	14,58
147	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.244.300,00	14.162.643,00	99,43	(81.657,00)	7.059.600,00	100,62
148	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	80.565.660,00	80.380.159,00	99,77	(185.501,00)	76.241.000,00	5,43
149	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	149.850.000,00	149.800.050,00	99,97	(49.950,00)	0,00	100,00
150	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	63.164.355,00	62.994.746,00	99,73	(169.609,00)	125.500.450,00	(49,81)
151	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	(50.000,00)	0,00	100,00
152	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	61.382.933,00	53.636.250,00	87,38	(7.746.683,00)	38.995.000,00	37,55
153	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	9.314.200,00	9.314.200,00	100,00	0,00	0,00	100,00
154	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara	7.425.000,00	7.425.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
155	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	14.596.389,00	14.437.700,00	98,91	(158.689,00)	0,00	100,00
156	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	16.650.000,00	15.817.500,00	95,00	(832.500,00)	9.405.000,00	68,18
157	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	698.494.611,00	668.713.460,00	95,74	(29.781.151,00)	483.603.675,00	38,28
158	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	17.249.824,00	12.098.000,00	70,13	(5.151.824,00)	15.974.000,00	(24,26)
159	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	603.014.592,00	585.790.126,00	97,14	(17.224.466,00)	700.308.740,00	(16,35)
160	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	150.040.708,00	148.786.205,00	99,16	(1.254.503,00)	214.573.600,00	(30,66)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
161	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	44.000.000,00	43.978.200,00	99,95	(21.800,00)	43.835.000,00	0,33
162	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio VHF	7.000.000,00	0,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00	0,00
163	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	22.000.000,00	21.943.000,00	99,74	(57.000,00)	18.920.000,00	15,98
164	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	220.465.000,00	220.006.270,00	99,79	(458.730,00)	0,00	100,00
165	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	22.920.000,00	16.400.000,00	71,55	(6.520.000,00)	0,00	100,00
166	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	49.790.996,00	46.639.001,00	93,67	(3.151.995,00)	61.316.550,00	(23,94)
167	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	59.900.000,00	59.740.200,00	99,73	(159.800,00)	58.206.500,00	2,63
168	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	582.330.692,00	417.377.976,00	71,67	(164.952.716,00)	1.900.000,00	21.867,26
169	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	195.256.720,00	185.846.310,00	95,18	(9.410.410,00)	475.758.500,00	(60,94)
170	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	802.691.489,00	770.964.089,00	96,05	(31.727.400,00)	230.938.364,00	233,84
171	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	75.000.000,00	74.858.400,00	99,81	(141.600,00)	164.769.000,00	(54,57)
172	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.591.712.039,00	5.111.029.569,00	91,40	(480.682.470,00)	5.142.045.095,00	(0,60)
173	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	46.352.500,00	36.352.500,00	78,43	(10.000.000,00)	193.325.000,00	(81,20)
174	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	179.193.600,00	179.046.000,00	99,92	(147.600,00)	525.899.937,00	(65,95)
175	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.259.620.230,00	1.257.195.016,52	99,81	(2.425.213,48)	0,00	100,00
176	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	57.330.000,00	53.860.160,00	93,95	(3.469.840,00)	29.425.000,00	83,04
177	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.372.800.000,00	1.185.762.914,00	86,38	(187.037.086,00)	0,00	100,00
178	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	110.000.000,00	109.400.000,00	99,45	(600.000,00)	57.977.298,00	88,69
179	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	298.500.000,00	294.362.700,00	98,61	(4.137.300,00)	17.484.500,00	1.583,56
180	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	25.650.000,00	25.369.050,00	98,90	(280.950,00)	0,00	100,00
181	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	2.113.182.130,00	2.110.043.068,00	99,85	(3.139.062,00)	3.398.848.900,00	(37,92)
182	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Desa	60.493.000,00	60.364.182,00	99,79	(128.818,00)	0,00	100,00
183	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
184	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Lainnya	7.080.000,00	7.059.600,00	99,71	(20.400,00)	0,00	100,00
185	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	250.000.000,00	188.577.900,00	75,43	(61.422.100,00)	0,00	100,00
186	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	700.000.000,00	687.937.953,00	98,28	(12.062.047,00)	0,00	100,00
187	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	91.092.796,00	48.502.000,00	53,24	(42.590.796,00)	0,00	100,00
188	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	112.137.653,00	101.469.121,00	90,49	(10.668.532,00)	21.935.100,00	362,59
189	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	50.000.000,00	49.192.000,00	98,38	(808.000,00)	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
190	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	12.824.040,00	12.787.200,00	99,71	(36.840,00)	0,00	100,00
191	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	4.455.000,00	4.373.400,00	98,17	(81.600,00)	9.887.900,00	(55,77)
192	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.228.360.779,00	25.108.183.639,00	80,40	(6.120.177.140,00)	12.767.617.865,00	96,66
193	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
194	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.340.994.273,00	15.242.887.624,00	74,94	(5.098.106.649,00)	11.646.123.115,00	30,88
195	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	174.500.000,00	162.600.000,00	93,18	(11.900.000,00)	0,00	100,00
196	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	73.000.000,00	73.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
197	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	468.516.401,00	457.400.930,00	97,63	(11.115.471,00)	451.536.340,00	1,30
198	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	336.592.800,00	333.592.800,00	99,11	(3.000.000,00)	83.800.000,00	298,08
199	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	4.217.760.000,00	4.199.510.000,00	99,57	(18.250.000,00)	3.792.428.500,00	10,73
200	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	67.000.000,00	36.000.000,00	53,73	(31.000.000,00)	0,00	100,00
201	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.257.570.800,00	2.252.304.000,00	99,77	(5.266.800,00)	2.857.950.000,00	(21,19)
202	Belanja Barang dan Jasa BOS	23.089.696.571,00	22.310.460.691,00	96,63	(779.235.880,00)	21.570.222.327,98	3,43
203	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.249.992.837,00	19.583.562.404,00	96,71	(666.430.433,00)	12.084.190.766,00	62,06
204	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	556.525.200,00	556.525.200,00	100,00	0,00	0,00	100,00
205	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	156.248.400,00	154.492.800,00	98,88	(1.755.600,00)	0,00	100,00
206	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	39.750.000,00	39.750.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
207	Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	(100,00)
208	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107.172,00	(100,00)
209	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	(100,00)
210	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.887.500,00	(100,00)
211	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.819.406,00	(100,00)
212	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531.150,00	(100,00)
213	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899.300,00	(100,00)
214	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00	0,00	67.375.000,00	(100,00)
215	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540.000,00	(100,00)
216	Belanja Pipa-Pipa Plastik (UPVC)	0,00	0,00	0,00	0,00	277.209,00	(100,00)
217	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	31.109.600,00	(100,00)
218	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	(100,00)
219	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	0,00	0,00	0,00	0,00	457.200.000,00	(100,00)
220	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.000,00	(100,00)
221	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.600.000,00	(100,00)
222	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692.598.783,00	(100,00)
223	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800.000,00	(100,00)
224	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	112.397.200,00	(100,00)
225	Belanja Sewa Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	(100,00)
226	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	(100,00)
227	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	0,00	0,00	0,00	17.975.000,00	(100,00)
228	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	74.794.500,00	(100,00)
229	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	0,00	0,00	0,00	0,00	124.927.000,00	(100,00)
230	Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	22.125.000,00	(100,00)
231	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	149.954.640,00	(100,00)
232	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	(100,00)
233	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937.045,00	(100,00)
234	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
235	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00	17.517.500,00	(100,00)
236	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134.240,00	(100,00)
237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	(100,00)
238	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	(100,00)
239	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	(100,00)
240	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	297.553.900,00	(100,00)
241	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	51.463.500,00	(100,00)
242	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	81.941.951,00	(100,00)
243	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	136.735.500,00	(100,00)
244	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00	0,00	130.930.000,00	(100,00)
245	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	69.767.500,00	(100,00)
246	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	570.572.288,00	(100,00)
247	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	0,00	0,00	0,00	992.197.243,00	(100,00)
248	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.970.500,00	(100,00)
	Jumlah	384.595.778.747,00	349.842.979.580,45	90,96	(34.752.799.166,55)	327.840.463.570,98	6,71

Realisasi belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar 6,71% dari Rp327.840.463.570,98 pada TA 2021 menjadi Rp349.842.979.580,45 pada TA 2022. Kenaikan ini terutama berasal dari kenaikan Belanja Pemeliharaan Komputer sebesar 21.867%, Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebesar 2.417,80%, Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar 1.199,95%, dan Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebesar 521,81%.

Kenaikan Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan sebesar Rp415.477.976,00 atau 21.867,26% disebabkan oleh adanya perubahan kode rekening belanja 2021 dan 2022 pada 2 (dua) OPD yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah dari yang semula Rp0,00 menjadi Rp87.112.800,00 dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dari yang semula Rp0,00 menjadi Rp47.841.000,00. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada TA 2022 baru menganggarkan sebesar Rp135.227.076,00 yang diperuntukan untuk belanja pemeliharaan sistem jaringan perangkat aplikasi SIAK di seluruh kantor Kecamatan dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penyebab utama kenaikan Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp570.600.000,00 atau 2.417,80% adalah adanya penganggaran pada TA 2022 untuk pelaksanaan diklat PIM 3 sebanyak 40 peserta oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp281.900.000,00 dan untuk Pelatihan



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kepemimpinan Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp148.500.000,00.

Kenaikan belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp7.890.731.500,00 atau 1.199,95% disebabkan oleh kenaikan pada Dinas Pendidikan dari Rp7.740.000,00 pada tahun 2021 menjadi Rp7.567.702.450,00 pada tahun 2022. Kenaikan ini dikarenakan pengeluaran pembiayaan untuk transportasi darat (bus sekolah) yang sudah beroperasi sesuai hari efektif belajar secara tatap muka (*offline*), dibanding tahun 2021 dimana proses belajar mengajar melalui daring (*online*).

Kenaikan Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebesar Rp2.454.538.000,00 atau 521,81% disebabkan oleh kenaikan pada dinas Sekretariat Daerah sebesar Rp1.390.500.000,00, gencarnya program pemerintah tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp544.350.000,00, dan adanya penambahan kegiatan Fasilitas Bantuan Ekonomi Masyarakat pada Dinas Sosial sebesar Rp204.600.000,00.

7.5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi TA 2022 merupakan bantuan subsidi bunga 0% untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada PD. BPR Bintan. Anggaran dan realisasi Belanja Subsidi TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi
 Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1.900.000.000,00	1.690.823.167,00	88,99	(209.176.833,00)	0,00	100,00
		1.900.000.000,00	1.690.823.167,00	88,99	(209.176.833,00)	0,00	100,00

Realisasi Belanja Subsidi TA 2022 sebesar Rp1.690.823.167,00 atau sebesar 88,99% dari anggaran sebesar Rp1.900.000.000,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yaitu sebesar Rp1.690.823.167,00.

Adapun belanja Subsidi per jenis belanja adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi Per Jenis Belanja
 Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.900.000.000,00	1.690.823.167,00	88,99	(209.176.833,00)	0,00	100,00
		1.900.000.000,00	1.690.823.167,00	88,99	(209.176.833,00)	0,00	100,00

7.5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2022 merupakan hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta. Anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
 Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	5.248.056.225,00	5.218.906.842,00	99,44	(29.149.383,00)	5.329.856.645,00	(2,08)
2	Dinas Kesehatan	269.076.000,00	268.999.600,00	99,97	(76.400,00)	300.000.000,00	(10,33)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	864.000.000,00	443.073.824,00	51,28	(420.926.176,00)	3.119.943.490,00	(85,80)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.730.130.926,00	4.581.656.865,00	96,86	(148.474.061,00)	4.876.962.871,00	(6,06)
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	747.381.613,00	747.381.613,00	100,00	0,00	747.381.613,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.295.560.000,00	1.295.560.000,00	100,00	0,00	2.000.000.000,00	(35,22)
7	Dinas Sosial	104.715.125,00	103.645.140,00	98,98	(1.069.985,00)	145.213.400,00	(28,63)
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.162.104.902,00	1.914.393.783,00	88,54	(247.711.119,00)	2.832.510.123,00	(32,41)
9	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	64.680.000,00	(100,00)
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	12.398.961.545,00	12.134.642.200,00	97,87	(264.319.345,00)	5.177.988.730,00	134,35
11	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	8.635.000.000,00	8.305.961.600,00	96,19	(329.038.400,00)	1.378.233.000,00	502,65
12	Dinas Perikanan	8.524.932.724,00	8.380.493.409,00	98,31	(144.439.315,00)	13.752.373.446,00	(39,06)
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	466.442.000,00	465.234.450,00	99,74	(1.207.550,00)	99.341.000,00	368,32
14	Sekretariat Daerah	4.155.000.000,00	3.599.115.344,00	86,62	(555.884.656,00)	2.739.832.150,00	31,36
15	Kecamatan Bintan Utara	595.994.067,00	595.126.167,00	99,85	(867.900,00)	613.228.000,00	(2,95)
16	Kecamatan Bintan Pesisir	175.000.000,00	174.769.500,00	99,87	(230.500,00)	0,00	100,00
17	Kecamatan Tambelan	162.687.000,00	161.809.140,00	99,46	(877.860,00)	0,00	100,00
18	Kecamatan Mantang	98.955.000,00	98.878.800,00	99,92	(76.200,00)	0,00	100,00
19	Kecamatan Toapaya	75.039.261,00	74.983.608,00	99,93	(55.653,00)	0,00	100,00
20	Kecamatan Teluk Sebong	70.000.000,00	69.359.460,00	99,08	(640.540,00)	0,00	100,00
21	Kecamatan Teluk Bintan	296.370.000,00	295.126.800,00	99,58	(1.243.200,00)	396.008.500,00	(25,47)
22	Kecamatan Gunung Kijang	220.500.000,00	74.281.200,00	33,69	(146.218.800,00)	550.067.760,00	(86,50)
23	Kecamatan Bintan Timur	1.065.000.000,00	617.647.090,00	58,00	(447.352.910,00)	426.948.500,00	44,67
24	Kecamatan Seri Kuala Lobam	198.750.000,00	198.401.400,00	99,82	(348.600,00)	0,00	100,00
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.359.749.998,00	1.231.800.000,00	90,59	(127.949.998,00)	1.010.420.000,00	21,91
	Jumlah	53.919.406.386,00	51.051.247.835,00	94,68	(2.868.158.551,00)	45.560.989.228,00	12,05

Realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp51.051.247.835,00 atau sebesar 94,68% dari anggaran sebesar Rp53.919.406.386,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yaitu sebesar Rp5.490.258.607,00 atau 12,05%.

Adapun belanja hibah per jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Perjenis Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.295.560.000,00	1.295.560.000,00	100,00	0,00	5.082.843.490,00	(74,51)
2	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.742.855.955,00	9.401.234.461,00	96,49	(341.621.494,00)	1.692.716.400,00	455,39
3	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.059.034.076,00	6.453.176.719,00	91,42	(605.857.357,00)	5.226.658.795,00	23,47
4	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suksrela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	32.862.322.593,00	30.966.644.445,00	94,23	(1.895.678.148,00)	32.590.188.930,00	(4,98)
5	Belanja Hibah Kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00	221.200.000,00	(100,00)
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.212.252.149,00	2.187.250.597,00	98,87	(25.001.552,00)	0,00	100,00
7	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	747.381.613,00	747.381.613,00	100,00	0,00	747.381.613,00	0,00
	Jumlah	53.919.406.386,00	51.051.247.835,00	94,68	(2.868.158.551,00)	45.560.989.228,00	12,05

Realisasi Belanja Hibah Perjenis Belanja TA 2022 sebesar Rp51.051.247.835,00 atau sebesar 94,68% dari anggaran sebesar Rp53.919.406.386,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp5.490.258.607,00 atau 12,05%.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 7.5.41 Anggaran dan Realisasi Hibah Kepada Pemerintah Pusat
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Satpol PP	Polres Bintan	1.295.560.000,00	1.295.560.000,00	100,00	0,00	2.000.000.000,00	(35,22)
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	TMMD di Kec. Toapaya	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	(100,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Polres Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.943.490,00	(100,00)
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kodim 0315/Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	412.900.000,00	(100,00)
Jumlah			1.295.560.000,00	1.295.560.000,00	100,00	0,00	5.082.843.490,00	(74,51)

Hibah kepada Kepala Pemerintah Pusat TA 2022 sebesar Rp1.295.560.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.295.560.000.000,00. Belanja tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp3.787.283.490,00 atau 74,51%.

**Tabel 7.5.42 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	SD Gracia	124.816.000,00	124.815.000,00	100,00	(1.000,00)	0,00	100,00
2	Dinas Pendidikan	SD Islam Al Hasanah	124.816.000,00	124.815.000,00	100,00	(1.000,00)	0,00	100,00
3	Dinas Pendidikan	SDIT Bahtera Insani	124.816.000,00	124.815.000,00	100,00	(1.000,00)	0,00	100,00
4	Dinas Pendidikan	SDIT Syiar Harmoni Bintan	124.816.000,00	124.815.000,00	100,00	(1.000,00)	0,00	100,00
5	Dinas Pendidikan	SD Surya Kemuliaan	124.816.000,00	124.815.000,00	100,00	(1.000,00)	0,00	100,00
6	Dinas Pendidikan	SD Tunas Bangsa	124.816.000,00	124.815.000,00	100,00	(1.000,00)	0,00	100,00
7	Dinas Pendidikan	SD Kristen Calisa	124.816.000,00	124.815.000,00	100,00	(1.000,00)	0,00	100,00
8	Dinas Kesehatan	PMI Kabupaten Bintan	269.076.000,00	268.999.600,00	99,97	(76.400,00)	0,00	100,00
9	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Hibah Kepada TNI AU Raja Haji Fisabilillah	400.067.955,00	386.619.761,00	96,64	(13.448.194,00)	0,00	100,00
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	Hibah kepada KONI	7.400.000.000,00	7.084.028.000,00	95,73	(315.972.000,00)	600.000.000	1.080,67
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	Hibah Kepada Pramuka	800.000.000,00	787.882.100,00	98,49	(12.117.900,00)	600.000.000	31,31
12	Kec. Gunung Kijang	Hibah Kepada Karang Taruna	0,00	0,00	0,00	0,00	134.244.000	(100,00)
13	Kec. Gunung Kijang	Hibah Kepada Yayasan Al-Furqon	0,00	0,00	0,00	0,00	179.190.000	(100,00)
14	Kec. Gunung Kijang	Hibah Kepada PKK Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	179.282.400	(100,00)
Jumlah			9.742.855.955,00	9.401.234.461,00	96,49	(341.621.494,00)	1.692.716.400,00	455,39

Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2022 sebesar Rp9.401.234.461,00 atau sebesar 96,49% dari anggaran sebesar Rp9.742.855.955,00. Belanja tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yaitu sebesar Rp7.708.518.061,00 atau 455,39%.

Tabel 7.5.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	TPQ ANNURIYAH	2.162.092.076,00	36.946.740,00	1,71	(4.140.831,00)	0,00	100,00
2	Dinas Pendidikan	SPS Anggur		51.139.318,00	2,37		0,00	100,00
3	Dinas Pendidikan	SMP AL Ihsan		188.472.558,00	8,72		0,00	100,00
4	Dinas Pendidikan	KB AL Hasanah		69.100.550,00	3,20		0,00	100,00
5	Dinas Pendidikan	(Pembangunan Pagar KB		59.436.060,00	2,75		0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
		TUNAS MUDA)						
6	Dinas Pendidikan	(Pembangunan Paving KB TUNAS MUDA)		59.655.960,00	2,76		0,00	100,00
7	Dinas Pendidikan	RA Fastabiqul khairat		55.209.465,00	2,55		0,00	100,00
8	Dinas Pendidikan	TPQ Asyamsiyah		62.288.838,00	2,88		0,00	100,00
9	Dinas Pendidikan	TK YKPP		61.254.820,00	2,83		0,00	100,00
10	Dinas Pendidikan	K MUHAMMADIYAH		61.170.504,00	2,83		0,00	100,00
11	Dinas Pendidikan	MTs Tambelan dan SMP AL-IHSAN BINTAN		299.400.000,00	13,85		0,00	100,00
22	Dinas Pendidikan	Pengadaan Seragam Drumband		31.547.000,00	1,46		0,00	100,00
23	Dinas Pendidikan	Pengadaan Leptop		98.628.000,00	4,56		0,00	100,00
24	Dinas Pendidikan	(MTs Negeri Bintan		46.298.100,00	2,14		0,00	100,00
25	Dinas Pendidikan	MTs Miftahul Ulum		46.543.000,00	2,15		0,00	100,00
26	Dinas Pendidikan	Mts Negeri Bintan		93.183.000,00	4,31		0,00	100,00
27	Dinas Pendidikan	SMP AL-AZHAR 34 BINTAN		228.425.500,00	10,57		0,00	100,00
28	Dinas Pendidikan	SDIT AAN NAHL		132.796.158,00	6,14		0,00	100,00
29	Dinas Pendidikan	SDIT Syiar Harmoni		184.679.201,00	8,54		0,00	100,00
30	Dinas Pendidikan	MIS AN NUR KIJANG		118.225.895,00	5,47		0,00	100,00
31	Dinas Pendidikan	KB Annida		173.550.578,00	8,03		0,00	100,00
32	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Hibah kepada Ikatan Keluarga Minang Saiyo	163.200.000,00	163.053.000,00	99,91	(147.000,00)	0,00	100,00
33	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Hibah Kepada Yayasan Bahtera Insani	244.800.000,00	237.737.180,00	97,11	(7.062.820,00)	0,00	100,00
34	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Hibah Kepada Sanggar Bintan Penao	75.000.000,00	74.453.250,00	99,27	(546.750,00)		100,00
35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Hibah Kepada Sanggar Turonggo Mas	75.000.000,00	74.958.300,00	99,94	(41.700,00)	0,00	100,00
36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Hibah Kepada LAM Kecamatan Tambelan	126.442.000,00	125.918.400,00	99,59	(523.600,00)	0,00	100,00
37	Sekretariat Daerah	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	1.450.000.000,00	1.447.195.020,00	99,81	(2.804.980,00)	1.388.532.150	4,22
38	Sekretariat Daerah	BAZNAS Kab. Bintan	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	0,00	200.000.000	(10,00)
39	Sekretariat Daerah	FKUB Kab. Bintan	100.000.000,00	99.256.000,00	99,26	(744.000,00)	200.000.000	(50,37)
40	Sekretariat Daerah	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Bintan	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00	0,00	200.000.000	(20,00)
41	Sekretariat Daerah	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kab.Bintan	100.000.000,00	91.491.000,00	91,49	(8.509.000,00)	0,00	100,00
42	Sekretariat Daerah	Ketua PC. NU Kab. Bintan	150.000.000,00	148.410.324,00	98,94	(1.589.676,00)	0,00	100,00
43	Sekretariat Daerah	Ketua PC. NU Kab. Bintan	400.000.000,00	397.763.000,00	99,44	(2.237.000,00)	0,00	100,00
44	Sekretariat Daerah	Ketua Masjid Al Madad	50.000.000,00	35.000.000,00	70,00	(15.000.000,00)	0,00	100,00
45	Sekretariat Daerah	Ketua Masjid Fastabiqul Khoirat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
46	Sekretariat Daerah	Ketua Masjid At-Taqwa	50.000.000,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00
47	Sekretariat Daerah	Ketua Masjid Jami' Mentigi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
48	Sekretariat Daerah	Ketua Musholla Al-Hidayah	75.000.000,00	0,00	0,00	(75.000.000,00)	0,00	0,00
49	Sekretariat Daerah	Pimpinan Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
50	Sekretariat Daerah	Pimpinan Pondok Pesantren Raja Haji Umar	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
51	Sekretariat Daerah	Ketua TPQ Al Husna	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
52	Sekretariat Daerah	Masjid Mantang Sidi	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
53	Sekretariat Daerah	Masjid Nurul Huda	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
54	Sekretariat Daerah	Pesantren Karang Rejo	400.000.000,00	0,00	0,00	(400.000.000,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
55	Kec. Bintan Timur	PAUD Permata Ibu	57.500.000,00	19.990.000,00	34,77	(37.510.000,00)	0,00	100,00
56	Dinas Kesehatan	PMI Kabupaten Bintan	0,00	0,00			300.000.000	(100,00)
57	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	TK Ceria	0,00	0,00	0,00	0,00	68.470.000	(100,00)
58	Sekretariat Daerah	Badan Kontak Majelis Taklim Kab. Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000	(100,00)
59	Sekretariat Daerah	Surau Al Ikhlas	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000	(100,00)
60	Sekretariat Daerah	Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000	(100,00)
61	Sekretariat Daerah	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Khatolik (LP3D) Kabupaten Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000	(100,00)
62	Sekretariat Daerah	Dewan Masjid Indonesia Kab. Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000	(100,00)
63	Sekretariat Daerah	Masjid Darussalam	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000	(100,00)
64	Sekretariat Daerah	Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000	(100,00)
65	Sekretariat Daerah	Masjid Baitur Rahman	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300.000	(100,00)
66	Sekretariat Daerah	Musholla Al-Hidayah	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000	(100,00)
67	Dinas Pendidikan	SDIT AN NAHL	0,00	0,00	0,00	0,00	62.865.000,00	(100,00)
68	Dinas Pendidikan	SDIT BAHTERA INSANI	0,00	0,00	0,00	0,00	88.011.000,00	(100,00)
69	Dinas Pendidikan	MIS Miftahul Ulum	0,00	0,00	0,00	0,00	58.630.000,00	(100,00)
70	Dinas Pendidikan	MTsN BINTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	18.645.000,00	(100,00)
71	Dinas Pendidikan	PAUD Gita Ceria	0,00	0,00	0,00	0,00	16.236.000,00	(100,00)
72	Dinas Pendidikan	PAUD Langgeng	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118.000,00	(100,00)
73	Dinas Pendidikan	PAUD Sabda Betuah	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118.000,00	(100,00)
74	Dinas Pendidikan	PAUD Mawar Asri	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118.000,00	(100,00)
75	Dinas Pendidikan	PAUD Nusa Indah	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118.000,00	(100,00)
76	Dinas Pendidikan	KB Kasih Bunda	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118.000,00	(100,00)
77	Dinas Pendidikan	TK Terumbu Karang	0,00	0,00	0,00	0,00	157.779.274,00	(100,00)
78	Dinas Pendidikan	KB Al Fathul Ilmi	0,00	0,00	0,00	0,00	50.816.451,00	(100,00)
79	Dinas Pendidikan	TK YKPP	0,00	0,00	0,00	0,00	50.783.911,00	(100,00)
80	Dinas Pendidikan	KB Kasih	0,00	0,00	0,00	0,00	36.956.428,00	(100,00)
81	Dinas Pendidikan	PAUD Tirta Dharma	0,00	0,00	0,00	0,00	117.533.324,00	(100,00)
82	Dinas Pendidikan	PAUD Sri Kemuning	0,00	0,00	0,00	0,00	127.270.000,00	(100,00)
83	Dinas Pendidikan	PAUD Tunas Sahabat	0,00	0,00	0,00	0,00	133.650.000,00	(100,00)
84	Dinas Pendidikan	KB Kasih	0,00	0,00	0,00	0,00	20.620.000,00	(100,00)
85	Dinas Pendidikan	TK Muhammadiyah	0,00	0,00	0,00	0,00	20.570.689,00	(100,00)
86	Dinas Pendidikan	TK Sinar Bahagia	0,00	0,00	0,00	0,00	34.611.397,00	(100,00)
87	Dinas Pendidikan	TK Bahrul Ulum	0,00	0,00	0,00	0,00	173.147.158,00	(100,00)
88	Dinas Pendidikan	PAUD Darul Mutaalim	0,00	0,00	0,00	0,00	177.048.703,00	(100,00)
89	Dinas Pendidikan	TK Amalya	0,00	0,00	0,00	0,00	50.046.559,00	(100,00)
90	Dinas Pendidikan	PAUD Teratai	0,00	0,00	0,00	0,00	42.331.000,00	(100,00)
91	Dinas Pendidikan	TK Nusantara	0,00	0,00	0,00	0,00	42.331.000,00	(100,00)
92	Dinas Pendidikan	PAUD Sri Kemuning	0,00	0,00	0,00	0,00	23.083.751,00	(100,00)
93	Dinas Pendidikan	PGRI	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	(100,00)
94	Dinas Pendidikan	IGTKI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	(100,00)
95	Kec. Bintan Timur	Surau Baiturrahman	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800.000	(100,00)
Jumlah			7.059.034.076,00	6.453.176.719,00	91,42	(605.857.357,00)	5.226.658.795,00	23,47

Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2022 sebesar Rp6.453.176.719,00 atau sebesar 91,42% dari anggaran sebesar Rp7.059.034.076,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yaitu sebesar Rp1.226.517.924,00 atau 23,47%.

Tabel 7.5.44 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang dan Pertanahan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kawasan Perdesaan Desa Malang Rapat	212.000.000,00	198.339.210,00	93,56	(13.660.790,00)	0,00	100,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang dan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kawasan Perdesaan	74.000.000,00	73.056.267,00	98,72	(943.733,00)	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
	Pertanahan	Desa Mantang Besar						
3	Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang dan Pertanahan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kawasan Perdesaan Desa Numbing	178.000.000,00	171.678.347,00	96,45	(6.321.653,00)	0,00	100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang dan Pertanahan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kawasan Perdesaan Desa Ekang Anculai	400.000.000,00	0,00	0,00	(400.000.000,0)	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pengurus Masjid Al Kautsar	115.056.000,00	114.999.000,00	99,95	(57.000,00)	0,00	100,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pengurus Masjid Miftahul Iman	99.008.000,00	98.837.000,00	99,83	(171.000,00)	0,00	100,00
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pengurus Masjid Munawarah	114.240.000,00	114.120.000,00	99,89	(120.000,00)	0,00	100,00
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pengurus Surau Nurul Huda	75.888.000,00	75.692.000,00	99,74	(196.000,00)	0,00	100,00
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pengurus Surau Baitul Huda	116.688.000,00	116.534.000,00	99,87	(154.000,00)	0,00	100,00
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pengurus TPQ Al Hikmah	116.688.000,00	116.478.000,00	99,82	(210.000,00)	0,00	100,00
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pengurus Masjid AL Madad	146.880.000,00	146.377.000,00	99,66	(503.000,00)	0,00	100,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pengurus Masjid At Taqwa	59.840.000,00	59.613.000,00	99,62	(227.000,00)	0,00	100,00
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pengurus Surau Al Falah	75.888.000,00	75.755.000,00	99,82	(133.000,00)	0,00	100,00
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Yayasan Buluang Sejahtera	115.651.503,00	115.600.000,00	99,96	(51.503,00)	0,00	100,00
15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Yayasan Darussalam Syafaat Bintan	152.048.000,00	151.098.000,00	99,38	(950.000,00)	0,00	100,00
16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pengurus Masjid Al Hikmah	77.792.000,00	76.570.000,00	98,43	(1.222.000,00)	0,00	100,00
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pengurus Masjid Darul Iman	69.585.026,00	69.430.000,00	99,78	(155.026,00)	0,00	100,00
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pengurus Masjid Mubalighin	115.690.442,00	115.569.000,00	99,90	(121.442,00)	0,00	100,00
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pengurus TPQ Al Madinah	114.240.000,00	113.025.000,00	98,94	(1.215.000,00)	0,00	100,00
20	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pengurus TPQ Al Baroqah	136.000.000,00	135.976.000,00	99,98	(24.000,00)	0,00	100,00
21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pesantren Mambaus Sholihin	152.320.000,00	152.283.000,00	99,98	(37.000,00)	0,00	100,00
22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Yayasan Al Amin Bintan	58.752.000,00	58.702.000,00	99,91	(50.000,00)	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
	Pemukiman							
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Yayasan Pendidikan Islam Al Ihsan Bintan	155.584.000,00	155.345.000,00	99,85	(239.000,00)	0,00	100,00
24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pengurus TPQ Darussalam	136.000.000,00	135.880.000,00	99,91	(120.000,00)	0,00	100,00
25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pengurus TPQ Al Ikhlas	136.000.000,00	135.887.000,00	99,92	(113.000,00)	0,00	100,00
26	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pengurus Masjid Nurul Huda	1.037.952.000,00	917.935.700,00	88,44	(120.016.300,00)	0,00	100,00
27	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pengurus Masjid Al Jihad	85.680.000,00	85.476.000,00	99,76	(204.000,00)	0,00	100,00
28	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dewan Kemakmuran Masjid Jami'ul Nurul Ikhlan	41.616.000,00	41.565.000,00	99,88	(51.000,00)	0,00	100,00
29	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pengurus Surau Pintu Hidayah	85.680.000,00	85.602.000,00	99,91	(78.000,00)	0,00	100,00
30	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dewan Kemakmuran Masjid Sholatul Muslimin RT.03 RW.02 Pulau Pucung	176.256.000,00	175.128.000,00	99,36	(1.128.000,00)	0,00	100,00
31	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	RT.002/RW.011 Kp. Baru keke	130.560.000,00	130.434.164,00	99,90	(125.836,00)	0,00	100,00
32	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rt.002/RW.017 Kel. Kijang Kota	24.480.000,00	24.336.060,00	99,41	(143.940,00)	0,00	100,00
33	Dinas Sosial	Belanja Kursi Roda bagi Lansia dan Disabilitas Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35.321.232,00	35.298.000,00	99,93	(23.232,00)	0,00	100,00
34	Dinas Sosial	Belanja Kursi Roda Sub Keg. Layanan Kedaruratan	50.038.412,00	49.062.000,00	98,05	(976.412,00)	0,00	100,00
35	Dinas Sosial	Belanja TV LED (untuk Rumah Bahagia Bintan)Sub Keg. Layanan Kedaruratan	19.355.481,00	19.285.140,00	99,64	(70.341,00)	0,00	100,00
36	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KPIK "Batako Manggar" Kecamatan Bintan Utara	423.341.450,00	49.228.500,00	11,63	(212.950,00)	0,00	100,00
37	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Yayasan Nurul Islam Al Bintani Kecamatan Toapaya		47.500.000,00	11,22		0,00	100,00
38	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kelompok Bumbu Pulau Harapan Kecamatan Bintan Utara		13.500.000,00	3,19		0,00	100,00
39	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUBE " Ayam Daging Sayur" Kecamatan Bintan Utara		48.700.000,00	11,50		0,00	100,00
40	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUBE " Bintan Berkah Jaya" Kecamatan Gunung Kijang		30.200.000,00	7,13		0,00	100,00
41	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUBE " Putra Mandiri" Kecamatan Teluk Bintan		44.000.000,00	10,39		0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
42	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	"Bintang Pemuda Tanjung Kapur" Kecamatan Gunung Kijang		190.000.000,00	44,88		0,00	100,00
43	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Idayati" Kecamatan Bintang Timur		508.566.250,00	4,68		0,00	100,00
44	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Spesial" Kecamatan Bintang Timur		383.417.793,00	4,68		0,00	100,00
45	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Anggis Rezeki" Kecamatan Bintang Timur		360.338.149,00	3,32		0,00	100,00
46	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Try Bersaudara" Kecamatan Bintang Timur		404.420.378,00	3,72		0,00	100,00
47	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Nur" Kecamatan Bintang Timur		378.359.109,00	3,48		0,00	100,00
48	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Saputra" Kecamatan Bintang Timur		347.018.875,00	3,19		0,00	100,00
49	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Falista" Kecamatan Bintang Timur		388.668.278,00	3,58		0,00	100,00
50	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Febina" Kecamatan Bintang Timur		351.782.480,00	3,24		0,00	100,00
51	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Etek Rita" Kecamatan Bintang Timur		351.782.480,00	3,24		0,00	100,00
52	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Kurnia" Kecamatan Bintang Timur	10.861.813.325,00	336.776.568,00	3,10	(175.638.325,00)	0,00	100,00
53	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Srikandi" Kecamatan Bintang Timur		336.776.568,00	3,10		0,00	100,00
54	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Diana Rezeki" Kecamatan Bintang Timur		336.776.568,00	3,10		0,00	100,00
55	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Mak Yati" Kecamatan Bintang Timur		384.359.828,00	3,54		0,00	100,00
56	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Saji" Kecamatan Bintang Timur		380.957.629,00	3,51		0,00	100,00
57	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Roso 99" Kecamatan Bintang Timur		357.863.183,00	3,29		0,00	100,00
58	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Nayla" Kecamatan Bintang Timur		377.673.480,00	3,48		0,00	100,00
59	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Pajo Rasa" Kecamatan Bintang Timur		357.100.711,00	3,29		0,00	100,00
60	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Barokah" Kecamatan Bintang Timur		363.571.872,00	3,35		0,00	100,00
61	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Bilah" Kecamatan Bintang Timur		363.309.946,00	3,34		0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
62	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Dwi Bersaudara" Kecamatan Bintan Timur		347.018.875,00	3,19		0,00	100,00
63	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Sakera" Kecamatan Bintan Timur		374.594.660,00	3,45		0,00	100,00
64	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Bunda O'cha" Kecamatan Bintan Timur		374.594.660,00	3,45		0,00	100,00
65	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Perintis" Kecamatan Bintan Timur		374.594.660,00	3,45		0,00	100,00
66	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Pelangi" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
67	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Berkah" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
68	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Wito" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
69	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Fadilah" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
70	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Ayu" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
71	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Mak Uwo" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
72	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Petro Rezeki" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
73	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Mamah Ezy" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
74	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Abi Umi" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
75	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Murni Gurih" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
76	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Tiga Warna" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
77	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Sri Rezeki" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
78	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Adiba" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
79	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Original" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
80	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Cap Dua Tamban" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
81	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Mak Sapit" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
82	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Cik Sabar" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
83	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Seruni" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
84	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Athaya" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
85	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Mak Dinda" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
86	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "2P" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
87	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Tina" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
88	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Tamban Bintan" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
89	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Bu Sus" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
90	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Airin" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
91	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Tiaz Rezeki" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
92	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kerupuk Ikan "Nurma" Kecamatan Bintan Timur		79.476.000,00	0,73		0,00	100,00
93	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Anugerah" Kecamatan Gunung Kijang		22.550.000,00	2,02		0,00	100,00
94	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Bintan Teralis" Kecamatan Gunung Kijang		22.587.000,00	2,03		0,00	100,00
95	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Maju Jaya" Kecamatan Gunung Kijang		22.550.000,00	2,02		0,00	100,00
96	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Sahabat Jaya" Kecamatan Gunung Kijang		22.550.000,00	2,02		0,00	100,00
97	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Teralis Liko Jaya" Kecamatan Bintan Utara	1.113.806.770,00	46.257.000,00	4,15	(88.468.070,00)	0,00	100,00
98	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Aneka Rasa" Kecamatan Gunung Kijang		22.275.000,00	2,00		0,00	100,00
99	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Seroja" Kecamatan Bintan Timur		21.505.000,00	1,93		0,00	100,00
100	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Maju Bersama" Kecamatan Bintan Timur		21.605.000,00	1,94		0,00	100,00
101	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Guyup Rukun" kecamatan Seri Kuala Lobam		58.248.700,00	5,23		0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
102	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Berkah Jaya" kecamatan Teluk Bintan		19.705.000,00	1,77		0,00	100,00
103	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Pondokan Kelana" Kecamatan Teluk Bintan		21.555.000,00	1,94		0,00	100,00
104	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Bintang Timur" Kecamatan Tambelan		24.350.000,00	2,19		0,00	100,00
105	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Lestari" Kecamatan Tambelan		24.350.000,00	2,19		0,00	100,00
106	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Malahayati" Kecamatan Tambelan		24.350.000,00	2,19		0,00	100,00
107	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Bestari" Kecamatan Seri Kuala Lobam		50.249.000,00	4,51		0,00	100,00
108	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Berdikari" Kecamatan Bintan Utara		89.634.000,00	8,05		0,00	100,00
109	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Usaha Mandiri" Kecamatan Tambelan		150.000.000,00	13,47		0,00	100,00
110	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Malahayati Jaya" Kecamatan Bintan Pesisir		17.000.000,00	1,53		0,00	100,00
111	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Tenggiri Putih" Kecamatan Mantang		17.000.000,00	1,53		0,00	100,00
112	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Berkah" Kecamatan Bintan Pesisir		17.000.000,00	1,53		0,00	100,00
113	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Bangun Sejahtera" Kecamatan Gunung Kijang		22.387.000,00	2,01		0,00	100,00
114	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Muda Berkarya" Kecamatan Gunung Kijang		22.320.000,00	2,00		0,00	100,00
115	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Harmoni" Kecamatan Bintan Timur		24.600.000,00	2,21		0,00	100,00
116	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Maju Jaya" Kecamatan Gunung Kijang		18.000.000,00	1,62		0,00	100,00
117	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Jaya Mandiri" Kecamatan seri Kuala Lobam		65.511.000,00	5,88		0,00	100,00
118	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Swadaya" Kecamatan Seri Kuala Lobam		89.000.000,00	7,99		0,00	100,00
119	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Pengikik Maju" Kecamatan Tambelan		21.000.000,00	1,89		0,00	100,00
120	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Pemuda Berkarya" Kecamatan Tambelan		21.000.000,00	1,89		0,00	100,00
121	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	KUEP "Alif Mandiri" Kecamatan Tambelan		26.200.000,00	2,35		0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
122	Dinas Kepemudaan dan olah raga	Mesin Pencetak baleho	435.000.000,00	274.600.000,00	63,13	(948.500,00)	0,00	100,00
123	Dinas Kepemudaan dan olah raga	Bantuan Kewirausahaan Alat Musik Desa Kp.Melayu Kec.Tambelan		159.451.500,00	63,13		0,00	100,00
124	Dinas kebudayaan dan pariwisata	Hibah Kepada LAM Kabupaten Bintan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
125	Dinas kebudayaan dan pariwisata	Hibah Kepada Sanggar Tuah Pustaka	40.000.000,00	39.904.500,00	99,76	(95.500,00)	0,00	100,00
126	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Benih dan Pupuk	29.944.200,00	29.929.840,00	99,95	(14.360,00)	0,00	100,00
127	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Telaten Tani (Belanja Bibit Ternak Sapi Bali)	45.602.834,00	45.500.000,00	99,77	(102.834,00)	0,00	100,00
128	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Cahaya Kukup, Kelompok Tani Panen Raya, Kelompok Tani Zaitun Berkah, Kelompok Tani Osani Mantap, Kelompok Paten (Belanja Bibit Ternak Ayam Buras)	182.042.016,00	171.371.200,00	94,14	(10.670.816,00)	0,00	100,00
129	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	KWT Banjar Sari (Belanja Bibit Ternak Itik)	15.275.000,00	15.174.500,00	99,34	(100.500,00)	0,00	100,00
130	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Zaitun Berkah, Kelompok Tani Cahaya Kukup, Kelompok Tani Osani Mantap, KWT Banjar Sari, Kelompok Paten, Pakan Ternak Unggas (Belanja Pakan Ternak Unggas)	65.212.984,00	30.016.000,00	46,03	(35.196.984,00)	0,00	100,00
131	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Panen Raya (Belanja Jagung Giling)	33.174.000,00	29.672.300,00	89,44	(3.501.700,00)	0,00	100,00
132	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Bintan Hijau (Bibit Kelapa Genjah)	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
133	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Bintan Hijau (Pupuk NPK)	15.000.000,00	14.985.000,00	99,90	(15.000,00)	0,00	100,00
134	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Tunas Muda (Belanja Benih)	8.696.037,00	7.824.300,00	89,98	(871.737,00)	0,00	100,00
135	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Tunas Muda (Belanja Pupuk KCL)	12.765.000,00	12.515.250,00	98,04	(249.750,00)	0,00	100,00
136	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Tunas Muda (Belanja TSP/SP36)	13.320.000,00	12.515.250,00	93,96	(804.750,00)	0,00	100,00
137	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Tunas Muda (Pupuk Urea)	12.210.000,00	10.517.250,00	86,14	(1.692.750,00)	0,00	100,00
138	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Panen Raya (Pupuk Organik)	99.900.000,00	75.900.000,00	75,98	(24.000.000,00)	0,00	100,00
139	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Panen Raya (Pupuk NPK)	63.270.000,00	52.820.000,00	83,48	(10.450.000,00)	0,00	100,00
140	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Panen Raya (Belanja Kendaraan Angkutan) Isuzu Pick Up Box	265.776.103,00	243.600.000,00	91,66	(22.176.103,00)	0,00	100,00
141	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	KWT Pisang (Belanja Mesin Robin)	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
142	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	KWT Pisang (Belanja Benih)	6.633.000,00	5.642.241,00	85,06	(990.759,00)	0,00	100,00
143	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	KWT Pisang (Belanja Perlengkapan Pertanian)	29.941.241,00	27.710.817,00	92,55	(2.230.424,00)	0,00	100,00
144	Dinas Ketahanan Pangan dan	Kelompok Tani Panen Raya (Belanja Pembenh	33.000.000,00	32.467.500,00	98,39	(532.500,00)	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
	Pertanian	Tanah/ Dolomit)						
145	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Barokah, (Belanja Benih Durian)	138.000.060,00	137.082.000,00	99,33	(918.060,00)	0,00	100,00
146	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Jaya Baru, Kelompok Tani Sido Mekar, Belanja Obat-obatan	48.826.572,00	48.804.458,00	99,95	(22.114,00)	0,00	100,00
147	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Wanita Tani Pisang (Belanja Pupuk Kandang)	10.500.000,00	10.372.950,00	98,79	(127.050,00)	0,00	100,00
148	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Wanita Tani Pisang (Belanja Pupuk NPK 15:9:20)	23.310.000,00	18.200.000,00	78,08	(5.110.000,00)	0,00	100,00
149	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Poyotomo Makmur (Belanja Pupuk Kandang)	4.327.520,00	4.305.379,00	99,49	(22.141,00)	0,00	100,00
150	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Pupuk NPK (Kelompok Tani Poyotomo Makmur)	30.000.000,00	27.800.000,00	92,67	(2.200.000,00)	0,00	100,00
151	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Subur Makmur (Belanja Hand Traktor)	45.492.700,00	44.021.200,00	96,77	(1.471.500,00)	0,00	100,00
152	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Usaha Tani, Kelompok Tani Tani Mandiri, Kelompok Tani Barokah, Kelompok Tani Maju Bersama., Kelompok Tani Bringin Jaya, Kelompok Tani Panen Raya, (Belanja Cultivator)	177.600.000,00	128.260.000,00	72,22	(49.340.000,00)	0,00	100,00
153	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Beringin Jaya dan KT Panen Raya (Belanja Pupuk KCL)	96.528.930,00	94.640.321,00	98,04	(1.888.609,00)	0,00	100,00
154	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Pupuk TSP (Kelompok Tani Beringin Jaya dan KT Panen Raya)	46.540.080,00	43.728.284,00	93,96	(2.811.796,00)	0,00	100,00
155	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Pupuk Urea (Kelompok Tani Beringin Jaya dan KT Panen Raya)	45.054.900,00	38.808.653,00	86,14	(6.246.247,00)	0,00	100,00
156	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Pupuk Kandang (KT Maju Jaya, KT Makmur, KT Makmur, KT Waras)	118.908.195,00	107.696.851,00	90,57	(11.211.344,00)	0,00	100,00
157	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Pupuk NPK 16 16 Mutiara	318.348.000,00	265.768.000,00	83,48	(52.580.000,00)	0,00	100,00
158	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	KWT ALAMANDA, KWT NOSARI INDAH, KWT ROSELA, DASAWISMA ANGGREK (Belanja Benih)	88.055.528,00	87.894.240,00	99,82	(161.288,00)	0,00	100,00
159	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan Jaring Apollo Lengkap Untuk Nelayan Mantang dan Teluk Bintan, 1. Kelompok Rajungan Batik, 2. Kelompok Sri Jaya	199.555.800,00	199.094.218,00	99,77	(461.582,00)	0,00	100,00
160	Dinas Perikanan	Pengadaan Jaring Ketam untuk Nelayan Gunung Kijang, Teluk Sebong dan Teluk Bintan, 1. Kelompok Bahtera Taruna, 2. Kelompok Muda Mudi Nelayan, 3. Kelompok Ikan Selangkat, 4. Kelompok Udang Merah	165.839.769,00	165.207.405,00	99,62	(632.364,00)	0,00	100,00
161	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan (Bahan Jaring Ikan Bilis) utuk Nelayan Bintan Pesisir, 1. Kelompok Nelayan Maju	190.000.000,00	189.151.770,00	99,58	(791.430,00)	0,00	100,00
162	Dinas Perikanan	Pengadaan Bahan Jaring kelong Pantai (Waring	70.547.190,00	70.007.700,00	99,41	(414.752,00)	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
		PE) untuk Nelayan Bintan Utara, 1. Kelompok Maju Bersama						
163	Dinas Perikanan	Pengadaan Panel Solar Cell 50 WPS untuk Nelayan Tambelan, 1. Kelompok Sri Tambelan	94.817.654,00	94.422.150,00	99,58	(395.504,00)	0,00	100,00
164	Dinas Perikanan	Pengadaan Accu Basah 12 Volt, 50 Ah untuk Nelayan Tambelan, 1. Kelompok Tambelan Biru	195.604.200,00	195.004.800,00	99,69	(599.400,00)	0,00	100,00
165	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan (Bubu Ketam/Rajungan Oval) untuk Nelayan Kec. Gunung Kijang, Mantang, Bintan Utara, Sri Kuala Lobam, Teluk Bintan dan Teluk Sebung, 1. Kelompok Kertang Mantang, 2. Kelompok Delah Kawal, 3. Kelompok Nelayan Mandiri, 4. Kelompok Tenggara, 5. Kelompok Selar, 6. Kelompok Rajungan Batik, 7. Kelompok Sri Jaya, 8. Kelompok Nelayan Jaya, 9. Kelompok Sentigi	199.920.000,00	198.920.400,00	99,50	(999.600,00)	0,00	100,00
166	Dinas Perikanan	Pengadaan Tali Rumpon 12 mm untuk Nelayan Kec. Tambelan dan Mantang, 1. Kelompok Elang Perbatasan, 2. Kelompok Rajungan Batik	140.755.992,00	139.296.120,00	99,01	(1.399.044,00)	0,00	100,00
167	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan (Jaring Ikan) untuk Nelayan Bintan Pesisir, Mantang dan Teluk Sebung, 1. Kelompok Karang Malibun, 2. Kelompok Selar Dendun, 3. Kelompok Ranga Mapur, 4. Kelompok Lambai Karang	134.000.000,00	132.594.384,00	98,95	(1.405.482,00)	0,00	100,00
168	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan (Jaring Udang Lengkap) untuk Nelayan Kec. Teluk Bintan, 1. Kelompok Tamban Pangkil	187.701.000,00	185.790.912,00	98,98	(1.909.200,00)	0,00	100,00
169	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan (Jaring Ikan Bilis) untuk Kelompok Nelayan Pangkil Kec. Teluk Bintan, 1. Kelompok Pangkil Bahari Gemilang	190.000.000,00	189.457.748,00	99,72	(539.762,00)	0,00	100,00
170	Dinas Perikanan	Pengadaan Fishfinder untuk Nelayan Kecamatan Tambelan, 1. Kelompok Kute Tambelan	193.825.980,00	193.140.000,00	99,65	(685.314,00)	0,00	100,00
171	Dinas Perikanan	Pengadaan KAWAT BUBU 100 FT untuk Nelayan Kec. Bintan Utara dan Sri Kuala Lobam, 1. Kelompok Kerapu Mentigi, 2. Kelompok Lebam, 3. Kelompok Rinyau, 4. Kelompok Mutiara Nelayan Bintan	258.000.000,00	256.194.000,00	99,90	(258.000,00)	0,00	100,00
172	Dinas Perikanan	Pengadaa JARING UDANG tidak Lengkap untuk Nelayan Kec. Sri Kuala Lobam, Mantang dan Teluk Bintan, 1. Kelompok Ikan Layang,	462.750.000,00	459.048.000,00	99,20	(3.702.000,00)	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
		2. Kelompok Rajungan Batik, 3. Kelompok Sotong Karang, 4. Kelompok Kuda Laut, 5. Kelompok Cahaya Pangkil, 6. Kelompok Nelayan Camar						
173	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Patin, Ikan Lele dan Pakan utk Pokdakan Bumi Indah (Toapaya)	186.780.000,00	184.920.000,00	99,00	(1.860.000,00)	0,00	100,00
174	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Bawal Air Tawar dan Pakan utk Pokdakan Jaya Bersama dan Pokdakan Lele Sangkuriang	192.980.000,00	192.010.000,00	99,50	(970.000,00)	0,00	100,00
175	Dinas Perikanan	Pengadaan Indukan Ikan Hias Air Tawar utk Pokdakan Mata Air	45.000.000,00	44.955.000,00	99,90	(45.000,00)	0,00	100,00
176	Dinas Perikanan	Pengadaan Paket Percontohan Budidaya Ikan di Kolam utk Pokdakan Jaya Selalu (SKL)	191.060.000,00	189.900.000,00	99,39	(1.160.000,00)	0,00	100,00
177	Dinas Perikanan	Pengadaan Paket Benih dan Pakan untuk Ikan Air Tawar utk Pokdakan Lapaloma dan Pokdakan Cipta Mandiri	87.680.000,00	86.340.000,00	98,47	(1.340.000,00)	0,00	100,00
178	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Air Tawar, Pakan dan Vitamin utk Pokdakan Serumpun Bertuah (Teluk Bintan)	138.800.000,00	138.120.000,00	99,51	(680.000,00)	0,00	100,00
179	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Koi, Ikan Nila dan Pakan utk Pokdakan Beringin Jaya Sejahtera (Bintim)	90.460.000,00	89.560.000,00	99,01	(900.000,00)	0,00	100,00
180	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Nila dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Tuah Bintan (Tik Sebung)	89.660.000,00	89.295.000,00	99,59	(365.000,00)	0,00	100,00
181	Dinas Perikanan	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Air Tawar utk Pokdakan Maju Bersama (Bintim)	108.640.000,00	107.440.000,00	98,90	(1.200.000,00)	0,00	100,00
182	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Lele Putih dan Pokdakan Muda Berkarya	83.676.000,00	83.298.000,00	99,55	(378.000,00)	0,00	100,00
183	Dinas Perikanan	Pengadaan Pakan Buatan untuk Budidaya Ikan Air Tawar utk Pokdakan Wira Tirta Sejahtera	264.000.000,00	260.000.000,00	98,48	(4.000.000,00)	0,00	100,00
184	Dinas Perikanan	Pengadaan Pakan Buatan untuk Budidaya Ikan Air Tawar utk Pokdakan Nila Jaya Pokdakan Kawal Jaya, Pokdakan Kawal Jaya, Pokdakan Wisata Bahari Kawal (Gn Kjg), Pokdakan Sartuni Sukses (Binut), Pokdakan Kolam Milineal, Pokdakan Wira Tirta Sejahtera, Pokdakan Maju Bersama (Toapaya)	193.510.000,00	191.220.000,00	98,82	(2.290.000,00)	0,00	100,00
185	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Kerapu Cantang utk Pokdakan Yayasan Peduli Bintan (Salju Hangat, Tik Sbg) dan Pokdakan Kelong Mandiri (Binpes)	301.600.000,00	272.600.000,00	90,38	(29.000.000,00)	0,00	100,00
186	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Air Tawar utk Pokdakan	445.154.000,00	433.440.000,00	97,37	(11.714.000,00)	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
		Nila Jaya Pokdakan Kawal Jaya, Pokdakan Kawal Jaya, Pokdakan Wisata Bahari Kawal (Gn Kjg), Pokdakan Sartuni Sukses (Binut), Pokdakan Kolam Milineal, Pokdakan Wira Tirta Sejahtera, Pokdakan Maju Bersama (Toapaya)						
187	Dinas Perikanan	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Air Laut utk Nelayan Abadi Jaya dan Pokdakan Harapan Pangkil Bintan	43.200.000,00	40.446.000,00	93,63	(2.754.000,00)	0,00	100,00
188	Dinas Perikanan	Pengadaan Paket Budidaya Ikan Air Laut utk Nelayan Abadi Jaya dan Pokdakan Harapan Pangkil Bintan	163.800.000,00	141.120.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
189	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Gamat utk Pokdakan Cahaya Belakang Sidi (Mantang)	162.500.000,00	161.200.000,00	99,20	(1.300.000,00)	0,00	100,00
190	Dinas Perikanan	Pengadaan Kolam Bulat Terpal Bioflok Fullset utk Pokdakan Semangat Kita dan Pokdakan Sumber Berkah	138.600.000,00	137.569.959,00	99,26	(1.030.041,00)	0,00	100,00
191	Dinas Perikanan	Pengadaan Jaring untuk Budidaya Ikan Air Tawar utk Pokdakan Kawal Jaya	46.200.000,00	46.195.980,00	99,99	(4.020,00)	0,00	100,00
192	Dinas Perikanan	Pengadaan Keramba Jaring Apung HDPE utk Pokdakan Yayasan Peduli Bintang (Salju Hangat, Tik Sbg)	1.546.096.000,00	1.524.000.000,00	98,57	(22.096.000,00)	0,00	100,00
193	Dinas Perikanan	Pengadaan Prasarana Pembenuhan Ikan Kerapu utk Pokdakan Nelayan Abadi (Teluk Bintan)	59.315.903,00	55.278.187,00	93,19	(4.037.716,00)	0,00	100,00
194	Dinas Perikanan	Pengadaan Rumah Jaga Keramba Jaring Apung (HDPE) utk Pokdakan Yayasan Peduli Bintang (Salju Hangat, Tik Sbg)	99.000.000,00	98.789.533,00	99,79	(210.447,00)	0,00	100,00
195	Dinas Perikanan	Penataan Kolam Ikan Air Tawar utk Pokdakan Cipta Mandiri (Binut)	123.200.000,00	122.896.192,00	99,75	(303.808,00)	0,00	100,00
196	Dinas Perikanan	Pembuatan Keramba Jaring Apung untuk Budidaya Ikan Air Tawar utk Pokdakan Beringin Jaya Sejahtera (Bintim)	85.000.000,00	84.935.612,00	99,92	(64.388,00)	0,00	100,00
197	Dinas Perikanan	Pembuatan Kolam Bioflok untuk Budidaya Ikan Air Tawar utk Pokdakan Bintang Berkah Bersama (Toapaya)	90.000.000,00	89.679.123,00	99,64	(320.877,00)	0,00	100,00
198	Dinas Perikanan	Pembuatan Prasarana Pendukung Budidaya Ikan Air Tawar utk Pokdakan Harapan Jaya	65.000.000,00	64.769.048,00	99,64	(230.952,00)	0,00	100,00
199	Dinas Perikanan	Penataan Media Pembesaran Budidaya Ikan di Kecamatan Toapaya utk Pokdakan Kolam Milineal (Toapaya)	176.111.236,00	175.730.281,00	99,78	(380.955,00)	0,00	100,00
200	Dinas Perikanan	Pembangunan Prasarana Unit Pembesaran Ikan Air Tawar utk Pokdakan Wira Tirta Sejahtera	550.000.000,00	532.990.887,00	96,91	(17.009.113,00)	0,00	100,00
201	Dinas Perikanan	Mesin Pemotong Kerupuk dan Mesin Penggiling Ikan (Meat Minder/ Meat Grinder) utk Kelompok Usaha Bersama Nuget Ikan Numbing	74.592.000,00	74.465.000,00	99,83	(127.000,00)	0,00	100,00
202	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Yayasan Bahtera Insani	399.822.000,00	336.000.000,00	84,04	(63.822.000,00)	298.760.000,00	12,46
203	Badan Keuangan	Yayasan peduli Bintang	959.927.998,00	895.800.000,00	93,32	(64.127.998,00)	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
	dan Aset Daerah	bestari						
204	Kecamatan Bintang Utara	Tenda+Kursi Plastik+Alat Goro	40.000.000,00	39.893.400,00	99,73	(106.600,00)	0,00	100,00
205	Kecamatan Bintang Utara	Tenda + Kursi Plastik	50.000.000,00	49.938.900,00	99,88	(61.100,00)	0,00	100,00
206	Kecamatan Bintang Utara	Tenda + Kursi Plastik+Sound system	50.000.000,00	49.831.230,00	99,66	(168.770,00)	0,00	100,00
207	Kecamatan Bintang Utara	Tenda + Kursi Plastik	50.000.000,00	49.938.900,00	99,88	(61.100,00)	0,00	100,00
208	Kecamatan Bintang Utara	Sajadah Masjid	90.000.000,00	89.878.920,00	99,87	(121.080,00)	0,00	100,00
209	Kecamatan Bintang Utara	Lampu Hias	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	(50.000,00)	0,00	100,00
210	Kecamatan Bintang Utara	Kursi Plastik, Tenda Datar 6 x 5, Gerobak Sorong, Mesin potong Rumput (RW.001)	24.520.946,00	24.499.920,00	99,91	(21.026,00)	0,00	100,00
211	Kecamatan Bintang Utara	Kursi Plastik, Tenda Datar 6 x 5, Gerobak Sorong, Mesin potong Rumput (RW.002)	24.520.946,00	24.499.920,00	99,91	(21.026,00)	0,00	100,00
212	Kecamatan Bintang Utara	Kursi Plastik, Tenda Datar 6 x 5, Gerobak Sorong, Mesin potong Rumput (RW.003)	24.520.946,00	24.499.920,00	99,91	(21.026,00)	0,00	100,00
213	Kecamatan Bintang Utara	Kursi Plastik, Mesin Gergaji Kayu, Mesin Potong Rumput (Rw. 001)	24.373.890,00	24.372.492,00	99,99	(1.398,00)	0,00	100,00
214	Kecamatan Bintang Utara	Kursi Plastik, Mesin Gergaji Kayu, Mesin Potong Rumput, Tenda Datar 6x5 (Rw. 002)	28.609.100,00	28.608.474,00	100,00	(626,00)	0,00	100,00
215	Kecamatan Bintang Utara	Kursi Plastik, Mesin Gergaji Kayu, Mesin Potong Rumput (Rw. 003)	24.035.020,00	23.926.161,00	99,55	(108.859,00)	0,00	100,00
216	Kecamatan Bintang Utara	Kursi Plastik, Mesin Gergaji Kayu, Mesin Potong Rumput (Rw. 004)	14.696.857,00	14.581.848,00	99,22	(115.009,00)	0,00	100,00
217	Kecamatan Bintang Utara	Kursi Plastik, Tenda Datar 6x5 (Rw. 006)	24.373.892,00	24.370.272,00	99,99	(3.620,00)	0,00	100,00
218	Kecamatan Bintang Utara	Kursi Plastik, Mesin Gergaji Kayu, Mesin Potong Rumput, Tenda Datar 6x5 (Rw. 007)	28.500.000,00	28.497.030,00	99,99	(2.970,00)	0,00	100,00
219	Kecamatan Bintang Utara	Kursi Plastik, Mesin Gergaji Kayu, Mesin Potong Rumput, Tenda Datar 6x5 (Rw. 008)	28.416.550,00	28.416.000,00	100,00	(550,00)	0,00	100,00
220	Kecamatan Bintang Utara	Kursi Plastik, Mesin Gergaji Kayu, Mesin Potong Rumput (Rw. 009)	19.425.920,00	19.422.780,00	99,98	(3.140,00)	0,00	100,00
221	Kecamatan Bintang Pesisir	Mesjid Al-Ma'ruf Numbing	25.000.000,00	24.975.000,00	99,90	(25.000,00)	0,00	100,00
222	Kecamatan Bintang Pesisir	Mesjid Al-Hidayah	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90	(20.000,00)	0,00	100,00
223	Kecamatan Bintang Pesisir	RT 05 RW 02 Desa Mapur	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	(50.000,00)	0,00	100,00
224	Kecamatan Bintang Pesisir	RT 07 RW 02 Desa Air Glubi	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	(50.000,00)	0,00	100,00
225	Kecamatan Bintang Pesisir	Masjid Al Ma'ruf	30.000.000,00	29.914.500,00	99,72	(85.500,00)	0,00	100,00
226	Kecamatan Tambelan	Tenda Datar 6 x 5	28.625.000,00	28.615.800,00	99,97	(9.200,00)	0,00	100,00
227	Kecamatan Tambelan	Kursi Plastik	13.952.000,00	13.923.840,00	99,80	(28.160,00)	0,00	100,00
228	Kecamatan Tambelan	Mesin Ketam Listrik	24.420.000,00	24.057.030,00	98,51	(362.970,00)	0,00	100,00
229	Kecamatan Tambelan	Baju Gamis	25.530.000,00	25.300.230,00	99,10	(229.770,00)	0,00	100,00
230	Kecamatan Tambelan	Jaket + Celana Traning Olahraga	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	(50.000,00)	0,00	100,00
231	Kecamatan Tambelan	Kostum Olahraga	20.160.000,00	19.962.240,00	99,02	(197.760,00)	0,00	100,00
232	Kecamatan Mantang	Baju Kurung Melayu / Daerah	49.500.000,00	49.450.500,00	99,90	(49.500,00)	0,00	100,00
233	Kecamatan Mantang	Kostum Olah Raga	49.455.000,00	49.428.300,00	99,95	(26.700,00)	0,00	100,00
234	Kecamatan Topaya	Tenda Datar, Tenda Kerucut, Kursi Plastik	75.039.261,00	74.983.608,00	99,93	(55.653,00)	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
235	Kecamatan Teluk Sebong	Tenda Datar dan Kursi Plastik	70.000.000,00	69.359.460,00	99,08	(640.540,00)	0,00	100,00
236	Kecamatan Teluk Bintan	Pengadaan 4 unit Tenda dan 200 unit Kursi untuk	96.570.000,00	95.904.000,00	99,31	(666.000,00)	0,00	100,00
237	Kecamatan Teluk Bintan	400 PCS Baju Seragam Majelis Ta'lim	199.800.000,00	199.222.800,00	99,71	(577.200,00)	0,00	100,00
238	Kecamatan Gunung Kijang	pengadaan mesin fogging	35.000.000,00	34.743.000,00	99,27	(257.000,00)	0,00	100,00
239	Kecamatan Gunung Kijang	Pengadaan tenda dan kursi	40.000.000,00	39.538.200,00	98,85	(461.800,00)	0,00	100,00
240	Kecamatan Gunung Kijang	pembangunan Gerbang Kampung	145.500.000,00	0,00	0,00	(145.500.000,00)	0,00	0,00
241	Kecamatan Bintan Timur	Belanja Baju Kurung Melayu/Daerah	22.500.000,00	22.200.000,00	98,67	(300.000,00)	0,00	100,00
242	Kecamatan Bintan Timur	Belanja Baju Seragam Pengajian	127.400.000,00	49.728.000,00	39,03	(513.000,00)	0,00	100,00
243	Kecamatan Bintan Timur	Belanja Baju Seragam Pengajian		77.159.000,00	60,56		0,00	100,00
244	Kecamatan Bintan Timur	Belanja Kursi Plastik	30.000.000,00	14.985.000,00	49,95	(30.000,00)	0,00	100,00
245	Kecamatan Bintan Timur	Belanja Kursi Plastik		14.985.000,00	49,95		0,00	100,00
246	Kecamatan Bintan Timur	Belanja Tenda Kerucut 5x5	250.000.000,00	134.934.264,00	53,97	(2.678.236,00)	0,00	100,00
247	Kecamatan Bintan Timur	Belanja Tenda Kerucut 5x5		112.387.500,00	44,96		0,00	100,00
248	Kecamatan Bintan Timur	Belanja Baju Kurung Melayu/Daerah	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90	(20.000,00)	0,00	100,00
249	Kecamatan Bintan Timur	Belanja Mesin Jahit Portable	7.600.000,00	6.327.000,00	83,25	(1.273.000,00)	0,00	100,00
250	Kecamatan Bintan Timur	Belanja Sound System	25.000.000,00	24.975.000,00	99,90	(25.000,00)	0,00	100,00
251	Kecamatan Bintan Timur	Pengadaan Tenda dan Kursi	30.000.000,00	29.999.970,00	100,00	(30,00)	0,00	100,00
252	Kecamatan Bintan Timur	Pembangunan Parkir Masjid At Taqwa	30.000.000,00	29.999.304,00	100,00	(696,00)	0,00	100,00
253	Kecamatan Bintan Timur	Rehab WC Masjid Miftahul Iman	15.000.000,00	14.998.320,00	99,99	(1.680,00)	0,00	100,00
254	Kecamatan Bintan Timur	Pembangunan WC Balai Pertemuan	15.000.000,00	14.999.430,00	100,00	(570,00)	0,00	100,00
255	Kecamatan Bintan Timur	Perehapan Balai Serbaguna Kampung Wacopek RT.001 / RW.004	30.000.000,00	29.999.302,00	100,00	(698,00)	0,00	100,00
256	Kecamatan Bintan Timur	pembangunan Gerbang Kampung	405.000.000,00	0,00	0,00	(405.000.000,00)	0,00	0,00
257	Kecamatan Seri Kuala Lobam	Hibah Kursi Plastik (Kursi Makan Standart Motif Anyam) Kepada RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Permai	13.500.000,00	13.486.500,00	99,90	(13.500,00)	0,00	100,00
258	Kecamatan Seri Kuala Lobam	Hibah Tenda Kerucut dan Plafon 5x5 Kepada RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Permai	20.900.000,00	20.868.000,00	99,85	(32.000,00)	0,00	100,00
259	Kecamatan Seri Kuala Lobam	Hibah Tenda Pesta Kepada RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Permai	15.000.000,00	14.985.000,00	99,90	(15.000,00)	0,00	100,00
260	Kecamatan Seri Kuala Lobam	Hibah Meja Babul Khairat Kepada RT 002 RW 002 Desa Teluk Sasah	15.000.000,00	14.985.000,00	99,90	(15.000,00)	0,00	100,00
261	Kecamatan Seri Kuala Lobam	Hibah Kursi Plastik (Kursi Makan Standart) Kepada RT 004 RW 004 Desa Teluk Sasah	6.750.000,00	6.715.500,00	99,49	(34.500,00)	0,00	100,00
262	Kecamatan Seri Kuala Lobam	Hibah Kursi Plastik (Kursi Makan Standart Motif Anyam) Kepada RT 004 RW 004 Desa Teluk Sasah	16.200.000,00	16.183.800,00	99,90	(16.200,00)	0,00	100,00
263	Kecamatan Seri Kuala Lobam	Hibah Meja Pemandian Jenazah Kepada RT 004 RW 004 Desa Teluk Sasah	4.500.000,00	4.495.500,00	99,90	(4.500,00)	0,00	100,00
264	Kecamatan Seri Kuala Lobam	Hibah Peralatan Gotong Royong Kepada RT 004 RW 004 Desa Teluk Sasah	29.200.000,00	29.104.200,00	99,67	(95.800,00)	0,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
265	Kecamatan Seri Kuala Lobam	Hibah Tenda Datar 5x4 Kepada RT 004 RW 004 Desa Teluk Sasah	16.800.000,00	16.761.000,00	99,77	(39.000,00)	0,00	100,00
266	Kecamatan Seri Kuala Lobam	Hibah Tenda Kerucut dan Plafon 5x5 Kepada RT 004 RW 004 Desa Teluk Sasah	20.900.000,00	20.868.000,00	99,85	(32.000,00)	0,00	100,00
267	Kecamatan Seri Kuala Lobam	Hibah Tenda Pesta Kepada RT 004 RW 004 Desa Teluk Sasah	15.000.000,00	14.985.000,00	99,90	(15.000,00)	0,00	100,00
268	Kecamatan Seri Kuala Lobam	Hibah Peralatan Pertukangan Kepada RW 004 Kelurahan Tanjung Permai	25.000.000,00	24.963.900,00	99,86	(36.100,00)	0,00	100,00
269	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sanggar Joged Dangkong Melayu Serumpun Bersatu	0,00	0,00	0,00	0,00	99.341.000,00	(100,00)
270	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pamsimas Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	(100,00)
271	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pamsimas Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	(100,00)
272	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pamsimas Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	(100,00)
273	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Surau Al-Falah	0,00	0,00	0,00	0,00	72.680.000,00	(100,00)
274	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Surau Nurhidayah	0,00	0,00	0,00	0,00	72.748.000,00	(100,00)
275	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Surau Amalun Shalihin	0,00	0,00	0,00	0,00	74.770.000,00	(100,00)
276	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan Rumah Ustadz Miftahul Gayat	0,00	0,00	0,00	0,00	154.820.000,00	(100,00)
277	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Tempat Pengajian Al Qur'an Al Makruf	0,00	0,00	0,00	0,00	37.989.000,00	(100,00)
278	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Masjid Raya Al-Ma'ruf	0,00	0,00	0,00	0,00	47.948.000,00	(100,00)
279	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Masjid Jamiatul Mu'Minin	0,00	0,00	0,00	0,00	114.460.000,00	(100,00)
280	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Surau Baitul Solihin	0,00	0,00	0,00	0,00	152.735.000,00	(100,00)
281	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	TPA Karang Rejo	0,00	0,00	0,00	0,00	83.233.000,00	(100,00)
282	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	TPA Al Amal	0,00	0,00	0,00	0,00	82.083.000,00	(100,00)
283	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mushollah Nurul Hidayah	0,00	0,00	0,00	0,00	45.029.000,00	(100,00)
284	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Masjid An – Nur	0,00	0,00	0,00	0,00	145.910.000,00	(100,00)
285	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Pondok Pesantren Idris	0,00	0,00	0,00	0,00	170.750.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
	Pemukiman							
286	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Masjid Al - Hikmah	0,00	0,00	0,00	0,00	173.458.000,00	(100,00)
287	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mesjid Al Amin LDII	0,00	0,00	0,00	0,00	101.313.000,00	(100,00)
288	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mushola Al - Mu'minin	0,00	0,00	0,00	0,00	128.228.000,00	(100,00)
289	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mesjid Al - Ikhlas	0,00	0,00	0,00	0,00	46.935.000,00	(100,00)
290	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pondok Pesantren Hidayatullah	0,00	0,00	0,00	0,00	154.435.000,00	(100,00)
291	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan Dinding Penahan Tanah Kelenteng Jalan Lintas Barat RT. 05 RW. 02 Kel. Toapaya Asri Kec. Toapaya	0,00	0,00	0,00	0,00	154.697.000,00	(100,00)
292	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	TPQ Al - Kautsar	0,00	0,00	0,00	0,00	40.771.000,00	(100,00)
293	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mushola Ar - Rahmat	0,00	0,00	0,00	0,00	128.067.000,00	(100,00)
294	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mesjid Al Muhajirin	0,00	0,00	0,00	0,00	170.340.000,00	(100,00)
295	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	TPQ An Nur	0,00	0,00	0,00	0,00	85.380.000,00	(100,00)
296	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Masjid AD-Dakwah	0,00	0,00	0,00	0,00	133.378.000,00	(100,00)
297	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mushola Alif Lamm Mim	0,00	0,00	0,00	0,00	170.703.000,00	(100,00)
298	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Musholla Ar Rozaq	0,00	0,00	0,00	0,00	60.009.000,00	(100,00)
299	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Gereja HKBP	0,00	0,00	0,00	0,00	127.279.000,00	(100,00)
300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	TPA AL Kaunniyah Berakit	0,00	0,00	0,00	0,00	170.800.000,00	(100,00)
301	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mesjid Ashhaabul Yamin Berakit	0,00	0,00	0,00	0,00	152.690.000,00	(100,00)
302	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	TPQ AL-AMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	117.250.000,00	(100,00)
303	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mushola Al-Muqlisin	0,00	0,00	0,00	0,00	173.370.000,00	(100,00)
304	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Masjid Al-Muhajirin	0,00	0,00	0,00	0,00	85.260.000,00	(100,00)
305	Dinas Perumahan	Mushola As-Shuffah	0,00	0,00	0,00	0,00	86.310.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
	Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
306	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	TPQ At - Taubah	0,00	0,00	0,00	0,00	72.810.000,00	(100,00)
307	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mesjid Al. Fatah	0,00	0,00	0,00	0,00	83.250.000,00	(100,00)
308	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	RA Mattahul Huda	0,00	0,00	0,00	0,00	64.920.000,00	(100,00)
309	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Surau Baitul Mustaqim	0,00	0,00	0,00	0,00	43.157.000,00	(100,00)
310	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	TPQ Jannatul Ma'wa	0,00	0,00	0,00	0,00	170.860.000,00	(100,00)
311	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Masjid Al - Azhar	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600.000,00	(100,00)
312	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mesjid Ikhwatul Muslimin	0,00	0,00	0,00	0,00	177.390.000,00	(100,00)
313	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	masjid Nurul Iman	0,00	0,00	0,00	0,00	422.677.871,00	(100,00)
314	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Sentra IKM Sei Lekop	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601.988.830,00	(100,00)
315	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	0,00	0,00	0,00	0,00	174.984.000,00	(100,00)
316	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (KUEP)	0,00	0,00	0,00	0,00	179.815.900,00	(100,00)
317	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kelompok Usaha Pembuat Leker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	Kec. Teluk Bintan	Rehap Mesji dan Posyandu serta pembangunan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	306.041.000,00	(100,00)
319	Kec. Teluk Bintan	Uang Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	(100,00)
321	Kec. Teluk Bintan	Alat Tangkap nelayan	0,00	0,00	0,00	0,00	49.967.500,00	(100,00)
322	Dinas Pehubungan	Pembuatan Perahu Motor	0,00	0,00	0,00	0,00	64.680.000,00	(100,00)
323	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Lembaga Adat Melayu	0,00	0,00	0,00	0,00	298.760.000,00	(100,00)
324	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Peralatan DrumBand	0,00	0,00	0,00	0,00	178.233.000,00	(100,00)
325	Dinas Pendidikan	TK Permata Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	(100,00)
326	Dinas Pendidikan	TK Terumbu Karang	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(100,00)
327	Dinas Pendidikan	TK Sinar Bahagia	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	(100,00)
328	Dinas Pendidikan	TK Gracia	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	(100,00)
329	Dinas Pendidikan	TK Kids Club	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800.000,00	(100,00)
330	Dinas Pendidikan	TK Amalya	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	(100,00)
331	Dinas Pendidikan	TK Hang Tuah	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100.000,00	(100,00)
332	Dinas Pendidikan	TK YKPP	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	(100,00)
333	Dinas Pendidikan	TK Fransiskus	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	(100,00)
334	Dinas Pendidikan	TK Puji	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00	(100,00)
335	Dinas Pendidikan	TK Nusantara	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	(100,00)
336	Dinas Pendidikan	TK Surya Kebenaran	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	(100,00)
337	Dinas Pendidikan	TK Ceria Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	(100,00)
338	Dinas Pendidikan	TK Angkasa I	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
339	Dinas Pendidikan	TK Eden Ceria	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800.000,00	(100,00)
340	Dinas Pendidikan	Paud Nusa Indah Teluk Bakau	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	(100,00)
341	Dinas Pendidikan	Paud Nusa Indah I	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	(100,00)
342	Dinas Pendidikan	Paud Nusa Indah II	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100.000,00	(100,00)
343	Dinas Pendidikan	Paud Nusa Indah III	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	(100,00)
344	Dinas Pendidikan	Paud Nusa Indah IV	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	(100,00)
345	Dinas Pendidikan	KB Tunas Bantan	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	(100,00)
346	Dinas Pendidikan	KB Seruni	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	(100,00)
347	Dinas Pendidikan	KB Al Hikmah	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(100,00)
348	Dinas Pendidikan	KB Kenanga	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100.000,00	(100,00)
349	Dinas Pendidikan	KB Harapan Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	(100,00)
350	Dinas Pendidikan	KB Al Fathul Ilmi	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	(100,00)
351	Dinas Pendidikan	KB Nurul Istiqomah	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900.000,00	(100,00)
352	Dinas Pendidikan	KB Petra Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200.000,00	(100,00)
353	Dinas Pendidikan	KB Ananda	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	(100,00)
354	Dinas Pendidikan	KB Tunas Sahabat	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(100,00)
355	Dinas Pendidikan	KB Nurul Amin	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00	(100,00)
356	Dinas Pendidikan	KB Al Furqon	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800.000,00	(100,00)
357	Dinas Pendidikan	KB Tiara	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	(100,00)
358	Dinas Pendidikan	KB Al Jannatun Naim	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	(100,00)
359	Dinas Pendidikan	KB Bina Cahaya	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	(100,00)
360	Dinas Pendidikan	KB Ar Riyadhhussholihin	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	(100,00)
361	Dinas Pendidikan	KB Buah Hati	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	(100,00)
362	Dinas Pendidikan	Pos PAUD Seri Melati	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	(100,00)
363	Dinas Pendidikan	KB Al Hasanah I	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	(100,00)
364	Dinas Pendidikan	KB Cahaya Hati	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	(100,00)
365	Dinas Pendidikan	KB Gita Ceria	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	(100,00)
366	Dinas Pendidikan	KB Nilam Permata Bintan I	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900.000,00	(100,00)
367	Dinas Pendidikan	KB Cinta Nusantara	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	(100,00)
368	Dinas Pendidikan	KB Cahaya Indah	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	(100,00)
369	Dinas Pendidikan	KB Kasih Bunda	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	(100,00)
370	Dinas Pendidikan	TK Bhakti Awlya	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	(100,00)
371	Dinas Pendidikan	KB Teratai	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	(100,00)
372	Dinas Pendidikan	KB Mutiara Qur'ani	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	(100,00)
373	Dinas Pendidikan	KB Intan Cahaya	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	(100,00)
374	Dinas Pendidikan	SPS Permata Bunda	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200.000,00	(100,00)
375	Dinas Pendidikan	KB Mutiara Hati	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(100,00)
376	Dinas Pendidikan	KB Lentera Hati	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	(100,00)
377	Dinas Pendidikan	KB Cahaya Numbing	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	(100,00)
378	Dinas Pendidikan	KB Ananda (Kec.Toapaya)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	(100,00)
379	Dinas Pendidikan	KB Mutiara Bunda	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	(100,00)
380	Dinas Pendidikan	POS PAUD Langgeng	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	(100,00)
381	Dinas Pendidikan	KB Bina Sejahtera	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	(100,00)
382	Dinas Pendidikan	SPS Berseri	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	(100,00)
383	Dinas Pendidikan	KB Pelita Hati	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300.000,00	(100,00)
384	Dinas Pendidikan	KB Adinda Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	(100,00)
385	Dinas Pendidikan	Pos Paud Air Glubi Indah	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(100,00)
386	Dinas Pendidikan	KB Tunas Muda	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(100,00)
387	Dinas Pendidikan	TK Kandil Bahar	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400.000,00	(100,00)
388	Dinas Pendidikan	KB Tut Wuri Handayani	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	(100,00)
389	Dinas Pendidikan	KB Nurul 'Ain	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	(100,00)
390	Dinas Pendidikan	KB Al Hasanah II	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	(100,00)
391	Dinas Pendidikan	KB Anggerek Ladi	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	(100,00)
392	Dinas Pendidikan	KB Annida	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(100,00)
393	Dinas Pendidikan	KB Ar Raudhah	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	(100,00)
394	Dinas Pendidikan	KB FATiharah	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	(100,00)
395	Dinas Pendidikan	KB Kasih	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	(100,00)
396	Dinas Pendidikan	KB Kasih Ibu	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	(100,00)
397	Dinas Pendidikan	KB Kasih Sayang	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	(100,00)
398	Dinas Pendidikan	KB Kemala Sari	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	(100,00)
399	Dinas Pendidikan	KB Kids Club Center 1	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	(100,00)
400	Dinas Pendidikan	KB Malin Indah	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	(100,00)
401	Dinas Pendidikan	KB Mandiri (Kec.Teluk Sebung)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	(100,00)
402	Dinas Pendidikan	KB Mawar Asri	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	(100,00)
403	Dinas Pendidikan	KB RA Kartini	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200.000,00	(100,00)
404	Dinas Pendidikan	KB Mutiara	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	(100,00)
405	Dinas Pendidikan	KB Permata Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	(100,00)
406	Dinas Pendidikan	TK Cendikia Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	(100,00)
407	Dinas Pendidikan	KB Permata Ibu	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
408	Dinas Pendidikan	KB Putra Putri Ceria	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	(100,00)
409	Dinas Pendidikan	KB Qurrota'ayun	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	(100,00)
410	Dinas Pendidikan	KB Sengkuang	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	(100,00)
411	Dinas Pendidikan	KB Tenggiri	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00	(100,00)
412	Dinas Pendidikan	KB Tirta Dharma	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	(100,00)
413	Dinas Pendidikan	KB Bukit Timah	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	(100,00)
414	Dinas Pendidikan	KB Alamanda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	(100,00)
415	Dinas Pendidikan	Pos Paud Anggur	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	(100,00)
416	Dinas Pendidikan	KB Al Amin	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	(100,00)
417	Dinas Pendidikan	Pos Paud Galang Batang	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	(100,00)
418	Dinas Pendidikan	Pos Paud Harapan bunda	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	(100,00)
419	Dinas Pendidikan	Pos Paud Lestari	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(100,00)
420	Dinas Pendidikan	Pos Paud Melati Indah	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600.000,00	(100,00)
421	Dinas Pendidikan	Pos Paud Telaga Surya	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	(100,00)
422	Dinas Pendidikan	Pos Paud Tunas Harapan	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	(100,00)
423	Dinas Pendidikan	SPS Camar	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	(100,00)
424	Dinas Pendidikan	SPS Lengkuas Indah	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	(100,00)
425	Dinas Pendidikan	SPS Mutiara Ibu	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	(100,00)
426	Dinas Pendidikan	TK Antam Kijang	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	(100,00)
427	Dinas Pendidikan	TK Arlica	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	(100,00)
428	Dinas Pendidikan	TK Muhammadiyah 1	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	(100,00)
429	Dinas Pendidikan	KB Cahaya Fastabiqul Khairat	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00	(100,00)
430	Dinas Pendidikan	TK Pedesaan Gunung Kijang	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	(100,00)
431	Dinas Pendidikan	TK Tunas Bangsa	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	(100,00)
432	Dinas Pendidikan	TK Tunas Muda	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	(100,00)
433	Dinas Pendidikan	TK Muhammadiyah 2	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	(100,00)
434	Dinas Pendidikan	KB Tunas Harapan	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	(100,00)
435	Dinas Pendidikan	KB Janur Bina Maju	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	(100,00)
436	Dinas Pendidikan	Pos Paud Sri Kemuning	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	(100,00)
437	Dinas Pendidikan	KB Nurul Iman	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	(100,00)
438	Dinas Pendidikan	SPS Kemala Kasih	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	(100,00)
439	Dinas Pendidikan	KB Surya Kemenangan	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	(100,00)
440	Dinas Pendidikan	KB Nusantara	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	(100,00)
441	Dinas Pendidikan	KB Bhakti Awlya	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	(100,00)
442	Dinas Pendidikan	KB Killah	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	(100,00)
443	Dinas Pendidikan	KB Cipta Insantama	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	(100,00)
444	Dinas Pendidikan	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	(100,00)
445	Dinas Pendidikan	TK Yuliana	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	(100,00)
446	Dinas Pendidikan	KB Padi Mas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	(100,00)
447	Dinas Pendidikan	TK SD Satu Atap SDN 001 Teluk Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	(100,00)
448	Dinas Pendidikan	KB Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	(100,00)
449	Dinas Pendidikan	TK Tirta Eka Pertiwi	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00	(100,00)
450	Dinas Pendidikan	KB Terumbu Karang	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	(100,00)
451	Dinas Pendidikan	TK Satu Atap SDN 007 Teluk Sebung	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	(100,00)
452	Dinas Pendidikan	TK Tadika Berseri	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	(100,00)
453	Dinas Pendidikan	KB Gin Kecil Indah	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	(100,00)
454	Dinas Pendidikan	KB Permata Mantang	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	(100,00)
455	Dinas Pendidikan	Pos Paud Mutiara	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600.000,00	(100,00)
456	Dinas Pendidikan	Pos Paud Anggrek	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	(100,00)
457	Dinas Pendidikan	TK Numbing Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(100,00)
458	Dinas Pendidikan	KB Millatiasri	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	(100,00)
459	Dinas Pendidikan	Pos Paud Widuri	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800.000,00	(100,00)
460	Dinas Pendidikan	TK SD Satu Atap SDN 002 Bintan Pesisir	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	(100,00)
461	Dinas Pendidikan	KB Sri Kemalai	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	(100,00)
462	Dinas Pendidikan	TK-SD Satu Atap SDN 008 Gunung Kijang	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	(100,00)
463	Dinas Pendidikan	KB Bintang Kejora	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(100,00)
464	Dinas Pendidikan	KB Kasih Bunda	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00	(100,00)
465	Dinas Pendidikan	KB Rosella	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	(100,00)
466	Dinas Pendidikan	SPS Sengkuang	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	(100,00)
467	Dinas Pendidikan	KB Sayang Ibu	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	(100,00)
468	Dinas Pendidikan	TK-SD Satu Atap SDN 003 Tambelan	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800.000,00	(100,00)
469	Dinas Pendidikan	KB Permata Hati	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	(100,00)
470	Dinas Pendidikan	TK IT Alamanda	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	(100,00)
471	Dinas Pendidikan	TPA Bintang Sari	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	(100,00)
472	Dinas Pendidikan	Pos Paud Nala	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00	(100,00)
473	Dinas Pendidikan	KB Sabda Bertuah	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
474	Dinas Pendidikan	KB Harapan Insan	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	(100,00)
475	Dinas Pendidikan	KB Asy-Syifa	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	(100,00)
476	Dinas Pendidikan	KB Intan Payung	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	(100,00)
477	Dinas Pendidikan	KB Kandil Bahar	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	(100,00)
478	Dinas Pendidikan	KB Sri Merak	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	(100,00)
479	Dinas Pendidikan	TK SD Satu Atap SDN 001 Mantang	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	(100,00)
480	Dinas Pendidikan	PKBM Harapan Insan (Paket B)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	(100,00)
481	Dinas Pendidikan	PKBM Insan Cendikia (Paket B)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	(100,00)
482	Dinas Pendidikan	PKBM Nilam Permata Bintan (Paket B)	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	(100,00)
483	Dinas Pendidikan	PKBM Bintan Sari (Paket B)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	(100,00)
484	Dinas Pendidikan	PKBM Intan Payung (Paket B)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	(100,00)
485	Dinas Pendidikan	PKBM Maju Lestari (Paket B)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	(100,00)
486	Dinas Pendidikan	PKBM Persada Bahari (Paket B)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	(100,00)
487	Dinas Pendidikan	Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Bintan (Paket B)	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	(100,00)
488	Dinas Pendidikan	PKBM Karang Bertuah (Paket B)	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	(100,00)
489	Dinas Pendidikan	PKBM Bestari (Paket B)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	(100,00)
490	Dinas Pendidikan	PKBM Harapan Insan (Paket C)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	(100,00)
491	Dinas Pendidikan	PKBM Persada Bahari (Paket C)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	(100,00)
492	Dinas Pendidikan	PKBM Insan Cendikia (Paket C)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	(100,00)
493	Dinas Pendidikan	PKBM Nilam Permata Bintan (Paket C)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	(100,00)
494	Dinas Pendidikan	PKBM Bintan Sari (Paket C)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	(100,00)
495	Dinas Pendidikan	PKBM Intan Payung (Paket C)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	(100,00)
496	Dinas Pendidikan	PKBM Maju Lestari (Paket C)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	(100,00)
497	Dinas Pendidikan	PKBM Bestari (Paket C)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900.000,00	(100,00)
498	Dinas Pendidikan	Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Bintan (Paket C)	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	(100,00)
499	Dinas Pendidikan	PKBM Karang Bertuah (Paket C)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	(100,00)
500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Sri Rejeki (Bibit Kurma dan Pupuk Kandang)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.676.750,00	(100,00)
501	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Flo Java (Bibit Kelapa Genjah)	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250.000,00	(100,00)
502	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Beringin Jaya (Mashal 200 EC)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00	(100,00)
503	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Ronggo Lawe dan Kelompok Tani Harapan Jaya (Pupuk Urea)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.439.510,00	(100,00)
504	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Wanita Tani Sumber Rejeki (Ayam Buras dan Pakan Ternak)	0,00	0,00	0,00	0,00	162.702.100,00	(100,00)
505	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Maju Bersama,KT. Tunas Indah, KT. Bina Mandiri, KT. Beringin Jaya, KT. Sido Makmur,KT. Suri Mandiri (Pupuk Kompos dan Pupuk NPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	131.180.797,00	(100,00)
506	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	KWT Kusuma Jaya, KWT Melati Indah, KWT Al Iksar,KWT Selada (Bibit Benih)	0,00	0,00	0,00	0,00	119.296.716,00	(100,00)
507	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Utama II (Traktor Roda 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	160.501.000,00	(100,00)
508	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Air	0,00	0,00	0,00	0,00	86.047.500,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
	Pangan dan Pertanian	Sembat, KT. Hulu Air, KT. Bangun Tirta, KT. Batu Belah, KT. Bintang Timur, KT. Berkat Tani, KT. Beringin, KT. Gunung Lancang, KT. Mekar Sari, KT. Harum Manis, KT. Tirta Bharu (Mesin Rumpuk 35 Unit)						
509	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Maju Jaya (Sapi Jantan)	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400.000,00	(100,00)
510	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Maju Jaya, KT. Pelita Jaya, KT. Tani Mandiri, KT. Tani Mandiri, KT. Ngadi Luhur, KT. Cahaya Tani, KT. Horti Sukses, KT. Mulia Sejahtera, KT. Unggul Jaya, KT. Maju Jaya, KT. Sumber Makmur, KT. Tunas Muda (Belanja Obat-Obatan)	0,00	0,00	0,00	0,00	62.150.000,00	(100,00)
511	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Berkah (Traktor)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.996.500,00	(100,00)
512	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Flo Java (Pupuk dan Obat-Obatan)	0,00	0,00	0,00	0,00	127.183.650,00	(100,00)
513	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Flo Java (Benih Jagung)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.720.000,00	(100,00)
514	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Utama II, KT. Maju Jaya, KT. Pelita Jaya, KT. Mandiri, KT. Ngudi Luhur, KT. Cahaya Tani, KT. Horti Sukses, KT. Mulia Sejahtera, KT. Unggul Jaya, KT. Maju Jaya, KT. Sumber Makmur, KT. Tunas Muda (Belanja Pupuk)	0,00	0,00	0,00	0,00	171.094.000,00	(100,00)
515	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Maju Bersama, KT. Harapan Jaya, KT. Ronggo Lawe, KT. Sari Makmur, KT. Berakit Jaya, KT. Kya Asri, KT. Flo Java, KT. Mitra Tani, KT. Sido Makmur, KT. Mandiri (Belanja Pupuk NPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	334.133.800,00	(100,00)
516	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Tunas Muda II (Kunyit dan Jahe Merah)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235.000,00	(100,00)
517	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Sari Makmur dan KT. Sido Makmur (Hand Traktor)	0,00	0,00	0,00	0,00	61.712.800,00	(100,00)
518	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bibit Durian Tembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	Dinas Sosial	Bantuan Untuk Kube	0,00	0,00	0,00	0,00	138.508.900,00	(100,00)
520	Dinas Sosial	Bantuan Kursi Roda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704.500,00	(100,00)
521	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Penangkap Ikan 3 GT Kayu untuk Nelayan Kabupaten Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	910.710.900,00	(100,00)
522	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Fiber 15 PK dilengkapi Alat Tangkap untuk Nelayan Kec. Seri Kuala Lobam	0,00	0,00	0,00	0,00	194.187.510,00	(100,00)
523	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Fiber 3GT untuk Nelayan Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir	0,00	0,00	0,00	0,00	186.882.960,00	(100,00)
524	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Fiber 1GT Mesin 7PK untuk Nelayan Kec. Bintan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	118.924.159,00	(100,00)
525	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor	0,00	0,00	0,00	0,00	68.903.263,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
		Fiber 1GT beserta alat tangkap untuk Nelayan Desa Pangkil Kec. Teluk Bintan						
526	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Fiber 1GT untuk Nelayan Desa Penghujan Kec. Teluk Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	158.615.028,00	(100,00)
527	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Fiber 1GT beserta alat tangkap untuk Nelayan Kec. Seri Kuala Lobam	0,00	0,00	0,00	0,00	61.105.754,00	(100,00)
528	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Fiber 1GT beserta alat tangkap untuk Nelayan Kec. Teluk Sebung	0,00	0,00	0,00	0,00	148.082.176,00	(100,00)
529	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Fiber 1GT beserta alat penangkap untuk Nelayan Kec. Teluk Sebung	0,00	0,00	0,00	0,00	171.517.500,00	(100,00)
530	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan utk Nelayan Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir	0,00	0,00	0,00	0,00	185.367.600,00	(100,00)
531	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Fiber 40PK beserta alat tangkap untuk Nelayan Kec. Bintan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	193.054.400,00	(100,00)
532	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Kayu 1GT untuk Nelayan Desa Penghujan Kec. Teluk Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	194.334.800,00	(100,00)
533	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor 1GT untuk Nelayan Kec. Teluk Sebung	0,00	0,00	0,00	0,00	194.312.800,00	(100,00)
534	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Kayu 2GT beserta alat tangkap utk Nelayan Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang	0,00	0,00	0,00	0,00	109.511.600,00	(100,00)
535	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Penangkap Ikan 3GT Kayu utk Nelayan Kec. Tambelan	0,00	0,00	0,00	0,00	193.610.120,00	(100,00)
536	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Penangkap Ikan 3GT utk Nelayan Kel. Teluk Sekuni	0,00	0,00	0,00	0,00	189.370.720,00	(100,00)
537	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Penangkap Ikan 3GT utk Nelayan Kab. Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	195.553.600,00	(100,00)
538	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Tempel Fiber 15PK untuk Nelayan Kab. Binta	0,00	0,00	0,00	0,00	79.594.020,00	(100,00)
539	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Tempel Kayu 15HP untuk Nelayan Desa Pangkil Kec. Teluk Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	189.535.500,00	(100,00)
540	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Tempel Mesin 40 PK untuk Nelayan Kec. Gunung Kijang	0,00	0,00	0,00	0,00	99.125.400,00	(100,00)
541	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Penangkap Ikan 3GT Kayu utk Nelayan Kab. Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	189.588.960,00	(100,00)
542	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Penangkap Ikan 3GT Kayu utk Nelayan Desa Hilir Kec. Tambelan	0,00	0,00	0,00	0,00	196.698.920,00	(100,00)
543	Dinas Perikanan	Pengadaan Kelong Apung untuk Nelayan Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	187.916.828,00	(100,00)
544	Dinas Perikanan	Pengadaan Sarana Pendukung Fiber Box Kapasitas 400 Kg untuk Nelayan Kabupaten Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	98.807.390,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
545	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Jaring Udang untuk Nelayan Kec. Seri Kuala Lobam	0,00	0,00	0,00	0,00	98.348.454,00	(100,00)
546	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan Bubu Rajungan Oval+Tali PE untuk Nelayan Kab. Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	97.061.250,00	(100,00)
547	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan Bubu Rajungan Oval Tali PE untuk Nelayan Kab. Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	62.716.500,00	(100,00)
548	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan untuk Nelayan Kec. Teluk Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	190.206.500,00	(100,00)
549	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan untuk Nelayan Pulau Ladi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	75.645.000,00	(100,00)
550	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Jaring Karang utk Nelayan Kec. Tambelan	0,00	0,00	0,00	0,00	49.863.000,00	(100,00)
551	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan/Udang Lengkap Untuk Nelayan Kab. Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	187.924.660,00	(100,00)
552	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Jaring Udang lengkap utk Nelayan Desa Pangkil Kec. Teluk Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	95.717.000,00	(100,00)
553	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Jaring Udang tidak lengkap utk Nelayan Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam	0,00	0,00	0,00	0,00	39.916.800,00	(100,00)
554	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Jaring Udang utk Nelayan Kelurahan Tembeling Tanjung	0,00	0,00	0,00	0,00	75.589.000,00	(100,00)
555	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Tangkap Jaring Udang dan Jaring Karang utk Nelayan Kab. Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	97.482.000,00	(100,00)
556	Dinas Perikanan	Pengadaan Bahan Jaring Ikan Teri (Bilis) untuk Nelayan Desa Pangkil	0,00	0,00	0,00	0,00	149.429.000,00	(100,00)
557	Dinas Perikanan	Pengadaan Bahan Jaring Selangit tidak lengkap utk Nelayan Kab. Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	101.017.125,00	(100,00)
558	Dinas Perikanan	Pengadaan Bahan Jaring Udang tidak lengkap utk Nelayan Kec. Teluk Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	37.422.000,00	(100,00)
559	Dinas Perikanan	Pengadaan Bahan Jaring Udang tidak lengkap utk Nelayan Desa Pangkil	0,00	0,00	0,00	0,00	79.376.000,00	(100,00)
560	Dinas Perikanan	Pengadaan Bahan Kawat Bubu Ikan untuk Nelayan Kec. Seri Kuala Lobam	0,00	0,00	0,00	0,00	29.997.000,00	(100,00)
561	Dinas Perikanan	Pengadaan Bahan Kawat Bubu untuk Nelayan Kec. Bintan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	179.388.000,00	(100,00)
562	Dinas Perikanan	Pengadaan bahan kelengkapan Rumpon Ikan utk Nelayan Kec. Mantang	0,00	0,00	0,00	0,00	99.090.200,00	(100,00)
563	Dinas Perikanan	Pengadaan Radio Pantai (Marine) untuk Nelayan Kabupaten Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	119.816.400,00	(100,00)
564	Dinas Perikanan	Pengadaan Sarana Pendukung GPS untuk Nelayan Kabupaten Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	153.621.600,00	(100,00)
565	Dinas Perikanan	Pengadaan Sarana	0,00	0,00	0,00	0,00	143.220.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
		Pendukung Satelit (Fush Finder) untuk Nelayan Kab. Bintan						
566	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan untuk Nelayan Kec.Gunung Kijang dan Kec. Bintan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	144.310.760,00	(100,00)
567	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Fiber 40 PK utk Nelayan Kec. Binta Pesisir	0,00	0,00	0,00	0,00	98.765.873,00	(100,00)
568	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Penangkap Ikan Fiber kurang dari 5 GT beserta Alat Penangkap Ikan di Kabupaten Bintan (DAK)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.214.925,00	(100,00)
569	Dinas Perikanan	Pengadaan Pakan Ikan (Pelet) untuk Pokdakan di Kabupaten Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	712.565.700,00	(100,00)
570	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Lele, Nila dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Bintan Mina Sukses	0,00	0,00	0,00	0,00	49.975.000,00	(100,00)
571	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pakan Buatan (Pelet) untuk Pokdakan Dumbo Lengkuas	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905.000,00	(100,00)
572	Dinas Perikanan	Pengadaan Kolam Bioflok Fullset, Benih Ikan Lele dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Wahana Tani	0,00	0,00	0,00	0,00	169.030.000,00	(100,00)
573	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pakan Buatan (Pelet) untuk Pokdakan Melati Sumber Rezeki	0,00	0,00	0,00	0,00	89.050.000,00	(100,00)
574	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Kerapu Cantang dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Cahaya Mantang	0,00	0,00	0,00	0,00	94.076.000,00	(100,00)
575	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Sukses Bersama	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905.000,00	(100,00)
576	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Kawal Makmur	0,00	0,00	0,00	0,00	134.438.000,00	(100,00)
577	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Pelita Baru Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	175.361.000,00	(100,00)
578	Dinas Perikanan	pengadaan Benih Ikan Kerapu Cantang utk Pokdakan Jembelang	0,00	0,00	0,00	0,00	179.177.000,00	(100,00)
579	Dinas Perikanan	pengadaan Benih Ikan Kerapu Cantang dan Pakan Buatan utk Pokdakan Kerapu Belang	0,00	0,00	0,00	0,00	99.252.000,00	(100,00)
580	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Bawal Air Tawar, Ikan Nila dan Pakan Buatan (pelet) utk Pokdakan Harapan Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	187.494.000,00	(100,00)
581	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Kerapu Cantang dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Cahaya Kelong	0,00	0,00	0,00	0,00	94.172.000,00	(100,00)
582	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Gurami dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Berkah	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00	(100,00)
583	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Kerapu Cantang dan Pakan Buatan (Pelet) untuk Pokdakan Sumber Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	189.377.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
584	Dinas Perikanan	Pengadaan Keramba Ikan Air Tawar, Benih Ikan Nila, Benih Ikan Gurami dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Mina Sejahtera	0,00	0,00	0,00	0,00	75.628.000,00	(100,00)
585	Dinas Perikanan	Penataan Kolam utk Budidaya Ikan Air Tawar utk Pokdakan Harapan Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	185.929.700,00	(100,00)
586	Dinas Perikanan	Pembuatan Kolam Tanah utk Budidaya Ikan Air Tawar utk Pokdakan Sejahtera	0,00	0,00	0,00	0,00	164.339.938,00	(100,00)
587	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pakan Buatan (pelet) utk Pokdakan Sahabat Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00	187.236.000,00	(100,00)
588	Dinas Perikanan	Pengadaan Bak Fiber dan Atap Pendukung Unit Pembenihan Rakyat (UPR) utk Pokdakan Bintan Mina Sukses	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000.000,00	(100,00)
589	Dinas Perikanan	Pembuatan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) & Rumah Jaga utk Pokdakan Aur Kuning	0,00	0,00	0,00	0,00	98.711.000,00	(100,00)
590	Dinas Perikanan	Pembuatan Kolam Beton Uk. 6mx9m utk Pokdakan Jaya Bersama	0,00	0,00	0,00	0,00	108.322.000,00	(100,00)
591	Dinas Perikanan	Pembuatan Unit Atap dan Bak Tandon Air utk Pokdakan Jaya Bersama	0,00	0,00	0,00	0,00	49.982.397,00	(100,00)
592	Dinas Perikanan	Pekerjaan Pengadaan Benih Ikan Kerapu Cantang dan Pakan Buatan (Pelet) untuk Pokdakan Kelana	0,00	0,00	0,00	0,00	39.780.000,00	(100,00)
593	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Kerapu Cantang dan Pakan Buatan (pelet) utk Pokdakan Usaha Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00	134.179.200,00	(100,00)
594	Dinas Perikanan	Pengadaan Unit Media Pemeliharaan Budidaya Kepiting Bangkang utk Pokdakan Bahari Serantau	0,00	0,00	0,00	0,00	94.166.172,00	(100,00)
595	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Lele, Benih Gurami dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Gurami Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	57.571.300,00	(100,00)
596	Dinas Perikanan	Pembuatan Hacthery Skala Rumah Tangga (HSRT) utk Pokdakan Jaya Abadi	0,00	0,00	0,00	0,00	94.622.984,00	(100,00)
597	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Kepiting Bangkang dan Pakan Rucah utk Pokdakan Bahari Serantau	0,00	0,00	0,00	0,00	132.601.000,00	(100,00)
598	Dinas Perikanan	Pengadaan Keramba Apung Air Tawar utk Pokdakan Kec. SKL & Binut	0,00	0,00	0,00	0,00	197.280.600,00	(100,00)
599	Dinas Perikanan	Pengadaan Kolam Bioflok utk Pokdakan Kecamatan Toapaya	0,00	0,00	0,00	0,00	182.754.000,00	(100,00)
600	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Air Tawar utk Pokdakan Kec. SKL, Binut dan Kec. Toapaya	0,00	0,00	0,00	0,00	173.435.000,00	(100,00)
601	Dinas Perikanan	Pengadaan Pakan Ikan Air Tawar utk Pokdakan Kec. SKL, Binut dan Kec. Toapaya	0,00	0,00	0,00	0,00	196.802.000,00	(100,00)
602	Dinas Perikanan	Paket Budidaya Ikan Gurami dikolam	0,00	0,00	0,00	0,00	164.496.000,00	(100,00)
603	Dinas Perikanan	Paket Budidaya Ikan Hias	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	(100,00)
604	Dinas Perikanan	Paket Budaya Ikan Lele dikolam	0,00	0,00	0,00	0,00	211.990.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
605	Dinas Perikanan	Paket Budidaya Ikan Nila dikolam	0,00	0,00	0,00	0,00	54.367.500,00	(100,00)
606	Kec. Bintan Timur	Surau Pintu Hidayah	0,00	0,00	0,00	0,00	29.975.000,00	(100,00)
607	Kec. Bintan Timur	Tenda Kerucut dan Plafon 5x5 Kelurahan Sungai Lekop	0,00	0,00	0,00	0,00	45.870.000,00	(100,00)
608	Kec. Bintan Timur	Tenda Kerucut dan Plafon 5x5 Kel. Gunung Lengkuas	0,00	0,00	0,00	0,00	45.914.000,00	(100,00)
609	Kec. Bintan Timur	Mesjid Nurul Huda	0,00	0,00	0,00	0,00	69.960.000,00	(100,00)
610	Kec. Bintan Timur	Tenda Kerucut dan Plafon 5x5 Kel. Gunung Lengkuas	0,00	0,00	0,00	0,00	160.429.500,00	(100,00)
611	Kec. Bintan Utara	Pengadaan Alat	0,00	0,00	0,00	0,00	44.990.000,00	(100,00)
612	Kec. Bintan Utara	Mesin Potong Rumput Gendong	0,00	0,00	0,00	0,00	20.532.600,00	(100,00)
613	Kec. Bintan Utara	Kursi Plastik	0,00	0,00	0,00	0,00	44.946.000,00	(100,00)
614	Kec. Bintan Utara	Belanja Hibah Tenda Kerucut (5m x 5m)	0,00	0,00	0,00	0,00	125.070.000,00	(100,00)
615	Kec. Bintan Utara	Kursi Plastik	0,00	0,00	0,00	0,00	72.358.000,00	(100,00)
616	Kec. Bintan Utara	TPQ Madalwa	0,00	0,00	0,00	0,00	59.125.000,00	(100,00)
617	Kec. Bintan Utara	Sanggar Sang Nila Utama	0,00	0,00	0,00	0,00	197.868.000,00	(100,00)
618	Kec. Bintan Utara	Sanggar Minang Serumpun	0,00	0,00	0,00	0,00	48.338.400,00	(100,00)
619	Kec. Gunung Kijang	Sanggar Seni Krida Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00	16.437.300,00	(100,00)
620	Kec. Gunung Kijang	Karang Taruna Kecamatan Gunung Kijang	0,00	0,00	0,00	0,00	16.904.800,00	(100,00)
621	Kec. Gunung Kijang	Gereja Pantekosta	0,00	0,00	0,00	0,00	16.483.500,00	(100,00)
622	Kec. Gunung Kijang	Karang Taruna	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525.760,00	(100,00)
Jumlah			32.862.322.591,00	30.966.644.445,00	94,23	(1.895.678.146,00)	32.590.188.930,00	(4,98)

Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2022 sebesar Rp30.966.644.445,00 atau sebesar 94,23% dari anggaran sebesar Rp32.862.322.591,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.623.544.485,00 atau 4,98%.

Tabel 7.5.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Koperasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan	Koperasi Usaha Karya Sejahtera	0,00	0,00	0,00	0,00	221.200.000,00	(100,00)
Jumlah			0,00	0,00	0,00	0,00	221.200.000,00	(100,00)

Tidak terdapat Belanja Hibah Kepada Koperasi TA 2022. Belanja tersebut menurun jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp221.200.000,00 atau 100,00%.

Tabel 7.5.46 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	OPD	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Badan Pendidikan	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.212.252.149,00	2.187.250.597,00	98,87	(25.001.552,00)	0,00	100,00
Jumlah			2.212.252.149,00	2.187.250.597,00	98,87	(25.001.552,00)	0,00	100,00

Belanja Hibah Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta TA 2022 sebesar Rp2.187.250.597,00 atau sebesar 98,87% dari anggaran sebesar Rp2.212.252.149,00 Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.187.250.597,00 atau 100,00%.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 7.5.47 Anggaran dan Realisasi Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Ketua Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Bintan	164.711.701,00	164.711.701,00	100,00	0,00	164.711.701,00	0,00
2	Ketua Partai Demokrat (PD) Kabupaten Bintan	330.256.520,00	330.256.520,00	100,00	0,00	330.256.520,00	0,00
3	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bintan	55.690.734,00	55.690.734,00	100,00	0,00	55.690.734,00	0,00
4	Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bintan	55.348.942,00	55.348.942,00	100,00	0,00	55.348.942,00	0,00
5	Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bintan	28.347.374,00	28.347.374,00	100,00	0,00	28.347.374,00	0,00
6	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Bintan	24.801.282,00	24.801.282,00	100,00	0,00	24.801.282,00	0,00
7	Ketua Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kabupaten Bintan	88.225.060,00	88.225.060,00	100,00	0,00	88.225.060,00	0,00
Jumlah		747.381.613,00	747.381.613,00	100,00	0,00	747.381.613,00	0,00

Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2022 sebesar Rp747.381.613,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp747.381.613,00. Belanja tersebut tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp747.381.613,00 atau 0,00%.

7.5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan bentuk pemberian bantuan keuangan kepada individu/keluarga dan masyarakat. Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.48 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga	1.825.000.000,00	1.189.000.000,00	65,15	(636.000.000,00)	0,00	100,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	7.668.300.000,00	6.060.600.000,00	79,03	(1.607.700.000,00)	3.639.600.000,00	66,52
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00	300.000.000,00	0,00
Jumlah		9.793.300.000,00	7.549.600.000,00	77,09	(2.243.700.000,00)	3.939.600.000,00	91,63

Belanja Bantuan Sosial TA 2022 realisasi sebesar Rp7.549.600.000,00 atau sebesar 77,09% dari anggaran sebesar Rp9.793.300.000,00. Belanja tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp3.610.000.000,00 atau 91,63%.

Tabel 7.5.49 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Bantuan Sosial Tidak Terencana						
	- Bantuan Biaya Siswa	128.000.000,00	128.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	- Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1.082.000.000,00	1.061.000.000,00	98,06	(21.000.000,00)	0,00	100,00
Jumlah		1.210.000.000,00	1.189.000.000,00	98,26	(21.000.000,00)	0,00	100,00



Belanja Bansos kepada Individu dan/atau keluarga TA 2022 terealisasi sebesar Rp1.189.000.000,00 atau 98,26% dari anggaran sebesar Rp1.210.000.000,00.

Tabel 7.5.50 Anggaran dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	BLT Lansia	4.425.300.000,00	4.235.100.000,00	95,70	(190.200.000,00)	3.639.600.000,00	16,36
2	BLT BBM	3.243.000.000,00	1.825.500.000,00	56,29	(1.417.500.000,00)	0,00	100,00
Jumlah		7.668.300.000,00	6.060.600.000,00	79,03	(1.607.700.000,00)	3.639.600.000,00	66,52

Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga TA 2022 terealisasi sebesar Rp6.060.600.000,00 atau sebesar 79,03% dari anggaran sebesar Rp7.668.300.000,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.421.000.000,00 atau 66,52%.

Tabel 7.5.51 Anggaran dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Bantuan Sosial Kepada LKSA	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	200.000.000,00	0,00
2	Bantuan Sosial Kepada Forum Komunikasi Keluarga Penyandang Disabilitas (FKKPD)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	100.000.000,00	0,00
Jumlah		300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00	300.000.000,00	0,00

Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan TA 2022 terealisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp300.000.000,00.

7.5.1.2.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya. Anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.52 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Belanja Tanah	6.000.000.000,00	956.984.073,00	15,95	(5.043.015.927,00)	994.839.115,00	(3,81)
2	Belanja Peralatan dan Mesin	50.580.502.348,00	47.774.943.804,00	94,45	(2.805.558.544,00)	39.826.077.526,00	19,96
3	Belanja Gedung dan Bangunan	64.991.766.710,00	63.625.599.408,98	97,90	(1.366.167.301,02)	63.060.135.647,33	0,90
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.857.449.174,00	37.169.864.362,97	95,66	(1.687.584.811,03)	43.580.037.497,00	(14,71)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.521.606.701,00	1.483.878.197,00	97,52	(37.728.504,00)	1.954.288.040,00	(24,07)
6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	(100,00)
Jumlah		161.951.324.933,00	151.011.269.845,95	93,24	(10.940.055.087,05)	149.418.347.825,33	1,07

Realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp151.011.269.845,95 atau 93,24% dari anggaran sebesar Rp161.951.324.933,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.592.922.020,62 atau 1,07%.

**7.5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah**

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.53 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	6.000.000.000,00	956.984.073,00	15,95	(5.043.015.927,00)	994.839.115,00	(3,81)
	Jumlah	6.000.000.000,00	956.984.073,00	15,95	(5.043.015.927,00)	994.839.115,00	(3,81)

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 sebesar Rp956.984.073,00 atau 15,95% dari anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp37.855.042,00 atau 3,81%. Tahun 2022 ini melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Bintan kembali menganggarkan kegiatan pengadaan tanah namun sampai dengan saat ini masih belum terlaksana karena Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan belum juga mendapatkan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Appraisal yang bersedia untuk menilai; karena kondisi existing tanah-tanah masyarakat sudah menjadi bagian dari bangunan/genangan air embung hulu sungai bintan dan bahkan ada 1 (satu) tanah masyarakat yang semua tanahnya sudah menjadi genangan air embung hulu sungai bintan.

7.5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.54 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	14.018.484.824,00	13.922.292.989,00	99,31	(96.191.835,00)	15.018.141.296,00	(7,30)
2	Dinas Kesehatan	24.641.981.393,00	22.903.203.869,00	92,94	(1.738.777.524,00)	15.889.751.010,00	44,14
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	288.609.483,00	227.468.291,00	78,82	(61.141.192,00)	942.891.840,00	(75,88)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	390.446.239,00	390.260.260,00	99,95	(185.979,00)	85.877.000,00	354,44
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	309.748.400,00	(100,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	328.112.359,00	326.160.660,00	99,41	(1.951.699,00)	41.085.000,00	693,87
7	Dinas Sosial	106.292.622,00	106.045.871,00	99,77	(246.751,00)	72.286.500,00	46,70
8	Dinas Tenaga Kerja	30.000.000,00	29.958.900,00	99,86	(41.100,00)	18.189.600,00	64,70
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	552.617.722,00	492.318.044,00	89,09	(60.299.678,00)	276.331.920,00	78,16
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	77.900.000,00	71.737.584,00	92,09	(6.162.416,00)	2.570.000,00	2.691,35
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.891.817.505,00	1.774.418.633,00	93,79	(117.398.872,00)	534.580.800,00	231,93



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	982.354.000,00	652.529.200,00	66,43	(329.824.800,00)	343.360.688,00	90,04
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.000.000,00	9.657.000,00	64,38	(5.343.000,00)	20.460.000,00	(52,80)
14	Dinas Perhubungan	4.999.996,00	4.917.000,00	98,34	(82.996,00)	634.305.650,00	(99,22)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	377.307.724,00	303.684.500,00	80,49	(73.623.224,00)	221.551.000,00	37,07
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	462.985.064,00	462.290.000,00	99,85	(695.064,00)	65.000.000,00	611,22
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.790.000,00	38.744.550,00	99,88	(45.450,00)	0,00	100,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	52.976.248,00	52.946.808,00	99,94	(29.440,00)	84.095.000,00	(37,04)
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	126.791.250,00	126.161.440,00	99,50	(629.810,00)	93.225.000,00	35,33
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	145.700.920,00	144.999.300,00	99,52	(701.620,00)	298.650.000,00	(51,45)
21	Dinas Perikanan	66.660.000,00	66.338.800,00	99,52	(321.200,00)	272.454.420,00	(75,65)
22	Sekretariat Daerah	1.044.097.685,00	943.232.493,00	90,34	(100.865.192,00)	192.130.500,00	390,93
23	Inspektorat Daerah	43.979.004,00	29.507.800,00	67,10	(14.471.204,00)	20.519.400,00	43,80
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	288.317.542,00	286.457.700,00	99,35	(1.859.842,00)	89.958.000,00	218,43
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.029.574.267,00	956.929.720,00	92,94	(72.644.547,00)	987.746.700,00	(3,12)
26	Badan Pendapatan Daerah	239.219.000,00	237.112.650,00	99,12	(2.106.350,00)	360.495.000,00	(34,23)
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	52.481.000,00	(100,00)
28	Sekretariat DPRD	1.985.909.120,00	1.887.488.032,00	95,04	(98.421.088,00)	942.575.400,00	100,25
29	Kecamatan Bintan Utara	403.722.323,00	398.496.660,00	98,71	(5.225.663,00)	524.411.066,00	(24,01)
30	Kecamatan Bintan Pesisir	100.000.000,00	99.977.700,00	99,98	(22.300,00)	113.270.000,00	(11,74)
31	Kecamatan Tambelan	17.642.894,00	17.580.000,00	99,64	(62.894,00)	3.720.456,00	372,52
32	Kecamatan Mantang	136.000.000,00	135.968.800,00	99,98	(31.200,00)	317.896.700,00	(57,23)
33	Kecamatan Toapaya	266.529.667,00	265.963.850,00	99,79	(565.817,00)	100.137.000,00	165,60
34	Kecamatan Teluk Sebung	0,00	0,00	0,00	0,00	208.310.180,00	(100,00)
35	Kecamatan Teluk Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	470.112.500,00	(100,00)
36	Kecamatan Gunung Kijang	21.017.959,00	20.979.000,00	99,81	(38.959,00)	10.010.000,00	109,58
37	Kecamatan Bintan Timur	178.000.000,00	168.020.700,00	94,39	(9.979.300,00)	104.626.000,00	60,59
38	Kecamatan Seri Kuala Lobam	26.166.038,00	26.085.000,00	99,69	(81.038,00)	49.888.000,00	(47,71)
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	200.000.000,00	195.010.000,00	97,51	(4.990.000,00)	53.234.500,00	266,32
	Jumlah	50.580.002.848,00	47.774.943.804,00	94,45	(2.805.059.044,00)	39.826.077.526,00	19,96

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp50.580.002.848,00 atau 94,45% dari anggaran sebesar Rp50.580.002.848,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp7.948.866.278,00 atau 19,96%.

Realisasi Belanja Modal tersebut termasuk didalamnya Belanja Modal BLUD RSUD sebesar Rp1.555.711.326,00, Belanja Modal PPK-BLUD Puskesmas sebesar Rp168.058.525,00, Belanja Modal dari penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas non BLUD sebesar Rp392.643.984,00,00 dan Belanja Modal dari penggunaan Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp5.726.373.756,00.

7.5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.55 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	18.533.919.549,00	18.476.966.998,97	99,69	(56.952.550,03)	29.183.650.652,00	(36,69)
2	Dinas Kesehatan	10.490.730.590,00	10.214.415.927,00	97,37	(276.314.663,00)	11.573.826.963,00	(11,75)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	23.871.780.000,00	23.694.723.386,60	99,26	(177.056.613,40)	8.163.255.080,00	190,26
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.598.414.406,00	7.400.427.790,41	97,39	(197.986.615,59)	3.275.209.599,00	125,95
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	875.202.194,00	732.999.500,00	83,75	(142.202.694,00)	604.060.345,00	21,35
6	Dinas Lingkungan Hidup	70.000.000,00	69.384.500,00	99,12	(615.500,00)	707.481.712,33	(90,19)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	199.017.500,00	(100,00)
8	Dinas Perhubungan	215.000.001,00	214.649.445,00	99,84	(350.556,00)	6.844.477.840,00	(96,86)
9	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1.029.136.140,00	773.629.821,00	75,17	(255.506.319,00)	0,00	100,00
10	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	705.943.830,00	700.616.698,00	99,25	(5.327.132,00)	591.470.095,00	18,45
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.033.500.000,00	951.579.684,00	92,07	(81.920.316,00)	97.053.000,00	880,47
12	Sekretariat DPRD	217.640.000,00	194.702.598,00	89,46	(22.937.402,00)	261.804.440,00	(25,63)
13	Kecamatan Bintan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	370.084.000,00	(100,00)
14	Kecamatan Toapaya	85.500.000,00	56.998.819,00	66,67	(28.501.181,00)	189.944.092,00	(69,99)
15	Kecamatan Teluk Sebong	70.000.000,00	69.511.200,00	99,30	(488.800,00)	0,00	100,00
16	Kecamatan Teluk Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	74.822.000,00	(100,00)
17	Kecamatan Bintan Timur	195.000.000,00	74.993.041,00	38,46	(120.006.959,00)	899.395.529,00	(91,66)
18	Kecamatan Seri Kuala Lobam	0,00	0,00	0,00	0,00	24.582.800,00	(100,00)
Jumlah		64.991.766.710,00	63.625.599.408,98	97,90	(1.366.167.301,02)	63.060.135.647,33	0,90

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp63.625.599.408,98 atau 92,02% dari anggaran sebesar Rp64.991.766.710,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp565.463.761,65 atau 0,90%.

Realisasi Belanja Modal tersebut termasuk didalamnya Belanja Modal BLUD RSUD Belanja Modal BLUD RSUD sebesar Rp464.70.719,00, Belanja Modal PPK-BLUD Puskesmas sebesar Rp15.534.450,00, Belanja Modal dari penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas non BLUD sebesar Rp5.982.900,00.

7.5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 7.5.56 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	51.905.894,00	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	1.613.632.000,00	1.512.535.490,00	93,73	(101.096.510,00)	49.995.000,00	2.925,37
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	21.660.950.250,00	20.826.862.338,97	96,15	(834.087.911,03)	25.513.797.733,00	(18,37)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	12.462.055.180,00	12.429.564.114,00	99,74	(32.491.066,00)	13.503.035.500,00	(7,95)
5	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	54.837.750,00	(100,00)
6	Dinas Perhubungan	12.000.000,00	11.954.900,00	99,62	(45.100,00)	0,00	100,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	987.107.084,00	868.506.294,00	87,99	(118.600.790,00)	0,00	100,00
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	179.319.000,00	179.166.500,00	99,91	(152.500,00)	76.395.000,00	134,53
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	197.450.000,00	(100,00)
10	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100.000,00	(100,00)
11	Kecamatan Bintan Utara	170.000.000,00	169.945.510,00	99,97	(54.490,00)	1.284.558.000,00	(86,77)
12	Kecamatan Tambelan	6.815.976,00	6.806.520,00	99,86	(9.456,00)	0,00	100,00
13	Kecamatan Toapaya	147.000.000,00	146.993.568,00	100,00	(6.432,00)	464.847.885,00	(68,38)
14	Kecamatan Teluk Sebong	197.162.480,00	196.868.323,00	99,85	(294.157,00)	780.285.520,00	(74,77)
15	Kecamatan Teluk Bintan	126.407.204,00	126.251.000,00	99,88	(156.204,00)	180.000.000,00	(29,86)
16	Kecamatan Gunung Kijang	150.000.000,00	149.903.016,00	99,94	(96.984,00)	0,00	100,00
17	Kecamatan Bintan Timur	835.000.000,00	234.837.850,00	28,12	(600.162.150,00)	1.323.829.215,00	(82,26)
18	Kecamatan Seri Kuala Lobam	310.000.000,00	309.668.939,00	99,89	(331.061,00)	0,00	100,00
Jumlah		38.857.449.174,00	37.169.864.362,97	95,66	(1.687.584.811,03)	43.580.037.497,00	(14,71)

Realisasi Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2022 sebesar Rp37.169.864.362,97,00 atau 95,66% dari anggaran sebesar Rp38.857.449.174,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp6.410.173.134,03,00 atau 14,71%.

7.5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, bukubuku, dan jurnal ilmiah Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.57 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	1.361.306.922,00	1.324.092.397,00	97,27	(37.214.525,00)	1.702.897.040,00	(22,24)
2	Dinas Kesehatan	6.065.055,00	6.049.500,00	99,74	(15.555,00)	53.600.000,00	(88,71)
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	183.535.000,00	(100,00)
4	Dinas Perhubungan	31.118.864,00	30.946.800,00	99,45	(172.064,00)	0,00	100,00
5	Dinas Komunikasi dan Informasi	24.615.360,00	24.550.000,00	99,73	(65.360,00)	0,00	100,00
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	44.000.000,00	43.789.500,00	99,52	(210.500,00)	0,00	100,00



No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
7	Kecamatan Tambelan	0,00	0,00	0,00	0,00	14.256.000,00	(100,00)
8	Kecamatan Toapaya	55.000.000,00	54.450.000,00	99,00	(550.000,00)	0,00	100,00
	Jumlah	1.522.106.201,00	1.483.878.197,00	97,49	(38.228.004,00)	1.954.288.040,00	(24,07)

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp1.483.878.197,00 atau 97,49% dari anggaran sebesar Rp1.522.106.201,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp470.409.843,00 atau 24,07%.

Realisasi Belanja Modal tersebut termasuk didalamnya Belanja Modal PPK-BLUD Puskesmas Teluk Sasah sebesar Rp5.550.000,00 dan Belanja Modal dari penggunaan Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp1.324.092.397,00.

7.5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja modal aset lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Aplikasi berbentuk *software*. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.58 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	(100,00)
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	(100,00)

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2022. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.970.000,00 atau 100,00%.

Tabel 7.5.59 Jaminan Pemeliharaan Kegiatan Fisik Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	OPD	Jaminan Pemeliharaan 2022 (Rp)	Jaminan Pemeliharaan 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	247.188.938,00	1.571.413.177,50
2	Dinas Kesehatan	124.100.189,00	512.850.329,85
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	1.228.373.019,39	1.180.590.275,61
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.094.180.339,82	1.648.478.304,00
5	Dinas Perhubungan	59.288.145,65	290.686.619,00
6	Dinas Pariwisata	54.470.379,00	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	19.420.686,00
8	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	25.488.253,00	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	31.200.650,00	0,00
	Jumlah	3.864.289.913,86	5.223.439.391,96

Jumlah nilai retensi Jaminan Pemeliharaan kegiatan fisik TA. 2022 yang bersumber dari belanja modal terdapat pada sembilan SKPD pada TA 2022 sebesar Rp3.864.289.913,86. Nilai tersebut meningkat dibandingkan dengan TA. 2021 sebesar Rp1.359.149.478,10 dari Realisasi 2021 sebesar Rp5.223.439.391,96.

7.5.1.2.3 BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Anggaran dan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.60 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Belanja Tidak Terduga	5.483.017.521,00	1.074.996.083,00	19,61	(4.408.021.438,00)	5.674.118.343,00	(81,05)
	Jumlah	5.483.017.521,00	1.074.996.083,00	19,61	(4.408.021.438,00)	5.674.118.343,00	(81,05)

Adapun rincian belanja tidak terduga per OPD Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 7.5.61 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.483.017.521,00	1.074.996.083,00	19,61	(4.408.021.438,00)	5.674.118.343,00	(81,05)
	Jumlah	5.483.017.521,00	1.074.996.083,00	19,61	(4.408.021.438,00)	5.674.118.343,00	(81,05)

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 sebesar Rp1.074.996.083,00 atau 19,61% dari anggaran sebesar Rp5.483.017.521,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp4.599.122.260,00 atau 81,05%. Pada Tahun 2022 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah namun pengelolaan belanja tersebut dilaksanakan oleh BKAD, BPBD dan Dinas Sosial. Belanja tak terduga terdiri dari bantuan sosial tidak terencana korban bencana alam Rp54.329.500,00, bantuan pengobatan masyarakat tidak mampu Rp100.029.663,00, bantuan penanganan Covid-19 Rp211.624.260,00, bantuan musibah meninggal dunia Rp539.500.000,00, pengembalian atas kesalahan setoran bendahara BKAD Rp4.363.160,00, dan pengembalian dana BOS ke rekening kas Negara Rp165.149.500,00.

7.5.1.2.4 BELANJA TRANSFER

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Anggaran dan realisasi Belanja Transfer TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.62 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Belanja Bagi Hasil – LRA	17.316.296.600,00	17.316.296.600,00	100,00	0,00	15.285.365.800,00	13,29
2	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota Daerah Provinsi – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa – LRA	84.979.993.300,00	84.867.913.933,00	99,87	(112.079.367,00)	92.996.547.466,00	(8,74)
	Jumlah	102.296.289.900,00	102.184.210.533,00	99,89	(112.079.367,00)	108.281.913.266,00	(5,63)

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Transfer TA 2022 sebesar Rp102.296.289.900,00 terealisasi sebesar Rp102.184.210.533,00 atau 99,89%. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp6.097.702.733,00 atau 5,63%.

7.5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil – LRA

Anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil – LRA TA 2022 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 7.5.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil - LRA
 Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa- LRA	16.229.754.600,00	16.229.754.600,00	100,00	0,00	14.428.578.300,00	12,48
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa - LRA	1.086.542.000,00	1.086.542.000,00	100,00	0,00	856.787.500,00	26,82
Jumlah		17.316.296.600,00	17.316.296.600,00	100,00	0,00	15.285.365.800,00	13,29

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bagi Hasil TA 2022 sebesar Rp17.316.296.600.000,00 terealisasi sebesar Rp17.316.296.600,00 atau 100,00%. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.030.930.800,00 atau 13,29%.

7.5.1.2.4.1.1 Belanja Bagi Hasil Pajak – LRA

Anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak per Desa TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.64 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Per Desa - LRA
 Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Gunung Kijang	Gunung Kijang	1.438.527.000,00	1.438.527.000,00	100,00	0,00	469.884.000,00	206,15
2	Gunung Kijang	Malang Rapat	484.702.000,00	484.702.000,00	100,00	0,00	464.722.000,00	4,30
3	Gunung Kijang	Teluk Bakau	584.805.000,00	584.805.000,00	100,00	0,00	482.147.000,00	21,29
4	Bintan Utara	Lancang Kuning	286.147.000,00	286.147.000,00	100,00	0,00	375.363.000,00	(23,77)
5	Teluk Bintan	Bintan Buyu	347.363.000,00	347.363.000,00	100,00	0,00	450.774.000,00	(22,94)
6	Teluk Bintan	Pangkil	270.543.000,00	270.543.000,00	100,00	0,00	385.591.000,00	(29,84)
7	Teluk Bintan	Penaga	297.118.000,00	297.118.000,00	100,00	0,00	415.680.000,00	(28,52)
8	Teluk Bintan	Pengujan	275.122.000,00	275.122.000,00	100,00	0,00	379.273.000,00	(27,46)
9	Teluk Bintan	Tembeling	288.943.000,00	288.943.000,00	100,00	0,00	420.496.000,00	(31,29)
10	Tambelan	Batu Lepuk	270.496.000,00	270.496.000,00	100,00	0,00	281.273.000,00	(3,83)
11	Tambelan	Kampung Hilir	270.496.000,00	270.496.000,00	100,00	0,00	349.562.000,00	(22,62)
12	Tambelan	Kampung Melayu	270.496.000,00	270.496.000,00	100,00	0,00	284.990.000,00	(5,09)
13	Tambelan	Pulau Mentebung	270.496.000,00	270.496.000,00	100,00	0,00	263.819.000,00	2,53
14	Tambelan	Pulau Pinang	270.496.000,00	270.496.000,00	100,00	0,00	262.562.000,00	3,02
15	Tambelan	Kukup	270.496.000,00	270.496.000,00	100,00	0,00	263.593.000,00	2,62
16	Tambelan	Pengikik	270.496.000,00	270.496.000,00	100,00	0,00	261.677.000,00	3,37
17	Telok Sebong	Berakit	310.475.000,00	310.475.000,00	100,00	0,00	428.028.000,00	(27,46)
18	Telok Sebong	Ekan Aculai	288.892.000,00	288.892.000,00	100,00	0,00	485.560.000,00	(40,50)
19	Telok Sebong	Pengudang	297.830.000,00	297.830.000,00	100,00	0,00	396.806.000,00	(24,94)
20	Telok Sebong	Sebong Lagoi	3.427.058.000,00	3.427.058.000,00	100,00	0,00	535.787.000,00	539,63
21	Telok Sebong	Sebong Pereh	291.825.000,00	291.825.000,00	100,00	0,00	503.286.000,00	(42,02)
22	Telok Sebong	Sri Bintan	327.021.000,00	327.021.000,00	100,00	0,00	518.033.000,00	(36,87)
23	Toapaya	Toapaya	275.291.000,00	275.291.000,00	100,00	0,00	404.893.000,00	(32,01)
24	Toapaya	Toapaya Utara	285.500.000,00	285.500.000,00	100,00	0,00	462.558.000,00	(38,28)
25	Toapaya	Toapaya Selatan	755.833.000,00	755.833.000,00	100,00	0,00	470.648.000,00	60,59
26	Mantang	Mantang Baru	270.496.000,00	270.496.000,00	100,00	0,00	389.416.000,00	(30,54)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
27	Mantang	Mantang Besar	999.937.000,00	999.937.000,00	100,00	0,00	432.016.000,00	131,46
28	Mantang	Mantang Lama	270.958.000,00	270.958.000,00	100,00	0,00	281.061.000,00	(3,59)
29	Mantang	Dendun	271.768.000,00	271.768.000,00	100,00	0,00	343.425.000,00	(20,87)
30	Bintan Pesisir	Kelong	279.311.000,00	279.311.000,00	100,00	0,00	430.454.000,00	(35,11)
31	Bintan Pesisir	Mapur	270.579.000,00	270.579.000,00	100,00	0,00	316.005.000,00	(14,38)
32	Bintan Pesisir	Numbing	270.657.000,00	270.657.000,00	100,00	0,00	481.731.000,00	(43,82)
33	Bintan Pesisir	Air Gelubi	299.861.000,00	299.861.000,00	100,00	0,00	366.075.800,00	(18,09)
34	Seri Kuala Lobam	Busung	274.038.000,00	274.038.000,00	100,00	0,00	413.875.000,00	(33,79)
35	Seri Kuala Lobam	Teluk Sasah	307.890.000,00	307.890.000,00	100,00	0,00	517.964.000,00	(40,56)
36	Seri Kuala Lobam	Kuala Sempang	287.792.600,00	287.792.600,00	100,00	0,00	439.550.500,00	(34,53)
Jumlah			16.229.754.600,00	16.229.754.600,00	100,00	0,00	14.428.578.300,00	12,48

Belanja bagi hasil pajak adalah belanja yang diberikan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Bintan dengan mekanisme perhitungan: 1) 60% dibagi secara rata kepada 36 desa dan 2) 40% dibagi kepada desa dengan penyumbang pendapatan terbesar. Pada TA 2022, terdapat 2 (dua) desa dengan kenaikan signifikan yaitu, desa Gunung Kijang sebesar 206,15% dan Sebung Lagoi sebesar 539,63%. Kenaikan signifikan disebabkan karena kedua desa tersebut merupakan kawasan objek wisata sehingga berkontribusi memberikan pendapatan terbesar.

7.5.1.2.4.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi – LRA

Anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi per Desa TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.65 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Per Desa - LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Gunung Kijang	Gunung Kijang	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	26.978.000,00	11,88
2	Gunung Kijang	Malang Rapat	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	26.716.000,00	12,97
3	Gunung Kijang	Teluk Bakau	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	28.008.000,00	7,76
4	Bintan Utara	Lancang Kuning	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	21.159.000,00	42,64
5	Teluk Bintan	Bintan Buyu	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	27.129.000,00	11,25
6	Teluk Bintan	Pangkil	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	21.615.000,00	39,63
7	Teluk Bintan	Penaga	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	23.410.000,00	28,93
8	Teluk Bintan	Pengujan	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	21.234.000,00	42,14
9	Teluk Bintan	Tembeling	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	21.905.000,00	37,79
10	Tambelan	Batu Lepuk	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	16.980.000,00	77,75
11	Tambelan	Kampung Hilir	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	28.105.000,00	7,39
12	Tambelan	Kampung Melayu	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	17.076.000,00	76,75
13	Tambelan	Pulau Mentebung	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	15.785.000,00	91,21
14	Tambelan	Pulau Pinang	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	15.737.000,00	91,79
15	Tambelan	Kukup	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	17.211.000,00	75,36
16	Tambelan	Pengikik	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	15.614.000,00	93,30
17	Telok Sebung	Berakit	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	25.847.000,00	16,77



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
18	Telok Sebong	E Kang Anculai	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	25.606.000,00	17,87
19	Telok Sebong	Pengudang	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	23.925.000,00	26,15
20	Telok Sebong	Sebong Lagoi	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	32.213.000,00	(6,30)
21	Telok Sebong	Sebong Pereh	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	30.113.000,00	0,23
22	Telok Sebong	Sri Bintan	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	31.541.000,00	(4,31)
23	Toapaya	Toapaya	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	24.289.000,00	24,26
24	Toapaya	Toapaya Utara	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	24.240.000,00	24,51
25	Toapaya	Toapaya Selatan	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	28.245.000,00	6,86
26	Mantang	Mantang Baru	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	21.446.000,00	40,73
27	Mantang	Mantang Besar	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	26.007.000,00	16,05
28	Mantang	Mantang Lama	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	16.962.000,00	77,94
29	Mantang	Dendun	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	20.670.000,00	46,02
30	Bintan Pesisir	Kelong	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	25.980.000,00	16,17
31	Bintan Pesisir	Mapur	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	19.088.000,00	58,12
32	Bintan Pesisir	Numbing	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	31.890.000,00	(5,36)
33	Bintan Pesisir	Air Gelubi	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	21.797.000,00	38,47
34	Seri Kuala Lobam	Busung	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	24.719.000,00	22,10
35	Seri Kuala Lobam	Teluk Sasah	30.182.000,00	30.182.000,00	100,00	0,00	31.052.000,00	(2,80)
36	Seri Kuala Lobam	Kuala Sempang	30.172.000,00	30.172.000,00	100,00	0,00	26.495.500,00	13,88
Jumlah			1.086.542.000,00	1.086.542.000,00	100,00	0,00	856.787.500,00	26,82

7.5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan – LRA

Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.66 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa – LRA	84.979.993.300,00	84.867.913.933,00	99,87	(112.079.367,00)	92.996.547.466,00	(8,74)
Jumlah		84.979.993.300,00	84.867.913.933,00	99,87	(112.079.367,00)	92.996.547.466,00	(8,74)

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2022 sebesar Rp84.979.993.300,00 terealisasi sebesar Rp84.867.913.933,00 atau 99,87%. Belanja tersebut menurun jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp8.128.633.533,00 atau 8,74%. Belanja bantuan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bintan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan kepada 36 Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa di Kabupaten Bintan. Dari realisasi Rp84.867.913.933,00 yang terdiri dari Dana Desa yang pengalokasiannya dihitung dari Pemerintah Pusat dan langsung ditransfer ke Rekening Desa dengan anggaran sebesar Rp28.338.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp28.226.109.120,00 serta Alokasi Dana Desa yang pengalokasiannya dihitung oleh Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar 10% dari Dana Transfer Pusat dengan anggaran sebesar Rp56.641.843.300,00 dan terealisasi sebesar Rp56.641.804.813,00.

7.5.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal antara lain dari pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bintan meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Anggaran dan realisasi Pembiayaan TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.67 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Penerimaan Pembiayaan	136.783.533.519,00	136.780.420.359,09	100,00	(3.113.159,91)	149.093.793.369,68	(8,26)
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	136.783.533.519,00	136.780.420.359,09	100,00	(3.113.159,91)	147.493.793.369,68	(7,26)

Tabel di atas menunjukkan Realisasi Pembiayaan *Netto* TA 2022 sebesar Rp136.780.420.359,09 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp136.783.533.519,00. Pengeluaran pembiayaan pada umumnya digunakan untuk penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan, penyertaan modal kepada BPR dilakukan mulai dari TA 2017 sampai dengan 2021, sehingga pada TA 2022 tidak dianggarkan. Pembiayaan *Netto* menurun dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp10.713.373.010,59 atau 7,26%.

7.5.1.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) tahun lalu. Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.68 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2021 (Rp)	Tren
1	Penggunaan SILPA Tahun lalu	136.783.533.519,00	136.779.170.359,09	100,00	(4.363.159,91)	149.088.793.369,68	(8,26)
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	5.000.000,00	(75,00)
	Jumlah	136.783.533.519,00	136.780.420.359,09	100,00	(3.113.159,91)	149.093.793.369,68	(8,26)

Tabel di atas menunjukkan realisasi Penggunaan SILPA APBD Tahun 2022 sebesar Rp136.779.170.359,09 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp136.783.533.519 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp1.250.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 menurun sebesar Rp12.313.373.010,59 atau 8,26%. Anggaran penggunaan SILPA Tahun lalu berbeda dengan SILPA *Audited* Tahun Lalu disebabkan karena pada tahun 2021 terdapat kewajiban atas retribusi IMTA dan IMB yang harus disetor ke Kas Negara sebesar Rp619.117.500,00 sesuai dengan Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ Tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing tanggal 21 Oktober 2021 serta kewajiban atas kesalahan setor Bendahara Pengeluaran BKAD sebesar Rp4.363.160,00. Sedangkan berbeda dengan realisasi dikarenakan sesuai dengan Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/33233/Keuda tentang Penjelasan Pemungutan Retribusi IMB dan IMTA Tahun 2021 Tentang 16 November 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

bahwa kewajiban atas retribusi IMB dan IMTA tidak perlu dilakukan pengembalian kepada kas negara dan diakui sebagai penerimaan daerah.

7.5.1.3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran yang penggunaannya antara lain untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Tidak terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan APBD TA 2022. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 menurun sebesar Rp1.600.000.000,00 atau 100,00%.

7.5.1.4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SILPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. Dalam TA 2022 realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah sebesar Rp163.448.168.531,26 di jelaskan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 7.5.69 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	APBD (Rp)	Dana Kapitasi (Rp)	BLUD (Rp)	Dana BOS (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Daerah	1.098.542.695.604,19	2.474.220.896,00	25.467.022.594,00	34.714.606.869,38	1.161.198.545.963,57
2	Belanja Daerah	1.064.068.843.041,47	2.614.242.712,00	32.411.680.637,00	35.435.849.400,93	1.134.530.797.791,40
3	Surplus (Defisit) : 1-2	34.473.852.562,72	(140.021.816,00)	(6.944.658.043,00)	(721.242.531,55)	26.667.748.172,17
4	Penerimaan Pembiayaan	136.780.420.359,09	0,00	0,00	0,00	136.780.420.359,09
5	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pembiayaan Netto : 4-5	136.780.420.359,09	0,00	0,00	0,00	136.780.420.359,09
	SILPA (SIKPA) : 3+6	171.254.272.921,81	(140.021.816,00)	(6.944.658.043,00)	(721.242.531,55)	163.448.168.531,26

**7.5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

Laporan Perubahan-SAL adalah untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah sebagai berikut.

7.5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2022 sebesar Rp136.160.052.859,29

7.5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2022 Penggunaan SAL tersebut yang merupakan Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp136.779.170.359,09.

7.5.2.3 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan, yaitu:

- Surplus/Defisit Anggaran	Rp 26.667.748.172,17
- Pembiayaan <i>Netto</i>	<u>Rp136.780.420.359,09</u>
SiLPA Tahun berjalan	Rp163.448.168.531,26

SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp163.448.168.531,26 atau meningkat sebesar 20.04% yaitu sebesar Rp27.288.115.671,97 dari Tahun 2021 sebesar Rp136.160.052.859,29.

7.5.2.4 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk Tahun 2022 terdapat koreksi sebesar Rp619.117.499,80, sedangkan pada tahun 2021 tidak terdapat kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

7.5.2.5 KOREKSI PENAMBAHAN SALDO KAS PADA BLUD

Tidak terdapat Koreksi Penambahan saldo kas pada BLUD pada Tahun 2022 dan pada tahun 2021.

7.5.2.6 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Akhir diperoleh dengan terlebih dahulu memperhitungkan Surplus/Defisit dan SiLPA/SiKPA. Surplus/Defisit tersebut diperoleh dari realisasi Pendapatan dikurangi realisasi Belanja selama 1 (satu) periode pelaporan.



SiLPA TA 2022 merupakan jumlah Kas Daerah per 31 Desember 2022 yang berada pada Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara BLUD, Dana BOS, Dana Kapitasi pada FKTP dan Kas Lainnya pada Bendahara Pengeluaran serta dikurangi Utang PFK pada Bendahara Umum Daerah yang belum disetor pada akhir TA 2022 dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Kabupaten Bintan TA 2022 sebesar Rp163.448.168.531,26. Saldo tersebut terdiri dari:

Tabel 7.5.70 Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)
1	Kas	
A	Kas di Kas Daerah	53.368.218.970,28
B	Kas di Bendahara Penerimaan	80.000,00
C	Kas di Bendahara Pengeluaran	18.805,00
D	Kas di Bendahara BLUD	5.991.828.655,47
E	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	189.890.788,00
F	Kas Dana BOS	898.131.312,51
G	Setara Kas	103.000.000.000,00
Jumlah Kas		163.448.168.531,26
2	Utang	0,00
A	Utang PFK BUD	0,00
Jumlah Utang		0,00
Jumlah (1 – 2)		163.448.168.531,26

**7.5.3 NERACA****7.5.3.1 ASET LANCAR**

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp249.497.888.296,85 terdiri dari Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 7.5.71 Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	%
Kas dan Setara Kas	163.448.168.531,26	136.783.533.519,09	19,49
Piutang	61.048.829.108,59	55.942.434.008,63	9,13
Belanja Dibayar Dimuka	124.125.500,00	165.587.500,00	(25,04)
Persediaan	23.798.626.309,00	27.806.798.242,99	(14,41)
Jumlah	248.419.749.448,85	220.698.353.270,71	12,56

7.5.3.1.1 Kas dan Setara Kas

Pos ini menunjukkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), Bendahara FKTP Puskesmas Non BLUD, Bendahara BLUD RSUD, BLUD Dana Bergulir, BLUD Puskesmas, Bendahara pada OPD, serta Bendahara Dana BOS SD dan SMP baik berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank.

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp163.448.168.531,26 atau naik sebesar 26.664.635.012,17 atau 19,49% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp136.783.533.519,09 sebagai berikut.

Tabel 7.5.72 Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	%
1	Kas di Kas Daerah	53.368.218.970,28	122.218.026.235,56	(56,33)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	18.805,00	983.581,00	(98,09)
3	Kas di Bendahara Penerimaan	80.000,00	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	5.991.828.655,47	12.940.786.698,47	(53,70)
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	189.890.788,00	0,00	100,00
6	Kas Dana BOS	898.131.312,51	1.619.373.844,06	(44,54)
7	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	4.363.160,00	(100,00)
8	Setara kas	103.000.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	163.448.168.531,26	136.783.533.519,09	19,49

Adapun rincian saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021, dapat disajikan sebagai berikut.

7.5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Pos ini menunjukkan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Saldo Kas dan Setara



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.368.218.970,28 atau turun sebesar Rp68.849.807.265,28 atau 56,33% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp122.218.026.235,56. Penurunan dikarenakan reklasifikasi kas rekening puskesmas non BLUD ke kas dana kapitasi pada FKTP. Adapun rincian kas di kas daerah sebagai berikut.

Tabel 7.5.73 Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	%
a.	Rekening Kas Daerah			
	- Bank Riau Kepri No Rek. 135.02.01010	53.368.218.970,28	121.893.481.631,56	(56,22)
	Jumlah a	53.368.218.970,28	121.893.481.631,56	(56,22)
b.	Rekening Puskesmas Non BLUD			
	Berakit (BNI No. Rek. 0471361776)	0,00	28.044.189,00	(100,00)
	Toapaya (BNI No. Rek. 0469397752)	0,00	25.409.878,00	(100,00)
	Sei Lekop (BNI No. Rek. 0466657761)	0,00	43.389.731,00	(100,00)
	Kelong (BNI No. Rek. 0469795979)	0,00	3.734.307,00	(100,00)
	Teluk Bintan (BNI No. Rek. 046967507)	0,00	29.408.245,00	(100,00)
	Sri Bintan (BNI No. Rek. 0469458967)	0,00	33.687.847,00	(100,00)
	Tambelan (BNI No. Rek. 0476538366)	0,00	1.449.278,00	(100,00)
	Kuala Sempang (BNI No. Rek. 0469679667)	0,00	89.065.696,00	(100,00)
	Mantang (BNI No. Rek. 0466643453)	0,00	70.355.433,00	(100,00)
	Jumlah b	0,00	324.544.604,00	(100,00)
	Jumlah a+b	53.368.218.970,28	122.218.026.235,56	(56,33)

7.5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.805,00 atau turun sebesar Rp964.776,00 atau 98,09% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp983.581,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.74 Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	%
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	983.581,00	(100,00)
2	Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan	14.563,00	0,00	100,00
3	Kecamatan Gunung Kijang	483,00	0,00	100,00
4	Kelurahan Toapaya Asri	1.067,00	0,00	100,00
5	Kelurahan Teluk Sekuni	2.692,00	0,00	100,00
	Jumlah	18.805,00	983.581,00	(98,09)

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 sebesar Rp18.805,00 merupakan kas di bendahara pengeluaran pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Pembinaan PAUD dan dan Pendidikan Non Formal, Kecamatan Gunung Kijang, Kelurahan Toapaya Asri dan Kelurahan Teluk Sekuni yang merupakan jasa giro bendahara yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.

7.5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp80.000,00.

**Tabel 7.5.75 Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	%
Puskesmas Toapaya	60.000,00	0,00	100,00
Puskesmas Sri Bintan	20.000,00	0,00	100,00
Jumlah	80.000,00	0,00	100,00

7.5.3.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD

Saldo Kas BLUD adalah kas tunai dan di rekening giro bank yang berada pada BLUD Puskesmas, BLUD RSUD, dan BLUD Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.991.828.655,47 atau menurun sebesar Rp6.948.958.043,00 atau sekitar 53,70% dari saldo kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.940.786.698,47 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.76 Kas di Bendahara BLUD pada Kas Tunai dan Rekening BLUD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	%
a. BLUD Puskesmas			
- Teluk Sebong No. Rek. 146.20.00097 dan Kas Tunai	68.762.633,00	57.405.452,00	19,78
- Kawal No. Rek. 0471363003	108.728.384,00	13.305.642,00	717,16
- Kijang No. Rek. 0469647342	97.890.126,00	81.990.897,00	19,39
- Tanjung Uban No. Rek. 146.20.00312 dan Kas Tunai	125.295.212,00	21.457.889,00	483,91
- Teluk Sasah No. Rek. 146.20.00313 dan Kas Tunai	43.446.251,00	35.565.555,00	22,16
Jumlah a	444.122.606,00	209.725.435,00	111,76
b. BLUD RSUD No. Rek. 135.20.00046	2.147.681.406,00	9.399.389.561,00	(77,15)
c. BLUD Dana Bergulir			
- Bank Riau Kepri No. Rek. 135.02.00013	3.091.651.600,47	3.029.088.528,47	2,07
- BPR Bintan No. Rek. 00101000408	308.373.043,00	302.583.174,00	1,91
Jumlah c	3.400.024.643,47	3.331.671.702,47	2,05
Jumlah a+b+c	5.991.828.655,47	12.940.786.698,47	(53,70)

Saldo Kas Tunai pada Kas BLUD sebesar Rp1.886.000,00 terdiri dari Rp200.000,00 pada Puskesmas Teluk Sasah, Rp1.130.000,00 pada Puskesmas Tanjung Uban dan Rp556.000,00 pada Puskesmas Teluk Sebong.

7.5.3.1.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp189.890.788,00 mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun 2022 kas rekening puskesmas non BLUD tidak lagi diakui pada kas di kas daerah tetapi diakui di kas dana kapitasi pada FKTP. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 7.5.77 Kas Dana Kapitasi pada FKTP Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	%
1	Berakit (BNI No. Rek. 0471361776)	38.870.959,00	0,00	100,00
2	Toapaya (BNI No. Rek. 0469397752)	25.441.529,00	0,00	100,00
3	Sei Lekop (BNI No. Rek. 0466657761)	38.144.577,00	0,00	100,00
4	Kelong (BNI No. Rek. 0469795979)	31.575.419,00	0,00	100,00



No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	%
5	Teluk Bintang (BNI No. Rek. 046967507)	20.435,00	0,00	100,00
6	Sri Bintang (BNI No. Rek. 0469458967)	36.722.702,00	0,00	100,00
7	Tambelan (BNI No. Rek. 0476538366)	16.695.953,00	0,00	100,00
8	Kuala Sempang (BNI No. Rek. 0469679667)	1.672.694,00	0,00	100,00
9	Mantang (BNI No. Rek. 0466643453)	746.520,00	0,00	100,00
Jumlah		189.890.788,00	0,00	100,00

7.5.3.1.1.6 Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana BOS termasuk di dalamnya saldo kas dana BOS yang berada pada SD Negeri dan SMP Negeri pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp898.131.312,51 atau menurun sebesar Rp721.242.531,55 atau sekitar 44,54% dari saldo kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.619.373.844,06 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.78 Kas Dana BOS Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	%
I. SEKOLAH DASAR (SD)				
1	SD Negeri 001 Bintang Pesisir	7.106.470,36	15.345.867,36	(53,69)
2	SD Negeri 002 Bintang Pesisir	7.808.001,57	4.813.661,57	62,21
3	SD Negeri 003 Bintang Pesisir	2.587.031,22	8.940.531,22	(71,06)
4	SD Negeri 004 Bintang Pesisir	2.339.528,38	502.828,38	365,27
5	SD Negeri 005 Bintang Pesisir	4.669,51	2.739.709,51	(99,83)
6	SD Negeri 006 Bintang Pesisir	2.865.415,36	8.770.715,36	(67,33)
7	SD Negeri 002 Bintang Timur	4.290.024,01	913.102,01	369,83
8	SD Negeri 003 Bintang Timur	13.887.472,19	643.695,19	2.057,46
9	SD Negeri 006 Bintang Timur	41.543.924,29	55.459.257,29	(25,09)
10	SD Negeri 007 Bintang Timur	8.567.739,45	237.706,45	3.504,34
11	SD Negeri 008 Bintang Timur	3.931.512,21	4.292.812,21	(8,42)
12	SD Negeri 009 Bintang Timur	14.677.223,73	16.400.903,73	(10,51)
13	SD Negeri 010 Bintang Timur	3.370.292,47	1.957.338,47	72,19
14	SD Negeri 011 Bintang Timur	8.055.299,28	2.239.015,28	259,77
15	SD Negeri 012 Bintang Timur	18.493.735,35	875.232,35	2.013,01
16	SD Negeri 013 Bintang Timur	5.954.244,41	9.818.123,41	(39,35)
17	SD Negeri 014 Bintang Timur	1.175.300,56	506.366,56	132,10
18	SD Negeri 015 Bintang Timur	4.041.546,84	1.584.571,84	155,06
19	SD Negeri 016 Bintang Timur	2.823.502,39	162.072,39	1.642,12
20	SD Negeri 017 Bintang Timur	7.502.047,33	56.581.247,33	(86,74)
21	SD Negeri 018 Bintang Timur	75.667,16	122.267,16	(38,11)
22	SD Negeri 019 Bintang Timur	10.726.685,36	9.169.691,36	16,98
23	SD Negeri 001 Bintang Utara	28.842.838,93	2.980.316,93	867,78
24	SD Negeri 003 Bintang Utara	11.437.595,70	1.359.322,70	741,42
25	SD Negeri 004 Bintang Utara	15.184.482,63	14.133.060,63	7,44
26	SD Negeri 005 Bintang Utara	12.546.266,11	442.898,11	2.732,77
27	SD Negeri 006 Bintang Utara	14.919.247,17	22.122.955,17	(32,56)
28	SD Negeri 008 Bintang Utara	21.958.506,01	16.402.734,01	33,87
29	SD Negeri 009 Bintang Utara	29.918.155,45	13.161.558,45	127,31
30	SD Negeri 010 Bintang Utara	5.908,87	68,87	8.479,74
31	SD Negeri 001 Gunung Kijang	3.679.349,91	5.567.828,91	(33,92)
32	SD Negeri 002 Gunung Kijang	2.616.555,03	36.413.966,03	(92,81)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	%
33	SD Negeri 003 Gunung Kijang	5.169.090,07	858.662,07	501,99
34	SD Negeri 004 Gunung Kijang	8.345.187,61	340.060,61	2.354,03
35	SD Negeri 005 Gunung Kijang	2.324.256,75	3.216.924,75	(27,75)
36	SD Negeri 006 Gunung Kijang	1.080.957,97	169.592,97	537,38
37	SD Negeri 007 Gunung Kijang	15.675.143,54	26.714.042,54	(41,32)
38	SD Negeri 008 Gunung Kijang	2.021.190,41	4.638.150,41	(56,42)
39	SD Negeri 009 Gunung Kijang	1.415.785,59	3.655.567,59	(61,27)
40	SD Negeri 001 Mantang	425.600,27	745.321,27	(42,90)
41	SD Negeri 002 Mantang	1.105.031,78	49.281,78	2.142,27
42	SD Negeri 003 Mantang	2.855.985,89	155.035,89	1.742,14
43	SD Negeri 004 Mantang	1.190.323,05	3.045.823,05	(60,92)
44	SD Negeri 001 Seri Kuala Lobam	377.169,71	12.778.397,71	(97,05)
45	SD Negeri 002 Seri Kuala Lobam	9.885.849,10	15.843.178,10	(37,60)
46	SD Negeri 003 Seri Kuala Lobam	33.490.925,76	12.065.616,76	177,57
47	SD Negeri 004 Seri Kuala Lobam	3.459.206,50	2.605.106,50	32,79
48	SD Negeri 005 Seri Kuala Lobam	14.169.845,11	1.735.714,11	716,37
49	SD Negeri 006 Seri Kuala Lobam	2.313.682,72	48.683,72	4.652,48
50	SD Negeri 007 Seri Kuala Lobam	24.442.038,00	2.970.000,00	722,96
51	SD Negeri 001 Tambelan	2.063.337,15	93.337,15	2.110,63
52	SD Negeri 002 Tambelan	1.982.660,00	40.000,00	4.856,65
53	SD Negeri 003 Tambelan	577.608,06	353.464,06	63,41
54	SD Negeri 004 Tambelan	6.641,26	55.591,26	(88,05)
55	SD Negeri 005 Tambelan	1.392.288,71	1.092.488,71	27,44
56	SD Negeri 006 Tambelan	231.888,52	1.563.788,52	(85,17)
57	SD Negeri 007 Tambelan	67.618,88	626.468,88	(89,21)
58	SD Negeri 001 Teluk Sebong	151.714,52	7.902.006,52	(98,08)
59	SD Negeri 002 Teluk Sebong	4.784.700,54	10.217.600,54	(53,17)
60	SD Negeri 003 Teluk Sebong	11.606.942,84	1.537,84	754.656,21
61	SD Negeri 004 Teluk Sebong	1.550.189,50	2.940.155,50	(47,28)
62	SD Negeri 005 Teluk Sebong	10.889.038,00	2.773.048,00	292,67
63	SD Negeri 006 Teluk Sebong	3.240.600,12	1.800.000,12	80,03
64	SD Negeri 007 Teluk Sebong	10.881.838,33	7.049.364,33	54,37
65	SD Negeri 008 Teluk Sebong	18.723.318,38	14.798.428,38	26,52
66	SD Negeri 009 Teluk Sebong	330.868,37	689.367,37	(52,00)
67	SD Negeri 010 Teluk Sebong	1.325.222,07	222,07	596.658,71
68	SD Negeri 001 Teluk Bintan	4.015.605,99	2.116.255,99	89,75
69	SD Negeri 002 Teluk Bintan	2.179.506,79	448.506,79	385,95
70	SD Negeri 003 Teluk Bintan	4.691.660,49	2.531.010,49	85,37
71	SD Negeri 004 Teluk Bintan	19.097,72	1.396.674,72	(98,63)
72	SD Negeri 005 Teluk Bintan	320.348,00	1.179.300,00	(72,84)
73	SD Negeri 006 Teluk Bintan	7.542.396,39	6.150.826,39	22,62
74	SD Negeri 007 Teluk Bintan	777,00	58.177,00	(98,66)
75	SD Negeri 008 Teluk Bintan	8.532,59	2.222.832,59	(99,62)
76	SD Negeri 009 Teluk Bintan	31.105,32	5.505.396,32	(99,44)
77	SD Negeri 010 Teluk Bintan	1.075.898,65	602,65	178.427,94
78	SD Negeri 011 Teluk Bintan	124.039,80	2.381.589,80	(94,79)
79	SD Negeri 012 Teluk Bintan	5.926,85	2.883.826,85	(99,79)
80	SD Negeri 013 Teluk Bintan	8.532,00	1.921.000,00	(99,56)
81	SD Negeri 014 Teluk Bintan	319.524,56	479.624,56	(33,38)
82	SD Negeri 001 Toapaya	13.059.912,57	19.860.982,57	(34,24)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	%
83	SD Negeri 002 Toapaya	5.560.898,52	33.756.879,52	(83,53)
84	SD Negeri 003 Toapaya	77.049,27	57.939,27	32,98
85	SD Negeri 004 Toapaya	4.570.148,06	29.523.221,06	(84,52)
86	SD Negeri 005 Toapaya	2.458.566,52	219.506,52	1.020,04
87	SD Negeri 006 Toapaya	2.949.652,15	1.864.612,15	58,19
Jumlah A		561.509.163,56	572.852.220,56	(1,98)
I. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)				
1	SMP Negeri 1 Bintan	82,82	62.720.330,82	(100,00)
2	SMP Negeri 2 Bintan	53.144.478,76	64.301.539,76	(17,35)
3	SMP Negeri 3 Bintan	57.461.846,70	37.892.190,70	51,65
4	SMP Negeri 4 Bintan	861.752,32	2.931.752,32	(70,61)
5	SMP Negeri 5 Bintan	8.567.402,53	135.958.977,53	(93,70)
6	SMP Negeri 6 Bintan	3.318.964,35	68.141.675,35	(95,13)
7	SMP Negeri 7 Bintan	51.559.305,22	63.565.885,22	(18,89)
8	SMP Negeri 8 Bintan	4.577.038,38	18.545.397,38	(75,32)
9	SMP Negeri 9 Bintan	6.531.945,78	33.337.475,78	(80,41)
10	SMP Negeri 10 Bintan	2.053.095,78	2.974.395,78	(30,97)
11	SMP Negeri 11 Bintan	7.386.749,30	81.693.765,30	(90,96)
12	SMP Negeri 12 Bintan	11.100.128,80	92.372.636,80	(87,98)
13	SMP Negeri 13 Bintan	23.703.837,43	25.968.549,43	(8,72)
14	SMP Negeri 14 Bintan	1.317.862,82	14.106.553,82	(90,66)
15	SMP Negeri 15 Bintan	40.329.851,38	47.028.953,38	(14,24)
16	SMP Negeri 16 Bintan	4.396.317,01	5.837.259,01	(24,69)
17	SMP Negeri 17 Bintan	26.521.489,75	69.977.074,75	(62,10)
18	SMP Negeri 18 Bintan	5.944.756,91	98.550.626,91	(93,97)
19	SMP Negeri 19 Bintan	11.231.859,70	89.162.089,70	(87,40)
20	SMP Negeri 20 Satu Atap Pulau Pucung	76.117,68	906.677,68	(91,60)
21	SMP Negeri 21 Satu Atap Teluk Bintan	28.529,98	17.060,98	67,22
22	SMP Negeri 22 Satu Atap Mapur	2.745.325,26	1.017.325,26	169,86
23	SMP Negeri 23 Satu Atap Mantang	6.406,34	345.806,34	(98,15)
24	SMP Negeri 24 Bintan	4.168.748,58	16.790.801,58	(75,17)
25	SMP Negeri 25 Satu Atap Mantang	3.031,60	2.817.131,60	(99,89)
26	SMP Negeri 26 Bintan	4.496.391,15	4.533.890,70	(0,83)
27	SMP Negeri 27 Bintan	3.417.700,72	3.064.300,72	11,53
28	SMP Negeri 28 Bintan	1.671.131,90	1.961.498,90	(14,80)
Jumlah B		336.622.148,95	1.046.521.623,50	(67,83)
Total (A+B)		898.131.312,51	1.619.373.844,06	(44,54)

Kas Dana BOS yang berada pada Dinas Pendidikan sebesar Rp898.131.312,51 yang merupakan kas tunai dan kas di rekening giro Bank Riau Kepri yang berada pada SD dan SMP per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.79 Kas Dana BOS pada Kas Tunai dan Kas di Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	%
1.	SD (87 sekolah)	561.509.163,56	572.852.220,56	(1,98)
2.	SMP (28 sekolah)	336.622.148,95	1.046.521.623,50	(67,83)
	Jumlah	898.131.312,51	1.619.373.844,06	(44,54)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kas tunai yang berada pada SD dan SMP pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.80 Kas Dana BOS pada Kas Tunai Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

NO	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	%
1.	SD (87 sekolah)	17.879.616,58	12.961.267,11	37,95
2.	SMP (28 sekolah)	770.800,45	0,45	171.288.888,89
	Jumlah	18.650.474,45	12.961.267,56	43,89

Kas di rekening giro pada Bank Riau yang berada pada SD dan SMP pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.81 Kas Dana BOS pada Kas di Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

NO	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	%
1.	SD (87 sekolah)	543.629.546,98	559.890.953,45	(2,90)
2.	SMP (28 sekolah)	335.851.348,50	1.046.521.623,05	(67,91)
	Jumlah	879.480.895,48	1.606.412.576,50	(45,25)

7.5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 adalah nihil dan mengalami penurunan sebesar Rp4.363.160,00 atau 100,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.363.160,00.

Tabel 7.5.82 Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	%
I. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)				
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	4.363.160,00	(100,00)
	Jumlah A	0,00	4.363.160,00	(100,00)

7.5.3.1.1.8 Setara Kas

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp103.000.000.000,00 atau naik sebesar Rp103.000.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.83 Setara Kas Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	%
1	Bank Riau Kepri	52.000.000.000,00	0,00	100,00
2	BPR Bintan	15.000.000.000,00	0,00	100,00
3	Bank Rakyat Indonesia	9.000.000.000,00	0,00	100,00
4	Bank Syariah Indonesia	11.000.000.000,00	0,00	100,00
5	Bank Tabungan Negara	16.000.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	103.000.000.000,00	0,00	100,00

**7.5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PENDEK**

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021.

7.5.3.1.3 PIUTANG

Piutang adalah hak Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mendapat suatu pembayaran dari pemerintah/entitas pelaporan lainnya. Saldo piutang Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 7.5.84 Piutang Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

Uraian		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	%
1	Piutang Pajak	68.116.398.740,05	63.083.751.216,98	7,98
2	Piutang Retribusi	389.458.313,00	392.270.333,00	(0,72)
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	30.545.884.683,24	24.555.303.202,18	24,40
4	Piutang Transfer Antar Daerah	19.399.345.835,00	19.731.542.871,00	(1,68)
5	Piutang Lainnya	1.422.445.696,00	1.385.324.876,00	2,68
Jumlah		119.873.533.267,29	109.148.192.499,16	9,83

7.5.3.1.3.1 Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp68.116.398.740,05 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.85 Mutasi Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	965.765.076,06	62.423.963.437,77	62.456.176.468,22	933.552.045,61
2	Pajak Restoran	1.383.049.084,66	1.413.462.238,86	1.438.138.762,41	1.358.372.561,11
3	Pajak Hiburan	1.332.094.114,53	2.826.742.246,00	2.826.742.246,00	1.332.094.114,53
4	Pajak Reklame	306.611.343,43	644.872.703,75	655.826.972,00	295.657.075,18
5	Pajak Penerangan Jalan	3.440.451.897,01	14.152.472.649,00	14.154.349.466,00	3.438.575.080,01
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.997.864.351,86	16.244.510.678,00	15.638.136.597,30	7.604.238.432,56
7	Pajak Parkir	0,00	132.486.866,00	132.486.866,00	0,00
8	Pajak BPHTB	16.545.425,25	17.561.723.011,75	17.570.074.837,00	8.193.600,00
9	Pajak PBB P2	48.639.524.924,18	35.106.254.381,87	30.601.170.475,00	53.144.608.831,05
10	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
11	Pajak Air Tanah	1.845.000,00	4.428.000,00	5.166.000,00	1.107.000,00
JUMLAH		63.083.751.216,98	150.514.166.213,00	145.481.518.689,93	68.116.398.740,05

Saldo Piutang pajak per 31 Desember 2022 yang merupakan pokok piutang pajak bruto sebesar Rp68.116.398.740,05 apabila dibandingkan dengan Saldo Piutang pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp63.083.751.216,98 terjadi kenaikan trend sebesar 7,98%. Adapun penyisihan piutang pajak tersebut sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 7.5.86 Penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

NO	Jenis Pajak	0 Bln s/d 12 Bln (0,5%)	13 Bln s/d 36 Bln (10%)	37 Bln s/d 60 Bln (50%)	> 60 Bln (100%)	PENYISIHAN PIUTANG
		Pokok	Pokok	Pokok	Pokok	
1	Pajak Hotel	1.374.687,56	12.000.000,00	240.430.382,24	57.753.768,40	311.558.838,20
2	Pajak Restoran	26.355,00	3.175.699,00	143.382.610,90	1.034.579.349,32	1.181.164.014,22
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	1.332.094.114,53	1.332.094.114,53
4	Pajak Reklame	169.981,25	9.836.721,48	109.551.621,11	170.029.126,25	289.587.450,10
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	3.000,00	0,00	3.438.545.080,01	3.438.548.080,01
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.060.251,85	0,00	0,00	6.392.188.062,56	6.398.248.314,41
7	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pajak BPHTB	0,00	819.360,00	0,00	0,00	819.360,00
9	PBB	0,00	1.026.496.337,41	0,00	18.935.219.200,06	26.324.066.615,42
10	Pajak Sarang Burung Walet	56.665.273,24	0,00	6.305.685.804,72	0,00	0,00
11	Pajak Air Tanah	3.690,00	36.900,00	0,00	0,00	40.590,00
	JUMLAH	64.300.238,90	1.052.368.017,89	6.799.050.418,96	31.360.408.701,13	39.276.127.376,89

Adapun piutang pajak setelah penyisihan sebagai berikut.

Tabel 7.5.87 Piutang Pajak Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	URAIAN	SALDO 31 Des 2022 (SEBELUM PENYISIHAN) (Rp)	PENYISIHAN PIUTANG (PER 31 Des 2022) (Rp)	SALDO 31 Des 2022 (SETELAH PENYISIHAN) (Rp)
1	Pajak Hotel	933.552.045,61	311.558.838,20	621.993.207,41
2	Pajak Restoran	1.358.372.561,11	1.181.164.014,22	177.208.546,90
3	Pajak Hiburan	1.332.094.114,53	1.332.094.114,53	0,00
4	Pajak Reklame	295.657.075,18	289.587.450,10	6.069.625,08
5	Pajak Penerangan Jalan	3.438.575.080,01	3.438.548.080,01	27.000,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7604238432,56	6.398.248.314,41	1.205.990.118,15
7	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
8	Pajak BPHTB	8.193.600,00	819.360,00	7.374.240,00
9	Pajak PBB P2	53.144.608.831,05	26.324.066.615,42	26.820.542.215,62
10	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00
11	Pajak Air Tanah	1.107.000,00	40.590,00	1.066.410,00
	JUMLAH	68.116.398.740,05	39.276.127.376,89	28.840.271.363,16

7.5.3.1.3.2 Piutang Retribusi Daerah

Perincian saldo piutang retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp389.458.313,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.88 Mutasi Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Ret. Jasa Usaha	225.136.515,00	3.599.720,00	6.411.740,00	222.324.495,00
2	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	167.133.818,00	0,00	0,00	167.133.818,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

	Jumlah	392.270.333,00	3.599.720,00	6.411.740,00	389.458.313,00
--	---------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 merupakan Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Sewa Rumah Dinas) dan Izin Mendirikan Bangunan. Apabila dibandingkan dengan saldo Piutang per 31 Desember 2021 terjadi penurunan sebesar 12,19%. Penurunan ini disebabkan karena adanya pembayaran piutang retribusi sewa rumah dinas dan retribusi izin mendirikan bangunan pada tahun 2020.

Tabel 7.5.89 Penyisihan Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	NILAI PENYISIHAN PIUTANG				Total Penyisihan Piutang
		0 Bln s/d 12 Bln (0,5%)	13 Bln s/d 36 Bln (10%)	37 Bln s/d 60 Bln (50%)	> 60 Bln (100%)	
1	Ret. Jasa Usaha	0,00	0,00	4.050.000,00	214.224.495,00	218.274.495,00
2	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	0,00	1.825.200,00	74.440.909,00	0,00	76.266.109,00
	Jumlah	0,00	1.825.200,00	78.490.909,00	214.224.495,00	294.540.604,00

Adapun piutang retribusi setelah penyisihan sebagai berikut.

Tabel 7.5.90 Piutang Retribusi Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022 Sebelum Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2022 Setelah Penyisihan
1	Ret. Jasa Usaha	222.324.495,00	218.274.495,00	4.050.000,00
2	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	167.133.818,00	76.266.109,00	90.867.709,00
	Jumlah	389.458.313,00	294.540.604,00	94.917.709,00

7.5.3.1.3.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp30.545.884.683,24. Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 7.5.91 Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Denda Pajak Hotel	410.254.287,65	94.413.981,92	252.145.191,70	252.523.077,87
2	Denda Pajak Restoran	691.135.719,39	14.725.844,02	138.737.037,70	567.124.525,71
3	Denda Pajak Hiburan	525.442.748,13	6.038.512,00	1.052.985,00	530.428.275,13
4	Denda Pajak Reklame	20.630.430,00	1.576.243,00	847.233,00	21.359.440,00
5	Denda Pajak Penerangan Jalan	2.096.858.786,44	(300.290,00)	0,00	2.096.558.496,44
6	Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.123.800.609,29	1.649.598.460,40	67.186.586,00	3.706.212.483,69
7	Denda Pajak Parkir	0,00	371.366,00	371.366,00	0,00
8	Denda Pajak BPHTB	420.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	420.000,00
9	Denda Pajak PBB P2	17.946.305.603,87	3.988.046.405,82	601.647.326,00	21.332.704.683,69
10	Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	279.000,00	279.000,00	0,00
11	Denda Pajak Air Tanah	125.460,00	479.700,00	531.360,00	73.800,00
12	Denda Retribusi Sewa Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Denda Izin Mendirikan Bangunan	120.226.310,66	5.835.599,12	0,00	126.061.909,78
14	Piutang Pendapatan BLUD	564.059.557,00	1.915.770.789,00	623.629.635,00	1.856.200.711,00
15	Piutang Pendapatan Denda	52.438.689,75	5.399.272,50	4.074.090,00	53.763.872,25



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
	Pengakhiran Sewa BMD				
16	Piutang Pendapatan Dana Kaptasi JKN pada FKTP	3.605.000,00	44.955.000,00	48.560.000,00	0,00
17	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	2.453.407,68	0,00	2.453.407,68
Jumlah		24.555.303.202,18	7.730.763.291,46	1.740.181.810,40	30.545.884.683,24

Pada Tahun 2022 terdapat penambahan piutang pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah yang merupakan remunerasi dari Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas TDF (*Treasury Deposit Facility*) terhitung mulai tanggal penyimpanan pada Bank Indonesia sebesar Rp2.453.407,68 dari dana TDF sebesar Rp10.115.876.520,00 yang diakui sebagai Aset Lainnya.

Adapun penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah tersebut sebagai berikut.

**Tabel 7.5.92 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

Jenis Pajak	0 Bln s/d 12 Bln (0,5%)		13 Bln s/d 36 Bln (10%)		37 Bln s/d 60 Bln (50%)		> 60 Bln (100%)		Pokok	Denda	Jumlah
	Pokok	Denda	Pokok	Denda	Pokok	Denda	Pokok	Denda			
Denda Pajak Hotel	0,00	927.720,30	0,00	2.785.394,13	0,00	13.013.655,88	0,00	13.097.764,57	0,00	29.824.534,88	29.824.534,88
Denda Pajak Restoran	0,00	24.399,53	0,00	1.458.105,90	0,00	8.896.964,58	0,00	526.024.130,55	0,00	536.403.600,56	536.403.600,56
Denda Pajak Hiburan	0,00	26.526,14	0,00	7.278,00	0,00	26.000,00	0,00	524.998.268,13	0,00	525.058.072,27	525.058.072,27
Denda Pajak Reklame	0,00	4.844,80	0,00	61.973,50	0,00	1.427.032,50	0,00	16.916.680,00	0,00	18.410.530,80	18.410.530,80
Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	2.096.550.696,44	0,00	2.096.551.476,44	2.096.551.476,44
Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	7.912.059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.800.609,29	0,00	2.131.712.668,66	2.131.712.668,66
Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denda Pajak BPHTB	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
Denda Pajak PBB P2	0,00	6.315.477,27	0,00	492.718.241,37	0,00	3.026.729.186,25	0,00	9.088.968.445,15	0,00	12.614.731.350,04	12.614.731.350,05
Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denda Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00
Denda Retribusi Sewa Rumah Dinas											
Denda Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.793.808,19	0,00	52.363.191,92	0,00	3.397.444,08	0,00	57.554.444,19	68.507.465,59
Piutang Pendapatan BLUD	9.281.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281.006,00	0,00	9.281.006,00
Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	0,00	30.421,58	0,00	1.468.845,38	0,00	6.767.681,25	0,00	19.455.741,00	0,00	27.722.689,21	27.722.689,21
Piutang Pendapatan Dana Kaptasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Penyisihan	9.281.006,00	15.241.448,99	0,00	500.343.806,47	0,00	3.109.223.712,38	0,00	14.413.209.779,21	9.281.006,00	18.038.018.747,05	18.047.299.753,05

Adapun piutang lain-lain PAD yang sah setelah penyisihan sebagai berikut.

**Tabel 7.5.93 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Setelah Penyisihan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	URAIAN	SALDO 31 Des 2022 (SEBELUM PENYISIHAN) (Rp)	PENYISIHAN PIUTANG (PER 31 Des 2022) (Rp)	SALDO 31 Des 2022 (SETELAH PENYISIHAN) (Rp)
1	Denda Pajak Hotel	252.523.077,87	29.824.534,88	222.698.542,99
2	Denda Pajak Restoran	567.124.525,71	536.403.600,56	30.720.925,15
3	Denda Pajak Hiburan	530.428.275,13	525.058.072,27	5.370.202,87
4	Denda Pajak Reklame	21.359.440,00	18.410.530,80	2.948.909,20
5	Denda Pajak Penerangan Jalan	2.096.558.496,44	2.096.551.476,44	7.020,00



6	Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.706.212.483,69	2.131.712.668,66	1.574.499.815,03
7	Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
8	Denda Pajak BPHTB	420.000,00	42.000,00	378.000,00
9	Denda Pajak PBB P2	21.332.704.683,69	12.614.731.350,04	8.717.973.333,64
10	Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00
11	Denda Pajak Air Tanah	73.800,00	7.380,00	66.420,00
12	Denda Retribusi Sewa Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00
13	Denda Izin Mendirikan Bangunan	126.061.909,78	57.554.444,19	68.507.465,59
14	Piutang Pendapatan BLUD	1.856.200.711,00	9.281.006,00	1.846.919.705,00
15	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	53.763.872,25	27.722.689,21	26.041.183,04
16	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00
17	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.453.407,68	0,00	2.453.407,68
JUMLAH		30.545.884.683,24	18.047.299.753,05	12.498.584.930,19

7.5.3.1.3.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Tidak terdapat Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022.

**Tabel 7.5.94 Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambah an (Rp)	Pengurang an (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

7.5.3.1.3.5 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.399.345.835,00 sesuai dengan SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 165 Tahun 2023 Tanggal 16 Januari 2023. Rincian saldo piutang transfer antar daerah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.95 Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.706.980.312,00	4.054.708.926,00	3.706.980.312,00	4.054.708.926,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.630.917.850,00	3.110.635.760,00	1.630.917.850,00	3.110.635.760,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.379.425.736,00	12.214.401.840,00	14.379.425.736,00	12.214.401.840,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	14.218.973,00	19.599.309,00	14.218.973,00	19.599.309,00
Jumlah		19.731.542.871,00	19.399.345.835,00	19.731.542.871,00	19.399.345.835,00

**7.5.3.1.3.6 Piutang Lainnya**

Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.422.445.696,00. Rincian saldo piutang lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.96 Mutasi Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

NO.	URAIAN	SALDO 31 Des 2021 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO 31 Des 2022 (Rp)
1	Angsuran Rumah Dinas	1.083.332.105,00	200.019.543,00	203.398.723,00	1.079.952.925,00
2	Angsuran Kendaraan Dinas Roda 4	78.961.000,00	0,00	0,00	78.961.000,00
3	Angsuran Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	174.518.500,00	0,00	0,00	174.518.500,00
6	Bagian Lancar TGR	48.513.271,00	43.500.000,00	3.000.000,00	89.013.271,00
	JUMLAH	1.385.324.876,00	243.519.543,00	206.398.723,00	1.422.445.696,00

Angsuran Rumah Dinas dicatat sebagai piutang lainnya atas angsuran cicilan rumah dinas yang telah dibuatkan Surat Perjanjian Sewa Beli, dimana pegawai yang menempati rumah dinas dapat melakukan pengalihan hak setelah melakukan pelunasan cicilan rumah dinas. Adapun jumlah rumah dinas yang masih dilakukan pencicilan sebanyak 14 Unit Rumah Dinas.

Adapun penyisihan piutang lainnya tersebut sebagai berikut.

Tabel 7.5.97 Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

Jenis Pajak	0 Bln s/d 12 Bln (0,5%)		13 Bln s/d 36 Bln (10%)		37 Bln s/d 60 Bln (50%)		> 60 Bln (100%)		Pokok	Denda	Jumlah
	Pokok	Denda	Pokok	Denda	Pokok	Denda	Pokok	Denda			
Angsuran Rumah Dinas	172.036,75	0,00	9.199.452,50	0,00	32.422.250,00	0,00	888.706.550,00	0,00	930.500.289,25	0,00	930.500.289,25
Angsuran Kendaraan Dinas Roda 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.961.000,00	0,00	78.961.000,00	0,00	78.961.000,00
Angsuran Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.518.500,00	0,00	174.518.500,00	0,00	174.518.500,00
Bagian Lancar TGR	0,00	0,00	0,00	0,00	22.756.635,00	0,00	0,00	0,00	22.756.635,00	0,00	22.756.635,00
Total Penyisihan	172.036,75	0,00	9.199.452,50	0,00	55.178.885,00	0,00	1.142.186.050,00	0,00	1.206.736.424,25	0,00	1.206.736.424,25

Adapun piutang lainnya setelah penyisihan sebagai berikut.

Tabel 7.5.98 Piutang Lainnya Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

NO	URAIAN	SALDO 31 Des 2022 (SEBELUM PENYISIHAN) (Rp)	PENYISIHAN PIUTANG (PER 31 Des 2022) (Rp)	SALDO 31 Des 2022 (SETELAH PENYISIHAN) (Rp)
1	Angsuran Rumah Dinas	1.079.952.925,00	930.500.289,25	149.452.635,75
2	Angsuran Kendaraan Dinas Roda 4	78.961.000,00	78.961.000,00	0,00
3	Angsuran Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00
4	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00
5	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	174.518.500,00	174.518.500,00	0,00
6	Bagian Lancar TGR	89.013.271,00	22.756.635,50	66.256.635,50
	JUMLAH	1.422.445.696,00	1.206.736.424,75	215.709.271,25

**7.5.3.1.3.7 Penyisihan Piutang**

Perincian saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp58.824.704.158,70 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.99 Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

NO	URAIAN	SALDO 31 Des 2022 (Rp)	SALDO 31 Des 2021 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	39.276.127.376,90	35.854.338.761,98
2	Penyisihan Piutang Retribusi	294.540.604,00	246.297.432,80
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	18.047.299.753,05	15.921.193.565,87
4	Penyisihan Piutang Lainnya	1.206.736.424,75	1.183.928.729,88
JUMLAH		58.824.704.158,70	53.205.758.490,53

7.5.3.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp124.125.500,00 atau turun sebesar Rp41.462.000,00 dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp165.587.500,00. Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 pada OPD dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 7.5.100 Beban Dibayar Dimuka Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

NO	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	(%)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	Ruko 3 Lantai di Perumahan Taman Sari Kec. Bintan Utara	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00
	Ruko 2 Lantai di Jl. Nusantara	20.250.000,00	22.500.000,00	(10,00)
	Ruko 2 Lantai di Desa Toapaya Selatan Nomor Bukti Sertifikat 01795	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
	Ruko 2 Lantai di Desa Toapaya Selatan Nomor Bukti Sertifikat 01796 (Gudang)	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00
Jumlah a		48.375.000,00	50.625.000,00	0,00
2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
	Gedung/Rumah di Jl. Kesatria Blok A No. 1 Tanjungpinang	0,00	10.312.500,00	(100,00)
Jumlah b		0,00	10.312.500,00	(100,00)
3	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan			
	Ruko di Jl. Raya Tanjung Pinang - Tanjung Uban Mo. 4 Km. 16	13.500.000,00	4.500.000,00	200,00
Jumlah c		13.500.000,00	4.500.000,00	200,00
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah			
	Ruko (Gudang Arsip) di Jl. Hang Jebat Kijang Bintan Timur	24.166.666,67	24.166.666,67	0,00
	2 Ruko di Jl. Perikanan No. 80 C 80 D Berek Motor Kijang	4.983.333,33	4.983.333,33	0,00



NO	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	(%)
	Ruko 3 Lantai di Jl Baru KM. 8 Tanjungpinang	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
	Jumlah d	37.900.000,00	37.900.000,00	0,00
5	Badan Pendapatan Daerah			
	Ruko 3 Lantai di Jl. Pasar Berdikari Kijang	0,00	26.250.000,00	(100,00)
	2 Unit Mobil Avanza	0,00	36.000.000,00	(100,00)
	Jumlah e	0,00	62.250.000,00	(100,00)
6	Puskesmas Kelong			
	Kupon/Voucher Bahan Bakar Minyak	3.440.500,00	0,00	100,00
	Jumlah f	3.440.500,00	0,00	100,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Kupon/Voucher Bahan Bakar Minyak	9.225.000,00	0,00	100,00
	Jumlah g	9.225.000,00	0,00	100,00
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
	Kupon/Voucher Bahan Bakar Minyak	11.685.000,00	0,00	100,00
	Jumlah h	11.685.000,00	0,00	100,00
	TOTAL (a+b+c+d+e+f+g+h)	124.125.500,00	165.587.500,00	(25,04)

7.5.3.1.5 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23.798.626.309,00 dan terjadi penurunan sebesar Rp4.008.171.933,99 atau 14,41% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp27.806.798.242,99.

Jumlah persediaan tersebut merupakan sisa barang habis pakai dan barang yang akan dihibahkan pada OPD per 31 Desember 2022. Saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 pada OPD dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 7.5.101 Persediaan Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Persediaan Per SKPD	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	29.474.459,00	15.671.715,00	88,07
2	Dinas Kesehatan	6.565.972.615,00	4.557.430.067,00	44,07
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.788.423.364,00	6.836.562.582,00	(73,84)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.509.247,00	1.528.500,00	(1,26)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	159.080.000,00	159.080.000,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	299.409.700,00	101.287.250,00	195,60
7	Dinas Sosial	1.431.210,00	701.000,00	104,17
8	Dinas Tenaga Kerja	58.154,00	497.200,00	(88,30)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.504.373,00	27.661.704,00	(65,64)
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	173.255.979,00	115.614.893,00	49,86
11	Dinas Lingkungan Hidup	4.185.710,00	0,00	100,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.132.529,00	136.684.680,00	(96,24)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	110.380,00	192.860,00	(42,77)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Persediaan Per SKPD	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	(%)
14	Dinas Perhubungan	1.150.900,00	475.743.545,00	(99,76)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	186.000,00	203.200,00	(8,46)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.953.080,00	1.228.500,00	58,98
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	152.000.416,00	360.657.600,00	(57,85)
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.433.000,00	1.113.500,00	28,69
21	Dinas Perikanan	0,00	13.104.422,22	(100,00)
22	Sekretariat Daerah	90.714.968,00	88.297.925,00	2,74
23	Inspektorat Daerah	5.026.114,00	0,00	100,00
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	387.021,00	2.000.555,00	(80,65)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.236.443.200,00	17.152.475,00	7.108,54
26	Badan Pendapatan Daerah	1.013.856,00	2.086.100,00	(51,40)
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	300.500,00	484.000,00	(37,91)
28	Sekretariat DPRD	1.048.800,00	1.198.000,00	(12,45)
29	Kecamatan Bintan Utara	0,00	635.500,00	(100,00)
30	Kecamatan Bintan Pesisir	734.000,00	305.000,00	140,66
31	Kecamatan Tambelan	347.895,00	976.000,00	(64,36)
32	Kecamatan Mantang	3.292.225,00	4.590.000,00	(28,27)
33	Kecamatan Toapaya	751.470,00	2.543.500,00	(70,46)
34	Kecamatan Teluk Sebong	3.055.000,00	0,00	100,00
35	Kecamatan Teluk Bintan	254.300,00	1.154.000,00	(77,96)
36	Kecamatan Gunung Kijang	279.500,00	1.398.815,00	(80,02)
37	Kecamatan Bintan Timur	450.000,00	1.840.000,00	(75,54)
38	Kecamatan Seri Kuala Lobam	545.000,00	547.300,00	(0,42)
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00
40	RSUD Bintan	9.239.375.877,00	9.718.057.093,09	(4,93)
41	BLUD Puskesmas	1.760.989.172,00	2.342.103.170,17	(24,81)
42	Puskesmas JKN	2.259.346.295,00	2.816.465.591,51	(19,78)
	Jumlah	23.798.626.309,00	27.806.798.242,99	(14,41)

Adapun mutasi tambah kurang atas saldo persediaan tersebut sebagai berikut.

Tabel 7.5.102 Mutasi Persediaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Persediaan	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	192.456.754,40	4.445.591.479,00	4.405.389.608,40	232.658.625,00
2	Alat Listrik	16.024.696,80	1.746.668.090,00	1.710.720.214,80	51.972.572,00
3	Alat Kebersihan	60.606.217,10	2.930.558.170,00	2.733.601.517,10	257.562.870,00
4	Obat-Obatan	7.827.901.251,93	5.508.016.784,00	2.810.729.293,93	10.525.188.742,00
5	Barang yang akan Dihilangkan	7.761.226.275,00	8.087.143.650,00	12.551.022.730,00	3.297.347.195,00
6	Cetak dan Penggandaan	151.931.979,00	8.003.710.301,00	8.095.097.596,00	60.544.684,00
7	Bahan Bakar Minyak	22.991.500,00	8.437.093.985,00	8.460.085.485,00	0,00
8	Pakaian Khusus Kegiatan	159.080.000,00	0,00	0,00	159.080.000,00
9	Bahan Medis Habis Pakai	10.703.676.884,60	3.382.771.368,00	6.171.640.292,60	7.914.807.960,00
10	Bahan Kimia	706.346.072,00	5.610.701.242,00	5.221.728.921,00	1.095.318.393,00
11	Benda Pos/Materai	1.770.000,00	256.447.000,00	249.487.000,00	8.730.000,00
12	Persediaan Bantuan COVID	106.093.400,00	104.027.000,00	60.710.700,00	149.409.700,00
13	Makanan Tambahan Dinas Kesehatan	83.913.789,94	50.564.385,00	134.478.174,94	0,00
14	Obat-Obatan Ikan	159.466,66	0,00	159.466,66	0,00
15	Pakan Ikan	12.420.000,00	0,00	12.420.000,00	0,00
16	Vitamin Ikan	199.955,56	0,00	199.955,56	0,00
17	Bibit Tanaman	0,00	168.862.698,00	122.857.130,00	46.005.568,00



No	Persediaan	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)
	Jumlah	27.806.798.242,99	48.732.156.152,00	52.740.398.085,99	23.798.626.309,00

Penambahan persediaan sebesar Rp48.732.156.152,00 terdiri dari:

- Penambahan *netto* pada pengadaan Alat Tulis Kantor Tahun 2022 sebesar Rp4.445.591.479,00;
- Penambahan *netto* pada Alat Listrik Tahun 2022 sebesar Rp1.746.668.090,00;
- Penambahan *netto* pada Alat Kebersihan Tahun 2022 yang merupakan Bahan Medis Habis Pakai sebesar Rp2.930.558.170,00;
- Penambahan *netto* pada Obat-Obatan Tahun 2022 sebesar Rp5.508.016.784,00;
- Penambahan *netto* pada Barang yang akan dihibahkan Tahun 2022 sebesar Rp8.087.143.650,00;
- Penambahan *netto* pada Cetak dan Penggandaan Tahun 2022 sebesar Rp8.003.710.301,00;
- Penambahan *netto* pada Bahan Bakar Minyak Tahun 2022 sebesar Rp8.437.093.985,00;
- Penambahan *netto* pada Bahan Medis Habis Pakai Tahun 2022 sebesar Rp3.382.771.368,00;
- Penambahan *netto* pada Bahan Kimia Tahun 2022 sebesar Rp5.610.701.242,00;
- Penambahan *netto* pada Benda Pos/Materai Tahun 2022 sebesar Rp256.447.000,00;
- Penambahan *netto* pada Persediaan Bantuan COVID Tahun 2022 sebesar Rp104.027.000,00;
- Penambahan *netto* pada Makanan Tambahan Pendamping ASI Tahun 2022 sebesar Rp50.564.385,00;
- Penambahan *netto* pada Bibit Tanaman Tahun 2022 sebesar Rp168.862.698,00.

Sedangkan pengurangan persediaan sebesar Rp52.740.328.085,99 terdiri dari:

- Pengurangan *netto* pada pengadaan Alat Tulis Kantor Tahun 2022 sebesar Rp4.405.389.608,40;
- Pengurangan *netto* pada Alat Listrik Tahun 2022 sebesar Rp1.710.720.214,80;
- Pengurangan *netto* pada Alat Kebersihan Tahun 2022 yang merupakan Bahan Medis Habis Pakai sebesar Rp2.733.601.517,10;
- Pengurangan *netto* pada Obat-Obatan Tahun 2022 sebesar Rp2.810.729.293,93;
- Pengurangan *netto* pada Barang yang akan dihibahkan Tahun 2022 sebesar Rp12.551.022.730,00;
- Pengurangan *netto* pada Cetak dan Penggandaan Tahun 2022 sebesar Rp8.095.097.596,00;
- Pengurangan *netto* pada Bahan Bakar Minyak Tahun 2022 sebesar Rp8.460.085.485,00;



- Pengurangan *netto* pada Bahan Medis Habis Pakai Tahun 2022 sebesar Rp6.171.640.292,60;
- Pengurangan *netto* pada Bahan Kimia Tahun 2022 sebesar Rp5.221.728.921,00;
- Pengurangan *netto* pada Benda Pos/Materai Tahun 2022 sebesar Rp249.487.000,00;
- Pengurangan *netto* pada Persediaan Bantuan COVID Tahun 2022 sebesar Rp60.710.700,00;
- Pengurangan *netto* pada Makanan Tambahan Pendamping ASI Tahun 2022 sebesar Rp134.478.174,94;
- Pengurangan *netto* pada Obat-Obatan Ikan Tahun 2022 sebesar Rp159.466,66;
- Pengurangan *netto* pada Pakan Ikan Tahun 2022 sebesar Rp12.420.000,00;
- Pengurangan *netto* pada Vitamin Ikan Tahun 2022 sebesar Rp199.955,56;
- Pengurangan *netto* pada Bibit Tanaman Tahun 2022 sebesar Rp122.857.130,00.

Adapun persediaan atau barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebagai berikut.

Tabel 7.5.103 Persediaan atau Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	OPD	TOTAL (Rp)	KET	SUMBER DANA	JUMLAH DITERIMA/PENERIMA
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan	19.910.000,00	Pakaian Pawai/Bunga Telor dan Bunga Manggar	PAD	50 Stell
		29.920.000,00	Pakaian Penari Pawai Budaya	PAD	50 Stell
		9.212.500,00	Bunga Telur	PAD	25 Set
		2.750.000,00	Dayung Kayu	PAD	25 Buah
		5.280.000,00	Bendera Kecil	PAD	600 Buah
		4.950.000,00	Parfum	PAD	250 Botol
		962.500,00	Tongkat Bendera	PAD	25 Batang
		2.337.500,00	Bendera Merah Putih	PAD	25 Lembar
		5.280.000,00	Pin MTQ	PAD	400 Buah
		3.850.000,00	Payung	PAD	25 Buah
		4.620.000,00	Piala (Trophy) Bergilir	PAD	1 Buah
		6.050.000,00	Piala (Trophy) Pemenang	PAD	5 Buah
		2.970.000,00	Piala (Trophy) Penata Terbaik	PAD	3 Buah
		6.050.000,00	Pakaian Panitia	PAD	25 Buah
		19.470.000,00	Topi	PAD	300 Pcs
		1.842.500,00	Peluru Air Soft Gun Magazine	PAD	5
		220.000,00	Kertas Karton Target	PAD	100 Lembar
		1.644.500,00	Baricade Tape (Police Line)	PAD	10 Roll
		1.760.000,00	Carabine Snap	PAD	4 Buah
		198.000,00	Papan Target	PAD	4 Set
16.225.000,00	Pakaian Olahraga	PAD	125 Buah		
7.986.000,00	Piala	PAD	2 Set		
8.992.500,00	Plakat Trophy	PAD	15 Buah		
2.788.500,00	Healy Kit	PAD	30 Paket		
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	115.203.131,00	Beras Bulog	PAD	10609 Kg
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.359.749.998,00	Kendaraan Bermotor Penumpang	PAD	2 Kendaraan
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.784.864.564,00	Bangunan Gedung Kantor	PAD	1 Bangunan



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Adapun persediaan obat-obatan dalam kondisi rusak dan kadaluarsa sebagai berikut.

**Tabel 7.5.104 Persediaan Obat-obatan Dalam Kondisi Rusak dan Kadaluarsa
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
BPFAK Dinas Kesehatan					
1	DOPAMET 250 MG TAB	KTK/ 100 TAB	108.800,00	8	870.400,00
2	CALCIUM GLUKONAS INJ 10 %	AMPUL	4.989,00	58	289.362,00
3	FITOMENADION TAB SALUT 10 MG	KTK/ 100 TAB	78.100,00	29	2.264.900,00
4	ASIKLOVIR 200 MG TAB	KTK/ 100 TAB	61.400,00	38	2.333.200,00
5	AMLODIPIN 5 MG TAB	BLISTER	770,00	1.329	1.023.330,00
6	ERITROMISIN 500 MG	KTK/ 100 TAB	78.100,00	93	7.263.300,00
7	DIAZEPAM RECTAL 5 MG/2.5 ML	KTK/ 5 RECTAL	72.925,00	134	9.771.950,00
8	LARUTAN NACL + GLUKOSA (1 / 4)	BOTOL	9.840,00	79	777.360,00
9	FLUCONAZOLE 150 MG KAPSUL	KAPSUL	23.100,00	330	7.623.000,00
10	PHYTOMENADIONE 2 MG INJ	KTK/ 30 AMP	43.560,00	4	174.240,00
11	SALEP 2-4	POT	3.013,00	96	289.248,00
12	SALEP ANTI FUNGI WHITEFIELD	POT	5.170,00	560	2.895.200,00
13	PIRACETAM 400 MG	KTK/ 100 TAB	49.508,00	2	99.016,00
14	FAVIPIRAVIR	KTK/100 TAB	1.485.000,00	47	69.795.000,00
15	PRO-CREPE 10 CM * 4.55 M	ROL	33.000,00	12	396.000,00
16	GLIBENCLAMIDE 5 MG TAB	KTK/100 TAB	9.660,00	216	2.086.560,00
17	ALUVIA (LOVINA VIR/RITONAVIR)	BTL/ 120 TAB	736.203,00	132	97.178.796,00
18	OXYTETRACYCLINE HCL S.M 1%	KTK/ 25 TUBE	65.000,00	9	585.000,00
19	HYOSCINE BUTYLBROMIDE INJ	KTK/ 5 Ampul	46.000,00	119	5.474.000,00
20	ACICLOVIR TAB 200 MG	KTK/ 50 TAB	21.250,00	158	3.357.500,00
21	ISONIAZID 300 MG	KTK/ 100 TAB	17.000,00	15	255.000,00
22	BACITRACIN-POLYMXIN B	KTK/ 25 TUBE	87.250,00	46	4.013.500,00
23	TRANEXAMIC ACID INJ 100 MG	KTK/ 10 AMPUL	22.250,00	5	111.250,00
24	METOCLOPRAMIDE 10 MG	KTK/ 100 TAB	8.300,00	21	174.300,00
25	EFLIN TABLET	KTK/ 100 tab	139.200,00	398	55.401.600,00
26	MYCOTEC REAGEN ZIEHL NELSEN	PAKET	178.750,00	49	8.758.750,00
27	MALARIA AG. PLDH/HRP2	KTK/ 25 TES	449.975,00	10	4.499.750,00
28	CAVITON	KTK	250.900,00	9	2.258.100,00
29	TRICRESOL FORMALINA	KTK	77.334,00	5	386.670,00
30	COTRIMOXAZOLE SUSPENSI	BOTOL	2.052,00	85	174.420,00
31	SALBUTAMOL 2 MG TAB	KTK/ 100 TAB	6.400,00	111	710.400,00
32	EUGENOL CAIRAN	BOTOL	21.648,00	19	411.312,00
33	DIPHENHYDRAMINE HCL INJ 10MG	KTK/ 30 AMP	37.860,00	5	189.300,00
34	BACITRACIN-POLYMYXIN B	KTK/ 25 TUBE	87.250,00	44	3.839.000,00
35	CHLORPHENAMINE MALEATE	KTK/ 100 TAB	2.600,00	3.823	9.939.800,00
36	TREMENZA	KTK/ 100 TAB	126.500,00	134	16.951.000,00
37	SEMEN SENG POSFAT	KTK	159.000,00	7	1.113.000,00
38	CHKM	KTK	71.665,00	3	214.995,00
39	CALSIUM HYDROXIDE PASTE	PCS	91.000,00	6	546.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
40	PREDNISON TAB	KTK/ 100 TAB	7.900,00	502	3.965.800,00
41	KAOLIN PEKTIN SIRUP	BOTOL	7.130,00	1.230	8.769.900,00
42	ERGOTAMINE TAB	BTL/ 100 TAB	21.200,00	18	381.600,00
43	ISONIAZIDE TAB 100 MG	KTK/ 100 TAB	7.900,00	20	158.000,00
44	SILK 1	KTK/ 12 PCS	387.420,00	19	7.360.980,00
45	KALSIMUM LAKTAT TAB	KTK/ 100 TAB	5.900,00	704	4.153.600,00
46	CETRIZIN TAB	KTK/ 100 TAB	5.200,00	225	1.170.000,00
47	HYDROCHLORTHIAZIDE 25 MG TAB	KTK/ 100 TAB	17.800,00	99	1.762.200,00
48	GARAM ORALIT	KTK/ 100 SAC	27.400,00	139	3.808.600,00
49	CEFADROXIL 250 MG SIRUP	BTL/ 100 TAB	5.660,00	250	1.415.000,00
50	VTM	PCS	55.000,00	1.350	74.250.000,00
51	SERUM ANTI TETANUS	AMPUL	130.999,00	10	1.309.990,00
52	NYSTATIN 500.000 IU TAB	KTK/ 100 TAB	88.100,00	9	792.900,00
53	BENZATIN BENZYL PENICILIN	PCS	16.675,00	25	416.875,00
54	PYRANTEL PAMOATE SUSPENSI	BOTOL	11.050,00	175	1.933.750,00
55	URISPAS 200 MG	KTK/ 30 TAB	172.500,00	101	17.422.500,00
56	DIAZEPAM 5 MG TABLET	KTK/ 100 TAB	10.900,00	48	523.200,00
57	EFLIN SIRUP	BOTOL	22.425,00	510	11.436.750,00
58	SPECULUM	PCS	12.600,00	2.718	34.246.800,00
59	CLOBAZAM TAB 10 MG	KTK/ 100 TAB	73.900,00	8	591.200,00
60	KODEIN FOSFAT 10 MG TAB	BTL/ 100 TAB	65.700,00	4	262.800,00
Jumlah A					500.627.954,00
Puskesmas Kijang					
1	Asiklovir tablet 200 mg	Tablet	236,00	139	32.804,00
2	Eritromisin kaplet 500 mg	Kaplet	781,00	1.490	1.163.690,00
3	Fitomenadion (Vitamin K1) tablet salut gula 10 mg	Tablet	818,00	230	188.140,00
4	Kalsium Glukonat injeksi 10% (100 mg/ml) @ 10 ml	Ampul	8.949,00	4	35.796,00
5	Nistatin oral drop	Botol	36.915,00	69	2.547.135,00
6	Omeprazole inj 40 mg/ 10 ml	Ampul	11.245,00	13	146.185,00
7	Pirasetam tablet 400 mg	Tablet	495,08	400	198.032,00
8	Asam Traneksamat injeksi 100 mg @ 5 ml	Ampul	2.225,00	22	48.950,00
9	Cefixime 100 mg/5 ml sirup kering @ 30ml	Botol	18.700,00	9	168.300,00
10	Diazepam tablet 5 mg	Tablet	114,00	286	32.604,00
11	Dimenhidrinat tablet 50 mg	Tablet	121,00	322	38.962,00
12	Flukonazol 150 mg kapsul	Tablet	20.700,00	40	828.000,00
13	Glimepiride tablet 1 mg	Tablet	174,00	1.070	186.180,00
14	Propranolol tablet 10 mg	Tablet	69,00	230	15.870,00
15	Pavipirapir	Tablet	14.850,00	1.460	21.681.000,00
16	Fitomenadion (Vitamin K1) 2 mg/ml injeksi	Ampul	4.236,00	102	432.072,00
17	Amlodipin 5 mg tablet	Tablet	77,00	4.500	346.500,00
18	Amoksisilin kaplet 500 mg	Kaplet	248,00	1.800	446.400,00
19	Asiklovir tablet 200 mg	Tablet	236,00	280	66.080,00
20	Digoksin tablet 0,25 mg	Tablet	104,00	500	52.000,00



	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
21	Isoniazid tablet 100 mg	Tablet	79,00	200	15.800,00
22	Klozapin tab 25 mg	Tablet	1.121,00	100	112.100,00
23	Loratadin tablet 10 mg	Tablet	127,00	200	25.400,00
24	Mikonazol krim 2 % @ 10 g	Tube	4.313,00	37	159.581,00
25	Pembalut elastis ukuran 4 inci (10 cm x 4.55 m)	Roll	33.000,00	28	924.000,00
26	Amlodipin 5 mg tablet	Tablet	77,00	2.400	184.800,00
27	Alopurinol tablet 100 mg	Tablet	99,00	730	72.270,00
28	Asiklovir tablet 400 mg	Tablet	425,00	523	222.275,00
29	Cefadroksil 125 mg / 5 ml sirup kering @ 60ml	Botol	4.360,00	32	139.520,00
30	Cimetidin tablet 200 mg	Tablet	230,00	3.000	690.000,00
31	Glibenklamid tablet 5 mg	Tablet	96,60	2.350	227.010,00
32	Glimepiride 2 mg	Tablet	207,00	800	165.600,00
33	Hyoscine-N-Butilbromide injeksi	Ampul	9.200,00	10	92.000,00
34	Metoklorpramid tablet 10 mg	Tablet	83,00	100	8.300,00
35	Neurotropik (Vit B1 100mg, Vit B6 200mg, Vit B12 5000 mcg) injeksi	Ampul	5.715,50	15	85.732,50
36	Oksitetrasiklin HCl salap mata 1 % @ 3,5 g.	Tube	2.600,00	50	130.000,00
37	Sorbitol PEG 400 Enema @5ML (Mikrolak)	Tube	19.741,66	60	1.184.499,60
38	Tripolidin HCl 2.5 mg, Pseudoefedrin 60 mg tablet	Tablet	1.265,00	2.192	2.772.880,00
39	Pembalut elastis ukuran 6 inci (15 cm x 4.55 m)	Roll	41.910,00	5	209.550,00
40	Cat Gut Chromic No. 3/0 DS 19 mm	Pcs	41.685,00	36	1.500.660,00
41	Tripolidin HCl 2.5 mg, Pseudoefedrin 60 mg tablet	Tablet	1.265,00	1.000	1.265.000,00
42	Kotrimoksazol susp. komb. : Sulfametoksazol 200 mg. + Trimetoprim 40 mg/5ml	Botol	2.052,00	49	100.548,00
43	Antasida DOEN I tablet komb : Al(OH) 200 mg + Mg (OH) 200 mg	Tablet	56,00	190	10.640,00
44	Asam Folat tablet 0.4 mg	Tablet	61,00	600	36.600,00
45	Bromheksin sirup 4mg/ 5ml 60 ml	Botol	12.075,00	27	326.025,00
46	Kombinasi anti alergi lotion 100 ml (Kalamin 8%, Difenhidramin HCl 1%, Kamfer 0.1%, Gliserol alkohol 2%)	Botol	14.835,00	11	163.185,00
47	Simvastatin 20 mg tablet	Tablet	225,00	5.000	1.125.000,00
48	Tripolidin Hcl 1.25mg, Pseudoefedrin Hcl 30mg/5ml @100 ml	Botol	22.425,00	23	515.775,00
49	Rapid Test Corona Virus	Pcs	0,00	100	0,00
50	Povidon Iodida 10 % 30 ml	Botol	3.335,00	6	20.010,00
51	S i l k (Benang Bedah Sutera) No. 4/0 DS 19 mm	Sachet	31.765,00	12	381.180,00
52	Klorpromazin HCl tablet salut 100 mg	Tablet	157,00	65	10.205,00
53	Haloperidol 5 mg tablet	Tablet	56,00	110	6.160,00
54	Triheksifenidil Hidroklorida tab 2 mg	Tablet	95,00	110	10.450,00
55	Kaolin Pektin sirup	Botol	14.260,00	156	2.224.560,00
56	Tripolidin Hcl 1.25mg, Pseudoefedrin Hcl 30mg/5ml @100 ml	Botol	22.425,00	79	1.771.575,00
57	Amoksisilin kaplet 500 mg	Kaplet	248,00	7.300	1.810.400,00
58	Prednison tablet 5 mg	Tablet	79,00	1.444	114.076,00
59	Multivitamin mineral dengan zat besi tablet dewasa	Tablet	983,00	1.387	1.363.421,00



	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
60	Clindamisin Capsul 150 mg	Capsul	754,00	170	128.180,00
61	Pavipirapir	Tablet	10.399,00	310	3.223.690,00
62	Kaolin Pektin sirup	Botol	14.260,00	10	142.600,00
63	Klorpromazin HCl tablet salut 100 mg	Tablet	157,00	300	47.100,00
64	Kodein Fosfat tablet 10 mg	Tablet	657,00	100	65.700,00
65	Salbutamol tablet 2 mg	Tablet	64,00	500	32.000,00
66	Ketoprofen Supp 100 mg	Supp	2.380,00	100	238.000,00
67	Amoksisilin kaplet 500 mg	Kaplet	248,00	7.300	1.810.400,00
68	Prednison tablet 5 mg	Tablet	79,00	1.444	114.076,00
69	Multivitamin mineral dengan zat besi tablet dewasa	Tablet	983,00	1.387	1.363.421,00
70	Clindamisin Capsul 150 mg	Capsul	754,00	170	128.180,00
71	Pavipirapir	Tablet	10.399,00	310	3.223.690,00
72	Kaolin Pektin sirup	Botol	14.260,00	10	142.600,00
73	Klorpromazin HCl tablet salut 100 mg	Tablet	157,00	300	47.100,00
74	Kodein Fosfat tablet 10 mg	Tablet	657,00	100	65.700,00
75	Salbutamol tablet 2 mg	Tablet	64,00	500	32.000,00
76	Ketoprofen Supp 100 mg	Supp	2.380,00	100	238.000,00
77	Amoksisilin sirup kering 125 mg / 5 ml	Botol	5.111,00	82	419.102,00
78	Cetirizina kapsul 10 mg	Kapsul	104,00	1.700	176.800,00
79	Hidroklortiazida tablet 25 mg	Tablet	171,00	500	85.500,00
80	Klorfeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg	Tablet	24,00	3.377	81.048,00
81	Nistatin tablet salut 500.000 IU	Tablet	881,00	68	59.908,00
82	Salbutamol tablet 4 mg	Tablet	77,00	529	40.733,00
83	Zinc siup 20 mg/5 ml @ 60 ml	Botol	2.489,00	12	29.868,00
84	Sianokobalamin injeksi 500 mcg/ml - 1 ml	Ampul	1.160,00	80	92.800,00
85	Cat Gut Chromic No. 2/0 DS 19 mm	Pcs	40.865,00	24	980.760,00
86	Dimenhidrinat tablet 50 mg	Tablet	121,00	374	45.254,00
87	Metformin tablet 500 mg	Tablet	109,00	1.100	119.900,00
88	Metoklorpramid tablet 10 mg	Tablet	83,00	264	21.912,00
89	Piroksikam capsul 10 mg	Capsul	110,00	350	38.500,00
90	Dimenhidrinat tablet 50 mg	Tablet	121,00	374	45.254,00
91	Metformin tablet 500 mg	Tablet	109,00	1.100	119.900,00
92	Metoklorpramid tablet 10 mg	Tablet	83,00	264	21.912,00
93	Piroksikam capsul 10 mg	Capsul	110,00	350	38.500,00
94	Amoksisilin kaplet 500 mg	Kaplet	248,00	3.200	793.600,00
95	Garam Oralit untuk 200 ml air	Sachet	274,00	200	54.800,00
96	Gliseril Guayakolat tablet 100 mg	Tablet	163,70	1.370	224.269,00
97	Multivitamin Mineral dengan zat besi (BIONICOM)	Tablet	594,00	400	237.600,00
98	Pirantel pamoat suspensi 125 mg/ 5 ml	Botol	11.050,00	9	99.450,00
99	Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg	Tablet	93,00	380	35.340,00
100	Klobazam tab 10 mg	Tablet	739,00	100	73.900,00
101	Lidocain injeksi 2 % @ 2 ml	Ampul	891,00	90	80.190,00
Jumlah B					63.890.725,10



	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
Puskesmas Kawal					
1	Metildopa 250 mg	tablet	1.088,00	100	108.800,00
2	Alprazolam 1 mg	tablet	120,00	85	10.200,00
3	Nystatin Drop	botol	38.500,00	32	1.232.000,00
4	Fitomenadion 10 mg	tablet	818,00	268	219.224,00
5	Kalsium Glukonat Injeksi	ampul	8.949,00	14	125.286,00
6	Asam Tranexamat Injeksi	ampul	2.225,00	5	11.125,00
7	Fitomenadion 2 ml Injeksi	ampul	4.236,00	39	165.204,00
8	Dimenhidrinat 50 mg	tablet	121,00	400	48.400,00
9	Amlodipin 5 mg	tablet	77,00	1.740	133.980,00
10	Klorheksidin 60 ml	botol	25.850,00	6	155.100,00
11	Glimepiride 1 mg	tablet	174,00	200	34.800,00
12	Triheksifenidil Hidroklorida 2 mg	tablet	95,00	170	16.150,00
13	Diazepam 5 mg	tablet	114,00	30	3.420,00
14	Stesolid Supp 5 mg	tube	1.913,00	25	47.825,00
15	Ventolin Nebu 2.5 ml	ampul	10.725,00	60	643.500,00
16	Haloperidol 2 mg	tablet	84,00	70	5.880,00
17	Amlodipin 5 mg	tablet	77,00	1.800	138.600,00
18	Glibenklamide 5 mg	tablet	137,00	4.100	561.700,00
19	Cimetidin 200 mg	tablet	253,00	4.524	1.144.572,00
20	Eflin tablet	tablet	1.661,00	1.767	2.934.987,00
21	Glimepiride 2 mg	tablet	207,00	200	41.400,00
22	Reagen Ziehl Nielsen	paket	178.750,00	5	893.750,00
23	Acyclovir 400 mg	tablet	425,00	500	212.500,00
24	Mikrolax Supp	tube	5.900,00	27	159.300,00
25	Asam Askorbat 50 mg	tablet	120,00	300	36.000,00
26	Hyoscin-N-Butilbromide Injeksi	ampul	10.120,00	13	131.560,00
27	Cotrimoxazole sirup	botol	2.052,00	11	22.572,00
28	Kalsium Laktat 500 mg	tablet	59,00	1.890	111.510,00
29	Cotrimoxazole 480 mg	tablet	125,00	20	2.500,00
30	Nifedipin 10 mg	tablet	149,00	60	8.940,00
31	Basitrasin Salep	tube	3.490,00	46	160.540,00
32	Corona Virus Test	pcs	73.000,00	375	27.375.000,00
33	Povidone Iodine 30 ml	botol	3.335,00	19	63.365,00
34	Silk 3/0	pcs	31.125,00	12	373.500,00
35	Caolin Pektin Sirup	botol	15.400,00	45	693.000,00
36	Tremenza tablet	tablet	1.661,00	600	996.600,00
37	Simvastatin 20 mg	tablet	225,00	3.350	753.750,00
38	Bromhexine Sirup	botol	13.200,00	75	990.000,00
39	Loperamide 2 mg	tablet	171,00	500	85.500,00
40	Metilprednisolone 4 mg	tablet	139,00	592	82.288,00
41	Tremenza Sirup	botol	23.100,00	6	138.600,00
42	Metformin 500 mg	tablet	102,00	30	3.060,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
43	ATS 1500 IU	ampul	130.999,00	1	130.999,00
44	Clindamicin caps 150 mg	kapsul	754,00	200	150.800,00
45	Ergotamin tablet	tablet	199,00	200	39.800,00
46	Favipiravir tablet	tablet	14.850,00	600	8.910.000,00
47	Salbutamol 2 mg	tablet	64,00	1.960	125.440,00
48	Amoxicillin 500 mg	tablet	248,00	6.300	1.562.400,00
49	Vitamin B Kompleks	tablet	135,00	1.796	242.460,00
50	Pehavral tablet	tablet	1.045,00	610	637.450,00
51	Ambroxol 30 mg	tablet	231,00	280	64.680,00
52	Fluconazole 150 mg	kapsul	20.700,00	80	1.656.000,00
53	Prednisone 5 mg	tablet	79,00	108	8.532,00
54	Dexametasone Injeksi	ampul	1.210,00	18	21.780,00
55	Epinefrin 1 mg Injeksi	ampul	1.518,00	16	24.288,00
56	Lansoprazole 30 mg	kapsul	330,00	100	33.000,00
57	Hidroklortiazide 25 mg	tablet	178,00	1.000	178.000,00
58	Dexametasone 0,5 mg tablet	tablet	160,00	354	56.640,00
59	Chlorpeniramine Maleat 4 mg	tablet	26,00	1.265	32.890,00
60	Silk 3/0	pcs	31.125,00	23	715.875,00
61	Cat Gut Plain 2/0	pcs	40.864,00	12	490.368,00
62	Amoxicillin Sirup 125mg/5ml	botol	3.846,00	180	692.280,00
63	Salbutamol 4 mg	tablet	77,00	327	25.179,00
64	Cetirizin 10 mg tablet	tablet	104,00	364	37.856,00
65	Cyanocobalamin Injeksi	ampul	1.160,00	191	221.560,00
66	Diazepam 5 mg	tablet	114,00	97	11.058,00
67	Gliseril Guaiakolat 100 mg	tablet	165,00	682	112.530,00
68	Garam Oralit	sachet	262,00	74	19.388,00
69	Hidroklortiazide 25 mg	tablet	178,00	90	16.020,00
70	Simvastatin 20 mg	tablet	225,00	100	22.500,00
71	Amoxicillin 500 mg	tablet	248,00	746	185.008,00
72	Salbutamol 4 mg	tablet	231,00	280	64.680,00
Jumlah C					57.565.449,00
Puskesmas Sri Bintan					
1	Fitomenadion (Vitamin K1) tablet salut gula 10 mg	tablet	818,00	70	57.260,00
2	Kalsium Glukonat injeksi 10% (100 mg/ml) @ 10 ml	ampul	8.949,00	2	17.898,00
3	Multivitamin anak sirup dengan kalsium pidolat 300 mg, fruktooligosakarida 300 mg dan kurkuminoid 2 mg per 5 ml	botol	41.250,00	1	41.250,00
4	Natrium Diklofenak emulgel	tube	19.800,00	1	19.800,00
5	Nistatin oral drop	botol	38.500,00	59	2.271.500,00
6	Cat Gut Chromic No. 2/0 DS 24 mm	pcs	41.345,00	26	1.074.970,00
7	Amlodipin tablet 5 mg	tablet	77,00	960	73.920,00
8	Anti Fungi DOEN komb : As. Benzoat 6 % + As. Salisilat 3 %	pot	5.170,00	44	227.480,00
9	Dimenhidrinat tablet 50 mg	tablet	121,00	500	60.500,00
10	Fitomenadion (Vitamin K1) 2 mg/ml injeksi	ampul	4.236,00	89	377.004,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
11	Kaptopril tablet 12,5 mg	tablet	65,00	20	1.300,00
12	Magnesium Sulfat injeksi (IV) 40 % - 25 ml	vial	3.650,00	2	7.300,00
13	Vitamin B-Kompleks tablet	tablet	135,00	150	20.250,00
14	Amoksisilin kaplet 500 mg	kaplet	248,00	300	74.400,00
15	Aqua Pro Injeksi steril 25 ml	botol	2.860,00	1	2.860,00
16	Asiklovir tablet 200 mg	tablet	236,00	50	11.800,00
17	Salap 2 - 4 Kombinasi : As.Salisilat 2 % + Belerang Endap 4 % @ 30 g	pot	3.013,00	38	114.494,00
18	Salbutamol tablet 4 mg	tablet	77,00	40	3.080,00
19	Rapid test HBsAg Antigen (Prog utk Bumil)	pcs	4.453,00	50	222.650,00
20	Rapid Test Corona virus	pcs	73.000,00	5	365.000,00
21	Alopurinol tablet 100 mg	tablet	99,00	40	3.960,00
22	Asiklovir tablet 400 mg	tablet	425,00	20	8.500,00
23	Glibenklamid tablet 5 mg	tablet	137,00	3.700	506.900,00
24	Neurotropik (Vit B1 100mg, Vit B6 200mg, Vit B12 5000 mcg) injeksi	ampul	6.160,00	2	12.320,00
25	Oksitetrasiklin HCl salap 3 % 5 g	tube	1.760,00	21	36.960,00
26	Tramadol kapsul 50 mg	kapsul	396,00	55	21.780,00
27	Tripolidin HCl 2.5 mg, Pseudoefedrin 60 mg tablet (EFLIN)	tablet	1.661,00	300	498.300,00
28	Vitamin B-Kompleks tablet	tablet	135,00	90	12.150,00
29	Cimetidin tablet 200 mg	tablet	253,00	1.590	402.270,00
30	microlax	PCS	19.742,00	17	335.614,00
31	Antasida DOEN I tablet komb : Al(OH) 200 mg + Mg (OH) 200 mg	tablet	56,00	100	5.600,00
32	Anti Bakteri DOEN salap komb : Basitrasin 500 IU/g + Polimiksin 1000 IU/g	tube	3.490,00	19	66.310,00
33	Asam Folat tablet 1 mg	tablet	60,00	140	8.400,00
34	Asam Mefenammat kaplet 500 mg	kaplet	103,00	80	8.240,00
35	Difenhidramin HCl injeksi 10 mg / ml - 1 ml	ampul	1.262,00	17	21.454,00
36	Kalsium Laktat tablet 500 mg	tablet	59,00	465	27.435,00
37	Kanamycin injeksi 1 gram	vial	16.000,00	2	32.000,00
38	Kaolin Pektin sirup	botol	15.400,00	1	15.400,00
39	Kotrimoksazol susp. komb. : Sulfametoksazol 200 mg. + Trimetoprim 40 mg/5ml	botol	2.052,00	4	8.208,00
40	Kotrimoksazol tab dewasa komb : Sulfametoksazol 400 mg+Trimetoprim 80 mg	tablet	125,00	202	25.250,00
41	Pirosikam tablet 20 mg	tablet	149,00	60	8.940,00
42	Povidon Iodida 10 % 30 ml	botol	3.335,00	4	13.340,00
43	Rapid Test Corona virus	pcs	73.000,00	100	7.300.000,00
44	Bromheksin sirup 100 ml	botol	13.200,00	24	316.800,00
45	Eugenol cairan 10 ml.	botol	21.648,00	1	21.648,00
46	Kaolin Pektin sirup	botol	15.400,00	61	939.400,00
47	Povidon Iodida 10 % 300 ml	botol	20.700,00	1	20.700,00
48	Simvastatin 20 mg tablet	tablet	225,00	430	96.750,00
49	Tripolidin Hcl 1.25mg, Pseudoefedrin Hcl 30mg/5ml @ 100 ml	botol	23.100,00	26	600.600,00
50	Tripolidin HCl 2.5 mg, Pseudoefedrin 60 mg tablet	tablet	1.661,00	145	240.845,00
51	Albendazol tablet 400 mg	tablet	451,00	160	72.160,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
52	Amoksisilin kaplet 500 mg	kaplet	248,00	160	39.680,00
53	Anti Migren DOEN kombinasi : Ergotamin Tartrat 1 mg + Koffein 50 mg	tablet	199,00	200	39.800,00
54	Deksametason injeksi 5 mg / ml - 1 ml	ampul	1.210,00	25	30.250,00
55	Ekstrak Plasenta Gel @ 15 g	tube	16.500,00	1	16.500,00
56	Epinefrin HCl (Adrenalin) inj 0,1 % - 1 ml	ampul	1.518,00	25	37.950,00
57	Multivitamin mineral dengan zat besi tablet dewasa	tablet	1.023,00	735	751.905,00
58	Prednison tablet 5 mg	tablet	79,00	176	13.904,00
59	Salbutamol tablet 2 mg	tablet	64,00	186	11.904,00
60	Vitamin B-Kompleks tablet	tablet	135,00	332	44.820,00
61	Lidocain injeksi 2 % @ 2 ml	ampul	1.317,00	13	17.121,00
62	Sianokobalamin tablet 50 mcg	tablet	49,00	78	3.822,00
63	Cat Gut Chromic No. 2/0 DS 19 mm	pcs	40.865,00	15	612.975,00
64	Cat Gut Plain No. 2/0 DS 19 mm	pcs	40.865,00	4	163.460,00
65	Cat Gut Plain No. 2/0 DS 24 mm	pcs	41.345,00	5	206.725,00
66	Rapid test for Malaria Pan/Pf	pcs	47.397,00	7	331.779,00
67	Folley Catheter 2. W 30 cc No.16	pcs	20.450,00	5	102.250,00
68	Dimenhidrinat tablet 50 mg	tablet	121,00	100	12.100,00
69	Metformin tablet 500 mg	tablet	102,00	280	28.560,00
70	Piroksikam kapsul 10 mg	kapsul	132,00	95	12.540,00
71	Natrium Diklofenak tab. 25 mg	tablet	142,00	30	4.260,00
72	Asam Traneksamat tablet 500 mg	tablet	1.784,00	10	17.840,00
73	Difenhidramin HCl injeksi 10 mg / ml - 1 ml	ampul	1.262,00	29	36.598,00
74	Oksitetrasiklin HCl salap mata 1 % @ 3,5 g.	tube	2.600,00	35	91.000,00
75	Acyclovir 400mg	tablet	425,00	440	187.000,00
76	Garam Oralit	sachet	263,00	135	35.505,00
77	Anti Hemoroid DOEN kombinasi	supp	3.642,00	37	134.754,00
78	Tripolidin Hcl 1.25mg, Pseudoefedrin Hcl 30mg/5ml @100 ml	botol	23.100,00	50	1.155.000,00
79	Dimenhidrinat tablet 50 mg	tablet	121,00	100	12.100,00
80	Fero Sulfat tablet 300 mg (tablet tambah darah)	tablet	43,00	270	11.610,00
81	Kloramfenikol salap mata 1 % @ 3,5 g.	tube	1.925,00	9	17.325,00
82	Hidroklortiazida tablet 25 mg	tablet	178,00	810	144.180,00
83	Urine Bag	set	6.653,00	9	59.877,00
84	Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg	tablet	93,00	107	9.951,00
85	Oksitoksin inj 10 IU / ml-1 ml	ampul	1.232,00	18	22.176,00
86	Fitomenadion (Vitamin K1) injeksi 10 mg/ml - 1 ml	ampul	4.583,00	10	45.830,00
87	Rapid test for Dengue Ns1	pcs	34.890,00	11	383.790,00
88	Rapid test for Malaria Pan/Pf	pcs	47.397,00	19	900.543,00
89	Lidocain injeksi 2 % @ 2 ml	ampul	1.317,00	5	6.585,00
Jumlah D					22.486.919,00
Puskesmas Tanjung Uban					
1	Nystatin oral drop	botol	38.500,00	29	1.116.500,00
2	Erythromycin 500 mg	tabket	781,00	410	320.210,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
3	Cat gut Plain 2/0	pcs	40.865,00	7	286.055,00
4	Glimepirid 1 mg	tablet	174,00	2.002	348.348,00
5	Amlodipin 5 mg	tablet	77,00	1.645	126.665,00
6	Cefixime 100mg/5ml	botol	18.700,00	1	18.700,00
7	Fitomenadione 2 mg/1ml	ampul	4.236,00	10	42.360,00
8	Diazepam 5 mg	tablet	114,00	42	4.788,00
9	Nifedipin 10 mg	tablet	149,00	38	5.662,00
10	Propranolol 40 mg	tablet	90,00	139	12.510,00
11	Asam Traneksamat 500mg/5ml injeksi	ampul	2.225,00	5	11.125,00
12	Isoniazid 300 mg	tablet	170,00	16	2.720,00
13	Rapid Test Covid19	pcs	73.000,00	54	3.942.000,00
14	Glibenklamid 5 mg	tablet	137,00	2.000	274.000,00
15	Tripolidin HCl 2.5 mg, Pseudoefedrin 60 mg tablet (Eflin)	tablet	1.661,00	1.200	1.993.200,00
16	Cimetidin 200 mg	tablet	253,00	4.112	1.040.336,00
17	Larutan Ziehl Neelsen	set	178.750,00	1	178.750,00
18	Oxytetracycline HCl Salep mata	tube	2.600,00	21	54.600,00
19	Aciclovir 400 mg	tablet	425,00	128	54.400,00
20	Hyoscine Butilbromide injeksi	ampul	10.120,00	10	101.200,00
21	Metampiron 500 mg	tablet	242,00	70	16.940,00
22	Natrium laurilsulfoasetat, Natrium sulfat, Sorbitol, PEG 400 enema @ 5 ml (Microlax)	tube	18.883,00	3	56.649,00
23	Kalsium laktat 500 mg	tablet	59,00	642	37.878,00
24	Simvastatin 20 mg	tablet	225,00	5.341	1.201.725,00
25	Kaolin Pectin sirup	sirup	15.400,00	5	77.000,00
26	Devitalisasi Pasta	kotak	255.800,00	2	511.600,00
27	Multivitamin (Pehavral)	tablet	1.023,00	300	306.900,00
28	Salbutamol 2 mg	tablet	64,00	100	6.400,00
29	Ergotamin caffein	tablet	199,00	100	19.900,00
30	Ketoprofen Supp 100 mg	suppo	2.380,00	120	285.600,00
31	Deksametason injeksi 5 mg / ml - 1 ml	ampul	1.210,00	30	36.300,00
32	Haloperidol 5mg/ml	injeksi	101.300,00	25	2.532.500,00
33	Nistatin tablet vaginal 100.000 IU / g	ovula	645,00	30	19.350,00
34	Nystatin tablet salut	tablet	881,00	100	88.100,00
35	Klorfeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg	tablet	26,00	7.470	194.220,00
36	Hydrochlorthiazide 25 mg	tablet	178,00	890	158.420,00
37	Cat Gut Chronic No. 2/0 DS 19 mm	pcs	40.865,00	9	367.785,00
38	Folley Catheter 2. W 30 cc No.14	pcs	20.450,00	13	265.850,00
39	Glibenklamide 5 mg	tablet	137,00	400	54.800,00
40	Metformin 500 mg	tablet	102,00	70	7.140,00
Jumlah E					16.268.606,00
Puskesmas Tambelan					
1	Asiklovir tablet 200 mg	Tablet	236,00	200	47.200,00
2	Asiklovir tablet 400 mg	Tablet	425,00	80	34.000,00
3	Ambroksol tablet 30 mg	Tablet	231,00	800	184.800,00



	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
4	Amlodipin tablet 5 mg	Tablet	77,00	310	23.870,00
5	Amlodipin tablet 5 mg	Tablet	77,00	2.250	173.250,00
6	Amoksisilin kaplet 500 mg	Tablet	248,00	50	12.400,00
7	Amoksisilin sirup kering 125 mg / 5 ml	Botol	5.500,00	7	38.500,00
8	Antasida DOEN I tablet komb : Al(OH) 200 mg + Mg (OH) 200 mg	Tablet	56,00	90	5.040,00
9	Anti Bakteri DOEN salap komb : Basitrasin 500 IU/g + Polimiksin 1000 IU/g	Tube	3.490,00	5	17.450,00
10	Anti Fungi DOEN komb : As. Benzoat 6 % + As. Salisilat 3 %	Pot	5.170,00	33	170.610,00
11	Anti Migren DOEN kombinasi : Ergotamin Tartrat 1 mg + Koffein 50 mg	Tablet	129,00	193	24.897,00
12	Asam Folat tablet 0.4 mg	Tablet	60,00	520	31.200,00
13	Asam Mefenamat kaplet 500 mg	Tablet	103,00	50	5.150,00
14	Asam Traneksamat injeksi 100 mg @ 5 ml	Ampul	2.225,00	24	53.400,00
15	Bromheksin sirup 100 ml	Botol	13.200,00	88	1.161.600,00
16	Cefadroksil 125 mg / 5 ml sirup kering @ 60ml	Botol	4.360,00	26	113.360,00
17	Cefadroksil 250 mg / 5 ml sirup kering @ 60 ml	Botol	5.826,00	9	52.434,00
18	Cefixime kapsul	Kapsul	923,00	50	46.150,00
19	Codein 10 mg tablet	Tablet	657,00	338	222.066,00
20	Dexamethasone injeksi	Ampul	1.210,00	15	18.150,00
21	Diazepam 5 mg	Tablet	114,00	442	50.388,00
22	Diazepam larutan Rectal 5 mg/2.5 ml	Tube	14.459,00	26	375.934,00
23	Diazepam larutan Rectal 5 mg/2.5 ml	Tube	14.459,00	10	144.590,00
24	Digoxin 0,25 mg	Tablet	109,00	1.200	130.800,00
25	Diphenhidramin injeksi	Ampul	1.262,00	80	100.960,00
26	Eritromisin kaplet 500 mg	Tablet	781,00	700	546.700,00
27	Fero Sulfat tablet 300 mg (tablet tambah darah)	Tablet	43,00	130	5.590,00
28	Fitomenadion (Vitamin K1) injeksi 10 mg/ml - 1 ml	Ampul	4.583,00	26	119.158,00
29	Fitomenadion (Vitamin K1) tablet salut gula 10 mg	Tablet	818,00	990	809.820,00
30	Flukonazol 150 mg kapsul	Tablet	20.700,00	20	414.000,00
31	Garam Oralit	Sachet	273,00	10	2.730,00
32	Glibenklamid tablet 5 mg	Tablet	137,00	110	15.070,00
33	Glibenklamid tablet 5 mg	Tablet	137,00	100	13.700,00
34	Glimepiride tablet 1 mg	Tablet	174,00	625	108.750,00
35	Gliseril Guayakolat tablet 100 mg	Tablet	121,00	1.300	157.300,00
36	Griseofulvin tablet 125 mg, micronized	Tablet	223,00	305	68.015,00
37	Haloperidol 5 mg tablet	Tablet	60,00	540	32.400,00
38	Hidroklortiazida tablet 25 mg	Tablet	178,00	880	156.640,00
39	Hyoscine-N-Butilbromide injeksi	Ampul	4.600,00	10	46.000,00
40	Isoniazid tablet 100 mg	Tablet	79,00	100	7.900,00
41	Kalsium Glukonat injeksi 10% (100 mg/ml) @ 10 ml	Ampul	8.949,00	2	17.898,00
42	Kalsium Laktat tablet 500 mg	Tablet	59,00	100	5.900,00
43	Kaolin Pektin sirup	Botol	15.400,00	156	2.402.400,00
44	Klorfeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg	Tablet	26,00	260	6.760,00



	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
45	Klorpromazin HCl tablet salut 100 mg	Tablet	179,00	510	91.290,00
46	Kotrimoksazol susp. komb. : Sulfametoksazol 200 mg. + Trimetoprim 40 mg/5ml	Botol	2.052,00	11	22.572,00
47	Kotrimoksazol tab dewasa komb : Sulfametoksazol 400 mg+Trimetoprim 80 mg	Tablet	125,00	1.072	134.000,00
48	Kotrimoksazol tab dewasa komb : Sulfametoksazol 800 mg+Trimetoprim 160 mg	Tablet	512,00	600	307.200,00
49	Larutan NaCl 0,225 %+ Dextrose 5 % (cairan 1 : 4) infus @ 500 ml.	Botol	9.350,00	62	579.700,00
50	Loratadin tablet 10 mg	Tablet	127,00	590	74.930,00
51	Metampiron (Antalgin) tablet 500 mg	Tablet	242,00	100	24.200,00
52	Metildopa 250 mg	Tablet	1.088,00	510	554.880,00
53	Metoklorpramid tablet 10 mg	Tablet	83,00	100	8.300,00
54	Multivitamin anak sirup dengan kalsium pidolat 300 mg, fruktooligosakarida 300 mg dan kurkuminoid 2 mg per 5 ml	Botol	41.250,00	1	41.250,00
55	Neurotropik (Vit B1 100 mg, Vit B6 200 mg, Vit B12)	Tablet	6.300,00	76	478.800,00
56	Neurotropik (Vit B1 100 mg, Vit B6 200 mg, Vit B12) injeksi	Ampul	6.160,00	40	246.400,00
57	Nifedipin tablet 10 mg	Tablet	143,00	105	15.015,00
58	Nistatin tablet vaginal 100.000 IU / g	Tablet	645,00	68	43.860,00
59	Oksitetrasiklin HCl salap 3 % 5 g	Tube	1.760,00	25	44.000,00
60	Oksitetrasiklin HCl salap mata 1 % @ 3,5 g.	Tube	2.600,00	49	127.400,00
61	Parasetamol syr 120mg / 5 ml @ 60 ml	Botol	1.238,00	3	3.714,00
62	Povidon Iodida 10 % 30 ml	Botol	3.335,00	32	106.720,00
63	Povidon Iodida 10 % 30 ml	Botol	3.335,00	4	13.340,00
64	Prednison tablet 5 mg	Tablet	79,00	225	17.775,00
65	Salap 2 - 4 Kombinasi : As.Salisilat 2 % + Belerang Endap 4 % @ 30 g	Pot	3.013,00	73	219.949,00
66	Salbutamol tablet 2 mg	Tablet	77,00	260	20.020,00
67	Salbutamol tablet 4 mg	Tablet	77,00	686	52.822,00
68	Salbutamol tablet 4 mg	Tablet	77,00	179	13.783,00
69	Simvastatin 20 mg tablet	Tablet	225,00	268	60.300,00
70	Tramadol kapsul 50 mg	Kapsul	88,00	154	13.552,00
71	Tripolidin Hcl 1.25mg, Pseudoefedrin Hcl 30mg/5ml @60 ml	Botol	22.425,00	102	2.287.350,00
72	Tripolidin HCl 2.5 mg, Pseudoefedrin 60 mg tablet	Tablet	1.386,00	464	643.104,00
73	Tripolidin HCl 2.5 mg, Pseudoefedrin 60 mg tablet	Tablet	1.386,00	1.980	2.744.280,00
74	Vitamin B-Kompleks tablet	Tablet	135,00	220	29.700,00
	<i>BAHAN HABIS PAKAI</i>				
1	Cat Gut Plain No. 3/0 DS 19 mm	Pcs	40.865,00	71	2.901.415,00
2	I.V. Canula Venocath No. 20	Pcs	16.088,00	2	32.176,00
	<i>BAHAN LABORATORIUM (REAGEN KIMIA)</i>				
1	Larutan Karbol Fuchsin 1 %	Botol	100.100,00	1	100.100,00
2	Larutan Metanol	Botol	62.700,00	1	62.700,00
3	Larutan Metilen Blue	Botol	79.750,00	1	79.750,00
4	Larutan Rees Ecker	Botol	52.150,00	1	52.150,00
5	Larutan Turk	Botol	29.350,00	1	29.350,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
6	Rapid test HBsAg Antigen	Pcs	11.047,00	65	718.055,00
Jumlah F					21.170.832,00
Puskesmas Teluk Sebong					
1	Nistatin oral drop	botol	38.500,00	32	1.232.000,00
2	Alprazolam tab 1 mg	tablet	120,00	14	1.680,00
3	Asam Traneksamat injeksi 100 mg @ 5 ml	ampul	2.225,00	9	20.025,00
4	Diazepam tablet 5 mg	tablet	114,00	41	4.674,00
5	Diazepam larutan Rectal 5 mg/2.5 ml	tube	14.459,00	3	43.377,00
6	Glimepiride tablet 1 mg	tablet	174,00	700	121.800,00
7	Asiklovir tablet 200 mg	tablet	236,00	400	94.400,00
8	Salbutamol tablet 4 mg	tablet	77,00	100	7.700,00
9	Cimetidine Tablet	tablet	230,00	1.300	299.000,00
10	Fero Sulfat tablet 300 mg (tablet tambah darah)	tablet	43,00	1.590	68.370,00
11	Glibenklamid tablet 5 mg	tablet	137,00	2.800	383.600,00
12	Glimepiride 2 mg	tablet	207,00	300	62.100,00
13	Tramadol kapsul 50 mg	kapsul	396,00	10	3.960,00
14	Anti Bakteri DOEN salap komb : Basitrasin 500 IU/g + Polimiksin 1000 IU/g	tube	3.490,00	25	87.250,00
15	Kalsium Laktat tablet 500 mg	tablet	59,00	400	23.600,00
16	Kotrimoksazol tab dewasa komb : Sulfametoksazol 400 mg+Trimetoprim 80 mg	tablet	125,00	700	87.500,00
17	Kaolin Pektin sirup	botol	15.400,00	34	523.600,00
18	Simvastatin 20 mg tablet	tablet	225,00	500	112.500,00
19	Simvastatin 20 mg tablet	tablet	225,00	500	112.500,00
20	Tripolidin HCl 2.5 mg, Pseudoefedrin 60 mg tablet	tablet	1.661,00	100	166.100,00
21	Deksametason injeksi 5 mg / ml - 1 ml	ampul	1.210,00	25	30.250,00
22	Diazepam larutan Rectal 5 mg/2.5 ml	tube	14.459,00	5	72.295,00
23	Epinefrin HCl (Adrenalin) inj 0,1 % - 1 ml	ampul	1.518,00	8	12.144,00
24	Ketoprofen Supp 100 mg	supp	2.380,00	12	28.560,00
25	Klorpromazin HCl tablet salut 100 mg	tablet	170,00	168	28.560,00
26	Prednison tablet 5 mg	tablet	79,00	1.300	102.700,00
27	Salbutamol tablet 2 mg	tablet	64,00	300	19.200,00
28	Amoksisilin sirup kering 125 mg / 5 ml	botol	5.500,00	17	93.500,00
29	Salbutamol tablet 4 mg	tablet	77,00	200	15.400,00
30	Zinc siup 20 mg/5 ml @ 60 ml	botol	3.285,00	41	134.685,00
31	Difenhidramin HCl injeksi 10 mg / ml - 1 ml	ampul	1.262,00	15	18.930,00
32	Fitomenadion (Vitamin K1) injeksi 10 mg/ml - 1 ml	ampul	4.583,00	10	45.830,00
33	Oksitoksin inj 10 IU / ml-1 ml	ampul	1.232,00	1	1.232,00
Jumlah G					4.059.022,00
Puskesmas Berakit					
1	Test HIV Lini I	pcs	85.894,00	25	2.147.350,00
2	Rapid test HBsAg Antigen	pcs	4.453,00	50	222.650,00
3	Pembalut elastis ukuran 10 cm x 4.55 m	roll	37.500,00	26	975.000,00
4	Gentian violet	btl	3.850,00	2	7.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
5	Hyoscine Butilbromide	tab	1.705,00	5	8.525,00
6	Sputit injeksi 10 cc	pcs	1.200,00	7	8.400,00
7	Kasa kompres 40 cm x 40 cm	bks	1.760,00	15	26.400,00
8	Infus set anak	pcs	9.504,00	1	9.504,00
9	Stesolid rektal 5 mg	tube	14.459,00	2	28.918,00
10	Glibenclamide 5 mg	tab	137,00	2.000	274.000,00
11	Simvastatin 20 mg	tab	225,00	700	157.500,00
12	Polypropilene blue 4/0	pcs	31.765,00	24	762.360,00
13	Difenhidramin inj	ampul	1.262,00	20	25.240,00
14	Caladine lotion	btl	13.750,00	4	55.000,00
15	Ketoproven suppositoria	pcs	2.380,00	10	23.800,00
16	Kaolin pektin sirup	btl	15.400,00	57	877.800,00
17	Microlox enema	tube	18.883,00	15	283.245,00
18	Antasida tablet	tab	56,00	89	4.984,00
19	Bacitracin polimixin salep	tube	3.490,00	5	17.450,00
20	Cimetidin	tab	253,00	800	202.400,00
21	Catgut chromic 3/0	pcs	41.685,00	3	125.055,00
22	Pembalut elastis ukuran 15 cm x 4.55 m	roll	48.100,00	2	96.200,00
23	Pehavral tablet	tab	1.023,00	117	119.691,00
24	Amoxycillin syrup 125mg	btl	5.500,00	74	407.000,00
25	Mineral mix	sach	3.116,00	40	124.640,00
26	Metformin 500mg	tab	102,00	370	37.740,00
27	Larutan eosin 100ml	btl	183.228,00	3	549.684,00
28	Cefadroxil syrup 250mg	btl	5.826,00	7	40.782,00
29	Difenhidramin injeksi	amp	1.262,00	25	31.550,00
30	Parasetamol syrup	btl	5.500,00	8	44.000,00
31	Bromhexin syrup	btl	13.200,00	3	39.600,00
32	Kalsium laktat	tab	59,00	400	23.600,00
33	Catgut chrome 2/0	pcs	40.865,00	9	367.785,00
34	Hidroklortiazide	tab	178,00	480	85.440,00
35	Prednison	tab	79,00	100	7.900,00
36	Klorfeniramin maleat	tab	26,00	313	8.138,00
37	Flavoxat / urispas	tab	6.233,00	20	124.660,00
38	Ferro sulfat tablet	tab	43,00	30	1.290,00
39	Propranolol tablet	tab	90,00	100	9.000,00
40	Deksametason injeksi	amp	1.210,00	10	12.100,00
41	Deksametason tablet	tab	160,00	80	12.800,00
42	Cetirizin tablet	tab	104,00	96	9.984,00
43	Amoxycillin tablet 500mg	tab	248,00	30	7.440,00
44	Pehavral tablet	tab	1.023,00	80	81.840,00
45	Tripolidin pseudoefedrin tablet	tab	1.661,00	30	49.830,00
46	Vitamin B kompleks	tab	135,00	40	5.400,00
47	Salbutamol 4mg	tab	77,00	10	770,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
48	Ketoprofen supp	supp	2.380,00	4	9.520,00
49	Natrium diklofenak 25mg	tab	142,00	10	1.420,00
50	Kasa 4x5	roll	825,00	1	825,00
51	Ambroksol tablet	tab	231,00	35	8.085,00
52	Zinc syrup	btl	3.285,00	1	3.285,00
53	Albendazole tablet	tab	451,00	97	43.747,00
54	Garam oralit	sach	263,00	154	40.502,00
55	Hidroklortiazida tablet	tab	178,00	200	35.600,00
56	Amoksisilin tablet	tab	248,00	66	16.368,00
57	Pirantel suspensi	btl	11.050,00	6	66.300,00
58	Povidon iodine 30 cc	btl	3.335,00	1	3.335,00
59	Anti hemoroid suppositoria	supp	3.642,00	11	40.062,00
60	Epinefrin injeksi	amp	1.518,00	9	13.662,00
61	Gliseril guayakolat tablet	tab	165,00	90	14.850,00
62	Bisturi	pcs	3.150,00	5	15.750,00
63	Fitomenadion injeksi	amp	4.583,00	4	18.332,00
64	Natrium diclofenac 25 mg	tab	142,00	15	2.130,00
65	Deksametason 0.5 mg	tab	160,00	40	6.400,00
66	Asam askorbat 500 mg	tab	198,00	900	178.200,00
Jumlah H					9.060.518,00
Puskesmas Toapaya					
1	Pirasetam tab 400mg	Tablet	495,00	100	49.500,00
2	Omeprazol injeksi	Vial	11.245,00	10	112.450,00
3	Eritromisin tab 500mg	Tablet	781,00	470	367.070,00
4	Phytomenadion tab 10mg	Tablet	818,00	240	196.320,00
5	Nistatin Oral drop	Botol	38.500,00	32	1.232.000,00
6	Kalsium Glukonas injeksi	Ampul	8.949,00	6	53.694,00
7	Oksitetrasiklin zalf mata	tube	2.600,00	5	13.000,00
8	Phytomenadion inj 2 mg	Ampul	4.236,00	19	80.484,00
9	Fluconazol 150mg kapsul	kapsul	20.700,00	76	1.573.200,00
10	Dimenhidrinat tab	Tablet	121,00	100	12.100,00
11	Amlodipin tab 5 mg	Tablet	77,00	45	3.465,00
12	Larutan H2O2 3%	Botol	3.864,00	2	7.728,00
13	Isoniazid tab 100mg	Tablet	79,00	50	3.950,00
14	Salep 2-4	pot	3.013,00	17	51.221,00
15	Asiklovir tab 200mg	Tablet	236,00	205	48.380,00
16	Amoksisilin tab 500mg	Tablet	248,00	260	64.480,00
17	Alprazolam tab 1 mg	tablet	120,00	45	5.400,00
18	Diazepam tab 5 mg	tablet	114,00	87	9.918,00
19	Diazepam suppos	suppos	14.459,00	6	86.754,00
20	Aciclovir tab 400g	Tablet	425,00	156	66.300,00
21	Cimetidin tab	Tablet	253,00	2.930	741.290,00
22	Eflin tab	Tablet	1.661,00	380	631.180,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
23	Glibencamid tab	Tablet	137,00	1.300	178.100,00
24	Metoclopramid tab	Tablet	83,00	347	28.801,00
25	Oxytetracycline salep mata 1 %	Tube	2.600,00	21	54.600,00
26	Tablet tambah darah (PROGRAM)	Tablet	43,00	2.910	125.130,00
27	Tramadol kapsul	kapsul	396,00	40	15.840,00
28	Sorbitol PEG Enema @5ml / Microlax	ktk / 3 tube	59.225,00	17	1.006.825,00
29	Kotrimoksazol syr	botol	2.052,00	9	18.468,00
30	Difenhydramin inj	ampul	1.262,00	30	37.860,00
31	Antibakteri DOEN / Basitracin zalf	tube	3.490,00	19	66.310,00
32	Tremenza syr	botol	23.100,00	37	854.700,00
33	Kaolin Pektin syr	botol	15.400,00	5	77.000,00
34	Simvastatin tab 20 mg	Tablet	225,00	1.685	379.125,00
35	Isoniazid tab 100mg/Program TB	Tablet	225,00	300	67.500,00
36	Favipiravir tab 200mg	Tablet	10.399,00	220	2.287.780,00
37	Pehavral tab	Tablet	1.023,00	280	286.440,00
38	Amoksisillin tak 500mg	Tablet	248,00	814	201.872,00
39	Clindamycin kaps 150mg	Kapsul	754,00	50	37.700,00
40	Deksamethason injeksi	Ampul	1.210,00	11	13.310,00
41	Prednison tab	Tablet	79,00	120	9.480,00
42	Benzatin Benzil Penicillin	vial	16.675,00	27	450.225,00
43	Salbutamol tab 2 mg	Tablet	64,00	220	14.080,00
44	Epinefrin inj	Ampul	1.518,00	2	3.036,00
45	CTM tab	Tablet	26,00	1.300	33.800,00
46	Zinc syr	botol	3.285,00	3	9.855,00
47	Hidroklortiazid tab 25mg	Tablet	178,00	500	89.000,00
48	Piroksikam tab 10 mg	Tablet	132,00	1.200	158.400,00
49	Metformin tab	Tablet	102,00	1.130	115.260,00
50	Kotrimoksazol tab 960mg	Tablet	512,00	134	68.608,00
51	Difenhidramin inj	Ampul	1.262,00	23	29.026,00
52	Cat Gut Plain no. 3/0	pcs	40.865,00	22	899.030,00
53	Cat Gut Plain no. 2/0	pcs	40.865,00	18	735.570,00
54	Bisturi	pcs	3.150,00	20	63.000,00
55	Cat Gut Chrome no. 3/0	pcs	41.685,00	8	333.480,00
56	Cat Gut Chrome no. 2/0	pcs	40.865,00	25	1.021.625,00
57	Dengue IgG/IgM	pcs	22.631,00	40	905.240,00
58	Asetil Sistein kapsul	Kapsul	440,00	20	8.800,00
59	Cetirizin syr	botol	3.861,00	134	517.374,00
60	Pyrantel tab 125mg	Tablet	331,00	4	1.324,00
61	Phytomenadione inj 10mg/ml	Ampul	4.583,00	27	123.741,00
62	Garam Oralit	Sachet	263,00	25	6.575,00
63	Isosorbid Dinitrat	Tablet	93,00	230	21.390,00
64	Multivitamin / Bionicom Zinc	Tablet	594,00	340	201.960,00
65	Asam Askorbat / Vit C 500mg	Tablet	198,00	160	31.680,00



Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
Jumlah I				16.998.804,00
Puskesmas Mantang				
1	Kalsium Glukonat injeksi 10% (100 mg/ml) @ 10 ml	ampul	23	205.827,00
2	Pirasetam tablet 400 mg	tablet	91	45.045,00
3	Propranolol HCl tablet 40 mg	tablet	100	9.000,00
4	Metildopa 250 mg tablet	tablet	40	43.520,00
5	Fitomenadion (Vitamin K1) tablet salut gula 10 mg	tablet	380	310.840,00
6	Nistatin oral drop	botol	31	1.193.500,00
7	Larutan NaCl 0,225 %+ Dextrose 5 % (cairan 1 : 4) infus @ 500 ml.	botol	6	59.040,00
8	Amlodipin 5 mg tablet	tablet	1.630	125.510,00
9	Lactobacillus	sachet	40	198.000,00
10	Fitomenadion (Vitamin K1) injeksi 10 mg/ml - 1 ml	ampul	24	109.992,00
11	Nifedipin tablet 10 mg	tablet	160	23.840,00
12	Flukonazol 150 mg kapsul	kapsul	5	103.500,00
13	Nifedipin tablet 10 mg	tablet	400	59.600,00
14	Dimenhidrinat tablet 50 mg	tablet	100	12.100,00
15	Klorheksidin lar 0.2% (larutan kumur antiseptik gigi) @ 60 ml	botol	12	310.200,00
16	Diazepam tablet 5 mg	tablet	163	18.582,00
17	Digoksin tablet 0,25 mg	tablet	200	20.800,00
18	Asiklovir tablet 200 mg	tablet	197	46.492,00
19	Salap 2 - 4 Kombinasi : As.Salisilat 2 % + Belerang Endap 4 % @ 30 g	pot	10	30.130,00
20	Salbutamol tablet 4 mg	tablet	12	924,00
21	Isoniazid tablet 100 mg	tablet	240	18.960,00
22	Diazepam larutan Rectal 5 mg/2.5 ml	tube	6	86.754,00
23	Haloperidol 5 mg tablet	tablet	100	5.600,00
24	Glibenklamid tablet 5 mg	tablet	1.850	253.450,00
25	Tripolidin HCl 2.5 mg, Pseudoefedrin 60 mg tablet	tablet	481	608.465,00
26	Hyoscine-N-Butilbromide injeksi	ampul	10	101.200,00
27	Alopurinol tablet 100 mg	tablet	80	7.920,00
28	Natrium laurilsulfoasetat, Natrium sulfat, Sorbitol, PEG 400 enema @ 5 ml	Tube	60	1.132.980,00
29	Cefixime 100 mg	capsul	328	541.200,00
30	Anti Malaria DOEN kombinasi : Pirimetamin 25 mg + Sulfadoksin 500 mg	tablet	100	54.600,00
31	Cat Gut Chromic No. 3/0 DS 19 mm	pcs	1	41.685,00
32	Difenhidramin HCl injeksi 10 mg / ml - 1 ml	ampul	1	1.262,00
33	Cimetidin tablet 200 mg	tablet	2.484	628.452,00
34	Oksitetrasiklin HCl salap 3 % 5 g	tube	25	44.000,00
35	Metoklorpramid tablet 10 mg	tablet	136	11.288,00
36	Kotrimoksazol susp. komb. : Sulfametoksazol 200 mg. + Trimetoprim 40 mg/5ml	botol	1	2.052,00
37	Asam Folat tablet 0.4 mg	tablet	275	16.500,00
38	Nifedipin tablet 10 mg	tablet	1.200	178.800,00
39	Difenhidramin HCl injeksi 10 mg / ml - 1 ml	ampul	13	16.406,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
40	Silk (Benang Bedah Sutura) No. 1 DS 24 mm	sachet	31.040,00	15	465.600,00
41	Simvastatin 20 mg tablet	tablet	225,00	232	52.200,00
42	Pancreatin komb. tablet	tablet	3.080,00	120	369.600,00
43	Bromheksin sirup 4mg/ 5ml 60 ml	botol	13.200,00	39	514.800,00
44	Kaolin Pektin sirup	botol	15.400,00	51	785.400,00
45	Tripolidin Hcl 1.25mg, Pseudoefedrin Hcl 30mg/5ml @100 ml	botol	23.100,00	9	207.900,00
46	Tripolidin HCl 2.5 mg, Pseudoefedrin 60 mg tablet	tablet	1.265,00	100	126.500,00
47	Glibenklamid tablet 5 mg	tablet	137,00	93	12.741,00
48	Prednison tablet 5 mg	tablet	79,00	152	12.008,00
49	Vitamin B-Kompleks tablet	tablet	135,00	200	27.000,00
50	Anti Migren DOEN kombinasi : Ergotamin Tartrat 1 mg + Koffein 50 mg	tablet	199,00	200	39.800,00
51	Deksametason injeksi 5 mg / ml - 1 ml	ampul	1.210,00	34	41.140,00
52	Clindamisin Capsul 150 mg	capsul	754,00	60	45.240,00
53	Salbutamol tablet 2 mg	tablet	64,00	106	6.784,00
54	Ketoprofen Supp 100 mg	supp	2.380,00	24	57.120,00
55	Epinefrin HCl (Adrenalin) inj 0,1 % - 1 ml	ampul	1.518,00	10	15.180,00
56	Salbutamol tablet 4 mg	tablet	77,00	55	4.235,00
57	Sianokobalamin injeksi 500 mcg/ml - 1 ml	ampul	1.160,00	11	12.760,00
58	Sianokobalamin tablet 50 mcg	tablet	1.160,00	88	102.080,00
59	Cetirizina kapsul 10 mg	kapsul	104,00	100	10.400,00
60	Jelly USG @ 250 g	botol	14.471,00	2	28.942,00
61	Hidroklortiazida tablet 25 mg	tablet	178,00	805	143.290,00
62	Folley Catheter 2. W 30 cc No.14	pcs	20.450,00	2	40.900,00
63	Needle 24 G	pcs	311,00	4	1.244,00
64	Larutan Giemsa Stain 100 ml.	botol	363.253,00	2	726.506,00
65	Cetirizina sirup 5 mg / 5 ml @ 60 ml	botol	3.861,00	32	123.552,00
66	Cefadroksil 250 mg / 5 ml sirup kering @ 60 ml	botol	5.660,00	36	203.760,00
67	Dimenhidrinat tablet 50 mg	tablet	121,00	19	2.299,00
68	Piroksikam capsul 10 mg	capsul	132,00	65	8.580,00
69	Kotrimoksazol tab dewasa komb : Sulfametoksazol 800 mg+Trimetoprim 160 mg	kaplet	512,00	400	204.800,00
70	Flavoksat HCl tab. 200 mg	tablet	6.233,00	34	211.922,00
71	Larutan Mersi Oil 100 ml	botol	381.655,00	1	381.655,00
72	Difenhidramin HCl injeksi 10 mg / ml - 1 ml	ampul	1.262,00	15	18.930,00
73	Garam Oralit untuk 200 ml air	sachet	263,00	46	12.098,00
74	Hidroklortiazida tablet 25 mg	tablet	178,00	105	18.690,00
75	Amoksisilin kaplet 500 mg	kaplet	248,00	150	37.200,00
76	ASAM ASKORBAT 500 MG	tablet	198,00	856	169.488,00
77	Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg	tablet	93,00	73	6.789,00
78	Fitomenadion (Vitamin K1) injeksi 10 mg/ml - 1 ml	ampul	4.583,00	64	293.312,00
79	Anti Hemoroid DOEN kombinasi	supp	3.642,00	27	98.334,00
80	RAPID TEST CORONA VIRUS PL (PNS)	pcs	73.000,00	100	7.300.000,00



Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
81	RAPID TEST CORONA VIRUS PL (PNS)	pcs	73.000,00	50	3.650.000,00
Jumlah J					23.268.795,00
Puskesmas Kelong					
1	Asiklovir tablet 200 mg	TABLET	236,00	6	1.416,00
				60	14.160,00
				50	11.800,00
				50	11.800,00
2	Asiklovir tablet 400 mg	TABLET	425,00	20	8.500,00
				380	161.500,00
3	Fitomenadion (Vitamin K1) 2 mg/ml injeksi	ampul	4.236,00	30	127.080,00
4	Cefixime 100 mg/5 ml sirup kering @ 30ml	BOTOL	18.700,00	22	411.400,00
5	Cefixime 100 mg	KAPSUL	923,00	334	308.282,00
6	Glimepiride tablet 1 mg	TABLET	174,00	577	100.398,00
7	Omeprazole inj 40 mg/ 10 ml	ampul	11.245,00	13	146.185,00
8	Amlodipin 10 mg tablet	tablet	94,00	350	32.900,00
9	Natrium Diklofenak emulgel	tube	12.161,00	2	24.322,00
10	Glibenklamid tablet 5 mg	tablet	137,00	1.710	234.270,00
11	Fero Sulfat tablet 300 mg (tablet tambah darah)	tablet	43,00	170	7.310,00
12	Tripolidin HCl 2.5 mg, Pseudoefedrin 60 mg tablet (EFLIN)	tablet	1.667,00	254	423.418,00
13	Amoksisilin kaplet 500 mg	kaplet	248,00	732	181.536,00
				40	9.920,00
14	Eritromisin kaplet 500 mg	kaplet	781,00	120	93.720,00
15	Pirasetam tablet 400 mg	tablet	495,00	20	9.900,00
16	Metoklorpramid tablet 10 mg	tablet	83,00	30	2.490,00
17	Isoniazid tablet 300 mg	tablet	170,00	100	17.000,00
18	Metampiron (Antalgin) tablet 500 mg	tablet	242,00	30	7.260,00
19	Epinefrin HCl (Adrenalin) inj 0,1 % - 1 ml	ampul	1.518,00	4	6.072,00
20	Ketorolac 30 mg/ml injeksi @ 1ml	ampul	1.045,00	8	8.360,00
21	Salbutamol Nebules cairan ih 0.1% @ 2.5ml (VENTOLIN)	ampul	10.750,00	6	64.500,00
22	Hyoscine-N-Butilbromide injeksi	ampul	10.120,00	10	101.200,00
23	Flukonazol 150 mg kapsul	kapsul	20.700,00	10	207.000,00
24	Propranolol HCl tablet 40 mg	tablet	90,00	200	18.000,00
25	Nifedipin tablet 10 mg	tablet	143,00	20	2.860,00
26	Asam Traneksamat injeksi 500 mg @ 5 ml	ampul	2.225,00	12	26.700,00
27	Asam Traneksamat tablet 500 mg	tablet	1.784,00	25	44.600,00
28	Difenhidramin HCl injeksi 10 mg / ml - 1 ml	ampul	1.262,00	30	37.860,00
29	Kalsium Glukonat injeksi 10% (100 mg/ml) @ 10 ml	ampul	8.949,00	5	44.745,00
30	Simetidin tablet		348,00	2.300	800.400,00
31	Cefadroksil 250 mg / 5 ml sirup kering @ 60 ml	sirup	5.660,00	22	124.520,00
32	Sianokobalamin injeksi 500 mcg/ml - 1 ml	ampul	1.160,00	69	80.040,00
33	Piroksikam capsul 10 mg	tablet	116,00	103	11.948,00
34	Neurotropik (Vit B1 100mg, Vit B6 200mg, Vit B12 5000 mcg) injeksi	ampul	5.715,00	5	28.575,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
35	Anti Migren DOEN kombinasi : Ergotamin Tartrat 1 mg + Koffein 50 mg	tablet	199,00	100	19.900,00
36	Difenhidramin HCl injeksi 10 mg / ml - 1 ml	ampul	1.262,00	45	56.790,00
37	Difenhidramin HCl injeksi 10 mg / ml - 15 ml	ampul	8.778,00	3	26.334,00
38	Zinc sirup 20 mg/5 ml @ 60 ml	BOTOL	3.285,00	20	65.700,00
39	Omeprazole inj 40 mg/ 10 ml	ampul	11.245,00	13	146.185,00
40	Cetirizina kapsul 10 mg	tablet	104,00	59	6.136,00
41	Glipepiride tablet 1 mg	tablet	174,00	628	109.272,00
42	Salbutamol tablet 2 mg	tablet	64,00	39	2.496,00
43	Hidroklortiazida tablet 25 mg	tablet	178,00	650	115.700,00
44	Amoksisilin kaplet 500 mg	tablet	248,00	132	32.736,00
45	Gliseril Guayakolat tablet 100 mg	tablet	165,00	61	10.065,00
46	Multivitamin mineral dengan zat besi tablet dewasa	tablet	363,00	11	3.993,00
47	Larutan infus Glukosa 5% steril @ 500 ml	BOTOL	6.900,00	3	20.700,00
48	Garam Oralit untuk 200 ml air	sachet	263,00	20	5.260,00
49	Fitomenadion (Vitamin K1) injeksi 10 mg/ml - 1 ml	ampul	4.583,00	45	206.235,00
50	Tripolidin HCl 2.5 mg, Pseudoefedrin 60 mg tablet	tab	1.667,00	8	13.336,00
51	Parasetamol syr 120mg / 5 ml @ 60 ml	botol	1.238,00	7	8.666,00
52	Amoksisilin sirup kering 125 mg / 5 ml	botol	5.500,00	5	27.500,00
53	mineral mix			27	0,00
54	Cetirizina sirup 5 mg / 5 ml @ 60 ml	botol	3.861,00	3	11.583,00
55	Kombinasi anti alergi lotion 100 ml (Kalamina 8%, Difenhidramin HCl 1%, Kamfer 0.1%, Gliserol alkohol 2%)	botol	9.900,00	1	9.900,00
56	Natrium Diklofenak tab. 25 mg	tablet	142,00	50	7.100,00
57	Asam Askorbat 500mg	tablet	1.715,00	50	85.750,00
58	Klorfeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg	tablet	26,00	104	2.704,00
59	Neurotropik (Vit B1 100mg, Vit B6 200mg, Vit B12 5000 mcg) injeksi	ampul	6.160,00	5	30.800,00
60	Ketoprofen Supp 100 mg	supp	2.380,00	60	142.800,00
61	Piroksikam kapsul 10 mg	capsul	121,00	103	12.463,00
62	Povidon Iodida 10 % 30 ml	botol	3.335,00	4	13.340,00
63	Eritromisin kaplet 500 mg	kaplet	781,00	120	93.720,00
64	Pirasetam tablet 400 mg	tablet	495,00	20	9.900,00
65	Metampiron (Antalgin) tablet 500 mg	tablet	242,00	30	7.260,00
66	Amlodipin 5 mg tablet	tablet	77,00	265	20.405,00
67	Prednison tablet 5 mg	tablet	79,00	20	1.580,00
Jumlah K					5.280.256,00
Puskesmas Sei Lekop					
1	Alprazolam tab 1 mg	Tablet	120,00	55	6.600,00
2	Calcium Gluconas inj	Ampul	8.949,00	5	44.745,00
3	Phytomenadion tab 10 mg	Tablet	818,00	100	81.800,00
4	Catgut Plain 2/0	pcs	40.865,00	24	980.760,00
5	Asam Tranexamat inj 500mg/5ml	Ampul	2.225,00	28	62.300,00
6	Diazepam tab 5 mg	Tablet	114,00	134	15.276,00



	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
7	Vitamin B complex tab	Tablet	135,00	100	13.500,00
8	Isoniazid tab 300 mg	Tablet	170,00	200	34.000,00
9	Ventolin Nebulizer	Ampul	10.725,00	5	53.625,00
10	Clozapine tab 25 mg	Tablet	1.121,00	100	112.100,00
11	Haloperidol tab 5 mg	Tablet	56,00	102	5.712,00
12	Stesolid 5 mg/ 2,5ml	tube	14.459,00	8	115.672,00
13	Cimetidin tab 200 mg	Tablet	253,00	239	60.467,00
14	Glibenklamid tab 5 mg	Tablet	137,00	1.000	137.000,00
15	Hyoscine Butylbromide 20 mg/ml	Ampul	10.120,00	40	404.800,00
16	Tramadol Kapsul	Kapsul	396,00	30	11.880,00
17	Acyclovir 400 mg tab	Tablet	425,00	94	39.950,00
18	Catgut Chrom 3/0	pcs	41.685,00	40	1.667.400,00
19	Biocombin 5000 inj	Ampul	6.160,00	15	92.400,00
20	Dipenhidramin inj	Ampul	1.262,00	11	13.882,00
21	Microlox gel	Tube	18.883,00	14	264.362,00
22	Glibenklamid tab	Tablet	137,00	1.000	137.000,00
23	Cotrimoxazol syr	Botol	2.052,00	7	14.364,00
24	Chlorpromazine tab 100 mg	Tablet	170,00	130	22.100,00
25	Polypropylene 1	pcs	31.040,00	15	465.600,00
26	Cefadroxyl syr 125mg/ml	Botol	4.360,00	19	82.840,00
27	Cimetidine tab 200 mg	Tablet	253,00	200	50.600,00
28	Tablet tambah darah	Tablet	43,00	240	10.320,00
29	Natrium Diklofenac 25 mg	Tablet	142,00	30	4.260,00
30	Allopurinol tab 100 mg	Tablet	99,00	100	9.900,00
31	Acyclovir 400 mg tab	Tablet	425,00	100	42.500,00
32	Catgut Chrom 3/0	pcs	41.685,00	7	291.795,00
33	Antalgin tab	Tablet	242,00	30	7.260,00
34	Antasida tab	Tablet	56,00	204	11.424,00
35	Cotrimoxazol tab 480 mg	Tablet	125,00	100	12.500,00
36	Simvastatin tab 20 mg	Tablet	225,00	100	22.500,00
37	Amlodipin tab 10 mg	Tablet	94,00	70	6.580,00
38	Simvastatine tab 20 mg	Tablet	225,00	535	120.375,00
39	Tremenza tab	Tablet	1.661,00	218	362.098,00
40	Kodein tab 10 mg	tablet	657,00	33	21.681,00
41	Methylprednisolon tab	Tablet	139,00	140	19.460,00
42	Hidrochlorothiazid tab 25 mg	Tablet	178,00	593	105.554,00
43	Zinc tablet	Tablet	604,00	100	60.400,00
44	Zinc syr	Botol	3.285,00	35	114.975,00
45	Catgut Plain 3/0	Pcs	40.865,00	6	245.190,00
46	Catgut Plain 2/0	Pcs	40.865,00	6	245.190,00
47	Favipiravir tab	Tablet	1.039,00	100	103.900,00
48	Salbutamol tab 2 mg	Tablet	64,00	190	12.160,00
49	Parasetamol syr	Botol	5.500,00	11	60.500,00



Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
50	Ambroxol tab	Tablet	231,00	340	78.540,00
51	Amoxicillin tab 500 mg	Tablet	248,00	180	44.640,00
52	Vitamin B komplek	Tablet	135,00	110	14.850,00
53	Prednison tab	Tablet	79,00	300	23.700,00
54	Amoxicillin tab 500 mg	Tablet	248,00	190	47.120,00
55	Pehavral tab	Tablet	1.023,00	200	204.600,00
56	Favipiravir tab	Tablet	1.039,00	580	602.620,00
57	Larutan MgSo4 20 %	Botol	3.200,00	10	32.000,00
58	Benzatin Benzylpenicillin	vial	16.675,00	5	83.375,00
59	Ketoprofen supp	Suppos	2.380,00	7	16.660,00
60	Dexamethason inj	Ampul	1.210,00	6	7.260,00
61	Efinephrin inj	Ampul	1.518,00	3	4.554,00
62	Salbutamol tab 2 mg	Tablet	64,00	96	6.144,00
63	Amoxicillin syr 125 mg/ml	Botol	5.500,00	18	99.000,00
64	Cetirizin syr	Botol	3.861,00	5	19.305,00
65	Salbutamol tab 4 mg	Tablet	77,00	110	8.470,00
66	Vitamin B12	Tablet	49,00	100	4.900,00
67	Lidocain 2 % inj	Ampul	1.317,00	10	13.170,00
68	Propranolol tab 10 mg	Tablet	69,00	100	6.900,00
69	Urispas 200 mg	Tablet	6.233,00	60	373.980,00
70	Dipenhidramin 10mg/ml	Ampul	1.262,00	42	53.004,00
71	Amoxicillin 500 mg	tablet	248,00	40	9.920,00
72	Metformin 500 mg	Tablet	102,00	39	3.978,00
73	Metoklopramid 10 mg	Tablet	83,00	141	11.703,00
74	Piroxicam 20 mg	Tablet	149,00	80	11.920,00
75	Lansoprazol 30 mg	kapsul	330,00	25	8.250,00
76	Hidrochlorotiazid 25 mg	Ampul	178,00	200	35.600,00
77	Garam Oralit	Sachet	263,00	130	34.190,00
78	Pirantel Pamoat syr	Botol	11.050,00	41	453.050,00
79	Phytomenadion inj 10 mg/ ml	Ampul	4.583,00	33	151.239,00
80	Rapid test Covid-19	pcs	73.000,00	50	3.650.000,00
81	Aluvia 200 mg/ 50 mg tab	Botol		2	0,00
82	Efavirenz tab 600 mg	Botol	191.250,00	2	382.500,00
83	Duviral tab	Botol	205.740,00	1	205.740,00
84	Zidovudine	Botol		1	0,00
85	Dolutegravir	Botol		1	0,00
86	TELURA (TLE)	Botol	354.530,00	16	5.672.480,00
Jumlah L					19.256.619,00
Puskesmas Numbing					
1	Fitomenadion (Vitamin K1) tablet salut gula 10 mg	tablet	818,00	258	211.044,00
2	Nistatin oral drop	botol	38.500,00	28	1.078.000,00
3	Amlodipin 5 mg tablet	tablet	77,00	2.160	166.320,00
4	Dimenhidrinat tablet 50 mg	tablet	121,00	100	12.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
5	Favipiravir	tablet	14.850,00	200	2.970.000,00
6	Fitomenadion (Vitamin K1) 2 mg/ml injeksi	ampul	4.236,00	19	80.484,00
7	Stick gula darah	pcs	5.116,00	50	255.800,00
8	Klorheksidin lar 0.2% (larutan kumur antiseptik gigi) @ 60 ml	botol	25.850,00	10	258.500,00
9	Propranolol HCl tablet 40 mg	tablet	90,00	67	6.030,00
10	Garam Oralit untuk 200 ml air	sachet	263,00	9	2.367,00
11	Asiklovir tablet 200 mg	tablet	236,00	50	11.800,00
12	Diazepam larutan Rectal 5 mg/2.5 ml	tube	14.459,00	8	115.672,00
13	Rapid Test Antigen Covid-19 (CPNS)	pcs	73.000,00	40	2.920.000,00
14	Cimetidin tablet 200 mg	tablet	253,00	2.144	542.432,00
15	Glibenklamid tablet 5 mg	tablet	137,00	1.390	190.430,00
16	Natrium laurilsulfoasetat, Natrium sulfat, Sorbitol, PEG 400 enema @ 5 ml (microlax)	Tube	18.883,00	9	169.947,00
17	Cat Gut Chronic No. 3/0 DS 19 mm	pcs	41.685,00	19	792.015,00
18	Oksitetrasiklin HCl salap mata 1 % @ 3,5 g.	tube	2.600,00	15	39.000,00
19	Tramadol kapsul 50 mg	kapsul	396,00	150	59.400,00
20	Fero Sulfat tablet 300 mg (tablet tambah darah)	tablet	43,00	2.510	107.930,00
21	Asiklovir 400 mg	tablet	425,00	40	17.000,00
22	Kalsium Lactate	tablet	59,00	390	23.010,00
23	Chlorpromazine	tablet	170,00	110	18.700,00
24	Rapid Test Covid 19	pcs	73.000,00	124	9.052.000,00
25	S i l k (Benang Bedah Sutera) No. 3/0 DS 19 mm	sachet	31.125,00	18	560.250,00
26	Trihexy phenidyl Hcl	Tablet	95,00	130	12.350,00
27	Metformine Hcl	Tablet	102,00	20	2.040,00
28	Tripolidin HCl 2.5 mg, Pseudoefedrin 60 mg tablet	tablet	1.661,00	653	1.084.633,00
29	Kaolin pectin Sirup	tablet	15.400,00	77	1.185.800,00
30	Amoksisilin kaplet 500 mg	kaplet	248,00	448	111.104,00
31	Anti Migren DOEN kombinasi : Ergotamin Tartrat 1 mg + Koffein 50 mg	tablet	199,00	800	159.200,00
32	Prednison tablet 5 mg	tablet	79,00	160	12.640,00
33	Multivitamin mineral dengan zat besi tablet dewasa	tablet	1.023,00	425	434.775,00
34	Deksametason injeksi 5 mg / ml - 1 ml	ampul	1.210,00	5	6.050,00
35	Ketoprofen Supp 100 mg	supp	2.380,00	5	11.900,00
36	Kaolin pectin Sirup	tablet	15.400,00	2	30.800,00
37	Diazepam larutan Rectal 5 mg/2.5 ml	tube	14.459,00	5	72.295,00
38	Salbutamol tablet 2 mg	tablet	64,00	163	10.432,00
39	S i l k (Benang Bedah Sutera) No. 1 DS 24 mm	sachet	31.040,00	10	310.400,00
40	Antasida DOEN II susp. 60 ml.komb.:Al(OH) 200 mg/5 ml.+Mg(OH) 200 mg/5 ml	botol	2.098,00	1	2.098,00
41	Ichtyol (Salap Hitam)	pot	11.000,00	27	297.000,00
42	Zinc sirup 20 mg/5 ml @ 60 ml	botol	3.285,00	1	3.285,00
43	Klorfeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg	tablet	26,00	348	9.048,00
44	Hidroklortiazida tablet 25 mg	tablet	178,00	280	49.840,00
45	Jelly USG @ 250 g	botol	14.472,00	4	57.888,00



Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
46	Cat Gut Chromic No. 3/0 DS 19 mm	pcs	41.685,00	12	500.220,00
47	Salbutamol tablet 4 mg	tablet	77,00	77	5.929,00
48	Sianokobalamin injeksi 500 mcg/ml - 1 ml	ampul	1.160,00	38	44.080,00
49	S i l k (Benang Bedah Sutera) No. 3/0 DS 19 mm	sachet	31.125,00	9	280.125,00
50	Cat Gut Plain No. 3/0 DS 19 mm	pcs	40.865,00	1	40.865,00
51	Oksitetrasiklin HCl salap mata 1 % @ 3,5 g.	tube	2.600,00	4	10.400,00
52	Amoksisilin kaplet 500 mg	kaplet	248,00	212	52.576,00
53	Anti Hemoroid DOEN kombinasi	supp	3.642,00	16	58.272,00
54	Garam Oralit untuk 200 ml air	sachet	263,00	64	16.832,00
55	Pirantel pamoat suspensi 125 mg/ 5 ml	botol	11.050,00	3	33.150,00
56	Rapid Test Antigen Covid-19 (CPNS)	pcs	73.000,00	27	1.971.000,00
57	Salbutamol tablet 4 mg	tablet	77,00	84	6.468,00
58	Asam Askorbat 500 mg	tablet	19.800,00	25	495.000,00
59	Rapid test for Malaria Pan/Pf	pcs	17.900,00	25	447.500,00
Jumlah M					27.486.226,00
RSUD					
1	Nymiko (Nystatin Suspensi)	Botol	35.000,00	7	245.000,00
2	Desoximethasone 2,5 mg cr	Tube	13.310,00	7	93.170,00
3	Infusan Ring AS	Pouch	15.785,00	3	47.355,00
4	Aquabidest 25 cc	Ampul	2.650,00	4	10.600,00
5	Kendaron (Amiodarone 200 mg)	Tablet	1.088,00	54	58.752,00
6	Methyldopa 250 mg	Tablet	1.087,00	15	16.305,00
7	Ciprofloxacin infus 200 mg/100 ml	Botol	11.178,00	658	7.355.124,00
8	Hytroz (Terazosin 2 mg)	Tablet	938,00	2.100	1.969.800,00
10	Erlamycetin Salep Mata	Tube	6.358,00	93	591.294,00
11	Voxamed (Flavoxate) Hcl	Tablet	4.125,00	1.560	6.435.000,00
13	Meloxicam 7,5 mg tab	Tablet	311,00	2.300	715.300,00
14	Griseofulvin 500 mg	Tablet	1.570,00	4.900	7.693.000,00
15	Vit K Injeksi	Ampul	7.744,00	300	2.323.200,00
16	Otsu D40%	Ampul	7.000,00	30	210.000,00
17	Lexadium (Loperamid HCl 2 mg)	Tablet	150,00	4.900	735.000,00
18	Paracetamol 10 mg/ml Drop	Botol	5.980,00	70	418.600,00
19	Ephedrin HCl Injeksi	Ampul	8.569,00	160	1.371.040,00
20	Clozapine 25 mg	Tablet	1.121,00	10.050	11.266.050,00
21	Ferosfol 1% MCI/LCI INjeksi	Ampul	104.500,00	300	31.350.000,00
22	Berotec Inhaler	Botol	83.190,00	5	415.950,00
23	Misprostol Tablet	Tablet	1.238,00	630	779.940,00
24	Hyoscine Butilbromide Injeksi	Ampul	7.920,00	125	990.000,00
25	MicroLax Gel Enema	Tube	19.741,00	96	1.895.136,00
26	Meylon 84	Ampul	6.750,00	90	607.500,00
27	Piracetam 800 mg	Tablet	739,00	300	221.700,00
28	Erythromycin 500 mg	Tablet	781,00	500	390.500,00
29	Sulfasalazine 500 mg	Tablet	1.980,00	600	1.188.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
30	Amiodarone HCl 50 mg/ml	Ampul	8.700,00	156	1.357.200,00
31	Prednisone 5 mg	Tablet	79,00	400	31.600,00
32	Sodium Valproart Syrup 250 mg / 5 ml	Botol	17.789,00	249	4.429.461,00
33	Cilostazol 100mg	Tablet	8.360,00	700	5.852.000,00
34	Onbrez Inhaler	Tablet	11.750,00	960	11.280.000,00
35	Illiadin Spray Anak	Botol	39.468,00	26	1.026.168,00
36	Nystatin Drop	Botol	21.870,00	26	568.620,00
37	Biosave (ABU)	Ampul	517.132,00	6	3.102.792,00
38	Valsartan 80 mg	Tablet	2.200,00	1.650	3.630.000,00
40	Stesolid 5 mg Rectal Tube	Tube	13.384,00	40	535.360,00
41	Vitamin C 50 mg	Tablet	157,00	700	109.900,00
42	Propranolol 40 mg	Tablet	274,00	6.700	1.835.800,00
43	Recofol 10 mg/ml Injeksi	Ampul	104.500,00	40	4.180.000,00
44	Decatona 30 mg	Tablet	183,00	4.700	860.100,00
45	Meloxicam 15 mg	Tablet	563,00	8.700	4.898.100,00
46	Acyclovir 5% cream	Tube	3.257,00	100	325.700,00
47	Biosave (ABU)	Ampul	517.132,00	10	5.171.320,00
48	Cendo Polygran	Pcs	3.581,00	50	179.050,00
49	Mecobalamin Injeksi	Ampul	7.040,00	130	915.200,00
50	Piracetam 1 g / 5 ml Injeksi	Ampul	4.620,00	60	277.200,00
51	Cendo Xitrol	Pcs	4.987,00	25	124.675,00
52	Fargoxin Injeksi	Ampul	52.250,00	50	2.612.500,00
53	Farsorbid Injeksi	Ampul	74.250,00	50	3.712.500,00
54	Haloperidol 1,5 mg	Tablet	74,00	6.700	495.800,00
55	Atropine Injeksi	Ampul	2.613,00	200	522.600,00
56	Dumin (Paracetamol) 250 mg/5ml Rectal tube	Tube	21.453,00	5	107.265,00
57	Ascorbic Acid Injeksi	Ampul	19.602,00	10	196.020,00
58	Lisinopril 5 mg	Tablet	484,00	2.600	1.258.400,00
59	Erbifin 500 mg	Tablet	185,00	700	129.500,00
60	Stesolid 10 mg / 2 ml	Ampul	13.527,00	26	351.702,00
61	Lodomer 5mg Injeksi	Ampul	10.019,00	48	480.912,00
62	Carmed 20% Cream	Tube	3.979,00	3	11.937,00
Jumlah N					139.962.698,00
PUSKESMAS TELUK BINTAN					
1	Asiklovir tablet 200 mg	tablet	236,00	116	27.376,00
2	Asiklovir tablet 200 mg	tablet	236,00	100	23.600,00
3	Kalsium Glukonat injeksi 10% (100 mg/ml) @ 10 ml	ampul	8.949,00	19	170.031,00
4	Nistatin oral drop	botol	38.500,00	13	500.500,00
5	Propanolol HCl tablet 40 mg	tablet	90,00	90	8.100,00
6	Alat Suntik Sekali Pakai 10 ml	pcs	1.200,00	83	99.600,00
7	Diazepam larutan Rectal 5 mg/2.5 ml	tube	14.459,00	5	72.295,00
8	Klozapin tab 25 mg	tablet	1.121,00	70	78.470,00
9	Loratadin tablet 10 mg	tablet	127,00	130	16.510,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
10	Salap 2 - 4 Kombinasi : As.Salisilat 2 % + Belerang Endap 4 % @ 30 g	pot	3.013,00	9	27.117,00
11	Favipiravir 200 mg (PROG)	tablet	9.680,00	199	1.926.320,00
12	RAPID TEST COVID-19 (NASOPHARYNGEA)	TEST	70.000,00	37	2.590.000,00
13	Cefadrosil 125 mg / 5 ml sirup kering @ 60ml	botol	4.360,00	4	17.440,00
14	Glibenklamid tablet 5 mg	tablet	137,00	300	41.100,00
15	Hyoscine-N-Butilbromide injeksi	ampul	10.120,00	6	60.720,00
16	Metampiron (Antalgin) tablet 500 mg	tablet	242,00	20	4.840,00
17	Neurotropik (Vit B1 100mg, Vit B6 200mg, Vit B12 5000 mcg) injeksi	ampul	6.160,00	2	12.320,00
18	Oksitetrasiklin HCl salap mata 1 % @ 3,5 g.	tube	2.600,00	22	57.200,00
19	Tramadol capsul 50 mg	capsul	396,00	20	7.920,00
20	Cimetidin tablet 200 mg	tablet	253,00	350	88.550,00
21	Kotrimoksazol susp. komb. : Sulfametoksazol 200 mg. + Trimetoprim 40 mg/5ml	botol	2.052,00	4	8.208,00
22	Anti Bakteri DOEN salap komb : Basitrasin 500 IU/g + Polimiksin 1000 IU/g	tube	3.490,00	16	55.840,00
23	S i l k (Benang Bedah Sutera) No. 1 DS 24 mm	sachet	31.040,00	3	93.120,00
24	Kaolin Pektin sirup	botol	15.400,00	25	385.000,00
25	RAPID TEST COVID-19 (NASAL)	TEST	70.000,00	38	2.660.000,00
26	Deksametason injeksi 5 mg / ml - 1 ml	ampul	1.210,00	11	13.310,00
27	Ketoprofen Supp 100 mg	supp	2.380,00	50	119.000,00
28	Klorpromazin HCl tablet salut 100 mg	tablet	170,00	82	13.940,00
29	Nistatin tablet vaginal 100.000 IU / g	tablet	645,00	150	96.750,00
30	Prednison tablet 5 mg	tablet	79,00	10	790,00
31	Amoksisilin sirup kering 125 mg / 5 ml	botol	5.500,00	8	44.000,00
32	Cetirizina kapsul 10 mg	kapsul	104,00	10	1.040,00
33	Jelly USG @ 250 g	botol	14.472,00	1	14.472,00
34	Sianokobalamin injeksi 500 mcg/ml - 1 ml	ampul	1.160,00	11	12.760,00
35	Folley Catheter 2. W 30 cc No.16	pcs	20.450,00	2	40.900,00
36	Folley Catheter 2. W 30 cc No.18	pcs	20.450,00	4	81.800,00
37	Amoksisilin kaplet 500 mg	kaplet	248,00	400	99.200,00
38	Difenhidramin HCl injeksi 10 mg / ml - 1 ml	ampul	1.262,00	16	20.192,00
39	Dimenhidrinat tablet 50 mg	tablet	121,00	89	10.769,00
40	Metoklorpramid tablet 10 mg	tablet	83,00	164	13.612,00
41	Propranolol tablet 10 mg	tablet	69,00	100	6.900,00
42	Bistury / mata pisau bedah	pcs	3.150,00	100	315.000,00
43	Favipiravir 200 mg (PROG)	tablet	9.680,00	220	2.129.600,00
44	Garam Oralit untuk 200 ml air	sachet	263,00	57	14.991,00
45	Lanzoprazol Kapsul 30 mg	kaplet	330,00	60	19.800,00
46	Urine Bag	set	6.653,00	4	26.612,00
47	Fitomenadion (Vitamin K1) injeksi 10 mg/ml - 1 ml	ampul	4.583,00	26	119.158,00
48	Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg	tablet	93,00	120	11.160,00
JUMLAH O					12.257.933,00
PUSKESMAS TELUK SASAH					



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
1	Amlodipin 5mg	Tablet	77,00	74	5.698,00
2	Antasid	Tablet	56,00	19	1.064,00
3	Asiklovir 200mg	Tablet	236,00	92	21.712,00
4	Asiklovir 200mg	Tablet	236,00	125	29.500,00
5	Asiklovir 400mg	Tablet	425,00	68	28.900,00
6	Ats 1,5	Ampul	130.999,00	4	523.996,00
7	Attaque Gel	Pieces	113.850,00	1	113.850,00
8	Azitromisin 500mg	Tablet	1.888,00	120	226.560,00
9	Basitrasin+Polimiksin	Tube	3.490,00	12	41.880,00
10	Blade	Pieces	3.150,00	100	315.000,00
11	Catgut Chromic 2/0	Pieces	40.865,00	24	980.760,00
12	Catgut Chromic 3/0	Pieces	41.685,00	12	500.220,00
13	Catgut Chromic 3/0	Pieces	41.685,00	12	500.220,00
14	Catgut Plain 2/0	Pieces	40.865,00	24	980.760,00
15	Cefadroksil Suspensi	Botol	4.360,00	30	130.800,00
16	Cetirizine 10mg	Tablet	104,00	390	40.560,00
17	Chlorhexidine Gluconate 0,2%	Botol	25.850,00	10	258.500,00
18	Cimetidine 200mg	Tablet	230,00	2302	529.460,00
19	Dexamethasone	Ampul	1.210,00	12	14.520,00
20	Dexamethasone	Tablet	1.595,00	85	135.575,00
21	Difenhidramin	Ampul	1.262,00	24	30.288,00
22	Epinefrin 1mg/ML	Ampul	1.518,00	5	7.590,00
23	Foley Kateter No.18	Pieces	20.450,00	1	20.450,00
24	Glibenklamid 5mg	Tablet	137,00	1975	270.575,00
25	Guaifenesin 100mg	Tablet	165,00	100	16.500,00
26	Gutta Percha	Kotak	37.400,00	1	37.400,00
27	H2o2	Botol	3.864,00	1	3.864,00
28	Hyosine Butyl Bromide 20mg/ML	Ampul	10.120,00	6	60.720,00
29	Ichtyol Salap	Pot	11.000,00	2	22.000,00
30	Isoniazid 100mg	Tablet	79,00	18	1.422,00
31	Isoniazid 300mg	Tablet	170,00	25	4.250,00
32	Kalsium Hidroksida Pasta	Tube	91.000,00	1	91.000,00
33	Kalsium Laktat	Tablet	59,00	200	11.800,00
34	Kaolin Pectin	Botol	15.400,00	49	754.600,00
35	Ketorolac	Ampul	1.045,00	4	4.180,00
36	Mantoux	Vial	887.700,00	1	887.700,00
37	Metformin 500mg	Tablet	102,00	810	82.620,00
38	Metildopa	Tablet	1.088,00	2	2.176,00
39	Microlax	Enema	18.883,00	12	226.596,00
40	Nystatin Suspensi	Botol	38.500,00	20	770.000,00
41	Oat Kategori li - Fdc	Paket	1.492.574,00	1	1.492.574,00
42	Omeprazole 40mg	Vial	11.245,00	6	67.470,00
43	One Coat Bond SI	Botol	509.000,00	1	509.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
44	Pembalut Elastis 10cmx4,55m	Pieces	37.500,00	4	150.000,00
45	Pembalut Elastis 15cmx4,55m	Pieces	48.100,00	10	481.000,00
46	Propanolol Hcl 10mg	Tablet	69,00	400	27.600,00
47	Pyrantel Pamoat 125mg	Tablet	331,00	63	20.853,00
48	Salbutamol 2mg	Tablet	64,00	32	2.048,00
49	Simvastatin 20mg	Tablet	225,00	2684	603.900,00
50	Spons Gelatin	Kotak	106.700,00	3	320.100,00
51	Sulfametoxazole&Trimetoprim 960mg	Tablet	512,00	200	102.400,00
52	Tes Covid	Pieces	73.000,00	75	5.475.000,00
53	Tkf	Botol	77.333,00	1	77.333,00
54	Tremenza	Botol	23.100,00	13	300.300,00
55	Tremenza Tablet	Tablet	1.667,00	865	1.441.955,00
56	Tumpatan Light Cure	Box	854.000,00	1	854.000,00
57	Vit K	Tablet	818,00	100	81.800,00
58	Vit K 10mg/MI	Ampul	4.583,00	15	68.745,00
59	Codein 10mg	Tablet	657,00	59	38.763,00
60	Diazepam 5mg	Tablet	114,00	90	10.260,00
61	Diazepam 5mg	Tablet	114,00	100	11.400,00
62	Stesolid 5mg/2,5ml	Tube	14.459,00	4	57.836,00
63	Stesolid 5mg/2,5ml	Tube	14.459,00	2	28.918,00
JUMLAH P					20.908.521,00
PUSKESMAS KUALA SEMPANG					
1	Analgin 1000 mg/ 2 ml	Ampul	3.050,00	4	12.200,00
2	Nymiko	Botol	38.500,00	22	847.000,00
3	Phytomenadion Tab	Tab	818,00	120	98.160,00
4	Aluvia	Tab		240	0,00
5	Flukonazole	Tab	20.700,00	3	62.100,00
6	Minosep (Chlorhexidine Gluconate 0,2%)	Botol	25.850,00	7	180.950,00
7	Phytomenadion Inj	Ampul	4.236,00	14	59.304,00
8	Salep Whitfield	Tube	5.170,00	2	10.340,00
9	Salep 24	Tube	3.013,00	22	66.286,00
10	Stesolid 5 mg/2,5 ml	Tube	14.459,00	7	101.213,00
11	Cat Gut Chromic No. 3/0 DS 19 mm	Buah	41.685,00	5	208.425,00
12	Cefadroxil 125 Dry syrup	Botol	4.360,00	39	170.040,00
13	Efavirenz 600	Tab		300	0,00
14	Acyclovir 400	Tab	425,00	200	85.000,00
15	Glibenklamide	Tab	137,00	2000	274.000,00
16	Microlox Enema	Tab	18.883,00	8	151.064,00
17	Tripolidin HCl 2.5 mg, Pseudoefedrin 60 mg tablet	Tab	1.661,00	312	518.232,00
18	Cimetidine	Tab	253,00	1491	377.223,00
19	TTD	Tab	43,00	104	4.472,00
20	Pembalut elastis 15 cm x 4,55 m	Roll	48.100,00	12	577.200,00
21	Pembalut elastis 10 cm x 4,55 m	Roll	37.500,00	24	900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
22	Anti Bakteri DOEN salap komb : Basitrasin 500 IU/g + Polimiksin 1000 IU/g	Tube	3.490,00	9	31.410,00
23	Kanamycin Meiji (Kanamycin Sulfate)	Ampul	16.000,00	6	96.000,00
24	Cotrimoxazole	Tab	125,00	170	21.250,00
25	Pembalut elastis 15 cm x 4,55 m	Roll	48.100,00	9	432.900,00
26	Polypropylene USP 1 EP 4	Buah	31.040,00	3	93.120,00
27	Zidovudine 100	Tab		60	0,00
28	Neo Kaominal	Botol	15.400,00	76	1.170.400,00
29	Tripolidin Hcl 1.25mg, Pseudoefedrin Hcl 30mg/5ml @100 ml (Tremenza)	Botol	1.661,00	76	126.236,00
30	Simvastatin 20 mg	Tab	225,00	501	112.725,00
31	Amoksisilin kaplet 500 mg	Tablet	248,00	507	125.736,00
32	Benzatin Benzil Penisillin injeksi 2,4 Juta IU	Vial	16.675,00	10	166.750,00
33	Deksametason injeksi 5 mg / ml - 1 ml	Ampul	1.210,00	35	42.350,00
34	Favipavir 200 mg	Buah		100	0,00
35	Phevral	Tablet	1.045,00	700	731.500,00
36	Polypropylene Blue	Buah	31.040,00	11	341.440,00
37	Prednisone tablet 5 mg	Buah	79,00	25	1.975,00
38	Salbutamol tablet 4 mg	Tablet	77,00	308	23.716,00
39	Amoksisilin sirup kering 125 mg / 5 ml	Botol	5.500,00	54	297.000,00
40	Cat Gut Chromic No. 2/0 DS 19 mm	Buah	40.865,00	31	1.266.815,00
41	Cetirizina kapsul 10 mg	Tablet	104,00	415	43.160,00
42	Klorfeniramin Maleat (CTM) tab 4 mg	Tablet	26,00	300	7.800,00
43	Zinc sirup 20 mg/5 ml @ 60 ml	Botol	3.285,00	15	49.275,00
44	Glibenklamid tablet 5 mg	Tablet	137,00	400	54.800,00
45	Difenhidramin HCl injeksi 10 mg / ml - 1 ml	Ampul	1.262,00	12	15.144,00
46	FDC TLD	Tablet	83.916,00	298	25.006.968,00
47	Nevirapine tablet 200 mg	Tablet		600	0,00
48	Guaifenesin tablet 100 mg	Tablet	165,00	265	43.725,00
49	Garam Oralit 200 ml	Sachets	263,00	66	17.358,00
50	Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg	Tablet	93,00	55	5.115,00
51	Alat Suntik Sekali Pakai 1 ml	pcs	1.614,00	30	48.420,00
JUMLAH Q					35.076.297,00
TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q)					995.626.174,10

7.5.3.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih 12 bulan. Investasi Jangka Panjang meliputi Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2022 sebesar Rp90.485.291.356,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.105 Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	%
Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
Investasi Permanen	90.485.291.356,00	96.104.697.867,00	(5,85)
Jumlah	90.485.291.356,00	96.104.697.867,00	(5,85)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

7.5.3.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintang berupa dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepala kelompok masyarakat, meliputi Dana Bergulir Sapi, Ayam Buras, Sayur-sayuran, Padi *Polybag* dan Koperasi. Metode penilaian Investasi Non Permanen yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintang adalah metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bintang per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.106 Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Uraian	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
1	Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Investasi dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	3.364.367.000,00	0,00	1.400.000,00	3.362.967.000,00
6	Penyisihan Non Permanen Dana Bergulir	3.364.367.000,00	0,00	1.400.000,00	3.362.967.000,00
	Investasi Non Permanen Dana Bergulir Netto	0,00			0,00

Pengurangan Investasi Non Permanen Dana Bergulir sebesar Rp1.400.000,00 disebabkan pembayaran pokok dan bagi hasil atas dana bergulir usaha pengembangan sayur tahun 2007 sebesar Rp1.400.000,00 yang sudah disisihkan sebesar 100%. Tarif penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.107 Mutasi Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Uraian	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
1	Usaha Penggemukan Sapi	1.253.877.500,00	0,00	0,00	1.253.877.500,00
2	Pengembangan Ayam Buras	39.200.000,00	0,00	0,00	39.200.000,00
3	Pengembangan Sayur-sayuran	786.139.500,00	0,00	1.400.000,00	784.739.500,00
4	Padi <i>Polybag</i> 2008	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00
5	Koperasi	1.229.150.000,00	0,00	0,00	1.229.150.000,00
	Jumlah	3.364.367.000,00	0,00	1.400.000,00	3.362.967.000,00
	Penyisihan Piutang :				
6	0 s.d 12 bulan = 0,5%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	13 s.d 36 bulan = 10%	0,00	0,00	0,00	0,00
8	37 s.d 60 bulan = 50%	0,00	0,00	0,00	0,00
9	60 bulan = 100%	3.364.367.000,00	0,00	1.400.000,00	3.362.967.000,00
	Jumlah Penyisihan	3.364.367.000,00	0,00	1.400.000,00	3.362.967.000,00
	Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan	0,00			0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 7.5.108 Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per Komoditi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Saldo Bruto 31 Des 2022 (Rp)	Penyisihan Piutang				Saldo Netto 31 Des 2022 (Rp)	
			0 sd 12 Bln = 0,5 %	13 sd 36 Bln = 10 %	37 sd 60 Bln = 50 %	60 Bln > 100 %		Jumlah
1	Usaha Penggemukan Sapi	1.253.877.500,00	0,00	0,00	0,00	1.253.877.500,00	1.253.877.500,00	0,00
	- Sumber Dana 2008	392.280.000,00	0,00	0,00	0,00	392.280.000,00	392.280.000,00	0,00
	- Sumber Dana 2009	604.845.000,00	0,00	0,00	0,00	604.845.000,00	604.845.000,00	0,00
	- Sumber Dana 2012	88.200.000,00	0,00	0,00	0,00	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00
	- Sumber Dana 2013	121.652.500,00	0,00	0,00	0,00	121.652.500,00	121.652.500,00	0,00
	- Sumber Dana 2014	46.900.000,00	0,00	0,00	0,00	46.900.000,00	46.900.000,00	0,00
2	Pengembangan Ayam Buras	39.200.000,00	0,00	0,00	0,00	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00
	- Sumber Dana 2013	39.200.000,00	0,00	0,00	0,00	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00
3	Pengembangan Sayur-Sayuran	784.739.500,00	0,00	0,00	0,00	784.739.500,00	784.739.500,00	0,00
	- Sumber Dana 2005	34.132.500,00	0,00	0,00	0,00	34.132.500,00	34.132.500,00	0,00
	- Sumber Dana 2007	166.442.500,00	0,00	0,00	0,00	166.442.500,00	166.442.500,00	0,00
	- Sumber Dana 2008	584.164.500,00	0,00	0,00	0,00	584.164.500,00	584.164.500,00	0,00
4	Padi Polybag	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
5	Koperasi	1.229.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.229.150.000,00	1.229.150.000,00	0,00
	-DPC SPSI Reformasi	707.875.000,00	0,00	0,00	0,00	707.875.000,00	707.875.000,00	0,00
	-DPC SPSI	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
	-DPC SBSI	372.275.000,00	0,00	0,00	0,00	372.275.000,00	372.275.000,00	0,00
	-UKM Kusmayadi	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
	JUMLAH (1+2+3+4+5)	3.362.967.000,00	0,00	0,00	0,00	3.362.967.000,00	3.362.967.000,00	0,00

7.5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2022 sebesar Rp90.485.291.356,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.109 Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Investasi Permanen	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 – (Rp)	(%)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	90.485.291.356,00	96.104.697.867,00	(5,85)
2	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	90.485.291.356,00	96.104.697.867,00	(5,85)

7.5.3.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

Tabel 7.5.110 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021 – (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	(%)
1	PT Bank Riau Kepri	38.078.900.000,00	0,00	0,00	38.078.900.000,00	0,00
2	PD BPR Bintan	41.566.177.003,00	0,00	166.783.878,00	41.399.393.125,00	(0,40)



No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021 – (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	(%)
3	PT Bintan Inti Sukses	16.459.620.864,00	0,00	5.452.622.633,00	11.006.998.231,00	(33,13)
	Jumlah	96.104.697.867,00	0,00	5.619.406.511,00	90.485.291.356,00	(5,85)

7.5.3.2.2.1.1 PT Bank Riau Kepri

Realisasi penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri Tahun 2022 adalah nihil sehingga saldo penyertaan modal tetap sebesar Rp38.078.900.000,00. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bintan pada PT Bank Riau Kepri adalah sebesar 3,16% dengan jumlah saham yang dimiliki sebanyak 380.789 lembar.

7.5.3.2.2.1.2 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (PD BPR Bintan)

PD BPR Bintan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005. Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bintan pada PD BPR Bintan sebesar 100%. Modal Dasar PD BPR Bintan adalah sebesar Rp5.600.000.000,00 telah seluruhnya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Nilai penyertaan modal sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp20.000.000.000,00, sedangkan Tahun 2022 tidak terdapat penyertaan modal dikarenakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan bahwa Penyertaan Modal ke PD BPR Bintan hanya dianggarkan sampai dengan TA 2021.

Jumlah ekuitas akhir *netto* menurut Laporan Keuangan PD BPR Bintan Tahun 2022 (*Audited*) adalah Rp41.399.393.125,00 sehingga terdapat penurunan ekuitas sebesar Rp166.783.878,00 dari jumlah ekuitas akhir pada PD BPR Bintan Tahun 2021 adalah sebesar Rp41.566.177.003,00 dan koreksi saldo awal PD. BPR Bintan Tahun 2020 (*Audited*) sebesar (Rp1.600.000.000,00). Adapun perhitungan Ekuitas PD BPR Bintan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 7.5.111 Perhitungan Ekuitas PD BPR Bintan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Neraca PD BPR Bintan		
		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)
1	Modal Disetor	21.600.000.000,00	20.000.000.000,00	(1.600.000.000,00)
2	Pengurangan Modal (sumbangan)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
3	Pengurangan Modal (Kewajiban)	0,00	0,00	0,00
4	Cadangan Umum	8.825.640.137,00	8.971.801.755,00	146.161.618,00
5	Cadangan Tujuan	8.178.920.687,00	8.325.082.305,00	146.161.618,00
6	Laba Ditahan	1.778.554.464,00	803.888.898,00	(974.665.566,00)
7	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.461.616.179,00	2.602.509.065,00	1.140.892.886,00
	Jumlah Ekuitas PD BPR	43.344.731.467,00	42.203.282.023,00	(1.141.449.444,00)
8	Pembagian Dividen	(1.778.554.464,00)	(803.888.898,00)	974.665.566,00
	Jumlah Ekuitas Pemda	41.566.177.003,00	41.399.393.125,00	(166.783.878,00)

7.5.3.2.2.1.3 PT Bintan Inti Sukses (PT BIS)

PT BIS didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2007 dan telah direvisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010. Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bintan pada PT BIS sebesar 99,70%. Modal dasar menjadi sebesar Rp27.755.193.360,00 yang terdiri dari *inbreng* sebesar Rp12.755.193.360,00 dan setoran tunai sebesar Rp15.000.000.000,00.



Untuk setoran tunai sebesar Rp15.000.000.000,00 sudah dilakukan penyertaan modal berupa setoran tunai Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp6.000.000.000,00 terdiri dari sebesar Rp1.000.000.000,00 telah dibayarkan Tahun 2007, Rp2.000.000.000,00 dibayarkan Tahun 2008 dan Tahun 2010 dibayarkan sebesar Rp3.000.000.000,00. Pada Tahun 2011 sampai Tahun 2022 tidak ada pembayaran penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bintan kepada PT BIS, dikarenakan keuangan perusahaan masih cukup membiayai operasional perusahaan dan belum adanya kebutuhan modal yang diperlukan untuk membiayai bidang usaha/rencana investasi yang *feasible* dan memberikan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan.

Jumlah ekuitas menurut Laporan Keuangan PT BIS Tahun 2022 (*Unaudited*) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.006.998.231,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp5.452.622.633,00 dari jumlah ekuitas Tahun 2021 sebesar Rp16.459.620.864,00.

**Tabel 7.5.112 Perhitungan Ekuitas PT Bintan Inti Sukses
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Neraca PT BIS		
		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)
1	Modal Inbreng	12.755.193.360,00	12.755.193.360,00	0,00
2	Modal Uang Tunai	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
3	Rugi ditaham	(2.295.572.496,00)	(7.748.195.129,00)	(5.452.622.633,00)
4	Koreksi Laba(Rugi)	0,00	0,00	0,00
5	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	198.008.575,00	902.281.792,00	704.273.217,00
	Jumlah Ekuitas PT BIS	16.657.629.439,00	11.909.280.023,00	4.748.349.416,00
6	Pembagian Dividen	(198.008.575,00)	(902.281.792,00)	(704.273.217,00)
	Jumlah Ekuitas Pemda	16.459.620.864,00	11.006.998.231,00	(5.452.622.633,00)

7.5.3.3 ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan aset tetap. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.093.233.954.984,00 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp4.027.847.268,00 atau 0,19% dari Tahun 2021 sebesar Rp2.089.206.107.716,00 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.5.113 Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	(%)
1	Tanah	353.017.406.517,00	355.655.756.211,00	(0,74)
2	Peralatan dan Mesin	585.992.258.060,00	544.776.914.253,00	7,57
3	Gedung dan Bangunan	1.244.355.426.937,00	1.154.776.066.415,00	7,76
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.647.682.984.328,00	1.613.799.500.522,00	2,10
5	Aset Tetap Lainnya	54.394.797.077,00	53.635.440.194,00	1,42
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.715.941.070,00	31.785.134.272,00	(75,72)
7	Akumulasi Penyusutan	(1.799.924.859.005,00)	(1.665.222.704.151,00)	8,09
	Jumlah	2.093.233.954.984,00	2.089.206.107.716,00	0,19

Adapun rincian mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 7.5.114 Rincian Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Tambah	Kurang	31 Desember 2022 (Rp)
1	Tanah	355.655.756.211,00	3.096.242.076,00	5.734.591.770,00	353.017.406.517,00
2	Peralatan dan Mesin	544.776.914.253,00	61.790.961.309,00	20.575.617.502,00	585.992.258.060,00
3	Gedung dan Bangunan	1.154.776.066.415,00	103.720.767.233,00	14.141.406.711,00	1.244.355.426.937,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.613.799.500.522,00	41.782.486.204,00	7.899.002.398,00	1.647.682.984.328,00
5	Aset Tetap Lainnya	53.635.440.194,00	1.422.282.190,00	662.925.307,00	54.394.797.077,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	31.785.134.272,00	-	24.069.193.202,00	7.715.941.070,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.665.222.704.151,00)	(155.912.522.381,00)	(21.210.367.527,00)	(1.799.924.859.005,00)
	Jumlah	2.089.206.107.716,00	55.900.216.631,00	51.872.369.363,00	2.093.233.954.984,00

7.5.3.3.1 TANAH

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp353.017.406.517,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.638.349.694,00 atau 0,74% dari Tahun 2021 sebesar Rp355.655.756.211,00.

Jumlah Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 merupakan mutasi Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang terdiri dari:

Tabel 7.5.115 Data Mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Tanah	355.655.756.211,00	3.096.242.076,00	5.734.591.770,00	353.017.406.517,00
	Jumlah	355.655.756.211,00	3.096.242.076,00	5.734.591.770,00	353.017.406.517,00

Penambahan aset tanah sebesar Rp3.096.242.076,00 berasal dari:

- Belanja Modal Tanah Tahun 2022 sebesar Rp956.984.073,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan;
- Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa menjadi Belanja Modal Aset Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan sebesar Rp134.458.000,00;
- Hibah Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan sebesar Rp4.800.000,00 berdasarkan hasil Appraisal oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dedy Arifin, Nazir dan Rekan Nomor 00243/2.0128-01/PI/11/0302/1/XI/2022 Tanggal 28 November 2022 SK Status Penggunaan Nomor 687/XII/ 2022 tanggal 07 Desember 2022;
- Hibah Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan sebesar Rp2,00 SK Status Penggunaan Nomor 687/XII/ 2022 tanggal 07 Desember 2022;
- Hibah Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja pada Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan sebesar Rp1,00 SK Status Penggunaan Nomor 636/XI/2022 tanggal 24 November 2022;
- Mutasi tambah pencatatan antar OPD Aset Tanah sebesar Rp2.000.000.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan.

Sedangkan pengurangan aset tanah sebesar Rp5.734.591.770,00 berasal dari:

- Penghapusan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Tahun 2022 sebesar Rp171.269.862,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 015/SK/2022 tanggal 13 April 2022;



- Penghapusan Tanah Tandus Tahun 2022 sebesar Rp110.771.700,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 016/SK/2022 tanggal 13 April 2022;
- Penghapusan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Tahun 2022 sebesar Rp528.120.750,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 017/SK/2022 tanggal 05 Oktober 2022;
- Penghapusan Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga, Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja, dan Tanah Lapangan Olah Raga Tahun 2022 sebesar Rp1.247.286.601,00 pada Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 019/SK/2022 tanggal 05 Oktober 2022;
- Penghapusan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Tahun 2022 sebesar Rp570.000.000,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 021/SK/2022 tanggal 05 Oktober 2022;
- Penghapusan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Tahun 2022 sebesar Rp1.107.142.857,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 024/SK/2022 tanggal 14 Desember 2022;
- Mutasi kurang antar OPD Aset Tanah sebesar Rp2.000.000.000,00 pada Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.

Aset Tanah per OPD selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.116 Data Aset Tetap Tanah per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Nama OPD	Tanah		Selisih	(%)
		2022	2021		
1	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	95.797.517.402,00	97.645.930.121,00	(1.848.412.719,00)	(1,89)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.873.503.003,00	10.782.060.930,00	1.091.442.073,00	10,12
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.106.007.582,00	5.106.007.582,00	2.000.000.000,00	39,17
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	3.671.487.000,00	3.671.487.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Kesehatan	7.320.195.613,00	7.848.316.363,00	(528.120.750,00)	(6,73)
8	Dinas Pendidikan	78.287.766.001,00	78.287.766.001,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Sosial	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	22.907.359.361,00	22.907.359.361,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan	1.059.261.600,00	1.059.261.600,00	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2.078.410.000,00	2.078.410.000,00	0,00	0,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	99.766.194.937,00	99.876.966.637,00	(110.771.700,00)	(0,11)
20	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.813.000.000,00	1.813.000.000,00	0,00	0,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.209.125.675,00	2.209.125.675,00	0,00	0,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.998.000.000,00	4.998.000.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Tanah		Selisih	(%)
		2022	2021		
26	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.800.002,00	0,00	4.800.002,00	100,00
30	Kecamatan Bintan Utara	476.400.000,00	476.400.000,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Bintan Timur	2.330.000.000,00	5.577.286.601,00	(3.247.286.601,00)	(58,22)
32	Kecamatan Tambelan	38.736.001,00	38.736.000,00	1,00	0,00
33	Kecamatan Gunung Kijang	2.508.400.000,00	2.508.400.000,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Teluk Bintan	199.175.000,00	199.175.000,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Teluk Sebong	1.776.000.000,00	1.776.000.000,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Toapaya	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Mantang	10.458.500,00	10.458.500,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Bintan Pesisir	106.773.840,00	106.773.840,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	3.378.835.000,00	3.378.835.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	353.017.406.517,00	355.655.756.211,00	(2.638.349.694,00)	(0,75)

7.5.3.3.2 PERALATAN DAN MESIN

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp585.992.258.060,00 dan mengalami kenaikan sebesar 41.215.343.807,00 atau 7,57% dari Tahun 2021 sebesar Rp544.776.914.253,00.

Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 merupakan mutasi Aset Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang terdiri dari:

Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp62.836.579.089,00 yang berasal dari:

- Penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp48.268.717.802,00;
- Penambahan Sumber Lainnya (Hibah) Peralatan dan Mesin Aset Tahun 2022 sebesar Rp1.609.347.538,00;
- Penambahan Reklas Belanja Barang/Jasa/Pemeliharaan Tahun 2022 sebesar Rp53.910.000,00;
- Mutasi Tambah Antar OPD sebesar Rp12.904.603.749.

Pengurangan Peralatan dan Mesin 2022 sebesar Rp21.621.235.282,00 yang berasal dari:

- Aset yang dibawah minimal Kapitalisasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.892.622.834,00;
- Penghapusan Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.778.390.919,00;
- Mutasi Antar Pengurangan OPD sebesar Rp12.904.603.749;
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya atas Hasil Koreksi Audited BPK Tahun 2021 dikarenakan Kondisi Barang Rusak Berat sebesar Rp1.045.617.780,00.

Mutasi tambah kurang Aset Peralatan dan Mesin selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.117 Data Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Peralatan Dan Mesin	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Alat Besar	10.473.978.942,00	2.176.657.759,00	1.273.939.440,00	11.376.697.261,00
2	Alat Angkutan	142.781.947.134,00	12.475.794.929,00	15.017.296.154,00	140.240.445.909,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Peralatan Dan Mesin	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	13.312.818.993,00	169.938.765,00	42.283.000,00	13.440.474.758,00
4	Alat Pertanian	7.642.840.914,00	252.050.760,00	22.298.260,00	7.872.593.414,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	130.643.458.565,00	13.071.751.514,00	3.089.341.299,00	140.625.868.780,00
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	24.563.744.931,00	870.221.857,00	243.632.020,00	25.190.334.768,00
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	99.408.752.896,00	16.999.954.877,00	58.711.074,00	116.349.996.699,00
8	Alat Laboratorium	18.848.684.098,00	2.091.600.303,00	29.979.624,00	20.910.304.777,00
9	Alat Persenjataan	1.295.171.000,00	0,00	0,00	1.295.171.000,00
10	Komputer	84.617.372.827,00	12.965.035.645,00	778.249.591,00	96.804.158.881,00
11	Alat Eksplorasi	4.730.000,00	0,00	0,00	4.730.000,00
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	533.467.903,00	222.357.000,00	4.917.000,00	750.907.903,00
16	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Peralatan Proses/Produksi	540.042.400,00	0,00	0,00	540.042.400,00
18	Rambu-Rambu	9.635.269.649,00	78.554.700,00	10.878.000,00	9.702.946.349,00
19	Peralatan Olah Raga	474.634.001,00	424.233.200,00	11.282.040,00	887.585.161,00
	Jumlah	544.776.914.253,00	61.798.151.309,00	20.582.807.502,00	585.992.258.060,00

Aset Peralatan dan Mesin per OPD selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.118 Data Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Nama OPD	Peralatan Dan Mesin		Selisih	(%)
		2022 (Rp)	2021 (Rp)		
1	Sekretariat DPRD	15.677.194.099,00	14.853.695.717,00	823.498.382,00	5,54
2	Sekretariat Daerah	44.858.298.505,00	43.768.279.612,00	1.090.018.893,00	2,49
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.323.896.180,00	11.817.605.139,00	506.291.041,00	4,28
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.288.108.968,00	20.371.114.141,00	(7.083.005.173,00)	(34,77)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.266.713.644,00	9.955.045.484,00	311.668.160,00	3,13
6	Dinas Perhubungan	18.885.490.074,00	18.885.490.074,00	0,00	0,00
7	Dinas Kesehatan	189.140.992.708,00	164.613.254.437,00	24.527.738.271,00	14,90
8	Dinas Pendidikan	73.537.121.264,00	60.848.324.663,00	12.688.796.601,00	20,85
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.261.365.114,00	1.105.787.069,00	155.578.045,00	14,07
10	Dinas Sosial	2.909.838.981,00	3.281.073.110,00	(371.234.129,00)	(11,31)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	6.413.689.154,00	5.931.816.654,00	481.872.500,00	8,12
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.337.682.165,00	9.257.925.565,00	2.079.756.600,00	22,46
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.841.199.525,00	1.595.744.825,00	245.454.700,00	15,38
14	Dinas Tenaga Kerja	1.835.209.261,00	1.815.717.961,00	19.491.300,00	1,07
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.255.302.914,00	11.328.553.410,00	(73.250.496,00)	(0,65)
16	Dinas Perikanan	18.824.177.640,00	18.799.451.940,00	24.725.700,00	0,13
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	5.063.646.623,00	4.601.356.623,00	462.290.000,00	10,05
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	5.042.150.516,00	5.451.905.966,00	(409.755.450,00)	(7,52)
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	23.782.507.649,00	24.955.537.857,00	(1.173.030.208,00)	(4,70)
20	Badan Pendapatan Daerah	7.642.639.516,00	7.295.959.116,00	346.680.400,00	4,75
21	Inspektorat Daerah	2.073.279.817,00	2.052.622.017,00	20.657.800,00	1,01



No	Nama OPD	Peralatan Dan Mesin		Selisih	(%)
		2022 (Rp)	2021 (Rp)		
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.675.273.637,00	9.851.991.709,00	(176.718.072,00)	(1,79)
23	Dinas Lingkungan Hidup	18.450.975.342,00	9.790.246.404,00	8.660.728.938,00	88,46
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8.141.027.270,00	7.479.332.270,00	661.695.000,00	8,85
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.272.621.062,00	2.077.611.062,00	195.010.000,00	9,39
26	Satuan Polisi Pamong Praja	4.995.912.800,00	4.962.912.800,00	33.000.000,00	0,66
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.732.949.705,00	3.950.447.705,00	(217.498.000,00)	(5,51)
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.575.447.876,00	4.430.448.576,00	144.999.300,00	3,27
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.858.301.350,00	3.525.706.850,00	332.594.500,00	9,43
30	Kecamatan Bintan Utara	7.278.430.315,00	7.982.764.345,00	(704.334.030,00)	(8,82)
31	Kecamatan Bintan Timur	5.904.099.239,00	7.968.328.539,00	(2.064.229.300,00)	(25,91)
32	Kecamatan Tambelan	3.881.508.989,00	3.863.928.989,00	17.580.000,00	0,45
33	Kecamatan Gunung Kijang	7.757.938.177,00	7.736.959.177,00	20.979.000,00	0,27
34	Kecamatan Teluk Bintan	5.823.127.276,00	6.136.820.776,00	(313.693.500,00)	(5,11)
35	Kecamatan Teluk Sebong	5.591.175.064,00	5.591.175.064,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Toapaya	6.453.003.802,00	6.709.319.968,00	(256.316.166,00)	(3,82)
37	Kecamatan Mantang	2.899.297.121,00	2.763.328.321,00	135.968.800,00	4,92
38	Kecamatan Bintan Pesisir	2.502.775.120,00	2.457.525.720,00	45.249.400,00	1,84
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	4.937.889.598,00	4.911.804.598,00	26.085.000,00	0,53
	Jumlah	585.992.258.060,00	544.776.914.253,00	41.215.343.807,00	7,57

7.5.3.3.2.1 Alat Besar

Saldo Aset Tetap berupa Alat Besar per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.376.697.261,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp902.718.319,00 atau 8,62 % dari Tahun 2021 sebesar Rp10.473.978.942,00 yang dikarenakan adanya Belanja Modal Alat Besar Tahun dan mutasi pencatatan antar OPD pada tahun 2022.

Penambahan Alat Besar Tahun 2022 sebesar Rp2.176.657.759,00 berasal dari:

- Belanja Modal Alat Besar Tahun 2022 sebesar Rp907.273.759,00 pada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan;
- Mutasi Tambah antar OPD sebesar Rp1.269.384.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.

Pengurangan Alat Besar Tahun 2022 sebesar Rp1.273.939.440,00 berasal dari:

- Mutasi Kurang antar OPD sebesar Rp1.269.384.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan;
- Aset yang dibawah minimal kapitalisasi sebesar Rp4.555.440,00 pada Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku *Ekstrakomptabel*.

7.5.3.3.2.2 Alat Angkutan

Saldo Aset Tetap berupa Alat Angkutan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp140.240.445.909,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp2.541.501.225,00 atau - 1,78% dari Tahun 2021 sebesar Rp142.781.947.134,00 yang dikarenakan adanya Penambahan dari Belanja Modal Alat Angkutan, mutasi pencatatan antar OPD, Aset yang dibawah minimal kapitalisasi, Koreksi Pencatatan Atas Hasil Pemeriksaan BPK untuk Aset Rusak Berat dan Penghapusan Aset Alat Angkutan.

Penambahan alat angkutan Tahun 2022 sebesar Rp13.485.395.209,00 berasal dari:



- Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp1.850.175.460,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Pesisir, dan Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan;
- Mutasi tambah pencatatan antar OPD sebesar Rp11.635.219.749,00 pada Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan.

Pengurangan alat angkutan sebesar Rp16.026.896.434,00 berasal dari:

- Mutasi kurang pencatatan antar OPD sebesar Rp11.635.219.749,00 berasal dari mutasi kurang pencatatan antar OPD pada Sekretariat DPRD, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, DPMPTSP, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
- Aset yang dibawah minimal kapitalisasi sebesar Rp5.197.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku Ekstrakomptabel;
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp27.260.000,00 Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 001/SK/2022 Tanggal 13 April 2022;
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp199.200.000,00 Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 002/SK/2022 Tanggal 13 April 2022;
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp894.550.000,00 Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 003/SK/2022 Tanggal 13 April 2022;
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp33.110.000,00 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 004/SK/2022 Tanggal 13 April 2022;
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp139.857.000,00 Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 005/SK/2022 Tanggal 13 April 2022;
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp201.960.000,00 Pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 006/SK/2022 Tanggal 13 April 2022;
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp10.467.600,00 Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 007/SK/2022 Tanggal 13 April 2022;
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp214.017.000,00 Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 008/SK/2022 Tanggal 13 April 2022;



- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp529.050.000,00 Pada Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 009/SK/2022 Tanggal 13 April 2022;
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp423.410.000,00 Pada Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 010/SK/2022 Tanggal 13 April 2022;
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp92.012.250,00 Pada Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 011/SK/2022 Tanggal 13 April 2022;
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp275.980.000,00 Pada Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 012/SK/2022 Tanggal 13 April 2022;
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp149.658.555,00 Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 013/SK/2022 Tanggal 13 April 2022;
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp186.347.000,00 Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 014/SK/2022 Tanggal 13 April 2022;
- Koreksi Reklas atas Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2021 pada Alat Angkutan sebesar Rp1.009.600.280,00 yang dikarenakan kondisi Rusak Berat sehingga dipindahkan menjadi Aset Lainnya pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DPMPTSP, Inspektorat Daerah dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan.

7.5.3.3.2.3 Alat Bengkel dan Alat Ukur

Saldo Aset Tetap berupa Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.440.474.758,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp127.655.765,00 atau 0,96% dari Tahun 2021 sebesar Rp13.312.818.993,00 yang dikarenakan adanya Penambahan dari Belanja modal Alat Bengkel dan Alat Ukur, Aset yang dibawah minimal Kapitalisasi dan Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2022 sebesar Rp169.938.765,00 berasal dari:

- Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2022 sebesar Rp169.938.765,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Bintan Utara, dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.

Pengurangan Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp42.283.000,00 berasal dari:

- Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp2.298.000,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku Ekstrakomptabel.



- Penghapusan Alat Bengkel dan Alat Ukur Sebesar Rp39.985.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 034/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022.

Terdapat Penghapusan Aset Ekstrakomptabel atas Alat Bengkel dan Alat Ukur (tercatat diluar neraca aset) Sebesar Rp148.000,00 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 023/SK/2022 Tanggal 14 Desember 2022.

7.5.3.3.2.4 Alat Pertanian

Saldo Aset Tetap berupa Alat Pertanian per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.872.593.414,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp229.752.500,00 atau 3,01% dari Tahun 2021 sebesar Rp7.642.840.914,00. Mutasi Alat Pertanian Tahun 2022 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan Alat Pertanian Tahun 2022 sebesar Rp252.050.760,00 berasal dari:

- Belanja Modal Alat Pertanian Tahun 2022 sebesar Rp252.050.760,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan.

Pengurangan Alat Pertanian Tahun 2022 sebesar Rp22.298.260,00 berasal dari:

- Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp22.298.260,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan.

7.5.3.3.2.5 Alat Kantor dan Rumah Tangga

Saldo Aset Tetap berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp140.625.868.780,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp9.982.410.215,00 atau 7,64% dari Tahun 2021 sebesar Rp130.643.458.565,00. Mutasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Penambahan alat kantor dan rumah tangga Tahun 2022 sebesar Rp13.074.151.514,00 berasal dari:

- Belanja Modal alat kantor dan alat rumah tangga Tahun 2022 sebesar Rp13.052.151.514,00 pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Toapaya, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan;
- Penambahan Alat Kantor dan Rumah Tangga yang bersumber dari reklasifikasi Belanja Barang/Jasa/Pemeliharaan Tahun 2021 atas hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan sebesar Rp22.000.000,00 Pada Dinas Sosial Kabupaten Bintan.



Pengurangan alat kantor dan rumah tangga Tahun 2022 sebesar Rp3.091.741.299,00 berasal dari:

- Pengurangan alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp1.721.796.200,00 berasal dari Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Bintan Utara, dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku Ekstrakomptabel;
- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp62.244.203,00 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 023/SK/2022 Tanggal 14 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp460.645.772,00 Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 028/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp7.730.000,00 Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 029/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp36.242.800,00 Pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 030/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp312.524.000,00 Pada Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 031/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp72.219.803,00 Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 032/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp4.950.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 033/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp134.053.905,00 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 034/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp1.700.000,00 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 035/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp175.136.500,00 Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 036/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;



- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp4.950.000,00 Pada Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 037/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp87.448.116,00 Pada Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 038/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp7.700.000,00 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 039/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Koreksi Reklas atas Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Aset Lain-Lain dikarenakan kondisi Rusak Berat Sebesar Rp2.400.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan.

Terdapat Penghapusan Aset Ekstrakomptabel atas Alat Kantor dan Rumah Tangga (tercatat diluar neraca aset) Sebesar Rp129.254.762,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp29.631.858,00 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 023/SK/2022 Tanggal 14 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp2.999.700,00 Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 029/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp16.046.800,00 Pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 030/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp6.879.594,00 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 034/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp1.980.000,00 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 035/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp44.969.650,00 Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 036/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp25.863.860,00 Pada Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 038/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp883.300,00 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 039/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022.

7.5.3.3.2.6 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Saldo Aset Tetap berupa Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tanggal per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp25.190.334.768,00 dan mengalami kenaikan sebesar



Rp626.589.837,00 atau 2,55% dari Tahun 2021 sebesar Rp24.563.744.931,00. Mutasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun 2022 sebesar Rp870.221.857,00 berasal dari:

- Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp841.511.857,00 pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan;
- Penambahan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dari reklasifikasi Belanja Barang/Jasa/Pemeliharaan Tahun 2022 sebesar Rp28.710.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.

Pengurangan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun 2022 sebesar Rp243.632.020,00 berasal dari:

- Pengurangan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp16.365.220,00 pada Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan yang tidak memenuhi kapitalisasi dipindahkan pencatatannya ke Buku Ekstrakomptabel;
- Penghapusan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Sebesar Rp22.310.000,00 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 023/SK/2022 Tanggal 14 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Sebesar Rp8.497.500,00 Pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 030/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Sebesar Rp4.840.000,00 Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 033/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Sebesar Rp10.818.500,00 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 034/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Sebesar Rp10.508.300,00 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 035/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Sebesar Rp14.355.000,00 Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 036/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Sebesar Rp141.955.000,00 Pada Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 038/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;



- Penghapusan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Sebesar Rp6.792.500,00 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 039/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Koreksi Reklas atas Alat Studio dan Komunikasi ke Aset Lain-Lain dikarenakan kondisi Rusak Berat Sebesar Rp7.190.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan.

Terdapat Penghapusan Aset Ekstrakomptabel atas Alat Studio dan Komunikasi (tercatat diluar neraca aset) Sebesar Rp3.862.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Penghapusan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Sebesar Rp1.634.000,00 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 023/SK/2022 Tanggal 14 Desember 2022;
- Penghapusan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Sebesar Rp2.228.600,00 Pada Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 038/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022.

7.5.3.3.2.7 Alat Kedokteran dan Kesehatan

Saldo Aset Tetap berupa Alat Kedokteran dan Kesehatan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp116.349.996.699,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp16.941.243.803,00 atau 17,04% dari Tahun 2021 sebesar Rp99.408.752.896,00. Mutasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2022 sebesar Rp16.999.954.877,00 berasal dari:

- Penambahan Alat Kedokteran dan Kesehatan Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp16.999.954.877,00 pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Kabupaten Bintan;

Pengurangan Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2022 sebesar Rp58.711.074,00 berasal dari:

- Pengurangan Alat Kedokteran dan Kesehatan yang tidak memenuhi kapitalisasi sebesar Rp58.711.074,00 pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku Ekstrakomptabel.

7.5.3.3.2.8 Alat Laboratorium

Saldo Aset Tetap berupa Alat Laboratorium per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.911.424.777,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.062.740.679,00 atau 10,94% dari Tahun 2021 sebesar Rp18.848.684.098,00. Mutasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan Alat Laboratorium Tahun 2022 sebesar Rp2.091.600.303,00 berasal dari:

- Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun 2022 sebesar Rp482.252.765,00 pada Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;
- Penambahan Alat Laboratorium yang bersumber dari Hibah dari Kementerian Kesehatan RI, IOM UN Migration, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, PT. Bintan



Resort Cakrawala, dan Trikora Beach Resort sebesar Rp1.609.347.538,00, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan berdasarkan SK Hibah Nomor 478/VIII/2022 Tanggal 25 Agustus 2022.

Pengurangan Alat Laboratorium Tahun 2022 sebesar Rp29.979.624,00 berasal dari:

- Pengurangan Aset Alat Laboratorium Tahun 2022 sebesar Rp10.245.100,00 berasal dari aset yang tidak memenuhi kapitalisasi pada Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku Ekstrakomptabel;
- Penghapusan Alat Laboratorium Sebesar Rp19.734.524,00 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 023/SK/2022 Tanggal 14 Desember 2022.

Terdapat Penghapusan Aset Ekstrakomptabel atas Alat Laboratorium (tercatat diluar neraca aset) Sebesar Rp28.189.900,00 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 023/SK/2022 Tanggal 14 Desember 2022.

7.5.3.3.2.9 Alat Persenjataan

Saldo Aset Tetap berupa Alat Persenjataan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.295.171.000,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dari Tahun 2021 sebesar Rp1.295.171.000,00.

Terdapat Penghapusan Aset Ekstrakomptabel atas Alat Persenjataan (tercatat diluar neraca aset) Sebesar Rp605.000,00 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 039/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022.

7.5.3.3.2.10 Komputer

Saldo Aset Tetap berupa Komputer per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp96.804.158.881,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp12.186.786.054,00 atau 14,40% dari Tahun 2021 sebesar Rp84.617.372.827,00. Mutasi Komputer Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan Komputer Tahun 2022 sebesar Rp12.991.463.145,00 berasal dari:

- Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp12.988.263.145,00 pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan;



- Penambahan Komputer dari reklasifikasi Belanja Barang/Jasa/Pemeliharaan Tahun 2022 sebesar Rp1.000.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan;
- Penambahan Komputer yang bersumber dari reklasifikasi Belanja Barang/Jasa/Pemeliharaan Tahun 2021 atas hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan sebesar Rp2.200.000,00 Pada Dinas Sosial Kabupaten Bintan.

Pengurangan Komputer Tahun 2022 sebesar Rp804.677.091,00 berasal dari:

- Pengurangan Komputer sebesar Rp24.079.500,00 berasal dari Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku Ekstrakomptabel;
- Penghapusan Komputer Sebesar Rp54.334.841,00 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 023/SK/2022 Tanggal 14 Desember 2022;
- Penghapusan Komputer Sebesar Rp7.500.000,00 Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 028/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Komputer Sebesar Rp33.883.100,00 Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 029/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Komputer Sebesar Rp9.988.000,00 Pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 030/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Komputer Sebesar Rp138.902.500,00 Pada Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 031/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Komputer Sebesar Rp128.029.000,00 Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 032/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Komputer Sebesar Rp74.888.000,00 Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 033/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Komputer Sebesar Rp22.799.950,00 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 034/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Komputer Sebesar Rp3.564.000,00 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 035/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Komputer Sebesar Rp84.256.150,00 Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 036/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;



- Penghapusan Komputer Sebesar Rp32.763.500,00 Pada Badan Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 037/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Komputer Sebesar Rp163.261.050,00 Pada Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 038/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Koreksi Reklas atas Komputer ke Aset Lain-Lain dikarenakan kondisi Rusak Berat Sebesar Rp26.427.500,00 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

Terdapat Penghapusan Aset Ekstrakomptabel atas Komputer (tercatat diluar neraca aset) sebesar Rp9.570.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Penghapusan Komputer Sebesar Rp1.615.750,00 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 023/SK/2022 Tanggal 14 Desember 2022;
- Penghapusan Komputer Sebesar Rp480.000,00 Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 028/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Komputer Sebesar Rp1.650.000,00 Pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 030/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Komputer Sebesar Rp4.977.500,00 Pada Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 038/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022;
- Penghapusan Komputer Sebesar Rp847.000,00 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 039/SK/2022 Tanggal 20 Desember 2022.

7.5.3.3.2.11 Alat Eksplorasi

Saldo Aset Tetap berupa Alat Eksplorasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.730.000,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dari Tahun 2021 sebesar Rp4.730.000,00.

7.5.3.3.2.12 Alat Pengeboran

Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Aset Tetap Alat Pengeboran.

7.5.3.3.2.13 Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Aset Tetap Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian.

7.5.3.3.2.14 Alat Bantu Eksplorasi

Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Aset Tetap Alat Bantu Eksplorasi.

7.5.3.3.2.15 Alat Keselamatan Kerja

Saldo Aset Tetap berupa Alat Keselamatan Kerja per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp750.907.903,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp217.440.000,00 atau



40,76% dari Tahun 2021 sebesar Rp533.467.903,00. Mutasi Alat Keselamatan Kerja Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Penambahan Alat Keselamatan Kerja Tahun 2022 sebesar Rp222.357.000,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2022 pada Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan;
- Terdapat Pengurangan Alat Keselamatan Kerja Tahun 2022 sebesar Rp4.917.000,00 yang berasal dari Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku Ekstrakomptabel.

7.5.3.3.2.16 Alat Peraga

Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Aset Tetap Alat Peraga.

7.5.3.3.2.17 Peralatan Proses/Produksi

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp540.042.400,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dari Tahun 2021 sebesar Rp540.042.400,00.

7.5.3.3.2.18 Rambu-Rambu

Saldo Aset Tetap berupa Rambu-Rambu per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.702.946.349,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp67.676.700,00 atau 0,70% dari Tahun 2021 sebesar Rp9.635.269.649,00. Mutasi Rambu-Rambu Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan Rambu-Rambu Tahun 2022 sebesar Rp78.554.700,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.

Pengurangan Rambu-Rambu sebesar Rp10.878.000,00 berasal dari aset yang tidak memenuhi kapitalisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku Ekstrakomptabel.

7.5.3.3.2.19 Peralatan Olah Raga

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan Olah Raga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp887.585.161,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp412.951.160,00 atau 87,00% dari Tahun 2021 sebesar Rp474.634.001,00. Mutasi Peralatan Olah Raga Kerja Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Penambahan Aset Peralatan Olah Raga yang berasal dari Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp424.233.200,00 pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Kabupaten Bintan.
- Pengurangan Aset Peralatan Olah Raga sebesar Rp11.282.040,00 berasal dari Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku Ekstrakomptabel.

7.5.3.3.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Aset Tetap berupa Bangunan Gedung per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.244.355.426.937,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp89.579.360.522,00 atau 7,76% dari Tahun 2021 sebesar Rp1.154.776.066.415,00.

Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 merupakan mutasi Aset Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang terdiri dari:

Tabel 7.5.119 Data Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Gedung dan Bangunan	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
1	Bangunan Gedung	1.143.099.263.755,00	100.274.854.048,00	13.831.698.900,00	1.229.542.418.903,00
2	Monumen	8.581.127.869,00	1.721.744.415,00	159.805.311,00	10.143.066.973,00
3	Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.095.674.791,00	1.724.168.770,00	149.902.500,00	4.669.941.061,00
	Jumlah	1.154.776.066.415,00	103.720.767.233,00	14.141.406.711,00	1.244.355.426.937,00

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp103.720.767.233,00 terdiri dari:

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp60.440.564.360;
- Penambahan Aset Sumber Lainnya yang berasal dari Reklasifikasi Belanja Barang/ Jasa tahun 2022 sebesar Rp1.690.829.834,00;
- Penambahan Aset atas hasil penilaian Kembali (Appraisal) oleh Kantor Jasa Penilai Publik tahun 2022 sebesar Rp2.479.684.000,00;
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Bangunan Induknya di Gedung dan Bangunan sebesar Rp127.743.000,00;
- Mutasi Tambah pencatatan antar OPD sebesar Rp4.105.420.630,00;
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Bangunan Induknya di Gedung dan Bangunan yang berasal dari Koreksi BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 sebesar Rp23.856.062.702,00;
- Penambahan Aset Sumber Lainnya yang berasal dari Koreksi BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2022 atas Gedung dan Bangunan hasil Inkrah Putusan Pengadilan Akta Perdamaian Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Tpg Tanggal 16 November 2022 sebesar Rp11.005.370.000,00 sesuai dengan Harga Perolehan namun menurut penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir & Rekan nilai wajar bangunan tersebut adalah Rp7.259.795.000,00. Tetapi dikarenakan sudah diputuskan dalam Putusan Pengadilan sehingga ditetapkan pengakuan bangunan tersebut adalah sebesar Rp11.005.370.000,00;
- Penambahan Koreksi Pencatatan Harga Perolehan Gedung dan Bangunan atas Hasil Koreksi Pengembalian BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 sebesar Rp15.092.707,00.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.141.406.711,00 berasal dari:

- Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.056.883.055;
- Mutasi Kurang pencatatan antar OPD sebesar Rp4.105.420.630,00;
- Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Koreksi BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2022 atas Reklas Pencatatan Aset dibawah nilai Kapitalisasi Gedung dan Bangunan menjadi Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp835.683.026,00;



- Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Koreksi BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2022 atas Penghapusan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen yang telah dirobohkan sebesar Rp1.143.420.000,00.

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.120 Data Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Nama OPD	Gedung Dan Bangunan		Selisih	(%)
		2022	2021		
1	Sekretariat DPRD	78.302.393.699,00	78.142.341.101,00	160.052.598,00	0,20
2	Sekretariat Daerah	102.399.615.310,00	99.963.955.278,00	2.435.660.032,00	2,44
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	175.730.223.513,00	134.026.031.935,00	41.704.191.578,00	31,12
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	130.527.697.801,00	123.262.662.976,00	7.265.034.825,00	5,89
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	105.248.000,00	105.248.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	13.114.562.301,00	13.114.562.301,00	0,00	0,00
7	Dinas Kesehatan	132.094.309.461,00	126.296.435.655,00	5.797.873.806,00	4,59
8	Dinas Pendidikan	312.244.785.161,00	294.654.329.455,00	17.590.455.706,00	5,97
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.808.132.501,00	1.107.515.803,00	700.616.698,00	63,26
10	Dinas Sosial	17.649.809.715,00	17.649.809.715,00	0,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	5.310.157.833,00	4.608.833.333,00	701.324.500,00	15,22
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.436.783.091,00	6.442.821.040,00	(6.037.949,00)	(0,09)
16	Dinas Perikanan	8.626.564.254,00	8.658.594.504,00	(32.030.250,00)	(0,37)
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	5.183.922.254,00	4.410.292.433,00	773.629.821,00	17,54
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	15.067.863.677,00	15.067.863.677,00	0,00	0,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	25.142.506.820,00	12.800.872.820,00	12.341.634.000,00	96,41
20	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.777.955.450,00	3.777.955.450,00	0,00	0,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	4.822.303.055,00	4.822.303.055,00	0,00	0,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	52.976.010.737,00	51.896.688.053,00	1.079.322.684,00	2,08
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	329.419.000,00	329.419.000,00	0,00	0,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.312.054.576,00	7.312.054.576,00	0,00	0,00
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	12.084.959.209,00	12.084.959.209,00	0,00	0,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	47.753.387,00	47.753.387,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Bintan Utara	18.247.892.165,00	18.247.892.165,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Bintan Timur	15.709.025.240,00	16.824.607.886,00	(1.115.582.646,00)	(6,63)
32	Kecamatan Tambelan	13.420.584.988,00	13.424.759.488,00	(4.174.500,00)	(0,03)
33	Kecamatan Gunung Kijang	11.448.785.063,00	11.448.785.063,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Teluk Bintan	10.426.383.662,00	10.436.349.662,00	(9.966.000,00)	(0,10)
35	Kecamatan Teluk Sebong	16.891.802.419,00	16.822.291.219,00	69.511.200,00	0,41



No	Nama OPD	Gedung Dan Bangunan		Selisih	(%)
		2022	2021		
36	Kecamatan Toapaya	12.665.445.737,00	12.611.443.318,00	54.002.419,00	0,43
37	Kecamatan Mantang	12.125.543.995,00	12.125.543.995,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Bintan Pesisir	13.185.826.947,00	13.185.826.947,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	8.914.105.916,00	8.840.263.916,00	73.842.000,00	0,84
	Jumlah	1.244.355.426.937,00	1.154.776.066.415,00	89.579.360.522,00	7,76

7.5.3.3.3.1 Bangunan Gedung

Saldo Aset Tetap berupa Bangunan Gedung per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.229.542.418.903,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp86.443.155.148,00 atau 7,56% dari Tahun 2021 sebesar Rp1.143.099.263.755,00. Mutasi Aset Tetap Bangunan Gedung Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan bangunan gedung Tahun 2022 sebesar Rp100.274.854.048,00 berasal dari:

- Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp58.350.026.809,00 pada Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan;
- Penambahan Aset Sumber Lainnya yang berasal dari Reklasifikasi Belanja Barang/ Jasa tahun 2022 sebesar Rp803.823.800,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Bintan;
- Penambahan Aset Sumber Lainnya yang berasal dari Reklasifikasi Belanja Barang/ Jasa tahun 2022 sebesar Rp823.526.484,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan ;
- Penambahan Aset atas hasil penilaian Kembali (Appraisal) oleh Kantor Jasa Penilai Publik tahun 2022 sebesar Rp2.479.684.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bintan;
- Penambahan atas asset Kapitalisasi pada Bangunan Gedung sebesar Rp127.743.000,00 di OPD Pariwisata dan Kebudayaan dari KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan);
- Mutasi Tambah pencatatan antar OPD sebesar Rp4.105.420.630 di Sekretariat Daerah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan;
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Bangunan Induknya di Bangunan Gedung untuk Bangunan RSUD Tahap 3 dan Tahap 4 yang berasal dari Koreksi BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 sebesar Rp22.564.166.618,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan;
- Penambahan Aset Sumber Lainnya yang berasal dari Koreksi BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2022 atas Gedung dan Bangunan Pondok Pesantren Madani di Ceruk Ijuk hasil Inkrah Putusan Pengadilan sebesar Rp11.005.370.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan. Bangunan Pondok Pesantren Madani telah dilakukan Appraisal (Penilaian) oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan (DAZ dan Rekan)



dari Kota Pekanbaru pada tahun 2021. Atas hasil penilaian tersebut diperoleh hasil Nilai untuk Biaya Pengganti Baru sebesar Rp11.005.370.000,00 dan Indikasi Nilai Wajar Bangunan sebesar Rp7.259.795.000,00. Pemerintah Kabupaten Bintang melakukan pencatatan harga perolehan aset sebesar nilai Biaya Pengganti Baru sebesar Rp11.005.370.000,00 mengacu kepada hasil putusan inkrah pengadilan;

- Penambahan Koreksi Pencatatan Harga Perolehan Gedung dan Bangunan Kantor Kejaksaan Negeri Bintang atas Hasil Koreksi Pengembalian BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022 sebesar Rp15.092.707,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintang.

Sedangkan pengurangan bangunan gedung Tahun 2022 sebesar Rp13.831.698.900,00 berasal dari:

- Mutasi Kurang pencatatan antar OPD sebesar Rp4.105.420.630 di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang;
- Penghapusan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp3.425.379.548,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintang SK Penghapusan Bupati Bintang Nomor 025/SK/2022 Tanggal 14 Desember 2022;
- Penghapusan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp4.246.097.258,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang SK Penghapusan Bupati Bintang Nomor 06/SK/2021 Tanggal 05 Oktober 2022;
- Penghapusan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp379.368.300,00 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang SK Penghapusan Bupati Bintang Nomor 023/SK/2022 Tanggal 14 Desember 2022;
- Penghapusan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp6.037.949,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintang Kabupaten Bintang SK Penghapusan Bupati Bintang Nomor 018/SK/2021 Tanggal 05 Oktober 2022;
- Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Koreksi BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintang tahun 2022 atas Reklas Pencatatan Aset dibawah nilai Kapitalisasi Bangunan Gedung sesuai Kebijakan Akuntansi sebesar 10.000.000/unit menjadi Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp525.975.215,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Tambelan dan Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang;
- Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Koreksi BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintang tahun 2022 atas Penghapusan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen yakni Bangunan Gereja Katolik St. Cosmas dan Damianus Jl. Trikora, Kijang, Kecamatan Bintang Timur yang telah dirobohkan sebesar Rp1.143.420.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintang. Bangunan tersebut dirobohkan dengan tujuan untuk pembangunan Landscape halaman Gedung Community Centre Kecamatan Bintang Timur.

**7.5.3.3.3.2 Bangunan Monumen**

Saldo Aset Tetap berupa Bangunan Monumen per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.143.066.973,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.561.939.104,00 atau 18,20% dari Tahun 2021 sebesar Rp8.581.127.869,00.

Penambahan Bangunan Monumen Tahun 2022 sebesar Rp1.721.744.415,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp429.848.331,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan dan Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Bangunan Induknya di Bangunan Monumen untuk Pembangunan Simpang 3 (tiga) Koridor Lintas Barat Menuju Ibukota Desa Bintan Buyu yang berasal dari Koreksi BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 sebesar Rp1.291.896.084,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

Terdapat Pengurangan Bangunan Monumen Tahun 2022 sebesar Rp159.805.311,00 yang berasal dari Koreksi BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2022 atas Reklas Pencatatan Aset dibawah nilai Kapitalisasi Bangunan Monumen sesuai Kebijakan Akuntansi sebesar 10.000.000/unit menjadi Aset Ekstrakomptabel sebesar pada Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.

7.5.3.3.3.3 Bangunan Menara

Saldo Aset Tetap berupa Bangunan Menara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00. Tidak terdapat penambahan modal pada bangunan Menara.

7.5.3.3.3.4 Tugu Titik Kontrol/Pasti

Saldo Aset Tetap berupa Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.669.941.061,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.574.266.270,00 atau 50,85% dari Tahun 2021 sebesar Rp3.095.674.791,00.

Penambahan Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2022 sebesar Rp1.724.168.770,00 berasal dari:

- Penambahan Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp1.660.689.220,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan;
- Penambahan Aset Sumber Lainnya yang berasal dari Reklasifikasi Belanja Barang/ Jasa tahun 2022 sebesar Rp63.479.550,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan.

Pengurangan Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2022 sebesar Rp149.902.500,00 yang berasal dari Koreksi BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2022 atas Reklas Pencatatan Aset dibawah nilai Kapitalisasi Tugu Titik Kontrol/Pasti sesuai Kebijakan Akuntansi sebesar 10.000.000/unit menjadi Aset Ekstrakomptabel sebesar pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.

7.5.3.3.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.647.682.984.328,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp33.883.483.806,00 atau 2,10 % dari Tahun 2021 sebesar Rp1.613.799.500.522,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 merupakan mutasi tambah kurang Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Bintan selama Tahun 2022 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.121 Data Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Jalan, Irigasi, Jembatan	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Jalan dan jembatan	1.216.133.148.250,00	31.197.409.428,00	671.178.683,00	1.246.659.378.995,00
2	Bangunan air (irigasi)	244.597.792.129,00	6.203.628.813,00	236.666.899,00	250.564.754.043,00
3	Instalasi	55.280.614.012,00	2.381.718.460,00	587.825.641,00	57.074.506.831,00
4	Jaringan	97.787.946.131,00	1.999.729.503,00	6.403.331.175,00	93.384.344.459,00
	Jumlah	1.613.799.500.522,00	41.782.486.204,00	7.899.002.398,00	1.647.682.984.328,00

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp41.782.486.204,00 berasal dari:

- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp37.939.511.750,00;
- Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklas Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp3.630.535.954,00;
- Penambahan Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp127.051.000,00;
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp85.387.500,00.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp7.899.002.398,00 yang terdiri dari:

- Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp846.587.949,00;
- Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Koreksi BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2022 atas Reklas Pencatatan Aset dibawah nilai Kapitalisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan menjadi Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp7.052.414.449.

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per OPD selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.122 Data Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Nama OPD	Jalan Irigasi Dan Jaringan		Selisih	(%)
		2022	2021		
1	Sekretariat DPRD	382.295.000,00	382.295.000,00	0,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	1.099.097.800,00	1.136.904.800,00	(37.807.000,00)	(3,33)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.304.594.886.917,00	1.283.378.421.673	21.216.465.244,00	1,65
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	166.871.946.026,00	157.410.866.135,00	9.461.079.891,00	6,01
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	92.800.320.385,00	92.640.281.440,00	160.038.945,00	0,17
7	Dinas Kesehatan	11.751.389.035,00	10.588.462.078,00	1.162.926.957,00	10,98
8	Dinas Pendidikan	1.177.656.608,00	1.109.675.347,00	67.981.261,00	6,13
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	19.791.200,00	(19.791.200,00)	(100,00)



No	Nama OPD	Jalan Irigasi Dan Jaringan		Selisih	(%)
		2022	2021		
10	Dinas Sosial	41.250.000,00	48.230.000,00	(6.980.000,00)	-14,47
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	730.588.557,00	713.143.683,00	17.444.874,00	2,45
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.630.000,00	31.625.000,00	(5.995.000,00)	(18,96)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Tenaga Kerja	14.993.000,00	24.992.000,00	(9.999.000,00)	(40,01)
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	652.902.400,00	670.722.510,00	(17.820.110,00)	(2,66)
16	Dinas Perikanan	7.229.451.850,00	7.303.879.815,00	(74.427.965,00)	(1,02)
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	975.115.198,00	111.808.894,00	863.306.304,00	772,13
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	94.490.000,00	104.390.000,00	(9.900.000,00)	(9,48)
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	35.473.470.841,00	35.616.820.441,00	(143.349.600,00)	(0,40)
20	Badan Pendapatan Daerah	19.415.000,00	19.415.000,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	110.967.900,00	125.358.281,00	(14.390.381,00)	(11,48)
23	Dinas Lingkungan Hidup	397.313.965,00	397.313.965,00	0,00	0,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.121.760.672,00	866.996.672,00	254.764.000,00	29,38
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	62.786.418,00	62.786.418,00	0,00	0,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	56.834.237,00	72.364.237,00	(15.530.000,00)	(21,46)
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	34.980.000,00	34.980.000,00	0,00	0,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Bintan Utara	6.381.556.810,00	6.216.594.300,00	164.962.510,00	2,65
31	Kecamatan Bintan Timur	4.709.968.542,00	4.475.130.692,00	234.837.850,00	5,25
32	Kecamatan Tambelan	1.071.121.923,00	1.112.864.043,00	(41.742.120,00)	(3,75)
33	Kecamatan Gunung Kijang	1.129.411.161,00	986.675.145,00	142.736.016,00	14,47
34	Kecamatan Teluk Bintan	952.455.600,00	844.360.100,00	108.095.500,00	12,80
35	Kecamatan Teluk Sebong	3.057.169.222,00	2.989.561.899,00	67.607.323,00	2,26
36	Kecamatan Toapaya	1.524.911.013,00	1.404.814.445,00	120.096.568,00	8,55
37	Kecamatan Mantang	117.904.600,00	117.904.600,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Bintan Pesisir	120.264.100,00	151.944.100,00	(31.680.000,00)	(20,85)
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	2.801.879.548,00	2.531.326.609,00	270.552.939,00	10,69
	Jumlah	1.647.682.984.328,00	1.613.799.500.522,00	33.883.483.806,00	2,10

7.5.3.3.4.1 Jalan dan Jembatan

Saldo Aset Tetap berupa Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp Rp1.246.659.378.995,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.526.230.745,00 atau 2,51% dari Tahun 2021 sebesar Rp1.216.133.148.250,00 disebabkan adanya Penambahan Jalan dan Jembatan sebagai berikut.

Penambahan Jalan dan Jembatan sebesar Rp31.197.409.428,00 terdiri dari:

- Penambahan jalan dan jembatan Tahun 2022 sebesar Rp28.621.317.484,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan;



- Penambahan Aset yang bersumber dari barang dan jasa sebesar Rp3.630.535.954,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Penambahan dari Reklas KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) sebesar Rp85.387.500,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pengurangan Aset Tetap Jalan dan Jembatan Tahun 2022 sebesar Rp671.178.683,00 yang terdiri dari:

- Penghapusan Aset sebesar Rp624.732.683 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan berdasarkan SK Nomor 022/SK/2022 Tanggal 14 Desember 2022 dan SK Nomor 025/SK/2022 Tanggal 14 Desember 2022;
- Pengurangan Tahun 2022 sebesar Rp 46.446.000,00 yang berasal dari Koreksi BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2022 atas Reklas Pencatatan Aset dibawah nilai Kapitalisasi Tugu Titik Kontrol/Pasti sesuai Kebijakan Akuntansi sebesar 10.000.000/unit menjadi Aset Ekstrakomptabel sebesar pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, dan Kecamatan Gunung Kijang.

7.5.3.3.4.2 Bangunan Air/Irigasi

Saldo Aset Tetap berupa Bangunan Air/Irigasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp250.564.754.043,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp5.966.961.914,00 atau 2,44% dari Tahun 2021 sebesar Rp244.597.792.129,00. disebabkan adanya Penambahan Bangunan Air/Irigasi sebagai berikut:

Penambahan Bangunan Air/Irigasi Tahun 2022 sebesar Rp6.203.628.813,00 berasal dari:

- Penambahan Bangunan Air/Irigasi Tahun 2022 sebesar Rp5.384.891.703,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan;
- Penambahan Aset yang bersumber dari barang dan jasa atas sebesar Rp818.737.110,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pengurangan Aset Tetap Bangunan Air/ Irigasi Tahun 2022 sebesar Rp236.666.899,00 yang terdiri dari:

Penghapusan Aset sebesar Rp104.067.266,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan berdasarkan SK Nomor 027/SK/2022 tanggal 14 Desember 2022;

Pengurangan Tahun 2022 sebesar Rp132.599.633,00 yang berasal dari Koreksi BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2022 atas Reklas Pencatatan Aset dibawah nilai Kapitalisasi Tugu Titik Kontrol/Pasti sesuai Kebijakan Akuntansi sebesar 10.000.000/unit menjadi Aset Ekstrakomptabel sebesar pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, dan Kecamatan Tambelan.

**7.5.3.3.4.3 Instalasi**

Saldo Aset Tetap berupa Instalasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp57.074.506.831,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.793.892.819,00 atau 3,25% dari Tahun 2021 sebesar Rp55.280.614.012,00. Jumlah Aset Tetap Instalasi per 31 Desember 2022 merupakan mutasi tambah Aset Instalasi milik Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian sebagai berikut.

Penambahan instalasi Tahun 2022 sebesar Rp2.338.188.460,00 berasal dari:

- Belanja Modal Instalasi Tahun 2022 sebesar Rp2.282.079.460,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
- Penambahan Aset yang bersumber dari barang dan jasa atas sebesar Rp99.639.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan.

Pengurangan Aset Instalasi Tahun 2022 sebesar Rp587.825.641,00 yang terdiri dari:

- Penghapusan Aset sebesar Rp30.000.000,00 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan berdasarkan SK Nomor 023/SK/2022 Tanggal 14 Desember 2022;
- Penghapusan Aset sebesar Rp13.530.000 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan berdasarkan SK Nomor 033/SK/2022 Tanggal 14 Desember 2022;
- Pengurangan Tahun 2022 sebesar Rp544.295.641,00 yang berasal dari Koreksi BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2022 atas Reklas Pencatatan Aset dibawah nilai Kapitalisasi Tugu Titik Kontrol/Pasti sesuai Kebijakan Akuntansi sebesar 10.000.000/unit menjadi Aset Ekstrakomptabel sebesar pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Kb, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Toapaya.

7.5.3.3.4.4 Jaringan

Saldo Aset Tetap berupa Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp93.384.344.459,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.403.601.672,00 atau 4,50% dari Tahun 2021 sebesar Rp97.787.946.131,00. Jumlah Aset Tetap Jaringan per 31 Desember 2022 merupakan mutasi tambah Aset Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian sebagai berikut.

Penambahan Aset Tetap Jaringan sebesar Rp1.999.729.503,00 berasal dari:

- Penambahan Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp1.651.223.103,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan;



- Penambahan Aset yang bersumber dari barang dan jasa dan hibah dari Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp221.455.400,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
- Penambahan Aset Jaringan Atas Hibah Dari Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar Rp127.051.000,00 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan Dengan Nomor SK 360/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022.

Pengurangan Aset Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp6.403.331.175,00 yang terdiri dari :

- Penghapusan Aset sebesar Rp74.258.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan berdasarkan SK Nomor 026/SK/2022 Tanggal 14 Desember 2022;
- Pengurangan Tahun 2022 sebesar Rp6.329.073.175,00 yang berasal dari Koreksi BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2022 atas Reklas Pencatatan Aset dibawah nilai Kapitalisasi Tugu Titik Kontrol/Pasti sesuai Kebijakan Akuntansi sebesar 10.000.000/unit menjadi Aset Ekstrakomptabel sebesar pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Dinas Kepemudaan Dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, dan Sekretariat Daerah.

7.5.3.3.5 ASET TETAP LAINNYA

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp54.394.797.077,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp759.356.883,00 atau 1,42 % dari Tahun 2021 sebesar Rp53.635.440.194,00.

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 merupakan mutasi tambah kurang Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang terdiri dari:

Tabel 7.5.123 Data Mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Aset Tetap Lainnya	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	18.062.130.532,00	1.104.358.040,00	80.710.075,00	19.085.778.497,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.710.553.891,00	220.233.857,00	0,00	3.930.787.748,00
3	Hewan	464.833.000,00	0,00	434.968.000,00	29.865.000,00
4	Biota Perairan	162.435.750,00	0,00	99.385.000,00	63.050.750,00
5	Tanaman	701.228.061,00	97.690.293,00	47.862.232,00	751.056.122,00
6	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	30.534.258.960,00	0,00	0,00	30.534.258.960,00
	Jumlah	53.635.440.194,00	1.422.282.190,00	662.925.307,00	54.394.797.077,00

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.422.282.190,00 berasal dari:

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2022 sebesar Rp1.422.282.190,00.

Terdapat Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp662.925.307,00 berasal dari:

- Penghapusan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp80.710.075,00;



- Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp47.862.232,00 yang harga perolehannya dibawah nilai kapitalisasi sehingga tercatat pada Buku Ekstrakomptabel pada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
- Pengurangan Tahun 2022 sebesar Rp534.353.000,00 yang berasal dari Koreksi BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2022 atas penghapusan Hewan, dan Biota Perairan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , Dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Aset Tetap Lainnya per OPD selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.124 Data Aset Tetap Lainnya Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Nama OPD	Aset Tetap Lainnya		Selisih	(%)
		2022	2021		
1	Sekretariat DPRD	84.221.500,00	84.221.500,00	0,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	283.365.600,00	283.365.600,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.722.805.235,00	30.822.190.235,00	(99.385.000,00)	(0,32)
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	419.978.750,00	419.978.750,00	0,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Kesehatan	254.355.308,00	204.027.747,00	50.327.561,00	24,67
8	Dinas Pendidikan	18.103.292.012,00	16.859.909.690,00	1.243.382.322,00	7,37
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	84.719.948,00	519.687.948,00	(434.968.000,00)	(83,70)
16	Dinas Perikanan	242.050.750,00	242.050.750,00	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	67.817.999,00	67.817.999,00	0,00	0,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	84.182.250,00	84.182.250,00	0,00	0,00
20	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	696.500,00	696.500,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.830.100,00	4.830.100,00	0,00	0,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	77.180.839,00	77.180.839,00	0,00	0,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	474.939.304,00	474.939.304,00	0,00	0,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	1.753.476.000,00	1.753.476.000,00	0,00	0,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.338.700,00	23.338.700,00	0,00	0,00
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.397.635.832,00	1.397.635.832,00	0,00	0,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Bintan Utara	27.280.000,00	27.280.000,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Bintan Timur	8.140.000,00	8.140.000,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Tambelan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Gunung Kijang	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Teluk Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Teluk Sebong	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Toapaya	194.490.450,00	194.490.450,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Mantang	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Bintan Pesisir	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Nama OPD	Aset Tetap Lainnya		Selisih	(%)
		2022	2021		
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	54.394.797.077,00	53.635.440.194,00	759.356.883,00	1,42

7.5.3.3.5.1 Bahan Perpustakaan

Saldo Aset Tetap lainnya berupa Bahan Perpustakaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.085.778.497,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.023.647.965,00 atau 5,67% dari Tahun 2021 sebesar Rp18.062.130.532,00. Jumlah Buku Perpustakaan milik Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2022 merupakan mutasi tambah dengan rincian sebagai berikut.

Penambahan Bahan Perpustakaan sebesar Rp1.104.358.040,00 bersumber dari:

- Penambahan Bahan Perpustakaan Tahun 2022 sebesar Rp1.104.358.040,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2022 pada Dinas Dinas Pendidikan;

Pengurangan Aset Bahan Perpustakaan Tahun 2022 sebesar Rp80.710.075,00 merupakan penghapusan barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan SK Penghapusan 023/SK/2022 Tanggal 14 Desember 2022.

7.5.3.3.5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Saldo Aset Tetap lainnya berupa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.930.787.748,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp220.233.857,00 atau 5,94% dari Tahun 2021 sebesar Rp3.710.553.891,00. Jumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga milik Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2022 merupakan mutasi tambah dengan rincian sebagai berikut.

Penambahan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp220.233.857,00 bersumber dari Belanja Modal Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan;

7.5.3.3.5.3 Hewan

Saldo Aset Tetap lainnya berupa Hewan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp29.865.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp434.968.000,00 atau 93,58% dari Tahun 2021 sebesar Rp464.833.000,00. Jumlah Hewan milik Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2022 merupakan mutasi kurang dengan rincian sebagai berikut.

Pengurangan Tahun 2022 sebesar Rp434.968.000,00 yang berasal dari Koreksi BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2022 atas penghapusan Hewan yang telah mati/sudah tidak ada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan.

7.5.3.3.5.4 Biota Perairan

Saldo Aset Tetap lainnya berupa Biota Perairan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp63.050.750,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp99.385.000,00 atau 61,18% dari Tahun 2021 sebesar Rp162.435.750,00. Jumlah Biota Perairan milik Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2022 merupakan mutasi kurang dengan rincian sebagai berikut.

Pengurangan Tahun 2022 sebesar Rp99.398.000,00 yang berasal dari Koreksi BPK Audited LKPD Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2022 atas penghapusan Biota



Perairan yang telah mati/sudah tidak ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan.

7.5.3.3.5.5 Tanaman

Saldo Aset Tetap lainnya berupa Tanaman per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp751.056.122,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp49.828.061,00 atau 7,11% dari Tahun 2021 Sebesar Rp701.228.061,00. Jumlah Aset Tetap Lainnya Berupa Tanaman milik Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2022 merupakan mutasi tambah dengan rincian sebagai berikut.

Penambahan Tanaman sebesar Rp97.690.293,00 bersumber dari:

Penambahan Tanaman Tahun 2022 sebesar Rp97.690.293,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan.

Terdapat Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp47.862.232,00 berasal dari:

Terdapat Pengurangan Tanaman Tahun 2022 sebesar Rp47.862.232,00 yang harga perolehannya dibawah nilai kapitalisasi sehingga tercatat pada Buku Ekstrakomptabel pada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.

7.5.3.3.5.6 Barang Koleksi Non Budaya

Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Aset Barang Koleksi Non Budaya.

7.5.3.3.5.7 Aset Tetap Renovasi

Saldo Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp30.534.258.960,00 dan tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp30.534.258.960,00.

7.5.3.3.6 KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN

Aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.715.941.070,00 mengalami penurunan nilai sebesar Rp24.069.193.202,00 atau 75,72% dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp31.785.134.272,00.

Jumlah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 merupakan mutasi tambah kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang terdiri dari:

- Pengurangan Kontruksi Dalam Pengerjaan yang dikapitalisasikan pada asset induknya sebesar Rp24.069.193.202,00 yang direklas ke KIB C (Gedung dan Bangunan) dan KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

**Tabel 7.5.125 Data Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Konstruksi Dalam Pekerjaan	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Tanah	90.365.000,00	0,00	0,00	90.365.000,00
2	Gedung dan Bangunan	26.241.589.746,00	0,00	23.983.805.702,00	2.257.784.044,00
3	Jalan, irigasi dan jaringan	5.453.179.526,00	0,00	85.387.500,00	5.367.792.026,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
	Jumlah	31.785.134.272,00	0,00	24.069.193.202,00	7.715.941.070,00

Adapun Rincian Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.126 Data Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Nama Pekerjaan/Konstruksi Dalam Pengerjaan	Nilai (Rp)	Tahun	Keterangan OPD yang Mencatat
1	Konsultansi DED	289.113.000,00	2010	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Penyusunan Detail Desain Peningkatan Kapasitas Jalan Perbaikan Geometrik Jalan : Ruas Jalan Ibukota Bandar Seri Bentan, Ruas Jalan Km. 15 Gesek	148.621.000,00	2011	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Perencanaan Teknis Ded Ikk Teluk Sebong Kec. Teluk Sebong	49.914.000,00	2011	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Review Desain Perencanaan Jalan Lintas Barat (Lanjutan)	189.777.000,00	2011	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5	Pengawasan Teknis Pengadaan Sarana Budidaya Pertanian Pekerjaan Saung Tani Perlengkapan, Gudang Pupuk/ Alat, Tower Air Cor Beton, Land Clearing Jalan Usaha Tani(Jut), Jalan Produksi 0,90 Kmx4m, Embung, Mesin Air Instalasi Tiang Beton	99.401.000,00	2011	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	Ded Fasilitas Pendukung Pelabuhan Tanjung Berakit	142.175.000,00	2016	Dinas Perhubungan
9	Upl/Ukl Pembangunan Dermaga Nelayan Rt. 04/01 Dusun I Desa Sebong Pereh Kec. Teluk Sebong	49.665.000,00	2016	Dinas Perhubungan
10	Perencanaan Teknis Pemasangan Jaringan Listrik Dan Penyambungan Daya Listrik Pabrik Es Tanjung Uban Kec. Bintan Utara	24.420.000,00	2016	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
11	Perencanaan Teknis Pembangunan Semenisasi Beton Buras Bertulang Jalan Pasar Baru Gg. Raflesia Rt. 04 Rw. 001 Desa Sebong Lagoi Kec. Teluk Sebong (305 M2)	4.063.265,00	2016	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
12	Perencanaan Teknis Jalan Kp. Tekis Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya (1 Paket) (Reklas Barang Dan Jasa Konsultansi Th.2016)	197.800.000,00	2016	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
13	Perencanaan Teknis Pembangunan Insfarstruktur Spam Perdesaan Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya (1 Paket)	88.192.000,00	2016	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
14	Perencanaan Teknis Pembangunan Paving Block Lr. Nangka Rt. 03 Rw. 14 Tokojo Kp. Beringin Indah Barat Kel. Kijang Kota Kec.Bintan Timur (311 M2)	2.367.246,00	2016	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
15	Perencanaan Teknis Pembangunan Paving Block Gg. Alumina I Rt. 01 Rw. 22 Kp. Kolong Enam Kel.Kijang Kota Kec.Bintan Timur (342 M2)	2.603.970,00	2016	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
16	Perencanaan Teknis Pembangunan Balai Pertemuan Pemuda Kamboja. Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara	5.981.000,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
18	Perencanaan Teknis : Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung Posyandu Pandan Wangi Rt. 02 Rw. 05 Kp. Sei Datok Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (1 Paket)	4.674.684,00	2017	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
19	Jasa Perencanaan Rehab Berat Pkm Kijang	49.610.000,00	2017	Dinas Kesehatan
20	Jasa Perencanaan Rehab Pkm TI Bintan	7.999.063,00	2017	Dinas Kesehatan
21	Puskesmas Sri Bintan	7.999.063,00	2017	Dinas Kesehatan
22	Jasa Perencanaan Rehab Sedang Pkm Tanjung Uban	49.500.000,00	2017	Dinas Kesehatan
23	Jasa Perencanaan Rehab Pkm Berakit	7.999.063,00	2017	Dinas Kesehatan
24	Jasa Perencanaan Rehab Pkm Toapaya	7.999.061,00	2017	Dinas Kesehatan
25	Jasa Perencanaan Rehab Sedang Pkm Mantang	32.120.000,00	2017	Dinas Kesehatan
26	Jasa Perencanaan Rehab Berat Pkm TI Sasah	49.992.250,00	2017	Dinas Kesehatan
27	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kp. Pelita - Kp. Beringin Desa Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam (3 Km)	155.940.000,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
28	Perencanaan Teknis Pembangunan Spam	49.527.500,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum



No	Nama Pekerjaan/Konstruksi Dalam Pengerjaan	Nilai (Rp)	Tahun	Keterangan OPD yang Mencatat
	Perdesaan Desa Pulau Mentebung Kec. Tambelan (1 Paket)			Dan Penataan Ruang
29	Perencanaan Teknis Pembangunan Spam Perdesaan Desa Pulau Pinang Kec. Tambelan (1 Paket)	49.527.500,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
30	Perencanaan Teknis Optimalisasi Spam Kp. Bina Desa Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur (1 Paket)	49.912.500,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
31	Perencanaan Teknis Pembangunan Spam Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir (1 Paket)	44.522.500,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
32	Perencanaan Teknis Pembangunan Spam Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya (1 Paket)	49.857.500,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
33	Perencanaan Teknis Pengerasan Jalan Sdit An. Nahl Kel. Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam (700 M)	19.800.000,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
34	Perencanaan Teknis Optimalisasi Spam Ikk Kawal Kec. Gunung Kijang (1 Paket)	74.307.500,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
35	Perencanaan Teknis Optimalisasi Desa Penaga Kec. Teluk Bintan (1 Paket)	29.672.500,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
36	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Rt. 02 Rw. 01 Cikolek Kec. Toapaya (600 M)	24.436.500,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
37	Perencanaan Teknis Pembangunan/Pengaspalan Jalan Pepaya Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya (2,5 Km)	118.371.500,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
38	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Wacopek - Ppi Kec. Bintan Timur (3 Km)	160.961.500,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
39	Perencanaan Teknis Pembangunan/Pengaspalan Jalan Lingkar Wacopek - Sp. Wacopek Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (3 Km)	166.995.000,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
40	Perencanaan Teknis Pembangunan/Pengaspalan Jalan Maju Jaya Kel. Toapaya Asri Kec. Toapaya (1 Km)	98.304.000,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
41	Perencanaan Teknis Pelebaran Jalan Berdikari Ii Kel. Tanjunguban Timur Kec. Bintan Utara (3 Km)	159.652.500,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
42	Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Pengaspalan Jalan Kp. Siantan Menuju Kp. Balai Rejo Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan (2 Km)	126.154.000,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
43	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Kp. Belak - Kemalai Kec. Teluk Sebong (1 Unit)	168.150.000,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
44	Perencanaan Teknis Pembangunan/Pengaspalan Jalan Pesantren Hidayatullah Rt. 01/Rw. 01 Kel. Toapaya Asri Kec. Toapaya (1,5 Km)	123.493.000,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
45	Perencanaan Teknis Pengaspalan Jalan Siantan - Smp N 28 Bintan Kec. Teluk Bintan (500 M)	49.582.500,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
46	Perencanaan Teknis Pembangunan/Pengaspalan Jalan Sdn. 006 Pulau Ladi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan (500 M)	49.582.500,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
47	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Desa Batu Lepuk - Bandara/Air Strip Pulau Tambelan (1 Paket)	178.424.000,00	2017	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
48	Perencanaan Penyusunan Penerangan Umum Rayon Tanjung Uban	79.970.000,00	2018	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
49	Pengawasan Teknis (1paket) Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	19.000.000,00	2018	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
50	Perencanaan Penyusunan Penerangan Umum Rayon Kijang Dan Bintan Centre	79.970.000,00	2018	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
51	Perencanaan Teknis (Ded) Saluran Tersier Permukiman Kecamatan Bintan Utara	81.664.495,00	2018	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
52	Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Cendana Rt. 005 Rw. 002 Pasar Baru Kel. Tanjunguban Selatan Kec. Bintan Utara (350 M)	2.745.000,00	2018	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
53	Perencanaan Pembangunan Duiker Jalan Namling Kec. Toapaya (1 Buah)	9.790.000,00	2018	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
54	Review Desain Pembangunan/Penataan Persimpangan Km. 16 Toapaya Kec. Toapaya (1 Buah)	138.369.000,00	2018	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
55	Perencanaan Teknis Gedung Arsip Dinas Pupr Kab. Bintan (1 Keg)	41.690.000,00	2019	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
56	Perencanaan Teknis (Ded) Pembangunan Monumen Kp. Tua Mentigi Kel. Tanjunguban Kec. Bintan Utara	99.850.000,00	2019	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
57	Jasa Perencanaan Ruang Pertemuan Teluk Bintan	7.205.000,00	2019	Dinas Kesehatan



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama Pekerjaan/Konstruksi Dalam Pengerjaan	Nilai (Rp)	Tahun	Keterangan OPD yang Mencatat
58	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Tanah Embung Hulu Sungai (Koreksi Bpk Tahun 2020)	90.365.000,00	2020	Sekretariat Daerah
59	Jasa Perencanaan Posyandu Wijaya Kesuma	6.340.277,00	2020	Dinas Kesehatan
60	Master Plan Rsud 2020 (Blud 2020)	636.460.000,00	2020	Dinas Kesehatan
61	Perencanaan /Desain Engenering Kegiatan Dak Pembangunan /Perbaikan Balai Penyuluhan Bpp (Koreksi Bpk Th 2020)	27.445.000,00	2020	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
62	Ded Bangunan Tempat Parkir	14.998.500,00	2020	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
63	Perencanaan Teknis/Ded Pembangunan Batu Miring Kantor Bp3bk Kab. Bintan (Koreksi Bpk Tahun 2020)	69.850.000,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
64	Perencanaan Teknis/Ded Pembangunan Gedung Nasional Dan Rumah Dinas Bupati Di Bintan Utara (Koreksi Bpk Tahun 2020)	99.825.000,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
65	Perencanaan Teknis/Ded Pembangunan Kantor Pelayanan Sim Satlantas (Koreksi Bpk Tahun 2020)	99.715.000,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
66	Perencanaan Teknis Penataan Bundaran Simpang Km. 16 Toapaya (Koreksi Bpk Tahun 2020)	94.600.000,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
67	Perencanaan Rehap Balai Pertemuan Kp. Lengkuas Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (Lanjutaan)	12.405.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
68	Perencanaan Bangunan Tugu Tulisan Di Kec. Bintan Utara (1 Lokasi)	69.910.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
69	Pengawasan Pembangunan Pagar Tpu Kecamatan Binpes (1 Lokasi) (1 Kegiatan)	15.000.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
70	Perencanaan Pembangunan Pagar Makam Jl. Lama Tg. Uban Km. 27 Kec. Toapaya	11.980.833,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
71	Detail Enginerig Design (Ded) Penataan Kawasan Pujasera Dan Kios Kolam Tasek Gemilang Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur	99.957.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
72	Perencanaan Pembangunan Taman Bermain Di Kec. Seri Kuala Lobam (1 Lokasi)	19.910.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
73	Belanja Jasa Konsultansi Individu Perencanaan Dan Pengawasan Teknis Peningkatan Sarana Bangunan Balai Tenun Kec. Bintan Utara (Koreksi Bpk Tahun 2020)	18.499.250,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
74	Perencanaan Ded Masjid Terapung Tambelan Kec. Tambelan (1 Kegiatan)	99.850.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
75	Perencanaan Pembangunan Ruang Pertemuan Perumahan Telaga Surya Kelurahan Tanjung Uban Utara Kecamatan Bintan Utara Kab. Bintan	12.405.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
76	Belanja Perencanaan Teknis/Ded Resettlement, Pematangan Lahan Dan Grading Kawasan Desa Pengudang (Koreksi Bpk Tahun 2020)	99.888.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
77	Perencanaan Teknis Peningkatan Kapasitas Jl. Sp. Wacopek-Batu Licin (Koreksi Bpk Tahun 2020)	84.964.000,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
78	Perencanaan Teknis/Ded Jl. Lintas 2 Kp. Sinjang Rt.04/Rw.02 Desa Toapaya (Koreksi Bpk Tahun 2020)	99.682.000,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
79	Perencanaan Teknis Overlay Jl. Utama Perumahan Lobam Bestari (Koreksi Bpk Tahun 2020)	84.683.500,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
80	Perencanaan Teknis Pengaspalan Jl. Semangka Tr.01 Rw.01 Desa Toapaya (Koreksi Bpk Tahun 2020)	99.844.800,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
81	Perencana Teknis Peningkatan Jl. Karet Kec. Bintan Utara (Koreksi Bpk Th 2020)	84.777.000,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
82	Perencanaan Teknis Jalan Bansun Kec. Gunung Kijang (Koreksi Bpk Tahun 2020)	89.760.000,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
83	Perencanaan Teknis/Ded Jl. Wakatobi Kec. Gunung Kijang (Koreksi Bpk Tahun 2020)	99.385.000,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
84	Perencanaan Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Gg. Harahap Desa Kuala Sempang Kec Seri Kuala Lobam (226 M2)	6.996.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
85	Perencanaan Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Menuju Tk/Paud Petra Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam (72 M2)	6.996.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
86	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok	5.593.750,00	2020	Dinas Perumahan Dan



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama Pekerjaan/Konstruksi Dalam Pengerjaan	Nilai (Rp)	Tahun	Keterangan OPD yang Mencatat
	Kampung Nosari Timur Rt.003 Rw.015 Kec. Bintan Timur (190 M2)			Kawasan Permukiman
87	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok Jl. Jahe Rt.004 Rw.002 Kec. Bintan Timur(Lanjutan) (292 M2)	5.593.750,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
88	Perencanaan Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Gg. Garuda VIII Rt. 01 Rw. 01 Kel. Tanjung Permai Kec. Seri Kuala Lobam (304 M2)	6.996.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
89	Perencanaan Pembangunan Pembangunan Semenisasi Beton Gg. Pala 1 Rt.001 Rw002 Kec. Bintan Timur (226 M2)	5.593.750,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
90	Perencanaan Pembangunan Semenisasi Beton Jl. Kampung Baru Kelurahan Sei Lekop Kec. Bintan Timur (538 M2)	5.593.750,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
91	Perencanaan Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Perumahan Lobam Mas Asri 2 Rt.01 Rw. 01 Kel. Tanjung Permai Kec Seri Kuala Lobam (150 M2)	6.996.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
92	Perencanaan Pembangunan Paving Blok Gg. Kemunting Rt.04 Rw.03 Kelurahan Gunung Lengkuas Kec. Bintim (Lanjutan) (190 M2)	6.440.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
93	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kampung Budi Mulya Gg. Seta Rt.002 Rw.004 Kelurahan Kijang Kota Kec. Bintan Timur (Tahap 4)	14.214.285,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
94	Perencanaan Pembangunan Paving Blok Gg. Anggur Rt. 05 Rw. 01 Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam (190 M2)	6.996.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
95	Perencanaan Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan Gg. Sepat Rt. 004 Rw 004 Perumahan Telaga Surya Kelurahan Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara	16.567.500,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
96	Perencanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Kp. Kolam Renang Rt.004 Rw.003 Kecamatan Bintan Timur	9.988.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
97	Perencanaan Pembangunan Paving Blok Rt.04 Rw.04 Gunung Lengkuas Kec. Bintim (390 M2)	6.440.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
98	Perencanaan Pembangunan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Rt.03 Rw.01 Kelurahan Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam	9.988.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
99	Perencanaan Pembangunan Pembangunan Fasilitas Umum (Sumur) Rt. 01 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (1 Kegiatan)	6.182.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
100	Pembangunan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kampung Kolam Renang Rt.004 Rw. 003 Kelurahan Kijang Kota Kec. Bintan Timur	14.214.285,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
101	Perencanaan Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Jl. Mulya Sari Rt.012 Rw.002 Tanjung Uban Selatan Kota Kec. Bintan Utara (Lanjutan) (266 M2)	5.578.750,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
102	Perencanaan Pembangunan Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Sidodadi Rt.03 Rw.02 Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan (226 M2)	5.989.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
103	Perencanaan Pembangunan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Rt.01 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir	9.988.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
104	Perencanaan Pembangunan Paving Blok Gg. Kaswari Rt. 01 Rw.05 Kec. Gunung Kijang (242 M2)	5.989.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
105	Perencana Pembangunan Paving Blok, Batu Miring Dan Timbunan Jalan Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang (276 M2)	5.989.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
106	Perencanaan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Gg. Lengkuas Rt. 008 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (192 M2)	5.989.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
107	Perencanaan Pembangunan Pelantar Permukiman Kp. Panglong Desa Berakit Kec. Teluk Sebong	57.986.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
108	Perencanaan Pembangunan Pelantar Permukiman Rt.004 Rw.003 Desa Mantang Lama Kec. Mantang	5.712.857,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama Pekerjaan/Konstruksi Dalam Pengerjaan	Nilai (Rp)	Tahun	Keterangan OPD yang Mencatat
109	Perencanaan Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Jl. Pasar Baru Blok A. Rt.05 Rw.01 Kamboja Luar Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara (204 M2)	5.578.750,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
110	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Jl. Nusantara Rt.Oo2 Rw.002 Kec. Bintan Timur	14.048.333,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
111	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Rw.001 Rw.003 Rw.005 Rw.006 Kelurahan Sei Lekop Kec. Bintan Timur	14.048.333,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
112	Perencanaan Pembangunan Pelantar Permukiman Kp. Mentigi Kec. Bintan Utara	5.712.858,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
113	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Rt.002 Rw.005 Kelurahan Sei Lekop Kec. Bintan Timur	14.048.333,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
114	Perencanaan Pembangunan Sarana Rth Kolam Kijang (Pagar Pengaman Keliling Kolam) Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (Tahap 2)	89.837.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
115	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Kec. Bintan Timur	14.048.333,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
116	Perencanaan Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jalan Di Kec. Bintan Timur	20.735.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
117	Perencanaan Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jalan Di Kelurahan Sei Lekop Dan Kel. Gunung Lengkuas	20.735.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
118	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Rt.002 Rw.003 Kelurahan Sei Enam Kec. Bintan Timur	14.048.333,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
119	Perencanaan Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jalan Menuju Tempat Ibadah, Simpang Jalan Dan Fasilitas Umum Kab. Bintan	99.980.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
120	Perencanaan Pengadaan Mesin Pompa Air Dan Peninggian Tangki Air Rt.04 Rt.06 Rw.03 Lobam Mas Asri Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam	17.930.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
121	Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jalan Di Kampung Berek Motor Rw 008 Kec. Bintan Timur	20.735.000,00	2020	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
122	Perencanaan Teknis Sistem Drainase Area Simpang Km.16 (Koreksi Bpk Tahun 2020)	84.920.000,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
123	Perencanaan Teknis (Ded) Sarana Dan Spam Ikk Kp Bugis (Koreksi Bpk Tahun 2020)	39.900.300,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
124	Perencanaan Teknis Ded Jalan Kp. Limau Kec. Seri Kuala Lobam (Koreksi Bpk Tahun 2020)	99.539.000,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
125	Perencanaan Teknis (Ded) Sarana Dan Prasarana Spam Ikk Kawal (Koreksi Bpk Tahun 2020)	54.175.000,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
126	Perencanaan Teknis (Ded) Sarana Dan Prasarana Spam Ikk Teluk Bintan (Koreksi Bpk Th 2020)	63.525.000,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
127	Perencanaan Teknis/Ded Jl. Kimbong Desa Sri Bintan Kec. Teluk Sebong (Koreksi Bpk Tahun 2020)	99.488.000,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
128	Perencanaan Teknis/Ded Jalan Jalan Kec. Seri Kuala Lobam (Koreksi Bpk Tahun 2020)	99.550.000,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
129	Perencanaan Teknis (Ded) Jalan Dan Jembatan (Koreksi Bpk Tahun 2020)	89.870.000,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
130	Pembayaran Termin Perencanaan Teknis Pengaspalan Sei Jeram (Koreksi Bpk Tahun 2020)	89.817.200,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
131	Perencanaan Teknis (Ded) Jalan Dan Jembatan (Koreksi Bpk Tahun 2020)	29.796.800,00	2020	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
132	Belanja Apbd 2021 Ruangan Radiologi Bangunan Kesehatan Biaya Kosultasi Perencanaan Rehab Ruang Mobile X-Ray	11.902.000,00	2021	Dinas Kesehatan
133	Belanja Apbd 2021 Ruangan Bougenville Bangunan Kesehatan Biaya Kosultasi Perencanaan Pembangunan Tempat Pelayanan Bencana Pandemi	15.532.000,00	2021	Dinas Kesehatan
134	Konsultan Perencanaan Tenis (Pembangunan, Rekonstruksi, Rehabilitasi, Pemeliharaan Berkala Dermaga / Pelabuhan Kabupaten) Di Kp. Telang Kecamatan Mantang	79.915.000,00	2021	Dinas Perhubungan
	Jumlah	7.715.941.070,00		



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

7.5.3.3.7 AKUMULASI PENYUSUTAN

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.799.924.859.005,00 mengalami kenaikan sebesar Rp134.702.154.854,00 atau 8,09% dari Tahun 2021 sebesar Rp1.665.222.704.151.

Tabel 7.5.127 Data Mutasi Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Akumulasi Penyusutan	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	415.344.148.664,00	456.440.963.043,00
2	Gedung dan Bangunan	235.141.585.569,00	260.260.428.503,00
3	Jalan, irigasi dan jaringan	984.202.710.958,00	1.052.689.208.499,00
4	Aset Tetap Lainnya	30.534.258.960,00	30.534.258.960,00
	Jumlah	1.665.222.704.151,00	1.799.924.859.005,00

Tabel 7.5.128 Data Akumulasi Penyusutan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan 2022 (Rp)			
		Peralatan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya
1	Sekretariat DPRD	11.541.930.146,00	17.951.990.499,00	78.323.094,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	40.671.101.018,00	23.608.570.336,00	334.347.149,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.749.504.072,00	22.799.731.119,00	948.242.258.420,00	30.534.258.960,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.928.749.618,00	12.531.881.965,00	48.631.686.218,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.594.026.355,00	12.727.862,00	0,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	16.509.258.465,00	2.751.428.180,00	35.623.605.227,00	0,00
7	Dinas Kesehatan	127.745.130.561,00	19.834.591.992,00	1.250.979.928,00	0,00
8	Dinas Pendidikan	46.342.690.528,00	94.616.590.383,00	418.667.949,00	0,00
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.131.902.346,00	59.887.113,00	0,00	0,00
10	Dinas Sosial	2.472.042.826,00	2.927.685.199,00	10.089.057,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	4.710.082.454,00	760.903.063,00	295.946.869,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.781.455.233,00	0,00	9.664.646,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.700.991.254,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Tenaga Kerja	1.562.882.853,00	0,00	1.416.004,00	0,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.108.451.917,00	2.903.390.992,00	188.257.248,00	0,00
16	Dinas Perikanan	17.959.600.692,00	1.674.168.755,00	2.084.870.096,00	0,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	3.977.631.346,00	771.941.178,00	37.389.139,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	4.629.275.814,00	8.573.213.484,00	24.275.625,00	0,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	20.998.928.184,00	4.964.281.818,00	10.087.824.649,00	0,00
20	Badan Pendapatan Daerah	6.311.273.639,00	0,00	1.779.708,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	1.984.279.440,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.047.133.688,00	1.549.474.092,00	53.804.816,00	0,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	12.959.168.205,00	952.549.152,00	326.463.683,00	0,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.227.782.782,00	7.401.116.691,00	232.082.780,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan 2022 (Rp)			
		Peralatan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.023.204.580,00	67.875.000,00	26.815.029,00	0,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	4.524.881.502,00	82.665.137,00	15.860.052,00	0,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.609.904.233,00	1.784.086.350,00	13.692.670,00	0,00
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.007.997.496,00	1.245.840.922,00	15.886.750,00	0,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.642.784.933,00	3.899.861,00	4.789.583,00	0,00
30	Kecamatan Bintan Utara	6.702.965.183,00	3.547.549.539,00	1.227.126.013,00	0,00
31	Kecamatan Bintan Timur	5.007.655.287,00	3.118.845.888,00	984.599.126,00	0,00
32	Kecamatan Tambelan	3.479.960.714,00	3.629.013.215,00	197.010.268,00	0,00
33	Kecamatan Gunung Kijang	7.003.155.977,00	2.918.872.796,00	352.921.490,00	0,00
34	Kecamatan Teluk Bintan	5.676.392.246,00	2.654.219.039,00	177.244.938,00	0,00
35	Kecamatan Teluk Sebong	5.107.072.424,00	4.578.422.456,00	626.857.653,00	0,00
36	Kecamatan Toapaya	5.663.263.324,00	2.447.387.580,00	412.127.357,00	0,00
37	Kecamatan Mantang	2.597.359.232,00	2.859.823.927,00	31.403.484,00	0,00
38	Kecamatan Bintan Pesisir	2.264.158.577,00	2.882.813.196,00	33.895.357,00	0,00
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	4.484.933.899,00	1.792.989.724,00	635.246.424,00	0,00
	Total	456.440.963.043,00	260.260.428.503,00	1.052.689.208.499,00	30.534.258.960,00

Akumulasi penyusutan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 sebesar Rp1.799.924.859.005,00 terdiri dari Peralatan Mesin sebesar Rp456.440.963.043,00, Gedung Bangunan sebesar Rp260.260.428.503,00, Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp1.052.689.208.499,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp30.534.258.960,00.

7.5.3.4 ASET LAINNYA

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.247.942.622,00 yang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp339.697.527,00, Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp89.195.180,00, Aset Tak Berwujud *netto* sebesar Rp2.715.986.257,00 dan Aset Lain-Lain *netto* sebesar Rp18.103.063.658,00, terdiri dari:

Tabel 7.5.129 Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Aset Lainnya	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	Tagihan Penjualan Angsuran	339.697.527,00	539.716.145,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	75.289.420,00
3	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	89.195.180,00	0,00
4	Aset Tak Berwujud	7.965.422.254,00	6.425.835.400,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(5.249.435.997,00)	(4.997.669.284,00)
	Aset Tak Berwujud <i>Netto</i>	2.715.986.257,00	1.428.166.116,00
5	Aset Lain-lain	19.132.591.294,00	11.286.473.755,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.029.527.636,00)	0,00
	Aset Lain-Lain <i>Netto</i>	18.103.063.658,00	11.286.473.755,00
	Jumlah	21.247.942.622,00	13.329.645.436,00

Tabel 7.5.130 Data Mutasi Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Aset Lainnya	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Tagihan Penjualan	539.716.145,00	(200.018.618,00)	0,00	339.697.527,00



No	Aset Lainnya	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
	Angsuran				
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	75.289.420,00	0,00	75.289.420,00	0,00
3	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	89.195.180,00	0,00	89.195.180,00
4	Aset Tak Berwujud	6.425.835.400,00	1.539.586.854,00	0,00	7.965.422.254,00
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(4.997.669.284,00)	(251.766.713,00)	0,00	(5.249.435.997,00)
	Aset Tak Berwujud Netto	1.428.166.116,00	1.287.820.141,00	0,00	2.715.986.257,00
5	Aset lain-lain	11.286.473.755,00	10.175.419.250,00	2.329.301.711,00	19.132.591.294,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(1.029.527.636,00)	0,00	(1.029.527.636,00)
	Aset Lain-Lain Netto	11.286.473.755,00	0,00	3.358.829.347,00	18.103.063.658,00
	Jumlah	13.329.645.436,00			21.247.942.622,00

7.5.3.4.1 TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp339.697.527,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp200.018.618,00 atau 37,06% dari Tahun 2021 sebesar Rp539.716.145,00 yang dikarenakan adanya reklasifikasi terhadap piutang lain-lain yang merupakan tagihan penjualan atas angsuran rumah dinas yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan.

7.5.3.4.2 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Saldo Kemitraan dengan pihak Ketiga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 yang mengalami penurunan dari Tahun 2021 sebesar Rp75.289.420,00. Saldo kemitraan dengan pihak ketiga pada Tahun 2021 merupakan Deposit atas Jaminan Bongkar Penayangan Reklame dan pada tahun 2022 direklasifikasi ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

7.5.3.4.3 KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada Tahun 2022 merupakan Deposit atas Jaminan Bongkar Penayangan Reklame sebesar Rp89.195.180,00 dan mengalami peningkatan dari Tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2021 deposit atas jaminan bongkar penayangan reklame di akui pada kemitraan dengan pihak ketiga.

7.5.3.4.4 ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.965.422.254,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.539.586.854,00 atau 23,96% dari Tahun 2021 sebesar Rp6.425.835.400,00 yang dikarenakan adanya Penambahan aset tidak berwujud tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penambahan Belanja Modal Tahun 2022 Aset Tak Berwujud sebesar Rp168.670.800,00 pada Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan;
- Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa sebesar Rp1.370.916.054,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Adapun Rincian Aset Tidak Berwujud per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 7.5.131 Data Aset Tidak Berwujud Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Nama OPD	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	Sekretariat DPRD	244.514.500,00	244.514.500,00
2	Sekretariat Daerah	291.680.500,00	291.680.500,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.370.916.054,00	0,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	114.806.000,00	114.806.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.500.000,00	49.500.000,00
6	Dinas Perhubungan	293.817.800,00	262.871.000,00
7	Dinas Kesehatan	856.255.100,00	856.255.100,00
8	Dinas Pendidikan	474.111.000,00	474.111.000,00
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	0,00
10	Dinas Sosial	48.785.000,00	48.785.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	10.120.000,00	10.120.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	961.700.000,00	961.700.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
14	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	145.232.500,00	145.232.500,00
16	Dinas Perikanan	174.863.000,00	174.863.000,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	95.250.000,00	95.250.000,00
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	90.595.000,00	90.595.000,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	473.070.000,00	473.070.000,00
20	Badan Pendapatan Daerah	330.480.000,00	330.480.000,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	541.000.900,00	497.211.400,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	166.954.500,00	97.570.000,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	39.600.000,00	39.600.000,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.950.000,00	37.950.000,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	95.250.000,00	95.250.000,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	443.415.900,00	443.415.900,00
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	143.289.500,00	143.289.500,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	24.550.000,00	0,00
30	Kecamatan Bintan Utara	4.972.000,00	4.972.000,00
31	Kecamatan Bintan Timur	0,00	0,00
32	Kecamatan Tambelan	0,00	0,00
33	Kecamatan Gunung Kijang	0,00	0,00
34	Kecamatan Teluk Bintan	95.250.000,00	95.250.000,00
35	Kecamatan Teluk Sebong	94.558.000,00	94.558.000,00
36	Kecamatan Toapaya	56.335.000,00	56.335.000,00
37	Kecamatan Mantang	48.800.000,00	48.800.000,00
38	Kecamatan Bintan Pesisir	48.800.000,00	48.800.000,00
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	99.000.000,00	99.000.000,00
	Total	7.965.422.254,00	6.425.835.400,00

7.5.3.4.5 ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.132.591.294,00 mengalami peningkatan sebesar Rp7.846.117.539,00 atau 69,52% dari Tahun 2021 sebesar Rp11.286.473.755,00. Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2022 yang terdiri dari aset lain-



lain rumah dinas sebesar Rp3.088.378.750,00, aset lain-lain sebesar Rp5.868.793.294,00, Dana Bagi Hasil yang Disalurkan secara Non Tunai melalui *Treasury Deposit Facility* sebesar Rp10.115.876.520,00, dan kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa TA 2022 pada Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Sekretariat DPRD yang belum di setor ke kas daerah sebesar Rp59.542.730,00. Saldo aset lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp7.846.117.539,00 yang dikarenakan adanya mutasi aset lainnya sebagai berikut:

Penambahan aset lain-lain sebesar Rp11.221.037.030,00:

- Koreksi Reklas atas Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2021 pada Alat Angkutan sebesar Rp1.045.617.780,00 yang dikarenakan kondisi Rusak Berat sehingga dipindahkan menjadi Aset Lainnya pada Sekretariat Daerah, Sekratriat DPRD, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DPMPTSP, Inspektorat Daerah dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan.
- Pada tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui *Fasilitas Treasury Deposit Facility*, Kabupaten Bintan memperoleh Dana Bagi Hasil yang Disalurkan secara Non Tunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* sebesar Rp10.115.876.520,00 yang diakui sebagai Aset Lain-Lain. *Treasury Deposit Facility* yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.
- Pada tahun 2022 ditemukan kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.980.000,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp28.482.730,00, serta Sekretariat DPRD sebesar Rp29.080.000,00 yang belum di setor ke kas daerah.

Pengurangan aset lain-lain sebesar Rp3.374.919.491,00:

- Pengurangan Penghapusan Aset Lain-Lain sebesar Rp3.094.663.991,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan Nomor SK Penghapusan 020/SK/2022 tanggal 05 Oktober 2022 dan 14/SK/2022 tanggal 13 April 2022;
- Pengurangan Penghapusan Aset Rumah Dinas sebesar Rp280.255.500,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor 10/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 dan SK Penghapusan Nomor 677/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022.

Adapun rincian aset lain-lain yang tercatat dalam neraca aset sebagai berikut.

**Tabel 7.5.132 Data Aset Lain-Lain Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Nama Pelaksana/Pekerjaan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan Asrama Pelajar (Rumah Adat) Tambelan Di Tanjungpinang (1 Gedung) Tahap I	915.830.048,00	Tercatat Di : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Pembelian Dan Pemasangan Patok/Plang Tanah Untuk Lahan Prasarana Spam Toapaya (1paket)	1.579.667,00	Tercatat Di : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Pembelian Dan Pemasangan Patok/Plang Tanah Untuk Lahan Embung Hulu Sungai Bintn Kec.Teluk Bintan (1paket)	16.000.133,00	Tercatat Di : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Dermaga Nelayan Rt 005/03 Kp Galang Batang	27.937.200,00	Tercatat Di : Dinas Perhubungan



No	Nama Pelaksana/Pekerjaan	Nilai (Rp)	Keterangan
	Ref Adm		
5	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Dermaga Desa Malang Rapat / Sungai Hangus Kec Gunung Kijang Ref Adm	49.442.800,00	Tercatat Di : Dinas Perhubungan
6	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Dermaga Desa Mantang Baru Pulau Alang Kp Cenut Tahap Ii Kec Mantang Ref Adm	33.522.500,00	Tercatat Di : Dinas Perhubungan
7	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Dermaga Tanjung Kudus Pangkil (Lanjutan) Kec Teluk Bintan Ref Adm	24.933.100,00	Tercatat Di : Dinas Perhubungan
8	Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Dermaga Telang Kec Mantang Ref Adm	9.938.800,00	Tercatat Di : Dinas Perhubungan
9	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Ref Adm	89.732.000,00	Tercatat Di : Dinas Perhubungan
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Kantor Bpp Jl. Wisata Kawal	15.000.000,00	Tercatat Di : Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
11	Bangunna Gedung Permanen Kantor Bpp Jl.Kawal Kec.Gunung Kijang	216.093.000,00	Tercatat Di : Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
12	Rumah Negara Golongan Ii Type A Jl. Kawal Kec. Gunung Kijang (Rumah Kepala Bpp Kawal)	9.270.000,00	Tercatat Di : Badan Keuangan Dan Aset Daerah
13	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan (Bpp) Jl. Raya Wisata Bahari Kec. Gunung Kijang	525.000.000,00	Tercatat Di : Badan Keuangan Dan Aset Daerah
14	Rumah Negara Golongan Ii Type A Jl. Kawal Kec. Gunung Kijang (Rumah Penyuluh)	8.040.000,00	Tercatat Di : Badan Keuangan Dan Aset Daerah
15	Rumah Negara Golongan Ii Type A Jl. Kawal Kec. Gunung Kijang (Rumah Penyuluh)	8.040.000,00	Tercatat Di : Badan Keuangan Dan Aset Daerah
16	Bangunan Balai Sidang/Pertemuan (Kantor Bpp Kawal) Jl. Raya Wisata Bahari Kec. Gunung Kijang	109.440.000,00	Tercatat Di : Badan Keuangan Dan Aset Daerah
17	Aset Lain-Lain (Peralatan Pembuatan Gasing Dan Jong) Ref Adm	77.973.500,00	Tercatat Di : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
18	Aset Lain-Lain (Tambur) Ref Adm	118.800.000,00	Tercatat Di : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
19	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) (Kondisi : Rusak Berat)	241.000.000,00	Tercatat Di : Sekretariat Dprd
20	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (Dst) (Kondisi : Rusak Berat)	31.435.000,00	Tercatat Di : Sekretariat Dprd
21	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) (Kondisi : Rusak Berat)	87.975.000,00	Tercatat Di : Sekretariat Daerah
22	Sepeda Motor (Kondisi : Rusak Berat)	15.000.000,00	Tercatat Di : Sekretariat Daerah
23	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) (Kondisi : Rusak Berat)	139.857.000,00	Tercatat Di : Sekretariat Daerah
24	P.C Unit (Kondisi : Rusak Berat)	5.830.000,00	Tercatat Di : Dinas Pendidikan
25	P.C Unit (Kondisi : Rusak Berat)	5.830.000,00	Tercatat Di : Dinas Pendidikan
26	P.C Unit (Kondisi : Rusak Berat)	5.830.000,00	Tercatat Di : Dinas Pendidikan
27	Lap Top (Kondisi : Rusak Berat)	8.937.500,00	Tercatat Di : Dinas Pendidikan
28	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (Dst) (Kondisi : Rusak Berat)	139.857.000,00	Tercatat Di : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
29	Perkakas Pabrik Es Lainnya (Dst) (Kondisi : Rusak Berat)	75.383.516,00	Tercatat Di : Dinas Perikanan
30	Perkakas Pabrik Es Lainnya (Dst) (Kondisi : Rusak Berat)	1.407.120.000,00	Tercatat Di : Dinas Perikanan
31	Perkakas Pabrik Es Lainnya (Dst) (Kondisi : Rusak Berat)	84.150.000,00	Tercatat Di : Dinas Perikanan
32	Perkakas Pabrik Es Lainnya (Dst) (Kondisi : Rusak Berat)	84.150.000,00	Tercatat Di : Dinas Perikanan
33	Perkakas Pabrik Es Lainnya (Dst) (Kondisi : Rusak Berat)	74.800.000,00	Tercatat Di : Dinas Perikanan
34	Perkakas Pabrik Es Lainnya (Dst) (Kondisi : Rusak Berat)	74.800.000,00	Tercatat Di : Dinas Perikanan
35	Perkakas Pabrik Es Lainnya (Dst) (Kondisi :	74.800.000,00	Tercatat Di : Dinas Perikanan



No	Nama Pelaksana/Pekerjaan	Nilai (Rp)	Keterangan
	Rusak Berat)		
36	Alat Pendingin Lainnya (Kondisi : Rusak Berat)	86.845.000,00	Tercatat Di : Dinas Perikanan
37	Alat Pendingin Lainnya (Kondisi : Rusak Berat)	86.845.000,00	Tercatat Di : Dinas Perikanan
38	Alat Pendingin Lainnya (Kondisi : Rusak Berat)	86.845.000,00	Tercatat Di : Dinas Perikanan
39	Bak Air (Kondisi : Rusak Berat)	14.850.000,00	Tercatat Di : Dinas Perikanan
40	Perkakas Pabrik Es Lainnya (Dst) (Kondisi : Rusak Berat)	21.615.000,00	Tercatat Di : Dinas Perikanan
41	Pompa Air (Kondisi : Rusak Berat)	7.150.000,00	Tercatat Di : Dinas Perikanan
42	Instalasi Pltd Kapasitas Sedang (Kondisi : Rusak Berat)	192.500.000,00	Tercatat Di : Dinas Perikanan
43	Instalasi Pltd Kapasitas Sedang (Kondisi : Rusak Berat)	192.500.000,00	Tercatat Di : Dinas Perikanan
44	Ikan Air Tawar Budidaya (Kondisi : Rusak Berat)	749.750,00	Tercatat Di : Dinas Perikanan
45	Ikan Air Tawar Budidaya (Kondisi : Rusak Berat)	749.750,00	Tercatat Di : Dinas Perikanan
46	Ikan Air Tawar Budidaya (Kondisi : Rusak Berat)	749.750,00	Tercatat Di : Dinas Perikanan
47	Sepeda Motor (Kondisi : Rusak Berat)	22.450.000,00	Tercatat Di : Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
48	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Lainnya (Dst) (Kondisi : Rusak Berat)	16.900.000,00	Tercatat Di : Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
49	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Lainnya (Dst) (Kondisi : Rusak Berat)	23.034.330,00	Tercatat Di : Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
50	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Lainnya (Dst) (Kondisi : Rusak Berat)	33.371.250,00	Tercatat Di : Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
51	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Lainnya (Dst) (Kondisi : Rusak Berat)	31.390.700,00	Tercatat Di : Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
52	Sepeda Motor (Kondisi : Rusak Berat)	12.980.000,00	Tercatat Di : Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
53	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) (Kondisi : Rusak Berat)	100.000.000,00	Tercatat Di : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
54	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) (Kondisi : Rusak Berat)	95.500.000,00	Tercatat Di : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
55	Sepeda Motor (Kondisi : Rusak Berat)	8.850.000,00	Tercatat Di : Inspektorat Daerah
56	Sepeda Motor (Kondisi : Rusak Berat)	10.000.000,00	Tercatat Di : Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
57	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi) (Kondisi : Rusak Berat)	2.400.000,00	Tercatat Di : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
58	Pesawat Telephone (Kondisi : Rusak Berat)	1.250.000,00	Tercatat Di : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
59	Pesawat Telephone (Kondisi : Rusak Berat)	5.940.000,00	Tercatat Di : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Jumlah	5.868.793.294,00	

7.5.3.4.6 AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022 sebesar Rp5.249.435.997,00 mengalami kenaikan sebesar Rp251.766.713,00 atau 5,04% dari Tahun 2021 sebesar Rp4.997.669.284.

Adapun Rincian Akumulasi Tidak Berwujud per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.5.133 Data Akumulasi Amortisasai Tidak Berwujud per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Nama OPD	Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2022
1	Sekretariat DPRD	244.514.500,00
2	Sekretariat Daerah	217.100.273,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2022
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.120.559,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	114.806.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.500.000,00
6	Dinas Perhubungan	125.060.832,00
7	Dinas Kesehatan	568.771.780,00
8	Dinas Pendidikan	156.486.367,00
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00
10	Dinas Sosial	48.785.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	10.120.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	818.791.667,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00
14	Dinas Tenaga Kerja	0,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	136.432.500,00
16	Dinas Perikanan	148.474.667,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	95.250.000,00
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	90.595.000,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	472.172.584,00
20	Badan Pendapatan Daerah	328.685.166,00
21	Inspektorat Daerah	0,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	453.636.301,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	102.773.837,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	39.600.000,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.950.000,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	95.250.000,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	276.892.131,00
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	143.289.500,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	204.583,00
30	Kecamatan Bintan Utara	2.071.667,00
31	Kecamatan Bintan Timur	0,00
32	Kecamatan Tambelan	0,00
33	Kecamatan Gunung Kijang	0,00
34	Kecamatan Teluk Bintan	95.250.000,00
35	Kecamatan Teluk Sebong	94.558.000,00
36	Kecamatan Toapaya	52.693.083,00
37	Kecamatan Mantang	48.800.000,00
38	Kecamatan Bintan Pesisir	48.800.000,00
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	99.000.000,00
	Jumlah	5.249.435.997,00

7.5.3.4.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 sebesar Rp1.029.527.636,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.029.527.636,00 atau 100% dari Tahun 2021 sebesar Rp0,00.

Adapun Rincian Akumulasi Aset Lainnya per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 7.5.134 Data Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Nama OPD	Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2022
1	Sekretariat DPRD	257.465.952,00



No	Nama OPD	Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2022
2	Sekretariat Daerah	242.832.000,00
3	Dinas Pendidikan	26.427.500,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	139.857.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	139.005.184,00
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	195.500.000,00
7	Inspektorat Daerah	8.850.000,00
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.000.000,00
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.590.000,00
	Jumlah	1.029.527.636,00

7.5.3.5 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

7.5.3.5.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.091.920.203,80 terdiri dari:

Tabel 7.5.135 Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	619.117.500,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	996.608.174,80	816.080.706,56
Utang Belanja	6.006.116.849,00	4.008.765.175,43
Utang Jangka Pendek Lainnya	89.195.180,00	79.652.580,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	7.091.920.203,80	5.523.615.961,99

7.5.3.5.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tidak terdapat Saldo Utang PFK per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.136 Data Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	0,00	11.659.226.432,00	11.659.226.432,00	0,00
2	Askes	0,00	3.548.440.254,00	3.548.440.254,00	0,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	0,00	19.146.128.356,00	19.146.128.356,00	0,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	1.474.025.413,00	1.474.025.413,00	0,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	748.862.824,00	748.862.824,00	0,00
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	0,00	1.937.860.508,00	1.937.860.508,00	0,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,00	22.949.722.479,00	22.949.722.479,00	0,00
8	Pajak PPh – Final	0,00	328.544.044,00	328.544.044,00	0,00
9	BPJS	0,00	14.009.547.107,00	14.009.547.107,00	0,00
10	JKK	0,00	332.115.187,00	332.115.187,00	0,00
11	JKM	0,00	996.347.068,00	996.347.068,00	0,00
12	Penerimaan Retribusi	619.117.500,00	0,00	619.117.500,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
	Jumlah	619.117.500,00	77.130.819.672,00	77.749.937.172,00	0,00

Penambahan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2022 sebesar Rp77.130.819.672,00 berasal dari pemungutan PFK oleh BUD selama Tahun 2022 Sedangkan pengurangan utang PFK sebesar Rp77.749.937.172,00 terdiri dari Rp77.130.819.672,00 berasal dari pengurangan PFK oleh BUD selama tahun 2022 dan Rp619.117.500,00 merupakan Penerimaan Retribusi IMB Rp593.407.500,00 dan Penerimaan Retribusi IMTA Rp25.710.000,00 yang batal disetor ke Kas Negara sesuai dengan Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/33233/Keuda.

7.5.3.5.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp996.608.174,80 terdiri dari:

**Tabel 7.5.137 Data Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022**

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Reklame	207.078.239,89	18.760.518,25	0,00	225.838.758,13
2	Pendapatan Retribusi IMTA	591.335.800,00	722.894.416,67	591.335.800,00	722.894.416,67
3	Pendapatan Retribusi SITU Mikol	17.666.666,67	47.875.000,00	17.666.666,67	47.875.000,00
4	Pendapatan Retribusi IMB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	816.080.706,56	996.608.174,80	816.080.706,56	996.608.174,80

**Tabel 7.5.138 Data Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022**

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	BAPENDA	207.078.239,89	18.760.518,25	0,00	225.838.758,13
2	DPMPSTP	609.002.466,67	770.769.416,67	609.002.466,67	770.769.416,67
	Jumlah	816.080.706,56	996.608.174,80	816.080.706,56	996.608.174,80

7.5.3.5.1.3 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.006.116.849,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.139 Data Mutasi Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	235.899.323,00	742.128.364,00	235.899.323,00	742.128.364,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	3.772.865.852,43	5.263.988.485,00	3.772.865.852,43	5.263.988.485,00
3	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.008.765.175,43	6.006.116.849,00	4.008.765.175,43	6.006.116.849,00

Adapun rincian Utang Belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.140 Rincian Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	235.899.323,00	742.128.364,00	235.899.323,00	742.128.364,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Rujukan Parsial/PMI)	235.899.323,00	742.128.364,00	235.899.323,00	742.128.364,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	3.772.865.852,43	5.263.988.485,00	3.772.865.852,43	5.263.988.485,00
a	- Belanja Obat-obatan	1.443.400.667,13	1.960.781.736,00	1.443.400.667,13	1.960.781.736,00
b	- Belanja Bahan Medis (ampul, Masker, dll)	893.824.676,30	1.015.136.271,00	893.824.676,30	1.015.136.271,00
c	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Rujukan Parsial/PMI)	122.211.010,00	19.189.000,00	122.211.010,00	19.189.000,00
d	- Belanja Bahan Kimia	1.313.429.499,00	2.119.308.978,00	1.313.429.499,00	2.119.308.978,00
e	- Isi tabung Gas (Oksigen)	0,00	149.572.500,00	0,00	149.572.500,00
	Jumlah	4.008.765.175,43	6.006.116.849,00	4.008.765.175,43	6.006.116.849,00

7.5.3.5.1.3.1 Utang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Berikut adalah rincian Utang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan.

Tabel 7.5.141 Utang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Instansi	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Total (Rp)	Ket
1	RSUD Raja Ahmad Tabib	08 Desember 2022	956/11012/3.3/RSUD-RAT	171.695.166,00	Susulan Tagihan biaya perawatan dan pengobatan pasien kelas III Kabupaten Bintan bulan November 2022
2	RSUD Raja Ahmad Tabib	05 Januari 2023	956/150/3.3/RSUD-RAT	49.531.746,00	Tagihan biaya perawatan dan pengobatan pasien kelas III Kabupaten Bintan bulan Desember 2022
3	RSUD Engku Haji Daud	05 Januari 2022	P/947/29/RSUD-EHD/2023	45.577.152,00	Tagihan biaya perawatan dan pengobatan pasien kelas III Kabupaten Bintan bulan Desember 2022
4	RSUD Bintan	2 November 2022	B/5599/900/XI/2022	151.120.500,00	Tagihan biaya perawatan dan pengobatan pasien kelas III Kabupaten Bintan bulan September 2022
5	RSUD Bintan	21 November 2022	B/6004/900/IX/2022	118.961.500,00	Tagihan biaya perawatan dan pengobatan pasien kelas III Kabupaten Bintan bulan Oktober 2022
6	RSUD Bintan	12 Desember 2022	B/6254/900/XII/2022	93.524.900,00	Tagihan biaya perawatan dan pengobatan pasien kelas III Kabupaten Bintan bulan November 2022
7	RSUD Bintan	09 Januari 2023	B/544/900/I/2023	111.717.400,00	Tagihan biaya perawatan dan pengobatan pasien kelas III Kabupaten Bintan bulan Desember 2022
	Jumlah			742.128.364,00	

7.5.3.5.1.3.2 Utang Obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah

Tabel 7.5.142 Utang Obat-obatan pada RSUD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Distributor	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Total (Rp)
1	PT. Utama Global Alkes	23 Februari 2022	122-01116	4.617.085,00
2	PT. Utama Global Alkes	27 Juni 2022	J22-01720	9.477.765,00
3	PT. kimia farma TD	02 Maret 2022	2805012497	678.607,00
4	PT. kimia farma TD	02 Maret 2022	2805013006	3.742.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5	PT. kimia farma TD	16 Maret 2022	2805051489	15.278.080,00
6	PT. kimia farma TD	16 Maret 2022	2805049992	1.008.002,00
7	PT. kimia farma TD	23 Maret 2022	2805071949	20.328.000,00
8	PT. kimia farma TD	12 April 2022	2805120538	19.891.200,00
9	PT. kimia farma TD	21 April 2022	2805144167	10.817.505,00
10	PT. kimia farma TD	31 Mei 2022	2805242928	1.586.301,00
11	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	08 Maret 2022	8530250609	19.823.232,00
12	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	07 Maret 2022	8530253324	1.714.713,00
13	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	17 Maret 2022	8530253429	2.097.001,00
14	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	17 Maret 2022	8530253426	23.731.808,00
15	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	18 Maret 2022	8530253877	18.367.085,00
16	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	09 April 2022	1530238082	25.489.485,00
17	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	21 April 2022	1530260744	1.087.151,00
18	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	17 Mei 2022	1530265611	10.223.127,00
19	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	19 Mei 2022	1530266418	2.024.473,00
20	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	16 Juni 2022	1530273504	16.917.199,00
21	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	28 Juni 2022	1530276664	17.543.994,00
22	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	05 Juli 2022	1530278265	23.039.870,00
23	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	29 Juli 2022	1530284460	559.200,00
24	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	29 Juli 2022	1530284461	5.994.000,00
25	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	29 Juli 2022	1530284488	802.556,00
26	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	07 September 2022	1530294974	2.331.000,00
27	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	17 September 2022	1530297678	13.553.100,00
28	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	07 Maret 2022	763222000001	64.079.770,00
29	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	23 Maret 2022	703222000001	15.785.000,00
30	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	23 Maret 2022	723222000005	15.048.000,00
31	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	26 Maret 2022	133222004809	1.800.562,00
32	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	29 Maret 2022	133222004953	4.020.500,00
33	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	31 Maret 2022	133222005096	544.500,00
34	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	14 April 2022	133222005828	1.689.975,00
35	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	14 April 2022	133222005833	8.618.040,00
36	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	16 April 2022	133222005853	1.747.585,00
37	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	23 April 2022	133222006170	10.667.988,00
38	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	23 April 2022	133222006187	21.345.927,00
39	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	25 April 2022	133222006241	1.562.880,00
40	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	27 April 2022	133222006406	3.055.666,00
41	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	27 April 2022	133222006430	2.930.400,00
42	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	28 April 2022	133222006560	3.468.750,00
43	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	17 Mei 2022	133222007113	1.671.660,00
44	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	18 Mei 2022	133222007140	6.003.234,00
45	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	18 Mei 2022	133222007176	2.509.710,00
46	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	23 Mei 2022	133222007357	3.021.975,00
47	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	24 Mei 2022	133222007393	23.430.324,00
48	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	27 Mei 2022	133222007603	2.189.808,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

49	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	31 Mei 2022	133222007836	582.750,00
50	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	11 Juni 2022	133222008353	2.747.250,00
51	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	13 Juni 2022	133222008404	26.184.012,00
52	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	14 Juni 2022	133222008513	3.379.950,00
53	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	22 Juni 2022	133222008829	12.820.500,00
54	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	22 Juni 2022	133222008862	18.033.337,00
55	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	22 Juni 2022	133222008869	1.443.000,00
56	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	25 Juni 2022	313222000380	23.892.750,00
57	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	30 Juni 2022	133222009353	2.164.500,00
58	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	30 Juni 2022	133222009354	5.572.200,00
59	PT. Mellinnium Pharmacon International Tbk	21 Juli 2022	723222000011	11.509.590,00
60	PT. Merapi Utama Pharma	31 Maret 2022	220191005343	18.292.800,00
61	PT. Merapi Utama Pharma	29 April 2022	220191006713	31.565.625,00
62	PT. Merapi Utama Pharma	29 April 2022	220191006631	34.671.960,00
63	PT. Merapi Utama Pharma	29 April 2022	220191006714	17.622.360,00
64	PT. Merapi Utama Pharma	29 April 2022	220191006728	3.356.640,00
65	PT. Merapi Utama Pharma	25 Mei 2022	2201901009523	10.073.250,00
66	PT. Merapi Utama Pharma	29 Juli 2022	2201901009923	1.942.500,00
67	PT. Merapi Utama Pharma	30 Mei 2022	220191007934	4.870.014,00
68	PT. Merapi Utama Pharma	30 Juni 2022	220191009771	3.968.250,00
69	PT. Merapi Utama Pharma	30 Juni 2022	220191009816	14.444.430,00
70	PT. Merapi Utama Pharma	31 Mei 2022	220191008090	9.324.000,00
71	PT. Adya Artha Abadi	25 April 2022	2204004906	21.367.500,00
72	PT. Adya Artha Abadi	23 April 2022	2204004676	27.750.000,00
73	PT. Adya Artha Abadi	18 Mei 2022	2205004522	31.080.000,00
74	PT. Adya Artha Abadi	28 Mei 2022	2205008617	46.620.000,00
75	PT. Adya Artha Abadi	28 Mei 2022	2205009070	46.620.000,00
76	PT. Adya Artha Abadi	28 Mei 2022	2205009055	46.620.000,00
77	PT. Adya Artha Abadi	28 Mei 2022	2205009069	46.620.000,00
78	PT. Adya Artha Abadi	28 Mei 2022	2205009079	7.770.000,00
79	PT. Oasis Mitra Alkes	06 April 2022	JL-OMA/0198	3.353.532,00
80	PT. Oasis Mitra Alkes	21 Oktober 2022	JL-OMA/0394	4.428.900,00
81	PT. Oasis Mitra Alkes	02 Nopember 2022	JL-OMA/0415	3.496.500,00
82	PT. Ensevalputera Megatrading	06 April 2022	322000649	8.506.055,00
83	PT. Ensevalputera Megatrading	16 April 2022	122014903	8.325.000,00
84	PT. Ensevalputera Megatrading	23 April 2022	122015848	679.320,00
85	PT. United Dico Citas	27 April 2022	95868	5.676.151,00
86	PT. United Dico Citas	28 April 2022	95937	1.796.742,00
87	PT. United Dico Citas	29 Juni 2022	0097237	2.018.812,00
88	PT. Penta Valent	14 April 2022	40-0138-22-0003873	3.642.187,00
89	PT. Penta Valent	22 April 2022	40-0138-22-0004240	39.727.510,00
90	PT. Penta Valent	23 April 2022	40-0138-22-0004272	3.496.500,00
91	PT. Penta Valent	23 Mei 2022	40-0138-22-0005154	15.651.000,00
92	PT. Penta Valent	26 Juli 2022	40-0138-22-0007643	7.557.435,00
93	PT. Parit Padang Global	16 April 2022	8360115608	28.399.916,00
94	PT. Parit Padang Global	29 April 2022	8360116826	48.129.745,00
95	PT. Parit Padang Global	13 Juni 2022	8360119746	4.963.365,00
96	PT. Parit Padang Global	18 Juni 2022	8360120155	6.660.000,00
97	PT. Parit Padang Global	30 Juni 2022	8360121030	30.286.350,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

98	PT. Parit Padang Global	12 Juli 2022	8360121819	2.497.500,00
99	PT. Parit Padang Global	20 Juli 2022	8360122510	8.770.021,00
100	PT. Parit Padang Global	29 Juli 2022	8360123523	4.995.000,00
101	PT. Parit Padang Global	08 Agustus 2022	8360124094	7.451.430,00
102	PT. Parit Padang Global	12 Agustus 2022	8360124450	4.273.500,00
103	PT. Parit Padang Global	31-08-202	8360126109	9.990.000,00
104	PT. Parit Padang Global	13 September 2022	8360127039	9.712.500,00
105	PT. Parit Padang Global	16 September 2022	836017299	6.660.000,00
106	PT. Parit Padang Global	19 September 2022	8360127477	6.484.176,00
107	PT. Parit Padang Global	21 September 2022	8360127702	4.807.688,00
108	PT. Parit Padang Global	21 September 2022	8360127711	5.097.120,00
109	PT. Parit Padang Global	27 September 2022	8360128155	24.042.600,00
110	PT. Parit Padang Global	28 September 2022	8360128333	7.522.470,00
111	PT. Parit Padang Global	30 September 2022	8360128638	11.958.000,00
112	PT. Parit Padang Global	30 September 2022	8360128646	16.949.001,00
113	PT. Parit Padang Global	30 September 2022	8360128664	25.174.800,00
114	PT. Parit Padang Global	30 September 2022	8360128673	1.120.878,00
115	PT. Parit Padang Global	30 September 2022	8360128708	18.884.985,00
116	PT. Parit Padang Global	03 Oktober 2022	8360128801	5.061.600,00
117	PT. Parit Padang Global	07 Oktober 2022	8360129239	14.903.970,00
118	PT. Parit Padang Global	13 Oktober 2022	8360129695	6.571.200,00
119	PT. Parit Padang Global	18 Oktober 2022	8360130078	6.168.825,00
120	PT. Parit Padang Global	18 Oktober 2022	8360130079	1.714.284,00
121	PT. Parit Padang Global	21 Oktober 2022	8360130387	3.106.224,00
122	PT. Parit Padang Global	21 Oktober 2022	8360130404	21.188.790,00
123	PT. Parit Padang Global	25 Oktober 2022	8360130653	24.912.533,00
124	PT. Parit Padang Global	27 Oktober 2022	8360130894	1.060.605,00
125	PT. Parit Padang Global	27 Oktober 2022	8360130908	7.051.719,00
126	PT. Parit Padang Global	31 Oktober 2022	8360131283	5.612.271,00
127	PT. Parit Padang Global	31 Oktober 2022	8360131346	4.884.000,00
128	PT. Parit Padang Global	31 Oktober 2022	8360131347	2.663.223,00
129	PT. Parit Padang Global	31 Oktober 2022	8360131352	1.456.320,00
130	PT. Parit Padang Global	12 Nopember 2022	8360132229	5.117.100,00
131	PT. Parit Padang Global	12 Nopember 2022	8360132239	21.645.000,00
132	PT. Parit Padang Global	12 Nopember 2022	8360132243	14.846.423,00
133	PT. Parit Padang Global	15 Nopember 2022	8360132391	45.128.160,00
134	PT. Parit Padang Global	17 Nopember 2022	8360132541	6.660.000,00
135	PT. Parit Padang Global	18 Nopember 2022	8360132679	652.680,00
136	PT. Parit Padang Global	19 Nopember 2022	8360132781	6.021.972,00
137	PT. Parit Padang Global	19 Nopember 2022	8360132782	19.455.192,00
138	PT. Parit Padang Global	22 Nopember 2022	8360132863	9.918.072,00
139	PT. Parit Padang Global	30 Nopember 2022	8360133787	9.790.200,00
140	PT. Parit Padang Global	30 Nopember 2022	8360133791	9.790.200,00
141	PT. Parit Padang Global	30 Nopember 2022	8360133792	439.560,00
142	PT. Parit Padang Global	30 Nopember 2022	8360133818	1.787.544,00
143	PT. Parit Padang Global	30 Nopember 2022	8360133831	6.993.000,00
144	PT. Parit Padang Global	30 Nopember 2022	8360133832	3.426.570,00
145	PT. Parit Padang Global	30 Nopember 2022	8360133836	9.790.200,00
146	PT. Parit Padang Global	02 Desember 2022	8360133995	5.068.013,00
147	PT. Parit Padang Global	05 Desember 2022	8360134085	14.144.000,00
148	PT. Rajawali Nusindo	23 September 2022	FKT/BTM/2022/00002681	19.252.728,00
149	PT. Rajawali Nusindo	27 September 2022	FKT/BTM/2022/00002720	3.330.000,00
150	PT. Rajawali Nusindo	27 September 2022	FKT/BTM/2022/00002725	24.642.000,00
151	PT. Rajawali Nusindo	29 September 2022	FKT/BTM/2022/00002725	12.820.500,00
152	PT. Rajawali Nusindo	30 September 2022	FKT/BTM/2022/00002774	2.496.512,00
153	PT. Rajawali Nusindo	30 September 2022	FKT/BTM/2022/00003946	5.094.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

154	PT. Rajawali Nusindo	09 Desember 2022	FKT/BTM/2022/00003601	32.550.750,00
155	PT. Anugrah Argon Medica	30 September 2022	191222020274	26.942.700,00
156	PT. Anugrah Argon Medica	30 September 2022	191222020290	26.942.700,00
157	PT. Anugrah Argon Medica	14 Desember 2022	191222026373	16.912.400,00
158	PT. Anugrah Argon Medica	14 Desember 2022	191222026372	8.951.898,00
159	PT. Anugrah Argon Medica	14 Desember 2022	191222026371	9.354.263,00
160	PT. Anugrah Argon Medica	22 Desember 2022	191222026769	18.004.300,00
161	PT. Anugrah Argon Medica	26 Desember 2022	191222027001	38.628.215,00
162	PT. Omega Surya Anugerah	12 Oktober 2022	PBF/21/00124	1.072.038,00
163	PT. Omega Surya Anugerah	14 Oktober 2022	PBF/21/00127	12.744.532,00
Jumlah				1.960.781.736,00

7.5.3.5.1.3.3 Utang Bahan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah

Tabel 7.5.143 Utang Bahan Medis pada RSUD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Distributor	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Total (Rp)
1	PT. Pelangi Rapha Semesta	11 Juni 2022	12620	2.941.500,00
2	PT. Pelangi Rapha Semesta	27 Juni 2022	12621	22.152.125,63
3	PT. Pelangi Rapha Semesta	04 Agustus 2022	12923	29.059.800,00
4	PT. Pelangi Rapha Semesta	04 Agustus 2022	12924	4.358.970,00
5	PT. Pelangi Rapha Semesta	04 Agustus 2022	12925	6.190.470,00
6	PT. Pelangi Rapha Semesta	13 Agustus 2022	12947	38.850.000,00
7	PT. Pelangi Rapha Semesta	16 Agustus 2022	12956	444.000,00
8	PT. Pelangi Rapha Semesta	01 September 2022	12997	2.319.900,00
9	PT. Pelangi Rapha Semesta	09 September 2022	13019	4.302.360,00
10	PT. Pelangi Rapha Semesta	19 September 2022	13036	4.058.160,00
11	PT. Pelangi Rapha Semesta	20 September 2022	13034	6.993.000,00
12	PT. Pelangi Rapha Semesta	24 September 2022	13044	942.390,00
13	PT. Pelangi Rapha Semesta	03 Oktober 2022	13053	36.867.096,00
14	PT. Pelangi Rapha Semesta	04 Oktober 2022	13070	3.154.620,00
15	PT. Pelangi Rapha Semesta	27 Oktober 2022	13124	2.797.200,00
16	PT. Pelangi Rapha Semesta	03 Nopember 2022	13139	14.818.500,00
17	PT. Pelangi Rapha Semesta	14 Nopember 2022	13170	11.488.500,00
18	PT. Pelangi Rapha Semesta	07 Desember 2022	13224	12.174.480,00
19	PT. Pelangi Rapha Semesta	08 Desember 2022	13223	8.946.600,00
20	PT. Utama Global Alkes / Uga	02 Agustus 2022	j22-04255	9.855.468,00
21	PT. Utama Global Alkes / Uga	28 September 2022	j22-05597	1.649.200,00
22	PT. Utama Global Alkes / Uga	17 Oktober 2022	j22-06002	7.239.975,00
23	PT. Utama Global Alkes / Uga	31 Oktober 2022	j22-06321	10.859.962,00
24	PT. Oasis Mitra Alkes	15 Juli 2022	JL-OMA/0279	2.331.000,00
25	PT. Oasis Mitra Alkes	21 Juli 2022	JL-OMA/0285	36.702.116,70
26	PT. Oasis Mitra Alkes	29 Juli 2022	JL-OMA/0296	28.720.695,00
27	PT. Oasis Mitra Alkes	17 Agustus 2022	JL-OMA/0317	29.281.800,00
28	PT. Oasis Mitra Alkes	29 Agustus 2022	JL-OMA/0323	47.398.762,68
29	PT. Oasis Mitra Alkes	30 Agustus 2022	JL-OMA/0325	41.847.000,00
30	PT. Oasis Mitra Alkes	23 September 2022	JL-OMA/0352	25.722.196,50
31	PT. Oasis Mitra Alkes	10 Oktober 2022	JL-OMA/0372	21.964.147,00
32	PT. Oasis Mitra Alkes	21 Oktober 2022	jl-oma/0392	43.706.250,00
33	PT. Oasis Mitra Alkes	24/10/2022	jl-OMA/0396	15.885.000,01
34	PT. Oasis Mitra Alkes	01 Desember 2022	jl-oma/0444	24.256.333,53
35	PT. Oasis Mitra Alkes	10 Nopember 2022	jl-oma/0432	31.443.969,00
36	PT. Oasis Mitra Alkes	23 Desember 2022	jl-oma/0467	11.645.612,95
37	PT. Oasis Mitra Alkes	06 April 2022	JL-OMA/0198	3.353.532,00
38	PT. Mellinium Pharmacon International	30 Juni 2022	123222000113	37.264.032,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Distributor	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Total (Rp)
39	PT. Mellinium Pharmacon International	30 Juni 2022	123222001342	11.965.800,00
40	PT. Mellinium Pharmacon International	29 Juli 2022	753222000022	6.533.460,00
41	PT. Mellinium Pharmacon International	30 Nopember 2022	153222100120	13.791.972,00
42	PT. Mellinium Pharmacon International	05 Desember 2022	153222100163	12.595.836,00
43	PT. Espana Inti Perkasa	22 Juli 2022	2022/EP/VII/422	24.153.600,00
44	PT. Espana Inti Perkasa	23 Juli 2022	2022/EP/VII/423	45.288.000,00
45	PT. Danvi Medilab Perkasa	08 September 2022	DMP202209/0284	9.706.284,00
46	PT. Danvi Medilab Perkasa	29 September 2022	DMP202209/0983	4.728.600,00
47	PT. Danvi Medilab Perkasa	20 Oktober 2022	DMP202210/0766	8.447.933,00
48	PT. Danvi Medilab Perkasa	20 Oktober 2022	DMP202210/0767	988.733,00
49	PT. Danvi Medilab Perkasa	09 Nopember 2022	DMP202211/0347	2.677.209,00
50	PT. Danvi Medilab Perkasa	18 Nopember 2022	DMP202211/0698	811.188,00
51	PT. Rubitek Anugrah Medicalindo	04 Agustus 2022	PJ1688	4.795.200,00
52	PT. Rubitek Anugrah Medicalindo	05 Agustus 2022	PJ1689	4.262.400,00
53	PT. Rubitek Anugrah Medicalindo	08 Agustus 2022	PJ1691	12.481.950,00
54	PT. Rubitek Anugrah Medicalindo	19 Agustus 2022	PJ1697	5.573.865,00
55	PT. Rubitek Anugrah Medicalindo	19 Agustus 2022	PJ1698	25.639.779,00
56	PT. Rubitek Anugrah Medicalindo	19 Agustus 2022	PJ1699	31.213.644,00
57	PT. Rubitek Anugrah Medicalindo	22 Agustus 2022	PJ1701	37.902.282,00
58	PT. Rubitek Anugrah Medicalindo	25 Agustus 2022	PJ1702	20.065.914,00
59	PT. Parit Padang Global / Ppg	26 September 2022	8360128119	31.801.500,00
60	Medical Systems Indonesia	15 Agustus 2022	EG90003922	3.046.950,00
61	PT. Rajawali Nusindo	25 Juni 2022	FKT/BTM/2022/0001732	15.620.198,60
62	PT. Rajawali Nusindo	24 Agustus 2022	FKT/BTM/2022/0002329	34.727.999,40
63	Intergastra Nusantara	30 Nopember 2022	INT/11-2022/4985	2.329.250,00
Jumlah				1.015.136.271,00

7.5.3.5.1.3.4 Utang Bahan Kimia pada Rumah Sakit Umum Daerah

Tabel 7.5.144 Utang Bahan Kimia pada RSUD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Distributor	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Total (Rp)
1	PT. Espana	25 Maret 2022	2022/EP/III/183	20.218.650,00
2	PT. Espana	04 April 2022	2022/EP/IV/196	18.315.000,00
3	PT. Espana	11 April 2022	2022/EP/IV/211	47.403.482,00
4	PT. Espana	14 April 2022	2022/EP/IV/225	47.366.475,00
5	PT. Espana	16 April 2022	2022/EP/IV/226	43.312.244,00
6	PT. Espana	18 April 2022	2022/EP/IV/227	11.988.000,00
7	PT. Espana	19 April 2022	2022/EP/IV/239	14.985.000,00
8	PT. Espana	21 April 2022	2022/EP/IV/243	40.315.200,00
9	PT. Espana	22 April 2022	2022/EP/IV/244	28.860.000,00
10	PT. Espana	28 April 2022	2022/EP/IV/263	29.970.000,00
11	PT. Espana	23 Mei 2022	2022/EP/V/291	3.330.000,00
12	PT. Espana	23 Mei 2022	2022/EP/V/303	47.647.171,00
13	PT. Espana	27 Mei 2022	2022/EP/V/304	14.085.633,00
14	PT. Espana	28 Mei 2022	2022/EP/V/310	35.964.000,00
15	PT. Espana	30 Mei 2022	2022/EP/VI/340	6.660.000,00
16	PT. Espana	13 Juni 2022	2022/EP/VI/368	25.495.012,00
17	PT. Espana	28 Juni 2022	2022/EP/VII/395	4.256.850,00
18	PT. Espana	11 Juli 2022	2022/EP/VII/412	26.072.212,00
19	PT. Espana	18 Juli 2022	2022/EP/VII/431	38.652.975,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Distributor	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Total (Rp)
20	PT. Espana	26 Juli 2022	2022/EP/VIII/454	34.309.833,00
21	PT. Espana	05 Agustus 2022	2022/EP/VIII/455	16.650.000,00
22	PT. Espana	08 Agustus 2022	2022/EP/VIII/479	9.990.000,00
23	PT. Espana	16 Agustus 2022	2022/EP/VIII/514	43.956.000,00
24	PT. Espana	31 Agustus 2022	2022/EP/IX/516	34.115.006,00
25	PT. Espana	01 September 2022	2022/EP/IX/522	5.705.955,00
26	PT. Espana	02 September 2022	2022/EP/IX/569	30.490.012,00
27	PT. Espana	21 September 2022	2022/EP/IX/574	36.260.725,00
28	PT. Espana	23 September 2022	2022/EP/IX/581	31.308.438,00
29	PT. Espana	04 Oktober 2022	2022/EP/X/606	8.325.000,00
30	PT. Espana	12 Oktober 2022	2022/EP/X/621	36.652.200,00
31	PT. Espana	11 Nopember 2022	2022/EP/XI/688	49.050.633,00
32	PT. Espana	16 Nopember 2022	2022/EP/XI/700	46.669.950,00
33	PT. Espana	17 Nopember 2022	2022/EP/XII/702	19.390.012,00
34	PT. Espana	12 Januari 2022	2022/EP/XII/742	19.980.000,00
35	PT. Espana	12 September 2022	2022/EP/XII/768	45.687.600,00
36	PT. Espana	13 Desember 2022	2022/EP/XII/776	45.302.962,00
37	PT. Espana	14 Desember 2022	2022/EP/XII/777	48.840.000,00
38	PT. Espana	15 Desember 2022	2022/EP/XII/778	40.534.225,00
39	PT. Espana	15 Desember 2022	2022/EP/XII/784	26.640.000,00
40	PT. Espana	16 Desember 2022	2022/EP/XII/785	33.300.000,00
41	PT. Espana	26 Desember 2022	2022/EP/XII/802	6.997.995,00
42	PT. Oasis	27 Desember 2022	JL-OMA/0469	23.583.060,00
43	PT. Oasis	26 Desember 2022	JL-OMA/0468	40.475.040,00
44	PT. Oasis	23 Desember 2022	JL-OMA/0466	48.268.350,00
45	PT. Oasis	01 Desember 2022	JL-OMA/0443	41.124.945,00
46	PT. Oasis	01 Nopember 2022	JL-OMA/0414	37.862.100,00
47	PT. Oasis	24 Oktober 2022	JL-OMA/0395	48.429.300,00
48	PT. Oasis	06 Oktober 2022	JL-OMA/0368	47.356.485,00
49	PT. Oasis	05 Oktober 2022	JL-OMA/0364	41.107.740,00
50	PT. Oasis	23 September 2022	JL-OMA/0351	44.508.225,00
51	PT. Oasis	26 Agustus 2022	JL-OMA/0319	18.392.700,00
52	PT. Oasis	15 Agustus 2022	JL-OMA/0313	39.551.520,00
53	PT. Oasis	29 Juli 2022	JL-OMA/0295	48.441.510,00
54	PT. Oasis	26 Februari 2022	JL-OMA/0268	49.993.845,00
55	PT. Pelangi	30 Agustus 2022	12992	11.530.236,00
56	PT. Pelangi	30 Agustus 2022	12990	26.409.675,00
57	PT. Pelangi	12 Juli 2022	12869	21.457.632,00
58	PT. Pelangi	19 Desember 2022	13249	1.047.618,00
59	PT. Pelangi	30 Mei 2022	12762	8.046.612,00
60	PT. Pelangi	17 Mei 2022	12735	8.519.250,00
61	PT. Pelangi	27 April 2022	12715	16.186.575,00
62	PT. Pelangi	21 Nopember 2022	13183	26.822.040,00
63	PT. Pelangi	18 Oktober 2022	13107	10.656.000,00
64	PT. Pelangi	23 Agustus 2022	12948	4.717.500,00
65	PT. Pelangi	19 Agustus 2022	12970	3.367.296,00
66	PT. Pelangi	11 Agustus 2022	12944	3.740.256,00
67	PT. Pelangi	02 Juli 2022	12846	21.312.000,00
68	PT. Pelangi	10 Januari 2022	12435	10.632.160,00
69	PT. Enseval	26 Maret 2022	122012039	662.420,00
70	PT. Enseval	26 Maret 2022	122012040	665.900,00
71	PT. Enseval	26 Maret 2022	122012041	619.925,00
72	PT. Enseval	26 Maret 2022	122012050	46.956.000,00
73	PT. Enseval	30 Maret 2022	122012655	8.900.000,00
74	PT. Enseval	13 April 2022	122014511	21.198.000,00



No	Distributor	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Total (Rp)
75	PT. Enseval	27 Mei 2022	122019856	4.350.000,00
76	PT. Enseval	27 Mei 2022	122019881	62.749.000,00
77	PT. Enseval	07 Juni 2022	122011729	7.070.000,00
78	PT. Enseval	27 Juni 2022	122014830	9.450.000,00
79	PT. Enseval	23 Juni 2022	322001249	4.842.954,00
80	PT. Enseval	18 April 2022	7122014511	2.331.780,00
81	PT. Enseval	01 Juli 2022	7122019856	478.500,00
82	PT. Enseval	31 Mei 2022	7122019881	6.902.390,00
83	PT. Enseval	28 Juni 2022	7122021729	777.700,00
84	PT. Enseval	02 Juli 2022	7122024830	1.039.500,00
85	PT. Enseval	28 Maret 2022	5122012050	4.695.600,00
86	PT. Enseval	31 Maret 2022	5122012655	890.000,00
87	PT. Enseval	01 Juli 2022	5322000977	47.999,00
88	PT. PPG	28 Nopember 2022	8360133448	14.355.630,00
89	PT. PPG	28 Nopember 2022	8360133449	14.355.630,00
90	PT. PPG	28 Nopember 2022	8360133450	14.355.630,00
91	PT. PPG	26 Agustus 2022	8360126119	13.020.300,00
Jumlah				2.119.308.978,00

7.5.3.5.1.3.5 Utang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah**Tabel 7.5.145 Utang Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Instansi	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Total (Rp)	Ket
1	RSUD Raja Ahmad Tabib	09 Nopember 2022	956/9613/3.3/RSUD-RAT	10.850.000,00	Tagihan Bulan Oktober 2022
2	RSUD Raja Ahmad Tabib	08 Desember 2022	956/11034/3.3/RSUD-RAT	8.339.000,00	Tagihan Bulan November 2022
Jumlah				19.189.000,00	

7.5.3.5.1.3.6 Utang Isi Tabung Gas (Oksigen) pada Rumah Sakit Umum Daerah**Tabel 7.5.146 Utang Isi Tabung Gas (Oksigen) pada RSUD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Instansi	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Total (Rp)
1	PT.Indogas Sukses Abadi	September	ISATPI/INV/2209/0108	45.787.500,00
2	PT.Indogas Sukses Abadi	Oktober	ISATPI/INV/2210/0119	36.630.000,00
3	PT.Indogas Sukses Abadi	Oktober	ISATPI/INV/2210/0120	12.210.000,00
4	PT.Indogas Sukses Abadi	Desember	ISATPI/INV/2212/0111	42.735.000,00
5	PT.Indogas Sukses Abadi	Desember	ISATPI/INV/2212/0112	12.210.000,00
Jumlah				149.572.500,00

7.5.3.5.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 bersumber dari kewajiban atas jaminan reklamasi pertambangan dan jaminan bongkar penayangan reklame sebesar Rp89.195.180,00 terdiri dari:

**Tabel 7.5.147 Data Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Jaminan Bongkar Penayangan Reklame	75.289.420,00	13.905.760,00	0,00	89.195.180,00
2	Kesalahan Setor	4.363.160,00	0,00	4.363.160,00	0,00
	Jumlah	79.652.580,00	13.905.760,00	4.363.160,00	89.195.180,00

Kewajiban atas Jaminan Bongkar Penayangan Reklame Per 31 Desember 2022 sebesar Rp89.195.180,00. Jaminan Bongkar merupakan Pendapatan yang dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Yang kemudian pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame dimana pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Jaminan Bongkar Penayangan Reklame dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bintan.

Jaminan Bongkar Penayangan Reklame adalah segala biaya yang dibebankan kepada penyelenggara reklame berupa dana yang disetorkan kepada pemerintah daerah melalui rekening penampung pada Bank yang ditunjuk oleh BKAD selaku bendahara umum daerah, dengan Nomor Rekening: 13-50-20012-6 (Jaminan Bongkar Penayangan Reklame).

Saldo Jaminan Bongkar Penayangan Reklame Per 31 Desember 2022 yang merupakan Jaminan Bongkar penayangan reklame yang belum jatuh tempo sebesar Rp54.106.100,00. Jaminan bongkar penayangan reklame yang sudah jatuh tempo namun belum dilakukan pemberitahuan ke wajib pajak dan penyetorannya ke Kas Daerah sebesar Rp35.089.080,00.

7.5.3.6 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.005.370.000,00. Kewajiban jangka panjang tahun 2022 merupakan kewajiban atas putusan pengadilan atas asset Pondok Pesantren Madani Unggulan Kabupaten Bintan yang berlokasi di Jalan Tata Bumi Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Akta Perdamaian Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Tpg tanggal 16 November 2022 yang harus dibayarkan secara bertahap mulai TA 2023 hingga TA 2024.

7.5.3.7 EKUITAS

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.435.289.648.207,05.

**7.5.4 LAPORAN OPERASIONAL****7.5.4.1 PENDAPATAN – LO**

Pendapatan LO adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Bintan pada TA 2022 adalah sebesar Rp1.154.894.896.157,61.

**Tabel 7.5.148 Pendapatan Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	208.173.281.838,16	155.730.268.517,51	33,68
2	Pendapatan Transfer – LO	944.319.535.036,00	833.349.256.759,00	13,32
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO	2.402.079.283,45	79.150.017.110,00	(96,97)
Jumlah		1.154.894.896.157,61	1.068.229.542.386,51	8,11

7.5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pada TA 2022 adalah sebesar Rp208.173.281.838,16 yang terdiri dari:

**Tabel 7.5.149 Pendapatan Asli Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	(%)
1	Pajak Daerah – LO	150.517.394.855,25	91.687.960.182,63	64,16
2	Retribusi Daerah – LO	7.768.055.034,00	8.230.457.748,33	(5,62)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	3.086.869.165,00	11.687.932.218,00	(73,59)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO	46.800.962.783,91	44.123.918.368,55	6,07
Jumlah		208.173.281.838,16	155.730.268.517,51	33,68

Masing-masing realisasi jenis PAD – LO TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

7.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2020, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2022 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2022. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

**Tabel 7.5.150 Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Pajak Hotel – LO	62.423.963.437,77	8.024.676.609,88	54.399.286.827,89	677,90



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
2	Pajak Restoran – LO	1.413.462.238,86	1.930.678.833,03	(517.216.594,17)	(26,79)
3	Pajak Hiburan – LO	2.826.742.246,00	373.205.305,00	2.453.536.941,00	657,42
4	Pajak Reklame – LO	644.872.703,75	324.490.303,72	320.382.400,03	98,73
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	14.154.349.466,00	12.984.150.557,00	1.170.198.909,00	9,01
6	Pajak Parkir – LO	132.486.866,00	80.452.633,00	52.034.233,00	64,68
7	Pajak Air Tanah – LO	4.428.000,00	5.397.000,00	-969.000,00	(17,95)
8	Pajak Sarang Burung Walet – LO	3.250.000,00	1.450.000,00	1.800.000,00	124,14
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	16.244.510.678,00	12.294.623.287,00	3.949.887.391,00	32,13
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO	35.106.254.381,87	31.487.113.095,00	3.619.141.286,87	11,49
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	17.563.074.837,00	24.181.722.559,00	(6.618.647.722,00)	(27,37)
Jumlah		150.517.394.855,25	91.687.960.182,63	58.829.434.672,62	64,16

Tabel 7.5.151 Rincian Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah LO dengan LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	150.517.394.855,25	145.481.518.689,93	5.035.876.165,32

Selisih antara pendapatan pajak LO dan pendapatan pajak LRA Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.035.876.165,32. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.152 Selisih Pendapatan Pajak Daerah LO dengan LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
Penambahan		
1	Penambahan Piutang Pajak Hotel Tahun 2022	121.542.051,09
2	Penambahan Piutang Pajak Restoran Tahun 2022	5.233.063,35
3	Penambahan Piutang Pajak Reklame Tahun 2022	33.996.250,00
4	Penambahan Piutang Pajak MBLB Tahun 2022	2.295.420.240,00
6	Penambahan Piutang PBB Tahun 2022	6.663.278.130,00
7	Penambahan Piutang Air Tanah Tahun 2022	738.000,00
8	Koreksi Piutang Pajak Hotel	(1.804.991,05)
9	Koreksi Piutang Pajak Restoran	37.936,65
10	Koreksi Piutang Pajak Penerangan Jalan	(1.876.817,00)
11	Koreksi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(68.812.480,00)
12	Koreksi Piutang BPHTB	(5.123.182,99)
13	Koreksi Piutang Pajak PBB P2	874.561.640,87
Jumlah		9.917.189.840,92
Pengurangan		
1	Realisasi Piutang Pajak Hotel Tahun 2021	151.950.090,49
2	Realisasi Piutang Pajak Restoran Tahun 2021	29.947.523,55
3	Realisasi Piutang Pajak Reklame Tahun 2021	26.190.000,00
4	Realisasi Piutang Pajak MBLB Tahun 2021	1.620.233.679,30
5	Realisasi Piutang Pajak PBB Tahun 2021	3.032.755.864,00
6	Realisasi Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2021	1.476.000,00
7	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Tahun 2022	18.760.518,25
Jumlah		4.881.313.675,59
Total Selisih		5.035.876.165,33

**7.5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO**

Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bintang dipungut dan dikelola oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintang. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bintang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Tabel 7.5.153 Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintang
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Kesehatan	49.120.000,00	42.411.500,00	6.708.500,00	15,82
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	467.330.000,00	498.610.000,00	(31.280.000,00)	(6,27)
3	Dinas Perhubungan	2.960.767.500,00	287.327.500,00	2.673.440.000,00	930,45
4	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	160.665.800,00	72.252.700,00	88.413.100,00	122,37
5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	4.079.549.734,00	7.318.302.048,33	(3.238.752.314,33)	(44,26)
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	47.022.000,00	6.554.000,00	40.468.000,00	617,45
7	Badan Pendapatan Daerah	3.600.000,00	5.000.000,00	(1.400.000,00)	(28,00)
Jumlah		7.768.055.034,00	8.230.457.748,33	(462.402.714,33)	(5,62)

Realisasi pendapatan retribusi pada tabel tersebut diatas merupakan pendapatan Laporan Operasional Tahun 2022 dan menurut jenisnya ada 3 (tiga) retribusi yaitu retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum dan retribusi perijinan tertentu dengan rincian sebagai berikut.

7.5.4.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum, terdiri dari:

**Tabel 7.5.154 Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO Pemerintah Kabupaten Bintang
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022**

No	Retribusi Jasa Umum	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas – LO (Dinas Kesehatan)	49.120.000,00	42.411.500,00	6.708.500,00	15,82
2	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO (Dinas Perhubungan)	168.761.000,00	123.900.000,00	44.861.000,00	36,21
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO (Dinas Perhubungan)	40.822.000,00	11.995.000,00	28.827.000,00	240,33
4	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya – LO (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan)	160.665.800,00	0,00	160.665.800,00	100,00
5	Retribusi Tera-Tera – LO	0,00	72.252.700,00	(72.252.700,00)	(100,00)
Jumlah		419.368.800,00	250.559.200,00	168.729.600,00	67,37

**7.5.4.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:

**Tabel 7.5.155 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO Pemerintah Kabupaten Bintang
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2020**

No	Retribusi Jasa Usaha	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	0,00	498.610.000,00	(498.610.000,00)	(100,00)
2	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan – LO	3.600.000,00	5.000.000,00	(1.400.000,00)	(28,00)
3	Retribusi Pemakaian Laboratorium – LO	467.330.000,00	0,00	467.330.000,00	100,00
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan – LO	2.750.749.500,00	151.342.500,00	2.599.407.000,00	1.717,57
5	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	47.022.000,00	6.554.000,00	40.468.000,00	617,45
Jumlah		3.268.701.500,00	661.506.500,00	2.607.195.000,00	394,13

7.5.4.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:

**Tabel 7.5.156 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022**

No	Retribusi Perizinan Tertentu	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan – LO	593.407.500,00	5.163.434.281,00	(4.570.026.781,00)	(88,51)
2	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO	72.291.666,67	55.625.000,33	16.666.666,34	29,96
3	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO	435.000,00	90.000,00	345.000,00	383,33
4	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing – LO	1.108.837.683,33	2.099.242.767,00	(990.405.083,67)	(47,18)
5	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	2.305.012.884,00	0,00	2.305.012.884,00	100,00
Jumlah		4.079.984.734,00	7.318.392.048,33	(3.238.407.314,33)	(44,25)

**Tabel 7.5.157 Rincian Perbedaan Pengakuan Pendapatan Retribusi Antara LRA Dengan LO
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022**

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Retribusi	7.768.055.034,00	7.313.516.224,00	454.618.810,00

Selisih antara pendapatan retribusi LO dan pendapatan retribusi LRA Tahun 2022 adalah sebesar Rp454.618.810,00. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 7.5.158 Selisih Pendapatan Retribusi Daerah
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penambahan		
1	Penambahan Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas Tahun 2022	3.600.000,00
2	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Izin Tempat Penjualan MIKOL Tahun 2020	591.335.800,00
3	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi IMTA Tahun 2020	17.666.666,67



No	Uraian	Jumlah (Rp)
4	Kewajiban penyeteroran Retribusi IMB Tahun 2021 yang batal disetor ke Kas Negara sesuai surat Kemendagri Nomor 900.1.13.1/33233/Keuda	25.710.000,00
5	Kewajiban penyeteroran Retribusi IMTA Tahun 2021 yang batal disetor ke Kas Negara sesuai surat Kemendagri Nomor 900.1.13.1/33233/Keuda	593.407.500,00
6	Penambahan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang disetor pada Tahun 2023	80.000,00
Jumlah		1.231.799.966,67
Pengurangan		
1	Realisasi Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	6.411.740,00
2	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi IMTA Tahun 2021	722.894.416,67
3	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Izin Tempat Penjualan MIKOL Tahun 2021	47.875.000,00
Jumlah		777.181.156,67
Total Selisih		454.618.810,00

7.5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan yang diterima dan dikelola melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bintan yang berupa PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bintan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.159 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	BUMD/BPR Bintan	(5.615.915.985,00)	2.253.182.332,00	(7.869.098.317,00)	(349,24)
2	PT Bintan Inti Sukses	800.398.373,00	(198.008.557,00)	998.406.930,00	(504,22)
3	Bank Riau Kepri	7.902.386.777,00	9.632.758.443,00	(1.730.371.666,00)	(17,96)
Jumlah		3.086.869.165,00	11.687.932.218,00	(8.601.063.053,00)	(73,59)

Tabel 7.5.160 Rincian Perbedaan Pengakuan Akun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.086.869.165,00	8.706.275.676,00	(5.619.406.511,00)

Selisih antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA Tahun 2022 adalah sebesar (Rp5.619.406.511,00). Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 7.5.161 Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengurangan dari Sisi Ekuitas Pembagian Dividen PT. Bintan Inti Sukses	5.452.622.633,00
2	Pengurangan dari Sisi Ekuitas Pembagian Dividen BUMD BPR Bintan	166.783.878,00
Jumlah		5.619.406.511,00
Total Selisih		5.619.406.511,00

**7.5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.162 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LO	14.657.722,00	246.680.000,00	(232.022.278,00)	(94,06)
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	4.127.200,00	(4.127.200,00)	(100,00)
3	Jasa Giro – LO	1.442.508.740,93	1.992.415.249,76	(549.906.508,83)	(27,60)
4	Pendapatan Bunga – LO	3.022.283.458,23	3.566.857.266,46	(544.573.808,23)	(15,27)
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	98.369.225,51	158.980.221,80	(60.610.996,29)	(38,12)
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	10.528.456.417,82	1.273.087.611,50	9.255.368.806,32	727,00
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO	8.948.351,12	0,00	8.948.351,12	100,00
8	Pendapatan Dari Pengembalian – LO	2.375.570.442,80	957.649.877,56	1.417.920.565,24	148,06
9	Pendapatan Dari BLUD – LO	26.691.868.807,00	33.004.041.261,00	(6.312.172.454,00)	(19,13)
10	Pendapatan Denda Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Terpisah – LO	0,00	9.095.444,75	(9.095.444,75)	(100,00)
11	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	5.446.522,50	0,00	5.446.522,50	100,00
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP – LO	2.612.853.096,00	2.872.210.750,00	(259.357.654,00)	(9,03)
13	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu – LO	0,00	38.773.485,72	(38.773.485,72)	(100,00)
Jumlah		46.800.962.783,91	44.123.918.368,55	2.677.044.415,36	6,07

7.5.4.1.1.4.1 Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan Jasa Giro terdiri dari:

**Tabel 7.5.163 Pendapatan Jasa Giro – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.330.698.832,00	1.863.386.434,00	(532.687.602,00)	(28,59)
2	Dinas Pendidikan	2.295.813,00	6.692.849,00	(4.397.036,00)	(65,70)
3	Dinas Kesehatan	1.803.889,00	7.691.271,00	(5.887.382,00)	(76,55)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.134,00	213.568,00	88.566,00	41,47
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	542.821,00	673.657,00	(130.836,00)	(19,42)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44.239,00	112.248,00	(68.009,00)	(60,59)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	87.810,00	124.077,00	(36.267,00)	(29,23)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	56.976,00	299.025,00	(242.049,00)	(80,95)
9	Dinas Sosial	636.878,00	1.773.912,00	(1.137.034,00)	(64,10)
10	Dinas Tenaga Kerja	96.236,00	67.715,00	28.521,00	42,12
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	126.216,00	113.294,00	12.922,00	11,41
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	135.172,00	86.781,00	48.391,00	55,76
13	Dinas Lingkungan Hidup	336.335,00	334.628,00	1.707,00	0,51



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.932,00	25.423,00	25.509,00	100,34
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	74.318,00	76.361,00	(2.043,00)	(2,68)
16	Dinas Perhubungan	117.076,00	102.144,00	14.932,00	14,62
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	136.015,00	146.031,00	(10.016,00)	(6,86)
18	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	118.038,00	120.103,00	(2.065,00)	(1,72)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92.998,00	95.602,00	(2.604,00)	(2,72)
20	Dinas Kepemudaan dan olah raga	117.455,00	34.536,00	82.919,00	240,09
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	38.457,00	38.390,00	67,00	0,17
22	Dinas Perikanan	172.943,00	143.726,00	29.217,00	20,33
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	97.993,00	45.371,00	52.622,00	115,98
24	Sekretariat DPRD	146.834,00	254.549,00	(107.715,00)	(42,32)
25	Sekretariat Daerah	224.163,00	1.633.520,00	(1.409.357,00)	(86,28)
26	Kecamatan BintanTimur	82.424,00	106.425,00	(24.001,00)	(22,55)
27	Kecamatan Gunung Kijang	36.211,00	58.480,00	(22.269,00)	(38,08)
28	Kecamatan Teluk Bintan	47.057,00	39.731,00	7.326,00	18,44
29	Kecamatan Bintan Utara	140.677,00	64.255,00	76.422,00	118,94
30	Kecamatan Teluk Sebong	48.938,00	35.407,00	13.531,00	38,22
31	Kecamatan Tambelan	28.717,00	32.138,00	(3.421,00)	(10,64)
32	Kecamatan Seri Kuala Lobam	43.336,00	34.794,00	8.542,00	24,55
33	Kecamatan Toapaya	67.459,00	54.419,00	13.040,00	23,96
34	Kecamatan Bintan Pesisir	127.811,00	46.491,00	81.320,00	174,92
35	Kecamatan Mantang	29.764,00	21.847,00	7.917,00	36,24
36	Inspektorat Daerah	151.678,00	152.772,00	(1.094,00)	(0,72)
37	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	212.156,00	151.332,00	60.824,00	40,19
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	614.341,00	1.425.592,00	(811.251,00)	(56,91)
39	Badan Pendapatan Daerah	210.101,00	308.231,00	(98.130,00)	(31,84)
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	231.711,00	130.343,00	101.368,00	77,77
41	SDN 001 Bintan Pesisir	144.139,00	599.303,00	(455.164,00)	(75,95)
42	SDN 002 Bintan Pesisir	125.981,00	200.191,00	(74.210,00)	(37,07)
43	SDN 003 Bintan Pesisir	51.822,00	71.751,00	(19.929,00)	(27,78)
44	SDN 004 Bintan Pesisir	134.085,00	186.956,00	(52.871,00)	(28,28)
45	SDN 005 Bintan Pesisir	59.605,00	70.701,00	(11.096,00)	(15,69)
46	SDN 006 Bintan Pesisir	67.379,00	62.964,00	4.415,00	7,01
47	SDN 002 Bintan Timur	266.959,00	463.048,00	(196.089,00)	(42,35)
48	SDN 003 Bintan Timur	337.782,00	895.368,44	(557.586,44)	(62,27)
49	SDN 006 Bintan Timur	630.021,00	538.425,00	91.596,00	17,01
50	SDN 007 Bintan Timur	55.418,00	56.969,00	(1.551,00)	(2,72)
51	SDN 008 Bintan Timur	92.964,00	69.394,00	23.570,00	33,97
52	SDN 009 Bintan Timur	343.208,00	621.557,00	(278.349,00)	(44,78)
53	SDN 010 Bintan Timur	354.463,00	534.670,00	(180.207,00)	(33,70)
54	SDN 011 Bintan Timur	504.314,00	1.032.581,00	(528.267,00)	(51,16)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
55	SDN 012 Bintan Timur	149.551,00	60.326,65	89.224,35	147,90
56	SDN 013 Bintan Timur	276.170,00	328.563,00	(52.393,00)	(15,95)
57	SDN 014 Bintan Timur	122.458,00	65.067,02	57.390,98	88,20
58	SDN 015 Bintan Timur	348.720,00	608.716,00	(259.996,00)	(42,71)
59	SDN 016 Bintan Timur	53.316,00	42.470,00	10.846,00	25,54
60	SDN 017 Bintan Timur	318.989,00	761.985,00	(442.996,00)	(58,14)
61	SDN 018 Bintan Timur	46.800,00	22.223,00	24.577,00	110,59
62	SDN 019 Bintan Timur	276.460,00	505.767,00	(229.307,00)	(45,34)
63	SDN 001 Bintan Utara	374.628,00	515.104,78	(140.476,78)	(27,27)
64	SDN 003 Bintan Utara	270.490,00	412.305,00	(141.815,00)	(34,40)
65	SDN 004 Bintan Utara	100.271,00	101.564,47	(1.293,47)	(1,27)
66	SDN 005 Bintan Utara	59.840,00	220.652,40	(160.812,40)	(72,88)
67	SDN 006 Bintan Utara	239.541,00	183.173,16	56.367,84	30,77
68	SDN 008 Bintan Utara	135.513,00	86.524,96	48.988,04	56,62
69	SDN 009 Bintan Utara	174.319,00	201.455,05	(27.136,05)	(13,47)
70	SDN 010 Bintan Utara	213.680,00	39.988,92	173.691,08	434,35
71	SDN 001 Tambelan	16.104,00	9.428,00	6.676,00	70,81
72	SDN 002 Tambelan	15.219,00	48.002,00	(32.783,00)	(68,30)
73	SDN 003 Tambelan	72.821,00	55.134,00	17.687,00	32,08
74	SDN 005 Tambelan	30.495,00	73.044,00	(42.549,00)	(58,25)
75	SDN 006 Tambelan	41.161,00	85.228,00	(44.067,00)	(51,70)
76	SDN 007 Tambelan	5.208,00	35.913,00	(30.705,00)	(85,50)
77	SDN 001 Gunung Kijang	117.286,00	139.958,51	(22.672,51)	(16,20)
78	SDN 002 Gunung Kijang	304.811,00	363.632,00	(58.821,00)	(16,18)
79	SDN 003 Gunung Kijang	87.144,00	103.995,03	(16.851,03)	(16,20)
80	SDN 004 Gunung Kijang	276.922,00	61.956,08	214.965,92	346,97
81	SDN 005 Gunung Kijang	54.282,00	32.824,00	21.458,00	65,37
82	SDN 006 Gunung Kijang	119.683,00	70.288,00	49.395,00	70,28
83	SDN 007 Gunung Kijang	213.418,00	370.756,00	(157.338,00)	(42,44)
84	SDN 008 Gunung Kijang	51.352,00	74.410,03	(23.058,03)	(30,99)
85	SDN 009 Gunung Kijang	108.100,00	58.386,00	49.714,00	85,15
86	SDN 001 Mantang	154.539,00	102.320,00	52.219,00	51,03
87	SDN 002 Mantang	63.227,00	37.062,00	26.165,00	70,60
88	SDN 003 Mantang	44.119,00	37.499,00	6.620,00	17,65
89	SDN 004 Mantang	57.891,00	43.013,00	14.878,00	34,59
90	SDN 001 Seri Kuala Lobam	395.618,00	598.689,29	(203.071,29)	(33,92)
91	SDN 002 Seri Kuala Lobam	137.322,00	96.761,36	40.560,64	41,92
92	SDN 003 Seri Kuala Lobam	413.078,00	134.482,23	278.595,77	207,16
93	SDN 004 Seri Kuala Lobam	69.014,00	39.994,98	29.019,02	72,56
94	SDN 005 Seri Kuala Lobam	377.542,00	700.176,00	(322.634,00)	(46,08)
95	SDN 006 Seri Kuala Lobam	417.864,00	141.067,17	276.796,83	196,22
96	SDN 007 Seri Kuala Lobam	219.086,00	241.241,42	(22.155,42)	(9,18)
97	SDN 001 Teluk Sebong	49.227,00	45.974,00	3.253,00	7,08



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
98	SDN 002 Teluk Sebong	122.776,00	265.237,27	(142.461,27)	(53,71)
99	SDN 003 Teluk Sebong	149.838,00	244.318,07	(94.480,07)	(38,67)
100	SDN 004 Teluk Sebong	107.183,00	117.527,00	(10.344,00)	(8,80)
101	SDN 005 Teluk Sebong	97.967,00	91.489,63	6.477,37	7,08
102	SDN 006 Teluk Sebong	48.106,00	29.348,27	18.757,73	63,91
103	SDN 007 Teluk Sebong	175.783,00	283.433,18	(107.650,18)	(37,98)
104	SDN 008 Teluk Sebong	254.311,00	440.600,89	(186.289,89)	(42,28)
105	SDN 009 Teluk Sebong	25.950,00	32.161,81	(6.211,81)	(19,31)
106	SDN 010 Teluk Sebong	18.363,00	45.036,12	(26.673,12)	(59,23)
107	SDN 001 Teluk Bintan	67.574,00	49.047,00	18.527,00	37,77
108	SDN 002 Teluk Bintan	19.381,00	24.671,00	(5.290,00)	(21,44)
109	SDN 003 Teluk Bintan	34.769,00	37.363,00	(2.594,00)	(6,94)
110	SDN 004 Teluk Bintan	246.131,00	47.111,98	199.019,02	422,44
111	SDN 005 Teluk Bintan	75.023,00	51.969,62	23.053,38	44,36
112	SDN 006 Teluk Bintan	87.621,00	38.541,00	49.080,00	127,34
113	SDN 007 Teluk Bintan	25.609,00	34.225,00	(8.616,00)	(25,17)
114	SDN 008 Teluk Bintan	26.196,00	31.321,95	(5.125,95)	(16,37)
115	SDN 009 Teluk Bintan	100.921,00	105.684,00	(4.763,00)	(4,51)
116	SDN 010 Teluk Bintan	18.583,00	36.358,20	(17.775,20)	(48,89)
117	SDN 011 Teluk Bintan	87.892,00	36.042,39	51.849,61	143,86
118	SDN 012 Teluk Bintan	27.214,00	30.268,00	(3.054,00)	(10,09)
119	SDN 013 Teluk Bintan	37.213,00	42.783,00	(5.570,00)	(13,02)
120	SDN 014 Teluk Bintan	14.144,00	35.900,00	(21.756,00)	(60,60)
121	SDN 001 Toapaya	343.575,00	372.129,00	(28.554,00)	(7,67)
122	SDN 002 Toapaya	300.906,00	624.533,00	(323.627,00)	(51,82)
123	SDN 003 Toapaya	22.963,00	34.575,00	(11.612,00)	(33,58)
124	SDN 004 Toapaya	581.708,00	846.887,00	(265.179,00)	(31,31)
125	SDN 005 Toapaya	81.803,00	120.306,76	(38.503,76)	(32,00)
126	SDN 006 Toapaya	86.793,00	22.207,00	64.586,00	290,84
127	SD Gracia	44.630,00	0,00	44.630,00	100,00
128	Sekolah Dasar Islam Terpadu	116.431,00	0,00	116.431,00	100,00
129	SD Islam Al azhar	71.869,00	0,00	71.869,00	100,00
130	SD Islam Al Hasanah	5.870,00	0,00	5.870,00	100,00
131	SD Islam Mambaus Sholah	175.854,00	0,00	175.854,00	100,00
132	SD Kristen Calisa	93.929,00	0,00	93.929,00	100,00
133	SD Surya Kemuliaan	10.408,00	0,00	10.408,00	100,00
134	SD Tunas Bangsa	82.448,00	0,00	82.448,00	100,00
135	SDIT An Nahl	11.947,00	0,00	11.947,00	100,00
136	SDIT Syiar Harmoni	974,00	0,00	974,00	100,00
137	SMPN 1 Bintan	1.042.762,00	4.726.295,00	(3.683.533,00)	(77,94)
138	SMPN 2 Bintan	1.508.448,00	1.796.768,00	(288.320,00)	(16,05)
139	SMPN 3 Bintan	941.146,00	986.838,00	(45.692,00)	(4,63)
140	SMPN 4 Bintan	91.428,00	391.075,00	(299.647,00)	(76,62)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
141	SMPN 5 Bintan	868.635,00	1.323.093,00	(454.458,00)	(34,35)
142	SMPN 6 Bintan	484.575,00	1.385.940,46	(901.365,46)	(65,04)
143	SMPN 7 Bintan	430.804,00	518.055,92	(87.251,92)	(16,84)
144	SMPN 8 Bintan	211.597,00	292.186,00	(80.589,00)	(27,58)
145	SMPN 9 Bintan	469.439,00	545.745,64	(76.306,64)	(13,98)
146	SMPN 10 Bintan	197.785,00	358.254,46	(160.469,46)	(44,79)
147	SMPN 11 Bintan	634.837,00	1.438.367,71	(803.530,71)	(55,86)
148	SMPN 12 Bintan	882.119,00	3.399.417,52	(2.517.298,52)	(74,05)
149	SMPN 13 Bintan	387.554,00	416.457,50	(28.903,50)	(6,94)
150	SMPN 14 Bintan	213.185,00	54.395,00	158.790,00	291,92
151	SMPN 15 Bintan	350.165,00	210.245,11	139.919,89	66,55
152	SMPN 16 Bintan	331.541,00	540.568,58	(209.027,58)	(38,67)
153	SMPN 17 Bintan	1.317.609,00	1.272.846,07	44.762,93	3,52
154	SMPN 18 Bintan	461.517,00	393.435,00	68.082,00	17,30
155	SMPN 19 Bintan	874.624,00	448.217,00	426.407,00	95,13
156	SMPN 20 Satu Atap Pulau Pucung	40.029,00	104.683,26	(64.654,26)	(61,76)
157	SMPN 21 Satu Atap Teluk Bintan	25.316,00	71.345,00	(46.029,00)	(64,52)
158	SMPN 22 Satu Atap Mapur	30.882,00	65.569,00	(34.687,00)	(52,90)
159	SMPN 23 Satu Atap Mantang	110.531,00	154.003,00	(43.472,00)	(28,23)
160	SMPN 24 Bintan	183.822,00	376.037,00	(192.215,00)	(51,12)
161	SMPN 26 Satu Atap BintanTimur	0,00	16.059,00	(16.059,00)	(100,00)
162	SMPN 26 Bintan	51.068,00	0,00	51.068,00	100,00
163	SMPN 27 Bintan	26.005,00	0,00	26.005,00	100,00
164	SMPN 27 Satu Atap Gunung Kijang	0,00	17.437,44	(17.437,44)	(100,00)
165	SMPN 28 Bintan	56.528,00	146.556,00	(90.028,00)	(61,43)
166	SMPN 25 Satu Atap Selat Limau	12.355,00	73.207,00	(60.852,00)	(83,12)
167	SMP Al ihsan bintan	61.291,00	0,00	61.291,00	100,00
168	SMP Islam Al Azhar 34	5.505,00	0,00	5.505,00	100,00
169	SMP Mambaus Sholihin	7.746,00	0,00	7.746,00	100,00
170	SMPIT Bahtera Insani	57.466,00	0,00	57.466,00	100,00
171	SMPS Tunas Bangsa	187.083,00	0,00	187.083,00	100,00
172	PPK BLUD Puskesmas Teluk Sebong	26.346,00	11.565,00	14.781,00	127,81
173	PPK BLUD Puskesmas Teluk Sasah	32.580,00	9.093,00	23.487,00	258,30
174	PPK BLUD Puskesmas Kijang	29.522,00	11.512,00	18.010,00	156,45
175	PPK BLUD Puskesmas TanjungUban	30.478,00	16.585,00	13.893,00	83,77
176	PPK BLUD Puskesmas Kawal	26.069,00	21.113,00	4.956,00	23,47
177	Puskesmas Kelong	16.054,00	9.762,00	6.292,00	64,45
178	Puskesmas Mantang	34.409,00	18.766,00	15.643,00	83,36
179	Puskesmas Toapaya	20.077,00	13.821,00	6.256,00	45,26
180	Puskesmas Teluk Bintan	22.784,00	18.859,00	3.925,00	20,81
181	Puskesmas Tambelan	51.664,00	22.889,00	28.775,00	125,72
182	Puskesmas Berakit	28.632,00	9.276,00	19.356,00	208,67
183	Puskesmas Sri Bintan	16.334,00	5.797,00	10.537,00	181,77



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
184	Puskesmas Kuala Sempang	34.160,00	21.756,00	12.404,00	57,01
185	Puskesmas Sei. Lekop	19.219,00	10.988,00	8.231,00	74,91
186	Puskesmas Numbing	39.672,00	4.318,00	35.354,00	818,76
187	Rumah Sakit Umum Daerah	42.693,00	67.188,00	(24.495,00)	(36,46)
188	Kelurahan Sungai Enam	477,00	0,00	477,00	100,00
189	Kelurahan Sungai Lekop	0,00	1.125,00	(311,00)	(100,00)
190	Kelurahan Gunung Lengkuas	699,00	2.604,00	(1.905,00)	(73,16)
191	Kelurahan Kawal	0,00	2.368,00	(2.368,00)	(100,00)
192	Kelurahan Kijang Kota	0,00	189,00	(189,00)	(100,00)
193	Kelurahan Tembeling Tanjung	0,00	53.880,00	(276,00)	(100,00)
194	Kelurahan Tanjung Uban	633,00	336,00	297,00	88,39
195	Kelurahan Tanjung Uban Utara	0,00	787,00	(687,00)	(100,00)
196	Kelurahan Tanjung Uban Selatan	281.576,00	242,00	281.334,00	116.253,72
197	Kelurahan Teluk Sekuni	2.692,00	7.026,00	(3.445,00)	(56,13)
198	Kelurahan Tanjung Permai	465,00	788,00	(323,00)	(40,99)
199	Kelurahan Teluk Lobam	221,00	2.934,00	(2.713,00)	(92,47)
200	Kelurahan Toapaya Asri	1.857,00	0,00	1.857,00	100,00
201	BLUD Dana Bergulir	0,00	65.882.992,00	(65.882.992,00)	(100,00)
202	BOP TK-SD Satap SDN 001 Mantang	558,00	632,00	(74,00)	(11,71)
203	DAK SMPN 8 Bintan	33.941,00	930,00	33.011,00	3.549,57
204	BPP Persidangan Setwan	110.715,00	0,00	110.715,00	100,00
205	BPP Sekrt Dinkes	50.780,00	0,00	50.780,00	100,00
206	BPP Kesra Setda	87.676,00	0,00	87.676,00	100,00
207	BPP Perbatasan Setda	192.383,00	0,00	192.383,00	100,00
208	BPP Pemerintahan Setda	43.497,00	0,00	43.497,00	100,00
209	BPP Pengelola BMD BKAD	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
210	BPP UPTD Metrologi	2.317.376,00	0,00	2.317.376,00	100,00
211	BPP Yankes Dinkes	56.240,00	0,00	56.240,00	100,00
212	BPP Kesmas Dinkes	237.596,00	0,00	237.596,00	100,00
213	Jasgir BPP Pemerintahan	11.228,00	0,00	11.228,00	100,00
214	Jasgir BPP UPTD BPEFAK Dinkes	27.492,00	0,00	27.492,00	100,00
215	BPP Protokol Setda	4.236,00	0,00	4.236,00	100,00
216	BPP Pengadaan Barjas	7.222,00	0,00	7.222,00	100,00
217	BPP Hukum Setda	4.506,00	0,00	4.506,00	100,00
218	BPP Perekonomian Setda	15.517,00	0,00	15.517,00	100,00
219	BPP SDK Dinkes	12.283,00	0,00	12.283,00	100,00
220	BPP Pembangunan Setda	4.543,00	0,00	4.543,00	100,00
221	BPP Usaha Mikro Dinas Koperasi	1.632,00	0,00	1.632,00	100,00
222	BPP Umum Setda	44.776,00	0,00	44.776,00	100,00
223	BPP Penganggaran	31.601,00	0,00	31.601,00	100,00
224	KB Adinda Mandiri	1.310,00	623,00	687,00	110,27
225	KB Al Amin	523,00	0,00	523,00	100,00
226	KB Al Fathul Ilmi	110,00	0,00	110,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
227	KB Al Furqon	586,00	0,00	586,00	100,00
228	KB Al Hikmah	1.890,00	1.230,00	660,00	53,66
229	KB Ananda	899,00	797,00	102,00	12,80
230	KB Annida	152,00	0,00	152,00	100,00
231	KB Anggerek Ladi	812,00	1.908,00	(1.096,00)	(57,44)
232	KB Ar Raudhah	1.667,00	0,00	1.667,00	100,00
233	KB Ar-Riyadhushsholihin	2.081,00	826,00	1.255,00	151,94
234	KB Asy Syifa	3.486,00	3.940,00	(454,00)	(11,52)
235	KB Bhakti Awlya	50.424,00	0,00	50.424,00	100,00
236	KB Bina Sejahtera	341,00	1.045,00	(704,00)	(67,37)
237	KB Bintang Kejora	846,00	414,00	432,00	104,35
238	KB Buah Hati	595,00	1.680,00	(1.085,00)	(64,58)
239	KB Bukit Timah	599,00	1.038,00	(439,00)	(42,29)
240	KB Cahaya Hati	2.842,00	1.332,00	1.510,00	113,36
241	KB Cahaya Indah	430,00	2.076,00	(1.646,00)	(79,29)
242	KB Cpta Insntma	8.127,00	0,00	8.127,00	100,00
243	KB Fatihara	22.603,00	0,00	22.603,00	100,00
244	KB GIN Kecil Indah	647,00	1.418,00	(771,00)	(54,37)
245	KB Gita Ceria	889,00	0,00	889,00	100,00
246	KB Harapan Jaya	955,00	1.710,00	(755,00)	(44,15)
247	KB Intan Cahaya	170,00	0,00	170,00	100,00
248	KB Intan Payung	4.412,00	2.941,00	1.471,00	50,02
249	KB Janur Bina Maju	3.422,00	0,00	3.422,00	100,00
250	KB Kandil Bahar	3.259,00	4.298,00	(1.039,00)	(24,17)
251	KB Kasih Bunda	1.723,00	656,00	1.067,00	162,65
252	KB Kasih Ibu	712,00	820,00	(108,00)	(13,17)
253	KB Kasih Sayang	1.125,00	0,00	1.125,00	100,00
254	KB Kids Club Center I	141,00	0,00	141,00	100,00
255	KB Killah	299,00	0,00	299,00	100,00
256	KB Lentera Hati	737,00	0,00	737,00	100,00
257	KB Mandiri	1.810,00	1.690,00	120,00	7,10
258	KB Mawar Asri	2.359,00	899,00	1.460,00	162,40
259	KB Millatiasri	193,00	0,00	193,00	0,00
260	KB Mutiara Bunda	2.814,00	889,00	1.925,00	216,54
261	KB Mutiara Hati	319,00	0,00	319,00	100,00
262	KB Nilam Permata Bintan I	5.390,00	518,00	4.872,00	940,54
263	KB Nurul Ain	614,00	0,00	614,00	100,00
264	KB Nurul Amin	83,00	0,00	83,00	100,00
265	KB Nurul Istiqomah	606,00	0,00	606,00	100,00
266	KB Nusantara	1.516,00	0,00	1.516,00	100,00
267	KB Padimas	1.250,00	1.332,00	(82,00)	(6,16)
268	KB PAUD Cahaya Fastabiqul Khairat	567,00	1.366,00	(799,00)	(58,49)
269	KB PAUD Cinta Nusantara	613,00	886,00	(273,00)	(30,81)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
270	KB Pelita Hati	564,00	1.749,00	(1.185,00)	(67,75)
271	KB Permata Bintang	449,00	1.376,00	(927,00)	(67,37)
272	KB Permata Hati	3.707,00	820,00	2.887,00	352,07
273	KB Permata Ibu	609,00	410,00	199,00	48,54
274	KB Permata Mantang	576,00	1.498,00	(922,00)	(61,55)
275	KB Petra Bintang	286,00	0,00	286,00	100,00
276	KB Putra Putri Ceria	686,00	717,00	(31,00)	(4,32)
277	KB Qurrota Ayun	174,00	0,00	174,00	100,00
278	KB RA Kartini	3.706,00	579,00	3.127,00	540,07
279	KB Rosella	288,00	0,00	288,00	100,00
280	KB Sabda Betuah	1.384,00	0,00	1.384,00	100,00
281	KB Sayang Ibu	763,00	1.016,00	(253,00)	(24,90)
282	KB Sengkuang	5.822,00	1.782,00	4.040,00	226,71
283	KB Seruni	465,00	860,00	(395,00)	(45,93)
284	KB Sinar Mantang	46.783,00	0,00	46.783,00	100,00
285	KB Sri Kemalai	722,00	428,00	294,00	68,69
286	KB Teratai	410,00	0,00	410,00	100,00
287	KB Terumbu Karang	1.191,00	345,00	846,00	245,22
288	KB Tirta Darma	182,00	0,00	182,00	100,00
289	KB Tunas Bentan	7.059,00	420,00	6.639,00	1.580,71
290	KB Tunas Muda	1.500,00	492,00	1.008,00	204,88
291	KB Tunas Sahabat	238,00	0,00	238,00	100,00
292	KB Tutwuri Handayani	470,00	412,00	58,00	14,08
293	Kelompok Bermain Al Hasanah	509,00	0,00	509,00	100,00
294	Kelompok Bermain Al-Janatunnaim	763,00	335,00	428,00	127,76
295	Kelompok Bermain Bina Cahaya	1.861,00	966,00	895,00	92,65
296	Kelompok Bermain Kemala Sari	687,00	616,00	71,00	11,53
297	Kelompok Bermain Malin Indah	3.422,00	1.632,00	1.790,00	109,68
298	Kelompok Bermain Nurul Iman	548,00	0,00	548,00	100,00
299	Kelompok Bermain Surya Kemenangan	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
300	Kelompok Bermain Tenggiri	1.442,00	448,00	994,00	221,88
301	PAUD Alamanda	1.787,00	0,00	1.787,00	100,00
302	PAUD AL-Hasanah II	1.276,00	933,00	343,00	36,76
303	PAUD Cahaya Numbing	205,00	0,00	205,00	100,00
304	PAUD Harapan Insan	300,00	0,00	300,00	100,00
305	PAUD KB Kasih	296,00	0,00	296,00	100,00
306	PAUD KB Kenanga	1.029,00	877,00	152,00	17,33
307	PAUD KB Mutiara	457,00	760,00	(303,00)	(39,87)
308	PAUD KB Tunas Harapan	582,00	1.678,00	(1.096,00)	(65,32)
309	PAUD Sri Merak	1.901,00	4.763,00	(2.862,00)	(60,09)
310	PAUD Tiara	857,00	1.060,00	(203,00)	(19,15)
311	PKBM Al Fitrah	651,00	0,00	651,00	100,00
312	PKBM Bestari	273,00	0,00	273,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
313	PKBM Bintang Sari	915,00	3.040,00	(2.125,00)	(69,90)
314	PKBM Harapan Insani	2.068,00	9.830,00	(7.762,00)	(78,96)
315	PKBM Insan Cendikia	775,00	3.126,00	(2.351,00)	(75,21)
316	PKBM Intan Payung	762,00	0,00	762,00	100,00
317	PKBM Karang Bertuah	967,00	1.692,00	(725,00)	(42,85)
318	PKBM Maju Lestari	4.275,00	1.142,00	3.133,00	274,34
319	PKBM Nilam Permata Bintang	2.121,00	1.269,00	852,00	67,14
320	PKBM Persada Bahari	1.157,00	1.140,00	17,00	1,49
321	POS PAUD Air Glubi Indah	2.028,00	984,00	1.044,00	106,10
322	POS PAUD Anggrek	2.684,00	1.584,00	1.100,00	69,44
323	POS PAUD Anggur	429,00	0,00	429,00	100,00
324	POS PAUD Berseri	587,00	990,00	(403,00)	(40,71)
325	POS PAUD Galang Batang	276,00	792,00	(516,00)	(65,15)
326	POS PAUD Harapan Bunda	474,00	0,00	474,00	100,00
327	POS PAUD Langgeng	364,00	1.148,00	(784,00)	(68,29)
328	POS PAUD Lengkuas Indah	471,00	624,00	(153,00)	(24,52)
329	POS PAUD Lestari	457,00	984,00	(527,00)	(53,56)
330	POS PAUD Melati Indah	1.726,00	1.280,00	446,00	34,84
331	POS PAUD Mutiara	1.758,00	1.890,00	(132,00)	(6,98)
332	POS PAUD Nala	1.354,00	748,00	606,00	81,02
333	POS PAUD Nusa Indah	3.220,00	2.116,00	1.104,00	52,17
334	POS PAUD Nusa Indah II	1.314,00	835,00	479,00	57,37
335	POS PAUD Nusa Indah IV	539,00	1.287,00	(748,00)	(58,12)
336	POS PAUD Permata Bunda	2.273,00	1.778,00	495,00	27,84
337	POS PAUD Sengkuang	641,00	1.777,00	(1.136,00)	(63,93)
338	POS PAUD Sri Kemuning	68,00	0,00	68,00	100,00
339	POS PAUD Sri Melati	766,00	2.632,00	(1.866,00)	(70,90)
340	POS PAUD Telaga Surya	56,00	0,00	56,00	100,00
341	POS PAUD Tunas Harapan	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
342	POS PAUD Widuri	1.577,00	531,00	1.046,00	196,99
343	Satuan Pendidikan Non Formal Kab.Bintan	17.023,00	7.961,00	9.062,00	113,83
344	SDN 004 Tambelan	10.460,00	41.394,00	(30.934,00)	(74,73)
345	SPS Camar	440,00	0,00	440,00	100,00
346	SPS Kemala Kasih	472,00	78,00	394,00	505,13
347	SPS Mutiara Ibu	755,00	777,00	(22,00)	(2,83)
348	SPS Nusa Indah I	773,00	630,00	143,00	22,70
349	Taman kanak Kanak Antam Kijang	1.397,00	2.497,00	(1.100,00)	(44,05)
350	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	2.124,00	0,00	2.124,00	100,00
351	TK Amalya	358,00	0,00	358,00	100,00
352	TK Angkasa I	609,00	0,00	609,00	100,00
353	TK Arlica	91,00	0,00	91,00	100,00
354	TK Bhakti Awlya	758,00	0,00	758,00	100,00
355	TK Cendikia Bintang	1.326,00	0,00	1.326,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
356	TK Ceria Bintan	42,00	675,00	(633,00)	(93,78)
357	TK Eden Ceria	1.204,00	0,00	1.204,00	100,00
358	TK Gracia	1.081,00	0,00	1.081,00	100,00
359	TK Hang Tuah	424,00	0,00	424,00	100,00
360	TK Kandil Bahar	3.444,00	4.540,00	(1.096,00)	(24,14)
361	TK Kids Club	1.287,00	0,00	1.287,00	100,00
362	TK Muhammadiyah	680,00	0,00	680,00	100,00
363	TK Muhammadiyah 2	8.292,00	0,00	8.292,00	100,00
364	TK Negeri Kota Baru	912,00	0,00	912,00	100,00
365	TK Negeri Pembina Bintan Timur	3.004,00	3.183,00	(179,00)	(5,62)
366	TK Negeri Pembina Bintan Utara	331,00	0,00	331,00	100,00
367	TK Negeri Pembina II	1.116,00	792,00	324,00	40,91
368	TK Numbing Jaya	398,00	1.121,00	(723,00)	(64,50)
369	TK Nusantara	1.661,00	0,00	1.661,00	100,00
370	TK Pedesaan Gunung Kijang	1.665,00	1.362,00	303,00	22,25
371	TK Pelangi	1.014,00	0,00	1.014,00	100,00
372	TK Permata Bintan	434,00	1.496,00	(1.062,00)	(70,99)
373	TK Puji	141,00	0,00	141,00	100,00
374	TK Satu Atap SDN 002 Bintan Pesisir	1.984,00	1.750,00	234,00	13,37
375	TK SD Satu Atap	539,00	2.590,00	(2.051,00)	(79,19)
376	TK SD Satu Atap SDN 001 Teluk Bintan	1.676,00	1.232,00	444,00	36,04
377	TK SDN 008 Satu Atap Pulau Pucung	559,00	214,00	345,00	161,21
378	TK Sinar Bahagia	110,00	0,00	110,00	100,00
379	TK Surya Kebenaran	399,00	238,00	161,00	67,65
380	TK Tadika Berseri	723,00	1.778,00	(1.055,00)	(59,34)
381	TK Terumbu Karang	519,00	369,00	150,00	40,65
382	TK Tirta Eka Pertiwi	913,00	305,00	608,00	199,34
383	TK Tunas Bangsa	1.144,00	0,00	1.144,00	100,00
384	TK Tunas Muda	604,00	720,00	(116,00)	(16,11)
385	TK YKPP	443,00	0,00	443,00	100,00
386	TK Yuliana	182,00	0,00	182,00	100,00
387	TK IT Alamanda	386,00	258,00	128,00	49,61
388	TPA Bintan Sari	452,00	0,00	452,00	100,00
389	MIS Miftahul Ulum GU	622,00	0,00	622,00	100,00
390	Bend Peng Pembinaan PAUD dan PNF	14.590,00	0,00	14.590,00	100,00
391	Bendahara Peng.Pembantu Kel Tanjung Uban Timur	621,00	0,00	621,00	100,00
392	Bendahara penerima Bapenda	53.517,00	0,00	53.517,00	100,00
393	DAK SD 002 Toapaya	293.870,00	0,00	293.870,00	100,00
394	Jasgir Bend Peng Pemb SD	7.197,00	0,00	7.197,00	100,00
395	Organisasi Setda	54.345,00	0,00	54.345,00	100,00
396	DAK SMPN 26 Bintan	1.629,00	0,00	1.629,00	100,00
397	Pemb P2P Dinkes	13.059,00	0,00	13.059,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
398	Jasgir Pemb Industri Koperasi	512,00	0,00	512,00	100,00
399	DAK SDN 001 Toapaya	489,00	0,00	489,00	100,00
400	Bendahara Peng.Pembantu Kelurahan Kota Baru	1.777,00	0,00	1.777,00	100,00
401	Bend Peng Pembantu teluk sekuni	512,00	0,00	512,00	100,00
402	Jasa giro dana bergulir	67.144.941,00	0,00	67.144.941,00	100,00
403	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	3.190.643,93	0,00	3.190.643,93	100,00
Jumlah		1.442.508.740,93	1.992.415.249,76	(553.041.556,76)	(27,60)

7.5.4.1.1.4.2 Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan Bunga Deposito terdiri dari:

Tabel 7.5.164 Pendapatan Bunga Deposito – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Rekening Deposito pada Bank BPR	563.876.716,00	1.147.311.472,00	(583.434.756,00)	(50,85)
2	Rekening Deposito pada Bank BNI'46	52.643.836,00	122.819.181,00	(70.175.345,00)	(57,14)
3	Rekening Deposito pada Bank RIAU	1.009.841.861,00	818.388.318,00	191.453.543,00	23,39
4	Rekening Deposito pada Bank BRI	853.691.336,00	644.407.228,00	209.284.108,00	32,48
5	Rekening Deposito pada Bank BSI	212.885.892,86	195.026.965,17	17.858.927,69	9,16
6	Rekening Deposito pada Bank BTN	309.863.013,69	421.267.123,29	(111.404.109,60)	(26,45)
7	Rekening Deposito pada Bank Bukopin	17.027.395,00	217.636.979,00	(200.609.584,00)	(92,18)
8	Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF (Treasury Deposit Facility) pada Bank Indonesia	2.453.407,68	0,00	2.453.407,68	100,00
Jumlah		3.022.283.458,23	3.566.857.266,46	(547.027.215,91)	(15,27)

7.5.4.1.1.4.3 Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Pajak terdiri dari:

Tabel 7.5.165 Pendapatan Denda Pajak – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel – LO	94.413.981,92	501.683.801,98	(407.269.820,06)	(81,18)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran – LO	20.714.504,52	261.136.240,50	(240.421.735,98)	(92,07)
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan – LO	6.038.512,00	0,00	6.038.512,00	100,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame – LO	1.576.243,00	762.435,00	813.808,00	106,74
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir – LO	371.366,00	0,00	371.366,00	100,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah – LO	487.080,00	154.980,00	332.100,00	214,29
7	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet – LO	279.000,00	0,00	279.000,00	100,00
8	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan – LO	0,00	308.090,00	(308.090,00)	(100,00)
9	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	1.649.598.460,40	18.945.633,00	1.630.652.827,40	8.607,01
10	Pendapatan Denda PBBP2 – LO	8.753.857.269,98	488.816.111,02	8.265.041.158,96	1.690,83
11	Pendapatan Denda BPHTB – LO	1.120.000,00	1.280.320,00	(160.320,00)	(12,52)
Jumlah		10.528.456.417,82	1.273.087.611,50	9.255.368.806,32	727,00

**7.5.4.1.1.4.4 Pendapatan Denda Retribusi**

Pendapatan Denda Retribusi terdiri dari:

Tabel 7.5.166 Pendapatan Denda Retribusi – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	5.835.599,12	0,00	5.835.599,12	100,00
2	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung – LO	3.112.752,00	0,00	3.112.752,00	100,00
Jumlah		8.948.351,12	0,00	8.948.351,12	100,00

7.5.4.1.1.4.5 Pendapatan Pengembalian

Pendapatan Pengembalian terdiri dari:

Tabel 7.5.167 Pendapatan dari Pengembalian – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan – LO	1.698.945.971,00	485.097.821,00	1.213.848.150,00	250,23
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa – LO	23.204.965,00	43.218.147,00	(20.013.182,00)	(46,31)
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya – LO	555.016.212,00	0,00	555.016.212,00	100,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat – LO	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	100,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK – LO	93.253.294,80	429.333.909,56	(336.080.614,76)	(78,28)
Jumlah		2.375.570.442,80	957.649.877,56	1.417.920.565,24	148,06

Tabel 7.5.168 Rincian Perbedaan Pengakuan Akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46.800.962.783,91	36.528.416.959,19	10.272.545.824,72

Selisih antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA Tahun 2022 adalah sebesar Rp10.272.545.824,72. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 7.5.169 Selisih Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penambahan		
1	Koreksi Pendapatan Denda Pajak Hiburan	4.985.527,00
2	Koreksi Pendapatan Denda Pajak Reklame	729.010,00
3	Koreksi Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.582.411.874,39
4	Koreksi Pendapatan Denda PBB	8.152.209.943,99



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5	Koreksi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	5.446.522,50
6	Koreksi Pendapatan Angsuran Rumah Dinas Tahun 2022	925,00
7	Penambahan Piutang Puskesmas BLUD Tahun 2022	96.973.676,00
8	Penambahan Piutang JKN di FKTP Tahun 2022	0,00
9	Penambahan Piutang BLUD RSUD Tahun 2022	1.759.227.035,00
10	Penambahan Piutang Denda Retribusi IMB Tahun 2022	5.835.599,12
11	Penambahan Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF (<i>Treasury Deposit Facility</i>)	2.453.407,68
Jumlah		11.610.273.520,68
Pengurangan		
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	157.731.209,78
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	118.022.533,18
3	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	44.280,00
4	Pembayaran piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2021	203.398.723,00
5	Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Tahun 2021	4.074.090,00
6	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bergulir Sayur atas Piutang Tahun Sebelumnya	150.000,00
7	Pendapatan atas Piutang Puskesmas BLUD Tahun 2021	61.349.430,00
8	Pendapatan atas Piutang JKN di FKTP Tahun 2021	3.605.000,00
9	Pendapatan atas Piutang BLUD RSUD Tahun 2021	502.710.127,00
10	Pendapatan atas Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi	3.000.000,00
11	Reklasifikasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan ke Surplus Penjualan	283.642.303,00
Jumlah		1.337.727.695,96
Total Selisih		10.272.545.824,72

7.5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan. Realisasi Pendapatan Transfer yang dicapai pada TA 2022 adalah sebesar Rp944.319.535.036,00 yang terdiri dari:

**Tabel 7.5.170 Pendapatan Transfer – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	840.897.742.563,00	719.308.629.856,00	16,90
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	19.885.822.000,00	44.420.166.000,00	(55,23)
3	Transfer Antar Daerah – LO	83.535.970.473,00	69.620.460.903,00	19,99
Jumlah		944.319.535.036,00	833.349.256.759,00	13,32

7.5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 7.5.171 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil	186.448.293.458,00	95.825.732.510,00	94,57
2	Dana Alokasi Umum	475.851.608.000,00	476.841.183.000,00	(0,21)
3	Dana Alokasi Khusus	93.467.543.851,00	90.479.520.346,00	3,30
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	85.130.297.254,00	56.162.194.000,00	51,58
Jumlah		840.897.742.563,00	719.308.629.856,00	16,90

7.5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.172 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	%
1	Dana Insentif Daerah	19.885.822.000,00	44.420.166.000,00	(55,23)
2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
4	Dana Desa	0,00	0,00	0,00
Jumlah		19.885.822.000,00	44.420.166.000,00	(55,23)

7.5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.173 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	%
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor – LO	13.831.675.321,00	12.746.141.518,00	8,52
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	9.167.864.595,00	6.184.300.116,00	48,24
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	46.668.931.656,00	39.856.867.424,00	17,09
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan – LO	61.944.911,00	51.142.415,00	21,12
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok – LO	12.689.553.990,00	10.782.009.430,00	17,69
6	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi – LO	1.116.000.000,00	0,00	100,00
Jumlah		83.535.970.473,00	69.620.460.903,00	19,99

**Tabel 7.5.174 Rincian Perbedaan Pengakuan Akun Pendapatan Transfer Antara LRA Dengan LO
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Transfer	944.319.535.036,00	962.761.964.672,00	(18.442.429.636,00)

Selisih pendapatan transfer sebesar (Rp18.442.429.636,00) merupakan penambahan dari beberapa pos berikut:

Tabel 7.5.175 Selisih Pendapatan Transfer
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penambahan		
1	Penambahan Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi TA 2022 sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 165 Tahun 2023	19.399.345.835,00
2	Penambahan Dana Bagi Hasil Non Tunai Melalui Fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023	10.115.876.520,00
Jumlah		29.515.222.355,00
Pengurangan		
1	Realisasi Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi TA 2022 sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 221 Tahun 2022	19.731.542.871,00
2	Realisasi Dana Desa yang hanya di akui pada LRA sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ	28.226.109.120,00
Jumlah		47.957.651.991,00
Total Selisih		(18.442.429.636,00)

7.5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 adalah sebesar Rp2.402.079.283,45 terdiri dari:

Tabel 7.5.176 Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 20201 (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah – LO	2.249.225.541,00	39.063.385.715,00	(94,24)
2	Pendapatan Lainnya – LO	152.853.742,45	40.086.631.395,00	(99,62)
Jumlah		2.402.079.283,45	79.150.017.110,00	(96,97)

Pendapatan Lainnya sebesar Rp152.853.742,45 terdiri dari Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp6.196.800,45 dan Pendapatan dari Pengembalian Hibah sebesar Rp146.656.942,00.

7.5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

Realisasi Pendaptan Hibah TA 2022 adalah sebesar Rp2.249.225.541,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.177 Pendapatan Hibah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	1.528.895.650,00	0,00	100,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah – LO	231.078.000,00	34.406.937.223,00	(99,33)
3	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LO	0,00	62.204.992,00	(100,00)
4	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri – LO	4.800.003,00	0,00	100,00
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri – LO	484.451.888,00	4.594.243.500,00	(89,46)
Jumlah		2.249.225.541,00	39.063.385.715,00	(94,24)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 7.5.178 Pendapatan Hibah – LO Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO				
1	Dinas Kesehatan	1.124.895.650,00	0,00	100,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.000.000,00	0,00	100,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	254.000.000,00	0,00	100,00
Jumlah A		1.528.895.650,00	0,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO				
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	127.051.000,00	0,00	100,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	104.027.000,00	0,00	100,00
3	Dinas Sosial	0,00	175.000.000,00	(100,00)
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	11.697.652.057,00	(100,00)
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	104.775.000,00	(100,00)
6	Dinas Perikanan	0,00	16.838.554.716,00	(100,00)
7	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	5.590.955.450,00	(100,00)
Jumlah B		231.078.000,00	34.406.937.223,00	(99,33)
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri				
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.800.002,00	0,00	100,00
2	Kecamatan Tambelan	1,00	0,00	100,00
Jumlah C		4.800.003,00	0,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri – LO				
1	Dinas Kesehatan	484.451.888,00	0,00	100,00
2	Kecamatan Bintang Utara	0,00	13.613.644,00	(100,00)
3	Kecamatan Bintang Pesisir	0,00	880.000,00	(100,00)
4	Kecamatan Tambelan	0,00	2.178.802,00	(100,00)
5	Kecamatan Mantang	0,00	880.000,00	(100,00)
6	Kecamatan Toapaya	0,00	3.854.010,00	(100,00)
7	Kecamatan Teluk Sebung	0,00	3.016.406,00	(100,00)
8	Kecamatan Teluk Bintang	0,00	2.807.005,00	(100,00)
9	Kecamatan Gunung Kijang	0,00	4.691.614,00	(100,00)
10	Kecamatan Bintang Timur	0,00	24.921.298,00	(100,00)
11	Kecamatan Seri Kuala Lobam	0,00	5.362.213,00	(100,00)
Jumlah D		484.451.888,00	62.204.992,00	680,60
Total (Jumlah a + b + c + d)		2.249.225.541,00	34.469.142.215,00	(93,47)

7.5.4.1.3.2 Pendapatan Dana Darurat – LO

Pada Tahun 2022 tidak terdapat pendapatan dana darurat pada Pemerintah Kabupaten Bintang.

Tabel 7.5.179 Pendapatan Dana Darurat - LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	%
1	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

7.5.4.1.3.3 Pendapatan Lainnya – LO

Realisasi Pendapatan Lainnya – LO TA 2022 adalah sebesar Rp152.853.742,45 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 7.5.180 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah Dana BOS – LO	0,00	29.204.438.000,00	(100,00)
2	Pendapatan dari Pengembalian Hibah – LO	152.853.742,45	10.882.193.395,00	(98,60)
Jumlah		152.853.742,45	40.086.631.395,00	(99,62)

Tabel 7.5.181 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan – LO Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	6.196.800,45	29.204.438.000,00	(99,98)
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	146.656.942,00	10.882.193.395,00	(98,65)
Jumlah		152.853.742,45	40.086.631.395,00	(99,62)

Tabel 7.5.182 Rincian Perbedaan Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.402.079.283,45	406.853.742,45	1.995.225.541,00

Selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah disebabkan karena pendapatan hibah yang berupa aset tetap sebesar Rp1.995.225.541,00 hanya menambah nilai aset tetap dan pendapatan hibah LO pada Tahun 2022.

Tabel 7.5.183 Selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penambahan		
1	Pendapatan hibah aset tetap dari Pemerintah Pusat - Kementerian Kesehatan dan BNPB	1.274.895.650,00
2	Pendapatan hibah aset tetap dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	231.078.000,00
3	Pendapatan hibah aset tetap dari masyarakat	4.800.003,00
4	Pendapatan hibah aset tetap dari swasta - IOM, Trikora Beach dan PT. BRC	484.451.888,00
Jumlah		1.995.225.541,00
Total Selisih		1.995.225.541,00

7.5.4.1.1 PENDAPATAN LUAR BIASA – LO

Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki realisasi Pendapatan Luar Biasa – LO untuk periode Tahun 2022.

7.5.4.2 BEBAN - LO

Beban – LO adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam suatu periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Beban Pemerintah Kabupaten Bintan pada TA 2022 adalah sebesar Rp1.118.670.317.105,13 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 7.5.184 Beban Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	%
1	Beban Operasi	901.404.171.959,13	852.533.146.991,57	5,73
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	142.233.047.650,00	159.345.959.312,00	(10,74)
3	Beban Transfer	73.958.101.413,00	68.095.752.066,00	8,61
4	Beban Tak Terduga	1.074.996.083,00	5.674.118.343,00	(81,05)
Jumlah		1.118.670.317.105,13	1.085.648.976.712,57	3,04

7.5.4.2.1 BEBAN OPERASI

Belanja Operasi pada TA 2022 adalah sebesar Rp901.404.171.959,13 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.185 Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	%
1	Beban Pegawai – LO	470.082.170.747,00	476.609.153.074,00	(1,37)
2	Beban Persediaan – LO	99.857.517.525,56	87.788.776.317,85	13,75
3	Beban Jasa – LO	190.006.537.020,93	183.530.430.162,12	3,53
4	Beban Pemeliharaan – LO	21.320.934.854,52	19.537.376.812,00	9,13
5	Beban Perjalanan Dinas – LO	41.028.919.990,00	24.922.899.828,00	64,86
6	Beban Subsidi – LO	1.690.823.167,00	0,00	100,00
7	Beban Hibah – LO	54.414.807.656,00	48.297.301.381,00	12,67
8	Beban Bantuan Sosial – LO	7.549.600.000,00	3.939.600.000,00	91,63
9	Beban Penyisihan Piutang – LO	5.617.545.668,17	4.173.489.948,07	34,60
10	Beban Lain-Lain – LO	9.835.315.329,95	3.734.119.468,53	163,39
Jumlah		901.404.171.959,13	852.533.146.991,57	5,73

7.5.4.2.1.1 Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp470.082.170.747,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.186 Beban Pegawai - LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Pegawai	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Beban Gaji Pokok ASN	154.684.807.707,00	153.205.347.898,00	1.479.459.809,00	0,97
2	Beban Gaji Pokok PPPK	6.016.062.000,00	0,00	6.016.062.000,00	100,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	14.816.992.684,00	14.965.530.419,00	(148.537.735,00)	(0,99)
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	550.463.740,00	0,00	550.463.740,00	100,00
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	6.755.375.000,00	6.694.122.396,00	61.252.604,00	0,92
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	8.590.851.050,00	8.954.135.190,00	(363.284.140,00)	(4,06)
7	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.513.070.000,00	2.094.961.434,00	418.108.566,00	19,96
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	375.180.000,00	0,00	375.180.000,00	100,00
9	Beban Tunjangan Beras PNS	9.563.278.248,00	9.573.944.703,00	(10.666.455,00)	(0,11)
10	Beban Tunjangan Beras PPPK	409.173.000,00	0,00	409.173.000,00	100,00
11	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	125.347.438,00	74.473.075,00	50.874.363,00	68,31
12	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.298.962,00	2.266.927,00	32.035,00	1,41
13	Beban Pembulatan Gaji PPPK	132.443,00	0,00	132.443,00	100,00
14	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.674.687.855,00	13.977.782.780,00	(303.094.925,00)	(2,17)
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	292.583.677,00	0,00	292.583.677,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Beban Pegawai	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
16	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	317.936.719,00	314.656.360,00	3.280.359,00	1,04
17	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	12.759.040,00	0,00	12.759.040,00	100,00
18	Beban luran Jaminan Kematian PNS	953.813.456,00	943.969.075,00	9.844.381,00	1,04
19	Beban luran Jaminan Kematian PPPK	38.275.328,00	0,00	38.275.328,00	100,00
20	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	172.301.624.131,00	136.438.167.990,00	35.863.456.141,00	26,29
21	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.333.791.200,00	0,00	1.333.791.200,00	100,00
22	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	899.317.440,00	1.100.359.280,00	(201.041.840,00)	(18,27)
23	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	6.353.229.280,00	7.043.351.600,00	(690.122.320,00)	(9,80)
24	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.216.000.000,00	3.900.000.000,00	(684.000.000,00)	(17,54)
25	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	417.948.387,00	0,00	417.948.387,00	100,00
26	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	13.098.674,00	0,00	13.098.674,00	100,00
27	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	4.168.651,00	0,00	4.168.651,00	100,00
28	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	105.202.153,00	0,00	105.202.153,00	100,00
29	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.342.807,00	0,00	2.342.807,00	100,00
30	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	202.614.644,00	0,00	202.614.644,00	100,00
31	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	296.322.262,00	0,00	296.322.262,00	100,00
32	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	100,00
33	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	100,00
34	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan	95.625.000,00	0,00	95.625.000,00	100,00
35	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,00
36	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	31.875.000,00	0,00	31.875.000,00	100,00
37	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	54.018.074.658,00	(54.018.074.658,00)	(100,00)
38	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	3.369.171.581,00	(3.369.171.581,00)	(100,00)
39	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	290.572.000,00	(290.572.000,00)	(100,00)
40	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	36.661.355.900,00	33.924.882.200,00	2.736.473.700,00	8,07
41	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	655.610.400,00	491.071.800,00	164.538.600,00	33,51
42	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	956.250.000,00	523.750.000,00	432.500.000,00	82,58
43	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	983.642.879,00	1.123.667.671,00	(140.024.792,00)	(12,46)
44	Beban Honorarium	3.617.435.000,00	0,00	3.617.435.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Beban Pegawai	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
	Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				
45	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	100,00
46	Beban Honorarium	0,00	36.000.000,00	(36.000.000,00)	(100,00)
47	Beban Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	558.180.000,00	3.360.000,00	0,60
48	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	73.327.800,00	73.294.200,00	33.600,00	0,05
49	Beban Tunjangan Beras DPRD	84.007.200,00	83.717.520,00	289.680,00	0,35
50	Beban Uang Paket DPRD	48.132.000,00	47.796.000,00	336.000,00	0,70
51	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	809.361.000,00	4.872.000,00	0,60
52	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	74.115.300,00	71.983.800,00	2.131.500,00	2,96
53	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	24.679.725,00	17.706.675,00	6.973.050,00	39,38
54	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.129.000.000,00	21.000.000,00	0,67
55	Beban Tunjangan Reses DPRD	514.500.000,00	493.500.000,00	21.000.000,00	4,26
56	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	526.749,00	526.749,00	0,00	0,00
57	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	138.240.000,00	0,00	138.240.000,00	100,00
58	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.155.168,00	0,00	1.155.168,00	100,00
59	Beban Jaminan Kematian DPRD	3.465.504,00	0,00	3.465.504,00	100,00
60	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	1.834.800.000,00	0,00	1.834.800.000,00	100,00
61	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	1.958.868.416,00	(1.958.868.416,00)	(100,00)
62	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.954.160.000,00	2.954.160.000,00	0,00	0,00
63	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	40.131.700,00	54.600.000,00	(14.468.300,00)	(26,50)
64	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.448.000,00	6.708.000,00	(1.260.000,00)	(18,78)
65	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	46.440.000,00	98.280.000,00	(51.840.000,00)	(52,75)
66	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.634.880,00	6.807.480,00	(2.172.600,00)	(31,91)
67	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	86.786,00	234.270,00	(147.484,00)	(62,95)
68	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400,00	2.040,00	(640,00)	(31,37)
69	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	3.263.280,00	5.469.120,00	(2.205.840,00)	(40,33)
70	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	88.560,00	112.320,00	(23.760,00)	(21,15)
71	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	265.680,00	336.960,00	(71.280,00)	(21,15)
72	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	142.032.780,00	0,00	142.032.780,00	100,00
73	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	4.677.543,00	0,00	4.677.543,00	100,00
74	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1.488.645,00	0,00	1.488.645,00	100,00
75	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	37.567.530,00	0,00	37.567.530,00	100,00
76	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	368.964,00	0,00	368.964,00	100,00
77	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	40.528.638,00	0,00	40.528.638,00	100,00
78	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	45.097.047,00	0,00	45.097.047,00	100,00
79	Beban Insentif bagi KDH/WKDH	16.875.000,00	0,00	16.875.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Beban Pegawai	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
	atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan bagi KDH/WKDH				
80	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
81	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00	100,00
82	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	428.457.859,00	(428.457.859,00)	(100,00)
83	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	57.656.250,00	(57.656.250,00)	(100,00)
84	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	193.200.000,00	8.400.000,00	4,35
85	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	243.789.000,00	450.040.000,00	(206.251.000,00)	(45,83)
86	Beban Pegawai BLUD	10.624.351.213,00	12.048.895.378,00	(1.424.544.165,00)	(11,82)
87	Beban TPG PPPK	275.884.500,00	0,00	275.884.500,00	100,00
88	Beban Tamsil Guru PPPK	149.250.000,00	0,00	149.250.000,00	100,00
	Jumlah	470.082.170.747,00	476.609.153.074,00	(6.526.982.327,00)	(1,37)

Adapun beban Pegawai berdasarkan OPD Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.187 Beban Pegawai - LO Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Pegawai	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	174.396.902.391,00	169.450.792.115,00	4.946.110.276,00	2,92
2	Dinas Kesehatan	87.905.698.709,00	85.065.101.020,00	2.840.597.689,00	3,34
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.495.221.615,00	6.814.069.730,00	681.151.885,00	10,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.956.147.851,00	3.774.789.982,00	181.357.869,00	4,80
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13.168.212.537,00	14.020.516.855,00	(852.304.318,00)	(6,08)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.835.021.569,00	5.991.544.400,00	(156.522.831,00)	(2,61)
7	Dinas Sosial	3.231.875.819,00	3.440.731.046,00	(208.855.227,00)	(6,07)
8	Dinas Tenaga Kerja	2.700.571.867,00	2.607.806.792,00	92.765.075,00	3,56
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.045.031.748,00	4.145.279.951,00	(100.248.203,00)	(2,42)
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.855.986.398,00	8.442.566.610,00	413.419.788,00	4,90
11	Dinas Lingkungan Hidup	5.496.053.094,00	5.219.010.001,00	277.043.093,00	5,31
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.133.839.666,00	4.325.601.562,00	(191.761.896,00)	(4,43)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.465.454.601,00	3.412.735.167,00	52.719.434,00	1,54
14	Dinas Perhubungan	5.790.635.499,00	5.297.088.408,00	493.547.091,00	9,32
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.126.855.429,00	5.142.999.866,00	(16.144.437,00)	(0,31)
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	5.497.580.125,00	5.202.459.874,00	295.120.251,00	5,67
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.626.494.888,00	4.681.495.951,00	(55.001.063,00)	(1,17)
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.102.495.061,00	3.300.773.167,00	(198.278.106,00)	(6,01)
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.331.228.722,00	4.352.361.107,00	(21.132.385,00)	(0,49)
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.310.697.785,00	3.384.916.282,00	(74.218.497,00)	(2,19)
21	Dinas Perikanan	6.929.138.432,00	6.171.861.437,00	757.276.995,00	12,27
22	Sekretariat Daerah	16.872.213.581,00	18.195.735.434,00	(1.323.521.853,00)	(7,27)
23	Inspektorat Daerah	7.442.162.900,00	6.885.643.110,00	556.519.790,00	8,08



No	Beban Pegawai	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.165.954.934,00	6.218.138.171,00	(52.183.237,00)	(0,84)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8.487.682.405,00	24.128.131.894,00	(15.640.449.489,00)	(64,82)
26	Badan Pendapatan Daerah	8.223.135.748,00	10.236.467.259,00	(2.013.331.511,00)	(19,67)
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.671.075.370,00	9.015.603.015,00	1.655.472.355,00	18,36
28	Sekretariat DPRD	15.343.137.851,00	14.524.570.108,00	818.567.743,00	5,64
29	Kecamatan Bintan Utara	4.652.772.533,00	4.564.599.845,00	88.172.688,00	1,93
30	Kecamatan Bintan Pesisir	1.875.613.417,00	1.699.727.550,00	175.885.867,00	10,35
31	Kecamatan Tambelan	2.281.852.088,00	1.917.587.045,00	364.265.043,00	19,00
32	Kecamatan Mantang	1.776.502.313,00	1.825.759.962,00	(49.257.649,00)	(2,70)
33	Kecamatan Toapaya	2.597.234.120,00	2.577.042.506,00	20.191.614,00	0,78
34	Kecamatan Teluk Sebung	2.981.297.435,00	3.049.597.708,00	(68.300.273,00)	(2,24)
35	Kecamatan Teluk Bintan	2.640.620.364,00	3.012.251.400,00	(371.631.036,00)	(12,34)
36	Kecamatan Gunung Kijang	3.037.355.209,00	3.110.790.346,00	(73.435.137,00)	(2,36)
37	Kecamatan Bintan Timur	5.029.115.449,00	4.589.725.541,00	439.389.908,00	9,57
38	Kecamatan Seri Kuala Lobam	2.961.934.308,00	3.277.810.815,00	(315.876.507,00)	(9,64)
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.641.366.916,00	3.535.470.042,00	105.896.874,00	3,00
	Jumlah	470.082.170.747,00	476.609.153.074,00	(6.483.482.327,00)	(1,37)

Tabel 7.5.188 Rincian Perbedaan Beban Pegawai Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Pegawai	470.082.170.747,00	470.125.670.747,00	(43.500.000,00)

Perbedaan beban pegawai LO dan belanja pegawai LRA disebabkan karena Koreksi kelebihan pembayaran tunjangan fungsional PNS yang belum disetor ke Kas Daerah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp43.500.000,00.

7.5.4.2.1.2 Beban Persediaan – LO

Beban Persediaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 99.857.517.525,56 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.189 Beban Persediaan - LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Persediaan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.734.886.630,00	2.989.765.040,00	(254.878.410,00)	(8,53)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	3.265.657.475,00	4.639.845.914,00	(1.374.188.439,00)	(29,62)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.598.292.745,00	7.780.945.950,00	817.346.795,00	10,50
4	Beban Bahan-Bahan Baku	828.148.921,00	827.957.550,00	191.371,00	0,02
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	268.959.950,00	525.811.244,00	(256.851.294,00)	(48,85)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	85.940.500,00	20.584.500,00	65.356.000,00	317,50
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	762.387.391,00	1.142.637.550,00	(380.250.159,00)	(33,28)
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	29.516.749,78	(29.516.749,78)	(100,00)
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	10.127.763.493,52	9.641.616.615,70	486.146.877,82	5,04
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.714.798.545,00	939.779.288,00	775.019.257,00	82,47
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	17.867.885,00	233.157.649,00	(215.289.764,00)	(92,34)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	31.321.400,00	21.905.940,00	9.415.460,00	42,98
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	2.432.000,00	49.918.000,00	(47.486.000,00)	(95,13)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Beban Persediaan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	103.274.850,00	72.476.800,00	30.798.050,00	42,49
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	37.804.130,00	0,00	37.804.130,00	100,00
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	499.741.430,00	79.791.200,00	419.950.230,00	526,31
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.579.551.365,40	8.023.549.151,60	(1.443.997.786,20)	(18,00)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	919.237.369,00	760.324.448,00	158.912.921,00	20,90
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.461.270.240,00	10.626.040.228,76	(164.769.988,76)	(1,55)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	352.053.500,00	315.814.730,00	36.238.770,00	11,47
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	634.047.287,00	320.973.018,21	313.074.268,79	97,54
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.509.923.703,10	1.800.338.424,50	709.585.278,60	39,41
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.164.263.925,80	2.337.492.991,20	(173.229.065,40)	(7,41)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	86.651.040,00	25.216.000,00	61.435.040,00	243,64
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	484.101.421,00	290.258.376,00	193.843.045,00	66,78
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	322.813.086,00	133.925.750,00	188.887.336,00	141,04
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.152.336.282,00	7.687.601.430,96	(4.535.265.148,96)	(58,99)
28	Beban Obat-Obatan-Obat	8.766.222.111,80	8.257.477.964,20	508.744.147,60	6,16
29	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	156.020.830,00	1.206.769.897,00	(1.050.749.067,00)	(87,07)
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.082.102.178,00	0,00	5.080.672.178,00	100,00
31	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.523.370.552,00	0,00	7.523.370.552,00	100,00
32	Beban Natura dan Pakan-Natura	936.623.140,00	2.405.530.470,00	(1.468.907.330,00)	(61,06)
33	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	134.478.174,94	196.739.315,94	(62.261.141,00)	(31,65)
34	Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.381.982.478,00	4.662.234.205,00	1.719.748.273,00	36,89
35	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.834.928.535,00	1.399.247.909,00	435.680.626,00	31,14
36	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	5.500.000,00	25.865.000,00	(20.365.000,00)	(78,74)
37	Belanja makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.184.672.906,00	809.795.680,00	374.877.226,00	46,29
38	Belanja makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	13.980.000,00	4.695.000,00	9.285.000,00	197,76
39	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.246.227.828,00	5.014.026.492,00	3.232.201.336,00	64,46
40	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	145.812.000,00	120.450.000,00	25.362.000,00	21,06
41	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	141.612.200,00	42.790.000,00	98.822.200,00	230,95
42	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	19.800.000,00	(19.800.000,00)	(100,00)
43	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	38.225.000,00	0,00	38.225.000,00	100,00
44	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	312.001.030,00	266.586.100,00	45.414.930,00	17,04
45	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	447.317.085,00	402.067.610,00	45.249.475,00	11,25
46	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	46.887.500,00	(46.887.500,00)	(100,00)
47	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	17.819.406,00	(17.819.406,00)	(100,00)
48	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	8.531.150,00	(8.531.150,00)	(100,00)
49	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	5.899.300,00	(5.899.300,00)	(100,00)
50	Beban Pakaian KORPRI	13.827.968,00	0,00	13.827.968,00	100,00
51	Beban Pakaian Adat Daerah	982.862.080,00	806.252.699,00	176.609.381,00	21,90
52	Beban Pakaian Batik Tradisional	62.892.450,00	50.184.200,00	12.708.250,00	25,32
53	Beban Pakaian Olahraga	572.334.454,00	457.033.071,00	115.301.383,00	25,23
54	Beban Pakaian Paskibraka	128.997.960,00	132.217.000,00	(3.219.040,00)	(2,43)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Beban Persediaan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
55	Beban Pakaian Jas/Safari	0,00	67.375.000,00	(67.375.000,00)	(100,00)
56	Beban Komponen-Komponen Peralatan	0,00	330.000,00	(330.000,00)	(100,00)
57	Beban Komponen-Komponen Lainnya	0,00	13.540.000,00	(13.540.000,00)	(100,00)
58	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	277.209,00	(277.209,00)	(100,00)
59	Beban Pipa-Pipa Lainnya	0,00	31.109.600,00	(31.109.600,00)	(100,00)
Jumlah		99.857.517.525,56	87.788.776.317,85	12.068.741.207,71	13,75

Adapun beban persediaan berdasarkan OPD Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.190 Beban Persediaan – LO Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Persediaan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	17.863.779.760,00	14.801.362.669,53	3.062.417.090,47	20,69
2	Dinas Kesehatan	28.712.222.496,34	34.041.884.889,54	(5.329.662.393,20)	(15,66)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.928.829.177,00	1.556.871.492,00	7.371.957.685,00	473,51
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.120.289.157,00	1.628.738.208,00	(508.449.051,00)	(31,22)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	584.701.831,00	443.016.780,00	141.685.051,00	31,98
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	642.738.162,00	579.572.847,00	63.165.315,00	10,90
7	Dinas Sosial	2.293.848.758,00	1.214.516.634,00	1.079.332.124,00	88,87
8	Dinas Tenaga Kerja	373.606.071,00	309.093.126,00	64.512.945,00	20,87
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	800.162.741,00	516.672.793,00	283.489.948,00	54,87
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	383.869.083,00	421.522.174,00	(37.653.091,00)	(8,93)
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.180.440.720,00	2.908.685.920,00	271.754.800,00	9,34
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	602.414.791,00	1.405.808.475,00	(803.393.684,00)	(57,15)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	710.573.220,00	950.464.597,00	(239.891.377,00)	(25,24)
14	Dinas Perhubungan	1.160.829.096,00	784.539.178,00	376.289.918,00	47,96
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	510.287.832,00	554.842.198,00	(44.554.366,00)	(8,03)
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	917.574.582,00	625.016.947,00	292.557.635,00	46,81
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	658.584.073,00	313.218.141,00	345.365.932,00	110,26
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.257.767.797,00	924.501.457,00	333.266.340,00	36,05
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.142.199.763,00	1.010.535.260,00	1.131.664.503,00	111,99
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	331.777.025,00	255.976.374,00	75.800.651,00	29,61
21	Dinas Perikanan	328.886.194,22	361.228.629,78	(32.342.435,56)	(8,95)
22	Sekretariat Daerah	9.172.192.554,00	6.060.049.742,00	3.112.142.812,00	51,36
23	Inspektorat Daerah	366.544.444,00	319.280.595,00	47.263.849,00	14,80
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.176.826.677,00	2.407.219.138,00	(230.392.461,00)	(9,57)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.767.955.208,00	1.670.058.847,00	97.896.361,00	5,86
26	Badan Pendapatan Daerah	752.417.048,00	861.901.327,00	(109.414.279,00)	(12,69)
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.423.230.647,00	483.314.135,00	939.916.512,00	194,47
28	Sekretariat DPRD	4.481.615.400,00	2.630.268.819,00	1.851.346.581,00	70,39
29	Kecamatan Bintan Utara	1.055.741.472,00	1.295.941.437,00	(240.199.965,00)	(18,53)
30	Kecamatan Bintan Pesisir	288.921.925,00	346.053.450,00	(57.131.525,00)	(16,51)
31	Kecamatan Tambelan	396.732.190,00	619.108.645,00	(222.376.455,00)	(35,92)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Beban Persediaan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
32	Kecamatan Mantang	570.598.674,00	437.155.989,00	133.442.685,00	30,53
33	Kecamatan Toapaya	725.296.625,00	824.114.490,00	(98.817.865,00)	(11,99)
34	Kecamatan Teluk Sebong	529.932.222,00	374.126.300,00	155.805.922,00	41,65
35	Kecamatan Teluk Bintan	455.849.557,00	462.872.639,00	(7.023.082,00)	(1,52)
36	Kecamatan Gunung Kijang	589.663.243,00	1.189.253.714,00	(599.590.471,00)	(50,42)
37	Kecamatan Bintan Timur	358.924.607,00	809.212.491,00	(450.287.884,00)	(55,65)
38	Kecamatan Seri Kuala Lobam	982.524.064,00	951.032.115,00	31.491.949,00	3,31
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	257.168.639,00	439.743.655,00	(182.575.016,00)	(41,52)
	Jumlah	99.857.517.525,56	87.788.776.317,85	12.068.741.207,71	13,75

7.5.4.2.1.3 Beban Jasa - LO

Beban Jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp190.006.537.020,93 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.191 Beban Jasa – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Jasa	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.680.981.000,00	1.444.284.480,00	1.236.696.520,00	85,63
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.094.387.281,00	5.276.164.432,00	1.818.222.849,00	34,46
3	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.924.926.000,00	470.388.000,00	2.454.538.000,00	521,81
4	Beban Honorarium Rohaniwan	8.767.966.000,00	8.305.110.000,00	462.856.000,00	5,57
5	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	9.900.000,00	(9.900.000,00)	(100,00)
6	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	594.200.000,00	23.600.000,00	570.600.000,00	2417,80
7	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	714.195.000,00	733.600.000,00	(19.405.000,00)	(2,65)
8	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	20.311.677.240,00	23.433.672.500,00	(3.121.995.260,00)	(13,32)
9	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	22.416.492.945,00	19.442.401.057,00	2.974.091.888,00	15,30
10	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	227.818.600,00	58.276.000,00	169.542.600,00	290,93
11	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.762.755.116,00	3.234.456.900,00	(1.471.701.784,00)	(45,50)
12	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	65.400.000,00	144.680.000,00	(79.280.000,00)	(54,80)
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	44.450.000,00	66.000.000,00	(21.550.000,00)	(32,65)
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	220.050.000,00	1.800.700.000,00	(1.580.650.000,00)	(87,78)
15	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	0,00	457.200.000,00	(457.200.000,00)	(100,00)
16	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	660.075.000,00	684.750.000,00	(24.675.000,00)	(3,60)
17	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	31.500.000,00	316.500.000,00	(285.000.000,00)	(90,05)
18	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	388.275.000,00	330.000.000,00	58.275.000,00	17,66
19	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	452.490.000,00	154.865.000,00	297.625.000,00	192,18
20	Beban Jasa Tenaga Administrasi	25.161.508.930,00	24.307.329.260,00	854.179.670,00	3,51



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

21	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	524.163.000,00	342.793.500,00	181.369.500,00	52,91
22	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	633.250.000,00	335.600.000,00	297.650.000,00	88,69
23	Beban Jasa Tenaga Ahli	2.815.555.442,00	3.192.644.700,00	(377.089.258,00)	(11,81)
24	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	15.268.557.264,00	14.160.691.813,00	1.107.865.451,00	7,82
25	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.435.880.000,00	682.600.000,00	753.280.000,00	110,35
26	Beban Jasa Tenaga Supir	283.200.000,00	460.642.584,00	(177.442.584,00)	(38,52)
27	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	50.400.000,00	0,00	50.400.000,00	100,00
28	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	168.908.639,00	95.977.500,00	72.931.139,00	75,99
29	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	192.500,00	0,00	192.500,00	100,00
30	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	90.400.000,00	30.950.000,00	59.450.000,00	192,08
31	Beban Jasa Tata Rias	11.899.200,00	17.347.000,00	(5.447.800,00)	(31,40)
32	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	138.578.250,00	212.020.000,00	(73.441.750,00)	(34,64)
33	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	302.137.008,00	273.814.854,00	28.322.154,00	10,34
34	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	95.710.181,93	9.815.517,30	85.894.664,63	875,09
35	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	0,00	3.864.000,00	(3.864.000,00)	(100,00)
36	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	172.855.000,00	189.832.500,00	(16.977.500,00)	(8,94)
37	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	495.428.000,00	181.434.250,00	313.993.750,00	173,06
38	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	459.755.892,00	17.780.000,00	441.975.892,00	2485,80
39	Beban Jasa Kalibrasi	44.874.145,00	173.380.244,00	(128.506.099,00)	(74,12)
40	Beban Jasa Pengolahan Sampah	312.494.070,00	37.842.400,00	274.651.670,00	725,78
41	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	8.312.460,00	722.246.010,00	(713.933.550,00)	(98,85)
42	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.678.636.130,00	1.484.647.400,00	1.193.988.730,00	80,42
43	Beban Tagihan Telepon	192.483.268,00	326.878.346,00	(134.395.078,00)	(41,11)
44	Beban Tagihan Air	482.483.588,00	395.779.700,00	86.703.888,00	21,91
45	Beban Tagihan Listrik	15.248.412.938,00	13.396.578.128,15	1.851.834.809,85	13,82
46	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	502.513.100,00	550.195.400,00	(47.682.300,00)	(8,67)
47	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.730.044.854,00	3.929.471.941,00	800.572.913,00	20,37
48	Beban Paket/Pengiriman	53.225.780,00	7.667.500,00	45.558.280,00	594,17
49	Belanja Penambahan Daya	59.853.695,00	14.815.500,00	45.038.195,00	303,99
50	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	404.324.090,00	221.174.323,00	183.149.767,00	82,81
51	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	2.097.600.000,00	(2.097.600.000,00)	(100,00)
52	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	21.071.436,00	9.160.612.699,00	(9.139.541.263,00)	(99,77)
53	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	580.289.248,00	596.635.424,00	(16.346.176,00)	(2,74)
54	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	8.292.147.500,00	8.356.189.000,00	(64.041.500,00)	(0,77)
55	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	1.112.778.800,00	1.058.982.400,00	53.796.400,00	5,08



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

56	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.957.143.811,00	5.724.116.200,00	233.027.611,00	4,07
57	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.893.720.114,00	1.777.223.510,00	116.496.604,00	6,55
58	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	81.500.000,00	66.500.000,00	15.000.000,00	22,56
59	Beban Sewa Excavator	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00
60	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	73.896.030,00	0,00	73.896.030,00	100,00
61	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.604.919.800,00	664.588.300,00	7.940.331.500,00	1194,77
62	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	25.162.700,00	33.105.000,00	(7.942.300,00)	(23,99)
63	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	82.800.000,00	(82.800.000,00)	(100,00)
64	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.176.911.000,00	1.858.163.200,00	(681.252.200,00)	(36,66)
65	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	155.195.300,00	140.911.600,00	14.283.700,00	10,14
66	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	273.033.545,00	158.372.000,00	114.661.545,00	72,40
67	Beban Sewa Mebel	89.228.220,00	21.366.840,00	67.861.380,00	317,60
68	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	417.320.040,00	145.691.500,00	271.628.540,00	186,44
69	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	181.136.800,00	98.410.000,00	82.726.800,00	84,06
70	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	112.397.200,00	(112.397.200,00)	(100,00)
71	Beban Sewa Sumber Tenaga	5.994.000,00	4.950.000,00	1.044.000,00	21,09
72	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	1.500.000,00	209.000,00	1.291.000,00	617,70
73	Beban Sewa Personal Computer	0,00	130.000,00	(130.000,00)	(100,00)
74	Beban Sewa Peralatan Mainframe	408.592.500,00	69.630.000,00	338.962.500,00	486,81
75	Beban Sewa Peralatan Jaringan	110.890.000,00	256.740.000,00	(145.850.000,00)	(56,81)
76	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	759.918.000,00	427.509.166,67	332.408.833,33	77,75
77	Beban Sewa Bangunan Gudang	42.900.000,00	265.250.000,00	(222.350.000,00)	(83,83)
78	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	107.000.000,00	370.797.300,00	(263.797.300,00)	(71,14)
79	Beban Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
80	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	340.475.000,00	179.560.000,00	160.915.000,00	89,62
81	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	13.500.000,00	45.000.000,00	(31.500.000,00)	(70,00)
82	Beban Sewa Rumah Negara Golongan II	200.000.000,00	343.000.000,00	(143.000.000,00)	(41,69)
83	Beban Sewa Hotel	2.255.881.929,00	1.641.125.400,00	614.756.529,00	37,46
84	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	40.000.000,00	46.517.500,00	(6.517.500,00)	(14,01)
85	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	1.840.000,00	(1.840.000,00)	(100,00)
86	Beban Sewa Tanaman	38.764.300,00	41.525.000,00	(2.760.700,00)	(6,65)
87	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	4.898.810,00	0,00	4.898.810,00	100,00
88	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	274.146.090,00	0,00	274.146.090,00	100,00
89	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	69.930.000,00	0,00	69.930.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

90	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.046.441.627,00	1.266.947.800,00	-220.506.173,00	-17,40
91	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	17.975.000,00	(17.975.000,00)	(100,00)
92	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	74.794.500,00	(74.794.500,00)	(100,00)
93	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	344.627.400,00	786.731.000,00	(442.103.600,00)	(56,20)
94	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	99.583.000,00	1.004.860.450,00	(905.277.450,00)	(90,09)
95	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	599.151.264,00	0,00	599.151.264,00	100,00
96	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	409.087.440,00	0,00	409.087.440,00	100,00
97	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	175.824.000,00	(175.824.000,00)	(100,00)
98	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	99.715.000,00	593.639.997,00	(493.924.997,00)	(83,20)
99	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	10.594.000,00	0,00	10.594.000,00	100,00
100	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	63.648.325,00	1.709.047.150,00	(1.645.398.825,00)	(96,28)
101	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	99.621.500,00	(99.621.500,00)	(100,00)
102	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	188.665.185,00	(34.760.000,00)	223.425.185,00	(642,77)
103	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	45.630.000,00	0,00	45.630.000,00	100,00
104	Beban Jasa Konsultansi Spesialis- Jasa Survei Permukaan Tanah	0,00	7.581.680,00	(7.581.680,00)	(100,00)
105	Beban Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	0,00	124.927.000,00	(124.927.000,00)	(100,00)
106	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan	467.143.500,00	403.499.300,00	63.644.200,00	15,77
107	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen	89.988.810,00	0,00	89.988.810,00	100,00
108	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	7.492.500,00	0,00	7.492.500,00	100,00
109	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	486.925.389,00	1.052.645.000,00	(565.719.611,00)	(53,74)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

110	Beban Sosialisasi	0,00	655.000,00	(655.000,00)	(100,00)
111	Beban Bimbingan Teknis	1.994.776.108,00	477.990.000,00	1.516.786.108,00	317,33
112	Beban Diklat Kepemimpinan	0,00	22.125.000,00	(22.125.000,00)	(100,00)
113	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	494.601.093,00	464.816.340,00	29.784.753,00	6,41
114	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	339.682.800,00	87.310.000,00	252.372.800,00	289,05
115	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	4.199.510.000,00	3.792.428.500,00	407.081.500,00	10,73
116	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00
117	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.003.072.000,00	3.373.959.966,00	(370.887.966,00)	(10,99)
118	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00	100,00
119	Beban Sewa Alat Musik	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	100,00
120	Beban Sewa Peralatan Cetak	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
121	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	100,00
Jumlah		190.006.537.020,93	183.530.430.162,12	6.476.106.858,81	3,53

Adapun beban jasa berdasarkan OPD Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.192 Beban Jasa – LO Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Beban Jasa	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	39.837.455.835,93	30.960.176.683,45	8.877.279.152,48	28,67
2	Dinas Kesehatan	43.586.094.904,00	51.693.512.359,00	(8.107.417.455,00)	(15,68)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.120.852.654,00	5.115.221.568,00	(1.994.368.914,00)	(38,99)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.844.052.967,00	14.450.869.926,00	(2.606.816.959,00)	(18,04)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.163.283.000,00	2.134.849.000,00	28.434.000,00	1,33
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	936.027.410,00	695.667.024,00	240.360.386,00	34,55
7	Dinas Sosial	2.071.848.680,00	1.502.651.432,00	569.197.248,00	37,88
8	Dinas Tenaga Kerja	974.506.176,00	422.705.270,00	551.800.906,00	130,54
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.732.766.751,00	1.231.965.913,00	500.800.838,00	40,65
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.640.254.784,00	2.459.118.468,00	(818.863.684,00)	(33,30)
11	Dinas Lingkungan Hidup	11.912.057.787,00	11.478.294.557,00	433.763.230,00	3,78
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	870.683.798,00	833.296.033,67	37.387.764,33	4,49
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.101.881.048,00	1.313.830.474,00	(211.949.426,00)	(16,13)
14	Dinas Perhubungan	1.647.270.671,00	1.319.907.723,00	327.362.948,00	24,80
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.818.809.764,00	3.195.685.525,00	623.124.239,00	19,50
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	2.044.752.479,00	906.189.957,00	1.138.562.522,00	125,64
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.314.467.901,00	1.045.308.775,00	269.159.126,00	25,75
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.749.492.910,00	972.901.825,00	776.591.085,00	79,82
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.872.982.278,00	2.049.087.085,00	823.895.193,00	40,21
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	472.540.028,00	535.777.837,00	(63.237.809,00)	(11,80)
21	Dinas Perikanan	1.820.800.838,00	1.091.134.652,00	729.666.186,00	66,87
22	Sekretariat Daerah	24.895.095.400,00	22.438.038.441,00	2.457.056.959,00	10,95
23	Inspektorat Daerah	681.465.484,00	547.483.873,00	133.981.611,00	24,47
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.432.199.738,00	2.915.228.505,00	(483.028.767,00)	(16,57)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	7.411.763.010,00	6.468.282.863,00	943.480.147,00	14,59
26	Badan Pendapatan Daerah	2.262.811.242,00	2.200.213.013,00	62.598.229,00	2,85



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Beban Jasa	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	936.756.321,00	1.345.898.180,00	(409.141.859,00)	(30,40)
28	Sekretariat DPRD	4.865.864.809,00	3.193.775.864,00	1.672.088.945,00	52,35
29	Kecamatan Bintan Utara	1.103.419.794,00	1.120.213.946,00	(16.794.152,00)	(1,50)
30	Kecamatan Bintan Pesisir	501.137.587,00	412.316.097,00	88.821.490,00	21,54
31	Kecamatan Tambelan	674.277.322,00	591.383.800,00	82.893.522,00	14,02
32	Kecamatan Mantang	458.085.803,00	395.879.888,00	62.205.915,00	15,71
33	Kecamatan Toapaya	827.701.170,00	880.114.594,00	(52.413.424,00)	(5,96)
34	Kecamatan Teluk Sebang	680.234.610,00	584.328.111,00	95.906.499,00	16,41
35	Kecamatan Teluk Bintan	573.053.355,00	604.815.544,00	(31.762.189,00)	(5,25)
36	Kecamatan Gunung Kijang	793.555.221,00	1.007.036.238,00	(213.481.017,00)	(21,20)
37	Kecamatan Bintan Timur	1.819.357.353,00	1.796.135.712,00	23.221.641,00	1,29
38	Kecamatan Seri Kuala Lobam	836.274.137,00	903.070.692,00	(66.796.555,00)	(7,40)
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	720.602.001,00	718.062.714,00	2.539.287,00	0,35
Jumlah		190.006.537.020,93	183.530.430.162,12	6.476.106.858,81	3,53

7.5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan – LO

Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp21.320.934.854,52 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.193 Beban Pemeliharaan - LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	22.564.635,00	0,00	22.564.635,00	100,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	19.282.000,00	0,00	19.282.000,00	100,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.353.501.559,00	1.697.306.000,00	(343.804.441,00)	(20,26)
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.653.899.274,00	1.653.795.790,00	103.484,00	0,01
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	459.703.040,00	401.222.000,00	58.481.040,00	14,58
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.162.643,00	7.059.600,00	7.103.043,00	100,62
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	80.380.159,00	116.218.300,00	(35.838.141,00)	(30,84)
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	149.954.640,00	(149.954.640,00)	(100,00)
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	149.800.050,00	0,00	149.800.050,00	100,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	62.994.746,00	125.500.450,00	(62.505.704,00)	(49,81)
11	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	49.950.000,00	0,00	49.950.000,00	100,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	53.636.250,00	38.995.000,00	14.641.250,00	37,55
13	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	9.314.200,00	0,00	9.314.200,00	100,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	7.425.000,00	3.200.000,00	4.225.000,00	132,03
15	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat	14.437.700,00	0,00	14.437.700,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
	Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor				
16	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	11.841.700,00	21.642.000,00	(9.800.300,00)	(45,28)
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
18	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	16.817.500,00	23.907.000,00	(7.089.500,00)	(29,65)
19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	16.505.000,00	8.971.000,00	7.534.000,00	83,98
20	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	820.721.143,00	619.223.100,00	201.498.043,00	32,54
21	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	62.552.880,00	113.955.500,00	(51.402.620,00)	(45,11)
22	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	143.808.624,00	141.273.920,00	2.534.704,00	1,79
23	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	656.230.483,00	708.898.740,00	(52.668.257,00)	(7,43)
24	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	199.374.175,00	260.457.800,00	(61.083.625,00)	(23,45)
25	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,00	19.937.045,00	(19.937.045,00)	(100,00)
26	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	0,00	5.670.000,00	(5.670.000,00)	(100,00)
27	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	17.517.500,00	(17.517.500,00)	(100,00)
28	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	43.978.200,00	43.835.000,00	143.200,00	0,33
29	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	11.766.000,00	31.282.240,00	(19.516.240,00)	(62,39)
30	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	21.943.000,00	18.920.000,00	3.023.000,00	15,98
31	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	220.006.270,00	0,00	220.006.270,00	100,00
32	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	100,00
33	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	113.109.131,00	61.316.550,00	51.792.581,00	84,47
34	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
35	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	0,00	4.400.000,00	(4.400.000,00)	(100,00)
36	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	0,00	14.300.000,00	(14.300.000,00)	(100,00)
37	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	59.740.200,00	58.206.500,00	1.533.700,00	2,63
38	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	0,00	3.960.000,00	(3.960.000,00)	(100,00)
39	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
40	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	9.365.600,00	5.950.000,00	3.415.600,00	57,41
41	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	2.990.000,00	(2.990.000,00)	(100,00)
42	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	436.610.476,00	15.720.000,00	420.890.476,00	2.677,42
43	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	276.933.460,00	610.707.000,00	(333.773.540,00)	(54,65)
44	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	9.354.000,00	15.070.000,00	(5.716.000,00)	(37,93)
45	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	1.905.000,00	(1.905.000,00)	(100,00)
46	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	822.769.239,00	304.023.664,00	518.745.575,00	170,63
47	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.581.000,00	313.830.900,00	(308.249.900,00)	(98,22)
48	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	91.373.458,00	59.533.000,00	31.840.458,00	53,48
49	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
50	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	74.858.400,00	164.769.000,00	(89.910.600,00)	(54,57)
51	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	51.463.500,00	(51.463.500,00)	(100,00)
52	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-PeralatanOlahraga Atletik	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	(100,00)
53	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.111.029.569,00	5.042.408.295,00	68.621.274,00	1,36
54	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	232.296.592,00	402.413.101,00	(170.116.509,00)	(42,27)
55	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	332.962.440,00	(332.962.440,00)	(100,00)
56	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	179.046.000,00	0,00	179.046.000,00	100,00
57	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.398.283.832,52	1.680.486.191,00	717.797.641,52	42,71
58	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	53.860.160,00	29.425.000,00	24.435.160,00	83,04
59	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.185.762.914,00	0,00	1.185.762.914,00	100,00
60	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	109.400.000,00	191.668.887,00	(82.268.887,00)	(42,92)
61	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	81.941.951,00	(81.941.951,00)	(100,00)
62	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	294.362.700,00	17.484.500,00	276.878.200,00	1.583,56
63	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	25.369.050,00	0,00	25.369.050,00	100,00
64	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	136.735.500,00	(136.735.500,00)	(100,00)
65	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	0,00	130.930.000,00	(130.930.000,00)	(100,00)
66	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-	0,00	69.767.500,00	(69.767.500,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
	Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya)
67	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	2.110.043.068,00	1.846.123.177,00	263.919.891,00	14,30
68	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	60.364.182,00		60.364.182,00	100,00
69	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	570.572.288,00	(570.572.288,00)	(100,00)
70	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	7.059.600,00	0,00	7.059.600,00	100,00
71	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	188.577.900,00	0,00	188.577.900,00	100,00
72	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	687.937.953,00	0,00	687.937.953,00	100,00
73	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	992.197.243,00	(992.197.243,00)	(100,00)
74	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	48.502.000,00	0,00	48.502.000,00	100,00
75	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	101.469.121,00	21.935.100,00	79.534.021,00	362,59
76	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	0,00	19.970.500,00	(19.970.500,00)	(100,00)
77	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	0,00	34.479.500,00	(34.479.500,00)	(100,00)
78	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	49.192.000,00	0,00	49.192.000,00	100,00
79	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	12.787.200,00	0,00	12.787.200,00	100,00
80	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	4.373.400,00	9.887.900,00	(5.514.500,00)	(55,77)
81	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	210.438.640,00	0,00	210.438.640,00	100,00
82	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor	142.625.779,00	0,00	142.625.779,00	100,00
83	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	13.321.999,00	0,00	13.321.999,00	100,00
84	Belanja PemeliharaanAlat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
85	Belanja PemeliharaanAlat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Jumlah		21.320.934.854,52	19.537.376.812,00	1.783.558.042,52	9,13

Adapun beban pemeliharaan berdasarkan OPD Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.194 Beban Pemeliharaan – LO Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	3.248.025.635,52	2.545.819.151,00	702.206.484,52	27,58
2	Dinas Kesehatan	1.699.303.334,00	1.426.599.757,00	272.703.577,00	19,12
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.649.807.269,00	3.115.200.690,00	534.606.579,00	17,16
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	730.173.807,00	1.104.735.435,00	(374.561.628,00)	(33,91)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	50.445.600,00	57.868.400,00	(7.422.800,00)	(12,83)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	172.116.780,00	150.036.150,00	22.080.630,00	14,72
7	Dinas Sosial	101.009.041,00	63.959.900,00	37.049.141,00	57,93
8	Dinas Tenaga Kerja	35.058.430,00	234.859.327,00	(199.800.897,00)	(85,07)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	67.935.164,00	50.948.200,00	16.986.964,00	33,34
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	44.580.550,00	22.199.000,00	22.381.550,00	100,82
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.258.166.880,00	796.546.965,00	461.619.915,00	57,95
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	225.335.876,00	251.244.825,00	(25.908.949,00)	(10,31)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.020.700,00	87.149.000,00	(72.128.300,00)	(82,76)
14	Dinas Perhubungan	1.452.423.186,00	543.530.595,00	908.892.591,00	167,22
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	154.358.630,00	147.206.400,00	7.152.230,00	4,86
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	36.609.200,00	9.316.000,00	27.293.200,00	292,97
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.431.000,00	203.939.150,00	(169.508.150,00)	(83,12)
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	57.877.832,00	124.103.550,00	(66.225.718,00)	(53,36)
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	328.055.640,00	215.316.188,00	112.739.452,00	52,36
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	116.694.700,00	125.539.600,00	(8.844.900,00)	(7,05)
21	Dinas Perikanan	128.856.679,00	96.342.900,00	32.513.779,00	33,75
22	Sekretariat Daerah	3.009.767.008,00	2.798.069.874,00	211.697.134,00	7,57
23	Inspektorat Daerah	70.380.350,00	59.706.000,00	10.674.350,00	17,88
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	390.702.225,00	192.946.600,00	197.755.625,00	102,49
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	589.579.497,00	765.429.500,00	(175.850.003,00)	(22,97)
26	Badan Pendapatan Daerah	76.462.750,00	130.295.000,00	(53.832.250,00)	(41,32)
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	45.156.200,00	31.123.000,00	14.033.200,00	45,09
28	Sekretariat DPRD	2.383.884.619,00	2.261.960.041,00	121.924.578,00	5,39
29	Kecamatan Bintan Utara	278.530.840,00	18.233.000,00	260.297.840,00	1.427,62
30	Kecamatan Bintan Pesisir	38.595.550,00	72.764.000,00	(34.168.450,00)	(46,96)
31	Kecamatan Tambelan	47.250.782,00	568.401.985,00	(521.151.203,00)	(91,69)
32	Kecamatan Mantang	46.556.756,00	9.350.000,00	37.206.756,00	397,93
33	Kecamatan Toapaya	39.152.268,00	186.012.624,00	(146.860.356,00)	(78,95)
34	Kecamatan Teluk Sebong	90.057.780,00	9.191.280,00	80.866.500,00	879,82
35	Kecamatan Teluk Bintan	128.307.220,00	200.309.186,00	(72.001.966,00)	(35,95)
36	Kecamatan Gunung Kijang	4.785.000,00	63.318.900,00	(58.533.900,00)	(92,44)
37	Kecamatan Bintan Timur	114.100.500,00	541.749.789,00	(427.649.289,00)	(78,94)
38	Kecamatan Seri Kuala Lobam	288.058.526,00	33.160.750,00	254.897.776,00	768,67
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	73.321.050,00	222.894.100,00	(149.573.050,00)	(67,10)
Jumlah		21.320.934.854,52	19.537.376.812,00	1.783.558.042,52	9,13

7.5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas – LO

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp41.028.919.990,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.195 Beban Perjalanan Dinas – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	25.340.640.366,00	13.121.728.713,00	12.218.911.653,00	93,12
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.449.679.624,00	11.801.171.115,00	3.648.508.509,00	30,92



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	162.600.000,00	0,00	162.600.000,00	100,00
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	100,00
Jumlah		41.028.919.990,00	24.922.899.828,00	16.106.020.162,00	64,62

Adapun beban perjalanan dinas berdasarkan OPD Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.196 Beban Perjalanan Dinas Per OPD – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	932.798.513,00	882.310.120,00	50.488.393,00	5,72
2	Dinas Kesehatan	7.875.033.374,00	5.788.292.499,00	2.086.740.875,00	36,05
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.091.418.246,00	1.576.381.650,00	515.036.596,00	32,67
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	770.275.387,00	418.489.624,00	351.785.763,00	84,06
5	Satuan Polisi Pamong Praja	131.420.780,00	57.672.706,00	73.748.074,00	127,87
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	330.746.917,00	121.394.893,00	209.352.024,00	172,46
7	Dinas Sosial	653.998.636,00	357.204.748,00	296.793.888,00	83,09
8	Dinas Tenaga Kerja	313.713.982,00	171.508.495,00	142.205.487,00	82,91
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	892.383.319,00	568.510.311,00	323.873.008,00	56,97
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	359.895.815,00	259.063.243,00	100.832.572,00	38,92
11	Dinas Lingkungan Hidup	626.503.818,00	247.017.067,00	379.486.751,00	153,63
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	167.213.591,00	189.595.818,00	(22.382.227,00)	(11,81)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	472.296.138,00	326.150.166,00	146.145.972,00	44,81
14	Dinas Perhubungan	284.613.621,00	563.238.814,00	(278.625.193,00)	(49,47)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	549.661.874,00	276.676.566,00	272.985.308,00	98,67
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1.222.823.950,00	555.154.305,00	667.669.645,00	120,27
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	749.304.993,00	293.470.023,00	455.834.970,00	155,33
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	216.653.156,00	121.044.981,00	95.608.175,00	78,99
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	385.613.900,00	136.649.300,00	248.964.600,00	182,19
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	274.092.950,00	155.454.465,00	118.638.485,00	76,32
21	Dinas Perikanan	639.473.527,00	533.349.920,00	106.123.607,00	19,90
22	Sekretariat Daerah	3.732.855.782,00	1.943.934.639,00	1.788.921.143,00	92,03
23	Inspektorat Daerah	1.525.609.985,00	1.143.612.019,00	381.997.966,00	33,40
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.492.666.956,00	1.049.714.881,00	442.952.075,00	42,20
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.207.620.796,00	643.706.753,00	563.914.043,00	87,60
26	Badan Pendapatan Daerah	618.265.984,00	405.815.826,00	212.450.158,00	52,35
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.135.927.272,00	321.143.984,00	814.783.288,00	253,71
28	Sekretariat DPRD	10.244.431.592,00	5.247.506.551,00	4.996.925.041,00	95,22
29	Kecamatan Bintan Utara	118.809.717,00	68.400.000,00	50.409.717,00	73,70
30	Kecamatan Bintan Pesisir	75.032.000,00	60.400.000,00	14.632.000,00	24,23
31	Kecamatan Tambelan	140.287.567,00	80.348.000,00	59.939.567,00	74,60



No	Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
32	Kecamatan Mantang	121.483.200,00	22.050.000,00	99.433.200,00	450,94
33	Kecamatan Toapaya	87.260.517,00	29.225.000,00	58.035.517,00	198,58
34	Kecamatan Teluk Sebong	83.286.401,00	32.325.000,00	50.961.401,00	157,65
35	Kecamatan Teluk Bintan	109.460.993,00	35.400.000,00	74.060.993,00	209,21
36	Kecamatan Gunung Kijang	131.831.152,00	153.125.195,00	(21.294.043,00)	(13,91)
37	Kecamatan Bintan Timur	48.450.000,00	22.200.000,00	26.250.000,00	118,24
38	Kecamatan Seri Kuala Lobam	76.488.167,00	2.250.000,00	74.238.167,00	3.299,47
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	139.215.422,00	63.112.266,00	76.103.156,00	120,58
Jumlah		41.028.919.990,00	24.922.899.828,00	16.106.020.162,00	64,62

**Tabel 7.5.197 Rincian Perbedaan Beban Barang Antara LRA Dengan LO
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Keterangan	(Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa - LRA	349.842.979.580,45
2	Jumlah	349.842.979.580,45
3	Beban Persediaan – LO	99.857.517.525,56
4	Beban Jasa – LO	190.006.537.020,93
5	Beban Pemeliharaan – LO	21.320.934.854,52
6	Beban Perjalanan Dinas – LO	41.028.919.990,00
7	Jumlah (3+4+5+6)	352.213.909.391,01
8	Selisih (7-2)	2.370.929.810,56

**Tabel 7.5.198 Selisih Belanja Barang LRA dan Beban Barang dan Jasa LO
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penambahan		
1	Mutasi Tambah Utang Beban	1.997.351.673,57
2	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Persediaan	7.437.148.932,00
3	Mutasi Kurang Beban Dibayar Dimuka	41.462.000,00
Jumlah		9.475.962.605,57
Pengurangan		
1	Mutasi Kurang Persediaan	84.307.734,01
2	Kapitalisasi Beban ke Aset Tetap	6.856.449.842,00
3	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa ke Beban Hibah	38.606.500,00
4	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa ke Persediaan	59.396.100,00
5	Koreksi kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa	59.542.730,00
6	Koreksi Beban Jasa ke beban lain lain	6.729.889,00
Jumlah		7.105.032.795,01
Selisih		2.370.929.810,56

7.5.4.2.1.6 Beban Subsidi

Beban subsidi yang terjadi pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.690.823.167,00 merupakan program bunga 0% Kredit Mikro Bangkit pada PD BPR Bintan.

**7.5.4.2.1.7 Beban Hibah – LO**

Beban Hibah adalah beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp54.414.807.656,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.199 Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Hibah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	5.218.906.842,00	7.879.120.255,00	(2.660.213.413,00)	(33,76)
2	Dinas Kesehatan	4.056.377.342,00	190.017.743,00	3.866.359.599,00	2.034,74
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	930.407.841,00	3.119.943.490,00	(2.189.535.649,00)	(70,18)
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	4.620.263.365,00	4.876.962.871,00	(256.699.506,00)	(5,26)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.295.560.000,00	2.000.000.000,00	(704.440.000,00)	(35,22)
6	Dinas Sosial	103.645.140,00	145.213.400,00	(41.568.260,00)	(28,63)
7	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.914.393.783,00	2.832.510.123,00	(918.116.340,00)	(32,41)
8	Dinas Perhubungan	0,00	64.680.000,00	(64.680.000,00)	(100,00)
9	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	12.134.642.200,00	5.177.988.730,00	6.956.653.470,00	134,35
10	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	8.305.961.600,00	1.378.233.000,00	6.927.728.600,00	502,65
11	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	465.234.450,00	99.341.000,00	365.893.450,00	368,32
12	Dinas Perikanan	8.380.493.409,00	13.752.373.446,00	(5.371.880.037,00)	(39,06)
13	Sekretariat Daerah	3.770.385.206,00	2.739.832.150,00	1.030.553.056,00	37,61
14	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	110.771.700,00	1.010.420.000,00	(899.648.300,00)	(89,04)
15	Kecamatan Bintan Utara	595.126.167,00	629.563.000,00	(34.436.833,00)	(5,47)
16	Kecamatan Bintan Pesisir	174.769.500,00	0,00	174.769.500,00	100,00
17	Kecamatan Tambelan	161.809.140,00	18.865.000,00	142.944.140,00	757,72
18	Kecamatan Mantang	98.878.800,00	50.270.000,00	48.608.800,00	96,70
19	Kecamatan Toapaya	74.983.608,00	0,00	74.983.608,00	100,00
20	Kecamatan Teluk Sebong	69.359.460,00	69.355.000,00	4.460,00	0,01
21	Kecamatan Teluk Bintan	295.126.800,00	396.008.500,00	(100.881.700,00)	(25,47)
22	Kecamatan Gunung Kijang	74.281.200,00	604.517.760,00	(530.236.560,00)	(87,71)
23	Kecamatan Bintan Timur	617.647.090,00	461.598.500,00	156.048.590,00	33,81
24	Kecamatan Seri Kuala Lobam	198.401.400,00	53.105.800,00	145.295.600,00	273,60
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	747.381.613,00	747.381.613,00	0,00	0,00
Jumlah		54.414.807.656,00	48.297.301.381,00	6.117.506.275,00	12,67

Adapun beban hibah berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.200 Beban Hibah Per Jenis Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Hibah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.295.560.000,00	3.500.000.000,00	(2.204.440.000,00)	(62,98)
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	282.041.562,00	1.582.843.490,00	(1.300.801.928,00)	(82,18)
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.140.909.700,00	1.692.716.400,00	6.448.193.300,00	380,94



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Beban Hibah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.260.324.761,00	0,00	1.260.324.761,00	100,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.599.115.344,00	5.226.658.795,00	(1.627.543.451,00)	(31,14)
6	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.877.260.875,00	0,00	2.877.260.875,00	100,00
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00
8	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	33.387.629.187,00	35.436.483.340,00	(2.048.854.153,00)	(5,78)
9	Beban Hibah kepada Koperasi	0,00	221.200.000,00	(221.200.000,00)	(100,00)
10	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.187.250.597,00	0,00	2.187.250.597,00	100,00
11	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	747.381.613,00	747.381.613,00	0,00	0,00
12	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	487.334.017,00	(109.982.257,00)	597.316.274,00	(543,10)
Jumlah		54.414.807.656,00	48.297.301.381,00	6.117.506.275,00	12,67

Adapun beban hibah berdasarkan jenisnya untuk masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.201 Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Beban Hibah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	1.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(100,00)
2	Satuan Polisi Pamong Praja	1.295.560.000,00	2.000.000.000,00	(704.440.000,00)	(35,22)
Jumlah		1.295.560.000,00	3.500.000.000,00	(2.204.440.000,00)	(62,98)

**Tabel 7.5.202 Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Beban Hibah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	1.169.943.490,00	(1.169.943.490,00)	(100,00)
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	110.771.700,00	412.900.000,00	(302.128.300,00)	(73,17)
3	Sekretariat Daerah	171.269.862,00	0,00	171.269.862,00	100,00
Jumlah		282.041.562,00	1.582.843.490,00	(1.300.801.928,00)	(82,18)

**Tabel 7.5.203 Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Beban Hibah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Kesehatan	268.999.600,00	0,00	268.999.600,00	100,00
2	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	7.871.910.100,00	1.200.000.000,00	6.671.910.100,00	555,99
3	Kecamatan Gunung Kijang	0,00	492.716.400,00	(492.716.400,00)	(100,00)



No	Beban Hibah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
	Jumlah	8.140.909.700,00	1.692.716.400,00	6.448.193.300,00	380,94

Tabel 7.5.204 Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Hibah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	873.705.000,00	0,00	873.705.000,00	100,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	386.619.761,00	0,00	386.619.761,00	100,00
	Jumlah	1.260.324.761,00	0,00	1.260.324.761,00	100,00

Tabel 7.5.205 Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Hibah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	0,00	2.043.556.645,00	(2.043.556.645,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)	(100,00)
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	68.470.000,00	(68.470.000,00)	(100,00)
4	Sekretariat Daerah	3.599.115.344,00	2.739.832.150,00	859.283.194,00	31,36
5	Kecamatan Bintan Timur	0,00	74.800.000,00	(74.800.000,00)	(100,00)
	Jumlah	3.599.115.344,00	5.226.658.795,00	(1.627.543.451,00)	(31,14)

Tabel 7.5.206 Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Hibah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	2.157.951.245,00	0,00	2.157.951.245,00	100,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	423.989.680,00	0,00	423.989.680,00	100,00
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	275.329.950,00	0,00	275.329.950,00	100,00
4	Kecamatan Bintan Timur	19.990.000,00	0,00	19.990.000,00	100,00
	Jumlah	2.877.260.875,00	0,00	2.877.260.875,00	100,00

Tabel 7.5.207 Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Hibah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00
	Jumlah	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00

Tabel 7.5.208 Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Hibah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	0,00	5.835.563.610,00	(5.835.563.610,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	3.787.377.742,00	0,00	3.787.377.742,00	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	443.073.824,00	450.000.000,00	(6.926.176,00)	(1,54)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.809.653.924,00	4.808.492.871,00	(998.838.947,00)	(20,77)
5	Dinas Sosial	103.645.140,00	145.213.400,00	(41.568.260,00)	(28,63)
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.914.393.783,00	2.832.510.123,00	(918.116.340,00)	(32,41)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Beban Hibah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
7	Dinas Perhubungan	0,00	64.680.000,00	(64.680.000,00)	(100,00)
8	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	12.134.642.200,00	4.956.788.730,00	7.177.853.470,00	144,81
9	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	434.051.500,00	178.233.000,00	255.818.500,00	143,53
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	39.904.500,00	99.341.000,00	(59.436.500,00)	(59,83)
11	Dinas Perikanan	8.380.493.409,00	13.752.373.446,00	(5.371.880.037,00)	(39,06)
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	597.520.000,00	(597.520.000,00)	(100,00)
13	Kecamatan Bintang Utara	595.126.167,00	629.563.000,00	(34.436.833,00)	(5,47)
14	Kecamatan Tambelan	161.809.140,00	18.865.000,00	142.944.140,00	757,72
15	Kecamatan Mantang	98.878.800,00	50.270.000,00	48.608.800,00	96,70
16	Kecamatan Teluk Sebong	69.359.460,00	69.355.000,00	4.460,00	0,01
17	Kecamatan Teluk Bintang	295.126.800,00	396.008.500,00	(100.881.700,00)	(25,47)
18	Kecamatan Gunung Kijang	74.281.200,00	111.801.360,00	(37.520.160,00)	(33,56)
19	Kecamatan Bintang Timur	597.657.090,00	386.798.500,00	210.858.590,00	54,51
20	Kecamatan Toapaya	74.983.608,00	0,00	74.983.608,00	100,00
21	Kecamatan Bintang Pesisir	174.769.500,00	0,00	174.769.500,00	100,00
22	Kecamatan Seri Kuala Lobam	198.401.400,00	53.105.800,00	145.295.600,00	273,60
Jumlah		33.387.629.187,00	35.436.483.340,00	(2.048.854.153,00)	(5,78)

Tabel 7.5.209 Beban Hibah Kepada Koperasi Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Beban Hibah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan perdagangan	0,00	221.200.000,00	(221.200.000,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	221.200.000,00	(221.200.000,00)	(100,00)

Tabel 7.5.210 Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Beban Hibah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	2.187.250.597,00	0,00	2.187.250.597,00	100,00
Jumlah		2.187.250.597,00	0,00	2.187.250.597,00	100,00

Tabel 7.5.211 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Beban Hibah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	747.381.613,00	747.381.613,00	0,00	0,00
Jumlah		747.381.613,00	747.381.613,00	0,00	0,00

Tabel 7.5.212 Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Beban Hibah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	487.334.017,00	(109.982.257,00)	597.316.274,00	(543,10)
Jumlah		487.334.017,00	(109.982.257,00)	597.316.274,00	(543,10)



Tabel 7.5.213 Rincian Perbedaan Beban Hibah Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Hibah	54.414.807.656,00	51.051.247.835,00	3.363.559.821,00

Tabel 7.5.214 Selisih Belanja Hibah LRA dan Beban Hibah LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penambahan		
1	Reklasifikasi dari Beban Jasa Konsultasi ke Beban Hibah	38.606.500,00
2	Penambahan dari Reklasifikasi Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar ke Beban Hibah akibat Penghapusan Aset Tetap	4.556.753.321,00
Jumlah		4.595.359.821,00
Pengurangan		
1	Reklasifikasi ke Persediaan yang Diserahkan ke Pihak Ketiga/Lainnya	1.231.800.000,00
Jumlah		1.231.800.000,00
Selisih		3.363.559.821,00

7.5.4.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp7.549.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.215 Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Beban Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.061.000.000,00	0,00	1.061.000.000,00	100,00
2	Dinas Sosial	6.488.600.000,00	3.939.600.000,00	2.549.000.000,00	64,70
Jumlah		7.549.600.000,00	3.939.600.000,00	3.610.000.000,00	91,63

Adapun beban bantuan sosial berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.216 Beban Bantuan Sosial Berdasarkan Jenisnya Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Beban Bantuan Sosial	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.189.000.000,00	0,00	1.189.000.000,00	100,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	6.060.600.000,00	3.939.600.000,00	2.121.000.000,00	53,84
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	100,00
Jumlah		7.549.600.000,00	3.939.600.000,00	3.610.000.000,00	91,63

Tabel 7.5.217 Rincian Perbedaan Beban Bantuan Sosial Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial	7.549.600.000,00	7.549.600.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

7.5.4.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang

Beban tersebut adalah Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.617.545.668,17 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.218 Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	7.523.668,34	(134.626.341,13)	142.150.009,47	(105,59)
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	152.766,51	0,00	152.766,51	100,00
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	1.026.478,50	(10.300.560,19)	11.327.038,69	(109,97)
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	(1.724.724,78)	0,00	(1.724.724,78)	(100,00)
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	113.245,00	0,00	113.245,00	100,00
6	Beban Penyisihan Pajak Hiburan	0,00	491.433.833,34	(491.433.833,34)	(100,00)
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	50.838.549,84	73.406.414,88	(22.567.865,04)	(30,74)
8	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Kain	3.040.591,00	0,00	3.040.591,00	100,00
9	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	(187.681,70)	181.147,62	(368.829,32)	(203,61)
10	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	0,00	(2.900,00)	2.900,00	(100,00)
11	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	31.365,00	9.225,00	22.140,00	240,00
12	Beban Penyisihan Piutang Pajak Granit/Andesit	(549.068.830,80)	0,00	(549.068.830,80)	(100,00)
13	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(65.140,00)	(614.372.068,53)	614.306.928,53	(99,99)
14	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.910.143.328,02	3.151.633.078,08	758.510.249,94	24,07
15	Beban Penyisihan Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	(35.000,00)	778.682,00	(813.682,00)	(104,49)
16	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	0,00	(7.050.000,00)	7.050.000,00	(100,00)
17	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	8.432.385,00	(8.432.385,00)	(100,00)
18	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(2.812.020,00)	0,00	(2.812.020,00)	(100,00)
19	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	51.055.191,20	0,00	51.055.191,20	100,00
20	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	20.768.818,62	(20.768.818,62)	(100,00)
21	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	(1.400.000,00)	(5.600.000,00)	4.200.000,00	(75,00)
22	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	1.163.380.036,03	(1.163.380.036,03)	(100,00)
23	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	(12.769.779,22)	0,00	(12.769.779,22)	(100,00)
24	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan	(9.637.683,22)	0,00	(9.637.683,22)	(100,00)
25	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.188.938,75	0,00	1.188.938,75	100,00
26	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	(760,45)	0,00	(760,45)	(100,00)
27	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	6.752,70	0,00	6.752,70	100,00
28	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	95.003.399,58	0,00	95.003.399,58	100,00
29	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.995.471.789,38	0,00	1.995.471.789,38	100,00
30	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	39.900,00	0,00	39.900,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
	Bangunan (BPHTB)				
31	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	5.185.399,87	(5.185.399,87)	(100,00)
32	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	45.216.110,60	0,00	45.216.110,60	100,00
33	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	6.460.708,21	1.992.508,88	4.468.199,33	224,25
34	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	6.103.516,29	(6.103.516,29)	(100,00)
35	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	5.144.835,84	0,00	5.144.835,84	100,00
36	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	(18.025,00)	(9.000,00)	(9.025,00)	100,28
37	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(1.500.000,00)	22.145.772,31	(23.645.772,31)	(106,77)
38	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	24.307.694,87	0,00	24.307.694,87	100,00
	Jumlah	5.617.545.668,17	4.173.489.948,07	1.444.055.720,10	34,60

7.5.4.2.1.10 Beban lain-lain

Beban tersebut adalah Beban lain-lain periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.835.315.329,95 adalah beban lain-lain atas ekstrakomptabel dari belanja modal aset tetap karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap.

Tabel 7.5.219 Beban Lain-Lain Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Lain-Lain	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	1.442.369.351,97	1.749.072.013,00	(306.702.661,03)	(17,54)
2	Dinas Kesehatan	460.588.471,00	660.431.637,00	(199.843.166,00)	(30,26)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	73.330.820,57	32.403.800,00	40.927.020,57	126,30
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.259.823.123,41	0,00	6.259.823.123,41	100,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	11.108.300,00	(11.108.300,00)	(100,00)
6	Dinas Sosial	6.980.000,00	3.647.600,00	3.332.400,00	91,36
7	Dinas Tenaga Kerja	9.999.000,00	0,00	9.999.000,00	100,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24.675.670,00	9.164.030,00	15.511.640,00	169,27
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	22.681.910,00	770.000,00	21.911.910,00	2.845,70
10	Dinas Lingkungan Hidup	70.973.444,00	0,33	70.973.443,67	21.507.104.142,42
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.520.489,00	5.307.500,00	14.212.989,00	267,79
12	Dinas Perhubungan	71.482.400,00	26.214.650,00	45.267.750,00	172,68
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	5.199.990,00	0,00	5.199.990,00	100,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	100,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	20.501.408,00	0,00	20.501.408,00	100,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11.366.440,00	110.385.000,00	(99.018.560,00)	(89,70)
18	Dinas Perikanan	106.458.215,00	685.285.700,00	(578.827.485,00)	(84,47)
19	Sekretariat Daerah	537.121.511,00	2.810.500,00	534.311.011,00	19.011,24
20	Badan Perencanaan,	14.390.381,00	0,00	14.390.381,00	100,00



No	Beban Lain-Lain	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
	Penelitian dan Pengembangan Daerah				
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	70.301.625,00	1.881.000,20	68.420.624,80	3.637,46
22	Badan Pendapatan Daerah	6.632.250,00	1.650.000,00	4.982.250,00	301,95
23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
24	Sekretariat DPRD	44.640.000,00	6.160.000,00	38.480.000,00	624,68
25	Kecamatan Bintan Utara	127.337.190,00	26.035.644,00	101.301.546,00	389,09
26	Kecamatan Bintan Pesisir	31.680.000,00	3.470.000,00	28.210.000,00	812,97
27	Kecamatan Tambelan	52.723.140,00	26.356.802,00	26.366.338,00	100,04
28	Kecamatan Mantang	0,00	880.000,00	(880.000,00)	(100,00)
29	Kecamatan Toapaya	67.497.000,00	76.164.010,00	(8.667.010,00)	(11,38)
30	Kecamatan Teluk Sebong	129.261.000,00	5.704.406,00	123.556.594,00	2.165,99
31	Kecamatan Teluk Bintan	28.121.500,00	3.667.461,00	24.454.039,00	666,78
32	Kecamatan Gunung Kijang	7.167.000,00	18.407.614,00	(11.240.614,00)	(61,07)
33	Kecamatan Bintan Timur	48.708.000,00	225.063.388,00	(176.355.388,00)	(78,36)
34	Kecamatan Seri Kuala Lobam	51.084.000,00	42.078.413,00	9.005.587,00	21,40
	Jumlah	9.835.315.329,95	3.734.119.468,53	6.101.195.861,42	163,39

Adapun beban lain-lain berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.220 Beban Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Lain-Lain	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Beban Ekstrakomptabel	9.828.582.541,00	3.734.119.468,00	6.094.463.073	163,21
2	Beban Kliring Atas Penjualan Asset Tetap Peralatan Dan Mesin Secara Lelang	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
3	Pembulatan Nilai Belanja Modal/Aset Tetap	(0,05)	0,33	(0,38)	(115,15)
4	Pembulatan Kelebihan Setor Utang PFK	0,00	0,20	(0,20)	(100,00)
5	Reklasifikasi atas hasil audited BPK (Kekurangan Kas)	6.729.889,00	0,00	6.729.889,00	100,00
	Jumlah	9.835.315.329,95	3.734.119.468,53	6.101.195.861,42	163,39

7.5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada TA 2022 adalah sebesar Rp142.233.047.650,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.221 Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	47.847.136.169,00	50.123.805.027,00	(2.276.668.858,00)	(4,54)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.956.803.602,00	32.454.466.514,00	(8.497.662.912,00)	(26,18)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	70.177.341.166,00	73.402.803.881,00	(3.225.462.715,00)	(4,39)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	3.166.112.177,00	(3.166.112.177,00)	(100,00)
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	251.766.713,00	198.771.713,00	52.995.000,00	26,66
	Jumlah	142.233.047.650,00	159.345.959.312,00	(17.112.911.662,00)	(10,74)

**7.5.4.2.2.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Beban Penyusutan Peralatan Mesin Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp47.847.136.169,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.222 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	8.947.317.996,00	5.475.092.718,00	3.472.225.278,00	63,42
2	Dinas Kesehatan	19.482.573.118,00	17.483.582.052,00	1.998.991.066,00	11,43
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	906.129.583,00	904.608.483,00	1.521.100,00	0,17
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	940.540.441,00	1.746.283.632,00	(805.743.191,00)	(46,14)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	244.120.267,00	321.968.778,00	(77.848.511,00)	(24,18)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	474.994.634,00	587.328.929,00	(112.334.295,00)	(19,13)
7	Dinas Sosial	213.078.864,00	303.631.090,00	(90.552.226,00)	(29,82)
8	Dinas Tenaga Kerja	186.447.409,00	194.495.137,00	(8.047.728,00)	(4,14)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	648.245.656,00	618.713.785,00	29.531.871,00	4,77
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	213.764.887,00	321.387.969,00	(107.623.082,00)	(33,49)
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.510.679.878,00	913.562.029,00	597.117.849,00	65,36
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	848.928.895,00	755.251.552,00	93.677.343,00	12,40
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	160.268.091,00	228.241.695,00	(67.973.604,00)	(29,78)
14	Dinas Perhubungan	1.183.433.717,00	1.394.744.724,00	(211.311.007,00)	(15,15)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	645.261.204,00	652.764.651,00	(7.503.447,00)	(1,15)
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	426.398.521,00	460.521.366,00	(34.122.845,00)	(7,41)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	307.939.769,00	336.547.089,00	(28.607.320,00)	(8,50)
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	80.370.021,00	88.450.165,00	(8.080.144,00)	(9,14)
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	320.239.127,00	358.849.077,00	(38.609.950,00)	(10,76)
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	415.026.540,00	457.268.190,00	(42.241.650,00)	(9,24)
21	Dinas Perikanan	721.222.912,00	6.389.609.277,00	(5.668.386.365,00)	(88,71)
22	Sekretariat Daerah	2.366.638.456,00	2.814.643.825,00	(448.005.369,00)	(15,92)
23	Inspektorat Daerah	65.441.361,00	88.978.106,00	(23.536.745,00)	(26,45)
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	366.818.186,00	479.805.512,00	(112.987.326,00)	(23,55)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.106.940.942,00	1.325.643.574,00	(218.702.632,00)	(16,50)
26	Badan Pendapatan Daerah	702.390.380,00	735.671.123,00	(33.280.743,00)	(4,52)
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	133.519.282,00	172.607.406,00	(39.088.124,00)	(22,65)
28	Sekretariat DPRD	1.109.574.876,00	990.953.812,00	118.621.064,00	11,97
29	Kecamatan Bintan Utara	271.612.544,00	356.501.313,00	(84.888.769,00)	(23,81)
30	Kecamatan Bintan Pesisir	108.760.395,00	139.464.478,00	(30.704.083,00)	(22,02)
31	Kecamatan Tambelan	231.730.370,00	307.094.944,00	(75.364.574,00)	(24,54)
32	Kecamatan Mantang	142.675.788,00	167.780.180,00	(25.104.392,00)	(14,96)
33	Kecamatan Toapaya	524.383.308,00	592.925.706,00	(68.542.398,00)	(11,56)
34	Kecamatan Teluk Sebong	346.098.127,00	369.659.250,00	(23.561.123,00)	(6,37)
35	Kecamatan Teluk Bintan	179.399.939,00	237.004.560,00	(57.604.621,00)	(24,31)
36	Kecamatan Gunung Kijang	484.463.733,00	516.885.906,00	(32.422.173,00)	(6,27)
37	Kecamatan Bintan Timur	440.026.214,00	430.205.543,00	9.820.671,00	2,28
38	Kecamatan Seri Kuala Lobam	290.790.818,00	353.536.295,00	(62.745.477,00)	(17,75)
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	98.889.920,00	51.541.106,00	47.348.814,00	91,87
	Jumlah	47.847.136.169,00	50.123.805.027,00	(2.276.668.858,00)	(4,54)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Adapun beban penyusutan peralatan dan mesin berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.223 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Beban Penyusutan Alat Besar	845.852.166,00	0,00	845.852.166,00	100,00
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	5.236.801.283,00	6.868.337.602,00	(1.631.536.319,00)	(23,75)
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1.147.574.439,00	3.735.791.430,00	(2.588.216.991,00)	(69,28)
4	Beban Penyusutan Alat Besar	0,00	872.256.745,00	(872.256.745,00)	(100,00)
5	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	591.250,00	197.084,00	394.166,00	200,00
6	Beban Penyusutan Alat Kantor Dan Rumah Tangga	12.207.751.351,00	11.344.567.012,00	863.184.339,00	7,61
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Dan Kesehatan	13.426.897.480,00	12.140.917.309,00	1.285.980.171,00	10,59
8	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	181.097.839,00	123.603.531,00	57.494.308,00	46,52
9	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	1.840.886.997,00	1.653.836.496,00	187.050.501,00	11,31
10	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	0,00	133.640.831,00	(133.640.831,00)	(100,00)
11	Beban Penyusutan Alat Pertanian	121.425.638,00	2.387.822.791,00	(2.266.397.153,00)	(94,91)
12	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.776.360.817,00	1.891.543.798,00	(115.182.981,00)	(6,09)
13	Beban Penyusutan Komputer	10.300.815.431,00	8.302.459.407,00	1.998.356.024,00	24,07
14	Beban Penyusutan Peralatan Olah Raga	75.078.855,00	21.940.708,00	53.138.147,00	242,19
15	Beban Penyusutan Alat Peraga	105.249.594,00	0,00	105.249.594,00	100,00
16	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	67.505.300,00	11.998.541,00	55.506.759,00	462,61
17	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	513.247.729,00	634.891.742,00	(121.644.013,00)	(19,16)
Jumlah		47.847.136.169,00	50.123.805.027,00	(2.276.668.858,00)	(4,54)

7.5.4.2.2.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp23.956.803.602,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.224 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	7.029.118.190,00	7.038.290.825,00	(9.172.635,00)	(0,13)
2	Dinas Kesehatan	2.556.009.940,00	2.333.140.231,00	222.869.709,00	9,55
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.145.957.965,00	2.685.648.130,00	460.309.835,00	17,14
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.479.439.022,00	2.449.470.006,00	29.969.016,00	1,22
5	Satuan Polisi Pamong Praja	6.670.334,00	6.670.334,00	0,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.104.960,00	2.104.960,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial	302.285.211,00	304.851.877,00	(2.566.666,00)	(0,84)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	90.468.524,00	74.652.481,00	15.816.043,00	21,19
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	130.405.634,00	139.124.870,00	(8.719.236,00)	(6,27)
10	Dinas Lingkungan Hidup	96.405.665,00	92.179.239,00	4.226.426,00	4,59
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	28.160.918,00	(28.160.918,00)	(100,00)



No	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
12	Dinas Perhubungan	275.053.314,00	273.795.250,00	1.258.064,00	0,46
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	955.068,00	955.068,00	0,00	0,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	90.784.615,00	88.205.848,00	2.578.767,00	2,92
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	272.958.947,00	7.522.923.443,00	(7.249.964.496,00)	(96,37)
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	25.017.231,00	12.489.414,00	12.527.817,00	100,31
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	879.630.008,00	876.944.717,00	2.685.291,00	0,31
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	241.699.184,00	241.699.184,00	0,00	0,00
19	Dinas Perikanan	171.945.844,00	961.668.284,00	(789.722.440,00)	(82,12)
20	Sekretariat Daerah	1.757.104.078,00	1.706.462.232,00	50.641.846,00	2,97
21	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	75.559.108,00	1.512.871.100,00	(1.437.311.992,00)	(95,01)
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	510.844.721,00	281.957.808,00	228.886.913,00	81,18
23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	134.559.054,00	134.559.054,00	0,00	0,00
24	Sekretariat DPRD	1.097.483.438,00	1.095.819.644,00	1.663.794,00	0,15
25	Kecamatan Bintan Utara	322.678.421,00	316.459.956,00	6.218.465,00	1,97
26	Kecamatan Bintan Pesisir	250.846.618,00	250.846.618,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Tambelan	296.089.071,00	296.172.560,00	(83.489,00)	(0,03)
28	Kecamatan Mantang	242.292.968,00	242.292.968,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Toapaya	212.600.670,00	209.942.796,00	2.657.874,00	1,27
30	Kecamatan Teluk Sebong	373.627.268,00	370.768.461,00	2.858.807,00	0,77
31	Kecamatan Teluk Bintan	220.742.929,00	220.069.326,00	673.603,00	0,31
32	Kecamatan Gunung Kijang	222.181.087,00	222.181.087,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Bintan Timur	266.237.593,00	279.557.694,00	(13.320.101,00)	(4,76)
34	Kecamatan Seri Kuala Lobam	172.546.922,00	169.405.456,00	3.141.466,00	1,85
35	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.500.000,00	12.124.675,00	(7.624.675,00)	(62,89)
	Jumlah	23.956.803.602,00	32.454.466.514,00	(8.497.662.912,00)	(26,18)

Adapun beban penyusutan gedung dan bangunan berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.225 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Bangunan Gedung	23.697.769.210,00	32.229.258.684,00	(8.531.489.474,00)	(26,47)
2	Monumen	236.383.939,00	170.749.642,00	65.634.297,00	38,44
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	22.650.453,00	54.458.188,00	(31.807.735,00)	(58,41)
	Jumlah	23.956.803.602,00	32.454.466.514,00	(8.497.662.912,00)	(26,18)

7.5.4.2.2.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp70.177.341.166,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.226 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	21.303.913,00	20.099.176,00	1.204.737,00	5,99
2	Dinas Kesehatan	338.576.268,00	278.513.343,00	60.062.925,00	21,57
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51.541.106.646,00	56.183.860.271,00	(4.642.753.625,00)	(8,26)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.937.051.042,00	11.682.007.823,00	1.255.043.219,00	10,74
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.247.125,00	1.247.125,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial	1.222.916,00	1.455.582,00	(232.666,00)	(15,98)
7	Dinas Tenaga Kerja	499.766,00	749.741,00	(249.975,00)	(33,34)



No	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.142.089,00	10.569.745,00	1.572.344,00	14,88
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.959.462,00	16.553.466,00	(594.004,00)	(3,59)
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.547.111,00	2.547.111,00	0,00	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	640.750,00	790.625,00	(149.875,00)	(18,96)
12	Dinas Perhubungan	2.528.264.658,00	2.400.196.747,00	128.067.911,00	5,34
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00	0,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	13.248.679,00	2.832.723,00	10.415.956,00	367,70
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.527.250,00	2.774.750,00	(247.500,00)	(8,92)
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	494.780,00	(494.780,00)	(100,00)
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25.809.141,00	19.521.625,00	6.287.516,00	32,21
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00	0,00
19	Dinas Perikanan	171.204.305,00	517.421.291,00	(346.216.986,00)	(66,91)
20	Sekretariat Daerah	23.268.501,00	43.478.434,00	(20.209.933,00)	(46,48)
21	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.574.198,00	4.119.017,00	(544.819,00)	(13,23)
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	885.337.488,00	882.735.222,00	2.602.266,00	0,29
23	Badan Pendapatan Daerah	485.375,00	485.375,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.933.955,00	2.012.143,00	(78.188,00)	(3,89)
25	Sekretariat DPRD	12.413.625,00	11.893.625,00	520.000,00	4,37
26	Kecamatan Bintan Utara	510.173.722,00	387.093.258,00	123.080.464,00	31,80
27	Kecamatan Bintan Pesisir	3.006.602,00	3.798.602,00	(792.000,00)	(20,85)
28	Kecamatan Tambelan	69.108.382,00	72.540.095,00	(3.431.713,00)	(4,73)
29	Kecamatan Mantang	2.947.615,00	2.947.615,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Toapaya	110.780.123,00	100.166.808,00	10.613.315,00	10,60
31	Kecamatan Teluk Sebang	152.428.443,00	102.555.540,00	49.872.903,00	48,63
32	Kecamatan Teluk Bintan	46.990.882,00	35.603.717,00	11.387.165,00	31,98
33	Kecamatan Gunung Kijang	87.184.470,00	85.729.645,00	1.454.825,00	1,70
34	Kecamatan Bintan Timur	416.618.161,00	338.074.168,00	78.543.993,00	23,23
35	Kecamatan Seri Kuala Lobam	232.907.343,00	183.103.533,00	49.803.810,00	27,20
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.569.660,00	1.569.660,00	0,00	0,00
	Jumlah	70.177.341.166,00	73.402.803.881,00	(3.225.462.715,00)	(4,39)

Adapun beban penyusutan gedung dan bangunan berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.227 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Bangunan Air	11.135.566.241,00	10.844.317.784,00	291.248.457,00	2,69
2	Instalasi	1.642.169.222,00	1.738.045.972,00	(95.876.750,00)	(5,52)
3	Jalan Dan Jembatan	54.696.107.592,00	58.081.624.878,00	(3.385.517.286,00)	(5,83)
4	Jaringan	2.703.498.111,00	2.738.815.247,00	(35.317.136,00)	(1,29)
	Jumlah	70.177.341.166,00	73.402.803.881,00	(3.225.462.715,00)	(4,39)

7.5.4.2.2.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat beban penyusutan Aset Tetap Lainnya untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

**Tabel 7.5.228 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	3.166.112.177,00	(3.166.112.177,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	3.166.112.177,00	(3.166.112.177,00)	(100,00)

Adapun beban penyusutan Aset Tetap Lainnya berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.229 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Aset tetap Dalam renovasi	0,00	3.166.112.177,00	(3.166.112.177,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	3.166.112.177,00	(3.166.112.177,00)	(100,00)

7.5.4.2.2.5 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp251.766.713,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.230 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	43.429.100,00	34.354.100,00	9.075.000,00	26,42
2	Dinas Kesehatan	43.394.890,00	40.828.223,00	2.566.667,00	6,29
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.120.559,00	0,00	33.120.559,00	100,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	5.203.837,00		5.203.837,00	100,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27.995.000,00	27.995.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Perhubungan	21.774.990,00	21.517.100,00	257.890,00	1,20
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	204.583,00	0,00	204.583,00	0,00
10	Dinas Perikanan	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	0,00
11	Sekretariat Daerah	12.736.800,00	12.736.800,00	0,00	0,00
12	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.160.563,00	9.876.350,00	3.284.213,00	33,25
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8.874.251,00	9.592.000,00	(717.749,00)	(7,48)
14	Badan Pendapatan Daerah	1.958.000,00	1.958.000,00	0,00	0,00
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.403.440,00	29.403.440,00	0,00	0,00
16	Kecamatan Bintan Utara	497.200,00	497.200,00	0,00	0,00
17	Kecamatan Toapaya	753.500,00	753.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	251.766.713,00	198.771.713,00	52.995.000,00	26,66

Adapun beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.231 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Lisensi Dan Frenchise	0,00	18.920.000,00	(18.920.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
2	Software	203.449.313,00	179.851.713,00	23.597.600,00	13,12
3	Goodwill	27.995.000,00	0,00	27.995.000,00	100,00
4	Aset Tidak Berwujud Lainnya	20.322.400,00	0,00	20.322.400,00	100,00
Jumlah		251.766.713,00	198.771.713,00	52.995.000,00	26,66

7.5.4.2.3 Beban Transfer

Beban Transfer berupa Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan Lainnya berupa Dana Bantuan Partai Politik pada TA 2022, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.232 Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	%
Beban Bagi Hasil				
1	Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	16.229.754.600,00	14.428.578.300,00	12,48
2	Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.086.542.000,00	856.787.500,00	26,82
Jumlah A		17.316.296.600,00	15.285.365.800,00	13,29
Beban Bantuan Keuangan				
1	Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	56.641.804.813,00	52.810.386.266,00	7,26
Jumlah B		56.641.804.813,00	52.810.386.266,00	7,26
Total (Jumlah A + Jumlah B)		73.958.101.413,00	68.095.752.066,00	9,47

Tabel 7.5.233 Rincian Perbedaan Bantuan Keuangan Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Bantuan Keuangan	56.641.804.813,00	84.867.913.933,00	(28.226.109.120,00)

Selisih tersebut merupakan Realisasi Dana Desa yang hanya di akui pada LRA sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ sebesar Rp28.226.109.120,00.

7.5.4.2.4 Beban Tak Terduga

Beban Tak Terduga berupa realisasi belanja tak terduga pada TA 2022, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.234 Beban Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
1	Beban Tak Terduga – LO	1.074.996.083,00	5.674.118.343,00	(81,05)
Jumlah		1.074.996.083,00	5.674.118.343,00	(81,05)

Beban Tak terduga – LO Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode Tahun 2022 merupakan Belanja tak terduga terdiri dari bantuan sosial tidak terencana korban bencana alam Rp54.329.500,00, bantuan pengobatan masyarakat tidak mampu Rp100.029.663,00, bantuan penanganan Covid-19 Rp211.624.260,00, bantuan musibah meninggal dunia Rp539.500.000,00, pengembalian atas kesalahan setoran bendahara BKAD Rp4.363.160,00, dan pengembalian dana BOS ke rekening kas Negara Rp165.149.500,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

7.5.4.2.5 Surplus Non Operasional

Realisasi Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2022 sebesar Rp480.126.532,00 yang merupakan surplus dari hasil penjualan aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2022.

Tabel 7.5.235 Surplus Non Operasional Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	%
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	480.126.532,00	0,00	100,00
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00	0,00
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	480.126.532,00	0,00	100,00

7.5.4.2.6 Defisit Non Operasional

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2022 sebesar Rp6.247.380.992,00 merupakan penghapusan aset tetap.

Rincian penghapusan aset tetap per OPD sebagai berikut:

Tabel 7.5.236 Defisit Non Operasional Penghapusan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	424.232.239,00	3.127.758.455,00	(2.703.526.216,00)	(86,44)
2	Dinas Kesehatan	5.047.831,00	1.280.000.000,00	(1.274.952.169,00)	(99,61)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.992.231.172,00	519.925.507,00	2.472.305.665,00	475,51
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	47.697.499,00	2.395.030.892,00	(2.347.333.393,00)	(98,01)
5	Dinas Sosial	0,00	938.000.001,00	(938.000.001,00)	(100,00)
6	Dinas Tenaga Kerja	0,00	2.941.200.000,00	(2.941.200.000,00)	(100,00)
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	436.537.867,00	6.202.073.861,00	(5.765.535.994,00)	(92,96)
8	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	3.690.472.317,00	(3.690.472.317,00)	(100,00)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	1.819.222.970,00	(1.819.222.970,00)	(100,00)
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	840.000.000,00	(840.000.000,00)	(100,00)
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	9.521.742.509,00	(9.521.742.509,00)	(100,00)
12	Sekretariat Daerah	1.107.142.857,00	93.750.000,00	1.013.392.857,00	1080,95
13	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	4.050.681.741,00	(4.050.681.741,00)	(100,00)
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.223.610.004,00	74.577.349.773,00	(73.353.739.769,00)	(98,36)
15	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.690.740,00	0	8.690.740,00	100,00
16	Kecamatan Bintan Utara	393.070,00	0	393.070,00	100,00
17	Kecamatan Toapaya	1.797.713,00	0	1.797.713,00	100,00
18	Kecamatan Bintan Timur	0,00	0	0,00	0,00
19	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	3.910.971.383,00	(3.910.971.383,00)	(100,00)
	Jumlah	6.247.380.992,00	115.908.179.409,00	(109.660.798.417,00)	(94,61)

**7.5.4.2.7 Beban Luar Biasa**

Tidak ada Beban Luar Biasa pada TA 2022.

Tabel 7.5.237 Beban Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	%
1	Beban Luar Biasa – LO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

7.5.4.3 SURPLUS/DEFISIT – LO

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan – LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 surplus sebesar Rp30.457.324.592,48.



7.5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Pemerintah Kabupaten Bintan menyajikan Laporan Arus Kas dengan menggunakan **Metode Langsung**, dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran disajikan dengan arus kas netto.

Tabel 7.5.238 Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	%
1	Arus Kas Aktivitas Operasi	177.679.018.018,12	138.084.607.314,94	28,67
2	Arus Kas Aktivitas Investasi	(151.010.019.845,95)	(151.013.347.825,33)	(0,00)
3	Arus Kas Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00
4	Arus Kas Aktivitas Transitoris	0,00	619.117.499,80	(100,00)
Jumlah		26.668.918.172,17	(12.309.623.010,59)	(316,65)

7.5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi, yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Tabel 7.5.239 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	%
1	Arus Kas Masuk	1.132.972.436.843,57	1.065.804.683.596,92	6,30
2	Arus Kas Keluar	955.293.418.825,45	927.720.076.281,98	2,97
Jumlah		177.679.018.018,12	138.084.607.314,94	28,67

Berdasarkan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2022 adalah sebesar Rp177.679.018.018,12 meningkat sebesar Rp39.594.410.703,18 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp138.084.607.314,94. Realisasi arus kas aktivitas operasi tersebut dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

7.5.5.1.1 ARUS KAS MASUK

Realisasi Arus Kas Masuk sebesar Rp1.132.972.436.843,57 merupakan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi yang berasal dari:

7.5.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Saldo Realisasi Pajak Daerah sejumlah Rp145.481.518.689,93 adalah Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.240 Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	(%)
1	Pajak Hotel	62.456.176.468,22	13.241.827.713,99	371,66
2	Pajak Restoran	1.438.138.762,41	6.213.190.825,03	(76,85)
3	Pajak Hiburan	2.826.742.246,00	373.205.305,00	657,42
4	Pajak Reklame	655.826.972,00	510.125.857,00	28,56
5	Pajak Penerangan Jalan	14.154.349.466,00	12.984.150.557,00	9,01



No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	(%)
6	Pajak Parkir	132.486.866,00	69.858.633,00	89,65
7	Pajak Air Tanah	5.166.000,00	3.552.000,00	45,44
8	Pajak Sarang Burung Walet	3.250.000,00	1.450.000,00	124,14
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.638.136.597,30	13.029.623.287,00	20,02
10	PBB-P2	30.601.170.475,00	59.452.301.412,00	(48,53)
11	BPHTB	17.570.074.837,00	24.180.312.733,75	(27,34)
Jumlah		145.481.518.689,93	130.059.598.323,77	11,86

7.5.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah sejumlah Rp7.313.516.224,00 adalah Saldo Arus Kas Masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.241 Pendapatan Retribusi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	(%)
1	Retribusi Jasa Umum			
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	49.040.000,00	42.411.500,00	15,82
b.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	168.761.000,00	123.900.000,00	36,21
c.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	40.822.000,00	11.995.000,00	240,33
d.	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	160.665.800,00	72.252.700,00	122,37
2	Retribusi Jasa Usaha			
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	473.741.740,00	506.610.000,00	(6,49)
b.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.750.749.500,00	151.342.500,00	1.717,57
c.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	47.022.000,00	6.554.000,00	617,45
3	Retribusi Perijinan Tertentu			
a.	Retribusi Izin Mendirikan bangunan	0,00	5.175.323.191,00	(100,00)
b.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	102.500.000,00	56.000.000,00	83,04
c.	Retribusi Izin Trayek	435.000,00	90.000,00	383,33
d.	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	1.214.686.300,00	1.455.318.800,00	(16,53)
e.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.305.012.884,00	0,00	100,00
Jumlah		7.313.516.224,00	7.601.797.691,00	(3,79)

7.5.5.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Bagian Laba BUMD Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp8.706.275.676,00 dan Rp11.411.312.907,00 yang berasal dari:

Tabel 7.5.242 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	(%)
1	BUMD BPR BINTAN	803.888.899,00	1.778.554.464,00	(54,80)
2	BUMD PT. BIS	0,00	0,00	0,00
3	Deviden Bagian Laba Bank Riau Kepri	7.902.386.777,00	9.632.758.443,00	(17,96)
Jumlah		8.706.275.676,00	11.411.312.907,00	(23,70)

7.5.5.1.1.4 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan diluar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode TA 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.243 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

NO	URAIAN	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	(%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	501.697.823,00	377.868.105,00	32,77
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	4.127.200,00	(100,00)
3	Jasa Giro	1.442.508.740,93	1.992.359.653,76	(27,60)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	150.000,00	600.000,00	(75,00)
5	Pendapatan Bunga	3.019.830.050,55	3.566.857.266,46	(15,34)
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	100,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	98.369.225,51	158.980.221,80	(38,12)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.063.918.085,40	4.130.831.096,57	(74,24)
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	3.112.752,00	0,00	100,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	2.375.570.442,80	957.705.473,56	148,05
11	Penerimaan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan BLUD	25.399.727.653,00	32.605.539.485,00	(22,10)
13	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	4.074.090,00	4.286.411,00	(4,95)
14	Dana Kapitasi JKN pada FKTP/Puskesmas yang telah disetor ke Kas Daerah	2.616.458.096,00	2.874.010.750,00	(8,96)
15	Pendapatan dari BLUD RSUD	0,00	0,00	0,00
16	Pendapatan dari Puskesmas JKN	0,00	0,00	0,00
17	Pendapatan dari Puskesmas BLUD	0,00	0,00	0,00
18	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LRA	0,00	0,00	0,00
Jumlah		36.528.416.959,19	46.673.165.663,15	(21,74)

7.5.5.1.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil

Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil sebesar Rp176.332.416.938,00 merupakan Arus Kas Masuk dari penerimaan Dana Bagi Hasil sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.244 Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	26.498.021.549,00	26.871.516.690,00	(1,39)
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	149.834.395.389,00	71.299.549.778,00	110,15
Jumlah		176.332.416.938,00	98.171.066.468,00	79,62

7.5.5.1.1.5.1 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp26.498.021.549,00 merupakan Arus Kas Masuk dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.245 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	10.016.012.680,00	9.026.348.987,00	10,96
2	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan pasal 21	15.016.733.578,00	16.966.847.200,00	(11,49)
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 25/29	1.455.083.125,00	857.257.000,00	69,74
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	10.192.166,00	21.063.503,00	(51,61)
Jumlah		26.498.021.549,00	26.871.516.690,00	(1,39)

**7.5.5.1.1.5.2 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**

Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp149.834.395.389,00 merupakan Arus Kas Masuk dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.246 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil dari Pentambangan Minyak Bumi	18.925.807.867,00	2.397.403.700,00	689,43
2	Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	125.346.390.564,00	63.044.917.349,00	98,82
3	Dana Bagi Hasil dari Iuran Tetap (<i>Land rent</i>)	116.061.523,00	24.673.475,00	370,39
4	Dana Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (<i>Royalti</i>)	3.479.622.285,00	4.081.075.600,00	(14,74)
5	Dana Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	8.202.150,00	76.979.504,00	(89,35)
6	Dana Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.958.311.000,00	1.674.500.150,00	16,95
Jumlah		149.834.395.389,00	71.299.549.778,00	110,15

7.5.5.1.1.6 Penerimaan Dana Alokasi Umum

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp475.851.608.000,00 dan Rp476.841.183.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,21%.

7.5.5.1.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp147.777.131.680,00 dan Rp146.641.714.346,00 atau mengalami kenaikan sebesar 0,77%.

7.5.5.1.1.7.1 Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp93.467.543.851,00 dan Rp90.479.520.346,00 atau mengalami kenaikan sebesar 3,30%.

7.5.5.1.1.7.2 Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp85.130.297.254,00 dan Rp56.162.194.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 51,58%.

7.5.5.1.1.8 Penerimaan Dana Insentif Daerah

Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian Pemerintah Kabupaten Bintan merupakan Dana Insentif Daerah. Penerimaan Dana Insentif Daerah Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp19.885.822.000,00 dan Rp44.420.166.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 55,23%.

**7.5.5.1.1.9 Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi**

Realisasi penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp82.752.167.509,00 dan Rp63.898.047.803,00 atau mengalami kenaikan sebesar 29,51%.

7.5.5.1.1.10 Penerimaan Bantuan Keuangan

Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan dari Provinsi pada Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1.116.000.000,00 dan Rp0,00 atau mengalami peningkatan sebesar 100,00%.

7.5.5.1.1.11 Penerimaan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan pendapatan Dana BOS yang ditransfer oleh pusat. Realisasi pendapatan hibah untuk periode TA 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp254.000.000,00 dan Rp0,00 atau mengalami peningkatan sebesar 100,00%.

7.5.5.1.1.12 Penerimaan dari Pendapatan Lainnya

Penerimaan lainnya pada Tahun 2022 merupakan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dan pendapatan Dana BOS yang dianggarkan dan direalisasikan pada pendapatan transfer, sehingga arus kas masuk pada Penerimaan dari Pendapatan Lainnya untuk TA 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp152.853.742,45 dan Rp40.086.631.395,00 atau mengalami penurunan sebesar 99,62%.

7.5.5.1.2 ARUS KAS KELUAR

Realisasi arus Kas Keluar sejumlah Rp955.293.418.825,45 merupakan saldo Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Operasi yang terdiri dari:

Tabel 7.5.247 Arus Kas Keluar Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)
1	Pembayaran Pegawai	470.125.670.747,00	476.580.386.274,00	(1,35)
2	Pembayaran Barang	349.842.979.580,45	327.869.230.370,98	6,70
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Pembayaran Subsidi	1.690.823.167,00	0,00	100,00
5	Pembayaran Hibah	51.051.247.835,00	45.560.989.228,00	12,05
6	Pembayaran Bantuan Sosial	7.549.600.000,00	3.939.600.000,00	91,63
7	Pembayaran Belanja Tak Terduga	1.074.996.083,00	5.674.118.343,00	(81,05)
8	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/kota	17.316.296.600,00	15.285.365.800,00	13,29
9	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	56.641.804.813,00	52.810.386.266,00	7,26
Jumlah		955.293.418.825,45	927.720.076.281,98	2,97

7.5.5.2 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Realisasi meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut.

Tabel 7.5.248 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)
1	Arus Kas Masuk	1.250.000,00	5.000.000,00	(75,00)



No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)
2	Arus Kas Keluar	151.011.269.845,95	151.018.347.825,33	(0,00)
	Jumlah	(151.010.019.845,95)	(151.013.347.825,33)	(0,00)

7.5.5.2.1 ARUS KAS MASUK

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2022 sebesar Rp1.250.000,00 yaitu Arus kas masuk dari Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen.

7.5.5.2.2 ARUS KAS KELUAR

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi digunakan untuk pembentukan dana cadangan, pembayaran belanja modal, meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Aset Lainnya serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut.

**Tabel 7.5.249 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2	Perolehan Tanah	956.984.073,00	994.839.115,00	(3,81)
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	47.774.943.804,00	39.826.077.526,00	19,96
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	63.625.599.408,98	63.060.135.647,33	0,90
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.169.864.362,97	43.580.037.497,00	(14,71)
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.483.878.197,00	1.954.288.040,00	(24,07)
7	Perolehan Aset Lainnya	0,00	2.970.000,00	(100,00)
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	1.600.000.000,00	(100,00)
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	151.011.269.845,95	151.018.347.825,33	(0,00)

7.5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Pada TA 2022 nihil.

Tabel 7.5.250 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)
1	Arus Kas Masuk	0,00	0,00	0,00
2	Arus Kas Keluar	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

7.5.5.4 ARUS KAS AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah daerah. Pada TA 2022, jumlah total Arus Kas Aktivitas Transitoris adalah Rp0,00. Jumlah total tersebut didapat dari Arus Kas Masuk Rp77.130.819.672,00 dikurangi Arus Kas Keluar Rp77.130.819.672,00.



Tabel 7.5.251 Arus Kas Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	Arus Kas Masuk	77.130.819.672,00	62.989.317.921,80	22,45
2	Arus Kas Keluar	77.130.819.672,00	62.370.200.422,00	23,67
	Jumlah	0,00	619.117.449,80	(100,00)

7.5.5.4.1 ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris realisasinya meliputi arus kas masuk TA 2022 sebesar Rp77.130.819.672,00 dan TA 2021 sebesar Rp62.989.317.921,80.

Arus Kas Masuk berasal dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar sebesar Rp77.130.819.672,00 yang merupakan penerimaan potongan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Iuran Wajib Pegawai (IWP) yang terdiri dari iuran Taspen dan BPJS dan Tabungan Perumahan (Taperum) pada Tahun 2022.

7.5.5.4.2 ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Realisasi kas keluar dari aktivitas Non Anggaran yang digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga (PFK) dan pengeluaran lainnya. Adapun nilainya sebesar sebesar Rp77.130.819.672,00 pada Tahun 2022 merupakan pengeluaran dari PPN, PPh, IWP dan Taperum.

7.5.5.5 SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir kas sebesar Rp163.448.168.531,26 adalah merupakan jumlah saldo kas akhir di BUD, kas di PPK-BLUD, Kas di Puskesmas non BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.252 Rincian Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)
1	Saldo Kas di Kas Daerah	163.448.069.726,26	136.778.186.778,09	19,50
2	Saldo Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	18.805,00	983.581,00	(98,09)
4	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	80.000,00	0,00	100,00
5	Saldo Kas Dana BOS	0,00	0,00	0,00
6	Saldo Kas Lainnya di JKN Kapitasi	0,00	0,00	0,00
7	Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	4.363.160,00	(100,00)
	Saldo Akhir Kas	163.448.168.531,26	136.783.533.519,09	19,49

7.5.5.5.1 KAS DI KAS DAERAH

Saldo Akhir Kas di BUD pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp163.448.168.531,26 yang merupakan jumlah Kenaikan/Penurunan Kas sebesar Rp26.664.635.012,17 dengan Saldo Awal Kas di BUD sebesar Rp136.779.170.359,09. Saldo Awal Kas di BUD merupakan Saldo Akhir Kas menurut LAK dan terdapat perbedaan dengan saldo akhir kas pada neraca tahun 2021 sebesar Rp4.363.160,00 yang merupakan saldo kas lainnya di Bendahara Pengeluaran BKAD yang hanya diakui pada neraca sehingga saldo akhir kas tahun 2021 sebesar Rp136.783.533.519,00.

Terdapat perbedaan antara pencatatan jumlah Saldo Akhir Kas di BUD menurut Laporan Arus Kas dengan Saldo Akhir Kas di BUD menurut Rekening Koran. Selisih tersebut disebabkan Saldo Akhir Kas di BUD menurut Laporan Arus Kas termasuk Sisa Kas



Dana Kapitasi yang masih berada pada Bendahara Dana Kapitasi dan Kas di Bendahara BLUD. Pada Tahun 2022 Laporan Arus Kas BLU dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum sesuai PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU.

Saldo Akhir Kas menurut Laporan Arus Kas sebesar Rp163.448.088.531,26 terdiri dari sisa kas yang ada di rekening BUD sebesar Rp53.558.109.758,28, sisa kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp18.805,00, sisa kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp80.000,00, sisa kas di BLUD sebesar Rp5.991.828.655,47, sisa kas dana BOS sebesar Rp898.131.312,51 dan sisa kas di Setara Kas Rp103.000.000.000,00.

7.5.5.2 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp18.805,00 sedangkan Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp983.581,00 terdapat pada kas di bendahara pengeluaran BKAD.

7.5.5.3 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Terdapat Kas di Bendahara Penerimaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp80.000,00 sedangkan tidak terdapat pada Kas di Bendahara Penerimaan pada Tahun 2021.

**7.5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, surplus atau defisit-LO pada periode yang bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

7.5.6.1 EKUITAS AWAL

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2022 sebesar Rp2.413.815.188.327,72 merupakan ekuitas akhir Tahun 2021.

Tabel 7.5.253 Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	%
1	Ekuitas Awal	2.413.815.188.327,72	2.552.025.244.633,75	(5,42)
	Jumlah	2.413.815.188.327,72	2.552.025.244.633,75	(5,42)

7.5.6.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Penambahan/Pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit pada Laporan Operasional pada akhir periode pelaporan. Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 sebesar Rp30.457.324.592,48.

Tabel 7.5.254 Surplus/Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	(%)
1	Suplus/Defisit-LO	30.457.324.592,48	(133.327.613.735,06)	(122,84)
	Jumlah	30.457.324.592,48	(133.327.613.735,06)	(122,84)

7.5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Pemerintah Kabupaten Bintan terdiri dari:

7.5.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Bintan tidak terdapat koreksi nilai persediaan.

7.5.6.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Bintan tidak terdapat selisih revaluasi aset tetap.

7.5.6.3.3 Lain-Lain

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp8.982.864.713,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.255 Koreksi Ekuitas Lain-lain Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
1	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Tahun 2022	(Rp225.838.758,13)
2	Koreksi Piutang Pajak Penerangan Jalan	(Rp1.876.817,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

3	Koreksi Retribusi Sewa Rumah Dinas Tahun 2022	(Rp280,00)
4	Koreksi Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan Tahun 2020	(Rp300.290,00)
5	Koreksi Denda Pajak Air Tanah Tahun 2021	(Rp7.380,00)
6	Koreksi Denda Pajak PBB Tahun 2021	(Rp4.765.810.864,16)
7	Koreksi Denda Pajak Restoran Tahun 2022	(Rp709.920,00)
8	Koreksi Pajak Restoran (Rumah Makan) Tahun 2022	(Rp5.278.740,50)
9	Koreksi Piutang BPHTB Tahun 2021	(Rp1.351.825,25)
10	Koreksi Piutang Denda Angsuran Rumah Dinas Tahun 2021	(Rp47.250,00)
11	Revaluasi Aset Tetap Setelah Appraisal	Rp2.479.684.000,00
12	Pengakuan Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021	Rp24.200.000,00
13	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Tahun 2021	Rp207.078.239,89
14	Koreksi kesalahan pencatatan <i>double</i> asset tetap	(Rp4.906.902.761,00)
15	Koreksi atas penghapusan asset tetap akibat penjualan peralatan dan mesin tahun 2021	(246.680.000,00)
16	Koreksi akumulasi penyusutan asset tetap atas reklasifikasi KDP ke Gedung dan Bangunan	(3.116.218.406,00)
17	Koreksi akumulasi penyusutan penyusutan atas reklasifikasi ke ekstrakomptabel dikarenakan penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi batas minimal kapitalisasi gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 per unit barang	100.934.722,00
18	Koreksi akumulasi penyusutan atas reklasifikasi ke ekstrakomptabel dikarenakan penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi batas minimal kapitalisasi jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp10.000.000,00 per unit barang	1.476.261.617,00
Jumlah		(8.982.864.713,15)

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp8.982.864.713,15 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.256 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
3	Lain – Lain	(8.982.864.713,15)	(4.882.442.570,97)
4	Selisih Revaluasi Tanah	0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
6	Selisih Revaluasi Ekstrakomptabel	0,00	0,00
7	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
8	Koreksi Piutang Pajak	0,00	0,00
9	Koreksi Piutang Lainnya	0,00	0,00
10	Koreksi Bagian Lancar TPTGR	0,00	0,00
11	Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
12	Koreksi atas Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Jumlah		(8.982.864.713,15)	(4.882.442.570,97)

**7.5.6.4 EKUITAS AKHIR**

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2022 sebesar Rp2.435.289.648.207,05 dengan rincian sebagai berikut.

- Ekuitas Awal	Rp2.413.815.188.327,72
- Surplus/Defisit-LO	30.457.324.592,48
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar	(8.982.864.713,15)
- Ekuitas Akhir	Rp2.435.289.648.207,05

Tabel 7.5.257 Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	(%)
1	Ekuitas Akhir	2.435.289.648.207,05	2.413.815.188.327,72	0,89
	Jumlah	2.435.289.648.207,05	2.413.815.188.327,72	0,89



7.6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

7.6.1 Kondisi Geografis dan Perangkat Daerah

Kabupaten Bintan secara geografis terletak antara 0°06'17"-1°34'52" Lintang Utara dan 104°12'47" Bujur Timur di sebelah Barat 108°02'27" Bujur Timur di sebelah Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Natuna, Anambas dan Malaysia
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga.
- 3) Sebelah Barat : Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.
- 4) Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan seluruhnya mencapai 87.717,84 Km², luas daratannya hanya 1,50 persen atau sebesar 1.319,51 Km² saja dan luas lautnya 86.398,33 Km² (98,50 persen). Secara administratif, Kabupaten Bintan terbagi atas 10 Kecamatan, 15 Kelurahan, 36 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Gunung Kijang, yaitu 503,12 Km². Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Tambelan dengan luas 169,42 Km².

Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 49 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang dikelilingi oleh daerah rawa-rawa. Wilayah Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama Paparan kontinental yang disebut Paparan Sunda. Morfologi pulau Bintan tidak memiliki perbedaan ketinggian yang menyolok yaitu antara 0-350 meter dari muka laut.

Penonjolan puncak-puncak bukit antara lain Gunung Bintan 348 meter, Gunung Bintan Kecil 196 meter. Bukit-bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian dibawah 100 meter. Bukit-bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir kearah Utara dan Selatan dengan pola sub paralel, sedangkan pola anak-anak sungainya berpola sub radial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek, dangkal dan tidak lebar. Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan beriklim tropis. Pada Tahun 2010 di wilayah Kabupaten Bintan temperatur rata-rata terendah sebesar 21,2 derajat celsius dan tertinggi rata-rata sebesar 34,2 derajat celsius dengan kelembaban nisbi rata-rata tercatat sekitar 84 persen.

Pemerintah Kabupaten Bintan pada TA 2016 memiliki 3 (tiga puluh Sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari dua sekretariat (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD), satu kantor (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja), tujuh badan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Daerah), sembilan belas dinas (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup,



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan dan olah raga, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), dan sepuluh kecamatan (Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya).

Kondisi OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 mengalami perubahan jumlahnya menjadi 39 OPD. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan perubahan terakhir Nomor 9 Tahun 2015, Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, maka OPD yang tahun dibentuk Pemerintah Kabupaten Bintan mulai tahun 2021 adalah, sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Sosial
8. Dinas Tenaga Kerja
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga



- 19 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 20 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- 21 Dinas Perikanan
- 22 Sekretariat Daerah
- 23 Inspektorat Daerah
- 24 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 25 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
- 26 Badan Pendapatan Daerah
- 27 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 28 Sekretariat DPRD
- 29 Kecamatan Bintan Utara
- 30 Kecamatan Bintan Pesisir
- 31 Kecamatan Tambelan
- 32 Kecamatan Mantang
- 33 Kecamatan Toapaya
- 34 Kecamatan Teluk Sebong
- 35 Kecamatan Teluk Bintan
- 36 Kecamatan Gunung Kijang
- 37 Kecamatan Bintan Timur
- 38 Kecamatan Seri Kuala Lobam
- 39 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Disamping memiliki 39 (tiga puluh sembilan) OPD di atas pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bintan juga memiliki Tujuh Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan dua Perusahaan Daerah. Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) terdiri dari:

- 1) Pola Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap Puskesmas (5 Puskesmas)
- 2) Pola Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap Dana Bergulir
- 3) Pola Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap RSUD Kabupaten Bintan

Ketiga jenis PPK-BLUD tersebut statusnya adalah PPK-BLUD Bertahap yang berarti belum PPK-BLUD penuh sehingga merupakan entitas akuntansi dari dinas teknis terkait, yaitu untuk PPK-BLUD Bertahap Puskesmas Teluk Sebong, Puskesmas Kijang, Puskesmas Tanjung Uban, Puskesmas Teluk Sasah dan Puskesmas Kawal dibawah koordinasi Dinas Kesehatan. Sedangkan PPK PPK-BLUD Bertahap Dana Bergulir berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan RSUD Bintan berdiri secara mandiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 7 Tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja RSUD Kabupaten Bintan dan Surat Keputusan Bupati Bintan nomor 566/XI/2014 tentang penerapan status PPK-BLUD bertahap



pada RSUD Bintan.

Pemerintah Kabupaten Bintan juga memiliki investasi permanen yaitu penyertaan modal pada Bank Riau Kepri. Jumlah penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.38.078.900.000,00 atau menguasai kepemilikan saham sebesar 3,16% yang meliputi 380.789 lembar saham. Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bintan tidak melakukan penambahan setoran penyertaan modal kepada Bank Riau Kepri.

7.6.2 Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Koordinasi dengan instansi vertikal di Kabupaten Bintan dilaksanakan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yaitu suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Bupati dengan pejabat-pejabat TNI dan Polri di daerah serta aparatur pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas nasional dan pembangunan nasional di daerah, sesuai Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Keanggotaannya terdiri dari Bupati, Ketua DPRD, Komandan Kodim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri dan ditambah Ketua Pengadilan Negeri yang kedudukannya disejajarkan. Berdasarkan pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 dimaksud, musyawarah pimpinan daerah mempunyai tujuan:

- 1) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
- 2) Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
- 3) Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukkseskan pembangunan nasional.

Sedangkan Forum Koordinasi Muspida, sesuai keputusan presiden tersebut di atas mempunyai fungsi :

- 1) Membina keserasian hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah.
- 2) Mengkordinasikan, mengintegrasikan dan menyinkronisasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Memantapkan sistem dan tata cara penyelenggaraan kebijakan/ program pemerintah dan pemerintah daerah dalam penguatan penyelenggaraan pemerintah guna mewujudkan stabilitas lokal, regional dan nasional.
- 4) Melakukan deteksi dini atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban umum, keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketahanan negara dan menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya.
- 5) Menentukan pola operasional penyelesaian permasalahan yang timbul di daerah dengan berpedoman pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Selanjutnya guna mewujudkan keterpaduan dan sinergisitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, koordinasi vertikal selain dilaksanakan melalui forum muspida, koordinasi juga dilaksanakan melalui rapat kerja yang dilaksanakan secara berkala setiap bulan sekali dan atau secara insidental yang bersifat situasional. Rapat koordinasi intansi vertikal disamping dilakukan melalui forum muspida juga dilakukan dengan seluruh instansi vertikal yang ada di Kabupaten Bintan.

Instansi vertikal sebagai perangkat departemen-departemen atau lembaga-lembaga pemerintah bukan departemen dan perangkat pemerintah propinsi yang mempunyai lingkungan kerja di Kabupaten Bintan, saat ini terdiri dari Badan Pertanahan Nasional, Biro Pusat Statistik, Kantor Departemen Agama, BRI Cabang, UPPJ PLN, PT Telkom, Perum Pegadaian, PT Pos, Gudang Dolog, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Bank BNI, Bank Danamon, Bank Riau, Bank BPR Kepri, PD BPR Bintan, PT BIS, PT Bintan Anugerah Bersama dan UPTD Dinas Pendapatan Propinsi dan lain-lain. Dengan terselenggaranya rapat koordinasi instansi vertikal dan perusahaan dimaksud, diharapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat dapat dihindari atau diminimalisir. Disamping itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih atau *overlapping* kegiatan dapat dihindari.

7.6.3 Pembinaan Batas Wilayah

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembinaan batas wilayah adalah mengacu pada kebijakan Pemerintah, yaitu dibidang Pemerintahan Umum Sub Bidang Pembinaan Wilayah Perbatasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 dimaksud pembinaan batas wilayah diarahkan pada Perbatasan Daerah, Toponimi (penyelidikan nama tempat) dan pemetaan wilayah, Pengembangan wilayah perbatasan, dan Penetapan luas wilayah.

- 1) Kebijakan perbatasan daerah dilaksanakan dengan menetapkan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan yang dituangkan ke dalam Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Kebijakan toponimi dan pemetaan wilayah, dilaksanakan melalui :
 - Penetapan toponimi dan pemetaan wilayah.
 - Pengelolaan toponimi dan pemetaan wilayah skala Kabupaten.
 - Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan wilayah skala kabupaten.
- 3) Kebijakan pengembangan wilayah perbatasan, dilakukan melalui :
 - Penetapan wilayah perbatasan skala kabupaten;
 - Pengelolaan wilayah perbatasan skala kabupaten;
 - Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten.
- 4) Kebijakan penetapan luas wilayah, dilakukan melalui :
 - Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi;
 - Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.

**7.6.4 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

Pada awal tahun 2022 terjadi peningkatan intensitas curah hujan dan perubahan cuaca ekstrim di wilayah Kabupaten Bintan sehingga terjadi kebakaran, banjir, tanah longsor, badai dan angin kencang di beberapa wilayah. Adapun bencana yang terjadi di Kabupaten Bintan per wilayah sebagai berikut.

Tabel 7.6.1 Data Bencana yang terjadi di Kabupaten Bintan Tahun 2020

NO	KEJADIAN BENCANA				
	TANGGAL/JAM	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JENIS BENCANA	
1	2	3	4	5	
1	13/01/22	12.30	Jl. M.Taher Latif Gg. Pandawa Kp. Baru Kel. Tg.Uban Utara	Kec. Bintan Utara	Kebakaran Hutan dan Lahan
2	20/01/22	00.20	Jl. Abd. Salam Kp. Berakit Desa Berakit	Kec. Teluk Sebong	Kebakaran Hutan dan Lahan
3	22/01/22	12.04	Jl. Cendrawasih Raya Gg. Perdana Kel. Tg.Permai	Kec. Seri Kuala Lobam	Kebakaran Hutan dan Lahan
4	22/01/22	15.00	Jl. Sakera Kp. Sakera Kel. Tg. Uban Utara	Kec. Bintan Utara	Kebakaran Hutan dan Lahan
5	22/01/22	15.30	Jl. Pringgondani Kp. Sukadamai Kel. Tg.Uban Timur	Kec. Bintan Utara	Kebakaran Hutan dan Lahan
6	22/01/22	16.25	Jl. Berdikari 2 Kel. Tg.Uban Timur	Kec. Bintan Utara	Kebakaran Hutan dan Lahan
7	28/01/22	16.55	Jl. Manggar Kp. Bugis Kel. Tg.Uban Utara	Kec. Bintan Utara	Kebakaran Hutan dan Lahan
8	29/01/22	13.11	Jl. Raya Tg.Pinang-Tg.Uban Desa Lancang Kuning	Kec. Bintan Utara	Kebakaran Hutan dan Lahan
9	30/01/22	11.15	Jl. Raya Busung Teluk Lobam	Kec. Seri Kuala Lobam	Kebakaran Hutan dan Lahan
10	30/01/22	13.19	Jl. Lobam Teluk Lobam	Kec. Seri Kuala Lobam	Kebakaran Hutan dan Lahan
11	10/01/22	10.00	Jl. Berek Motor Kijang	Kec. Bintan Timur	Evakuasi Sarang Lebah
12	11/01/22	14.30	Jl. Wacopek Kijang	Kec. Bintan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan
13	13/01/22	17.30	Jl. Wacopek Kijang	Kec. Bintan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan
14	15/01/22	17.30	Jl. Nusantara Km 18 Lengkuas	Kec. Bintan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan
15	16/01/22	17.30	Jl. Nusantara Km 18 Lengkuas	Kec. Bintan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan
16	25/01/22	16.00	Jl. Nusantara Km 20 Kijang	Kec. Bintan Timur	Evakuasi ular
17	26/01/22	15.20	Jl. Alumina Kijang	Kec. Bintan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan
18	26/01/22	15.45	Jl. Duyung Kijang	Kec. Bintan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan
19	28/01/22	15.00	Jl. Nusantara Km 18	Kec. Bintan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	KEJADIAN BENCANA				
	TANGGAL/JAM		KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JENIS BENCANA
1	2		3	4	5
20	30/01/22	17.00	Jl. Korindo Kampung Jawa	Kec. Bintan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan
21	03/01/22	13.30	Kp.Galang Batang Desa Gn.Kijang	Kec. Gunung Kijang	Kebakaran Semak Belukar
22	06/01/22	20.00	Desa Bintan Buyu Bukit Batu	Kec. Teluk Bintan	Kebakaran Rumah
23	12/01/22	13.30	Kp. Pulau Pucung Ds.Malang Rapat	Kec. Gunung Kijang	Kebakaran Semak Belukar
24	12/01/22	15.30	Kp. Sungai Angus Ds. Malang Rapat	Kec. Gunung Kijang	Kebakaran Semak Belukar
25	13/01/22	12.30	Jl. Bumi Indah Kel. Toapaya Asri	Kec. Toapaya	Kebakaran Semak Belukar
26	13/01/22	15.30	Kp. Masiran Desa Gn. Kijang	Kec. Gunung Kijang	Kebakaran Semak Belukar
27	14/01/22	11.50	Km 24 Simpang 24 Kel. Toapaya Asri	Kec. Toapaya	Kebakaran Semak Belukar
28	14/01/22	14.00	Jl. Bukit Zaitun Kel. Toapaya Asri	Kec. Toapaya	Kebakaran Semak Belukar
29	14/01/22	15.30	Simpang Kris Kp. Simpang Ds. Toapaya Selatan	Kec. Toapaya	Kebakaran Semak Belukar
30	14/01/22	16.30	Simpang Tepekong Kel. Tembeling Tanjung	Kel. Teluk Bintan	Kebakaran Semak Belukar
31	16/01/22	14.30	Belakang SDN 001 Malang Rapat	Kec. Gunung Kijang	Kebakaran Semak Belukar
32	17/01/22	12.00	Kp. Masiran Desa Gn. Kijang	Kec. Gunung Kijang	Kebakaran Semak Belukar
33	18/01/22	15.30	Kp. Lome Km 47 RT 07/04 Ds. Toapaya Utara	Kec. Toapaya	Kebakaran Semak Belukar
34	22/01/22	15.40	Jl. Tirta Madu RT 18/08 Ds. Toapaya Selatan	Kec. Toapaya	Kebakaran Semak Belukar
35	23/01/22	12.30	Jl. Uban Lama KM 19 Ds. Toapaya Selatan	Kec. Toapaya	Kebakaran Semak Belukar
36	25/01/22	11.30	Kp. Sidoharjo Kel. Kawal	Kec. Gunung Kijang	Kebakaran Semak Belukar
37	25/01/22	13.30	Kp. Masiran Ds. Gn. Kijang	Kec. Gunung Kijang	Kebakaran Semak Belukar
38	25/01/22	15.20	Km 18 Belakang Kantor Ds. Toapaya Selatan	Kec. Toapaya	Kebakaran Semak Belukar
39	27/01/22	10.30	Jl. Tirta Madu Ds. Toapaya Selatan	Kec. Toapaya	Kebakaran Semak Belukar
40	27/01/22	14.00	Panti Jompo Rumah Bahagia Kel. Kawal	Kec. Gunung Kijang	Evakuasi Sarang Lebah
41	28/01/22	15.20	Tirta Arung Kel. Toapaya Asri	Kec. Toapaya	Kebakaran Semak Belukar
42	29/01/22	17.45	Kp. Sidoarjo Depan Polsek Kawal	Kec. Gunung Kijang	Kebakaran Semak Belukar
43	01/02/22	18.35	Perum. Telaga Surya Kp. Baru	Kec. Bintan	Kebakaran Hutan



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	KEJADIAN BENCANA				
	TANGGAL/JAM	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JENIS BENCANA	
1	2	3	4	5	
		Kel. Tg. Uban Utara	Utara	dan Lahan	
44	03/02/22	12.30	Jl. Manggar Kp. Bugis Kel. Tg. Uban Utara	Kec. Bintan Utara	Kebakaran Hutan dan Lahan
45	03/02/22	20.00	Jl. Raya Tg.Pinang-Tg. Uban km 72 Kp. Perih Ds.Sebong Perih	Kec. Teluk Sasah	Kebakaran Hutan dan Lahan
46	04/02/22	15.17	Jl. Raya Busung Teluk Lobam	Kec. Seri Kuala Lobam	Kebakaran Hutan dan Lahan
47	05/02/22	11.15	Jl. Raya Tg.Pinang-Tg. Uban Kp. Krajan km 51 DS. Sri Bintan	Kec. Teluk Sebong	Kebakaran Hutan dan Lahan
48	13/02/22	16.00	Jl. Raya Busung Teluk Lobam	Kec. Seri Kuala Lobam	Kebakaran Hutan dan Lahan
49	21/02/22	18.29	Jl. Panca Marga TRC Manggrove Ds. Sebong Perih	Kec. Teluk Sebong	Kebakaran Hutan dan Lahan
50	25/02/22	16.19	JL. Sei Tongkang Kp. Wonosari	Kec. Teluk Sebong	Kebakaran Hutan dan Lahan
51	08/02/22	08.34	Jl. Nakhoda lancang Asrama Polsek Binut blok C.15 Kel. Tg. Uban Kota	Kec. Bintan Utara	Evakuasi Ular Sawah Emprit
52	20/02/22	18.22	Jl. Martosari Kel. Tg. Uban Selatan	Kec. Bintan Utara	Evakuasi Ular Cobra
53	01/02/22	11.28	Jl. Bukit Piatu Ds. Gn. Kijang	Kec. Gunung Kijang	Kebakaran Hutan dan Lahan
54	01/02/22	13.20	Km. 18 Belakang SDN Mentras Ds. Toapaya Selatan	Kec. Toapaya	Kebakaran Hutan dan Lahan
55	01/02/22	14.20	Kp. Bangsun depan Hermes Km 25 Kel. Toapaya Asri	Kec. Toapaya	Kebakaran Hutan dan Lahan
56	01/02/22	16.45	Pantai Cemara Kp. Bopeng Kawal Pantai Kel. Kawal	Kec. Gunung Kijang	Kebakaran Hutan dan Lahan
57	02/02/22	12.30	Kp. Kamboi Dalam Desa Toapaya Utara	Kec. Toapaya	Kebakaran Hutan dan Lahan
58	03/02/22	13.00	Kp. Tua Muda Km 24 Kel. Toapaya Asri	Kec. Toapaya	Kebakaran Hutan dan Lahan
59	04/02/22	17.30	Samping Bukit Dedemit Belakang Satladar Ds. Sri Bintan	Kec. Teluk Sebong	Kebakaran Hutan dan Lahan
60	04/02/22	14.15	Belakang Disdukcapil/PU Bintan Buyu Ds. Sri Bintan	Kec. Teluk Sebong	Kebakaran Hutan dan Lahan
61	13/02/22	15.30	Bukit Pandawa Ds. Teluk Bakau Dekat hotel Pertama Beach Resort	Kec. Gunung Kijang	Kebakaran Hutan dan Lahan
62	13/02/22	20.22	Teluk Ijuk Kel. Toapaya Asri	Kec. Toapaya	Kebakaran Hutan dan Lahan
63	19/02/22	14.00	Kp. Plores Ds. Gunung Kijang	Kec. Gunung	Kebakaran Hutan



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	KEJADIAN BENCANA				
	TANGGAL/JAM	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JENIS BENCANA	
1	2	3	4	5	
			Kijang	dan Lahan	
64	19/02/22	16.40	Kp. Masiran Ds. Gunung Kijang	Kec. Gunung Kijang	Kebakaran Hutan dan Lahan
65	20/02/22	12.10	Kp. Karang anum Kel. Toapaya Asri	Kec. Toapaya	Kebakaran Hutan dan Lahan
66	20/02/22	13.40	Kp. Mengkurus Ds. Teluk Bakau	Kec. Gunung Kijang	Kebakaran Hutan dan Lahan
67	21/02/22	13.30	Bukit Pandawa Ds. Teluk Bakau	Kec. Gunung Kijang	Kebakaran Hutan dan Lahan
68	22/02/22	13.30	Jl. Korindo Kawal Depan Pemakaman Cina	Kec. Gunung Kijang	Kebakaran Hutan dan Lahan
69	22/02/22	14.40	Kp. Plores Ds. Gunung Kijang	Kec. Gunung Kijang	Kebakaran Hutan dan Lahan
70	23/02/22	19.30	Kp. Hermin Bukit H. Fatsun Kel. Kawal	Kec. Gunung Kijang	Kebakaran Hutan dan Lahan
71	25/02/22	13.20	Kp. Kebun Dalam Pemakaman Tionghoa Jl. Korindo Kawal	Kec. Gunung Kijang	Kebakaran Hutan dan Lahan
72	01/02/22	21.00	Jl. Berek Betawi Kel. Kijang Kota	Kec. Bintan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan
73	01/02/22	10.00	Jl. Nusantara Km 18 Tirta Madu Kel. Sei Lekop	Kec. Bintan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan
74	01/02/22	14.30	Jl. Alumina Kel. Kijang Kota	Kec. Bintan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan
75	01/02/22	15.00	Kl. Korindo Kamp. Jawa Kel. Sei Lekop	Kec. Bintan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan
76	03/02/22	12.00	Jl. Nusantara Km 18 Bangun Rejo Kel. Sei Lekop	Kec. Bintan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan
77	03/02/22	16.30	Jl. Nusantara Km 18 Bangun Rejo Kel. Sei Lekop	Kec. Bintan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan
78	05/02/22	13.30	Jl. Nusantara Km 18 Kel. Sei Lekop	Kec. Bintan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan
79	06/02/22	14.00	Jl. Pasar Berdikari Kel. Kijang Kota	Kec. Bintan Timur	Evakuasi Ular
80	18/02/22	14.00	Jl. Korindo SMAN 1 Kel. Sei Lekop	Kec. Bintan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan
81	18/02/22	16.00	Jl. Nusantara Km 23 Kel. Kijang Kota	Kec. Bintan Timur	Evakuasi Biawak
82	21/02/22	14.00	Jl. Korindo Perum. Oktaviari Kel. Sei Lekop	Kec. Bintan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan
83	07/03/22	13.05	Km 16 Kp. Simpang depan perkuburan tionghoa	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
84	14/03/22	08.30	Km 25 sebelum badrah Kel. Toapaya	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
85	14/03/22	09.05	Km 25 sebelum badrah Kel. Toapaya	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	KEJADIAN BENCANA			
	TANGGAL/JAM	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JENIS BENCANA
1	2	3	4	5
				belukar
86	14/03/22	10.15	Danau biru Jln. Korindo Desa Gn. Kijang	Gunung Kijang Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
87	27/03/22	10.47	Kawal Pantai	Gunung Kijang Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
88	28/03/22	13.00	Perkuburan Cina dan Kristen	Gunung Kijang Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
89	28/03/22	14.10	Jl. Korindo Danau Hijau Desa Gn. Kijang	Gunung Kijang Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
90	29/03/22	13.57	Bintan Buyu Desa Sri Bintan	Teluk Bintan Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
91	30/03/22	12.30	Desa Gn. Kijang	Gunung Kijang Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
92	30/03/22	13.50	Desa Gn. Kijang	Gunung Kijang Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
93	30/03/22	15.30	Desa Gn. Kijang	Gunung Kijang Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
94	30/03/22	15.30	Desa Gn. Kijang	Gunung Kijang Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
95	05/03/22	09.30	Jl. Taman Sari PBI.2 Rt 03/04 Blok A No 15 Tg. Uban Timur	Bintan Utara lepas cincin emas
96	05/03/22	20.40	Jl. Martosari Tg. Uban Selatan	Bintan Utara evakuasi ular sawah semprit
97	06/03/22	08.47	Jl. Permaisuri Tg. Uban Kota	Bintan Utara lepas cincin emas
98	09/03/22	13.25	Perum. Lobam Bestari Jl. Utama 5 Gg. Jeruk 4 Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam evakuasi ular sawah/phyton
99	24/03/22	11.48	Jl. Eka Bhakti Kp. Baru no. 12 tg. Uban Utara	Bintan Utara evakuasi ular lidi/daun
100	27/03/22	07.00	Jl. M. Tahir Latif (mesjid al muhajirin) Kp. Baru Tg. Uban Utara	Bintan Utara Penyemprotan/pem bersihan jalan akibat tumpukan pasir
101	27/03/22	10.10	Jl. Taman sari (surau nurul karim) Kp. Bukit indah sari Tg. Uban Selatan	Bintan Utara evakuasi tawon vespa
102	13/03/22	13.00	Perum. Tanjung permai 2 Kel. Tg permai	Seri Kuala Lobam Kebakaran mobil minibus suzuki



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	KEJADIAN BENCANA				
	TANGGAL/JAM	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JENIS BENCANA	
1	2	3	4	5	
				avanza APV Arena	
103	24/03/22	14.30	Jl. Raya Tanjungpinang-Tg. Uban buki senyu Ds. Lancang Kuning	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
104	25/03/22	18.15	Jl. Bhakti sosial Tg. Uban Selatan	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
105	08-0322	13.00	Jl. Nusantara Kp. Lengkuas	Bintan Timur	evakuasi ular
106	12/03/22	11.30	Jl. Sungai Enam Darat	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
107	13/03/22	15.00	Jl. Wacopek	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
108	14/03/22	09.30	Jl. Kebon Nanas Kijang Kota	Bintan Timur	evakuasi ular
109	16/03/22	05.30	Jl. Berek Motor Kijang	Bintan Timur	kebakaran kompor gas
110	23/03/22	14.30	Jl. Kolong Enam	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
111	24/03/22	14.30	Jl. Wacopek	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
112	28/03/22	10.00	Jl. Nusantara Km 20 Gg. Melati	Bintan Timur	evakuasi sarang tawon
113	22/04/22	12.00	Jl. Nusantara KM. 20	Bintan Timur	Karhutla
114	25/04/22	09.00	Jl. Nusantara KM. 18	Bintan Timur	Evakuasi Tawon
115	26/04/22	08.00	Jl. Semen Tekojo	Bintan Timur	Evakuasi Tawon
116	14/04/22	09.18	Kp. Jeropet 3 Kel. Kawal	Gunung Kijang	Evakuasi ular cobra
117	16/04/22	10.35	Jl. Tirta Madu Ds. Toapaya Selatan	Toapaya	Kebakaran hutan mobil pick up
118	23/04/22	12.30	Jl. Tirta Madu Ds. Toapaya Selatan	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
119	25/04/22	15.30	Jl. Lintas Barat KM.16 Ds. Toapaya Selatan	Toapaya	Evakuasi Jenazah yang diterkam buaya
120	07/04/22	10.55	Gg. Pandan Kp. Baru Tanjung Uban Utara	Bintan Utara	Evakuasi ular sawah
121	07/04/22	19.55	Perum. PBI 1 Jl. M. Taher Latif Gg. Angkasa Kp. Baru, Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Evakuasi ular cincin emas
122	18/04/22	09.35	Jl. Indunsuri (depan ktr PLN) Tg. Uban Selatan	Bintan Utara	Penyemprotan pasir/lumpur dijalan
123	21/04/22	13.55	Jl. Tamansari (perum sijori) Tg.	Bintan Utara	Evakuasi ular cobra



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	KEJADIAN BENCANA				
	TANGGAL/JAM	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JENIS BENCANA	
1	2	3	4	5	
		Uban Selatan			
124	22/04/22	07.12	Jl. Pengujan Desa E kang Anculai	Teluk Sebong	Evakuasi ular sawah
125	25/04/22	17.14	Jl. Taman Sari Gg. Purnasari Tg. Uban Selatan	Bintan Utara	Evakuasi lebah madu
126	27/04/22	10.30	Jl. Permaisuri Tg. Uban Selatan	Bintan Utara	Eksekusi Gelang Staniless
127	05/05/22	09.0	Kp. Lapangan Kel. Kawal	Gunung Kijang	Evakuasi Tawon
128	18/05/22	08.00	Pengujan	Teluk Bintan	Evakuasi Buaya
129	23/05/22	16.10	Kawal	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
130	24/05/22	09.40	Perum. Mawadah Rt 005/005 Kawal	Gunung Kijang	Evakuasi Tawon
131	28/05/22	08.00	Km18 Toapaya Selatan	Toapaya	Evakuasi ular
132	30/05/22	17.0	Kp. Gesek	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
133	16/05/22	20.19	Jl. Raya Busung Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
134	30/05/22	14.47	Jl. Raya Busung Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
135	04/05/22	14.10	Jl. Diponegoro Kp. Jeruk Tg. Uban Kota	Bintan Utara	Evakuasi Ular Lidi/Daun
136	05/05/22	11.40	Jl. Mangar Kp. Bugis Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Evakuasi ular bajing/bamban
137	11/05/22	09.50	TK Muhammadiyah Tg. Uban Timur	Bintan Utara	Evakuasi Lebah madu
138	21/05/22	9.20	Jl. Berdikari Gg. Pringgondani Kp. Sukadamai Tg. Uban Timur	Bintan Utara	Evakuasi ular cobra
139	21/05/22	08.50	Pantai Coconut Jl. Manggar Kp. Bugis Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Evakuasi Tawon Vespa
140	25/05/22	19.40	Jl. Taman Sari Gg. Wahidsa Lancang Kuning	Bintan Utara	Evakuasi Tawon Vespa
141	05/05/22	15.00	Jl. Sei Datuk	Bintan Timur	Evakuasi ular
142	06/05/22	10.30	Jl. Kolong Enam Kijang	Bintan Timur	Evakuasi buaya
143	09/05/22	14.00	Jl. Kp. Wacopek Kel. Lengkuas	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
144	01/05/22	20.00	Jl. Nusantara KM 22 Ponpes Inayah	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
145	12/05/22	08.00	Jl. Tanah Kuning Kijang	Bintan Timur	Evakuasi ular
146	17/05/22	10.00	Kp. Nosari Kijang	Bintan Timur	Evakuasi Lebah



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	KEJADIAN BENCANA				
	TANGGAL/JAM	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JENIS BENCANA	
1	2	3	4	5	
				madu	
147	18/05/22	08.00	Jl. M Jantan Penguajan	Bintan Timur	Evakuasi Buaya
148	18/05/22	17.00	Jl. Nusantara Km 18 Bangun Rejo	Bintan Timur	Evakuasi ular
149	21/05/22	18.05	Jl. Nusantara Km 23 Budi Mulya	Bintan Timur	Evakuasi ular
150	22/05/22	11.30	Jl. Sei Enam Kijang	Bintan Timur	Evakuasi tawon
151	28/05/22	13.30	Jl. Nusantara Km 18 Sebelah Gereja	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
152	30/05/22	19.00	Jl. Bertuah Km 18 Tirta Madu	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
153	11/06/22	19.20	Jl. Bhakti Praja Kel. Tg. Uban Selatan	Bintan Utara	Kebakaran kios/ruko
154	01/06/22	06.33	Jl. Taman Sari Gg. H. Gharun I Tg. Uban Selatan	Bintan Utara	Evakuasi Tawon Vespa
155	09/06/22	06.27	Kp. Jeruk Jl. Manggis Rt 3 RW 3 Tg. Uban Selatan	Bintan Utara	Evakuasi Ular Sawah
156	15/06/22	20.08	Asrama Polek Binut C.20 Jl. Nahkoda Lancang Tg. Uban Kota	Bintan Utara	Evakuasi Ular Cobra
157	17/06/22	06.00	Perairan Mentigi, Kp. Mentigi Laut Tg. Uban Kota	Bintan Utara	Pencarian Korban Tenggelam
158	18/06/22	06.00	Perairan Mentigi, Kp. Mentigi Laut Tg. Uban Kota	Bintan Utara	Pencarian Korban Tenggelam
159	28/06/22	09.00	Perum. Sijori Indah Jl. Taman Sari Blok B.17 TG. Uban Selatan	Bintan Utara	Evakuasi Ular Sawah
160	28/06/22	13.00	Perum.Lobam Bestari Jl. Utama 3 Blok. A1.7 Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam	Evakuasi Ular Cobra
161	01/06/22	10.00	Kp. Gesek Km. 20	Toapaya	Evakuasi Tawon
162	07/06/22	13.50	Kantor Disduk Bintan	Teluk Bintan	Kebakaran Instalasi
163	01/06/22	09.00	Jl. Korindo depan Perum. Griya Indo Kencana	Bintan Timur	Penyemprotan Jalan
164	06/06/22	08.00	Jl. Gunung Lengkuas RT 001/003	Bintan Timur	Evakuasi Ular
165	07/06/22	16.00	Jl. Nusantara Km 23	Bintan Timur	Evakuasi Ular
166	15/06/22	08.10	Jl. Nusantara Km 23	Bintan Timur	Evakuasi Ular
167	16/06/22	11.00	JL. Kolong Enam	Bintan Timur	Evakuasi Buaya
168	20/06/22	09.00	JL. Kolong Enam	Bintan Timur	Evakuasi Buaya
169	07/07/2022	16.00	Jl. Raya Busung (kebun lima) Kel. Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
170	17/07/2022	13.00	Jl. An-Nur Kel. Tanjung Uban	Bintan Utara	Kebakaran



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	KEJADIAN BENCANA				
	TANGGAL/JAM	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JENIS BENCANA	
1	2	3	4	5	
		Selatan		hutan/lahan/semak belukar	
171	18/07/2022	10.23	Pantai Beijing Industri BIIE Lobam Kel. Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
172	18/07/2022	14.57	Jl. Raya Busung Kel. Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
173	19/07/2022	14.05	Jl. Raya Busung Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
174	19/07/2022	17.09	JL. Cendrawasih MTS Kp. Sukadamai Teluk Sasah	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
175	28/07/2022	14.30	Jl. Mekar Sari Rumdis TNI AL Bumi Moro Tanjung Uban Timur	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
176	31/07/2022	13.50	Jl. Kp. Harapan Gg. Pandan Rt 02 Rw 01 Teluk Sasah	Seri Kuala Lobam	Kebakaran Rumah Kosong (semi permanen)
177	06/07/2022	22.00	Jl. Mekarsari Gg. Matoa 3 Kel. Tg. Uban Selatan	Bintan Utara	Eksekusi Cincin Stainless
178	07/07/2022	13.04	SMPN 12 BINTAN Jl. Hang Tuah No.46 Tg. Uban Selatan	Bintan Utara	Evakuasi Ular Cobra
179	08/07/2022	15.00	Jl. Nuri Gg. Nuri I Kp. Sukadamai Teluk Sasah	Seri Kuala Lobam	Evakuasi Lebah Madu
180	09/07/2022	17.00	Jl. Wonosari Gg. Sempit Simpang Lagoi Kota Baru	Teluk Sebong	Eksekusi Tawon Vespa
181	12/07/2022	13.55	Jl. Eka Bhakti II Kp. Baru Tanjung Uban Utara	Bintan Utara	Eksekusi Cincin Stainless
182	21/07/2022	10.58	Jl. Permaisuri TMP Dwikora-SPBU Tg. Uban Selatan	Bintan Utara	Pembersihan/Penyempotan Tumpahan Solar
183	23/07/2022	11.17	Perum. Taman Sari Blok A No. 5 Jl. Taman Sari Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Evakuasi Ular Lidi
184	25/07/2022	18.00	Taman Kota KP. Bugis Jl. Manggar Kp. Bugis Rt 01 Rw 01 Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Eksekusi Tawon Vespa
185	26/07/2022	07.05	Pemotongan Ayam Jl. Manggis KP. Baru Rt 02 Rw 03 Tanjung Uban Utara	Bintan Utara	Evakuasi Ular Phytton/Sawah
186	26/07/2022	10.30	JL. Taman Sari Tanjung Uban Utara	Bintan Utara	Evakuasi Ular Lidi
187	30/07/2022	15.00	Jl. Manggar Kp. Bugis Rt 01 Rw 01 Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Eksekusi Tawon Vespa
188	06/07/2022	09.30	Jl. Kp Wacopek Kel. Gunung	Bintan Timur	Evakuasi ular



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	KEJADIAN BENCANA				
	TANGGAL/JAM	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JENIS BENCANA	
1	2	3	4	5	
		Lengkuas			
189	08/07/2022	12.00	Jl. Nusantara Km 18 Kel. Gunung Lengkuas	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
190	14/07/2022	10.30	Jl. Nusantara Km 23 Gereja	Bintan Timur	Evakuasi Sarang Tawon
191	17/07/2022	10.30	Jl. Nusantara Km 18 Kel. Gunung Lengkuas	Bintan Timur	Evakuasi Sarang Tawon
192	20/07/2022	13.30	Jl. Sei Datuk Kijang	Bintan Timur	Evakuasi Sarang Tawon
193	22/07/2022	00.30	Jl. Kp Nosari Kijang	Bintan Timur	Evakuasi ular
194	25/07/2022	12.30	Jl. Sei Enam Darat Kijang	Bintan Timur	Evakuasi Sarang Tawon
195	26/07/2022	21.00	Perumnas Suka Maju RT 05 RW 12 No 37 Kijang	Bintan Timur	Evakuasi ular
196	02/07/2022	19.30	Kawal Pantai Kel. Kawal	Gunung Kijang	Kebakaran Rumah
197	07/07/2022	18.30	Kantor Disduk Bintan	Teluk Bintan	Evakuasi Tawon
198	08/07/2022	13.10	Km 28 Kel. Kawal	Gunung Kijang	Evakuasi Tawon
199	11/07/2022	14.10	Kp. Lapangan Kel. Kawal	Gunung Kijang	Evakuasi Tawon
200	11/07/2022	15.40	SMAN 1 Toapaya Kel. Kawal	Gunung Kijang	Evakuasi Tawon
201	14/07/2022	10.00	Jln. Manunggal 10 Kel. Kawal	Gunung Kijang	Evakuasi Tawon
202	18/07/2022	10.30	Jl. Wisata Bahari Kp. Sidoarjo	Gunung Kijang	Evakuasi Tawon
203	19/07/2022	15.30	Cikolek	Toapaya	Kebakaran Kebun
204	20/07/2022	09.30	Pantai Pak Andi Kel. Kawal	Gunung Kijang	Evakuasi Tawon
205	20/07/2022	10.30	KM 28 Kel. Toapaya	Toapaya	Evakuasi Tawon
206	23/07/2022	09.00	SDN 007 Karang Rejo Kel. Kawal	Gunung Kijang	Evakuasi Tawon
207	23/07/2022	10.30	Kampung Karang Rejo	Gunung Kijang	Evakuasi Tawon
208	25/07/2022	14.00	Kampung Teripang Jl. Betuah Desa Teluk Bakau	Gunung Kijang	Evakuasi Tawon
209	27/07/2022	15.00	Kawal	Gunung Kijang	Evakuasi Sarang Lebah
210	06/08/2022	22.00	Jl. Nusantara RT 03 RW 01 Kel. Sei Lekop	Bintan Timur	Evakuasi Ular
211	05/08/2022	12.00	Perum. Buana Asri Blok A NO. 12	Bintan Timur	Evakuasi Sarang Tawon
212	08/08/2022	17.30	Kp. Jawa RT 03 RW 07 Kel. Sei Lekop	Bintan Timur	Evakuasi Sarang Tawon



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	KEJADIAN BENCANA				
	TANGGAL/JAM	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JENIS BENCANA	
1	2	3	4	5	
213	09/08/2022	20.00	Kp. Jawa RT 03 RW 07 Kel. Sei Lekop	Bintan Timur	Evakuasi Sarang Tawon
214	10/08/2022	08.30	KP. Jawa Gg. Bodri Kel. Sei Lekop	Bintan Timur	Evakuasi Ular
215	11/08/2022	12.00	Jl. Nusantara Kantor PMI Kel. Sei Lekop	Bintan Timur	Evakuasi Lebah Madu
216	12/08/2022	20.00	JL. Nusantara KM 22 Kel. Sei Lekop	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
217	13/08/2022	11.00	Kp. Nosari Barat RT 004 RW 016 Kel. Kijang Kota	Bintan Timur	Evakuasi Sarang Tawon
218	24/08/2022	23.05	JL. Nusantara Gg. Akasia	Bintan Timur	Evakuasi Ular
219	28/08/2022	09.30	Jl. Tekojo RT 06 RW 013	Bintan Timur	Evakuasi Sarang Tawon
220	28/08/2022	20.30	Jl. Ahmad Supri Hakim KM 19	Bintan Timur	Evakuasi Ular
221	31/08/2022	09.30	Kp. Pisang RT 01 RW 009	Bintan Timur	Evakuasi Sarang Tawon
222	03/08/2022	17.40	Kelurahan Kawal	Gunung Kijang	Evakuasi Sarang Tawon
223	05/08/2022	17.00	Topekong Toapaya Kel. Kawal	Toapaya	Evakuasi Ular
224	08/08/2022	15.30	Kelurahan Kawal	Gunung Kijang	Evakuasi Sarang Tawon
225	09/08/2022	19.50	JL. Galang Batang	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
226	11/08/2022	10.00	Jl. Thomas Kel. Toapaya	Toapaya	Evakuasi Sarang Tawon
227	13/08/2022	15.00	KP. Bolereng Desa Tembeling	Teluk Bintan	Evakuasi Ular
228	15/08/2022	13.40	JL. Uban Lama KM 25 Gg. Rambutan	Teluk Bintan	Evakuasi Sarang Tawon
229	16/08/2022	15.20	Sungai Kelobi Kp. Kolam Desa Teluk Bakau	Gunung Kijang	Evakuasi Sarang Tawon
230	10/08/2022	15.18	Perum PBI Jl. M. Taher Latif Kp. Baru Kel. Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
231	11/08/2022	11.55	Jl. Raya Busung Kel. Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
232	28/08/2022	23.59	JL. Hang Tuah Kel. Tg. Uban Kota	Bintan Utara	Kebakaran Ruko (Warung Kelontong)
233	05/08/2022	16.10	Jl. Raya Busung (Gurun Pasir, Telaga Biru) Desa Busung	Seri Kuala Lobam	Evakuasi Tawon Vespa
234	06/08/2022	15.32	JL. Indunsuri Kel. Tg. Uban Selatan	Bintan Utara	Evakuasi Lebah Madu
235	07/08/2022	10.17	JL. Kampung Harapan Desa	Seri Kuala	Evakuasi Tawon



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	KEJADIAN BENCANA				
	TANGGAL/JAM	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JENIS BENCANA	
1	2	3	4	5	
		Teluk Sasah	Lobam	Vespa	
236	07/08/2022	19.00	Jl. Manggar KP. Bugis Kel. Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Evakuasi Tawon Vespa
237	11/08/2022	07.25	JL. M. Taher Latif (Mesjid Al. Muhajirin) KP. Baru Kel. Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Penyemprotan/Pembersihan Pasir
238	11/08/2022	19.04	JL. Yos Sudarso Gg. Becek Kel. Tg. Uban Kota	Bintan Utara	Evakuasi Tawon Vespa
239	11/08/2022	19.54	Jl. Raya Tanjungpinang-Tg. Uban KM 68 Simpang Lagoi Kp. Prajan Kel. Kota Baru	Teluk Sebong	Evakuasi Ular Cobra
240	20/08/2022	19.08	JL. Manggar Kp. Bugis Kel. Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Evakuasi Tawon Vespa
241	24/08/2022	11.00	Jl. Sekera Kp. Sekera Kel. Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Evakuasi Ular Sawah (Phyton)
242	25/08/2022	19.02	JL. Berdikari Kp. Suka Damai Kel. Tg. Uban Timur	Bintan Utara	Evakuasi Tawon Vespa
243	27/08/2022	19.04	Jl. KP. Harapan Gg. Beringin Desa Teluk Sasah	Seri Kuala Lobam	Evakuasi Tawon Vespa
244	03/09/2022	10.00	Pantai Cemara Kawal Pantai	Gunung Kijang	Evakuasi Tawon
245	09/09/2022	14.50	Tembeling Kp. Beloreng RT 003 RW 005	Teluk Bintan	Evakuasi Ular
246	14/09/2022	15.00	Kp. Bukit Burung Desa Tembeling RT 02 Rw 002	Teluk Bintan	Evakuasi Buaya
247	15/09/2022	14.00	Pemakaman Islam Kp. Mengkurus	Toapaya	Evakuasi Tawon
248	20/09/2022	08.30	Jl. Uban Lintas Barat	Teluk Bintan	Evakuasi Tawon
249	25/09/2022	08.00	Kp. Jeropet Kel. Kawal	Gunung Kijang	Evakuasi Serangga
250	04/09/2022	12.25	Perum. Taman Surya Indah Desa Teluk Sasah	Seri Kuala Lobam	Evakuasi Lebah Madu
251	11/09/2022	10.15	Masjid Besar Baitul Ma'mur Kel. Tg. Uban Selatan	Bintan Utara	Penyemprotan Saluran Air
252	14/09/2022	18.20	Jl. H. Pareng-Parengi Kel. Tg. Uban Selatan	Bintan Utara	Evakuasi Ular Sawah
253	15/09/2022	18.50	Jl. Raya Busung Desa Busung	Seri Kuala Lobam	Evakuasi Tawon Vespa
254	17/09/2022	19.20	Jl. Sukarame Desa Sebong Perih	Teluk Sebong	Evakuasi Tawon Vespa
255	20/09/2022	18.43	Perum. Griya Bima Kencana Kel. Tg. Uban Selatan	Bintan Utara	Evakuasi Tawon Vespa
256	27/09/2022	19.03	JL. Kp. Harapan Gg. Sukun & Gg. Akasia Desa Teluk Sasah	Seri Kuala Lobam	Evakuasi Tawon Vespa
257	01/09/2022	14.10	JL. Telaga Biru	Bintan Timur	Evakuasi Tawon
258	08/09/2022	14.00	Jl. Musi Km 18	Bintan Timur	Evakuasi Ular



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	KEJADIAN BENCANA				
	TANGGAL/JAM	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JENIS BENCANA	
1	2	3	4	5	
259	09/09/2022	10.40	Jl. KP. Baru Keke	Bintan Timur	Evakuasi Ular
260	12/09/2022	13.40	Jl. Alumina Kantor BKAD	Bintan Timur	Evakuasi Ular
261	15/09/2022	13.10	Jl. Raja Ali Haji Cafe House Cahaya	Bintan Timur	Evakuasi Biawak
262	19/09/2022	16.40	JL. Tenggiri Mini Zoo Kijang	Bintan Timur	Evakuasi Tawon
263	21/09/2022	09.30	Jl. Nusantara KM 23	Bintan Timur	Evakuasi Tawon
264	22/09/2022	16.30	Jl. Tenggiri MIS Islamiyah Kijang	Bintan Timur	Evakuasi Tawon
265	24/09/2022	13.40	JL. Musi KM 18	Bintan Timur	Evakuasi Tawon
266	26/09/2022	17.20	JL. Nusantara KM 20	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
267	29/09/2022	14.30	JL. Korindo KM 22 Sei Lekop	Bintan Timur	Evakuasi Tawon
268	05/10/2022	09.00	Kp. Sei Jati Gn. Lengkuas	Bintan Timur	Evakuasi Buaya
269	06/10/2022	10.00	Kp. Jawa Kel. Sei Lekop	Bintan Timur	Evakuasi tawon vespa
270	08/10/2022	21.00	Jl. Semen Tekojo Kel. Kijang Kota	Bintan Timur	Kebakaran Rumah
271	10/10/2022	14.00	Pustu Jl. Sei Enam Kel. Sei Enam	Bintan Timur	Evakuasi tawon vespa
272	14/01/2022	18.00	Lapangan Bola Antam Jl. Trikora Kel. Kijang Kota	Bintan Timur	Kebakaran Pohon
273	15/01/2022	08.00	Lapangan Bola Antam Jl. Trikora Kel. Kijang Kota	Bintan Timur	Kebakaran Pohon
274	16/10/2022	10.55	JL. Sei Pulai Kel. Gn. Lengkuas	Bintan Timur	Evakuasi Ular
275	24/10/2022	12.30	JL. Nusantara KM 23 Kel. Kijang Kota	Bintan Timur	Evakuasi tawon vespa
276	26/10/2022	13.00	KP. Budi Mulya Kel. Kijang Kota	Bintan Timur	Evakuasi tawon vespa
277	27/10/2022	13.00	KP. Wacopek Kel. Gn. Lengkuas	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
278	28/01/2022	09.00	Jl. Korindo KM 21 Kel. Sei Lekop	Bintan Timur	Evakuasi tawon vespa
279	30/10/2022	07.30	SMAN 1 BINTIM Kel. Sei Lekop	Bintan Timur	Evakuasi tawon vespa
280	31/10/2022	09.00	JL. Kolong Enam Kel. Sei Enam	Bintan Timur	Evakuasi Buaya
281	06/10/2022	10.00	Tanjung Kapur Kel. Kawal	Gunung Kijang	Pembersihan Jalan
282	14/10/2022	08.30	Tanjung Kapur Kel. Kawal	Gunung Kijang	Pembersihan Jalan
283	14/10/2022	09.00	Cikolek Kel. Toapaya	Gunung Kijang	Pembersihan Jalan
284	13/01/2022	16.15	Jl. Manggar Kp. Bugis	Bintan Utara	Kebakaran



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	KEJADIAN BENCANA			
	TANGGAL/JAM	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JENIS BENCANA
1	2	3	4	5
		Tg.Uban Utara		hutan/lahan/semak belukar
285	28/10/2022 14.20	JL. Eka Bhakti II, Kp. Baru Kel. Tanjung Uban Utara	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
286	07/10/2022 13.50	JL. M. Taher Latif Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Evakuasi Tawon Vespa
287	09/10/2022 19.00	Jl. Kp. Harapan Bersama Desa Teluk Sasah	Seri Kuala Lobam	Evakuasi Tawon Vespa
288	10/10/2022 14.25	Jl. RA. Kartini Kel. Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Evakuasi Ular Sawah
289	17/10/2022 21.50	Jl. Datuk Syahbandar Kel Tg Uban Selatan	Bintan Utara	Evakuasi Ular Cincin
290	18/10/2022 20.30	Perum. Garden View Desa Sebong Perih	Teluk Sebong	Evakuasi Ular Cobra
291	19/10/2022 08.15	Jl. KP Harapan Desa Teluk Sasah	Seri Kuala Lobam	Evakuasi Lebah Madu
292	29/10/2022 08.19	JL. Permaisuri No. 10 Tanjung Uban Kota	Bintan Utara	Evakuasi Biawak
293	07/11/2022 12.40	KP. Karangnom Kel. Toapaya	Toapaya	Evakuasi Tawon
294	10/11/2022 08.00	Kp. Mentras KM 18 Desa Toapaya Selatan	Toapaya	Evakuasi Ular Cobra
295	22/11/2022 11.00	Kawal Lama Desa Gunung Kijang	Gunung Kijang	Kebakaran Rumah
296	16/11/2022 14.,20	JL. Datuk Laksamana GG. Kapas Desa Lancang Kuning	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
297	24/11/2022 20.48	Jl. Permaisuro Kel. Tanjung Uban Kota	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
298	03/11/2022 12.45	JL. Manggar Kp. Bugis Kel. Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Evakuasi Ular Cobra
299	04/11/2022 08.00	JL. Tanjung Permai Kavling Aiko II, Kel. Tg. Uban Selatan	Bintan Utara	Evakuasi ular cobra
300	05/11/2022 19.30	JL. Martosari Gg. Duren Kel. Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Evakuasi Cincin Stainles
301	09/11/2022 21.00	JL. Taman Sari TG. Uban Selatan	Bintan Utara	Evakuasi Tawon Vespa
302	10/11/2022 20.30	JL. Taman Sari Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Evakuasi Ular Air
303	11/11/2022 08.40	JL. Taman Sari Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Evakuasi Ular Emprit
304	13/11/2022 17.45	JL. M. Taher Latif Tg, Uban Utara	Bintan Utara	Evakuasi Tawon Vespa
305	18/11/2022 16.30	JL. Batin Kumbang Desa Sebong Perih	Teluk Sebong	Evakuasi Tawon Vespa
306	24/11/2022 07.00	JL. M. Taher Latif KP. Baru &	Bintan Utara	Pembersihan Jalan



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	KEJADIAN BENCANA				
	TANGGAL/JAM	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JENIS BENCANA	
1	2	3	4	5	
		Jl. Manggar KP. Bugis Tg. Uban Utara		Tumpahan Minyak Solar dijalan	
307	25/11/2022	10.30	Komplek TNI AL Tg. Uban Timur	Bintan Utara	Evakuasi Gelang Stainless
308	27/11/2022	15.50	Perum Sijori Indah Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Evakuasi Cincin Emas
309	15/11/2022	13.30	JL. Wacopek Gunung Lengkuas	Bintan Timur	Evakuasi Ular
310	18/11/2022	14.50	JL. Nusantara KM 23 Gunung Lengkuas	Bintan Timur	Evakuasi Monyet
311	02/12/2022	09.00	JL. Nusantara KM 23 Kel. Sei Lekop	Bintan Timur	Evakuasi Ular
312	03/12/2022	11.0	Kp. Lengkuas Kel. Gunung Lengkuas	Bintan Timur	Evakuasi Tawon Vespa
313	06/12/2022	12.00	Kp. Budi Mulya Kel. Gunung Lengkuas	Bintan Timur	Evakuasi Tawon Vespa
314	20/12/2022	14.10	Jl. Nusantara KM 22 Kel. Sei Lekop	Bintan Timur	Evakuasi Ular
315	30/12/2022	17.35	Jl. Korindo Bukit Tengkorak Kel. Sei Lekop	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
316	15/12/2022	12.00	Kp. Mengkudus Desa Teluk Bakau	Gunung Kijang	Evakuasi Tawon Vespa
317	18/12/2022	14.00	Kp. Alur Pekap GG. Sari desa Malang rapat	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
318	23/12/2022	12.30	Bintan Buyu Kantor Bupati Bintan	Teluk Bintan	Penyemprotan Gorong-gorong
319	26/12/2022	12.30	Jl. Raya Busung Kel. Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
320	31/12/2022	14.43	Jl. Berdikari II Kel. Tanjung Uban Timur	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
321	01/12/2022	12.45	Jl. Yos Sudarso Kel. Tg. Uban Kota	Bintan utara	pembersihan Tumpahan Minyak Solar
322	06/12/2022	08.20	Kantor UPTD Damkar Uban	Bintan Utara	Evakuasi kucing dalam kap motor
323	06/12/2022	17.20	Jl. Indunsuri Kel. Tg. Uban Timur	Bintan Utara	evakuasi ular cincin emas
324	07/12/2022	07.00	Jl. Indunsuri Kel. Tg. Uban Timur	Bintan Utara	evakuasi ular cincin emas
325	07/12/2022	17.41	Jl. Raya Busung Desa Busung	Seri Kuala Lobam	Evakuasi Tawon Vespa
326	07/12/2022	22.07	Masjid At Toyyibah Kel. Tg.	Bintan Utara	evakuasi ular cincin



NO	KEJADIAN BENCANA			
	TANGGAL/JAM	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JENIS BENCANA
1	2	3	4	5
		Uban Utara		emas
327	16/12/2022 22.15	Jl. Kp. Harapan Desa Teluk Sasah	Seri Kuala Lobam	Evakuasi Lebah Madu
328	19/12/2022 16.04	Kios percetakan Sticker dan Stempel JL. Permaisuri Kel. Tg. Uban selatan	Bintan Utara	Evakuasi ular tambang
329	20/12/2022 07.41	Perum. Komplek Koramil Kel. Tg. Uban Selatan	Bintan Utara	Evakuasi ular cobra
330	21/12/2022 08.08	Jl. Taman sari Gg. Mentari Kel. Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Evakuasi Lebah Madu
331	22/12/2022 17.00	Jl. Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Desa Lancang Kuning	Bintan Utara	Evakuasi Tawon Vespa

7.6.4.1 Upaya Pengendalian Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan

A. Pencegahan

1. Koordinasi para pihak (masyarakat, Pemda, praktisi, pemegang ijin usaha, LSM, TNI/POLRI, akademisi)
 - Koordinasi program dan anggaran terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - Mengembalikan jejaring kerja yang mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - Sharing informasi dan teknologi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - Membentuk Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di setiap Desa.

B. Penanganan Pasca

1. Identifikasi: areal bekas terbakar, penyebab kebakaran, luas kebakaran, tipe vegetasi terbakar, pengaruh terhadap lingkungan/ ekosistem dan informasi untuk mendukung penegakan hukum.
2. Monitoring dan pemeriksaan lokasi terbakar.
3. Penegakan hukum (*Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)*, POLRI dan Kejaksaan).
4. Pelaporan.

7.6.4.2 Uraian Belanja Tidak Terduga (BTT) :

Penanganan bencana alam di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 menggunakan APBD melalui Belanja Tidak Terduga Dana BTT untuk penggunaan dana darurat bencana dengan dasar harus ada Penetapan status darurat bencana oleh Kepala Daerah. Langkah-langkah status darurat bencana oleh Kepala Daerah yang diambil untuk penggunaan dana BTT :

1. Membuat analisis cuaca oleh BMKG
2. Rapat koordinasi dengan FKPD untuk penetapan status darurat
3. Membuat keputusan Bupati untuk status darurat bencana daerah



4. Membuat keputusan pos komando darurat bencana
5. Membuat rencana kebutuhan belanja bencana berdasarkan identifikasi pelaksanaan di lapangan

Langkah-langkah yang diambil guna menanggulangi bencana tersebut adalah :

1. Melaksanakan evakuasi kepada masyarakat yang terkena bencana ke tempat yang aman
2. Membuat dapur umum di tempat lokasi bencana
3. Pendataan korban bencana kerusakan material dan fasilitas publik
4. Menyalurkan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang terkena bencana

7.6.4.3 Uraian Belanja Bantuan Sosial Tak Terencana (BTR) :

Sumber dana untuk penanggulangan bencana dan pemberian bantuan kepada korban bencana berasal dari APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 pos Belanja Bantuan Sosial Tak Terencana (BTR) yang pengelolaannya dibawah tanggung jawab Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dibayarkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.

Langkah-langkah yang diambil guna menanggulangi bencana tersebut adalah :

1. Melaksanakan pendataan dan memverifikasi terhadap kerusakan akibat pascabencana
2. Memberikan bantuan berupa uang dari dana APBD pos belanja bantuan sosial tak terencana (BTR)

7.6.5 Pengelolaan Kawasan Khusus

Jenis kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah meliputi : kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otorita, kawasan kelautan dan kedirgantaraan sepanjang yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:

- 1) Kawasan Sumber Daya Alam, meliputi: Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2) Kawasan Sumber Daya Buatan, meliputi: Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya;
- 3) Kawasan Kepentingan Umum, meliputi: Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum.

Kebijakan daerah dalam pengelolaan kawasan khusus sesuai dengan kewenangan yang diserahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, antara lain meliputi:

- 1) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan SDA;
- 2) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan;
- 3) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten/kota;



- 4) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan.

Sebagian wilayah Kabupaten Bintang atau secara *enclave area* telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas pajak (*Free Trade Zone*). Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sehingga telah dibentuk Badan Pengelola Kawasan Kabupaten Bintang (BPK Bintang). BPK Bintang tersebut telah melaksanakan pelayanan satu atap atas semua jenis perijinan di Kabupaten Bintang sehingga dapat mempermudah semua jenis investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Untuk lebih mempercepat iklim investasi dan pembangunan daerah telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta tatalaksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

7.6.6 Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Untuk menjamin rasa aman, tentram, dan tertib dikalangan masyarakat dari tindak kriminalitas dan gangguan yang mengancam masyarakat, pada dasarnya bukan sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang dalam hal ini aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk bertanggung jawab atas ketertiban dan ketenteraman umum masyarakat.

Otonomi Daerah yang menghasilkan daerah otonom, daerah mempunyai keleluasaan untuk mengatur urusan rumah tangganya dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah dengan prasyarat adanya demokratisasi dalam penyelenggaraan negara, telah membawa masyarakat kepada tuntutan-tuntutan ke arah pemenuhan kebutuhan yang bersifat lokal. Satpol PP mempunyai peran menegakkan peraturan perundang-undangan daerah, banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah.

Tugas Satpol PP bersama-sama dengan PNS adalah menegakkan peraturan daerah dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang maupun lembaga. Satpol PP juga aktif penertiban dan menjaga ketertentaman di tempat-tempat umum seperti: pemasangan reklame yang tidak sesuai ketentuan, pedagang kaki lima yang melakukan aktifitasnya tidak pada tempatnya, tempat hiburan, tempat-tempat usaha; pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan; pelaksanaan Ijin Gangguan (HO); pelanggaran terhadap kebersihan, keindahan dan ketertiban dan lain-lain. Beberapa permasalahan tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap warga/masyarakat. Untuk itu perlu dilaksanakan langkah-langkah *preventif* diantaranya melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan daerah, melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

7.6.7 Penyelenggaraan Pembinaan Keuangan Desa

Pemerintah Kabupaten Bintang memiliki 36 Desa yang tersebar pada 9 Kecamatan yang pengelolaan keuangannya dilaksanakan secara otonom/mandiri berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2007 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

perencanaan pembangunan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Untuk menjamin tertib pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Bintan telah membentuk OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta didukung Tim Pembina Desa yang terdiri dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan sebagai Pembina Aparatur Pemerintahnya, BAPPEDA Kabupaten Bintan sebagai Pembina Perencanaan Desa dan BPKAD Kabupaten Bintan sebagai Pembina Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi verifikasi pencairan dana bantuan desa berikut tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu didampingi juga oleh Tim Pendamping Desa yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan gaji yang bersumber dana dari APBN (Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal), Pada Tahun Anggaran 2018 bantuan keuangan desa disalurkan langsung ke rekening kas desa terdiri dari alokasi dana desa bersumber APBD Kabupaten Bintan dan dana desa bersumber dari APBN, dengan target dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 7.6.2 Data Anggaran dan Realisasi Dana Desa APBD dan APBN Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Desa Lancang Kuning	1.483.182.000,00	1.483.145.513,00	99,99
2	Desa Sebung Perih	1.608.437.000,00	1.608.437.000,00	100,00
3	Desa Sebung Lagoi	1.789.147.000,00	1.789.147.000,00	100,00
4	Desa Ekang Anculai	1.671.749.000,00	1.671.749.000,00	100,00
5	Desa Sri Bintan	1.888.611.000,00	1.888.611.000,00	100,00
6	Desa Pengudang	2.010.098.000,00	2.010.098.000,00	100,00
7	Desa Berakit	2.018.238.000,00	2.018.238.000,00	100,00
8	Desa Pangkil	1.499.296.000,00	1.499.296.000,00	100,00
9	Desa Penaga	1.560.430.000,00	1.560.430.000,00	100,00
10	Desa Pengujan	1.403.796.000,00	1.403.796.000,00	100,00
11	Desa Bintan Buyu	1.563.119.000,00	1.563.119.000,00	100,00
12	Desa Tembeling	1.451.236.000,00	1.451.236.000,00	100,00
13	Desa Malang Rapat	1.509.786.000,00	1.509.786.000,00	100,00
14	Desa Teluk Bakau	1.573.423.000,00	1.573.423.000,00	100,00
15	Desa Gunung Kijang	1.743.573.000,00	1.743.571.000,00	100,00
16	Desa Batu Lepuk	1.337.514.000,00	1.337.514.000,00	100,00
17	Desa Kampung Melayu	1.450.647.000,00	1.450.647.000,00	100,00
18	Desa Kampung Hilir	1.545.641.000,00	1.545.641.000,00	100,00
19	Desa Pulau Pinang	1.326.747.000,00	1.326.747.000,00	100,00
20	Desa Mentebung	1.336.916.000,00	1.336.916.000,00	100,00
21	Desa Pengikik	1.265.779.000,00	1.265.779.000,00	100,00
22	Desa Kukup	1.384.495.000,00	1.384.495.000,00	100,00
23	Desa Toapaya	1.506.563.000,00	1.506.563.000,00	100,00
24	Desa Toapaya Selatan	1.763.014.000,00	1.763.014.000,00	100,00
25	Desa Toapaya Utara	1.431.979.000,00	1.431.979.000,00	100,00
26	Desa Mantang Lama	1.425.195.000,00	1.425.195.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
27	Desa Mantang Besar	1.488.408.000,00	1.488.408.000,00	100,00
28	Desa Mantang Baru	1.383.982.000,00	1.383.982.000,00	100,00
29	Desa Dendun	1.360.232.000,00	1.360.232.000,00	100,00
30	Desa Mapur	1.476.247.000,00	1.476.247.000,00	100,00
31	Desa Numbing	1.635.577.000,00	1.635.577.000,00	100,00
32	Desa Kelong	1.637.744.000,00	1.637.744.000,00	100,00
33	Desa Air Glubi	1.542.177.000,00	1.542.177.000,00	100,00
34	Desa Kuala Sempang	1.688.757.300,00	1.688.757.300,00	100,00
35	Desa Busung	1.591.574.000,00	1.591.574.000,00	100,00
36	Desa Teluk Sasah	2.288.534.000,00	2.288.534.000,00	100,00
Total		56.641.843.300,00	56.641.804.813,00	99,99

Realisasi dana desa sebesar Rp56.641.843.300,00 telah disalurkan 99,99% dan dari anggaran sebesar Rp56.641.804.813,00. Realisasi dana desa telah ditransfer ke rekening masing-masing kas desa sesuai jumlah alokasi dana desa Tahun Anggaran 2022.

7.6.8 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bintan pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan kewajiban perpajakan antara lain memungut, mencatat, menyetorkan dan menatausahakan dengan saldo awal per 01 Januari 2022 sebesar Rp619.117.500,00 pemungutan sebesar Rp77.130.819.672,00 Penyetoran sebesar Rp77.749.937.172,00 sehingga terdapat saldo akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.6.3 Kewajiban Perpajakan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2022 (Rp)	Pemungutan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	0,00	11.659.226.432,00	11.659.226.432,00	0,00
2	Askes	0,00	3.548.440.254,00	3.548.440.254,00	0,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	0,00	19.146.128.356,00	19.146.128.356,00	0,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	1.474.025.413,00	1.474.025.413,00	0,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	748.862.824,00	748.862.824,00	0,00
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	0,00	1.937.860.508,00	1.937.860.508,00	0,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,00	22.949.722.479,00	22.949.722.479,00	0,00
8	Pajak PPh – Final	0,00	328.544.044,00	328.544.044,00	0,00
9	BPJS	0,00	14.009.547.107,00	14.009.547.107,00	0,00
10	JKK	0,00	332.115.187,00	332.115.187,00	0,00
11	JKM	0,00	996.347.068,00	996.347.068,00	0,00
12	Penerimaan Retribusi	619.117.500,00	0,00	619.117.500,00	0,00
Jumlah		619.117.500,00	77.130.819.672,00	77.749.937.172,00	0,00

7.6.9 Permasalahan yang Dihadapi Daerah

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bintan salah satunya adalah Pembebasan Lahan di Embung Air Baku Hulu Bintan. (Pemda) yang merupakan hibah dari masyarakat seluas 80 hektar. Lahan tersebut diperuntukkan untuk membangun embung “Hulu Sungai Bintan” di desa Bintan Buyu. Pembangunan embung dilakukan secara bertahap pada tahun 2016 sampai dengan 2018 dan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR-Direktorat Jenderal Sumber Daya



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Air melalui Balai Wilayah Sungai IV-Batam. Realitanya, luas embung yang dibangun melebihi dari 80 hektar sehingga mengenai sebagian tanah yang dimiliki oleh warga. Pemerintah Kabupaten Bintan menjelaskan tidak ada koordinasi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Kabupaten Bintan mengenai pembangunan embung yang menggunakan tanah warga. Hal ini menjadi masalah bagi Pemerintah Kabupaten Bintan. Guna menghitung nilai kerugian yang dialami warga, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bintan mengajukan appraisal kepada 3 (tiga) Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) yaitu: 1) Toto Suharto dan rekan, 2) Aksa Nelson dan Rekan, dan 3) Mbpru, akan tetapi KJPP tersebut tidak berani melakukan penilaian karena surat keterangan pemilik tanah masih berupa alas hak dan tidak ada koordinat maupun patok batas sehingga menyulitkan untuk mengukur luas tanah masyarakat tersebut.

Pada tahun 2020, masyarakat menggugat Pemerintah Kabupaten Bintan bahwa tanah mereka terkena pembangunan waduk, sehingga Pemerintah Kabupaten Bintan kembali melakukan beberapa tahapan untuk menyelesaikan masalah tersebut, pertama melakukan konsultasi dengan BPKP, kedua meminta pihak Ombudsman datang ke lokasi untuk melihat permasalahan lahan tersebut, dan terakhir melakukan pendataan seperti pengukuran dan pemetaan tanah melalui desa. Dari hasil pendataan, diketahui terdapat 11 orang pemilik lahan yang terkena dampak dari pembangunan embung dengan luas total sebesar 14 hektar. Berikut adalah nama pemilik lahan yang tanahnya digunakan untuk pembangunan embung.

Tabel 7.6.4 Daftar Pemilik Tanah Untuk Embung Hulu Sungai Bintan

No	Nama	Luas (m ²)
1	Siti	10.000,00
2	Djie Lin alias Linda	20.000,00
3	Agus Toni	11.382,00
4	Pailan	20.000,00
5	Anima	20.000,00
6	Heng Kiem	8.618,50
7	Mujarni	5.000,00
8	Mujarto	2.500,00
9	Irma Annisa	9.312,00
10	Partono	19.887,50
11	Tjiu Hong	13.513,50
	Jumlah	140.213,50

Sampai dengan saat ini, belum terdapat serah terima dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kabupaten Bintan mengenai bangunan embung yang sudah jadi. Kementerian PUPR menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan yang akan melaksanakan ganti rugi. Melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Bintan kembali menganggarkan kegiatan pengadaan tanah, namun



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

sampai dengan saat ini masih belum terlaksana karena Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan belum juga mendapatkan KJPP yang bersedia untuk menilai, karena kondisi tanah masyarakat yang sudah menjadi bagian dari bangunan/genangan air embung hulu sungai bintan dan bahkan ada 1 (satu) tanah masyarakat yang semua tanahnya sudah menjadi genangan air embung hulu sungai bintan. Pada saat ini, tanah milik pemda yang berada di desa Bintan Buyu kurang lebih seluas 300 hektar (termasuk sebagian besar wilayah embung).



7.7 PENUTUP

Peranan Kabupaten Bintang sebagai pusat sistem keuangan daerah, pelayanan, perikanan dan pertanian baik dalam skala lokal, regional dan nasional, akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan seluruh *stakeholder* apabila dikelola dengan sistem pemerintahan yang efektif dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang handal dan profesional. Pembangunan sistem pemerintahan yang efektif memerlukan lingkungan politik yang diilhami oleh amanat reformasi, sehingga mampu memberikan koridor-koridor yang jelas tentang apa yang akan dituju dari agenda Kabupaten Bintang yang telah disepakati. Bentuk kesepakatan tersebut telah dituangkan melalui berbagai produk-produk aturan selama beberapa periode yang berkelanjutan yang akan dijadikan koridor penilaian penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Bintang telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bintang di masa yang akan datang dan berhadapan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa. Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum periode berikutnya.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2022 ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan pengguna Laporan Keuangan, atas perhatian serta kerjasama yang sinergis kami ucapkan terima kasih.